PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

RKPD
TAHUN 2019

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NO. 56 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan daerah;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan suatu dokumen perencanaan yang akan dipedomani oleh setiap stakeholder dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan

Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 701);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 1);
24. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017

Nomor 44);

25. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 102 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 102);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019, adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode satu tahun yaitu tahun 2019 terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;

(2) RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan :

a) Bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) Kota Payakumbuh dalam merencanakan program dan kegiatan Tahun 2019 yang dituangkan dalam Rencana Kerja PD.

b) Dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Payakumbuh Tahun 2019.

Pasal 2

Dokumen RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1), adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 29 Juni 2018

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 29 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

BENNI WARLIS

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2018 NOMOR 56

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... *i*

DAFTAR TABLE ..... *iii*

DAFTAR GAMBAR ..... *ix*

BAB I. PENDAHULUAN ..... **I**

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-2

1.3 Hubungan Antar Dokumen I-4

1.4 Maksud dan Tujuan I-5

1.5 Tahapan Penyusunan Perencanaan I-6

1.6 Inovasi Perencanaan di Kota Payakumbuh I-14

1.7 Sistematika Penulisan RKPD I-17

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..... **II**

2.1 Gambaran Umum Daerah II-1

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-16

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum II-26

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah II-107

2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Sampai Tahun 2017 ..... II-118

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah II-180

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH ..... **III**

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Payakumbuh III-1

3.1.1 Kondisi Ekonomi Kota Payakumbuh Tahun 2017 dan Perkiraan Tahun 2018..... III-7

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Payakumbuh Tahun 2019 ..... III-10

3.2 Kebijakan Keuangan III-11

3.2.1 Umum III-11

3.2.2 Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah III-14

3.2.3 Analisa Keuangan Daerah III-21

3.2.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-22

3.2.5 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah 2016-2019 ..... III-23

3.2.6 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-26
3.2.7 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah 2016-2020 ..... III-28
3.2.8 Arah Kebijakan Belanja Daerah III-29
3.2.9 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah 2016-2019 ..... III-32
3.2.10 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-34
3.2.11 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 ..... III-34
BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 ..... IV-13
4.3 Sinkronisasi Prioritas Program Nasional, Prioritas Provinsi Sumatera Barat dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 ..... IV-51
4.4 Prioritas Pembangunan Daerah Melalui Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) IV-65
4.5 Arah kebijakan Pembangunan Kota Payakumbuh sesuai Arah Kebijakan Provinsi Sumatera Barat IV-72
4.6 Kebijakan Pembangunan Berdimensi Kewilayahan IV-75
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH V
BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VI
6.1 Indikator Kinerja Utama VI-1
6.2 Indikator Kinerja Daerah VI-3
6.3 Inovasi Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 ..... VI-11
BAB VII. PENUTUP VII

DAFTAR TABEL

Tabel II-1	Pembagian Wilayah Administratif Kota Payakumbuh Tahun 2016.....	II-3
Tabel II-2	Klasifikasi Kemiringan Lahan di Kota Payakumbuh	II-4
Tabel II-3	Distribusi Hujan Tahun 2013-2017 Kota Payakumbuh.....	II-6
Tabel II-4	Luas Penggunaan Lahan menurut Jenisnya di Kota Payakumbuh	II-7
Tabel II-5	Luas Penggunaan Lahan Pertanian di Kota Payakumbuh	II-7
Tabel II-6	Persentase Luas Penggunaan Lahan Pertanian Sawah dan Non-Sawah dengan Luas Daerah Tahun 2017 Kota Payakumbuh	II-8
Tabel II-7	Perkembangan Nilai Indek Koefisien Lokasi (LQ) Menurut Lapangan Usaha di Kota Payakumbuh Tahun 2013-2017.....	II-9
Tabel II-8	Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2013-2017.....	II-11
Tabel II-9	Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2013-2017.....	II-13
Tabel II-10	Perhitungan Rasio Beban Tanggungan Penduduk.....	II-14
Tabel II-11	Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2013-2017.....	II-15
Tabel II-12	Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2013-2017.....	II-15
Tabel II-13	Tingkat Partisipasi Pendidikan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2013-2017.....	II-16
Tabel II-14	Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2013-2017 ADHB Kota Payakumbuh	II-17
Tabel II-15	Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2013-2017 ADHK (2000=100) Kota Payakumbuh	II-18
Tabel II-16	Laju Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB ADHB dan ADHK Tahun 2013-2017 Kota Payakumbuh	II-19
Tabel II-17	Perbandingan Tingkat Inflasi Kota Payakumbuh, Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2013-2017.....	II-20
Tabel II-18	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2017 Kota Payakumbuh (2000 = 100).....	II-21
Tabel II-19	Capaian Indikator HDI Tahun 2013-2017 Kota Payakumbuh	II-22
Tabel II-20	Perkembangan Data Ketenagakerjaan Tahun 2013- 2017 Kota Payakumbuh.....	II-23
Tabel II-21	Rasio Penduduk Bekerja Tahun 2013- 2017 Kota Payakumbuh	II-24
Tabel II-22	Perkembangan Data Kemiskinan Tahun 2013 - 2017 Kota Payakumbuh.....	II-24
Tabel II-23	Perkembangan Data PAUD Formal (TK dan RA) Jumlah Lembaga, Murid, Guru Tahun 2013- 2017 Kota Payakumbuh	II-26
Tabel II-24	Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Payakumbuh Tahun 2013- 2017.....	II-27
Tabel II-25	Angka Putus Sekolah Pada Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2013-2017	II-29
Tabel II-26	Angka Lulusan Siswa Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2013 - 2017.....	II-29
Tabel II-27	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2013- 2017.....	II-30
Tabel II-28	Kondisi Ketersediaan Kelas dan Rombel Tahun 2017.....	II-30
Tabel II-29	Rasio Guru dan Murid Kota Payakumbuh Tahun 2013 – 2017.....	II-31
Tabel II-30	Jumlah Guru Yang Berkualifikasi S1/D4 Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2013 - 2017.....	II-32
Tabel II-31	Jumlah Guru Bersertifikasi Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2013 – 2017	II-33

Tabel II-32 Data Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Negeri/Swasta Kota Payakumbuh Tahun 2017 ..... II-34
Tabel II-33 Data Sarana dan Prasarana SMP Negeri/Swasta Kota Payakumbuh Tahun 2017..... II-34
Tabel II-34 Data Akreditasi Sekolah Dasar dan Menengah Kota Payakumbuh Tahun 2013 - 2017..... II-35
Tabel II-35 Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2013 - 2017 Kota Payakumbuh II-36
Tabel II-36 Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Tahun 2017 Kota Payakumbuh II-37
Tabel II-37 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Tahun 2013 - 2017 Kota Payakumbuh II-38
Tabel II-38 Jumlah Dokter Menurut Kecamatan di Luar Rumah Sakit Tahun 2017 Kota Payakumbuh II-39
Tabel II-39 Jumlah Tenaga Para Medis (Bidan, Perawat, Perawat Gigi) di Luar Rumah Sakit Tahun 2013- 2017 Kota Payakumbuh II-39
Tabel II-40 10 Penyakit Terbanyak di Kota Payakumbuh Tahun 2013 – 2017..... II-41
Tabel II-41 Data Prevalensi HIV/ AIDS II-41
Tabel II-42 Jumlah Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional II-42
Tabel II-43 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2013-2017 Kota Payakumbuh..... II-43
Tabel II-44 Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase Tahun 2013-2017 Kota Payakumbuh II-45
Tabel II-45 Persentase Drainase dalam Kondisi Baik Kota Payakumbuh Tahun 2013 – 2017 ..... II-45
Tabel II-46 Jumlah Turap yang Dibangun Tahun 2013 - 2017 Kota Payakumbuh II-46
Tabel II-47 Rasio Jaringan Irigasi Kota Payakumbuh Tahun 2013- 2017..... II-46
Tabel II-48 Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2017 Kota Payakumbuh .. II-46
Tabel II-49 Panjang Jaringan Irigasi Kota Payakumbuh Tahun 2013– 2017..... II-47
Tabel II-50 Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Kota Payakumbuh Tahun 2013 – 2017..... II-47
Tabel II-51 Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2017 Kota Payakumbuh II-48
Tabel II-52 Panjang Sungai yang Berpotensi Mengalami Abrasi Tahun 2013 – 2017 Kota Payakumbuh II-49
Tabel II-53 Jumlah Kapasitas Ketersediaan Air, Pelayanan dan Tingkat Kehilangan Air Kota Payakumbuh Tahun 2013 - 2017..... II-49
Tabel II-54 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Tahun 2017..... II-50
Tabel II-55 Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2013 - 2017..... II-50
Tabel II-56 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas WilayahKota Payakumbuh Tahun 2013 - 2017..... II-51
Tabel II-57 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2017 ..... II-51
Tabel II-58 Rasio Bangunan ber-IMB Kota Payakumbuh Tahun 2013– 2017..... II-52
Tabel II-59 Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2013– 2017..... II-52
Tabel II-60 Rasio Rumah Layak Huni Terhadap Jumlah Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2013- 2017..... II-53
Tabel II-61 Rasio Permukiman Layak Huni Tahun 2013- 2017 Kota Payakumbuh II-53
Tabel II-62 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kota Payakumbuh Tahun 2015 - 2017..... II-53

Tabel II-63 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh Tahun 2013 – 2017..... II-54
Tabel II-64 Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2013 – 2017..... II-55
Tabel II-65 Tingkat Pelanggaran Kota Payakumbuh dari Tahun 2013 – 2017..... II-55
Tabel II-66 Data Tingkat Waktu Tanggap terhadap Bencana Wilayah Manajemen Kebakaran (MK)..... II-56
Tabel II-67 Data Bencana Alam di Kota Payakumbuh tahun 2013 – 2017..... II-56
Tabel II-68 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Payakumbuh Tahun 2016-2017..... II-57
Tabel II-69 Data Keluarga Miskin Yang Memperoleh Beras Miskin Kota Payakumbuh Tahun 2017..... II-58
Tabel II-70 Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Aktif Tahun 2017..... II-58
Tabel II-71 Rasio Penduduk Bekerja Kota Payakumbuh Tahun 2013 – 2017..... II-59
Tabel II-72 Capaian Kinerja OPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh II-59
Tabel II-73 Indikator Peran Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Payakumbuh Tahun 2013 - 2017..... II-60
Tabel II-74 Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2013-2017..... II-60
Tabel II-75 Indikator Kinerja Urusan Ketahanan pangan Kota Payakumbuh Tahun 2013 - 2017..... II-63
Tabel II-76 Data Keamanan Pangan selama Periode 2013-2017..... II-64
Tabel II-77 Data Lahan Pemerintah Kota Bersertifikat Kota Payakumbuh yang Difasilitasi Dinas PUPR Tahun 2013 - 2017..... II-64
Tabel II-78 Indeks Kualitas Udara Ambien 2013-2017 Kota Payakumbuh II-65
Tabel II-79 Data Baku Mutu Sungai tahun 2013-2017..... II-66
Tabel II-80 Jumlah Kawasan Lindung Tahun 2013 - 2017 Kota Payakumbuh II-67
Tabel II-81 Jumlah Volume Sampah dan Produksi SampahTahun 2013 - 2017 Kota Payakumbuh II-67
Tabel II-82 Jumlah TPS 3R Perkecamatan Kota Payakumbuh Tahun 2013-2017..... II-68
Tabel II-83 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2013- 2017..... II-69
Tabel II-84 Persentase Penduduk dan Cakupan Pelayanan Air Minum Kota Payakumbuh Tahun 2013 – 2017..... II-69
Tabel II-85 Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan Kota Payakumbuh Tahun 2013 - 2017..... II-70
Tabel II-86 Penerbitan Dokumen dan Akta pada Kota Payakumbuh tahun 2013-2017..... II-70
Tabel II-87 Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir, Akte Nikah Kota Payakumbuh Tahun 2017..... II-71
Tabel II-88 Kondisi Gedung Kantor Lurah per-Kecamatan Tahun 2017..... II-71
Tabel II-89 Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor Lurah per Kecamatan Tahun 2017..... II-72
Tabel II-90 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2013–2017..... II-73
Tabel II-91 Perkembangan Peserta KB Aktif Kota Payakumbuh Tahun 2013 - 2017..... II-75
Tabel II-92 Pencapaian Peserta Kb Baru Tahun 2013- 2017 Kota Payakumbuh II-75
Tabel II-93 Jumlah Petugas dan Kader Keluarga Berencana Tahun 2017..... II-76
Tabel II-94 Jumlah Dasawisma Aktif Tahun 2017..... II-76
Tabel II-95 Jumlah Arus Penumpang Tahun 2013 – 2017 Kota Payakumbuh II-77
Tabel II-96 Jumlah Izin Trayek dan Rasio yang Dikeluarkan Kota Payakumbuh II-77

Tabel II-97 Jumlah Arus Penumpang Tahun 2013 – 2017 Kota Payakumbuh II-78
Tabel II-98 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Kota Payakumbuh Tahun 2013 – 2017..... II-78
Tabel II-99 Jumlah Prasarana Perhubungan Kota Payakumbuh Tahun 2013 – 2017..... II-79
Tabel II-100 Jumlah Hotspot Kota Payakumbuh Tahun 2013 – 2017..... II-80
Tabel II-101 Perkembangan Koperasi Kota Payakumbuh Tahun 2013 - 2017..... II-81
Tabel II-102 Jenis Koperasi Kota Payakumbuh Tahun 2013 – 2017..... II-82
Tabel II-103 Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2013-2017..... II-82
Tabel II-104 Perkembangan Penanaman Modal Kota Payakumbuh Tahun 2013 - 2017.... II-83
Tabel II-105 Informasi Potensi dan Kawasan Investasi Kota Payakumbuh Tahun 2017 .... II-84
Tabel II-106 Prestasi Olahraga Tahun 2017 ..... II-85
Tabel II-107 Sarana Prasarana olahraga Tahun 2017..... II-86
Tabel II-108 Jumlah Organisasi Pemuda Kota Payakumbuh yang Aktif Tahun 2013 - 2017 II-87
Tabel II-109 Perkembangan Kinerja Urusan kebudayaan Kota PayakumbuhTahun 2013-2017..... II-88
Tabel II-110 Perkembangan Perpustakaan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013– 2017 II-89
Tabel II-111 Perkembangan kearsipan di Kota Payakumbuh Tahun 2013- 2017..... II-89
Tabel II-112 Jumlah Arsip dan Pejabat Arsiparis pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2013-2017..... II-90
Tabel II-113 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Kota Payakumbuh Tahun 2013- 2017..... II-91
Tabel II-114 Jumlah Tamu Menginap Di Hotel/Wisma Kota Payakumbuh II-92
Tabel II-115 Jumlah Atraksi Pariwisata Kota Payakumbuh Tahun 2013 – 2017..... II-92
Tabel II-116 Alih Fungsi Lahan Pertanian ke NonPertanian 2013 - 2017 ..... II-93
Tabel II-117 Luasan Lahan yang Mengalami Penurunan Tingkat Kesuburan Tahun 2013-2017..... II-93
Tabel II-118 Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun 2013- 2017 (ton)..... II-94
Tabel II-119 Produktifitas Peternakan Tahun 2013 – 2017..... II-94
Tabel II-120 Perkembangan Produksi Daging dan Telur Tahun Kota Payakumbuh 2013 – 2017..... II-95
Tabel II-121 Jumlah Usaha Pertanian Yang Membutuhkan Akses Permodalan Tahun 2013-2017..... II-95
Tabel II-122 Jumlah Gapoktan yang Difasilitasi Permodalan Tahun 2013-2017..... II-96
Tabel II-123 Jumlah Teknologi Anjuran Yang Telah Diterapkan II-96
Tabel II-124 Perkembangan Kelompok Usaha Pertanian Tahun 2013- 2017..... II-97
Tabel II-125 Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian Tahun 2013 – 2017..... II-97
Tabel II-126 Jumlah Tenaga Penyuluh Berdasarkan Keahlian Tahun 2013-2017..... II-98
Tabel II-127 Perkembangan Sarana Perdagangan Kota Payakumbuh Tahun 2013 – 2017. II-99
Tabel II-128 Perkembangan Industri Tahun 2013-2017 Kota Payakumbuh..... II-100
Tabel II-129 Kapasitas Produksi Tahun 2017..... II-100
Tabel II-130 Perkembangan Populasi, Produksi dan Kegiatan Perikanan Kota Payakumbuh Tahun 2013 - 2017..... II-102
Tabel II-131 Jumlah Produksi Perikanan Kota Payakumbuh Tahun 2013 - 2017..... II-103
Tabel II-132 Tabel keselarasan dokumen perencanaan dan realisasi pembangunan II-103
Tabel II-133 Tabel Jumlah Pejabat yang Mengikuti Diklat Struktural Tahun 2013 - 2017... II-104
Tabel II-134 Tabel Jumlah Pejabat yang Mengikuti Diklat Teknis dan Pejabat Fungsional Tertentu Tahun 2013 -2017 ..... II-104
Tabel II-135 Daftar Pelanggaran Kedisiplinan Pegawai II-105

Tabel II-136 Jumlah Kerjasama Litbang yang berkelanjutan di Kota Payakumbuh Tahun 2013 - 2017..... II-106
Tabel II-137 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Payakumbuh Tahun 2013 - 2017..... II-108
Tabel II-138 Kontribusi Kelompok Pengeluaran Makanan dan Non Makanan terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Tahun 2013-2017 Kota Payakumbuh II-109
Tabel II-139 Nilai Tukar Petani (NTP) Kota Payakumbuh Tahun 2014 – 2017..... II-110
Tabel II-140 Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2013- 2017 Kota Payakumbuh II-110
Tabel II-141 Rasio Luas Wilayah Produktif Tahun 2012 - 2017 Kota Payakumbuh II-111
Tabel II-142 Rasio Luas Wilayah Industri Tahun 2013 - 2017 Kota Payakumbuh..... II-111
Tabel II-143 Angka Kriminalitas di Kota Payakumbuh Tahun 2013- 2017..... II-112
Tabel II-144 Tindak Kriminal di Kota Payakumbuh Tahun 2013- 2017..... II-112
Tabel II-145 Jumlah Pos Siskamling Tahun 2013- 2017 di Kota Payakumbuh II-112
Tabel II-146 Lama Proses Perijinan Kota Payakumbuh Tahun 2017..... II-114
Tabel II-147 Pajak dan Retribusi Daerah sampai dengan Tahun 2017..... II-115
Tabel II-148 Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tahun 2013- 2017 ..... II-117
Tabel II-149 Rasio Ketergantungan Tahun 2013 - 2017 Kota Payakumbuh II-117
Tabel II-150 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program pada Tahun 2017 ..... II-119
Tabel II-151 Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh..... II-152
Tabel II-152 Capaian Kinerja Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Tahun 2017..... II-153
Tabel II-153 Capaian Indikator Kinerja Fokus Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2017..... II-154
Tabel II-154 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2017..... II-155
Tabel II-155 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2017..... II-156
Tabel II-156 Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum tahun 2017..... II-157
Tabel II-157 Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat tahun 2017..... II-158
Tabel II-158 Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2017..... II-158
Tabel II-159 Capaian Indikator Bidang Sosial Tahun 2017..... II-159
Tabel II-160 Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan tahun 2017..... II-159
Tabel II-161 Pencapaian Indikator Kinerja Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Barencana tahun 2017..... II-160
Tabel II-162 Capaian Indikator Urusan Pangan Tahun 2017..... II-160
Tabel II-163 Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan tahun 2017..... II-161
Tabel II-164 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Lingkungan Hidup tahun 2017..... II-161
Tabel II-165 Pencapaian Indikator Kinerja Kapendudukan dan Catatan Sipil tahun 2017... II-162
Tabel II-166 Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan tahun 2017..... II-162
Tabel II-167 Capaian Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2017 II-163
Tabel II-168 Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Tahun 2017..... II-163
Tabel II-169 Capaian Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2017..... II-164
Tabel II-170 Capaian Indikator Urusan Statistik Tahun 2017..... II-164
Tabel II-171 Capaian Indikator Urusan Kebudayaan Tahun 2017..... II-165
Tabel II-172 Capaian Indikator Urusan Perpustakaan Tahun 2017..... II-165
Tabel II-173 Capaian Indikator Urusan Kearsipan Tahun 2017..... II-165
Tabel II-174 Capaian Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2017..... II-166
Tabel II-175 Capaian Indikator Urusan Pariwisata Tahun 2017..... II-166
Tabel II-176 Capaian Indikator Urusan Pertanian Tahun 2017..... II-167
Tabel II-177 Capaian Indikator Urusan Perdagangan Tahun 2017..... II-167
Tabel II-178 Capaian Indikator Urusan Perindustrian Tahun 2017..... II-167

Tabel II-179	Capaian Indikator Urusan Pendukung Kesekretariatan Daerah Tahun 2017..	II-168
Tabel II-180	Capaian Indikator Urusan Pendukung Kesekretariatan DPRD Tahun 2017…..	II-168
Tabel II-181	Capaian Indikator Urusan Penunjang Inspektorat Tahun 2017…….	II-169
Tabel II-182	Capaian Indikator Urusan Penunjang Perencanaan Tahun 2017…….	II-170
Tabel II-183	Capaian Indikator Urusan Penunjang Keuangan Tahun 2017…….	II-170
Tabel II-184	Capaian Indikator Urusan Penunjang Kepegawaian Tahun 2017……...	II-171
Tabel II-185	Capaian Indikator Urusan Penunjang Penelitaian dan Pengembangan Tahun 2017.....	II-171
Tabel II-186	Capaian Indikator Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017……	II-172
Tabel II-187	Capaian Indikator Urusan Kewilayahan Tahun 2017…….	II-172
Tabel II-188	Capaian Indikator Urusan Bidang Pertanian Tahun 2017…….	II-173
Tabel II-189	Rekapitulasi Capaian Kinerja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017……..	II-173
Tabel II-190	Permasalahan Pembangunan Berkaitan dengan Prioritas dan Sasaran……..	II-180
Tabel III.1	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Payakumbuh.....	III-9
Tabel III-2	Inkonsistensi BAB III RKPD dengan BAB III RPJMD ……	III-21
Tabel III-3	Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan Kota Payakumbuh 2016-2022….	III-26
Tabel III-4	Realisasi dan Proyeksi / Target Belanja Kota Payakumbuh 2016-2020……	III-29
Tabel III-5	Realisasi dan Proyeksi / Target Pembiayaan Kota Payakumbuh 2016-2020…	III-33
Tabel III-6	Penetapan APBD 2018 dan Proyeksi Tahun Anggaran 2019……	III-35
Tabel IV.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Payakumbuh 2017-2022.....	IV-10
Tabel IV.2	Prioritas Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019.....	IV-14
Tabel IV.3	Sinkronisasi Prioritas RKP Nasional, RKPD Provinsi Sumatera Barat dan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2019.....	IV-51
Tabel IV.4	Sinkronisasi Program Prioritas Nasional, Provinsi Sumatera Barat dengan Kota Payakumbuh Tahun 2019.....	IV-52
Tabel IV.5	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se Sumatera Barat……	IV-72
Tabel IV.6	Proyeksi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2016-2021…….	IV-73
Tabel IV.7	Proyeksi Pengangguran Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2019-2021…….	IV-74
Tabel IV.8	Kawasan Pengembangan Komoditi Peternakan…….	IV-75
Tabel IV.9	Kawasan Pengembangan Agribisnis…….	IV-76
Tabel IV-10	Pengembangan Kawasan dan Sentra Industri di Provinsi Sumatera Barat……	IV-76
Tabel IV-11	Wilayah Pengembangan Pariwisata…….	IV-78
Tabel V.1	Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kota Payakumbuh.....	V-2
Tabel V.2	Usulan Rencana Program dan Kegiatan Kota Payakumbuh yang Belum Diakomodir Tahun Anggaran 2018…….....	V-147
Tabel V.3	Daftar Usulan Rencana Kegiatan Kota Payakumbuh yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2018…….	V-157
Tabel V.4	Usulan Rencana Program Kegiatan Kota Payakumbuh Sumber Dana APBN (Hasil Entri SIMLARAS) Tahun Anggaran 2018…….	V-160
Tabel VI.1	Target Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Payakumbuh Tahun 2019-2020…….	VI-1
Tabel VI.2	Target Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Payakumbuh Tahun 2019-2020…….	VI-3
Tabel VI.3	Inovasi Kota Payakumbuh Tahun 2018…….	VI-12

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1	Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-5
Gambar I-2	Proses Perencanaan dan Penganggaran …….....	I-13
Gambar I-3	Inovasi dalam Perencanaan di Kota Payakumbuh …….....	I-14
Gambar I-4	Skema perencanaan Partisipatif ….....…….....	I-16
Gambar II-1	Batas Administrasi Kota Payakumbuh…….....……...	II-2
Gambar II-2	Peta Kemiringan Lereng Kota Payakumbuh…….....……...	II-3
Gambar II-3	Peta Hidrologi Kota Payakumbuh …….....…….……....	II-5
Gambar II-4	Curah Hujan Kota Payakumbuh Tahun 2013-2017.....…….…….	II-5
Gambar II-5	Peta Rencana Rawan Bencana Kota Payakumbuh ……..…….	II-10
Gambar II-6	*Density* Penduduk Kota Payakumbuh…….…….....	II-11
Gambar II-7	Peta Perkembangan Kepadatan Kota Payakumbuh	II-12
Gambar II-8	Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Payakumbuh Tahun 2013-2017	II-13
Gambar II-9	Beban Ketergantungan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2013-2017...	II-14
Gambar II-10	Perbandingan Angka Inflasi Nasional, Propinsi dan Kota Payakumbuh Tahun 2013-2017	II-20
Gambar II-11	Perbandingan Gini Ratio Kota Payakumbuh dengan Sumatera Barat Tahun 2013-2017	II-21
Gambar II-12	Balita Gizi Buruk Tahun 2013- 2017 Kota Payakumbuh	II-23
Gambar II-13	Perkembangan Data Kemiskinan Tahun 2013 - 2017 Kota Payakumbuh...	II-25
Gambar II-14	Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk yang Berumur 15 Tahun ke Atas Tahun 2013- 2017 Kota Payakumbuh	II-25
Gambar II-15	Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Kota Payakumbuh Tahun 2013- 2017 (dalam %)	II-27
Gambar II-16	Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Payakumbuh Tahun 2013- 2017 …...	II-28
Gambar II-17	Rekapitulasi Guru PNS dan Non-PNS TK/SD/SMP Negeri Kota Payakumbuh Tahun 2017.....	II-31
Gambar II-18	Rasio Guru Yang Berkualifikasi S1/D4 Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2013 – 2017	II-32
Gambar II-19	Rasio Guru Yang Bersertifikasi Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2013 – 2017	II-33
Gambar II-20	Rasio Sekolah Terakreditasi-A di Kota Payakumbuh Tahun 2013 – 2017..	II-35
Gambar II-21	Perkembangan Kasus Kematian Bayi, Balita dan Ibu Melahirkan Tahun 2013 – 2017……	II-36
Gambar II-22	RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh (tampak depan)	II-38
Gambar II-23	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	II-40
Gambar II-24	Pembukaan Jalan Sepanjang Tepi Sungai Batang Agam, Payakumbuh ...	II-44
Gambar II-25	Persentase Jaringan Irigasi Kota Payakumbuh dalam Kondisi Baik Tahun 2013- 2017……..	II-47

Gambar II-26	PDAM Kota Payakumbuh (tampak depan)	II-50
Gambar II-27	RTH Taman Bendungan Talawi, Kota Payakumbuh (tampak dari Timur)...	II-51
Gambar II-28	Luasan Kawasan Kumuh Kota Payakumbuh Tahun 2017 (dalam Ha)	II-54
Gambar II-29	Jumlah Anak Berakte Kelahiran di Kota Payakumbuh Tahun 2013-2017 ..	II-61
Gambar II-30	Kelompok Wanita Tani Taratak Indah Padang Kaduduk, Kota Payakumbuh	II-62
Gambar II-31	Skor PPH Kota Payakumbuh dan PPH Indonesia Tahun 2013 – 2017	II-63
Gambar II-32	TPA Regional Payakumbuh	II-68
Gambar II-33	Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Tahun 2013-2017	II-74
Gambar II-34	Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kota Payakumbuh, Tahun 2013-2017	II-74
Gambar II-35	Salah satu aplikasi terintegrasi, Aplikasi E-Musrenbang Kota Payakumbuh	II-80
Gambar II-36	Salah satu aplikasi terintegrasi, Aplikasi E-Musrenbang Kota Payakumbuh yang terintegrasi dengan E-Pokir DPRD, SIPPD dan SIPKD	II-81
Gambar II-37	Salah Satu Model Mall Pelayanan Publik Yang Akan Dibangun Pemko Payakumbuh	II-83
Gambar II-38	Rencana Sport Center Yang Akan Dibangun di Area Sungai Batang Agam Kota Payakumbuh	II-86
Gambar II-39	Jumlah Kunjungan Wisata Asing dan Domestik di Kota Payakumbuh Tahun 2013-2017	II-91
Gambar II-40	Aplikasi SKP Online Kota Payakumbuh Tahun 2013-2017	II-105
Gambar IV.1	Sistematika Keterkaitan Antara Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025……..…….....	IV-3

.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 65 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa "Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD". Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan daerah yang disusun sekali dalam 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah yang disusun satu kali dalam 5 (lima) tahun. Selanjutnya rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah".

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019, yang selanjutnya disebut dengan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh tahun 2017-2022.

RKPD Kota Payakumbuh tahun 2019 telah disusun secara simultan sesuai dengan tahapan perencanaan pembangunan daerah. Pada tahap awal disusun Rancangan Awal RKPD 2019 sebagai bagian dari perencanaan teknokratis dengan memperhatikan input perencanaan yaitu hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja pembangunan daerah, kebijakan nasional dan daerah serta isu global yang tertuang dalam isu strategis daerah yang juga telah tertuang dalam RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2017-2022. Rancangan awal RKPD selanjutnya disempurnakan dengan Forum Konsultasi Publik untuk mendapatkan pengayaan terhadap isu-isu dan permasalahan daerah yang belum terakomodir dalam dokumen Rancangan Awal RKPD.

Tahapan selanjutnya adalah perencanaan *bottom-up* melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), mulai dari tingkat RW, kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota. Rancangan Awal RKPD menjadi bahan dalam pembahasan peserta musrenbang dalam mengajukan usulan program dan kegiatan, sehingga tercipta keserasian dan keselarasan antara usulan masyarakat dan prioritas daerah yang telah ditetapkan. Perencanaan *bottom-up* ini juga seiring dengan perencanaan politis dengan menginventarisasi masukan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Payakumbuh melalui mekanisme pokok-pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semua tahapan tersebut pada akhirnya menjadi bahan dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2019 yang komprehensif. Selanjutnya Rancangan Akhir RKPD yang telah disahkan dapat menjadi pedoman lebih lanjut dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sehingga perencanaan pembangunan daerah yang disusun lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Penyusunan RKPD dengan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, *top down* dan *bottom up* juga mengakomodir pendekatan "*money follows program*" yang mana dalam penyusunan program dan kegiatan pada tahun perencanaan mengacu pada pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022. Kebijakan *Money Follow Program* dalam Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran juga dilaksanakan dengan Pendekatan: Tematik, Holistik, Integratif, Spasial (**THIS**).

RKPD Kota Payakumbuh juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh tahun 2019 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 701);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7).
21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota PayakumbuhTahun 2018 Nomor 1);
24. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 44);
25. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 102 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 102);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap daerah harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Penyusunan RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 mengacu pada RPJP Nasional 2005-2025 sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat untuk kurun waktu yang sama. RPJPD disusun dengan mempedomani RTRW sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (2) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

RPJPD Kota Payakumbuh selanjutnya merupakan dasar utama bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh yang masing-masingnya untuk periode 5 tahun sesuai dengan masa jabatan kepala daerah.

Penyusunan RKPD tahun 2019 berpedoman pada RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2017-2022 dan RPJPD Kota Payakumbuh tahun 2005-2025 periode RPJMD ke-3 (2016-2020) serta mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 yang telah dituangkan dalam Permendagri Nomor 22 Tahun 2017.

RKPD Kota Payakumbuh tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk tahun 2019 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2019 ini memuat rancangan prioritas pembangunan daerah dan kerangka pendanaan yang akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah masing-masing. Mengingat adanya keselarasan sistem perencanaan dan sistem penganggaran, maka RKPD harus dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena itu penyusunan RKPD tersebut, perlu dilakukan secara lebih rinci dengan tekanan utama pada penetapan program dan kegiatan. Penetapan program dan kegiatan tersebut harus pula mencakup indikator dan target kinerja serta perkiraan kebutuhan dana untuk mendukung pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan. Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar I-1.

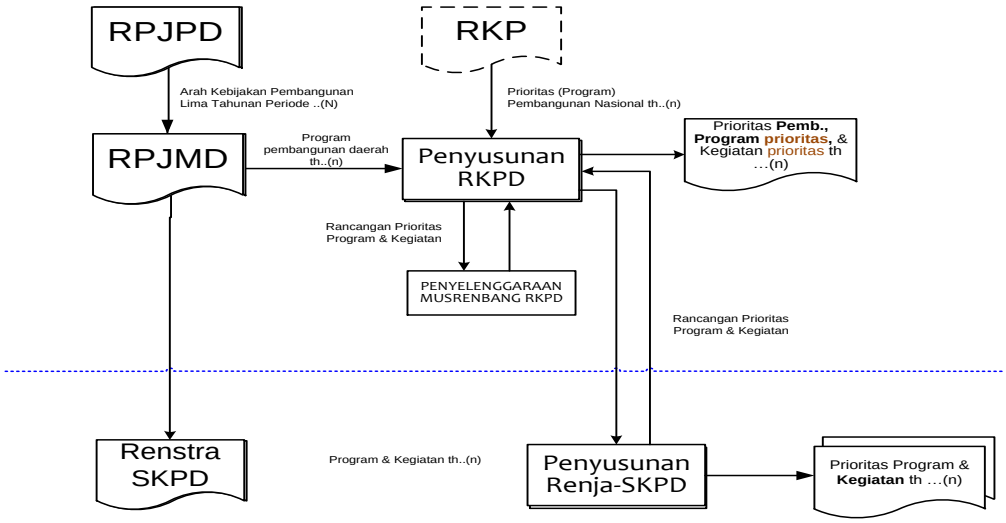

Gambar I-1

Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4 Maksud danTujuan

1. Maksud Penyusunan RKPD

   Penyusunan RKPD Kota Payakumbuh tahun 2019 dimaksudkan untuk tersedianya suatu dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2017-2022, sekaligus untuk mewujudkan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta

mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya yang ada dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan Penyusunan RKPD

   Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2019 disusun dengan tujuan untuk :

   a. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019;
   b. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2019.

1.5 Tahapan Penyusunan Perencanaan

Sebagaimana telah disampaikan pada Sub Bab sebelumnya, dalam semua proses penyusunan perencanaan termasuk RKPD Tahun 2019 berdasarkan pada prinsip *money follow program priority* dan prinsip Tematik, Holistik, Integratif, Spasial (THIS) sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- Prinsip Tematik
  Penyusunan perencanaan berdasarkan pada tema yang diperoleh dari isu strategis daerah dan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai khususnya pada tahun rencana. RKPD Kota Payakumbuh tahun 2019 disusun untuk mencermati keberhasilan pembangunan yang diperoleh dalam tahun 2017 dan perkiraan pencapaian hasil pembangunan pada tahun 2018, serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2019, dengan tema RKPD 2019 **"Mewujudkan Payakumbuh Sebagai Kota Maju Melalui Ketersediaan Infrastruktur, Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan SDM yang bermartabat, dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Akuntabilitas Kinerja".**
- Prinsip keseluruhan (*holistic*)
  Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perencanaan tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi atau satu unsur saja, tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. Dalam konsep tersebut unsur yang dikehendaki juga mengandung unsur yang dapat berkembang serta terbuka dan demokratis.
- Prinsip Integratif:
  Perencanaan harus terintegrasi dan tidak bersifat sektoral. Oleh karenanya perencanaan disusun dengan melihat kewenangan dari setiap stakeholder sehingga tidak tumpang tindih satu dengan lainnya namun terintegrasi sebagai suatu sistim yang saling berkaitan, termasuk dalam hal integasi pendanaan antar daerah, propinsi dan nasional.
- Prinsip Spasial
  Perencanaan disusun memperhatikan aspek spasial atau penataan ruang dan berwawasan lingkungan. Prinsip spasial memungkinkan perencanaan lebih fokus pada pencapaian standar kawasan kota yang harus dicapai dan diprioritaskan. Selain itu juga memperhatikan keterkaitan antar kawasan yang ada untuk menciptakan kesinambungan dalam pembangunan.

Penyusunan dokumen RKPD dilakukan secara bertahap dan simultan. Dengan mengacu pada Peremendagri Nomor 86 tahun 2017 sebagaimana dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RKPD meliputi :
   a. Pembentukan Tim Penyusun RKPD;
      Tim penyusunan RKPD terdiri dari Walikota, Wakil Walikota sebagai penanggungjawab dan wakil penanggungjawab, Sekretaris Daerah sebagai ketua tim, Kepala Bappeda sebagai wakil ketua dan Sekretaris Bappeda sebagai sekretaris tim. Anggota tim terdiri dari unsur Asisten dan Bagian Sekretariat Daerah, Badan Keuangan Daerah dan Bappeda. Tim penyusunan RKPD bertugas menyiapkan dokumen RKPD.
   b. Orientasi mengenai RKPD;
      Orientasi mengenai RKPD kepada seluruh anggota tim dilakukan untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan kebijakan pemerintah berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD, teknis penyusunan dokumen RKPD, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun RKPD.
   c. Penyusunan agenda kerja;
      Penyusunan agenda kerja dalam bentuk *time schedulle* penyusunan RKPD ditujukan untuk memenuhi jangka waktu penyusunan dokumen RKPD yang sangat ketat dan padat. Agenda kerja merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen RKPD dengan satuan waktu sejak persiapan sampai dengan penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD.
   d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
      Data dan informasi merupakan unsur penting yang harus tersedia dalam penyusunan RKPD, karena selain akan mendukung kelancaran penyusunan juga akan menentukan kualitas dokumen RKPD yang akan disusun. Untuk itu, perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

2. Penyusunan rancangan awal RKPD yang dilakukan melalui rangkaian proses sebagai berikut :
   a. Pengolahan data dan informasi :
      Pengolahan data dan informasi merupakan penyajian seluruh kebutuhan data dari laporan, informasi, hasil analisis, resume/notulen-notulen pertemuan, bahan paparan (*slide* atau *white paper*), hasil riset dan lain-lain, menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait pada setiap tahap perumusan penyusunan rancangan awal RKPD.
   b. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
      Data dan informasi gambaran umum kondisi daerah Kota Payakumbuh mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Data dan informasi RKPD Kota Payakumbuh disajikan dalam bentuk tabel, grafik, peta, yang dilengkapai dengan analisis.

c. Analisis ekonomi dan keuangan daerah;
Analisis ekonomi daerah Kota Payakumbuh dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Analisis asumsi umum/makro ekonomi daerah tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana memuat kondisi ekonomi riil suatu daerah pada tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana. Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah. Salah satu indikator utama ekonomi daerah Kota Payakumbuh adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Dalam analisis kondisi ekonomi daerah Kota Payakumbuh, selanjutnya digunakan sebagai salah satu input utama untuk membuat analisis keuangan daerah. Penentuan kemampuan keuangan daerah Kota Payakumbuh sangat terkait dengan kemampuan daerah untuk memperkirakan jumlah penerimaan sehingga kemampuan pendanaan pembangunan daerah pada tahun rencana dapat diketahui.

Data dan informasi gambaran pengelolaan keuangan daerah Kota Payakumbuh terdiri dari data pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah dan neraca daerah.

Penghitungan kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat dalam RPJMD masih relevan atau dapat dipakai pada tahun rencana

d. Evaluasi kinerja tahun lalu;

Evaluasi kinerja tahun lalu di Kota Payakumbuh dengan memperhatikan capaian kinerja RPJMD dan hasil evaluasi kinerja RKPD tahun lalu. Tujuan evaluasi kinerja RKPD tahun lalu antara lain untuk menilai/mengidentifikasi apakah program kegiatan terealisasi atau tidak terealisasi dengan baik, untuk diusulkan atau tidak diusulkan tahun berikutnya.

e. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional/provinsi;
Untuk penyusunan RKPD Kota Payakumbuh melakukan penelaahan atas kebijakan provinsi. Tahap ini menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam RPJMD provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD provinsi (rancangan awal) dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD Kota Payakumbuh yang direncanakan.

f. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Payakumbuh yaitu penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD Kota Payakumbuh berdasarkan hasil rapat dengan DPRD yaitu rapat dengar pendapat dan rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Payakumbuh memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum terbahas dalam musrenbang dan agenda kerja DPRD untuk tahun rencana. Penelaahan dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

g. Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi/misi daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan sehubungan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi.

h. Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah;
Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya bagi program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Guna mendapatkan rumusan masalah tahun rencana, langkah lebih teknis yang harus dilakukan adalah dengan mengidentifikasi isu-isu penting dan masalah mendesak dari berbagai langkah awal pada analisis daerah dan analisis kebijakan nasional/provinsi. Pada tingkat nasional mengidentifikasi isu-isu penting yang terjadi pada tingkat nasional yang ada keterkaitannya dengan daerah, sedangkan pada tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dilakukan analisis daerah dan analisis kebijakan nasional/provinsi untuk mengidentifikasi isu-isu penting dan masalah mendesak yang terjadi pada daerah.

i. Perumusan prioritas, sasaran pembangunan daerah dan program prioritas beserta pagu indikatif;
Suatu prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, mengingat keterdesakan dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah terkait, dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) pada tahun rencana dan kemungkinan perubahannya.

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh OPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas

pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.

Pada RPJMD, penentuan pagu indikatif oleh tim Bappeda menghasilkan program dan pagu indikatifnya. Kemudian pada Renstra Perangkat Daerah masing-masing program dijabarkan kedalam kegiatan disertai pagunya. Selanjutnya di RKPD, dalam hal terjadi perhitungan kapasitas keuangan daerah tahun rencana yang berbeda dengan perhitungan RPJMD maka atas kelebihan/kekurangan dana pagu tersebut dialokasikan untuk program/kegiatan alternatif dan program kegiatan baru. Suatu program kegiatan baru yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada renstra Perangkat Daerah dengan kriteria sebagai berikut :

1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
2. Dalam rangka mempercepat capaian sasaran Perangkat Daerah;
3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah;
4. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

j. Pelaksanaan forum konsultasi publik;

Pelaksanaan forum konsultasi publik dimaksudkan untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun yang direncanakan.

Bahan yang dikonsultasikan adalah rumusan sementara prioritas dan sasaran pembangunan untuk tahun rencana serta dasar analisis yang mendukung rumusan tersebut.

Dari forum konsultasi tersebut diharapkan mendapatkan masukan penting yang lebih menitikberatkan pada aspek teknokratis, oleh karena itu forum konsultasi dilaksanakan secara terbatas dengan mengundang para pemangku kepentingan utama yang terdiri dari unsur akademisi/perguruan tinggi, asosiasi-asosiasi profesi, para pengusaha dan tokoh masyarakat.

Bappeda mengundang seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk pembahasan rancangan awal RKPD, guna disepakati sebagai pedoman penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Bappeda mengirimkan rancangan awal RKPD yang disertai dengan jadwal kalender perencanaan daerah untuk tahun yang direncanakan kepada seluruh Perangkat Daerah sebagai bahan untuk menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah.

Rancangan awal RKPD kabupaten/kota juga merupakan bahan acuan musrenbang desa/kelurahan dan bahasan dalam musrenbang kecamatan. Pengiriman rancangan awal RKPD tersebut disertai dengan catatan agar setiap Perangkat Daerah menyerahkan rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda sesuai dengan kalender perencanaan yang disampaikan.

k. Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

Menyelaraskan antara program yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD dengan pagu indikatif, kemudian program tersebut diserahkan pada Perangkat Daerah untuk disusun prioritas kegiatan. Dalam penyusunan prioritas kegiatan Perangkat Daerah juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

Rancangan Awal RKPD menjadi dasar dan pedoman penyusunan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya Rancangan Renja Perangkat Daerah digunakan untuk menyempurnakan Rancangan Awal RKPD menjadi sebuah Rancangan RKPD.

3. Penyusunan rancangan RKPD

Penyusunan rancangan RKPD Tahun 2019 merupakan kelanjutan dari tahap penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2019 yang disempurnakan berdasarkan masukan dari rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan mengharmoniskan serta mensinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan provinsi/nasional. Pada tahap ini dilakukan Penajaman dan verifikasi terhadap renja Perangkat Daerah. Ini dilakukan agar Rancangan RKPD yang dihasilkan sudah merupakan hasil pembahasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat disampaikan kepada masyarakat pada saat musrenbang tingkat Kota Payakumbuh.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD merupakan forum antar pemangku kepentingan guna membahas rancangan RKPD Tahun 2019. Sesuai dengan pentahapannya, musrenbang dibagi menjadi Musrenbang RKPD di kecamatan, Musrenbang RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2019 dan Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

Musrenbang RKPD Kota Payakumbuh tahun 2019 tingkat Kota dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2018 dihadiri oleh Walikota, Wakil Walikota, para asisten, pimpinan dan anggota DPRD Kota Payakumbuh, Bappeda Kota Payakumbuh, utusan Bappeda Propinsi Sumatera Barat, Perangkat Daerah dan Bagian se- Kota Payakumbuh, lurah se Kota Payakumbuh, Fasilitator Kelurahan, delegasi kecamatan, akademisi, LSM dan organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, unsur pengusaha serta instansi vertikal.

Tujuan penyelenggaraan musrenbang RKPD tahun 2019 adalah :

- Menyelaraskan progr am dan kegiatan prioritas pembanguan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan propinsi dan nasional;
- Mengklarifikasikan usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah;
- Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan daerah;
- Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.

Bersamaan dengan itu, Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat Daerahnya juga melakukan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah membahas rancangan Renja Perangkat Daerah dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang RKPD di kecamatan. Tujuan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah adalah:

- Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD di kecamatan;
- Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah;
- Menyelaraskan program dan kegiatan antara Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah;
- Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah.

Selanjutnya Bappeda melaksanakan rapat teknis yang bertujuan untuk menyelaraskan *input* dan *output* kegiatan yang diusulkan PD, klarifikasi PD terhadap urgensi program dan kegiatan yang diusulkan dan menyelaraskan Renja yang diusulkan PD dengan Renstra OPD dan RPJMD Kota Payakumbuh.

5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2019

Untuk mewujudkan sinergi, harmonisasi, dan sinkronisasi pembangunan antara pusat dan daerah serta antar daerah, rancangan akhir RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2019 dirumuskan berdasarkan masukan hasil Musrenbang RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2019, Musrenbang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dengan memperhatikan hasil Musrenbang Nasional RKP Tahun 2019. Proses pengusulan kebutuhan daerah yang akan ditampung melalui APBN disampaikan melalui aplikasi *simlaras* dan *Krisna DAK*.

Aplikasi *e-musrenbang (simlaras)* merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Bappenas sebagai instrumen untuk penyusunan RKP kementrian lembaga. Jadi, melalui e-musrenbang masing-masing kab/kota maupun Provinsi dapat melakukan usulan kegiatan yang akan dibiayai melalui APBN. Tentunya usulan dimaksud yang berkontribusi pada pencapaian Visi Misi Presiden (Nawacita). Portal *e-musrenbang* ini juga merupakan aplikasi yang dibangun untuk mendukung proses dan rangkaian kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dan melalui Aplikasi e musrenbang ini pula maka proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dengan pendekatan *Holistik-Tematik*, *Integratif* dan *Spasial* dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien sehingga anggaran negara untuk pembangunan dapat diarahkan/berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional melalui pola pendekatan *Money Follow Program Priority*.

Selanjutnya *krisna DAK* merupakan aplikasi yang dibangun untuk mendukung sistem *bottom-up planning* yang efektif dan efisien di Kementerian/Lembaga. Dengan adanya *krisna DAK* akan mampu menjelaskan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang ditargetkan, lengkap dengan daya dukung yang akurat dan legalitas dari dinas terkait. Sistem *krisna DAK* memiliki beberapa tujuan antara lain: (1) menjaring sebanyak mungkin usulan-usulan dari daerah yang potensial untuk dikembangkan, mempercepat pengiriman data proposal dari seluruh Kab/Kota dan provinsi (3) memperkuat peran OPD provinsi sebagai koordinator mekanisme perencanaan satu pintu (4) mempercepat proses penilaian proposal oleh tim pusat (5) meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengalokasian anggaran pemerintah Kab/Kota dan provinsi di seluruh Indonesia (6) mendukung upaya hemat barang persediaan (*paperless)* dan pengelolaan data base lebih baik (7) mendukung percepatan Reformasi Birokrasi dimana usulan-usulan dari daerah akan diproses di pusat dengan transparan dan akuntabel.

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK termasuk Dana Perimbangan, di samping Dana Alokasi Umum (DAU). Penggangaran Dana Alokasi Khusus (DAK), proses pengajuannya adalah melalui mekanisme *proposal based*, dimana daerah mengajukan proposal sesuai dengan menu DAK yang ditentukan oleh kementerian/lembaga terkait.

6. Penetapan RKPD Tahun 2019

RKPD kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota setelah RKPD provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. RKPD provinsi yang telah ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah provinsi dan rancangan akhir RKPD kabupaten/kota. RKPD kabupaten/kota yang telah ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh.

Tahapan penyusunan RKPD dimulai dari musrenbang dapat dijelaskan dengan gambar di bawah ini:

Gambar I-2
Proses Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan yang diawali dari Musrenbang Tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Musrenbang Tingkat Kota dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

- Prinsip partisipatif (*participative*)

  Prinsip partisipatif menunjukkan bahwa rakyat atau masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Dengan kata lain masyarakat menikmati faedah perencanaan bukan semata-mata dari hasil perencanaan, tetapi dari keikutsertaan dalam prosesnya

- Prinsip kesinambungan (*sustainable*)

  Prinsip ini menunjukkan bahwa perencanaan tidak hanya terdiri pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam mencapai kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi stagnan atau kemunduran. Juga diartikan perlunya evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaannya sehingga secara terus menerus dapat diadakan koreksi dan perbaikan selama perencanaan diaplikasikan.

1.6 Inovasi Perencanaan di Kota Payakumbuh

Dalam memudahkan dan meningkatkan kualitas perencanaan, kota Payakumbuh telah mengembangkan beberapa inovasi sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar I-3

Inovasi dalam Perencanaan di Kota Payakumbuh

1. PERWAKO Nomor 21 Tahun 2017 tentang Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) Kota Payakumbuh

   Kebijakan penerapan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) di Kota Payakumbuh bertujuan sebagai pemberian stimulan bagi kelurahan untuk meningkatkan

partisipasi masyarakat. Pemikiran ini timbul melihat kabupaten-kabupaten sekitar yang mendapat Dana Desa dari Pemerintah Pusat, sementara Kota Payakumbuh tidak memperoleh alokasi dana tersebut dikarenakan tidak memiliki desa. Berkaca dari hal tersebut, Pemerintah Kota Payakumbuh berinisiatif untuk memberikan semacam dana yang dapat dikelola langsung oleh kelurahan.

Penganggaran Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) Kota Payakumbuh telah dimulai sejak tahun 2016, namun penyaluran AAK ini baru diatur dalam Peraturan Walikota Payakumbuh No 21 Tahun 2017 tentang Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) Kota Payakumbuh. Secara umum, pemberian Dana AAK untuk kelurahan adalah untuk meningkatkan fungsi pemerintahan kelurahan di wilayah Kota Payakumbuh serta berupaya untuk merangsang pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan di tingkat kelurahan.

Penetapan alokasi Dana AAK dihitung berdasarkan bobot kelurahan dengan varabel pertimbangan antara lain:

a) Luas Wilayah;

b) Jumlah Penduduk;

c) Tingkat Kemiskinan Kelurahan.

Sehingga alokasi jumlah AAK pada masing masing kelurahan yang juga telah diatur berdasarkan Peraturan Walikota tersebut akan menghasilkan jumlah yang berbeda-beda, dimana paling sedikit kelurahan memperoleh sebesar Rp. 36.674.503,- dan paling banyak sebesar Rp. 188.937.882,- Khusus untuk kelurahan yang memperoleh alokasi terbanyak ini mengambil pertimbangan pada kelurahan-kelurahan yang bergabung.

2. PERWAKO NOMOR 40 TAHUN 2017 tentang Pedoman Teknis Palaksanaan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

   Pada tahun 2018 Kota Payakumbuh melakukan perencanaan partisipatif dimulai dari Mufakat RW se Kota Payakumbuh sampai musrenbang Kota sesuai dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 40 Tahun 2017. Tahun 2019 ini pelaksanaan mufakat RW sudah semakin dirasakan manfaatnya dalam penjaringan usulan masyarakat yang melibatkan para ketua RT dan tokoh masyarakat setempat yang akan menghasilkan usulan pembangunan prioritas tingkat RW yang telah disepakati bersama. Kemudian dilanjutkan dengan Musrenbang Kelurahan yang akan membahas usulan prioritas masing-masing RW yang telah disepakati sebelumnya demikian sampai ke tingkat Kecamatan dan Kota.

Gambar I-4
Skema perencanaan Partisipatif

3. Penggunaan Aplikasi E-Musrenbang dan E-Pokir Dan Mengintegrasikannya Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Sippd)

   Mulai tahun 2017 proses perencanaan pembangunan Kota Payakumbuh dilakukan secara online melalui aplikasi e-planning. Sistem informasi yang dapat diakses melalui www.musrenbang-payakumbuh.or.id. Itu, dapat mempermudah perencanaan pembangunan daerah Kota Payakumbuh. Lebih dari itu, sistem informasi tersebut, proses perencanaan pembangunan daerah menjadi lebih transparan, efektif, efisien dan akuntabel

   Setiap tahapan proses perencanaan pembangunan terekam dengan rapi. Mulai dari tahapan musyawarah perencanaan (musrenbang) tingkat kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan, forum organisasi perangkat daerah (OPD), hingga musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), masyarakat pun dapat mengaksesnya dengan mudah, melalui internet kapanpun dan dimanapun.

   Untuk optimalnya penerapan aplikasi e-planning, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Payakumbuh sebagai leading sektor, membentuk fasilitator kelurahan (faskel) dan admin. Pada setiap kelurahan ditunjuk seorang faskel, sementara admin tidak saja terdapat di Kelurahan, tetapi juga disetiap kecamatan dan semua OPD. Faskel adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam menfasilitasi dan memandu diskusi kelompok/konsultasi publik di bidang perencanaan pada tingkat kelurahan yang memenuhi kompetensi teknis/substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang partisipatif dan efektivitas kegiatan. Karena itu, sebelumnya setiap faskel diberi pembekalan tentang hibah bantuan sosial (bansos), aset kelurahan, pengadaan sederhana,

alokasi anggaran kelurahan dan penggunaannya, perencanaan umum, kriteria usulan musrenbang dan kriteria tugas faskel itu sendiri.

Begitu juga dengan admin, dilatih terlebih dahulu tentang bagaimana cara mengentry data kedalam aplikasi. Pada musrenbang 48 kelurahan yang difasilitasi oleh faskel, admin kelurahan menginput usulan yang telah disepakati kedalam aplikasi. Setiap kelurahan diberikan kesempatan untuk menginput 20 usulan, yang terbagi atas 15 usulan prioritas dan 5 sebagai usulan cadangan. Kemudian, dikirim melalui sistem ke kecamatan untuk di bahas didalam musrenbang kecamatan.

Pada tahun 2019 selain aplikasi e-musrenbang juga terdapat aplikasi e-pokir yang bertujuan untuk mendokumentasikan usulan-usulan hasil pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Dengan adanya aplikasi ini setiap usulan anggota dewan dapat terinventarisasi dan terdokumentasi mulai dari pengusulan dan tindak lanjutnya oleh Perangkat Daerah. Usulan yang masuk ke dalam e-pokir langsung dapat ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah untuk dikaji secara teknis apakah usulan tersebut dapat diterima atau tidak dengan alasan yang jelas. Aplikasi ini pun langsung terintegrasi dengan sistim e planing SIPPD.

1.7 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kota Payakumbuh tahun 2019 disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I **Pendahuluan**

Bab I menjelaskan tentang Latar Belakang; Dasar Hukum Penyusunan; Hubungan Antar Dokumen; Maksud dan Tujuan; dan Sistematika Dokumen RKPD;

BAB II **Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Bab II menjelaskan tentang Kondisi Umum Kondisi Daerah; Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD dan Permasalahan Pembangunan Daerah.

BAB III **Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah**

Bab III ini menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, kondisi dan perkiraan ekonomi, serta arah kebijakan regulasi dan anggaran; Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

BAB IV **Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah**

Bab IV menjelaskan tentang Tujuan dan Sasaran Pembangunan; dan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun Rencana 2019.

BAB V **Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**

Bab V menjelaskan rencana program dan kegitana prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencanan RKPD dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI **Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Bab VI menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunanan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII **Penutup**

Bab VII ini menyampaikan kesimpulan umum dari RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2019.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

Identifikasi dan pemahaman terhadap kondisi dan potensi daerah merupakan modal dasar yang utama dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang strategis dan berkualitas dalam penyusunan perencanaan. Kondisi ini diperoleh melalui data tentang aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Aspek geografi merupakan aspek sumber daya alam yang ada berdasarkan tata letak suatu wilayah jika dibandingkan secara relatif dengan wilayah lainnya. Sedangkan aspek demografi adalah mempelajari tentang aspek sumber daya manusia berdasarkan struktur, komposisi dan persebaran penduduk. Aspek kesejahteraan masyarakat adalah mengkaji tentang tingkat perekonomian dan kajian sosial masyarakat dalam suatu wilayah. Aspek pelayanan umum memberikan gambaran tentang jenis-jenis layanan umum yang diberikan oleh pemerintah yang dapat diperoleh masyarakat, serta aspek daya saing daerah menjelaskan tentang kemampuan-kemampuan unggulan daerah yang selanjutnya menjadi nilai jual daerah dan dapat diperbandingkan secara relatif terhadap wilayah lain. Untuk itulah pada BAB ini akan dibahas semua aspek-aspek tersebut, sehingga dapat menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan yang ada sesuai dengan kondisi dan potensi Kota Payakumbuh.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Sebagaimana telah disampaikan di atas, bahwa dalam rangka menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan yang ada, dibutuhkan pemahaman mengenai kondisi dan potensi daerah yang dimiliki. Hal ini bertujuan agar upaya pembangunan yang dilakukan dapat berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.

2.1.1.1 Aspek Geografi

Kota Payakumbuh secara geografis berada pada daerah pegunungan Bukit Barisan yang berjarak 124 Km dari ibukota Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang. Kota Payakumbuhmerupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat yang menjadi gerbang Utara sebelum menuju Provinsi Riau. Dengan Posisi astronomis Kota Payakumbuh terletak pada 00^0-10^0 sampai dengan 0^0-17’ LS dan 100^0-35’ sampai dengan 100^0-48’ BT. Kota Payakumbuh dapat didominasi dataran rendah (92,30%), dan sisanya perbukitan dengan elevasi maksimum ±825 m dpl (7,70%). Area perbukitan terletak di batas Barat Daya dan Selatan Kota Payakumbuh, disamping jaringan alur sungai yang secara umum mengalir dari Barat Daya ke Timur Laut dan bergabung ke Batang Sinamar. Walaupun sepanjang aliran sungai terakumulasi endapan aluvial, tetapi mayoritas material pembentuk muka bumi berasal dari aktifitas gunung berapi.

Kota Payakumbuh memiliki luas wilayah ± 80,43 Km^2 atau ± 0,19% dari luas Provinsi Sumatera Barat.Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008, Kota

Payakumbuh dimekarkan dari tiga kecamatan menjadi lima kecamatan, dengan ditambahkannya Kecamatan Payakumbuh Selatan pada tanggal 23 Desember 2008, dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori pada tanggal 24 Desember 2008. Sebagai bagian dari Luhak Nan Bungsu, Kota Payakumbuh dikelilingi oleh Kabupaten LimapuluhKota yang secara administratif berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara : Kecamatan Harau dan Kecamatan Payakumbuh
- Sebelah Selatan : Kecamatan Luhak dan Kecamatan Situjuah Limo Nagari
- Sebelah Barat : Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Akabiluru
- Sebelah Timur : Kecamatan Luhak dan Kecamatan Harau

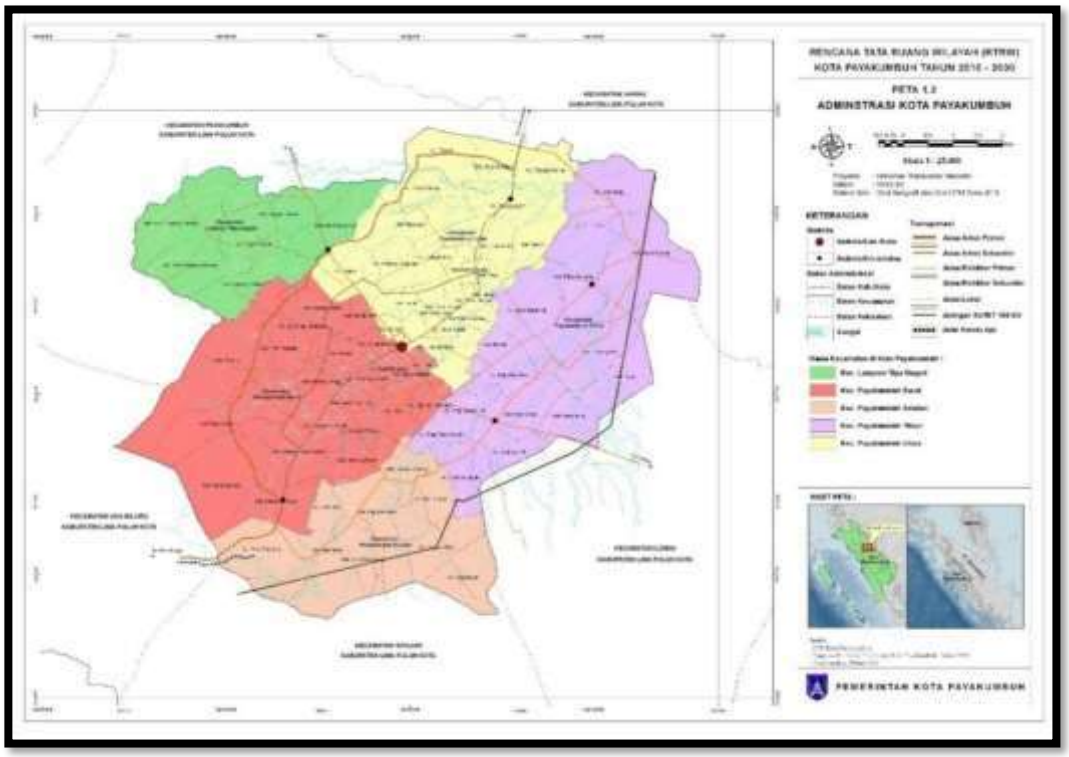

Gambar II-1
Batas Administrasi Kota Payakumbuh
Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010 – 2030

Tabel II-1
Pembagian Wilayah Administratif Kota Payakumbuh

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km^2)	Jumlah		
				Kelurahan	RW	RT
1	Payakumbuh Barat	Tanjung Pauh	19,06	17	60	166
2	Payakumbuh Utara	Pdg. Kaduduak	14,53	9	49	123
3	Payakumbuh Timur	Tiakar	22,73	9	33	91
4	Payakumbuh Selatan	Sawah Padang	14,69	7	16	49
5	Lamposi Tigo Nagori	Sei Durian	09,42	6	14	50
	Total		80,43	47	172	479

Sumber: Kecamatan Dalam Angka, 2017

Topografi Kota Payakumbuh berdasarkan aspek ketinggian dan kemiringan lahan, dimana hampir sebagian wilayahnya (±92,30% atau ±7423,75 Ha) terletak dengan kemiringan lahan kurang dari 2%, yang mencakup Kecamatan Payakumbuh Barat, Payakumbuh Timur, Payakumbuh Utara dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori. Sedangkan Kecamatan Payakumbuh Selatan lebih tergolong pada perbukitan. Secara umum Kota Payakumbuh memiliki relief dengan kemiringan lereng beragam dari 0% (datar) hingga lebih dari 40% (curam), yang terletak pada ketinggian daerah berada pada 500 Meter diatas permukaan laut.

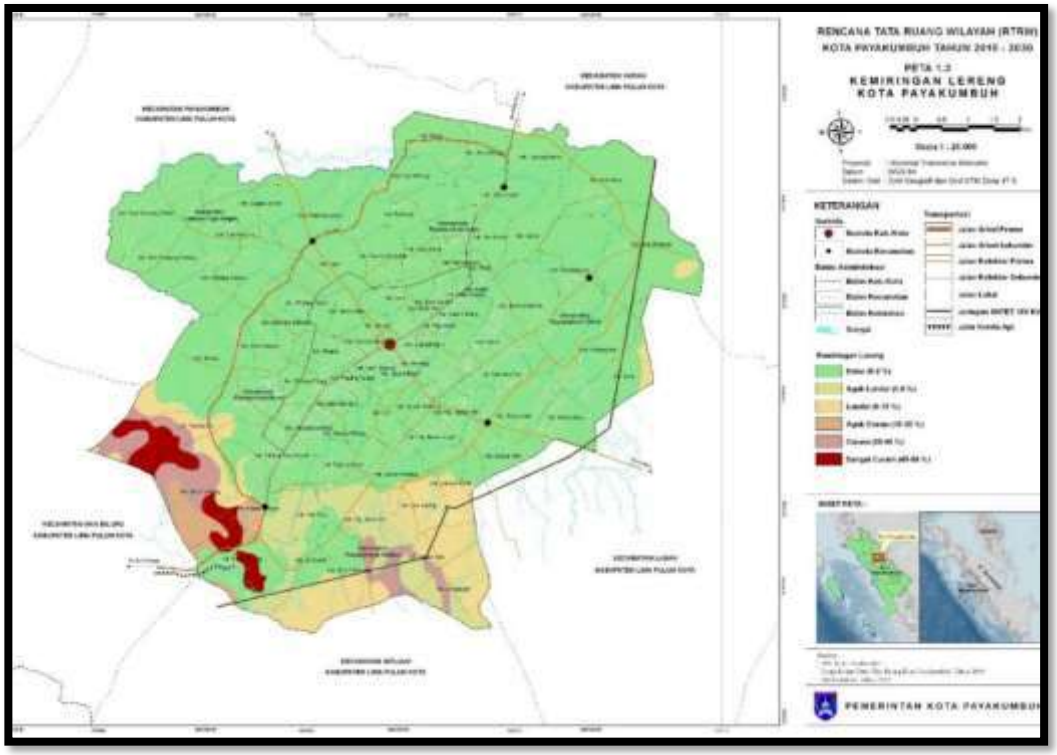

Gambar II-2
Peta Kemiringan Lereng Kota Payakumbuh
Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010 – 2030

Tabel II-2
Klasifikasi Kemiringan Lahan di Kota Payakumbuh

No	Kemiringan Lahan	Lereng (%)	Kelas	(Luas)	
				Ha	%
1	Datar	0-2	A	6.601.7	82,08
2	Agak Landai	2-8	B	304,0	3,78
3	Landai	8-15	C	588,8	7,32
4	Agak Curam	15-30	D	112,6	1,40
5	Curam	30-45	E	298,4	3,71
6	Sangat Curam	45-60	F	137,5	1,71
	Luas			8.043,0	100,00

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010 – 2030

Berdasarkan Gambar II-2 dan Tabel II-2, Kecamatan Payakumbuh Selatan (Kelurahan Kapalo Koto Ampangan, Kelurahan Limo Kampuang, dan Kelurahan Sawah Padang Aur Kuning) dan Kecamatan Payakumbuh Timur (Kelurahan Sicincin) memiliki tingkat kesuburan tanah yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lain. Disamping informasi mengenai curah hujan, dan posisi fisiografis yang cukup tinggi, Kecamatan Payakumbuh Selatan berpotensi untuk diprioritaskan pada usaha pertanian.

Kota Payakumbuh memiliki sumber air baku yang cukup potensial, ada tujuh alur sungai, yaitu Batang Lampasi, Batang Pulau, Batang Agam, Batang Sikali, Sungai Talang, Sungai Baih, dan Batang Sinamar. Aliran sungai yang menjangkau setiap wilayah di Kota Payakumbuh tidak hanya dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, tetapi juga dikembangkan sebagai bagian dari objek wisata Kota Payakumbuh.

1. **Sungai Batang Agam**
   Sumber air yang berasal dari air permukaan dengan debit air mencapai 3,38 m^3/detik sampai 6,30 m^3/detik. Sedangkan pada saat kemarau debit air sebesar 4,40m^3/detik.

2. **Mata Air Bulakan**
   Mata air ini berada di Kelurahan Limbukan. Selain sebagai sumber air baku, mata air Bulakan yang mempunyai tiga outlet dari dua bangunan penangkap air tersebut dengan debit sebesar 325 liter/detik dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan perikanan.

3. **Sungai Batang Lampasi**
   Sungai ini mengalir melewati Kelurahan Koto Panjang Dalam, Sungai Durian, Taratak Padang Kampung, dan kelurahan Ompang Tanah Sirah yang dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan dan peternakan.

4. **Sungai Batang Sinamar**
   Sungai yang mengalir melewati Kelurahan Ompang Tanah Sirah Kecamatan Payakumbuh Utara dan kelurahan Kotobaru Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur ini belum dapata dioptimalkan untuk keperluan irigasi karena elevasi pada hulu sungai sangat rendah dan hanya melewati Kota Payakumbuh sepanjang ±3 (tiga) Km, Sungai Batang Sinamar juga merupakan batas alami dengan Kabupaten Limapuluh Kota.

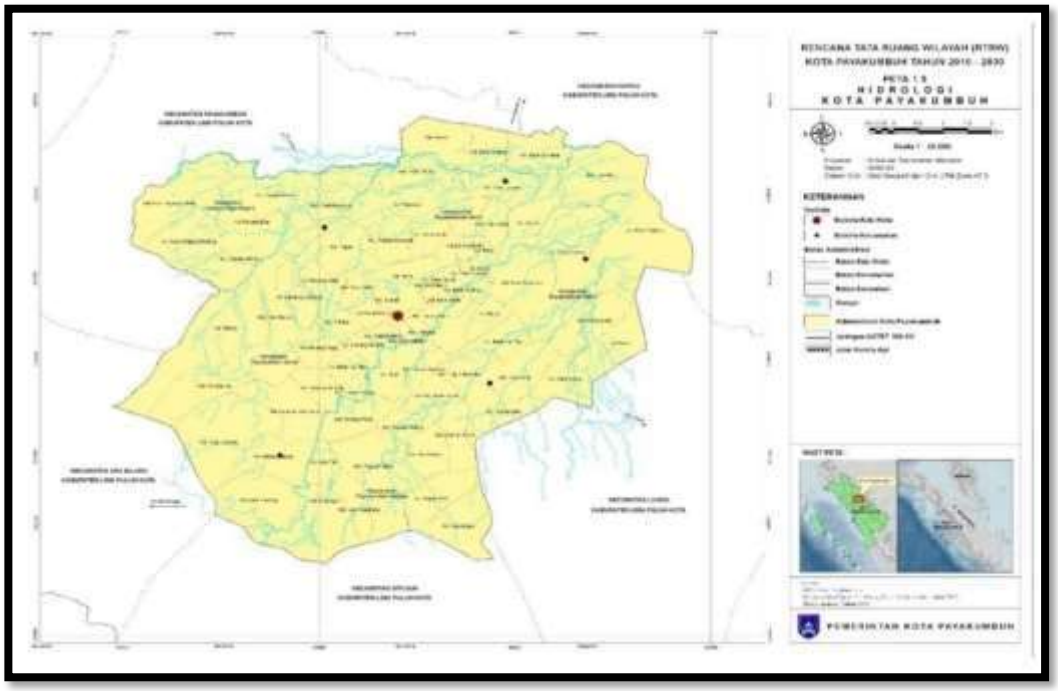

Gambar II-3
Peta Hidrologi Kota Payakumbuh
Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010 – 2030

Curah hujan berpengaruh terhadap ketersediaan air bagi tanaman. Pada daerah yang tidak terairi oleh irigasi, maka pertanian didaerah tersebut sangat tergantung pada hujan. Agar tanaman tidak kekurangan air dan dapat berproduksi maksimum, maka daerah perlu menyediakan sumber air bagi tanaman. Sedangkan untuk yang memiliki curah hujan rendah, petani atau instansi terkait membangun saluran irigasi agar air selalu tersedia bagi tanaman. Disisi lain, pertumbuhan vegetasi tidak hanya ditentukan oleh curah hujan, tetapi juga oleh distribusi hujan.

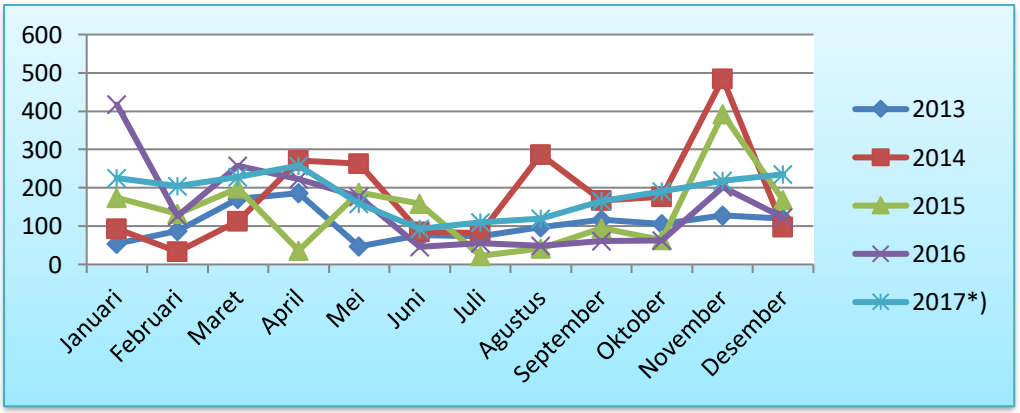

Gambar II-4
Curah Hujan Kota Payakumbuh, Tahun 2013-2017

Hari hujan dinyatakan sebagai suatu tempat yang mengalami hujan dengan angka curah hujan 0,5 mm atau lebih. Jumlah hujan yang sama dalam mm akan berbeda pengaruhnya jika tercurah pada waktu yang berbeda. Distribusi hujan dapat dinyatakan dengan melihat data jumlah hari hujan. Secara lebih detil dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel II-3

Distribusi Hujan Tahun 2013 - 2017 Kota Payakumbuh

No	Bulan	2013		2014		2015		2016		2017*)	
		Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan
1.	Januari	54,0	5	93,00	13	174,50	14	417	18	226	10
2.	Februari	87,6	8	33,00	5	132,50	9	126	9	204	18
3.	Maret	170,6	9	112,00	12	198,50	17	258	11	228	10
4.	April	186,0	8	271,00	20	35,50	20	223	13	258	15
5.	Mei	47,0	5	263,00	15	188,00	15	177	12	159	11
6.	Juni	76,8	4	85,00	5	159,00	9	46	4	93	7
7.	Juli	74,1	5	82,00	4	22,50	3	55	6	110	12
8.	Agustus	97,0	4	286,00	13	41,00	5	48	6	120	15
9.	September	116,6	7	167,00	13	95,00	6	61	5	165	11
10.	Oktober	105,0	4	176,00	14	64,00	5	62	7	190	21
11.	November	128,3	10	485,00	22	392,00	24	202	16	219	18
12.	Desember	119,3	6	97,00	15	168,50	19	122	11	235	21

Sumber: *Payakumbuh Dalam Angka 2014– 2017. *) Climate-data.org*

Pemanfaataan ruang wilayah perencanaan merupakan bentuk pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran, fungsi serta karakter kegiatan manusia dan alam. Pemanfaatan ruang untuk kebutuhan manusia dikategorikan sebagai kegiatan budi daya yang dalam prosesnya harus didukung dengan penyediaaan kawasan lindung. Kelangkaan lahan (*Land Scarcity*) mencerminkan bahwa lahan/tanah merupakan sumber daya yang terbatas dan tidak mungkin bertambah kedepannya, kecuali untuk daerah pantai yang melakukan reklamasi pada daerah pantai atau tanjung. Di sisi lain, perkembangan sosial ekonomi menuntut adanya kenaikan permintaan lahan, baik dari segi luas maupun dari segi keragamannya. Karena itu penataan ruang menjadi sebuah kebutuhan dari kota untuk mengoptimalkan pola kegiatan keruangan dari manusianya. Tanaman padi dapat hidup baik didaerah yang berhawa panas dan banyak mengandung uap air. Curah hujan yang baik rata-rata 200 mm per bulan atau lebih. Untuk daerah dengan ketersediaan air yang cukup, penanaman padi dilakukan pada periode tertentu selalu air tergenang. Berdasarkan tabel II-4 sepertiga luas daerah Kota Payakumbuh dimanfaatkan sebagai sawah.

Tabel II-4
Luas Penggunaan Lahan Menurut Jenisnya di Kota Payakumbuh

No	Jenis Penggunaan Lahan	2013		2014		2015		2016		2017*)	
		Luas Area (Ha)	Persen (%)	Luas Area (Ha)	Persen (%)	Luas Area (Ha)	Persen (%)	Luas Area (Ha)	Persen (%)	Luas Area (Ha)	Persen (%)
1.	Sawah	2.751	34,21	2.123	26,40	2.123	26,40	2.123	26,40	2.121	26,37
2.	Tanah untuk Bangunan dan Sekitarnya	2.902	36,10	3.511	43,64	3.533	43,89	3.530	43,88	3.532	43,91
3.	Kebun/ Ladang	1.456	18,10	1.224	15,22	1.456	18,10	1.458	18,13	1.458	18,13
4.	Kolam	14	0,17	198	2,46	14	0,17	14	0,17	14	0,17
5.	Hutan	356	4,43	360	4,48	356	4,43	354	4,40	354	4,40
6.	Padang Rumput	11	0,14	47	0,59	11	0,14	11	0,14	11	0,14
7.	Lainnya	553	6,87	580	7,21	550	6,87	553	6,88	553	6,88
	Jumlah	8.043	100,00	8.043	100,00	8.043	100,00	8.043	100,00	8.043	100,00

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2013– 2017 dan RTRW Kota Payakumbuh 2010-2030, data diolah.
*) Angka proyeksi

Pola penggunaan lahan Kota Payakumbuh sejak tahun 2013-2017 terlihat tidak ada perubahan yang signifikan. Pemanfaatan lahan terbesar digunakan untuk tanah dan bangunan. Alih fungsi lahan untuk pembangunan berasal dari perubahan fungsi pemanfaatan persawahan, kolam dan padang rumput untuk mengakomodir kebutuhan manusia akan ruang guna pembangunan fisik daerah.

Tabel II-5
Luas Penggunaan Lahan Pertanian di Kota Payakumbuh (Ha)

No	Kecamatan	Luas Daerah	2013		2014		2015		2016		2017*)	
			Sawah	Bukan Sawah	Sawah	Bukan Sawah	Sawah	Bukan Sawah	Sawah	Bukan Sawah	Sawah	Bukan Sawah
1	Payakumbuh Barat	1.966	529	577	404	577	404	577	404	577	403,5	576
2	PayakumbuhTimur	2.273	663	772	536	772	536	772	536	772	535,5	771,75
3	Payakumbuh Utara	1.453	745	255	620	255	620	225	620	225	619,5	224,75
4	Payakumbuh Selatan	1.409	378	493	252	493	252	493	252	491	251,75	490,75
5	Lamposi Tigo Nagori	942	436	293	311	293	311	293	311	293	310,75	292,75
	Jumlah	8.043	2.751	2.390	2.123	2.390	2.123	2.390	2.123	2.390	2.121	2.388

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2013– 2017 dan RTRW Kota Payakumbuh 2010-2030, data diolah.
*) Angka proyeksi

Untuk tahun 2017 terlihat bahwa Kecamatan Payakumbuh Utara (51,27%) dan Lampasi Tigo Nagori (46,28%) komoditi pertaniannya mayoritas adalah padi dibandingkan dengan tiga kecamatan lainnya, yang lebih dimanfaatkan untuk perkebunan rakyat, palawija, hortikultura, dan padang rumput.

Tabel II-6
Persentase Luas Penggunaan Lahan Pertanian Sawah dan Non-Sawah dengan Luas Daerah Tahun 2017 Kota Payakumbuh

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas Daerah	Sawah	Bukan Sawah	Persentase Luas Lahan Pertanian Sawah terhadap Luas Daerah	Persentase Luas Lahan Pertanian Bukan Sawah terhadap Luas Daerah	Persentase Luas Lahan Pertanian terhadap Luas Daerah
1.	Payakumbuh Barat	1.966	403,5	576	20,52%	29,30%	49,82%
2.	PayakumbuhTimur	2.273	535,5	771,75	23,56%	33,95%	57,51%
3.	Payakumbuh Utara	1.453	619,5	224,75	42,64%	15,47%	58,11%
4.	Payakumbuh Selatan	1.409	251,75	490,75	17,87%	34,83%	52,70%
5.	Lamposi Tigo Nagori	942	310,75	292,75	32,99%	31,08%	64,07%
Total		8.043	2.121	2.388	26,37%	29,69%	55,06%

Sumber: Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2018 (data diolah)

2.1.1.2Potensi Pengembangan Wilayah

Analisis potensi pengembangan ekonomi wilayah dilakukan untuk mengetahui secara konkrit sektor dan sub-sektor yang berpotensi mempengaruhi perkembangan ekonomi wilayah. Informasi ini diperlukan dalam penyusunan rencana daerah untuk menentukan arah dan prioritas pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga pertumbuhan ekonomi optimal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat maksimal dapat diwujudkan. Potensi pengembangan ekonomi kabupaten/ kota dari sisi pembangunan sektoral ditentukan oleh keunggulan komparatif yang dimiliki oleh daerah bersangkutan dibandingkan dengan kinerja sektoral pada tingkat provinsi. Alat analisa yang digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan komparatif sektor dan sub-sektor daerah adalah Indeks Koefisien Lokasi (Location Quotient, LQ).

LQ adalah suatu perbandingan besarnya peranan suatu sektor disuatu daerah terhadap besarnya peranan sektor tersebut pada tingkat yang lebih luas.Teknik ini mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki daerah pada sektor-sektor mana yang merupakan sektor basis dan sektor mana yang bukan sektor basis. LQ dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan sektor unggulan daerah. Dalam perhitungannya nilai LQ diperoleh dengan membandingkan PDRB Kota Payakumbuh dengan PDRB Provinsi Sumatera Barat pada rentang waktu tahun 2013-2017, hasil perhitungan sebagaimana yang tergambar pada Tabel II-7

Tabel II-7
Perkembangan Nilai Indek Koefisien Lokasi (LQ) Menurut Lapangan Usaha di Kota Payakumbuh Tahun 2013-2017

	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017*)	Rerata
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,31	0,33	0,32	0,32	0,31	0,32
B	Pertambangan dan Penggalian	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,15
C	Industri Pengolahan	0,54	0,50	0,51	0,52	0,52	0,52
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,63	0,46	0,58	0,60	0,59	0,57
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,86	2,85	2,86	2,75	2,73	3,01
F	Konstruksi	1,38	1,45	1,51	1,48	1,47	1,46
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,54	1,52	1,55	1,56	1,55	1,54
H	Transportasi dan Pergudangan	1,23	1,20	1,16	1,10	1,10	1,16
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,34	2,61	2,81	2,97	2,95	2,74
J	Informasi dan Komunikasi	1,32	1,10	1,00	0,97	0,97	1,07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,08	2,19	2,25	2,23	2,25	2,20
L	Real Estat	1,50	1,50	1,53	1,49	1,50	1,50
M,N	Jasa Perusahaan	0,63	0,60	0,61	0,61	0,60	0,61
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,30	1,37	1,25	1,24	1,25	1,28
P	Jasa Pendidikan	1,10	1,17	1,17	1,18	1,18	1,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,17	1,18	1,14	1,13	1,14	1,15
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,12	2,16	2,10	2,06	2,08	2,10
	Produk Domestik Regional Bruto	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Sumber: Data PDRB Kota Payakumbuh Tahun 2013-2016, (Data diolah)
*) Angka diolah

Dari tabel II-7 terlihat bahwa sektor yang menjadi basis dan menjadi sektor unggulan adalah sektor yang memiliki nilai LQ>1 yaitu sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan nilai LQ rata-rata = 3,01, sub sektor konstruksi dengan nilai LQ rata-rata = 1,46, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai LQ rata-rata = 1,54; sektor transportasi dan pergudangan dengan nilai LQ rata-rata 1,16; sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan nilai LQ rata-rata 2,74; sektor real estat dengan nilai LQ rata-rata = 1,50 serta sektor jasa lainnya yang memiliki 2,10. Angka koefisien ini memperlihatkan bahwa sektor tersebut mempunyai keunggulan komparatif yang cukup tinggi dibandingkan dengan sektor yang sama secara rata-rata di tingkat provinsi Sumatera Barat dan merupakan sektor basis di Kota Payakumbuh.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat yang terletak di zona patahan, Kota Payakumbuh relatif aman dari ancaman bencana alam gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan letusan gunung api. Namun ancaman bencana alam yang perlu mendapatkan perhatian adalah angin puting beliung.

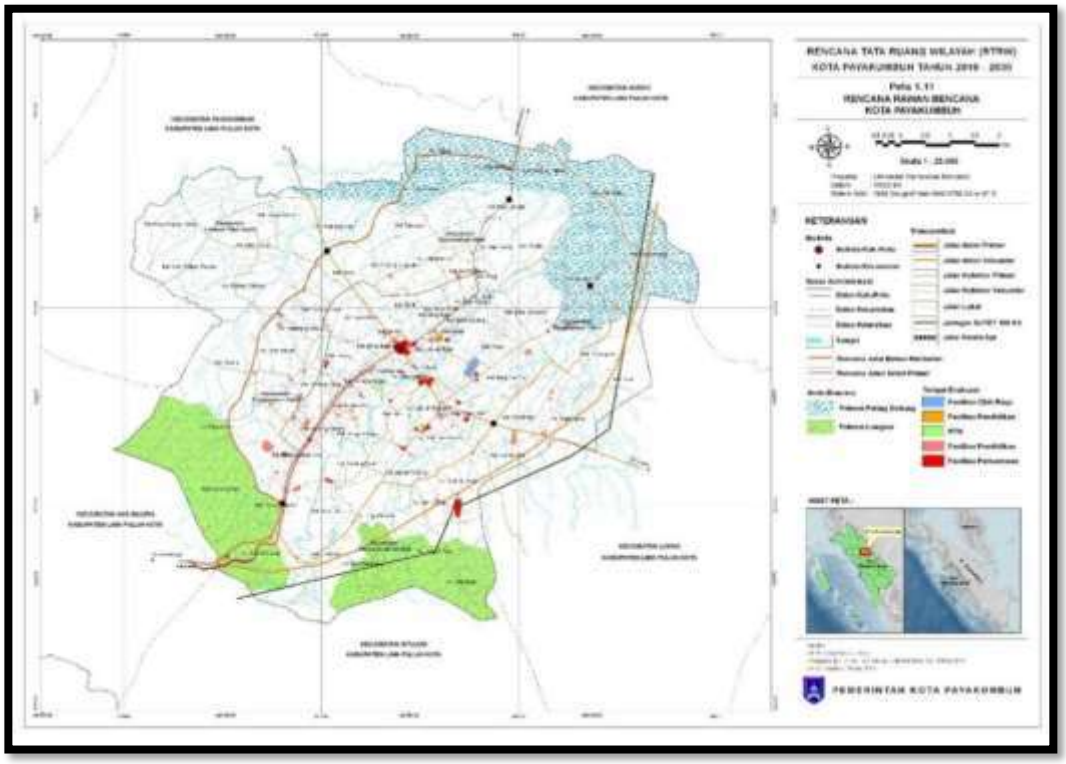

Gambar II-5

Peta Rencana Rawan Bencana Kota Payakumbuh

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010 – 2030

Kejadian bencana alam ataupun bencana sosial mengakibatkan penurunan pada daya dukung wilayah, dikarenakan adanya sumber daya yang rusak akibat bencana. Potensi bencana alam untuk Kota Payakumbuh dapat dikelompokkan menjadi dua; tanah longsor pada beberapa kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Selatan, dan potensi angin puting beliung pada bagian luar Kecamatan Payakumbuh Selatan, Payakumbuh Timur dan Payakumbuh Utara. Dengan mengetahui potensi bencana daerah, peruntukan fungsi ruang dapat dikendalikan dan juga dapat meminimalkan resiko sosial yang muncul apabila bencana terjadi. Wilayah berpotensi rawan bencana (Gambar II.4) menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi padat karya dan padat karsa, seperti: pemukiman, perdagangan, pendidikan dan sebagainya.

2.1.1.4 Demografi

Perencanaan Kota Payakumbuh merupakan perencanaan yang dimulai dari pemahaman untuk membangun manusia seutuhnya. Pola pendekatan ini mengevaluasi kebutuhan penduduk dari sisi kualitas dan kuantitas penduduk. Dari sisi kualitas dipahami perencanaan penduduk sebagai upaya meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia, sedangkan dari sisi kuantitas diperhatikan melalui pola kependudukan itu sendiri. Jumlah penduduk yang semakin meningkat, dan tidak diikuti oleh pertambahan daya dukung baik dari lahan maupun sumber daya, menjadi salah satu pertimbangan bahwa pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan subjek dan objek dari pembangunan yaitu manusia. Dengan mengetahui kondisi penduduk

suatu wilayah secara menyeluruh maka selanjutnya dapat diperkirakan tingkat kebutuhan dan kepentingan penduduk yang harus dipenuhi berdasarkan potensi-potensi yang ada baik untuk saat ini maupun kedepannya.

a. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Penduduk Kota Payakumbuh tersebar pada lima kecamatan, walaupun berdasarkan tabel II-1. Kecamatan yang paling luas tugas wilayahnya adalah Kecamatan Payakumbuh Timur, tetapi untuk persebaran penduduk, kecamatan Payakumbuh Barat lebih padat dibanding empat kecamatan lainnya.

Tabel II-8
Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2013- 2017

No	Uraian	Luas	2013		2014		2015		2016		2017*)	
			Jumlah	Density	Jumlah	Density	Jumlah	Density	Jumlah	Density	Jumlah	Density
1.	Payakumbuh Barat	19,06	48.537	2.496	48.624	2.473	49.450	2.594	50.033	2.562	50.616	2.656
2.	Payakumbuh Timur	22,73	25.904	1.140	27.246	1.199	27.634	1.216	28.370	1.230	29.106	1.280
3.	Payakumbuh Utara	14,53	30.063	2.069	30.117	2.073	30.679	2.112	30.797	2.120	30.946	2.130
4.	Payakumbuh Selatan	14,69	10.028	712	10.278	729	10.453	712	10.752	732	11.051	752
5.	Lamposi Tigo Nagori	9,42	9.122	968	9.425	1.001	9.610	1.020	9.855	1.037	10.100	1.072
	Total	80,43	123.654	1.537	125.690	1.563	127.826	1.589	129.807	1.614	131.819	1.639

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2014– 2017
*) Angka Proyeksi

Kondisi ini juga dipengaruhi oleh struktur ruang kota, dimana pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan ekonomi kota berada pada Kecamatan Payakumbuh Barat, dan Payakumbuh Utara. Disamping itu bentang alam kecamatan juga mempengaruhi preferensi masyarakat dalam memilih lingkungan perumahannya, sebagai contoh luas daerah Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Payakumbuh Selatan tidak terlalu berbeda, tetapi karena Kecamatan Payakumbuh Selatan lebih didominasi perbukitan, sehingga kecamatan Payakumbuh Utara lebih padat dibanding Kecamatan Payakumbuh Selatan.

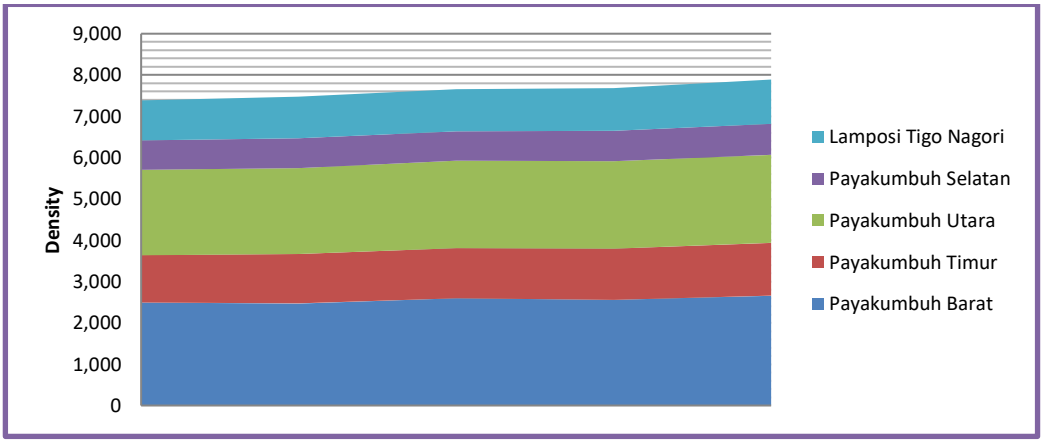

Gambar II-6
Density Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2017

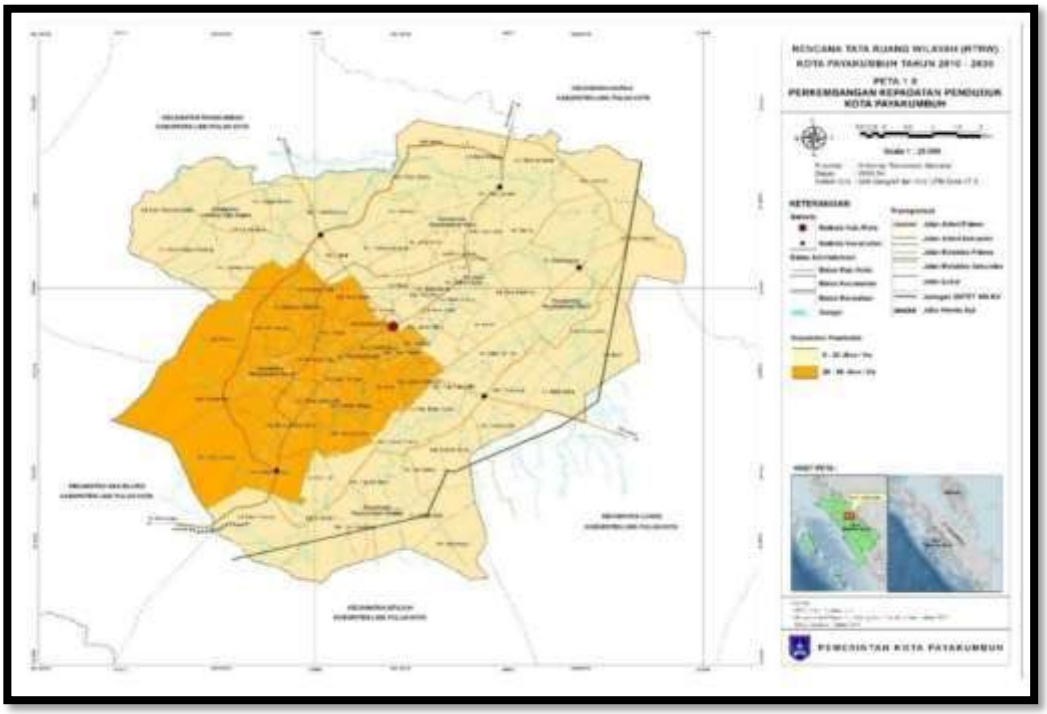

Gambar II-7
Peta Perkembangan Kepadatan Kota Payakumbuh
Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010 - 2030

b. Struktur dan Karakteristik Penduduk

1. Struktur Penduduk Berdasarkan Umur

Klasifikasi penduduk berdasarkan umur berguna untuk memperlihatkan karakteristik penduduk suatu daerah, dan juga untuk menunjukkan tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan) antara penduduk produktif (15-64 tahun) dengan penduduk non produktif (0-14 tahun dan diatas 65 tahun). Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan data pada tabel II-8, didapatkan *dependency ratio* atau rasio ketergantungan penduduk di Kota Payakumbuh (tabel II-9).

Tabel II-9
Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2013-2017

No	Kelompok Umur	2013	2014	2015	2016	2017*)
1.	0-4	13.816	13.915	13.936	13.914	13.921
2.	5 -9	12.178	12.374	12.598	12.777	12.956
3.	10 -14	11.116	11.220	11.374	11.548	11.697
4.	15-19	11.004	11.184	11.370	11.487	11.579
5.	20-24	9.124	9.151	9.213	9.334	9.455
6.	25-29	10.194	10.366	10.477	10.507	10.612
7.	30-34	9.722	9.837	9.992	10.181	10.370
8.	35-39	9.194	9.292	9.396	9.455	9.517
9.	40-44	8.251	8.440	8.631	8.832	9.035
10.	45-49	7.173	7.315	7.478	7.654	7.807
11.	50-54	6.539	6.640	6.767	6.875	6.982
12.	55-59	5.171	5.393	5.584	5.754	5.925
13.	60-64	3.392	3.643	3.897	4.139	4.384
14.	65+	6.780	6.920	7.113	7.350	7.582
	Jumlah	**123.654**	**125.690**	**127.826**	**129.807**	**131.819**

Sumber: Payakumbuh DalamAngka 2014–2017
*) Angka proyeksi

Selanjutnya jika ditampilkan dalam bentuk piramida, gambaran struktur penduduk Kota Payakumbuh dapat dilihat pada Gambar II.8 berikut yang berkaitan erat dengan analisis tingkat ketergantungan pada struktur penduduk di Kota Payakumbuh.

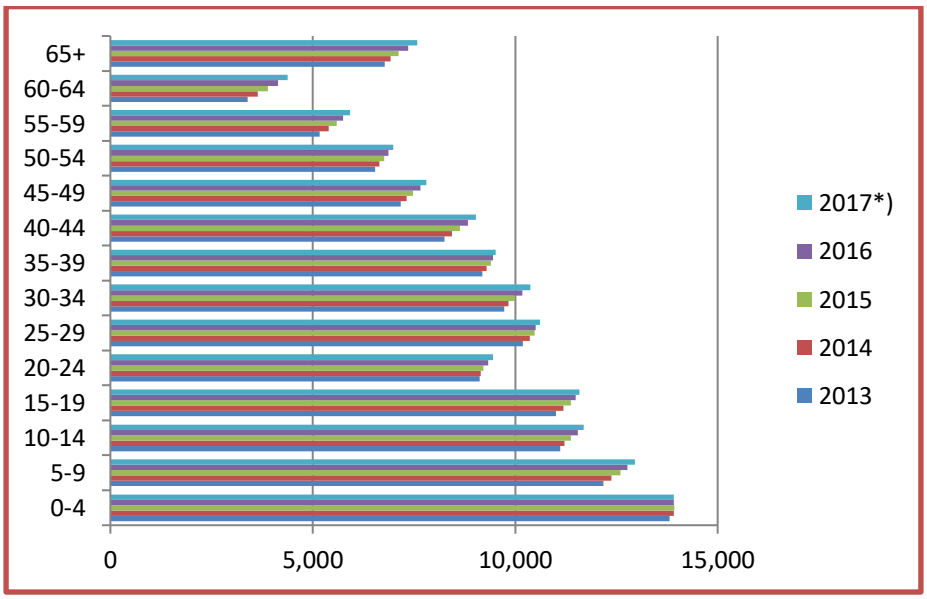

Gambar II-8
Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Payakumbuh Tahun 2013-2017

Tabel II-10
Perhitungan Rasio Beban Tanggungan Penduduk

No	Kelompok Umur	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kelompok Umur Produktif	79.764	81.261	82.805	84.218	85.666
2	Kelompok Umur Non-Produktif	43.890	44.429	45.021	45.589	46.156
3	Rasio Beban Tanggungan (%)	55,02	54,67	54,37	54,13	53,88

Sumber: Pengolahan Data Bappeda, 2018

Rasio ini menunjukkan bahwa semakin rendah nilai beban tanggungan menjadi lebih baik. Jika dilihat dari tabel di atas, selama periode tahun 2013-2017 terjadi penurunan beban ketergantungan dari 55,02 menjadi 53,88.

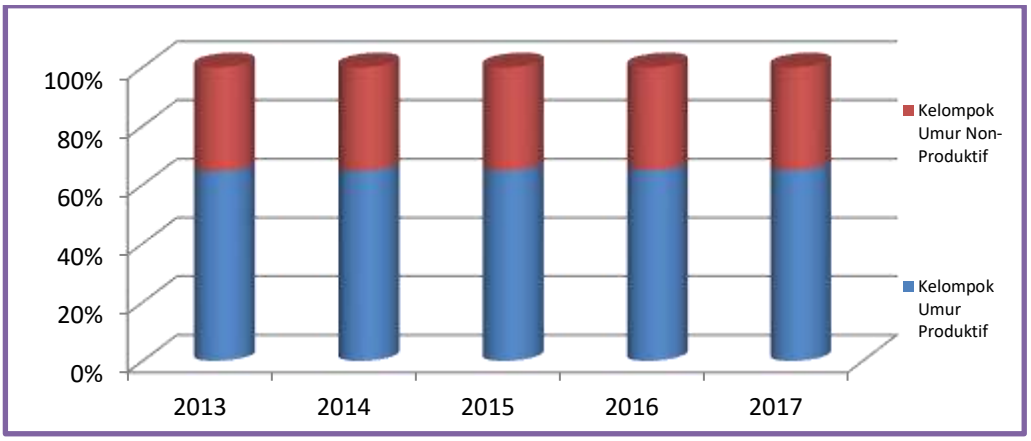

Gambar II-9
Beban Ketergantungan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2013-2017

Hal ini menggambarkanbahwasetiap 100 orang penduduk kelompok produktif harus menanggung 54,13 (~55 orang) dari kelompok tidak produktif pada tahun 2016 dan menurun menjadi 53,88 pada tahun 2017. Rasio ketergantungan penduduk dengan rentang nilai 51-69 diklasifikasikan sebagai sebagai pola ketergantungan sedang. Disamping itu, memperhatikan jumlah penduduk per-kelompok umur, dapat digolongkan bahwa penduduk kota Payakumbuh bercirikan ekspansif. Tipe penduduk ini dicirikan melalui tingginya tingkat kelahiran dan rendahnya tingkat kematian, hal ini berarti bahwa kualitas layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah meningkat setiap tahunnya.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan sex ratio (rasio jenis kelamin) di Kota Payakumbuh adalah 0,99 untuk laki-laki terhadap perempuan, yang dipahami bahwa 100 orang perempuan, sebanding dengan 99 orang penduduk laki-laki.

Tabel II-11

Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2013- 2017

No	Kecamatan	2013		2014		2015		2016		2017*)	
		LK	Pr	LK	Pr	LK	Pr	LK	Pr	Lk	Pr
1.	Payakumbuh Barat	24.060	24.477	24.136	24.488	24.566	24.884	25.035	25.270	25.504	25.656
2.	Payakumbuh Timur	12.826	13.078	13.525	13.721	13.728	13.906	13.895	14.122	14.062	14.338
3.	Payakumbuh Utara	15.004	15.059	14.950	15.167	15.241	15.438	15.449	15.677	15.657	15.916
4.	Payakumbuh Selatan	4.962	5.066	5.102	5.176	5.193	5.260	5.273	5.342	5.353	5.425
5.	Lamposi Tigo Nagori	4.527	4.595	4.678	4.747	4.774	4.836	4.848	4.911	4.922	4.986
	Total	61.379	62.275	62.391	63.299	63.502	64.324	64.486	65.321	65.498	66.321

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2014– 2017
*) Data proyeksi

3. Struktur Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Pada tahun 2015, jumlah penduduk angkatan kerja di Kota Payakumbuh adalah 63.017 jiwa, dimana 58.562 jiwa dikategorikan sebagai penduduk sudah bekerja atau 92,93% dari penduduk angkatan kerja sudah mempunyai pekerjaan. Berdasarkan tabel II-12, sektor perdagangan masih merupakan sektor favorit yang terlihat dari meningkatnya serapan tenaga kerja pada sektor ini. Untuk tahun 2017 sektor perdagangan menyerap 37,34% dari jumlah angkatan kerja pada tahun tersebut, yang melebihi sepertiga dari angkatan kerja aktif. Untuk sektor lainnya juga terdapat peningkatan dalam serapan tenaga kerja, yang diiringi dengan penurunan jumlah tenaga kerja pada sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan. Hal yang patut untuk menjadi perhatian adalah pertumbuhan lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja, akibatnya jumlah pencari kerja semakin meningkat setiap tahunnya.

Tabel II-12

Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2013- 2017

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017*)
1.	Pertanian, Kehutanan, Perburuan, Perikanan	10.228	10.988	8.380	7.387	6.440
2.	Industri Pengolahan	4.032	5.454	6.725	7.428	8.560
3.	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	15.478	19.420	21.397	22.845	25.301
4.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	15.694	12.747	13.246	13.890	13.289
5.	Lainnya	8.222	8.812	8.814	9.044	9.318
Jumlah yang Bekerja		53.654	57.421	58.562	60.594	62.907
Jumlah yang Mencari Pekerjaan		4.116	3.902	4.455	4.662	4.844
	Total	**57.770**	**61.323**	**63.017**	**65.256**	**67.751**

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2013 – 2016, *) Angka diolah

4. Struktur Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat partisipasi pendidikan di Kota Payakumbuh berguna untuk menunjukkan kebutuhan terhadap kuantitas pendidikan yang berkualitas. Data pada tabel II-13 menjadi dasar bagi pemerintah untuk menghitung jumlah guru, sekolah dan sarana pendidikan lainnya yang berguna untuk meningkatkan SDM yang berdaya saing.

Tabel II-13
Tingkat Partisipasi Pendidikan Penduduk Kota Payakumbuh
Tahun 2013- 2017

No	Tingkat Pendidikan	Usia (Tahun)	2013	2014	2015	2016	2017*)
1.	TK	5-6	5.175	5.266	5.692	5.264	5.294
2.	SD	7-12	16.307	16.594	15.756	14.477	13.867
3.	SLTP	13-15	6.960	7.083	7.403	6.933	6.924
4.	SLTA	16-18	7.134	7.259	7.475	6.991	6.943
	Total		**32.239**	**32.685**	**33.215**	**33.665**	**33.028**

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2013 – 2017
*) Angka sementara

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan Kota Payakumbuh yang dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, serta perlindungan sosial. Walaupun banyak kemajuan yang telah dicapai, tetapi masih banyak pula tantangan dan masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai selama ini akan diuraikan dalam bidang-bidang sebagai berikut :

2.1.2.1 Pertumbuhan PDRB

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah bruto barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Nilai tambah bruto adalah nilai produksi dikurangi dengan biaya antara. Nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah, serta keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung netto. PDRB mengukur seluruh transaksi ekonomi yang terjadi di wilayah domestik suatu daerah tanpa memperhatikan apakah transaksi dilakukan oleh masyarakat (residen) dari daerah tersebut atau masyarakat dari daerah lain (*non-residen*). Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tertentu pada tahun dasar.

.

Tabel II-14

Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2013- 2017 ADHB Kota Payakumbuh

No	Lapangan usaha	2013		2014		2015		2016		2017*)	
		(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	288.517,12	7,79	328.655,76	7,86	349.806,48	7,69	368.159,01	7,39	394.706,31	7,30
2	Pertambangan & penggalian	22.376,49	0,60	27.266,01	0,65	30.787,92	0,68	32.045,70	0,64	35.268,77	0,65
3	Industri Pengolahan	222.842,18	6,02	238.495,39	5,71	254.974,82	5,61	281.253,30	5,64	300.723,67	5,56
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.531,83	0,04	1.902,68	0,05	2.561,92	0,06	3.241,90	0,07	3.811,92	0,07
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.821,58	0,32	11.931,90	0,29	13.099,95	0,29	13.971,12	0,28	14.687,63	0,27
6	Konstruksi	454.536,01	12,27	522.686,42	12,50	600.633,13	13,21	651.884,24	13,05	717.666,98	13,27
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	883.901,87	23,87	980.667,08	23,46	1.078.984,91	23,73	1.192.225,3	23,92	1.294.999,78	23,94
8	Transportasi dan Pergudangan	493.976,51	13,34	563.936,37	13,49	609.220,22	13,40	648.425,20	13,08	699.908,10	12,94
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	91.721,73	2,48	107.539,82	2,57	128.778,88	2,83	157.647,90	3,16	179.623,29	3,32
10	Informasi dan Komunikasi	250.575,19	6,77	287.022,80	6,87	291.678,29	6,42	323.993,10	6,50	348.465,74	6,44
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	236.489,80	6,39	277.511,96	6,64	304.772,79	6,70	339.767,50	6,82	374.193,40	6,92
12	Real Estat	106.091,82	2,86	123.001,60	2,94	135.787,16	2,99	145.452,10	2,92	158.572,19	2,93
13	Jasa Perusahaan	9.910,08	0,27	11.053,53	0,26	12.352,46	0,27	13.582,00	0,27	14.805,97	0,27
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	296.348,42	8,00	322.160,27	7,71	318.825,91	7,01	346.685,30	6,96	363.464,26	6,72
15	Jasa Pendidikan	150.666,14	4,07	171.482,74	4,10	191.876,63	4,22	218.407,50	4,38	240.987,95	4,45
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	57.730,90	1,56	64.675,08	1,55	68.583,59	1,51	73.725,20	1,48	79.056,63	1,46
17	Jasa Lainnya	124.298,10	3,36	140.170,06	3,35	153.572,19	3,38	172.918,20	3,47	189.124,90	3,50
	Total	**3.703.335,77**	**100**	**4.180.159,45**	**100**	**4.546.297,23**	**100**	**4.983.384,6**	**100**	**5.410.067,54**	**100**

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2017.

*) Angka proyeksi

Tabel II-15

Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2013 - 2017 ADHK Kota Payakumbuh

No	Lapangan usaha	2013		2014		2015		2016		2017*)	
		(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	232.344,15	7,40	243.570,98	7,28	251.460,28	7,08	257.764,45	6,84	266.237,88	7,07
2	Pertambangan & penggalian	18.746,21	0,60	19.495,04	0,58	20.393,76	0,57	21.139,40	0,56	21.937,13	0,58
3	Industri Pengolahan	194.432,47	6,19	205.849,20	6,16	209.923,38	5,91	225.113,50	5,98	235.340,51	6,25
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.903,00	0,06	2.061,76	0,06	2.098,47	0,06	2.487,24	0,07	2.681,99	0,07
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.625,85	0,40	12.623,68	0,38	13.021,73	0,37	13.192,07	0,35	13.380,81	0,36
6	Konstruksi	373.409,22	11,89	408.026,76	12,20	445.405,73	12,54	479.091,84	12,72	514.319,38	13,65
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	745.682,82	23,74	789.104,35	23,60	829.764,74	23,37	870.703,20	23,11	912.376,66	24,22
8	Transportasi dan Pergudangan	426.789,72	13,59	456.146,61	13,64	493.323,49	13,89	515.593,50	13,69	545.194,76	14,47
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	72.924,49	2,32	78.826,55	2,36	85.447,59	2,41	98.080,30	2,60	106.465,57	2,83
10	Informasi dan Komunikasi	252.138,45	8,03	277.985,49	8,31	305.455,47	8,60	335.794,90	8,91	363.680,38	9,65
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	200.755,26	6,39	215.146,29	6,43	223.630,45	6,30	241.635,50	6,41	255.262,25	6,78
12	Real Estat	92.556,48	2,95	97.886,79	2,93	103.260,47	2,91	108.004,00	2,87	113.153,17	3,00
13	Jasa Perusahaan	8.660,52	0,28	9.241,95	0,28	9.789,41	0,28	10.320,30	0,27	10.873,56	0,29
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	239.676,65	7,63	243.099,36	7,27	251.484,57	7,08	259.887,90	6,90	266.624,98	7,08
15	Jasa Pendidikan	119.397,62	3,80	126.589,11	3,79	137.594,27	3,87	148.621,70	3,95	158.363,06	4,20
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	47.487,53	1,51	50.861,11	1,52	54.157,01	1,53	56.660,70	1,50	59.718,42	1,59
17	Jasa Lainnya	101.375,00	3,23	107.450,55	3,21	114.818,63	3,23	122.878,30	3,26	130.046,07	3,45
	Total	**3.140.905,43**	**100**	**3.343.965,58**	**100**	**3.551.029,44**	**100**	**3.766.968,80**	**100**	**3.975.656,59**	**100**

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2017

*) Angka proyeksi

Tabel II-16

Laju Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB ADHB dan ADHK Tahun 2013- 2017 Kota Payakumbuh

No	Lapangan Usaha	2013		2014		2015		2016		2017*)	
		ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,94	3,30	13,91	4,83	6,44	3,24	5,88	2.51	7,21	3,29
2	Pertambangan & penggalian	17,72	7,31	21,85	3,99	12,92	4,61	5,55	3,66	10,06	3,77
3	Industri Pengolahan	6,32	4,68	7,02	5,87	6,91	1,98	10,31	7,24	6,92	4,54
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,03	3,23	24,21	8,34	34,65	1,78	26,54	10.62	17,58	7,83
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-3,27	3,50	0,93	-0,02	9,79	3,15	6,65	1,31	5,13	1,43
6	Konstruksi	14,29	6,17	14,99	9,27	14,91	9,16	8,28	7,56	10,09	7,35
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,39	8,96	10,95	5,82	10,03	5,15	10,50	4,81	8,62	4,79
8	Transportasi dan Pergudangan	11,67	5,65	14,16	6,88	8,03	8,15	6,44	4,95	7,94	5,74
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	16,01	6,23	17,25	8,09	19,75	8,40	22,42	13.35	13,94	8,55
10	Informasi dan Komunikasi	5,03	9,53	14,55	10,25	1,62	9,88	11,08	9,93	7,55	8,30
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	14,72	8,12	17,35	7,17	9,82	3,94	11,48	8,05	10,13	5,64
12	Real Estat	12,70	5,66	15,94	5,76	10,39	5,49	7,12	4,59	9,02	4,77
13	Jasa Perusahaan	11,16	5,89	11,54	6,71	11,75	5,92	9,95	5,42	9,01	5,36
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,50	2,14	8,71	1,43	-1,03	3,45	8,74	3,34	4,84	2,59
15	Jasa Pendidikan	17,66	7,45	13,82	6,02	11,89	8,69	13,83	8,01	10,34	6,55
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13,37	7,71	12,03	7,10	6,04	6,48	7,50	4,62	7,23	5,40
17	Jasa Lainnya	17,51	6,42	12,77	5,99	9,56	6,86	12,60	7,02	9,37	5,83
	Total	**11,76**	**6,56**	**12,88**	**6,47**	**8,76**	**6,19**	**9,64**	**6,08**	**9,12**	**5,40**

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2017

*) Angka proyeksi

2.1.2.2 Laju Inflasi

Inflasi adalah meningkatnya harga secara umum dan terus menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh faktor permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) barang yang beredar di pasar. Berbagai faktor yang menyebabkan kenaikan harga secara menyeluruh antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, tingginya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi, atau ketidaklancaran distribusi barang. Tingginya inflasi berdampak pada penurunan daya beli masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Laju inflasi Kota Payakumbuh pada tahun 2012-2016 mengacu pada angka inflasi ibu kota Provinsi Sumatera Barat, yaitu kota Padang.

Tabel II-17
Perbandingan Tingkat Inflasi Kota Payakumbuh, Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2013-2017

Tahun	Payakumbuh	Sumbar	Indonesia
2013	10,87	10,87	8,38
2014	11,9	11,58	8,36
2015	1,08	1,08	3,35
2016	4,17	4,89	3,02
2017	2,11	2,03	3,61
Rata-rata	**6,44**	**6,52**	**5,48**

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2017

Pada Tabel II-17 terlihat bahwa angka inflasi Kota Payakumbuh selama periode 2013 – 2017 cenderung sama dengan Provinsi Sumatera Barat. Akan tetapi, dibandingkan dengan angka inflasi nasional, laju inflasi Kota Payakumbuh secara rata-rata lebih tinggi dari nasional. Berdasarkan informasi dari tabel tersebut terlihat bahwa untuk tahun 2015 laju inflasi mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini muncul karena lebih terjaganya pasokan pangan, tidak adanya pelemahan daya beli masyarakat sehingga tidak dibutuhkannya kebijakan kenaikan harga. Pada tahun 2017tingkat inflasi daerah juga turun menjadi 2,11%. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya ketersediaan barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.

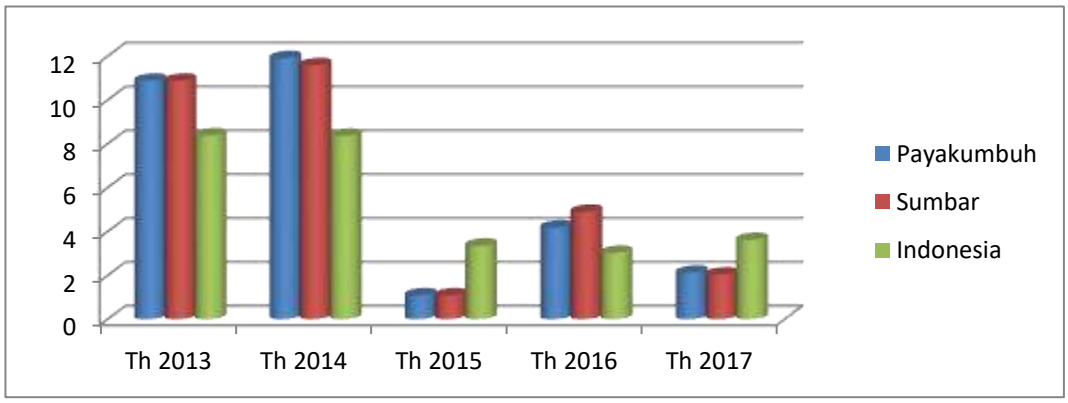

Gambar II-10
Perbandingan Angka Inflasi Nasional, Propinsi dan Kota Payakumbuh Tahun 2013-2017

2.1.2.3 PDRB per-Kapita

PDRB per-kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. PDRB per-kapita merupakan PDRB per jumlah penduduk di suatu daerah.

Tabel II-18
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kota Payakumbuh Tahun 2013- 2017 (2000 = 100)

No	Tahun	PDRB (juta rupiah)		Jumlah penduduk	PDRB per kapita (ribu rupiah)	
		ADHB	ADHK		ADHB	ADHK
1	2013	3.703,34	3.140,91	123,654	29.949,18	25.400,76
2	2014	4.180,16	3.343,97	125,690	33.257,69	26.604,87
3	2015	4.546,30	3.551,03	127,826	35.566,30	27.780,13
4	2016	4.984,53	3.767,82	129,807	35.023,51	29.026,31
5	2017*)	5.411,56	3.976,79	131.819	41.053,19	30.168,56

Sumber: PDRB Kota Payakumbuh Tahun 2017
*) Angka proyeksi

Sebagaimana yang telah dikemukan di atas, dimana data PDRB tahun 2017 belum tersedia, maka tetap mengacu pada angka PDRB tahun 2016. Pada tahun 2017, PDRB per-kapita Kota Payakumbuh bernilai 41,05 juta rupiah meningkat 17,22% dibanding tahun 2016 yang tumbuh sebesar 6,94%. Berdasarkan tabel II-18 di atas, PDRB per-kapita Kota Payakumbuh setiap tahunnya meningkat baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan, kecuali pada tahun 2016, dimana PDRB per-kapita turun dikarenakan pertambahan PDRB tidak sebanding dengan pertambahan jumlah penduduk.

2.1.2.4 Indeks Gini

Koefisien Gini (*Rasio Gini*) digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan melalui perbandingan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Indeks gini menunjukkan ketimpangan pendapatan yang ada masyarakat, dimana dapat digunakan untuk menunjukkan kemakmuran masyarakat.

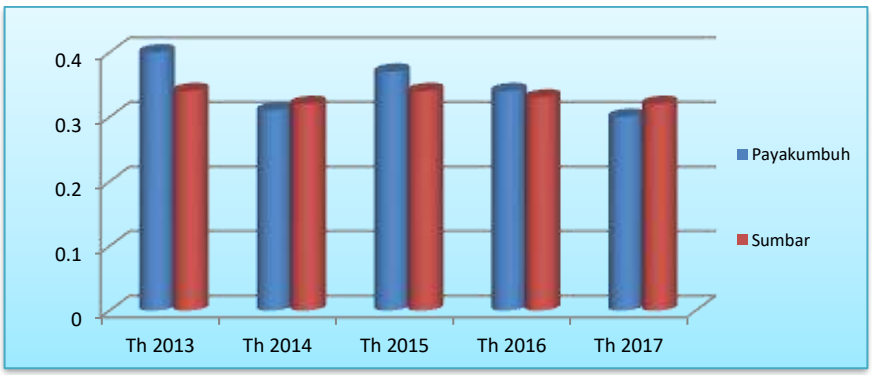

Gambar II-11
Perbandingan Gini Ratio Kota Payakumbuh dengan Sumatera Barat Tahun 2013-2017

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh, 2017

Pada tahun 2014, tingkat ketimpangan pendapatan di kota Payakumbuh relatif rendah jika dibandingkan dengan provinsi yang berada pada angka 0,31. Sedangkan untuk tahun 2015, Indeks Gini Kota Payakumbuh meningkat menjadi 0,37. Hal ini dipahami bahwa terjadi peningkatan kesenjangan pendapatan antara penduduk miskin dengan tidak miskin. Sedangkan pada tahun 2017, tingkat ketimpangan menurun menjadi 0,30, di bawah angka Sumatera Barat sebesar 0,32. Walaupun ini masih berada pada batas bawah tingkat ketimpangan sedang, namun selama krurun waktu dari 2013-2017, terjadi tingkat ketimpangan yang fluktuatif di Kota Payakumbuh.

2.1.2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian pembangunan daerah dapat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Tabel II-19
Capaian Indikator HDI Tahun 2013- 2017 Kota Payakumbuh

No	Indikator HDI	2013	2014	2015	2016	2017*)
1.	Pendidikan					
	▪ Harapan Lama Sekolah	14,13	14,80	14,21	14,22	14,25
	▪ Rata-rata lama Sekolah (Thn)	9,93	9,96	10,29	10,30	10,42
2.	Kesehatan					
	▪ Angka Harapan Hidup (Thn)	72,43	72,43	72,93	73,03	73,23
3.	Ekonomi					
	▪ Pengeluaran Riil/ Kapita (Rp/bln)	643,670	646,09	749,01	749,01	784,12
4.	Human Developmen Index (IPM)	76,34	76,49	77,42	77,56	77,97

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2014– 2017
*) Angka perkiraan

Dari data diatas terlihat bahwa selama rentang waktu 5 tahun terjadi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI) dari angka 76,34 pada tahun 2013 menjadi 77,97 pada tahun 2017, hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.6 Angka Melek Huruf

Angka melek huruf didefinisikan sebagai persentase penduduk 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Payakumbuh semakin meningkat setiap tahunnya, dan mendekati 100%.

2.1.2.7 Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk merupakan salah satu indikator dalam pembangunan bidang kesehatan, dimana semakin rendah capaian angka persentase balita gizi buruk maka semakin baik kinerja bidang kesehatan di Kota Payakumbuh. Gizi buruk merupakan kondisi kurang gizi yang disebabkan rendahnya konsumsi energi dan protein (KEP) dalam makanan sehari-hari. Persentase Balita Gizi Buruk dari tahun 2013-2017 cenderung mengalami penurunan, yang mengindikasikan program/kegiatan yang dilaksanakan sudah cukup efektif untuk meningkatkan kesadaran para ibu dari anak balita untuk

memperhatikan keadaan gizi anak mereka, sekaligus mencerminkan semakin membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat kota Payakumbuh. Apabila dibandingkan dengan target pada RPJMD tahun 2017 sebesar <3% maka target ini sudah tercapai.

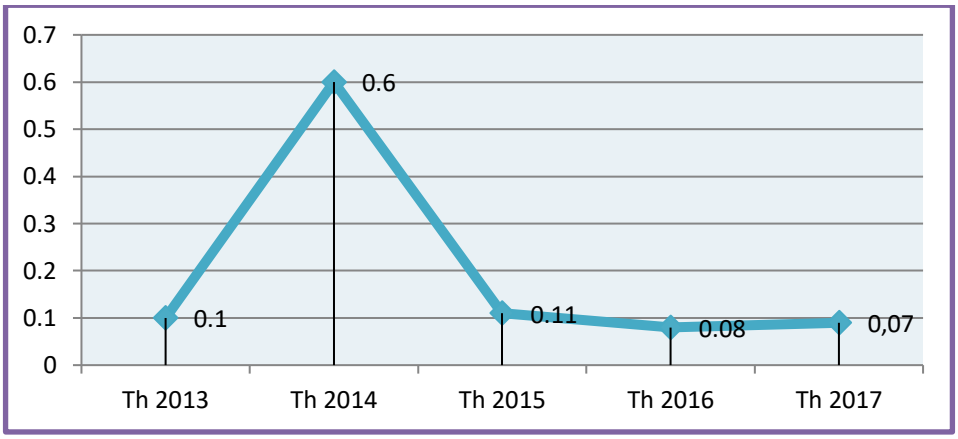

Gambar II-12

Balita Gizi Buruk Tahun 2013- 2017 Kota Payakumbuh

Sumber:Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2018

2.1.2.8 Tingkat Partisipasi Angka Kerja

Angka TPAK digunakan sebagai dasar untuk mengetahui penduduk yang bekerja atau mencari pekerjaan. Untuk tahun 2016 terdapat 900 orang Pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota.Angka TPAK dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi dan demografis; diantaranya jenis kelamin, umur, dan tingkat pendidikan.

Tabel II-20

Perkembangan Data Ketenagakerjaan Tahun 2013- 2017 Kota Payakumbuh

Kegiatan	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Angkatan Kerja	57.770	61.323	**63.017**	**64.714**	**66.039**
Bekerja	**53.654**	**57.421**	**58.562**	**60.184**	**61.370**
Penganggur	**4.116**	**3.902**	**4.455**	**4.530**	**4.669**
Bukan Angkatan Kerja	28.774	27.074	27 205	27 205	27.479
Sekolah	**6.504**	**9.727**	**7.776**	**7.776**	**7.867**
Mengurus Rumah Tangga	**16.856**	**13.412**	**15.019**	**15.019**	**15.110**
Lainnya	**22.279**	**3.935**	**4.410**	**4.410**	**4.504**
Penduduk Usia Kerja	86.544	88.397	90.222	90.222	93.518
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja **(%)**	**66.75**	**69,37**	**69,85**	**69,85**	**70,62**
Tingkat Penganggur Terbuka **(%)**	**7.16**	**6,36**	**7,07**	**7,07**	**3,45**
Tingkat Kesempatan Kerja **(%)**	**92.87**	**93,64**	**92,93**	**92,93**	**92,93**

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2014 – 2017, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, 2018

2.1.2.9 Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio Penduduk yang Bekerja atau Tingkat Kesempatan Kerja dapat dihitung dari jumlah penduduk yang bekerja dibanding dengan angkatan kerja dalam satu wilayah. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka jumlah angkatan kerja juga ikut meningkat. Tingkat Kesempatan Kerja berfluktuasi tergantung dengan naik turunnya jumlah penduduk yang bekerja dan jumlah angkatan kerja.

Tabel II-21
Rasio Penduduk Bekerja Tahun 2013- 2017 Kota Payakumbuh

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Angkatan Kerja (orang)	57.720	61.323	63.017	64.714	66.039
2.	Penduduk Yang Bekerja (orang)	53.654	57.421	58.562	60.184	61.370
3.	Rasio (%)	92,87	93,64	92,93	92,93	92,93

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2014 – 2017 (diolah), Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, 2018

2.1.2.10 Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Payakumbuh dalam beberapa tahun terakhir sudah memperlihatkan indikasi keberhasilan. Pada tahun 2013 jumlah penduduk penduduk miskin sebesar 9.700 jiwa, tingkat kemiskinan sebesar 7,81%.Sampai tahun 2017 terjadi penurunan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin menjadi 7.720 jiwa dan tingkat kemiskinan sebesar 5,88% atau terjadi penurunan sebesar 1,93% (1.980 jiwa).

Tabel II-22
Perkembangan Data Kemiskinan Tahun 2013- 2017 Kota Payakumbuh

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah penduduk	Jiwa	123.564	125.690	127.826	129.807	131.819
2	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	9.700	8.840	8.510	8.350	7.720
3	Jumlah KK Miskin	KK	1.940	2.344	2.300	2.257	2.086
4	Tingkat Kemiskinan	%	7,81	7,01	6,67	6,46	5,88

Sumber:Payakumbuh Dalam Angka 2017, BPS Kota Payakumbuh 2018.

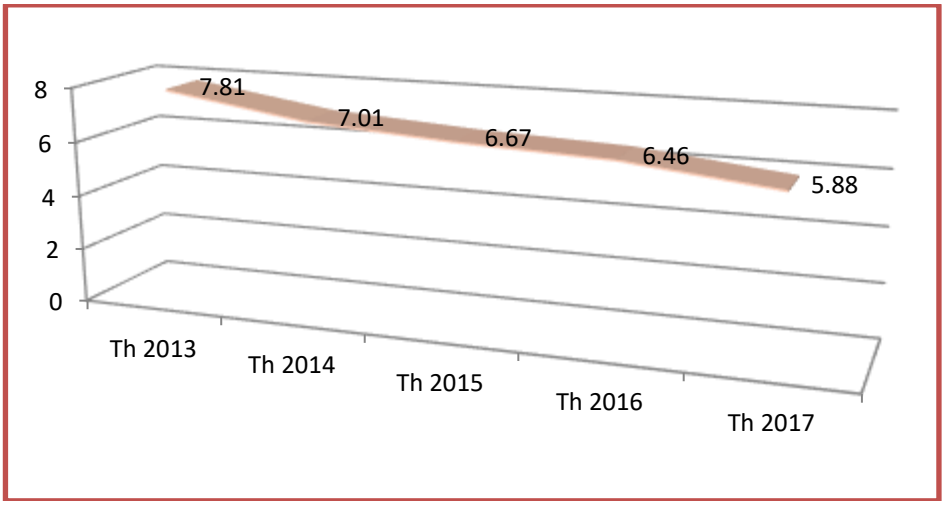

Gambar II-13

Perkembangan Data Kemiskinan Tahun 2013 - 2017 Kota Payakumbuh

Sumber:Payakumbuh Dalam Angka 2017, BPS Kota Payakumbuh 2018

Pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor yang terjadi pada tahun 2013 - 2017 mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Idealnya pertumbuhan lapangan kerja baru dapat lebih tinggi dari pertumbuhan angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran akan terkurangi setiap tahunnya. Angka pengangguran merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan kemandirian di Kota Payakumbuh. Pengangguran yang terjadi disebabkan oleh angkatan kerja yang pada umumnya tenaga kerja non formal, kurang terdidik dan minat generasi muda bekerja dibidang pertanian masih rendah, Oleh karena itu dibutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Kota.

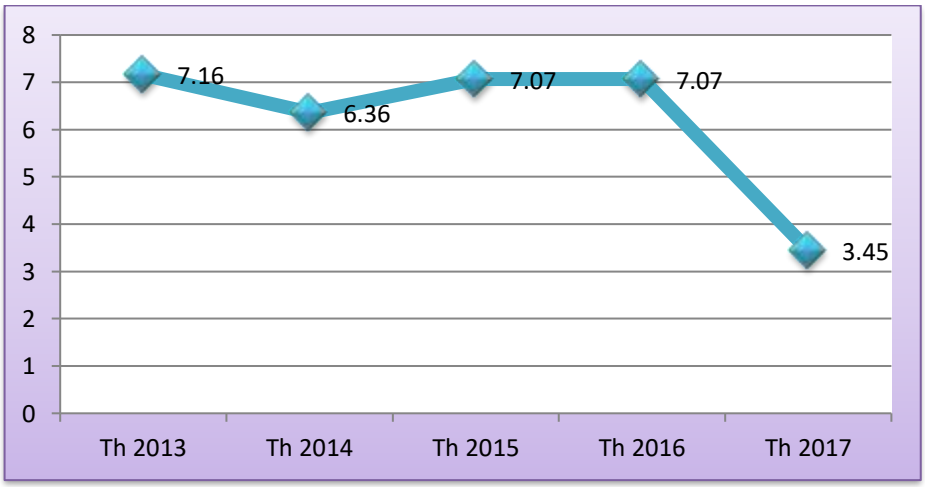

Gambar II-14

Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk yang Berumur 15 Tahun ke Atas Tahun 2013- 2017 Kota Payakumbuh

Sumber:BPS Kota Payakumbuh, 2018

Untuk tahun 2017 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Payakumbuh sebesar turun cukup signifikan menjadi hanya sebesar 3,45% dari 7,07% pada tahun 2016. Ini berarti bahwa dalam 100 orang pencari kerja yang tergolong angkatan kerja terdapat sekitar 3-

4orang yang sedang mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha atau tidak mencari kerja karena putus asa.

Walaupun terjadi penurunan pengangguran, namun Pemerintah Kota Payakumbuh mulai tahun 2018 ini, telah memformulasi kebijakan dan berkomitmen penuh bahwa pembangunan sumber daya manusia merupakan kunci utama bagi pengentasan persoalan pengangguran yang perlu terus ditangani melalui perbaikan kualitas pendidikan. Selain itu peningkatan kapasitas, kualitas, produktifitas dan daya saing angkatan kerja perlu terus dipacu agar menghasilkan tenaga kerja yang handal, terlatih dan siap bersaing serta mampu menciptakan lapangan kerja baru ditengah- tengah masyarakat.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang mencakup layanan urusan wajib dan urusan pilihan.

2.1.3.1 Layanan Urusan Wajib Dasar

A. Urusan Pendidikan

Pembangunan kesejahteraan sosial terkait dengan peningkatan pembangunan sumber daya manusia. Menurut ahli sumber daya manusia Priyono (2009) dan Elfindri (2014), pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Secara umum dapat dikatakan kualitas sumber daya manusia sejalan dengan kualitas dan tingkat pendidikannya. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Kota Payakumbuh, maka pendidikan selalu dijadikan prioritas pembangunan daerah.

1. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Tabel II-23
Perkembangan Data PAUD Formal (TK dan RA) Jumlah Lembaga, Murid, Guru Tahun 2013-2017 Kota Payakumbuh

No	PAUD Formal	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah TK/RA (Lembaga)	50	50	53	53	54
2.	Jumlah Guru (Orang)	304	300	334	317	321
3.	Jumlah Murid (Orang)	3.099	3.094	3.090	2.988	3.167
4.	Jumlah Rombongan Belajar	186	174	198	196	202

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka, 2017; Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2018

2. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase penduduk yang masih sekolah menurut kelompok umur pada setiap jenjang pendidikan terhadap penduduk

berdasarkan kelompok usia sekolah. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan tidak hanya pada daerah itu saja tetapi juga ada partisipasi daerah lain, dimana ada penduduknya yang sekolah pada daerah tersebut. Berdasarkan tabel di bawah, dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Kasar Kota Payakumbuh melebihi 100%. Hal ini disebabkan karena banyaknya penduduk usia sekolah berasal dari Kabupaten/Kota lainnya. Penyebab lainnya adalah karena banyak terdapat anak yang sekolah di tingkat pendidikan dasar (SD/SMP/SMA) yang umurnya diluar tingkatan usia sekolah tersebut. Kedua kondisi itulah yang menyebabkan APK di Kota Payakumbuh diatas 100%.

Tabel II-24
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Payakumbuh
Tahun 2013- 2017

No	Tingkat Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017*)
1	SD/MI	106	108	108,5	113,77	116,36
2	SMP/MTs	133	139	141	138,23	139,97
3	SMA/SMK/MA	157	157	159,6	163,87	166,16

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2018
*) Angka perkiraan

3. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Angka Pendidikan yang ditamatkan merupakan persentase perbandingan jumlah penduduk yang menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah baik negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ ijazah. APT bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, dan untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah. Untuk Kota Payakumbuh selama periode tahun 2013-2017, nilai APT mengalami peningkatan dari tahun ketahun.

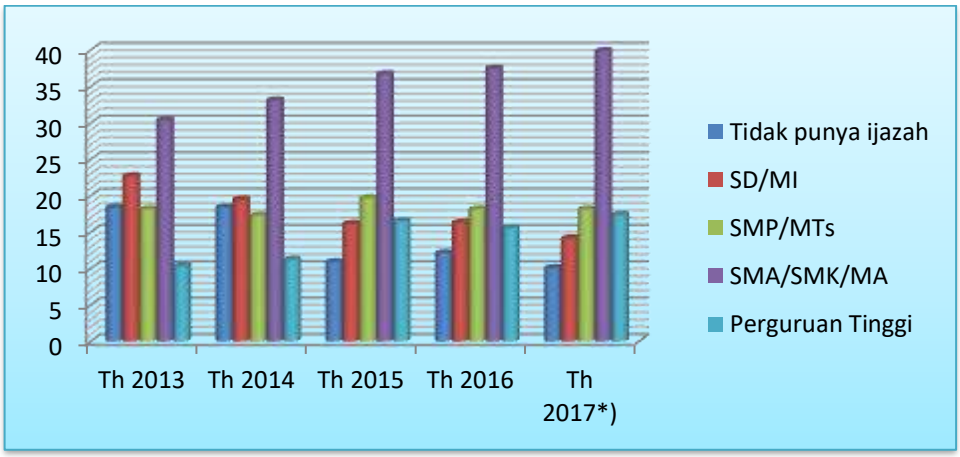

Gambar II-15
Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Kota Payakumbuh
Tahun 2013- 2017(dalam %)

4. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan penduduk yang masih sekolah menurut kelompok umur terhadap kelompok usia sekolah yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. APM Kota Payakumbuh cenderung naik dari tahun 2013-2017. APM Kota Payakumbuh mengalami peningkatan dari tahun ke tahun baik tingkat SD, SMP maupun SMA dan sederajat.

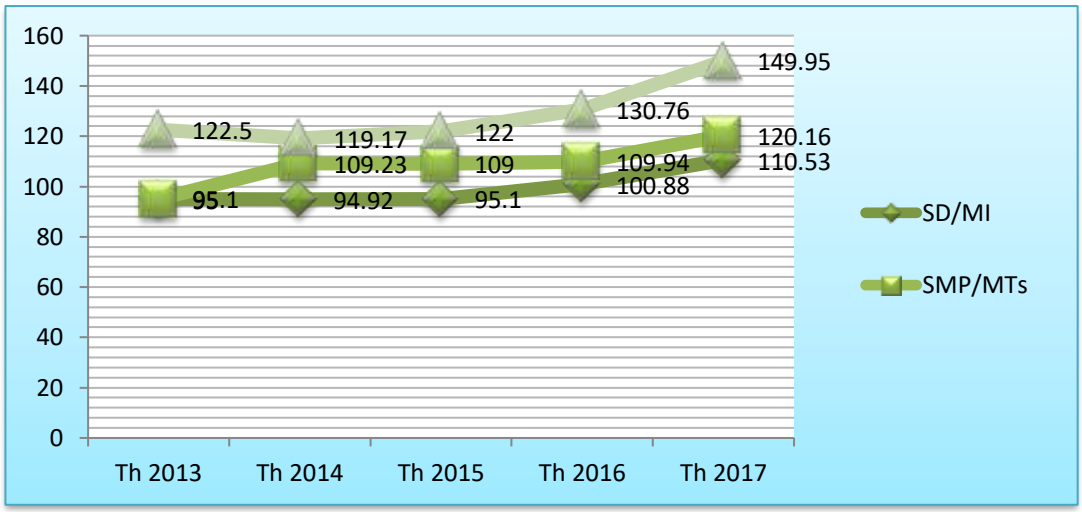

Gambar II-16
Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Payakumbuh Tahun 2013- 2017

5. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan layanan pendidikan yang berkualitas. APS adalah jumlah penduduk yang masih sekolah pada masing-masing kelompok usia sekolah dibagi dengan jumlah penduduk di masing-masing kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Untuk tahun 2017 tingkat APS 7-12 tahun mencapai 122,82, sedangkan APS 13-15 tahun sudah mencapai 153,21.

6. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah menunjukkan jumlah dan persentase siswa untuk setiap tingkatan pendidikan (SD/MI dan SMP/MTs dan SMA/MA/SMK) yang tidak menyelesaikan pendidikannya. Indikator angka putus sekolah menggambarkan seberapa besar angka putus sekolah pada setiap jenjang pendidikan.

Tabel II-25
Angka Putus Sekolah Pada Pendidikan Dasar dan Menengah
Tahun 2013-2017

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	**SD/MI**					
1.1.	Jumlah Murid SD/MI (Orang)	17.349	17.592	18.005	17.926	17.908
1.2.	Jumlah Murid Putus Sekolah (Orang)	14	2	5	2	19
1.3.	Persentase Angka Putus Sekolah	0,08	0,01	0,03	0,01	0,11
2	**SMP/MTs**					
2.1.	Jumlah Murid SMP/MTs (Orang)	9.317	9.740	9.964	10.233	10,853
2.2.	Jumlah Murid Putus Sekolah (Orang)	56	65	67	20	65
2.3.	Persentase Angka Putus Sekolah	0,60	0,67	0,67	0,19	0,60

Sumber:Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2016

7. Angka Kelulusan

Angka kelulusan merupakan salah satu indikator pembangunan bidang pendidikan. Semakin tinggi angka kelulusan siswa pada masing-masing jenjang pendidikan, maka semakin baik kinerja capaian bidang pendidikan. Namun demikian, angka kelulusan 100% belumlah merupakan jaminan bahwa kualitas pendidikan semakin baik. Sebab bisa saja tingkat kelulusan 100% tersebut nilainya hanya sekedar lulus dengan standar yang minimum dan belum standar yang memuaskan.

Tabel II-26
Angka Lulusan Siswa Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
Tahun 2013 - 2017

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	**SD/MI**					
1.1.	Peserta UN (Orang)	2.561	2.594	2.702	2.795	2.741
1.2.	Jumlah Lulusan (Orang)	2.561	2.553	2.553	2.795	2.740
1.3.	Persentase Lulusan	100	100	100	100	99,96
2	**SMP/MTs**					
2.1.	Peserta UN (Orang)	2.469	2.505	2.973	3.128	2.993
2.2.	Jumlah Lulusan (Orang)	2.449	2.505	2.973	3.128	2.989
2.3.	Persentase Lulusan	99,11	99,95	99,95	100	99,87
3	**SMA/MA/SMK**					
3.1.	Peserta UN (Orang)	3.337	3.118	3.118	3.514	3.502
3.2.	Jumlah Lulusan (Orang)	3.345	3.672	3.540	3.513	3.499
3.3.	Persentase Lulusan	99,81	99,74	99,74	99,97	99,91

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh 2015 – 2016

8. Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah digunakan untuk menunjukkan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan.Disamping ketersediaan sekolah, sarana dan prasarana sekolah juga ikut mempengaruhi proses belajar mengajar di sekolah.

Tabel II-27
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2013- 2017

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	**SD/MI**					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	76	78	79	80	80
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	16.307	16.594	15.756	14.477	14.477
1.3.	Rasio (%)	0,005	0,005	0,005	0.006	0,006
2	**SMP/MTs**					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	21	23	23	24	23
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	6.960	7.083	7.403	6.933	6.933
2.3.	Rasio	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
3	**SMA/MA/SMK**					
3.1.	Jumlah gedung sekolah	22	23	23	24	24
3.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	7.134	7.259	7.475	6.991	6.991
3.3.	Rasio	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2018

Tabel II-28
Kondisi Ketersediaan Kelas dan Rombel Tahun 2017

No	Uraian	TK	RA	SD	MI	SMP	MTs
1	Ruang Kelas	178	41	668	19	270	60
	a. Kondisi Baik	155	31	605	19	248	60
	b. Kondisi Rusak Ringan	1	-	36	-	10	50
	c. Kondisi Rusak berat	2	6	15	-	1	10
	d. Bukan milik/ sewa	20	4	12	-	11	-
2	Jumlah rombel	166	30	655	20	276	70

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2018

9. Rasio Guru terhadap Murid

Rasio guru murid adalah perbandingan jumlah guru dibagi jumlah murid. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar, jumlah peserta didik yang besar akan mempengaruhi kualitas pengajaran. Oleh karena itu, dengan berkurangnya rasio guru terhadap murid diharapkan dapat menghasilkan anak didik yang berkualitas. Rasio guru murid setingkar SD/MI tahun 2017 menunjukkan angka 1:17, yang diartikan 1 orang guru mendidik lebih kurang 17 orang murid.

Tabel II-29
Rasio Guru dan Murid Kota Payakumbuh Tahun 2013- 2017

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	**SD/MI**					
1.1.	Jumlah Guru	1.043	1.037	1.050	1.062	1.116
1.2.	Jumlah Murid	17.349	17.592	18.005	17.926	17.908
1.3.	Rasio	1 : 17	1 : 17	1 : 17	1 : 17	1:16
2	**SMP/MTs**					
2.1.	Jumlah Guru	715	726	753	799	782
2.2.	Jumlah Murid	8.085	8.032	8.467	10.233	10.853
2.3.	Rasio	1:11	1:11	1:11	1:13	1:14

Sumber:Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2018

Selanjutnya terkait dengan status kepegawaian dari para pengajar dari tingkat TK sampai dengan SLTP sederajat dapat dilihat pafa grafik berikut ini,

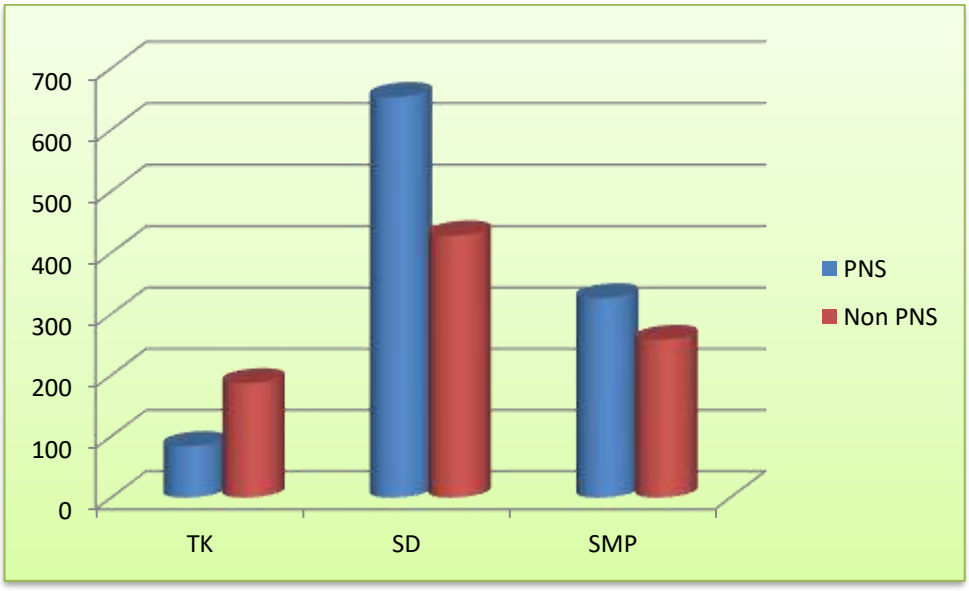

Gambar II-17
Rekapitulasi Guru PNS dan Non-PNS TK/SD/SMP Negeri Kota Payakumbuh Tahun 2017

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2018

10. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Kualitas pendidikan akan sangat ditentukan oleh kualitas tenaga pengajarnya. Semakin tinggi pendidikan dan kualitas guru diharapkan dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas.

Tabel II-30
Jumlah Guru Yang Berkualifikasi S1/D4 Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2013- 2017

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	**TK/RA**					
1.1.	Jumlah Guru (Orang)	304	136	334	317	321
1.2.	Guru Berkualifikasi S1/D4 (Orang)	107	80	221	221	246
1.3.	Rasio (%)	35,2	58,82	66,16	69,72	76,6
2	**SD/MI**					
2.1.	Jumlah Guru (Orang)	1.043	1.037	1.050	1.062	1.116
2.2.	Guru Berkualifikasi (Orang)	747	810	908	957	1.026
2.3.	Rasio (%)	71,62	78,11	86,47	90,11	91,94
3	**SLB**					
3.1.	Jumlah Guru (Orang)	87	89	115	118	120
3.2.	Guru Berkualifikasi (Orang)	68	70	99	104	110
3.3.	Rasio (%)	78,16	78,65	86,08	88,14	91,7
4	**SMP/MTs**					
4.1.	Jumlah Guru (Orang)	754	757	770	799	782
4.2.	Guru Berkualifikasi (Orang)	657	638	701	712	733
4.3.	Rasio (%)	87,14	84,28	91,04	89,11	93,73
5	**SMA/MA/SMK**					
5.1.	Jumlah Guru (Orang)	1.165	1.174	1.209	1.212	1.243
5.2.	Guru Berkualifikasi (Orang)	1.086	1.033	1.156	1.155	1.209
5.3.	Rasio (%)	93,22	87,99	95,6	95,23	97,26

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2018

Dalam rangka meningkatkan kualifikasi guru diarahkan untuk mendapatkan sertifikasi yang bertujuan untuk meningkatan mutu pendidikan yang lebih baik.

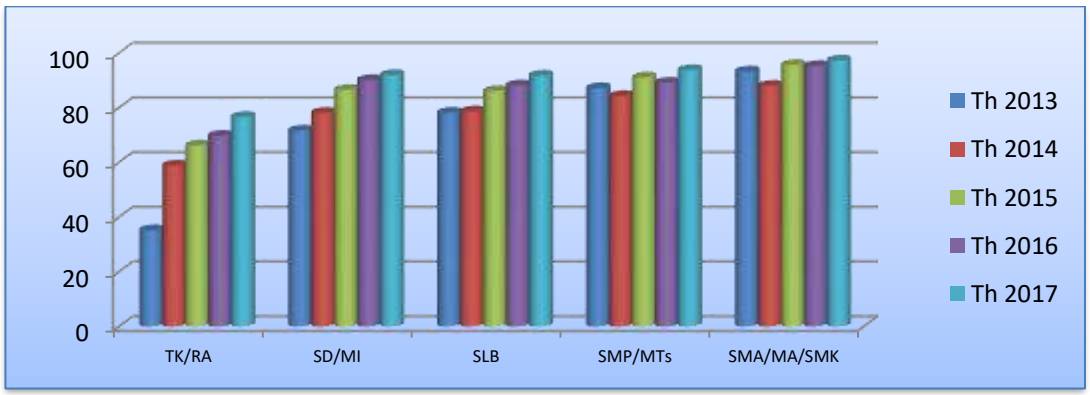

Gambar II-18
Rasio Guru Yang Berkualifikasi S1/D4 Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2013 – 2017
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2018

Tabel II-31
Jumlah Guru Bersertifikasi Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2013- 2017

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	**TK/RA**					
1.1.	Jumlah Guru (Orang)	304	304	334	317	321
1.2.	Guru Bersertifikasi (Orang)	28	79	132	126	129
1.3.	Rasio (%)	9,21	25,98	39,5	39,75	40,19
2	**SD/MI**					
2.1.	Jumlah Guru (Orang)	1.043	1.043	1.050	1.062	1.116
2.2.	Guru Bersertifikasi (Orang)	43	504	537	540	458
2.3.	Rasio (%)	4,12	48,32	51,10	50,85	41,04
3	**SMP/MTs**					
3.1.	Jumlah Guru (Orang)	754	754	770	799	782
3.2.	Guru Bersertifikasi (Orang)	13	361	414	302	271
3.3.	Rasio (%)	1,72	61,12	53,74	37,80	34,65
4	**Pengawas Sekolah**					
4.1.	Jumlah Pengawas (Orang)	27	27	34	30	19
4.2.	Pengawas Bersertifikasi (Orang)	13	27	34	30	19
4.3.	Rasio (%)	48	100	100	100	100

Sumber: DinasPendidikan Kota Payakumbuh, 2018

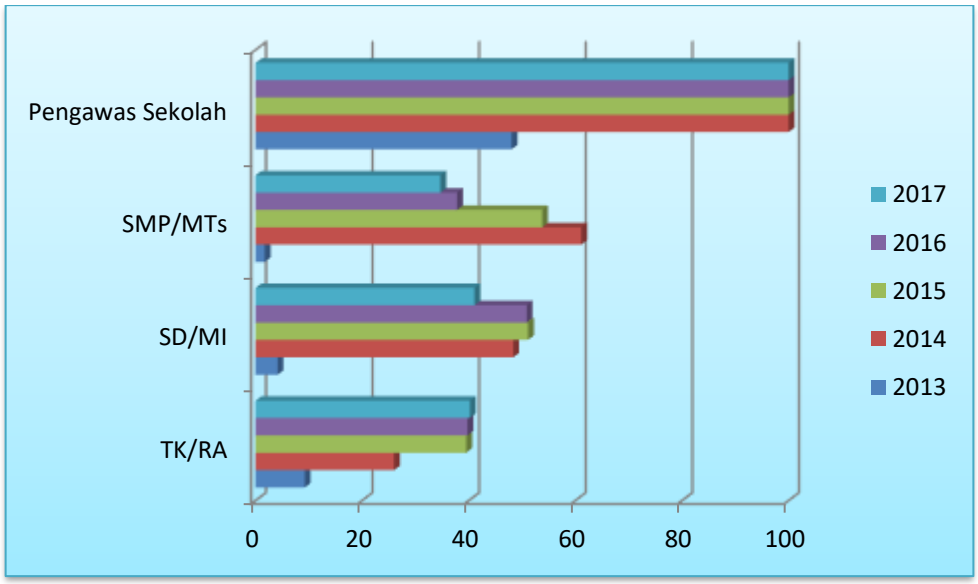

Gambar II-19
Rasio Guru Yang Bersertifikasi Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2013 – 2017
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2018

11. Sarana dan Prasarana Sekolah

Tabel II-32

Data Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Negeri/Swasta Kota Payakumbuh Tahun 2017

No	Sekolah Dasar/ Kecamatan	Jumlah siswa	Jumlah rombel	Jmlh lokal		Ruang Belajar		Ruang Kepsek			Ruang Guru			Sanitasi WC/KM			Mobiler yang dibutuhkan				Pagar(m)	Paving block (m)	Rumah dinas
						Rusak Brt	Rusak Sdg	Ada/ Tidak	Rusak Brt	Rusak Sdg	Ada/ Tidak	Rusak Brt	Rusak Sdg	Ada	Tidak	kebutuhan	Meja mrd	Kursi mrd	Lemari kls	Papan tulis			
1	SD Kec. Lamposi Tigo Nagori	892	38	39	0	7	3	0	0	1	0	0	1	39	3	42	246	438	18	25	188	350	19
2	SD Kec. Payakumbuh Barat	4.518	138	137	-6	14	23	16	0	4	24	2	5	120	21	143	896	1763	81	62	2646	3933	47
3	SD Kec. Payakumbuh Utara	6.446	268	221	-11	48	69	25	3	4	30	2	7	166	38	222	1637	3387	123	123	1182	2519	36
4	SD Kec. Payakumbuh Selatan	1.338	48	48	0	4	10	0	0	0	0	0	0	36	3	45	295	556	28	26	376	1073	20
5	SD Kec. Payakumbuh Timur	3.323	124	136	0	16	6	14	1	1	17	0	1	116	6	130	845	1571	104	74	1476	3390	73
	Jumlah	**16.517**	**616**	**581**	**-17**	**89**	**111**	**55**	**4**	**10**	**71**	**4**	**14**	**477**	**71**	**582**	**3919**	**7715**	**354**	**310**	**5868**	**11265**	**195**

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2018

Tabel II-33

Data Sarana dan Prasarana SMP Negeri/Swasta Kota Payakumbuh Tahun 2017

No	Sekolah Dasar/ Kecamatan	Jumlah siswa	Jumlah rombel	Jmlh lokal		Ruang Belajar		Ruang Kepsek			Ruang Guru			Sanitasi WC/KM			Mobiler yang dibutuhkan				Pagar (m)	Paving block (m)	Rumah dinas
						Rusak Brt	Rusak Sdg	Ada/ Tidak	Rusak Brt	Rusak Sdg	Ada/ Tidak	Rusak Brt	Rusak Sdg	Ada	Tidak	kebutuhan	Meja mrd	Kursi mrd	Lemari kls	Papan tulis			
1	SMP Negeri	5.517	194	186	0	23	54	10	1	4	9	2	3	110	116	216	44	0	10	0	1	1	5
2	SMP Swasta	1.705	64	54	0	3	8	5	0	1	5	0	2	26	11	37	3	0	4	0	0	0	3
	Jumlah	**7.222**	**258**	**240**	**0**	**26**	**62**	**15**	**1**	**5**	**14**	**2**	**5**	**136**	**127**	**253**	**47**	**0**	**14**	**0**	**1**	**1**	**8**

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2018

12. Akreditasi Sekolah

Untuk meningkatkan *kualitas layanan pendidikan* upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan akreditasi sekolah, karena jika rata-rata sekolah telah berakreditasi baik maka diharapkan secara sarana prasarana, kurikulum dan sistim pembelajaran telah berkualitas.Untuk tahun 2017, Sekolah Dasar sudah mencapai 76,32% yang terakreditasi A dan SMP baru 66,7% SMP yang terakreditasi A.

Tabel II-34
Data Akreditasi Sekolah Dasar dan Menengah Kota Payakumbuh
Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	**Sekolah Dasar**	**75**	**76**	**76**	**76**	**76**
	Akreditasi A	26	32	36	54	54
	Akreditasi B	12	14	15	15	15
	Akreditasi C	1	1	1	1	1
	Belum Terakreditasi	36	29	24	6	6
	Persen SD terakreditasi A	34,67%	42,10%	47,37%	71,05%	71,05%
2	**SMP**	**15**	**15**	**15**	**18**	**18**
	Akreditasi A	1	3	6	10	11
	Akreditasi B	-	-	1	1	1
	Akreditasi C	-	-	1	1	1
	Belum Terakreditasi	14	12	7	6	5
	Persen SMP terakreditasi A	6,67%	20%	40%	55,5%	61,11%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2018

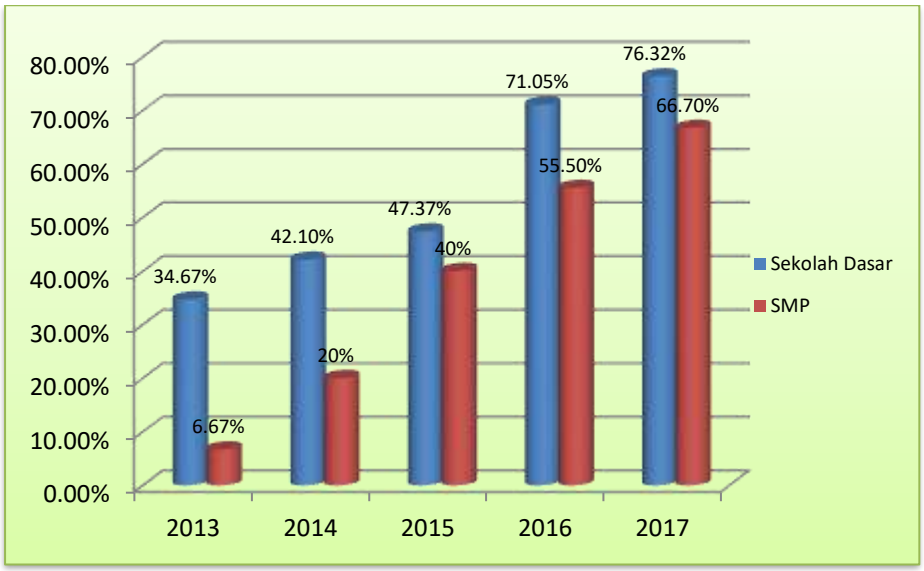

Gambar II-20
Rasio Sekolah Terakreditasi-Adi Kota Payakumbuh Tahun 2013 – 2017
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2018

B. Urusan Kesehatan

Pembangunan Kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan Kota Payakumbuh tahun 2019. Capaian pembangunan kesehatan dapat dilihat dari indikator - indikator yang dapat di lihat dari uraian berikut ini :

1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, tingkat kematian bayi di Kota Payakumbuh cenderung menurun, namun kematian balita terjadi peningkatan pada tahun 2016. Sedangkan kasus kematian ibu melahirkan pada tahun 2016 sudah nol, dan tahun 2017 kembali naik menjadi 3 kasus.

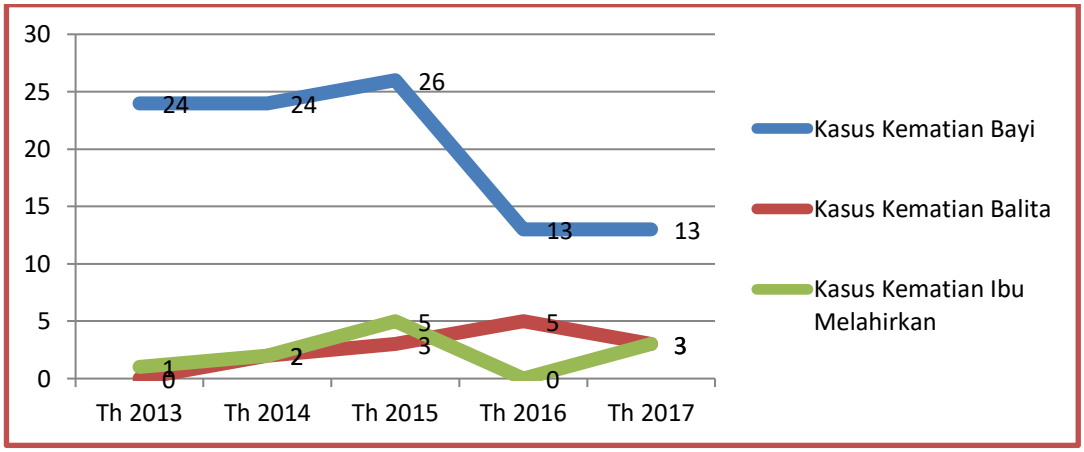

Gambar II-21
Perkembangan Kasus Kematian Bayi, Balita dan Ibu Melahirkan
Tahun 2013 – 2017
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2018

2. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Pada tahun 2017 posyandu di Kota Payakumbuh berjumlah 165 buah dengan rincian Posyandu Madya sebanyak 1 buah, posyandu Purnama sebanyak 82 buah dan posyandu Mandiri sebanyak 82 buah. Sedangkan untuk jumlah balita di Kota Payakumbuh tahun 2016 sebanyak 13.914 jiwa. Sehingga dapat dihitung rasio posyandu per satuan balita adalah 1:84, yang dipahami bahwa setiap Posyandu melayani rata-rata 84 orang anak balita.

Tabel II-35
Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2013- 2017 Kota Payakumbuh

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah posyandu	165	165	165	165	165
2.	Jumlah balita	13.816	13.915	13.936	13.914	13.898
	Rasio	1:74,5	1:78	1:84	1:84	1:84

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2018

Tabel II-36
Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan
Tahun 2017 Kota Payakumbuh

No	Kecamatan	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio
1	Kecamatan Payakumbuh Timur	38	2.894	1:76
2	Kecamatan Payakumbuh Barat	55	5.441	1:99
3	Kecamatan Payakumbuh Selatan	18	1.128	1:63
4	Kecamatan Payakumbuh Utara	21	3.425	1:82
5	Lamposi Tigo Nagori	33	1.026	1:86
	Jumlah	**165**	**13.914**	**1:84**

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2018

3. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per-satuan Penduduk

Untuk tahun 2017, Puskesmas di Kota Payakumbuh berjumlah 8 unit, dan apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk maka memiliki rasio 1:16.226. Kondisi ini diartikan bahwa satu Puskesmas melayani 16.226 jiwa. Dibandingkan dengan Standar Pelayanan Nasional maka angka ini jauh lebih tinggi, karena secara nasional satu Puskesmas diharapkan mampu melayani 30.000 penduduk, sehingga lima tahun kedepan jumlah puskesmas yang ada diperkirakan di Kota Payakumbuh masih ideal untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat Payakumbuh. Untuk membantu Puskesmas memberikan pelayanan kepada masyarakat, terdapat puskesmas pembantu di Kota Payakumbuh sebanyak 23 unit, yang jika dibandingkan dengan jumlah kelurahan sebanyak 48 kelurahan maka rata-rata satu Puskesmas pembantu melayani dua kelurahan sehingga cakupan layanan puskesmas pembantu sudah melayani hampir seluruh kelurahan di Kota Payakumbuh.

4. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit adalah institusi perawatan kesehatan profesional yang melayani melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen. Jumlah rumah sakit sangat mempengaruhi layanan kesehatan yang diterima oleh penduduk di suatu daerah, karena semakin banyak keberadaan rumah sakit pada suatu daerah maka akan semakin banyak masyarakat yang dapat terlayani, hal ini tentu diharapkan akan berbanding lurus juga dengan kualitas kesehatan masyarakat di daerah tersebut. Berikut disajikan jumlah rumah sakit yang ada di Kota Payakumbuh beserta rasionya jika dibandingkan dengan jumlah penduduk.

Gambar II-22
RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh (tampak depan)

Selanjutnya, terkait RSUD Dr Adnaan WD Payakumbuh yang masih berstatus type C yang telah terakreditasi **Paripurna** oleh Badan Akreditasi Kementerian Kesehatan RI sejak tahun 2017 lalu. RSUD ini merupakan RSUD rujukan dari beberapa RSUD Type D di wilayah Kabupaten tetangga, seperti RSUD Suliki dan Tanah Datar. Oleh sebab itu dalam upaya peningkatan pelayanan di RSUD Dr Adnaan WD, untuk percepatan pembanguna fasilitas tersebut dilakukan pembiayan pembangunan fasilitas layanan prima RSUD Dr Adnaan WD Payakumbuh melalui Dana Pembiayaan dengan sharing pembayaran melalui anggaran pembiayaan APBD Kota Payakumbuh dengan sumber atas pendapatan RSUD Adnaan WD Payakumbuh yang telah berstatus BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).

Tabel II-37
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk
Tahun 2013- 2017 Kota Payakumbuh

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Rumah Sakit Swasta	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan khusus lainnya	1	1	2	2	2
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI	0	0	0	0	0
4.	Jumlah Rumah Sakit Daerah	1	1	1	1	1
5.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	3	3	4	4	4
6.	Jumlah Penduduk	124.964	125.690	127.826	129.807	131.819
	Rasio	1 : 62.482	1:41.897	1:31.957	1:32.451	1:32.954

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2018

5. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Jumlah dokter umum

dan dokter spesialis di Indonesia belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia, termasuk di Kota Payakumbuh, permasalahan tersebut diperburuk dengan tidak meratanya kualitas dokter.

Tabel II-38
Jumlah Dokter Menurut Kecamatan di Luar Rumah Sakit
Tahun 2017 Kota Payakumbuh

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Dokter		Rasio	
			Dr	Drg	dr	Drg
1	Payumbuh Timur	27.472	4	3	1:6868	1:9.157
2	Payakumbuh Barat	51.546	5	4	1:10309	1:12.887
3	Payakumbuh Selatan	10.692	2	1	1:5346	1:10.692
4	Payakumbuh Utara	32.393	2	1	1:16.197	1:32.393
5	Lamposi Tigo Nagori	9.716	3	1	1:3239	1:9.716
	Jumlah	**131.819**	**18**	**10**	**1:7323**	**1:13.182**

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2018

6. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan besarnya ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Untuk tenaga para medis (bidan,perawat,perawat gigi) pada tahun 2017 berjumlah sebanyak 105 orang, maka rasio tenaga medis per satuan penduduk pada tahun 2017 adalah 1:1.236.

Tabel II-39
Jumlah Tenaga Para Medis (Bidan, Perawat, Perawat Gigi) di Luar Rumah Sakit
Tahun 2013- 2017 Kota Payakumbuh

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Tenaga Para Medis	95	106	107	102	157
2.	Jumlah Penduduk	124.964	125,690	127.826	129.807	131.819
	Rasio	1:1.315	1:1.186	1:1.195	1:1.236	1:840

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2018

7. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Komplikasi dan Kematian ibu maternal dan bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada masa persalinan. Hal ini disebabkan pertolongan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompentensi kebidanan. Berdasarkan profil kesehatan tahun 2017 menunjukkan bahwa dari 2.759 persalinan, yang ditolong oleh tenaga kesehatan adalah sebanyak 2.732 (91,8%). Hal ini menunjukkan bahwa ibu hamil telah memanfaatkan keberadaan tenaga kesehatan di Kota Payakumbuh.

8. Cakupan Kelurahan *Universal Child Immunization*

Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) pada tahun 2017 telah mencapai 100%; yakni 47 kelurahan dari 47 kelurahan yang ada.

9. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Dari pelaksanaan Posyandu maka diharapkan akan terjadi peningkatan kesehatan dan tumbuh kembang bayi dan balita, dan diharapakan akan terjaring bayi dan balita dengan keadaan gizi kurang atau buruk. Jika dilihat pada tahun 2017 ditemukan 11 orang bayi dan balita dengan gizi buruk, dan semuanya telah mendapat penanganan sesuai dengan standar tata laksana gizi buruk adalah 100%.

10. Cakupan Kunjungan Bayi

Pada Tabel II-42 telah disampaikan jumlah dan rasio perbandingan pelayanan posyandu di Kota Payakumbuh, dari 165 buah Posyandu yang ada jika dibandingkan dengan jumlah balita yang ada sebanyak 13.914 orang pada tahun 2017 maka didapat perbandinngan 1:84 orang yang berarti satu Posyandu akan melayani sampai 84 orang balita. Sedangkancakupan kunjungan bayi pada tahun 2017 adalah 90,22%.

11. Cakupan Puskesmas

Jumlah puskesmas di Kota Payakumbuh tahun 2017 adalah sebanyak 8 (delapan) unit dan jumlah kecamatan di Kota Payakumbuh adalah sebanyak 5 kecamatan, sehingga cakupan puskesmas sudah tercapai sebesar 96,68%. Capaian ini sudah jauh melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 57%

12. Cakupan Puskesmas Pembantu

Jumlah puskesmas pembantu di Kota Payakumbuh adalah sebanyak 23 unit dengan jumlah seluruh kelurahan adalah sebanyak 48 kelurahan, sehingga cakupan puskesmas pembantu pada tahun 2017 adalah sebesar 0,51 (51%), sehingga target sebesar 65% pada tahun 2017 belum tercapai.

13. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

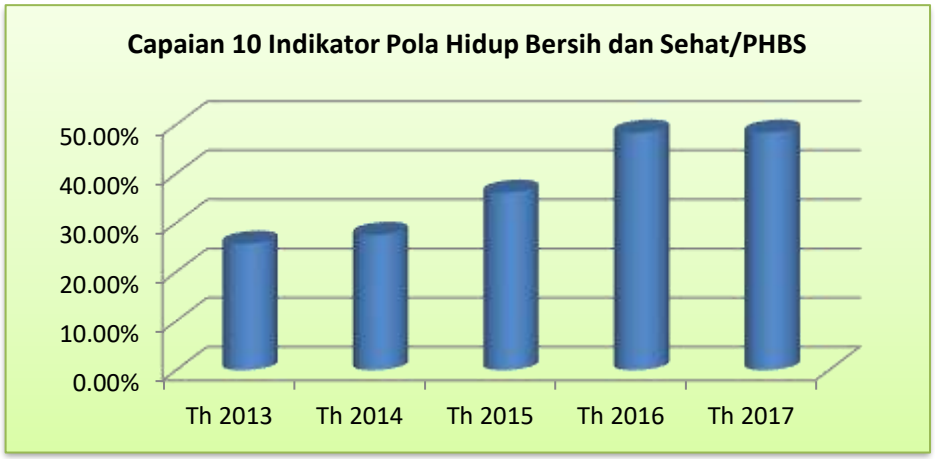

Gambar. II-23
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Sumber: **Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2018**

Berdasarkan gambar II-23 dapat dipahami walaupun terjadi peningkatan setiap tahunnya pada capaian PHBS, tetapi nilai tersebut masih diasumsikan rendah. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam Rumah Tangga ber-PHBS, karena dari 10 indikator PHBS Rumah Tangga apabila salah satu indikator tidak

terpenuhi maka belum bisa dikatakan rumah tangga ber-PHBS. Indikator tersebut adalah merokok di dalam rumah, makan buah dan sayur, dan aktivitas fisik.

14. Prevalensi Penyakit

Tabel II-40
10 Penyakit Terbanyak di Kota Payakumbuh Tahun 2013 - 2017

Jenis Diagnosis Penyakit	Jumlah Kunjungan				
	2013	2014	2015	2016	2017*)
ISPA	26.888 (1)	21.684 (1)	25.782 (1)	19.249 (1)	19.249 (1)
Hipertensi primer	6.231 (2)	5.611 (2)	6.183 (2)	7.588 (2)	7.588 (2)
Penyakit pulpa dan jar. Perifikal	5.676 (4)	4.268 (3)	4.540 (5)	3.733 (6)	3.733 (6)
Nasofaringitis akut (Common Cold)	3.389 (7)	3.244 (6)		4.400 (5)	4.400 (5)
Penyakit kulit Alergi	4.260 (5)	1.349 (9)	2.918 (6)	3.010 (8)	3.010 (8)
Rheumatoid	5.832 (3)	3.296 (5)	5.000 (3)	5.174 (4)	5.174 (4)
Gangguan Refraksi dan Akomodasi					
Diare					
Penyakit saluran pernapasan atas lainnya				2.267 (10)	2.267 (10)
Diabetes	1.113 (9)	1.183 (10)	1.991 (8)	3.287 (7)	3.287 (7)
Gasteristis	3.837 (6)	3.995 (4)	4.962 (4)	6.024 (3)	6.024 (3)
Dispepsia	1.351 (8)	2.549 (7)	2.879 (7)	2562 (9)	2562 (9)
Cepalgia	1.001 (10)		1.557 (10)		
Dermatitis		1.516 (8)			
Kelainan Refraksi			1.632 (9)		

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2018
*) Angka Sementara

Dari tabel di atas dapat terlihat dalam empat tahun terakhir jenis penyakit yang paling banyak di derita oleh masyarakat Payakumbuh untuk rangking pertama dan kedua adalah penyakit ISPA dan Hipertensi, ISPA atau Inveksi Saluran Pernapasan Atas dan Hipertensi biasanya terkait dengan pola hidup yang ada ditengah masyarakat itu sendiri, karena kedua jenis penyakit ini disebabkan oleh pola hidup yang kurang memperhatikan kesehatan, ISPA terkait pada kualitas udara yang ada disekitar pasien bisa saja disebabkan karena asap rokok atau pembakaran sampah yang menyebakan penurunan mutu udara, hipertensi terkait dengan pola hidup baik makan maupun aktifitas fisik sehingga diperlukan upaya prefentif dan promotif untuk permasalahan ini.

Tabel II-41
Data Prevalensi HIV/ AIDS

No	Permasalahan Pembangunan	2013	2014	2015	2016	2017*)
1	Terjadi perubahan perilaku masyakarat yang berdampak pada peningkatan jumlah penderita HIV	0,0073	0,0071	0,0039	0,0053	0,0053

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2018*) Angka Sementara

Masih banyak masyarakat yang belum bersedia untuk memeriksakan diri terkait penyakit HIV ke fasilitas pelayanan kesehatan sehingga penularan penyakit HIV masih belum bisa ditekan.

15. Jaminan Kesehatan Nasional

Tabel II-42
Jumlah Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepesertan JKN	Persentase
1	2014	125.224	103.810	82,9
2	2015	127.826	113.055	88,4
3	2016	129.807	110.514	85,1
4	2017	131.819	109.238	82,9

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2018

Kepesertaan JKN ini terdiri dari Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran yang terdiri dari dua kepesertaan yaitu kepesertaan yang dibiayai dengan APBN dan kepesertaan yang dibiayai oleh APBD dan non Penerima bantuan iuran yang terdiri dari Pegawai Negeri sipil, TNI/Polri dan Pekerja Mandiri, terjadi penurunan jumlah kepesertaan dari tahun 2015, 2016 dan 2017 jika dilihat dari komposisi kepesertaannya maka terlihat penurunan ini disebabkan karena penurunan jumlah kepesertaan PBI yang dibiayai dengan dana APBD, pada tahun 2014 PBI APBD ini berjumlah 40.000, tahun 2015 berjumlah 39.317 orang sedangkan pada tahun 2016 terjadi penurunan jumlah PBI APBD menjadi 33.077 atau berkurang sebanyak 6.240 orang atau sekitar 5% dari jumlah penduduk, penurunan ini disebabkan karena adanya perubahan komposisi pembiayaan dari APBD Provinsi dan Kota sehingga dana yang tersedia hanya dapat membiayai sejumlah yang tertera diatas.Selain pengurangan kepesertaan disebabkan berkurangnya jumlah PBI APBD, masih rendahnya partisipasi kepesertaan ini juga dipengaruhi oleh masih rendahnya kepesertaaan JKN Mandiri, sehingga sosialisasi berkaitan dengan Jaminan Kesehatan Nasional ini perlu terus ditingkatkan.

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Kinerja jaringan jalan berdasarkan aspek kemantapan merupakan gabungan kinerja dari aspek kondisi dan aspek pemanfaatan/kapasitas yang diklasifikasikan menjadi dua yaitu tingkat pelayanan mantap atau tidak mantap. Melalui Program Peningkatan Jalan dan Jembatan serta Program Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan maka kondisi jalan mantap (kondisi baik dan rusak sedang) di Kota Payakumbuh pada akhir tahun 2017 mencapai 171,19 Km meningkat dari kondisi tahun 2016 yaitu sepanjang 8,68 Km. Pada tahun 2016 dan 2017 panjang jalan di Kota Payakumbuh tetap yakni sepanjang 286,80 km, sedangkan proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap baru 67,22%. Hal ini menunjukan keseriusan pemerintah Kota Payakumbuh dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan. Selain itu, hampir 26% dalam kondisi rusak, yang diakibatkan antara lain tingginya volume kendaraan yang melebihi tonase, sedangkan jalan di Kota Payakumbuh rata-rata klasifikasinya adalah kelas III.

Tabel II-43
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi
Tahun 2013-2017 Kota Payakumbuh

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kondisi Baik	62,93	67,99	72,06	84,65	89,17
2.	Kondisi Rusak Sedang	62,82	66,85	70,85	77,86	82,02
3.	Kondisi Rusak	80,25	76,19	70,12	81,66	77,13
4.	Kondisi Rusak Berat	29,56	25,56	21,56	10,51	6,36
5.	Panjang Jalan Kota	236,58	236,59	236,59	254,68	254,68
6.	Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)	261,45	261,45	261,45	286,80	286,80
7.	Persentase	53,59	56,99	60,40	63,81	67,22

Sumber:Dinas PU dan PR Kota Payakumbuh, 2018

Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik di Kota Payakumbuh dari tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2017 secara persentase selalu mengalami kenaikanseiring dengan peningkatan pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan setiap tahunnya.

Megaproyek Normalisasi Sungai "Batang Agam".

Sejak tahun 2017, Pemko Payakumbuh mulai melakukan pembangunan megaproyek Normalisasi Sungai Batang Agam yang terdiri atas 11 segmen pekerjaan dengan dana APBN, dimulai dengan dua segmen dengan anggaran Rp14,6 miliar. Kedua segmen itu adalah segmen 5 di kawasan Kubu Gadang, Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo sepanjang lebih kurang 600 meter dan segmen 1 di Sungai Pinago, Kelurahan Tanjung Gadang Sungai Pinago, sepanjang 500 meter dari 1,4 Km. Pekerjaan kedua segmen itu berupa pengedaman kedua sisi sungai, ruang terbuka hijau, dan pembukaan ruas jalan pada kedua sisi sungai. Pembangunan segmen 1 dimulai dari Jembatan Jalan St. Hasanuddin (Padang Tangah – Ibuah) sampai Jembatan Jalan Surabaya (Tanjung Pauh – Sungai Pinago) sepanjang 1.452,9 meter.

Pembangunan fisik di Batang Agam tersebut merupakan proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui APBN.

Adapun 11 Segmen Pembangunan DAS Batang Agam terdiri atas :

a) **Segmen I,** Jalan St. Hasanuddin (Padang Tangah – Ibuah) sampai dengan Jembatan Jalan Surabaya (Tanjung Pauh – Sungai Pinago), sepanjang 1.452,9 meter.
b) **Segmen II,** Jembatan Jalan Surabaya (Kelurahan Tanjung Pauh – Sungai Pinago) s/d Jembatan Jl. St Syahril (Kelurahan Tanjung Pauh – Pakan Sinayan), sepanjang 1.606,5 meter.
c) **Segmen III,** Jembatan Jl. St Syahril (Kelurahan Tanjung Pauh – Pakan Sinayan) s/d Jembatan Jalan Singa Harau (Kel. Balai Panjang-Limbukan), sepanjang 2.153,9 meter.
d) **Segmen IV,** Jembatan Jalan Singa Harau (Kelurahan Balai Panjang-Limbukan s/d Batas Kota (Kelurahan Balai Panjang), sepanjang 1.772 meter.
e) **Segmen V,** Jembatan Jalan St. Hasanuddin (Kelurahan Padang Tangah – Ibuh) s/d Jembatan Ratapan Ibu (Kel. Ibuh – Daya Bangun), sepanjang 1.929,7 meter.

f) **Segmen VI,** Jembatan Ratapan Ibu (Ibuh – Daya Bangun) s/d Jembatan Jalan Pacuan (Labuh Baru-Kubu Gadang), sepanjang 827 meter.
g) **Segmen VII,** Jembatan Jalan Pacuan (Labuh Baru-Kubu Gadang) s/d Jembatan Konsen Jalan Sutomo (Balai Batimah-Pasir), sepanjang 990,9 meter.
h) **Segmen VIII,** Dari Balai Kaliki sampai ke Ranah, sepanjang 919,6 meter.
i) **Segmen IX,** Dari Taruko – Payobasung, sepanjang 1.440 meter.
j) **Segmen X,** Dari Jembatan Kirab Remaja ke Jembatan Jalan Gajah Mada, melewati Koto Baru Payobasung – Kotopanjang Payobasung, sepanjang 1.451,7 meter.
k) **Segmen XI ,** Dari Jembatan Jalan Gajah Mada ke Batang Sinamar, dari Kelurahan Koto Baru ke Kelurahan Kotopanjang Payobasung, sepanjang 832 meter.

Gambar. II-24
Pembukaan Jalan Sepanjang Tepi Sungai Batang Agam, Payakumbuh
Sumber: **Dinas Pekerjaan Umum Kota Payakumbuh, 2018**

Bagian Pekerjaan Pembangunan Fisik di sepanjang DAS Batang Agam, antara lain meliputi beberapa pekerjaan.

a. Normalisasi sungai dalam rangka pengendalian banjir. Bagian pekerjaannya termasuk penggalian sendimen sungai agar tak dangkal.
b. Pengamanan tebing sungai dengan susunan batu kawat beronjong atau dengan pengedaman beton agar tebing sungai tidak mengalami abrasi atau runtuh ke dasar sungai.
c. Penataan taman dan jalan di sepanjang DAS Batang Agam.
d. Membangun ruang terbuka hijau
e. Ruang untuk olahraga.
f. Ruang bermain anak-anak dan lansia
g. Ruang untuk pedagang kuliner.

Dengan selesainya pekerjaan ini, diharapkan dapat membuka potensi lokasi pariwisata baru di Kota Payakumbuh yang berdampak multi player dan meningkatkan akses kesejakteraan penduduk di sekitarnya.

2. Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase di Kota Payakumbuh dari tahun 2013 sampai 2017 terjadi peningkatan setiap tahunnya. Namun persentase panjang jalan yang memiliki trotoar meningkat signifikan pada tahun 2014, karena cukup pesatnya pembangunan drainase pada tahun tersebut. Sampai dengan tahun 2017 baru sekitar 51,55% jalan yang memiliki trotoar dan drainase di Kota Payakumbuh.

Tabel II-44
Persentase Panjang Jalan Kota Payakumbuh
yang Memiliki Trotoar dan Drainase Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase	72,36	142,07	142,08	147,09	147,75
2.	Panjang jalan seluruhnya	261,45	261,45	261,45	286,80	286,80
	Persentase	27,68	54,13	54,14	51,28	51,55

Sumber:Dinas PU dan PR Kota Payakumbuh, 2018

3. Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Panjang drainase keseluruhan dan dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai 2017. Peningkatan yang signifikan ini dikarenakan pemerintah Kota Payakumbuh dalam meningkatkan kualitas drainase tidak hanya didanai dari APBD Kota juga bersumber dari APBN. Secara persentase drainase kondisi baik pada tahun 2017sebesar 76,23%, kondisi lebih dipengaruhi karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan drainase yang sudah terbangun di kawasan permukiman dan banyaknya pembuangan air hujan yang langsung ke saluran drainase tanpa adanya resapan terlebih dahulu.

Tabel II-45
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik Kota Payakumbuh Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Panjang drainase dalam Kondisi baik	74,94	109,47	114,50	117,50	130,78
2.	Panjang drainase seluruhnya	76,78	150,47	156,27	158,27	171,55
	Persentase	97,60	72,75	73,26	74,23	76,23

Sumber: Dinas PU dan PR Kota Payakumbuh, 2018

4. Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor

Nilai persentase dihitung dari perbandingan antara jumlah lokasi pembangunan turap diwilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor dengan jumlah seluruh wilayah rawan longsor. Jumlah turap yang dibangun terus bertambah karena tingginya jumlah lokasi rawan lonsor, dan juga pada lokasi berpotensi rawan lonsor. Pembangunan turap ini tidak hanya didanai oleh APBD Kota, tetapi juga dari APBN.

Tabel II-46
Jumlah Turap yang Dibangun Kota Payakumbuh Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah lokasi turap yang dibangun	39	45	47	50	53
2.	Jumlah lokasi rawan longsor	48	48	48	48	48
	Persentase	81,25	93,75	97,91	104	110,42

Sumber: Dinas PU dan PR Kota Payakumbuh, 2018

5. Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi dihitung dari panjang saluran irigasi (m) dibandingkan dengan luas lahan budidaya pertanian (hektar) yang ada di Kota Payakumbuh dari tahun 2016 sampai 2017 terjadi kenaikan rasio jaringan irigasi. Namun periode tahun 2013-2015 mengalami penurunan karena adanya alih fungsi lahan akibat pengembangan pembangunan permukiman dan bencana alam.

Tabel II-47
Rasio Jaringan Irigasi Kota Payakumbuh Tahun 2013-2017

No	Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jaringan primer (m)	55.303	49.309,7	59.658	50.302,7	50.302,7
2.	Jaringan Sekunder (m)	55.772	54.314,0	52.117	55.772,0	55.772,0
3.	Jaringan Tersier (m)	45.100	54.967,0	39.401	45.100,0	55.787,3
4.	Jumlah jaringan irigasi	156.175	158.590,7	151.176	151.174,7	161.862
5.	Luas lahan budidaya (ha)	5.211	5.598	5.598	5.051,5	5.051,5
	Rasio	29,97	28,33	27,01	29,93	32,04

Sumber: Dinas PU dan PR Kota Payakumbuh, 2018

Tabel II-48
Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2017 Kota Payakumbuh

No	Kecamatan	Panjang Jaringan Irigasi			Total Panjang Jaringan Irigasi	Luas lahan budidaya	Rasio
		Primer	Sekunder	Tersier			
1	Payakumbuh Barat	1.607,68	9.702,00	11.107,00	22.416,68	718,50	31,20
2	Payakumbuh Timur	13.977,15	11.461,00	8.457,00	33.895,15	1.155,10	29,34
3	Payakumbuh Utara	5.135,43	14.581,50	10957,00	30.673,93	1.365,50	22,46
4	Payakumbuh Selatan	29.201,32	14.844,50	14.307,00	58.352,82	1.249,40	46,70
5	Latina	381,12	5.183,00	10.959,30	16.523,42	563,00	29,35
	Jumlah	80.302,70	55.772,00	55.787,30	161.862,00	5.051,50	32,04

Sumber: Dinas PU dan PR Kota Payakumbuh, 2018

Jaringan irigasi di wilayah Kota Payakumbuh dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan kondisi yang baik, di awal tahun 2013 baru 54,95% yang berkondisi baik dan meningkat menjadi 76,77% pada akhir tahun 2017, sebagaimana tertuang pada gambar II.25 berikut ini,

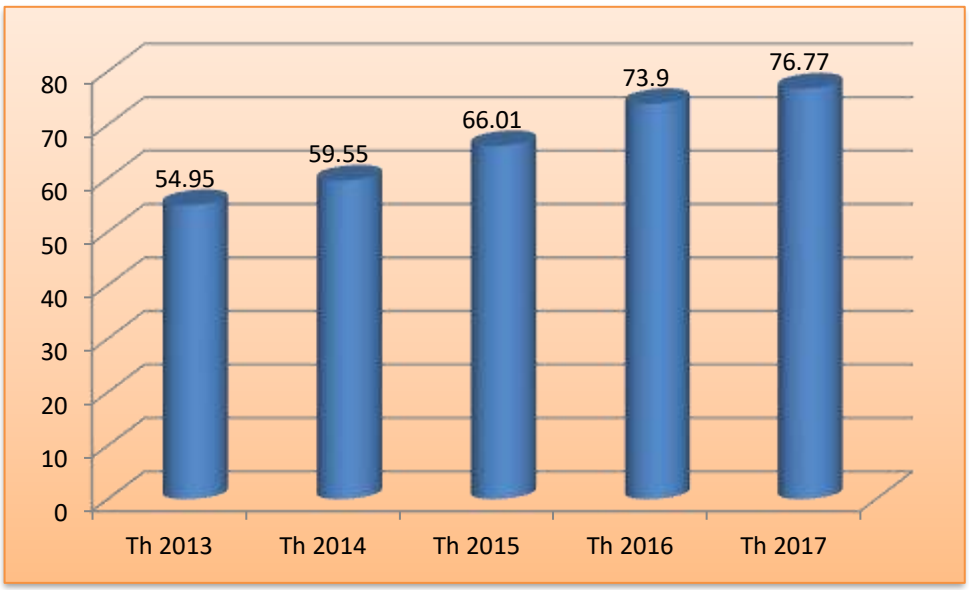

Gambar II-25
Persentase Jaringan Irigasi Kota Payakumbuh dalam Kondisi Baik Tahun 2013- 2017
Sumber: Dinas PU dan PR Kota Payakumbuh, 2018

Secara detil juga dapat dilihat pada tabel berikut ini,

Tabel II-49
Panjang Jaringan Irigasi Kota Payakumbuh Tahun 2013–2017

No	Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah jaringan irigasi	156.175	158.590,7	158.590,7	158.590,7	161.862
2.	Jaringan irigasi dalam kondisi baik	84.334	94,361	104.70	117.198	124.257
	Persentase	**54,95**	**59,55**	**66,01**	**73,90**	**76,77**

Sumber: Dinas PU dan PR Kota Payakumbuh, 2018

Tabel II-50
Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Kota Payakumbuh Tahun 2013–2017

No	Pasokan Irigasi	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Pasok Irigasi per Area	Ltr/dtk/Ha	5,85	6,15	6,15	6,15	6,15
2.	Pasok Irigasi Relatif	Ltr/dtk/Ha	4,35	3,80	3,80	3,80	3,80
3.	Pasok Air Relatif	Ltr/dtk/Ha	4,35	3,80	3,80	3,80	3,80
4.	Indek Luas Areal	%	3,95	3,80	3,80	3,80	3,80
5.	Rancangan Luas Areal	Ha	5.211	5.598	5.598	5.598	5.051

Sumber: Dinas PU dan PR Kota Payakumbuh, 2018

Kondisi jaringan irigasi yang baik adalah jaringan irigasi yang dipelihara secara terus menerus sepanjang tahun, yang dilaksanakan sesuai persyaratan teknis dan administrasi dengan baik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan.Kegiatan pemeliharaan rutin jaringan irigasi dapat menghasilkan kinerja jaringan irigasi yang sesuai dengan standar pelayanan minimum jaringan irigasi yang ditetapkan.

Tabel II-51
Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2017
Kota Payakumbuh

No	Kecamatan	Luas Rancangan (Ha)	Luas Lahan Terairi (Ha)	Kebutuhan Air Tanaman (Ha)	Pasok Air Irigasi (lt/ dtk)	Pasok Air Irigasi Total (lt/ dtk)	Total Pasok Air (lt/ dtk)	PIA (lt/ dtk/ha)	PIR (lt/ dtk/ ha)	PAR (lt/ dtk/ ha)	IA (%)
1	Payakumbuh Barat	781,50	574,80	898,13	747,24	747,24	747,24	1,30	0,83	0,83	0,80
2	Payakumbuh Timur	1.155,10	924,08	1.443,88	1.201,30	1.201,3	1.201,30	1,30	0,83	0,83	0,80
3	Payakumbuh Utara	1.365,50	1.092,40	1.706,88	1.420,12	1.420,12	1.420,12	1,30	0,83	0,83	0,80
4	Payakumbuh Selatan	1.249,40	999,52	1.561,75	1.299,38	1.299,38	1.299,38	1,30	0,83	0,83	0,80
5	Latina	563,0	450,40	703,75	585,52	585,52	585,52	1,30	0,83	0,83	0,80
	Jumlah	5.051,50	4.041,20	6.314,38	5.253,56	5.253,56	5.253,56	1,30	0,83	0,83	0,80

Sumber: Dinas PU dan PR Kota Payakumbuh, 2018

Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi merupakan tolok ukur keberhasilan dalam pengelolaan jaringan irigasi. Efisiensi diukur berdasarkan tiga indikator yaitu Pasok Irigasi per Area (PIA), Pasok Irigasi Relatif (PIR), dan Pasok Air Relatif (PAR), sedangkan efektifitas dihitung berdasarkan Indeks Luas Areal (IA). Semakin kecil nilai PIA, PIR dan PAR, maka pengelolaan irigasi semakin efisien. PIR dan PAR biasa juga dipakai untuk mengukur kemampuan masyarakat mengelola sumberdaya air dalam kegiatan suatu sistem irigasi. Semakin tinggi nilai IA menunjukkan semakin efektif pengelolaan jaringan irigasi.

6. Panjang Sungai yang Berpotensi Mengalami Abrasi

Kota Payakumbuh dilalui beberapa sungai besar dan sungai kecil, diantara sugai besar adalah sungai Batang Agam Batang Pulau, Batang Sikali, Sungai Baih, Sungai Tembok dan Sungai Talang. Dari tahun 2013 sampai tahun 2017 telah dilakukan penanganan terhadap tebing sungai yang berpotensi mengalami abrasi.

Tabel II-52
Panjang Sungai yang Berpotensi Mengalami Abrasi Kota Payakumbuh Tahun 2013–2017

No	Sungai	Panjang(m)	Lebar(m)	Potensi Abrasi Per-Tahun				
				2013	2014	2015	2016	2017
1	Batang Agam	15.600	25	8.804	8.184	7.899	7.343	7.343
2	Batang Lampasi	13.600	20	9.975	9.135	8.875	8.275	7.890
	Sawah Barueh	3.350	4	1.340	1.340	1.340	1.340	1.274
3	Batang Pulau	11.400	5	3.359	2.914	2.472	2.253	2.127
	Anak Pulau	1.200	4	360	360	123	-	-
4	Batang Sikali	14.500	6	5.641	5.405	5.077	4.869	4.793
5	Sungai Baih	5.270	6	1.961	1.723	1.604	1.493	1.437
6	Sungai Batang Jumpun	1.950	5	683	683	683	683	326
7	Sungai Tembok Jua	6.300	4	3.464	3.305	3.042	2.795	2.691
8	Sungai Talang	5.000	5	2.500	2.500	2.500	2.364	2.299
	Total	78.170		37.787	38.087	35.549	33.615	31.415

Sumber: Dinas PU dan PR Kota Payakumbuh, 2018

7. Kapasitas Air Minum, Pelayanan dan Tingkat Kehilangan Air

Kapasitas terpasang air minum untuk pelayanan di Kota Payakumbuh dari tahun 2013-2017adalah sebesar 285,57 liter/dtk. Sedangkan Cakupan pelayanan air minum terus meningkat dari tahun ketahun seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.

Tabel II-53
Jumlah Kapasitas Ketersediaan Air, Pelayanan dan Tingkat Kehilangan Air Kota Payakumbuh Tahun 2013-2017

No	Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Ketersediaan Air	L/dtk	1.380	1.380	1.380	1.380	**1.380**
2	Kapasitas Terpasang/ Kap.Produksi	L/dtk	285,57	285,57	285,57	285,57	**285,57**
3	Jumlah Pelanggan	SR	20.703	21.679	23.185	25.744	**26.833**
	Jumlah Kehilangan Air	**%**	**27,38**	**28,26**	**26,79**	**27,07**	**26,17**

Sumber: Dinas PU dan PR Kota Payakumbuh, 2018

8. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Selama waktu 2013-2017, telah terjadi peningkatan jumlah penduduk yang mendapat akses air minum, dimana pada tahun 2017 sudah mencapai 95,46%.

Tabel II-54
Persentase Penduduk Berakses Air Minum Tahun 2017

No	Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum	jiwa	114.780	116.338	119.875	122.485	**125.840**
2	Jumlah penduduk	Jiwa	124.694	125.690	127.826	129.807	**131.819**
	Persentase penduduk terlayani	**%**	**92,05**	**92,66**	**93,78**	**94,36**	**95,46**

Sumber: PDAM Kota Payakumbuh, 2018

Gambar II-26
PDAM Kota Payakumbuh (tampak depan)

9. Rasio Tempat Ibadah per-Satuan Penduduk

Rasio inidihitungantara jumlah tempat ibadah dengan jumlah penduduk di Kota Payakumbuh. Untuk tahun 2017 nilai rasio bernilai 2,99 yang dipahami bahwa hampir tiga tempat ibadah dapat menampung untuk 1.000 penduduk. Nilai rasio yang cenderung turun setiap tahunnya dipengaruhi oleh pertambahan penduduk yang tidak diiringi dengan pertambahan jumlah tempat ibadah.

Tabel II-55
Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk Kota PayakumbuhTahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Tempat Ibadah	389	389	389	390	390
2.	Jumlah Penduduk	124.694	125.690	127.826	129.807	131.819
	Rasio	3,11	3,09	3,04	2,99	2,96

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka, 2017

10. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/ HGB

Kegiatan penataan ruang mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian digambarkan melalui ketersediaan dokumen maupun peraturan-peraturan bidang penataan ruang yang akan dijadikan pedoman dalam proses pembangunan secara umum.

Tabel II-56
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas WilayahKota Payakumbuh
Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Luas Ruang Terbuka Hijau	13,78	13,78	20,98	20,98	20,99
2.	Luas wilayah ber HPL/HGB	16,95	16,95	24,07	24,07	24,07
3.	Luas wilayah	8.043	8.043	8.043	8.043	8.043
4.	Rasio Ruang Terbuka Hijau (1:2)	0,81	0,81	0,87	0,87	0,87
5.	Persentase ruang terbuka hijau (1:3)	0,17	0,17	0,26	0,26	0,26

Sumber: Dinas PU dan PR Kota Payakumbuh, 2018

Gambar II-27
RTH Taman Bendungan Talawi, Kota Payakumbuh (tampak dari Timur)

Indikator Jenis pemanfaatan ruang yang diarahkan dalam ruang terbuka hijau di Kota Payakumbuh terdiri dari: RTH taman kota, RTH jalur hijau, RTH tempat pemakaman umum, RTH jalur hijau dan RTH ruang pejalan kaki. Rasio ruang terbuka hijau diukur dari perbandingan luas ruang terbuka hijau dengan luas wilayah ber-HPL/HGB.

Tabel II-57
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Kota Payakumbuh
Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Luas wilayah ber HPL/HGB	Luas Ruang Terbuka Hijau	Rasio Ruang Terbuka Hijau
1	Payakumbuh Barat	1.908	3,14	4,4	0,23
2	Payakumbuh Timur	2.273	0,67	2,3	0,10
3	Payakumbuh Utara	1.453	0,02	10.04	0,69
4	Payakumbuh Selatan	1.467	13,12	2,24	0,15
5	Latina	942	0,01	2	4,84
	Jumlah	8.043	16,96	20,98	0,21

Sumber: Dinas PU dan PR Kota Payakumbuh, 2018

11. Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan

Rasio IMB dihitung berdasarkan pelayanan IMB yang sudah diberikan baik IMB untuk bangunan publik maupun bangunan privat serta IMB pemutihan untuk bangunan yang telah berdiri. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan dihitung dengan jumlah bangunan ber-IMB per jumlah bangunan.

Tabel II-58
Rasio Bangunan ber-IMB Kota Payakumbuh Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Bangunan ber-IMB	4.372	4.730	5.170	5.625	6.190
2.	Jumlah Bangunan	26.923	27.530	28.058	28.513	29.088
3.	Rasio bangunan ber-IMB (1:2)	0,16	0,17	0,18	0,19	0,21

Sumber: Dinas PU dan PR Kota Payakumbuh, 2018

Berdasarkan tabel di atas terlihat adanya peningkatan dari tahun ketahun, baik untuk bangunan yang sudah ada maupun yang baru dibangun. Hal ini karena adanya peningkatan kinerja dalam pembinaan, pengawasan, dan pengendalian IMB.

12. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Ketaatan dalam pemanfaatan ruang didasarkan pada pemenuhan indikator tertib Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030. Berdasarkan Tabel II.64, terlihat bahwa selama tahun 2013-2017 cenderung meningkat, hal ini disebabkan karena tingginya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang dan meningkatnya pengawasan peruntukan lahan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terlihat dari meningkatnya jumlah bangunan yang memiliki IMB baik bangunan privat maupun bangunan publik.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Payakumbuh juga telah menetapkan **Rencana Detil Tata Ruang (RDTR)** melalui **Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018** yang merupakanarahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang disusun guna menjaga integritas, keseimbangan dan keserasian perkembangan suatu wilayah Kota Payakumbuh dan antar sektor, serta keharmonisan antar ligkungan alam dengan lingkungan buatan.

Tabel II-59
Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2013–2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Realisasi RTRW (ha)	752	761	440	580	612,97
2.	Rencana Peruntukan RTRW (ha)	8.043	8.043	8.043	8.043	8.043
3.	Rasio (1/2)	0,093	0,094	0,054	0,072	0,076

Sumber: Dinas PU dan PR Kota Payakumbuh, 2018

D Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1. Rasio Rumah Layak Huni

Kualitas lingkungan permukiman menjadi perhatian utama dalam urusan wajib bidang perumahan guna menciptakan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Terkait dengan hal ini, Penataan dan pembangunan perumahan permukiman dilaksanakan secara bertahap dan diprioritaskan pada pemukiman penduduk untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Rasio rumah layak huni dihitung dari perbandingan jumlah rumah layak huni (unit) dengan jumlah penduduk (jiwa).

Tabel II-60
Rasio Rumah Layak Huni Terhadap Jumlah Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Rumah Layak Huni	25.791	26.398	26.823	26.893	27.343
2.	Jumlah Penduduk	124.694	125.690	127.826	129.807	131.819
3.	Rasio	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, 2018

Pada periode 2013- 2017 terjadi peningkatan rumah layak huni yang cukup signifikan, namun peningkatan rasionya tidak terlihat signifikan dikarenakan pertumbuhan jumlah penduduk yang selaras dengan pertambahan jumlah layak huni.

Tabel II-61
Rasio Permukiman Layak Huni Tahun 2013-2017 Kota Payakumbuh

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Luas Permukiman Layak Huni	2.092	2.092	2.092	2.092	2.092
2.	Jumlah luas permukiman	3.328	3.328	3.328	3.328	3.328
3.	Rasio	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, 2018

2. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Jumlah rumah tinggal bersanitasi selalu meningkat di Kota Payakumbuh, seiring dengan meningkatnya pembangunan sanitasi perkotaan sebagai salah satu prioritas penanggulangan kekumuhan.

Tabel II-62
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kota Payakumbuh Tahun 2015-2016

No	Uraian	2015	2016	2017
1.	Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi	23.833	24.434	25.980
2.	Jumlah Rumah Tinggal	27.723	28.436	28.436
3.	Persentase	85,95	85,92	91,36

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, 2017

3. Kebutuhan Rumah Kota Payakumbuh

Selisih pasokan dan permintaan rumah (backlog) di Kota Payakumbuh pada tahun 2017 adalah sebesar 4.796 unit.

4. Kawasan Kumuh

Luasan kawasan kumuh Kota Payakumbuh telah ditetapkan melalui surat Keputusan Walikota Nomor: 653.3/210/wk-Pyk/2016 pada tahun 2017, dimana dinyatakan seluas 59 Ha yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan.

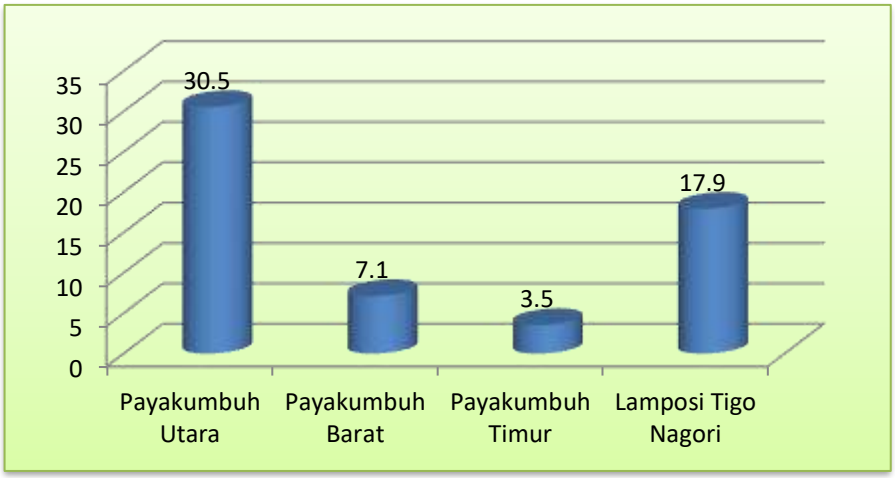

Tabel II-28

Luasan Kawasan Kumuh Kota Payakumbuh Tahun 2017(dalam Ha)

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, 2018

E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dalam pelaksanaannya melayani masyarakat melalui pembinaan wawasan kebangsaan, politik dan kerukunan beragama dan juga pengendalian ketertiban dan keamanan lingkungan.

1. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk mencerminkan kapasitas dan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menjamin, memelihara, menjalankan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah. Semakin tinggi rasio jumlah Polisi Pamong Praja, semakin besar ketersediaannya dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penegakan peraturan daerah.

Tabel II-63

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh Tahun 2013–2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Petugas Pol PP	79	99	102	108	115
2.	Jumlah Penduduk	123.654	125.690	127.826	129.807	131.819
3.	Rasio Jumlah Petugas Pol PP / 10.000 Penduduk	6,39	7,88	7,97	8,32	8,72

Sumber: Kesatuan Pol PP dan Damkar Kota Payakumbuh, 2018

Perlindungan masyarakat adalah komponen khusus pertahanan keamanan negara yang mampu berfungsi untuk membantu masyarakat menanggulangi bencana maupun memperkecil resiko kerugian. Perlindungan masyarakat berfungsi menyelenggarakan pembinaan ketentraman, ketertiban masyarakat, penegakan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat.

Tabel II-64
Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kota Payakumbuh
Tahun 2013–2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Linmas	630	630	630	630	525
2.	Jumlah Penduduk	123.654	125.690	127.826	129.807	131.819
	Rasio Jumlah Linmas per 10.000 / Peduduk	50,95	50,12	49,28	48,53	39,83

Sumber: Kesatuan Pol PP dan Damkar Kota Payakumbuh, 2018

2. Cakupan ketentraman dan ketertiban Masyarakat

Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat dilaksanakan untuk memastikan tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat. Pos Kamling adalah salah satu penyelenggaraan keamanan masyarakat dengan pola peningkatan partisipasi mayarakat dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar. Tingkat pelangagaran terhadap Perda di Kota Payakumbuh masih tinggi dan bervariasi tiap tahun dari tahun 2013 – 2017 , total pelanggaran tiap tahunnya padatahun 2013 sebanyak 226 kasus, tahun 2014 sebanyak 280 kasus, tahun 2015 sebanyak 262 kasus dan tahun 2016 sebanyak 268 kasus serta tahun 2017 melonjak menjadi 618 kasus, dari kasus pelanggaran Perda yang terjadi setiap tahunnya dapat tertangani baru 80% pada tahun 2017.

Tabel II-65
Tingkat Pelanggaran Kota Payakumbuh dari Tahun 2013–2017

No	Kategori Kasus	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Pelanggaran Perda Pekat	Kasus	72	81	75	86	121
2.	Selain Pelanggaran Perda Pekat	Kasus	158	199	`187	182	652
	Jumlah Pelanggaran	Kasus	226	280	262	268	773
	Jumlah Pelanggaran yang di Proses/ tertangani	Kasus	226	280	262	268	618
	Persentase Perda yang tertangani	%	100	100	100	100	80

Sumber: Kesatuan Pol PP dan Damkar Kota Payakumbuh, 2018

Tabel II-66
Data Tingkat Waktu Tanggap terhadap Bencana Wilayah Manajemen Kebakaran (MK)

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah kasus kebakaran	Kasus	118	140	178	212	120
2.	Kebakaran yang tertangani dalam waktu 15 menit	Kasus	118	140	178	212	120
3.	Persentase kebakaran yang tertangani dalam waktu 15 menit	%	100	100	100	100	100

Sumber: Kesatuan Pol PP dan Damkar Kota Payakumbuh, 2018

Dari tabel diatas dari tahun 2013 sampai tahun 2017 jumlah kasus bencana kebakaran yang terjadi cenderung meningkat dari tahun ke tahun kebanyakan diakibatkan konsleting listrik, karena umumnya instalasi listrik yang sudah lama.

Tabel II-67
Data Bencana Alam di Kota Payakumbuh tahun 2013–2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Angin Kencang, Badai/Puting Beliung	Kejadian	16	70	18	24	26
2	Banjir	Kejadian	3	5	2	1	1
3	Longsor	Kejadian	4	1	1	1	3

Sumber: Badan Penanggulangan bencana Daerah Kota Payakumbuh, 2017

Dari tabel diatas,Kota Payakumbuh yang paling berpotensi dan dan sering terjadi adalah bencana angin puting beliung, ini dipengaruhi oleh keadaan topografi Kota Payakumbuh yang cenderung datar dan kemudian banjir pada titik-titik tertentu akibat luapan dari beberapa sungai.

F. Urusan Sosial

Penanganan masalah kesejahteraan sosial sebelum tahun 2013 dilakukan secara parsial oleh SKPD teknis sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dengan adanya kerjasama antara Kementerian Sosial RI dengan Pemerintah Kota Payakumbuh dimana Kota Payakumbuh dijadikan salah satu daerah percontohan penanganan masalah kesejahteraan sosial. Maka dibentuklah sebuah lembaga penanganan kesejahteraan sosial yang dinamakan dengan UPT-KAN (unit Pelayan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari) yang telah diresmikan oleh Menteri sosial pada tanggal 17 Desember 2013. Sehingga seluruh program/kegiatan penanganan masalah kesejahteraan sosial dilakukan dalam satu atap, diharapkan dengn adanya lembaga ini, masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial yang belum terlayani/tersentuh oleh program/kegiatan penangulangan kemiskinan dapat terlayani dengan baik secara terpadu oleh satu lembaga saja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, program-program kesejahteraan sosial mencakup 4 (empat) kriteria: Rehabilitasi Sosial; Jaminan Sosial; Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial.

1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdapat di Kota Payakumbuh diantaranya adalah kemiskinan, ketunaan, penyandang cacat, lanjut usia, anak terlantar, anak jalanan, dan anak nakal.

Tabel II-68
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Payakumbuh Tahun 2016-2017

No	Jenis PMKS	TAHUN	
		2016	2017
1	Anak Balita Terlantar	78 Orang	16 Orang
2	Anak Terlantar	62 Orang	62 Orang
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	10 Orang	10 Orang
4	Anak Jalanan	25 Orang	5 Orang
5	Anak dengan Kedasibilitasan	25 Orang	165 Orang
6	Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan	2 Orang	2 Orang
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	3 Orang	3 Orang
8	Lanjut Usia Terlantar	220 Orang	220 Orang
9	Penyandang Disabilitas	277 Orang	277 Orang
10	Tuna Susila	1 Orang	1 Orang
11	Gelandangan	1 Orang	1 Orang
12	Pengemis	15 Orang	15 Orang
13	Pemulung	62 Orang	62 Orang
14	Kelompok Minoritas	3 Orang	3 Orang
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan	48 Orang	48 Orang
16	Orang dengan HIV/AIDS	1 Orang	2 Orang
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	333 Orang	39 Orang
18	Korban Trafficking	- Orang	- Orang
19	Korban Tindakkekerasan	7 Orang	7 Orang
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	5 Orang	2 Orang
21	Korban Bencana Alam	1 Orang	1 Orang
22	Korban Bencana Sosial	7 Orang	7 Orang
23	Perempuan Rawan Sosial ekonomi	491 Orang	491 Orang
24	Fakir Miskin	6.383 Orang	5745 Orang
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	7 Orang	7 Orang
26	Komunitas Adat Terpencil	- Orang	- Orang
	Jumlah	7.446 orang	7.191orang

Sumber: Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2018

Salah satu program nasional yang diberikan untuk masyarakat miskin adalah Pemberian beras miskin (raskin). Di Kota Payakumbuh jumlah penduduk yang memperoleh raskin pada tahun 2017 sebanyak 6.383 KK, yang diberikan bantuan setiap bulannya ditambah raskin ke 13 sebanyak 15 kg/KK.

Tabel II-69
Data Keluarga Miskin Yang Memperoleh Beras Miskin
Kota Payakumbuh Tahun 2017

No	Kecamatan	RTS	Pagu Raskin/Bulan
1.	Payakumbuh Utara	1.600	24.000
2.	Payakumbuh Barat	2.250	33.750
3.	Payakumbuh Timur	1.097	16.455
4.	Payakumbuh Selatan	568	8.520
5.	Lamposi Tigo Nagori	868	13.020
	Jumlah	**6.383**	**95.745**

Sumber: Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2018

2. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Selanjutnya terkait potensi sumber kesejahteraan sosial aktif menurut jenis kelamin pada tahun 2017 tercatat sebanyak 133 orang dengan dominasi perempuan sebanyak 110 orang. Secara lebih detilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini,

Tabel II-70
Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Aktif Tahun 2017

No	Jenis PSKS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)			
	Kec. Payakumbuh Barat	4	40	44
	Kec. Payakumbuh Timur	3	17	20
	Kec. Payakumbuh Utara	10	29	39
	Kec. Payakumbuh Selatan	2	13	15
	Kec. Lamposi Tigo Nagori	4	11	15
	TOTAL	**23**	**110**	**133**
2	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)			
	Kec. Payakumbuh Barat	1	0	1
	Kec. Payakumbuh Timur	1	0	1
	Kec. Payakumbuh Utara	1	0	1
	Kec. Payakumbuh Selatan	0	1	1
	Kec. Lamposi Tigo Nagori	0	1	1
	TOTAL	**3**	**2**	**5**

Sumber: Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2018

2.1.3.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

A Urusan Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah seluruh penduduk yang dapat bekerja jika ada permintaan kerja. Menurut Undang Undang dibatasi antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun, yang perlu menjadi perhatian adalah dengan semakin bertambahnya jumlah angkatan kerja produktif setiap tahunnya baik dari lulusan Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi

yang tidak tersalurkan secara maksimal dikarenakan sangat terbatasnya kesempatan kerja berakibat tingginya angka pengangguran. Hal ini diperburuk dengan sulitnya mendapatkan jenis pelatihan yang dibutuhkan untuk pasar kerja dan belum adanya lembaga pendidikan dan keterampilan yang menjamin lulusannya untuk ditempatkan pada lapangan kerja yang tersedia.

Tabel II-71

Rasio Penduduk Bekerja Kota Payakumbuh Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Angkatan Kerja (orang)	57.770	61.323	63.017	64.711	66.039
2.	Penduduk Yang Bekerja (orang)	53.654	57.421	58.562	59.703	61.370
3.	Jumlah Pengangguran	4.116	3.902	4.455	5.008	4.669
4.	Rasio (%)	92,88	93,64	92,93	92,22	92,93

Sumber:Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, 2018

Tabel II-72

Capaian Kinerja OPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

No	Indikator Kinerja OPD	Satuan	Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja			
			2014	2015	2016	2017
1	Tenaga kerja yang kompeten	%	27	60	60	62
2	Jumlah pencari kerja yang mendapat informasi tenaga kerja	org	873	1302	1100	1034
	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat K3P	org	-	-	134	150
	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat BPJS Kesehatan	org	-	-	882	2015
	Jumlah Perusahaan yang memberi jaminan Kesehatan	kasus	-	-	29	40
3	Pencari kerja yang ditempatkan	%	66	25.6	25	38,49
4	Jumlah perusahaan yang melaksanakan wajib lapor Ketenagakerjaan	Perusahaan	59	74	100	-
	Jumlah Sengketa Perusahaan	Kasus	-	-	2	6
5	Kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama	%	60	75	100	-

Sumber:Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, 2018

Pengangguran merupakan dampak dari jumlah angkatan kerja yang tumbuh lebih cepat dari pada kesempatan kerja. Dalam rangka mengurangi angka pengangguran Pemerintah Kota Payakumbuh telah melakukan kerjasama dengan Sekolah Tinggi Perhotelan (STP) Sahid Jakarta dalam upaya memenuhi kebutuhan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja bidang perhotelan dan Pariwisata.

B Pemberdayaan Perempuan dan Anak

1. Partisipasi Pemerintah di Pembangunan

Peran serta perempuan dalam pembangunan tidak bisa dipandang sebelah mata. Keberhasilan pembangunan manusia berawal dari pendidikan dalam keluarga yang peran terbesarnya ada pada ibu. Untuk melihat sejauh mana peran perempuan dan keluarga dalam perlindungan anak maka dapat dilihat dari beberapa indikator. Berdasarkan Tabel II-86 terlihat nilai IPG yang meningkat setiap tahunnya, indeks IPG merupakan cerminan dari meningkatnya taraf hidup masyarakat yang dikoreksi dengan gender. Untuk tahun 2015 terlihat nilai IPG bernilai 98,52 Ini dapat dipahami bahwa tidak ada perbedaan kesejahteraan/ kondisi yang diterima antara lelaki dan perempuan, baik dari pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan tahun 2016 dan 2017 BPS tidak melakukan pengukuran IPG dan IDG, sehingga untuk sementara tetap dipakai acuan tahun 2015.

Tabel II-73
Indikator Peran Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Payakumbuh Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98,42	98,47	98,52	N/A	N/A
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60,43	62,24	61,70	N/A	N/A
3.	Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah	64	65	69,92	69	20,8
4.	Persentase partisipasi perempuan dilembaga non pemerintah (swasta)	37	37	30,08	30,6	75,57
5.	Rasio KDRT	0,02	0,018	0,0016	0,0015	0,0015

Sumber: DP3AP2KB Kota Payakumbuh, 2018
N/A) = Tidak dilakukan penghitugan

Tabel II-74
Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2013-2017

No	Kasus KDRT	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kekerasan terhadap perempuan	68	37	51	11	9
2.	Kekerasan terhadap anak	22	30	44	8	23

Sumber: DP3AP2KB Kota Payakumbuh, 2018

2. Pembangunan Responsif Gender

Disamping itu, hal yang menjadi perhatian dalam percepatan pengarusutamaan gender adalah melalui pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) oleh pemerintah daerah. Berdasarkan informasi dari bidang pemberdayaan perempuan, 40% stakeholder sudah melaksanakan PPRG, dalam artian sudah membuat Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS). Indeks Pemberdayaan Gender digunakan untuk menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, yang direpresentasikan dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen; partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan.

3. Pemenuhan Hak-hak Anak

Terkait dengan pemenuhan hak anak dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

a. Fasilitas umum yang ramah anak
   Sebagai Kota ramah anak, tentunya fasilitas umum di Kota Payakumbuh diharapkan juga dilengkapi dengan fasilitas ramah anak, seperti tempat bermain anak baik itu di tempat – tempat pelayanan publik maupun fasilitas umum lainnya. Namun harus diakui kondisi ini belum optimal dilakukan. Tempat pelayanan publik seperti puskesmas, rumah sakit, tempat pelayanan publik seperti pencatatan sipil, pelayanan satu pintu, zona aman sekolah dan lain-lain masih minim dengan fasilitas yang ramah anak. Beberapa fasilitas umum dan taman bermain di Kota Payakumbuh telah mulai dilengkapi dengan fasilitas bermain anak, diantaranya RTH Batang Agam, RTH Talawi serta Objek wisata Ngalau Indah.

b. Fasilitas Pojok ASI untuk ibu menyusui
   Untuk fasilitas pojok ASI bagi ibu menyusui pada perkantoran juga masih minim. Dari 31 Perangkat daerah, yang memiliki fasilitas ruang ibu menyusui (pojok ASI) baru perangkat daerah yang melakukan pelayanan publik seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPMDPTSP, Rumah sakit dan Puskesmas

c. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran
   Berdasarkan data dari Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan, jumlah anak yang berusia 18 tahun kebawah (0 – 18 tahun) yang memiliki akta kelahiran pada tahun 2016 adalah sebanyak 28.614 anak dari total 36.397 anak. Artinya cakupan kepemilikan akta kelahiran anak berusia 18 tahun kebawah adalah sebesar 78,6%. Sedangkan tahun 2017, terdapat 44.327 anak yang sudah memiliki akte kelahiran dari 52.479 anak atau sebesar 81%. Angka ini masih berada dibawah target nasional yang mengisyaratkan cakupan kepemilikan akta kelahiran oleh anak sebesar 85% pada tahun 2019.

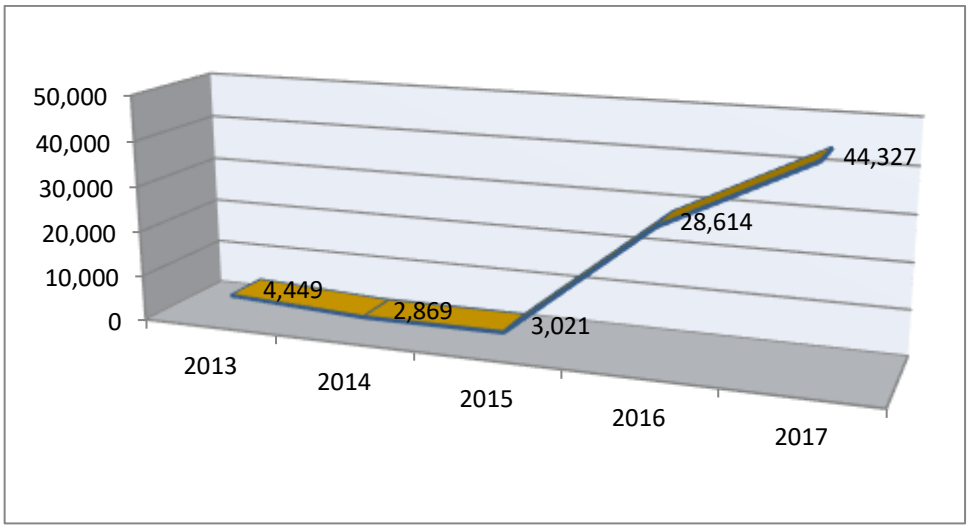

Gambar II-29
Jumlah Anak Berakte Kelahiran di Kota Payakumbuh Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan, 2018

C. Pangan

Ketahanan pangan adalah kecukupan ketersediaan pangan bagi setiap rumah tangga sekaligus kemampuan akses rumah tangga terhadap pangan yang dibutuhkan oleh setiap anggotanya. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial, budaya dan ekonomi. Ketersediaan pangan di kota Payakumbuh secara makro menunjukkan surplus terutama untuk kelompok padi-padian, sayuran, buah-buahan dan ikan. Distribusi pangan yang efektif dan efisien berguna untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Informasi harga pangan diperlukan oleh produsen untuk melihat jadwal tanam melalui pengaturan pola tanam, peluang pasar, dan gejolak harga yang terjadi. Disisi lain, pemerintah perlu mengambil kebijakan untuk mengantisipasi gejolak harga pada saat tertentu. Dengan demikian. diperlukan penataan jaringan informasi harga pangan, sehingga informasi harga sampai ke tangan produsen dan pemerintah tepat waktu.

Terkait penataan ini, Pemko Payakumbuh juga memfasilitasi dan melakukan pembinaan terhadap Kelompok-Kelompok Wanita Tani (KWT) yang tersebar di seluruh kelurahan, dimana upaya yang dilakukan meliputi **pemanfaatan pekarangan rumah** untuk ditanami berbagai tanaman sayuran dan buah-buahan. Pemanfaatan fungsi KWT ini juga sejalan dengan peningkatan peran Dasawisma di tingkat kelurahan se-Kota Payakumbuh.

Gambar II-30
Kelompok Wanita Tani Taratak Indah Padang Kaduduk, Kota Payakumbuh
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2018

1. Ketersediaan Pangan Utama

Secara umum kualitas (Keragaman dan Keseimbangan) konsumsi pangan masyarakat Payakumbuh ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) terus mengalami peningkatan dengan skor 86 tahun 2013 menjadi 89 pada tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh karena ketersediaan 3 kelompok bahan pangan masih rendah tingkat ketersediaannya yaitu Kacang – kacangan, Buah Biji Berminyak dan Sayuran dan Buah. Untuk tahun selanjutnya diupayakan agar kelompok bahan pangan yang menyebabkan PPH rendah akan ditingkatkan produksinya dan akan dilancarkan distribusinya sehingga ketersediaannya mencukupi untuk Kota Payakumbuh.

Tabel II-75
Indikator Kinerja Urusan Ketahanan pangan Kota Payakumbuh
Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Ketersediaan Pangan Utama	ton	26.355	27.211	27.456	28.359	29.027
2	Jumlah ketergantungan pada konsumsi beras	ton	13.100	13.050	13.000	12.950	12.900
3	Rasio pemenuhan kebutuhan beras	ton	1,65	1,75	1,85	1,95	2,05
4	Rata - rata jumlah konsumsi pangan hewani	Gr/kapita/ hari	250	300	350	375	416,67
5	Konsumsi Ikan	Kg/cap/thn	28	28,5	29	29,5	30
6	Lembaga distribusi masyarakat	gapoktan	2	2	2	2	2
7	Regulasi Ketahanan Pangan	buah	1	4	6	6	6

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, 2018

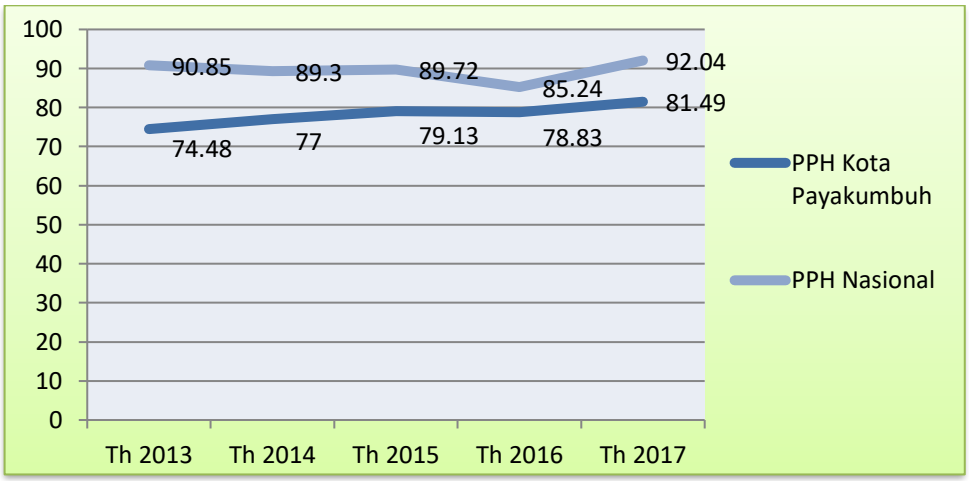

Gambar II-31
Skor PPH Kota Payakumbuh dan PPH Indonesia Tahun 2013 - 2017

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, 2018

2. Cadangan Pangan

Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, Setiap daerah Kabupaten/Kota harus memiliki cadangan pangan utama berupa beras sebanyak 100 ton. Untuk saat ini cadangan pangan pemerintah di Kota Payakumbuh adalah 17,016 ton. Dalam lima tahun kedepan diharapkan minimal 60% cadangan pangan sesuai SPM dapat terpenuhi. Target skor PPH Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah sebesar 92,5. Hal ini tentu harus didukung oleh pncapaian PPH di daerah termasuk Kota Payakumbuh. Akan tetapi, pada kenyataannya skor PPHKota Payakumbuh masih di bawah nasional dalam beberapa tahun terakhir.

3. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Dari data pengambilan sampel bahan pangan di Kota Payakumbuh pada tahun 2017 dari 83 sampel yang diambil sebanyak 69 sampel aman dikonsumsi (80,4%) dan sebanyak 13 sampel tidak aman dikonsumsi. Kedepannya perlu dilakukan pengawasan bahan pangan yang lebih intensif lagi, agar bahan pangan yang beredar dimasyarakat aman untuk dikonsumsi.

Tabel II-76
Data Keamanan Pangan selama Periode 2013-2017

No	Tahun	Jumlah sampel	Jumlah sampel aman	Jumlah sampel tidak aman	Sampel aman (%)
1	2017	83	70	13	80,4
2	2016	82	69	13	84
3	2015	8	6	2	75
4	2014	10	9	1	90
5	2013	5	4	1	80

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, 2018

D. Pertanahan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008, urusan pertanahan yang dilakukan pemerintah daerah harus terukur. Secara umum, permasalahan pertanahan di Kota Payakumbuh sudah dapat diselesaikan. Pada tahun 2013 telah diterbitkan izinlokasi pengadaan tanah untuk Pembangunan SMA Negeri 5 Payakumbuh, tahun 2014 diterbitkan 8 buah izin lokasi, yaitu untuk lokasi tanah Embung Bulakan, lokasi tanah Pembangunan Kantor lurah Parambahan, lokasi tanah Terminal Agribisnis, lokasi RTH Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Lampasi, lokasi RTH Komplek Unand Jl. Rasuna Said, lokasi RTH Jl. Gajah Mada, Jl. Panglima Polim, lokasi Pembangunan SMK 4 Payakumbuh, lokasi RTH Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Agam. Tahun 2015 dikeluarkan 4 izin lokasi yaitu, Penetapan lokasi tanah pembangunan kantor lurah Talang, penetapan lokasi pembangunan TPST Kota Payakumbuh, penetapan lokasi pembangunan Balai Benih Ikan Payakumbuh, penetapan lokasi pembangunan kantor lurah Padang Tinggi Piliang. Untuk tahun 2016 hannya dikeluarkan 1 izin lokasi yakni untuk perluasan halaman kantor BKD.

Tabel II-77
Data Lahan Pemerintah Kota Bersertifikat Kota Payakumbuh yang Difasilitasi Dinas PUPR Tahun 2013-2017

No	Tahun	Luas Lahan
1	2017	60,62 Ha
2	2016	59,59 Ha
3	2015	59,58 Ha
4	2014	58,60 Ha
5	2013	58,57 Ha

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2018

E. Lingkungan Hidup

1. Pencemaran Status Mutu Air

Pencemaran status mutu air dilihat dari jumlah kawasan permukiman atau industri dan sumber mata air yang dipantau mutu airnya dibandingkan dengan jumlah kawasan pemukiman atau industri dan sumber-sumber mata air. Status mutu air di Kota Payakumbuh dilihat pada sungai Batang Agam dan Batang Lampasi. Status mutu air dari tahun 2014 sampai dengan 2016 sebesar 28% sedang data 2017 belum tersedia, karena data ini dikeluarkan oleh Bapedalda Provinsi Sumatera Barat.

2. Pengukuran Indeks Kualitas Udara

Indeks kualitas udara di Kota Payakumbuh dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena pengaruh semakin tingginya volume kendaraan, hal ini perlu diimbangi dengan penyediaan hutan kota atau tanaman penghijauan untuk menetralisisr kembali udara yang tercemar

Tabel II-78
Indeks Kualitas Udara Ambien 2013-2017 Kota Payakumbuh

No	Parameter	2013	2014	2015	2016	2017
1	SO_2	-	21,26	21,26	4,75	4,73
2	CO	2.419	6409	6409	600	-
3	NO_2	-	17.76	17.76	3.16	4,3
4	O_3	53.03	9.6	9.6	15.9	-
5	HC	-		-	-	-
6	PM10	-	142.3	142.3	79.1	-
7	PM2,5	-		-	-	-
8	TSP	57.43		-	-	-

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2018

3. Pencemaran Sungai

Baku mutu sungai di Kota Payakumbuh di ambil sampel adalah sungai Batang Agam pada du lokasi, dilihat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 baku mutu Sungai di Kota Payakumbuh dari parameter yang diambil terhadap dua lokasi tingkat kecemarannya tergolong dalam tercemar sedang.

Tabel II-79
Data Baku Mutu Sungai tahun 2013-2017

Nama Sungai	No	Parameter Pengujian	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Baku Mutu Air Kelas II PP 82/2001
			Lokasi I	Lokasi II	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi I	Lokasi II	
Sungai Batang Agam	1	pH	7,63	7,45	7,48	7,5	8,16	8,16	7,57	7,62	7,33	7,29	6-9
	2	TSS	7	8	5	8	-	-	-	-	-	-	50
	3	BOD	0,76	2,62	2	2,3	2,5	1,7	2,29	1,44	1,29	2,03	3
	4	COD	7	11	14,88	19,89	16,8	15,6	6,5	5,6	6,45	22,4	25
	5	Fecal coliform	9.000	9.000	24.000	24.000	15.000	15.000	12.000	12.000	-	-	1.000
	6	Total Coliform	12.500	12.500	24.000	24.000	11.000	11.000	13.000	13.000	-	-	5.000
Status mutu sungai			Tercemar sedang	Tercemar sedang	Tercemar berat	Tercemar berat	Tercemar berat	Tercemar berat	Tercemar sedang	Tercemar sedang	Tercemar sedang	Tercemar sedang	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2018

4. Kawasan Lindung dan Pemanfaatan Air Tanah

Jumlah kawasan lindung di Kota Payakumbuh dari tahun 2013 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan dengan bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan berkurangnnya fungsi dan luasan kawasan lindung. Sedangkan untuk jumlah mata air di Kota Payakumbuh dari tahun 2013 sampai tahun 2017 berjumlah 2 buah, yakni di Bulakan Balai Kandi dan daerah Limbukan. Untuk penggunaan air tanah di Kota Payakumbuh dari tahun 2013 sampai tahun 2017 cenderung mengalami penurunan, hal ini disebabkan pengalihan penggunaan air tanah ke penggunaan air dengan sistem perpipaan dari PDAM.

Tabel II-80
Jumlah Kawasan Lindung Tahun 2013-2017 Kota Payakumbuh

No	Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kawasan Lindung	Ha	148	347,28	343,11	343,11	343,11
2.	Mata Air	buah	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Lingkungan HidupKota Payakumbuh, 2018

5. Persentase Pengelolaan Sampah

Volume sampah yang dihasilkan belum seluruhnya dapat ditangani oleh Pemerintah Kota Payakumbuh. Hal ini disebabkan karena armada sampah yang ada kurang memadai sehingga belum semua kelurahan yang terlayani. Kota Payakumbuh mensiasati hal ini dengan program 3R dalam rangka pengelolaan sampah yang belum terlayani, serta terus didorong untuk mewujudkan pengelolaan sampah dengan pola 3R (*reduce, reuse* dan *recycle*).

Tabel II-81
Jumlah Volume Sampah dan Produksi SampahTahun 2013-2017 Kota Payakumbuh

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah sampah yang terkelola (ton)	1.460	1.460	1.460	1.460	1.137
2.	Jumlah sampah yang terangkut (ton)	18.900,0	21.973,0	23.360,0	24.820,0	22.732
3.	Jumlah volume produksi sampah (ton)	28.798,5	30.842,5	38.069,5	47.012,0	45.464
	Persentase	49,16	54,27	62,88	73,29	69,33

Sumber:Dinas Lingkungan HidupKota Payakumbuh, 2018

7. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota

Pada tahun 2013 sampai tahun 2015 terjadi penambahan TPS yang cukup signifikan, terhitung untuk tahun 2015 terhitung sebanyak 218 TPS dibangun. Untuk tahun 2016 dan 2017, pemerintah fokus melakukan rehabilitasidan revitalisasi TPS.Padatabel di bawah ini, jumlah tempat pembuangan sampah menurun dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah sebelum di buang ke TPS. Wadah yang digunakan untuk tempat pembuangan sampah (TPS) terbuat dari tembok dan logam atau material lain seperti kayu dan fiber.

Tabel II-82
Jumlah TPS 3R Perkecamatan Kota Payakumbuh Tahun 2013-2017

No	Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Payakumbuh Timur	1	1	1	1	1
2.	Payakumbuh Barat	2	2	2	2	2
3.	Payakumbuh Utara	1	-	-	-	-
4.	Payakumbuh Selatan	2	2	2	2	2
5.	Lampasi Tigo Nagori	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Lingkungan HidupKota Payakumbuh, 2018

Dari sisi**Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA**)**,** Kepalo Koto di wilayah Kota Payakumbuh juga merupakan lokasi TPA Regional yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Gambar II-32
TPA Regional Payakumbuh

Sumber: DinasLingkungan Hidup, Kota Payakumbuh, 2018

TPA Regional ini menampung sampah dari beberapa wilayah, antara lain Kota Bukittinggi, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Agam, Kab. Tanah Datar dan Kota Payakumbuh sendiri. Penanganan TPA Regional sampai saat ini dilakukan dengan System Open Dumping, dimana sebelumnya dilakukan melalui system sanitarian landfill. Penanganan atas pelaksanaan TPA Regional ini secara intens kiranya akan dilakukan secara baik kedepannya.

Tabel II-83
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk
Kota Payakumbuh Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah tempat pembuangan sampah TPS (unit)	194	215	218	218	218
2.	Jumlah Daya Tampung TPS (ton)	151	166,22	190,7	190,7	190,7
3.	Jumlah penduduk	124.694	125.690	127.826	129.807	131.819
4.	Rasio	1,13	1,21	0,17	0,17	0,16

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2018

8. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Seiring peningkatan jumlah penduduk Kota Payakumbuh, cakupan pelayanan air minum juga meningkat dari tahun ketahun. Untuk tahun 2014 dilakukan penyesuaian persentase perbedaan layanan air minum, karena adanya layanan pada Kabupaten Limapuluh Kota sebesar 2,3%. Kondisi ini kemudian disesuaikan dengan adanya pemisahan layanan antara Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota pada tahun 2015. Dengan demikian penduduk Kota Payakumbuh yang belum mendapat pelayanan air minum perpipaan dari PDAM pada tahun 2017 adalah 5.985 jiwa atau hanya sebesar 4,54%.

Tabel II-84
Persentase Penduduk dan Cakupan Pelayanan Air Minum
Kota Payakumbuh Tahun 2013–2017

No	Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Penduduk Terlayani	Jiwa	117.837	116.464	116.035	121.187	125.834
2.	Persentase Cakupan Layanan	%	94,50	92,66	90,78	93,36	95,46

Sumber:PDAM Kota Payakumbuh, 2018

9. Pengawasan Izin Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan dilihat dari jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Pemerintah Daerah dibandingkan dengan jumlah kasus lingkungan yang ada. Cakupan ini dilihat dari jumlah perusahan wajib AMDAL yang telah diawasi dibandingkan dengan jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL. Jumlah usaha yang memiliki dokumen lingkungan dari tahun 2013 sampai 2017 cenderung mengalami peningkatan, pada tahun 2013 berjumlah 55 dokumen pada tahun 2016 menjadi 198 dokumen dan tahun 2017 turun menjadi 152 dokumen.
Penegakan atas izin lingkungan ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh melalui pengawasan lapangan, pemberian peringatan dan fasilitasi percepatan pengurusan izin sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Pertimbangan atas pemberian izin lingkungan ini dalam beberapa aspek juga berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

Tabel II-85
Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan Kota Payakumbuh
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan	Dokumen	55	83	152	198	152
2.	Kasus Penegakan Hukum Lingkungan	Kasus	8	5	3	3	7
3.	Kasus Penegakan Hukum Lingkungan Diselesaikan	Kasus	7	5	3	3	6
4.	Surat Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dikeluarkan	Surat Rekomendasi	35	-	-	189	139
5.	Usaha Pengendalian Lingkungan/ Usaha Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL)	Surat Rekomendasi	20	83	161	12	13

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2018

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kegiatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil berupa penerbitan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil dari tahun 2013 sampai dengan 2017cenderung meningkat, seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan.

1. Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk

Untuk melihat persentase penduduk yang telah mengurus dokumen kependudukannya dapat dilihat dari rasio penduduk ber KPT. Rasio penduduk ber-KTP adalah perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber-KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah. Rasio penduduk ber-KK adalah perbandingan jumlah penduduk yang ber-KK terhadap jumlah penduduk yang telah menikah, dan Rasio bayi berakte kelahiran adalah perbandingan jumlah bayi lahir dalam 1 tahun yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi lahir pada tahun yang sama. Sedangkan Rasio pasangan berakte nikah adalah perbandingan jumlah pasangan nikah berakte nikah terhadap jumlah keseluruhan pasangan yang telah menikah.

Tabel II-86
Penerbitan Dokumen dan Akta pada Kota Payakumbuh tahun 2013-2017

No	Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kartu Tanda Penduduk	KTP/Lembar	80.903	73.273	79.430	85.160	87.087
2.	Akta Kelahiran	Lembar	4.531	3.436	3.813	3.539	9.881
3.	Akta Kematian	Lembar	15	18	30	129	279
4.	Akta Perkawinan	Lembar	990	951	28	1	17
5	Akta Perceraian	Lembar	1	4	4	14	1
6	Akta Pengakuan dan Pengangkatan Adopsi Anak	Lembar	-	-	2	0	0
7	Akta Ganti Nama	Lembar	5	-	21	0	8
8	Jumlah Kartu Keluarga diterbitkan	Lembar	11.338	34.143	34.981	36.916	18.811

Sumber:Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKota Payakumbuh, 2018

Layanan administrasi kependudukan di Kota Payakumbuh memiliki keunggulan dalam hal upaya pelayanan administrasi yang berdasarkan ketepatan waktu dan kecepatan

pelayanan. Layanan ini melayani penduduk untuk penerbitan dokumen kependudukan hanya membutuhkan waktu 10 (sepuluh) menit apabila dokumen persyaratan administrasinya mencukupi. Program ini dikenal dengan nama **SEMEDI (Sepuluh Menit Jadi).**

Tabel II-87
Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir, Akte Nikah Kota Payakumbuh Tahun 2017

Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan							
KTP		KK		Akte lahir		Akte nikah	
Sdh	blm	Sdh	blm	Sdh	blm	Sdh	blm
87.087	2.586	37.539	-	44.629	86.429	24.737	34.602
97,12%		100%		34,05%		41,69%	

Sumber:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, 2018

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan pada dasarnya ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Berbagai kebijakan dan program pembangunan melalui berbagai pendekatan telah dilakukan agar dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Pada Tahun 2008 di Kota Payakumbuh terjadi pemekaran wilayah kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 dan 13 tahun 2008. Pada tahun 2014 dilaksanakan penggabungan kelurahan dari 76 menjadi 62 kelurahan. Tahun 2015 kembali dilaksanakan penggabungan kelurahan menjadi 48 kelurahan yang berlaku mulai tahun 2016 dan tahun 2017 terjadi penggabungan Kelurahan Tanah Mati dan Padang Datar, sehingga jumlah kelurahan saat ini adalah 47 kelurahan.

Tabel II-88
Kondisi Gedung Kantor Lurah per-Kecamatan Tahun 2017

No	Kecamatan	Kondisi			Jumlah Kantor Lurah
		Baik	Sedang	Kurang	
1	Payakumbuh Barat	9	1	7	17
2	Payakumbuh Utara	7	1	1	9
3	Payakumbuh Timur	8	-	1	9
4	Payakumbuh Selatan	5	1	-	6
5	Lamposi Tigo Nagori	-	5	1	6
Total		**29**	**8**	**10**	**47**

Sumber: Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, 2018

Pemerintah kelurahan sebagai pemerintahan terendah di Kota Payakumbuh merupakan ujung tombak pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah, maka kelurahan harus dilengkapi dengan fasilitas gedung kantor dan prasarana yang mencukupi. Kondisi kantor lurah yang ada saat ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Kantor dengan kondisi baik/representatif sebanyak 60%. Kondisi baik disebabkan gedung kantor masih baru, penataan ruang sudah baik, cukup luas, gedung sudah milik sendiri, dan ruang kantor sudah tidak digunakan bersama-sama dengan unsur-unsur yang ada dikelurahan. Kantor kondisi ini banyak pada kelurahan yang bergabung.
2. Kondisi kantor sedang sebanyak 16,6%. Kondisi ini berupa gedung kantor yang masih baik, tapi bangunan sudah lama, ruangan belum memadai, bangunan masih didirikan pada tanah masyarakat yang disewa.
3. Kantor dengan kondisi kurang sebanyak 23%. Kondisi kantor yang kurang/tidak representatif dapat dikatakan karena kondisi kantor kurang layak disebabkan kantor kecil, ruangan sempit, tidak ada penataan ruang yang jelas, kantor menumpang pada tanah masyarakat, pemakaian ruangan masih bergabung dengan unsur-unsur yang ada pada kelurahan seperti PKK, LPM.

Tabel II-89
Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor Lurah per KecamatanTahun 2017

No	Kecamatan	Kondisi			Jumlah Kantor Lurah
		Baik	Sedang	Kurang	
1	Payakumbuh Barat	9	3	5	17
2	Payakumbuh Utara	-	3	6	9
3	Payakumbuh Timur	6	-	3	9
4	Payakumbuh Selatan	-	5	1	6
5	Lamposi Tigo Nagori	-	-	6	6
	Jumlah	15	11	21	47

Sumber: Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, 2018

Untuk sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas seperti mobiler, perlengkapan kantor, alat-alat elektronik (komputer) dengan kondisi sebagai berikut:

1. Kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai sebesar 31,25%, dapat dilihat dari keberadaan mobiler yang layak dan mencukupi, perlengkapan kantor yang masih baik dan peralatan elektronik seperti komputer yang lebih dari 3(tiga) unit.
2. Sarana dan prasarana dalam kondisi sedang sebesar 22,9%, dapat dilihat dari mobiler yang layak namun belum mencukupi dengan kondisi yang baik, sedangkan peralatan elektronik/komputer sebanyak 2-3 unit.

Kondisi sarana dan prasarana yang kurang sebesar 45,83%, adalah sarana dan prasarana yang tidak mencukupi, perlengkapan kantor berupa komputer hanya 1 (satu) buah dan kondisinya sudah lama. Kondisi ini berada pada kelurahan-kelurahan yang kecil. Untuk menggerakkan partisipasi dan pembangunan di kelurahan, terdapat organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti LPM dan PKK. Masing-masing kelurahan memiliki satu organisasi LPM yang saat ini berjumlah 47 LPM, LPM tersebut aktif dan sangat berperan dalam menunjang pembangunan. Selain itu di setiap kelurahan juga ditunjang oleh ibu-ibu yang mengadakan kegiatan yang tergabung dalam kelompok PKK Kelurahan yang jumlahnya juga 47 kelompok.

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jumlah penduduk Kota Payakumbuh mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Trend pertumbuhan penduduk tersebut menunjukkan bahwa perkembangan penduduk Kota Payakumbuh tumbuh secara linier.

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan tabel di bawah ini, terlihat bahwa setiap kecamatan di Kota Payakumbuh mengalami peningkatan pertambahan penduduk, walaupun begitu laju pertumbuhan pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup kecil, hanya 0,98%. Pertambahan penduduk setiap tahunnya dipengaruhi oleh proses alami, dan migrasi penduduk; masuk atau keluar dari suatu daerah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik untuk tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, pertumbuhan penduduk bernilai positif, yang diartikan sebagai tingkat kelahiran dan migrasi masuk di Kota Payakumbuh lebih besar dibandingkan tingkat kematian dan migrasi keluar Kota Payakumbuh.

Prediksi untuk pola pertumbuhan penduduk melalui pertumbuhan alami, dan melalui migrasi merupakan pola perhitungan yang kompleks yang tidak hanya memperhitungan satu indeks pengukuran saja, karena dalam perhitungan pertumbuhan penduduk didasarkan dari tingkat kelahiran, kematian, migrasi masuk dan migrasi keluar. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pendorong dan penarik dari kota yang dituju maupun yang ditinggalkan.

Tabel II-90
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Payakumbuh
Tahun 2013-2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2013	2014	2015	2016	2017*)
1.	Payakumbuh Barat	48.537	48.624	49.450	50.367	50.616
2.	Payakumbuh Timur	25.904	27.246	27.634	27.954	29.106
3.	Payakumbuh Utara	30.063	30.117	30.679	31.082	30.946
4.	Payakumbuh Selatan	10.028	10.278	10.453	10.635	11.051
5.	Lamposi Tigo Nagori	9.122	9.425	9.610	9.769	10.100
6.	Total Jumlah Penduduk	123.654	125.690	127.826	129.807	131.819
7.	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,98%	1,65%	1,67%	1,69%	1,69%

Sumber*:* Payakumbuh Dalam Angka 2014- 2017
*) Angka Proyeksi

2. *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)

Contraceptive Prevalence Rate (CPR) merupakan persentase cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Pada tahun 2017, untuk Kota Payakumbuh nilainya masih di bawah 80%, yaitu sekitar 71,14%, menurun dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 79,28%.

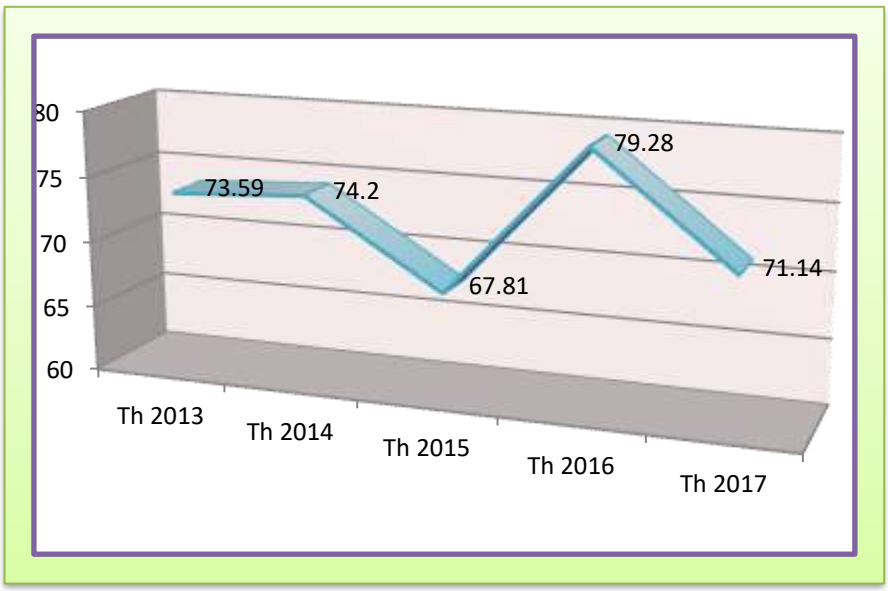

Gambar II-33
***Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) Tahun 2013-2017**

Sumber: DP3AP2KB Kota Payakumbuh, 2018

3. Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga

Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan rata-rata jumlah anak per- keluarga. Rata-rata jumlah anak per keluarga adalah jumlah anak dibagi dengan jumlah keluarga.

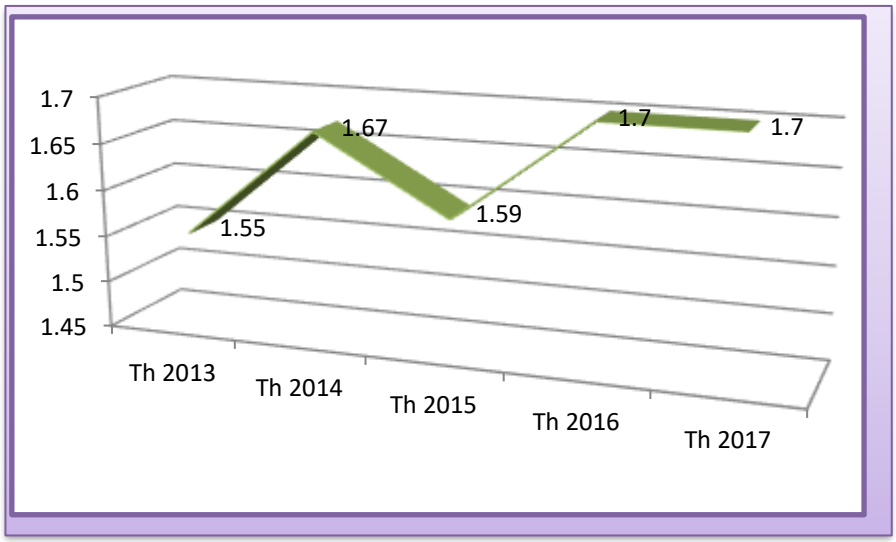

Gambar II-34
Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kota Payakumbuh, Tahun 2013-2017

Sumber: DinasP3AP2KB, Kota Payakumbuh, 2018

4. Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB merupakan perbandingan jumlah akseptor KB (peserta KB aktif) dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS). Perkembangan rasio akseptor KB ini cenderung mengalami fluktuasi, namun penambahan jumlah akseptor KB tidak sebanding dengan penambahan PUS sendiri. Pemerintah Kota Payakumbuh melaksanakan program Keluarga Berencana dan pendataan Pasangan Usia Subur (PUS) setiap tahun.

Tabel II-91
Perkembangan Peserta KB Aktif Kota Payakumbuh Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah akseptor KB (Pasang)	16.664	15.196	15.098	12.895	14.043
2.	Jumlah PUS (pasang)	21.519	19.834	20.041	19.016	19.740
3.	Rasio Akseptor KB (%)	77,40	76,62	75,34	76,36	71,14

Sumber: DP3AP2KB, 2018; Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, 2017

Sejak tahun 2013-2017 terjadi penurunan dalam Rasio Akseptor KB, dimana pada tahun 2013 Rasio Akseptor KB sebesar 77,40%, dan pada tahun 2017 menjadi 71,14%.

Tabel II-92
Pencapaian Peserta KB Baru Kota Payakumbuh Tahun 2013-2017

No	Mix Kontrasepsi	2013		2014		2015		2016		2017	
		PPM	Penca paian	PPM	Penca paian	PPM	Penca paian	PPM	Penca paian	PPM	Penca paian
1	I U D	651	641	500	641	724	557	562	694	647	680
2	M O P	18	32	85	32	8	12	24	0	2	8
3	M O W	45	150	22	150	98	92	163	195	150	185
4	I M P	252	325	750	325	347	296	366	376	373	350
5	SUNTIK	1.258	1.706	650	1.706	853	1.234	1688	1545	1.476	1.912
6	P I L	380	421	384	421	152	143	246	313	1.013	941
7	KONDOM	55	370	225	370	160	121	82	205	194	213
Jumlah		3.652	3.159	3.645	2.626	2.234	2.342	3131	3328	3.855	4.292
Pencapaian (%)			111,14		115,38		104,82		106,29	111,34	

Sumber:DP3AP2KB Kota Payakumbuh Tahun 2018

5. Petugas dan Kader KB

Selanjutnya terkait perbandingan antara petugas KB dengan kader, tabel berikut ini menggambarkan bahwa rata – rata 1 (satu) orang petugas KB melayani 4 (empat) kelurahan. Petugas KB dibantu oleh kader KB. Kader adalah seorang yang mampu dan suka rela berpartisipasi menyumbangkan pemikiran tenaga dan waktu nya untuk membantu pengelolahaan kegiatan program KB di kelurahan. Secara kuantitas dapat dilihat jumlah kader KB ini telah mencukupi, namun secara kualitas perlu dilakukan evaluasi dan pembinaan untuk peningkatan kualitas SDM kader KB tersebut.

Tabel II-93
Jumlah Petugas dan Kader Keluarga Berencana Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah PKB	Jumlah Kader KB
1	Payakumbuh Utara	9 kelurahan	3 orang	**84 orang**
2	Payakumbuh Timur	9 kelurahan	2 orang	**57 orang**
3	Payakumbuh Selatan	6 kelurahan	2 orang	**25 orang**
4	Payakumbuh Barat	17 kelurahan	4 orang	**91 orang**
5	Lamposi Tigo Nagori	6 kelurahan	1 orang	**23 orang**
	Jumlah	47 kelurahan	12 orang	280 orang

Sumber:DP3AP2KB Kota Payakumbuh, 2018

6. Ketahanan Keluarga

Terkait peran serta dasawisma dalam upaya peningkatan pemahaman masyarakat dalam ketahanan keluarga juga perlu ditingkatkan. Ketahanan keluarga diperlukan dalam menghadapi berbagai tantangan menuju terciptanya keluarga yang sejahtera.

Tabel II-94
Jumlah Dasawisma Aktif Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Dasawisma
1	Payakumbuh Utara	9 kelurahan	363
2	Payakumbuh Timur	9 kelurahan	91
3	Payakumbuh Selatan	6 kelurahan	106
4	Payakumbuh Barat	17 kelurahan	166
5	Lamposi Tigo Nagori	6 kelurahan	100
	Jumlah	47 kelurahan	1.346

Sumber:DP3AP2KB Kota Payakumbuh, 2018

I. Perhubungan

1. Jumlah Arus Penumpang Angkatan Umum

Dilihat dari jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah Kota Payakumbuh selama 1 tahun, jenis angkutan umum yang digunakan adalah bis. Untuk tahun 2016 dan 2017 terjadinya penurunan pada jumlah penumpang angkutan umum.Hal ini disebabkan adanya angkutan sewa “travel” yang bisa antar jemput ke lokasi keberangkatan dan lokasi tujuan. Di samping itu, juga adanya kemudahan kepemilikan kendaraan pribadi melalui uang muka ringan yang berdampak pada menjamurnya kendaraan pribadi baik roda dua maupun roda empat.

Tabel II-95
Jumlah Arus Penumpang Tahun 2013–2017 Kota Payakumbuh

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Penumpang	650.608	487.956	143.876	162.676	117.617

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, 2018

2. Rasio izin trayek

Izin trayek di Kota Payakumbuh terjadi penurunan selama 2 (dua) tahun awal, karena berkurangnya kecenderungan masyarakat menggunakan angkutan umum, rasionya menurun seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II-96
Jumlah Izin Trayek dan Rasio yang Dikeluarkan Kota Payakumbuh

No	Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Izin Trayek	Dokumen	121	121	110	105	105
2.	Jumlah Penduduk	Jiwa	124.694	125.690	127.826	129.807	131.819
3.	RasioTrayek dengan Jumlah Penduduk	-	0,0010	0,0010	0,0009	0,0008	0,0008

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, 2018

3. Jumlah Terminal Bis

Di Kota Payakumbuh pada tahun 2017 terdapat tiga buah terminal yang terdiri dari 1 terminal bis antar kota antar propinsi (Terminal Koto Nan Ampek) yang sekarang sudah menjadi kewenangan provinsi dan 2 terminal angkutan kota/ pedesaan yaitu Terminal Labuah Baru dan Pos Kota.Terminal merupakan pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan penumpang serta perpindahan moda. Saat ini kewenangan pengelolaan terminal bus Koto Nan IV (tipe B) berada pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sedangkan 2 terminal Angkutan Kota/Angkutan Pedesaan (tipe C) dikelola Pemerintah Kota Payakumbuh. Pengelolaan terminal Angkutan Kota/Angkutan Pedesaan belum beroperasi secara optimal dikarenakan rendahnya aksesibilitas pengguna jasa angkutan ke terminal membuat penumpang angkutan umum lebih memilih naik dan turun langsung di pusat-pusat kegiatan. Untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan terminal penumpang tersebut perlu dilakukan penertiban terhadap terminal bayangan, meningkatkan pengamanan dan pelayanan di terminal serta meningkatkan kualitas fasilitas di terminal.

4. Angkutan Darat

Angkutan darat yang dimaksudkan disini adalah semua jenis angkutan umum yang terdiri dari mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang. Tahun 2013perbandingan antara jumlah angkutan darat dengan jumlah penumpang adalah 0,44% kondisi ini meningkat signifikan pada tahun 2014 dengan 0,65%. Untuk tahun 2015, 2016 dan 2017 terjadi penurunan yang signifikan sehingga persentase perbandingan menjadi 0,01%.

Tabel II-97
Jumlah Arus Penumpang Tahun 2013–2017 Kota Payakumbuh

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Angkutan Darat	2.607	2.645	2.655	2.786	2.664
2.	Jumlah Penumpang	650.608	487.956	143.876	162.676	117.617
3.	Persentase Perbandingan	0,004	0,005	0,02	0,02	0,02

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh Tahun 2018

5. Perparkiran

Perparkiran di Kota Payakumbuh masih menggunakan tepi jalan umum sebagai area/lokasi parkir (*on street*). Lokasi parkir tersebut terletak di pusat kota dan pusat perbelanjaan, dimana kondisi lalu lintas cukup padat disebabkan volume kendaraan dan jumlah pejalan kaki yang cukup tinggi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kemacetan. Selain itu luas area/lokasi parkir yang tidak sebanding dengan jumlah pertambahan kendaraan mengakibatkan pelayanan terhadap pengguna jasa parkir belum maksimal. Jumlah titik parkir ditepi jalan umum dalam Kota Payakumbuh sebanyak 23 titik. Jumlah tersebut masih sangat kurang sehingga perlu dilakukan penambahan lokasi parkir baru untuk mengimbangi potensi parkir akibat pertumbuhan kendaraan, selain penambahan titik parkir *on street* diperlukan juga titik parkir *off street* berupa gedung parkir maupun taman parkir. Disamping meningkatkan ketersedian lokasi parkir, peningkatan kualitas pengelolaan parkir juga diperhatikan dari sisi pelayanan petugas parkir dengan cara memberikan pembinaan secara berkala kepada petugas parkir sehingga petugas parkir tersebut memahami tugas dan kewajibannya dalam memberikan pelayanan perparkiran.

6. Pelanggaran lalu Lintas

Rendahnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas merupakan faktor penyumbang terbesar dalam terjadinya kecelakaan. Masih rendahnya disiplin berlalu lintas masyarakat Kota Payakumbuh dapat terlihat dengan masih tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas. Secara bertahap dengan pembinaan/penyuluhan terus menerus akan menambah pengetahuan masyarakat dalam berlalu lintas. Selain pembinaan/penyuluhan Dinas Perhubungan juga melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dijalan. Pengawasan dan pengendalian lalu lintas dilaksanakan di daerah rawan hambatan, persimpangan, sekolah, dan perkantoran. Dengan dilaksanakannya pembinaan/penyuluhan serta lebih intensnya pengawasan dan pengendalian lalu lintas oleh aparatur dilapangan diharapkan dapat meningkatkan disiplin dan kepatuhan masyarakat pengguna jalan sehingga dapat menurunkan angka pelanggaran lalu lintas.

Tabel II-98
Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Kota Payakumbuh Tahun 2013–2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas	6.796	4.039	6.520	7.041	6.689

Sumber: Polres Kota Payakumbuh Tahun 2018

7. Prasarana Jalan

Perkembangan suatu kota sangat ditentukan oleh dinamika perkembangan masyarakatnya. Kenyataan ini terlihat dari perkembangan kegiatan masyarakat yang berdampak terhadap perkembangan di berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, bidang ekonomi, transportasi dan perkembangan infrastruktur kota itu sendiri.Khususnya bidang transportasi, dengan pertambahan jumlah kendaraan secara kontiniu, ruas jalan dan dinamika lalu lintas yang semakin kompleks dibutuhkan ketersediaan prasarana jalan yang memadai. Prasarana jalan meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung jalan.

Dalam Kota Payakumbuh masih banyak ruas jalan, persimpangan dan sekolah serta pusat keramaian yang belum dilengkapi prasarana jalan. Untuk memenuhi kebutuhan akan prasarana jalan tersebut adalah dengan meningkatkan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Manajemen dan rekayasa lalu lintas merupakan serangkaian usaha dan kegiatan berupa perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan prasarana jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Tabel II-99
Jumlah Prasarana Perhubungan Kota Payakumbuh Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah rambu (buah)	801	895	1.155	1.268	1.268
2.	Jumlah traffic/ warning light (tiang)	55	65	76	83	86
3.	Jumlah marka (m2)	30.340	30.340	30.340	30.340	30.340
4.	Jumlah halte (buah)	8	8	8	8	8
5.	Jumlah pagar pembatas jalan portabel (buah)	20	120	120	120	120

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, 2018

J. Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika di Kota Payakumbuh diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam pelaksanaan urusan ini Pemerintah Kota Payakumbuh telah memiliki **Master Plan E-Government** Periode Tahun 2015 – 2020, sehingga acuan pengembangan Teknologi Informatika (TI) di Kota Payakumbuh telah terarah sesuai dengan Dokumen tersebut.

Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan 4 (empat) urusan yang meliputi urusan komunikasi, urusan pengembangan Teknologi Informatika, urusan persandian dan terakhir urusan statistic. Dalam pelaksanaannya selalu mengacu kepada tujuan utama berupa pengintegrasian aplikasi kepemerintahan di Kota Payakumbuh sehingga efektifitas dan efesiensi pekerjaan pemerintah daerah dapat diwujudkan.

1. Jumlah Hotspot

Jumlah hotspot yang disediakan pemerintah Kota Payakumbuh dimulai dari 2013 sebanyak 1 unit sampai tahun 2014, pada tahun 2015 menjadi 10 unit terus meningkat tahun 2016 sebanyak 15 unit dan tahun 2017 tidak ada penambahan.

Tabel II-100
Jumlah Hotspot Kota Payakumbuh Tahun 2013–2017

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Hotspot	Unit	1	1	10	15	15

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2018

2. Integrasi Sistem Informasi Teknologi

Untuk penyebarluasan informasi dan meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat, di kota Payakumbuh telah dapat diterima beberapa siaran radio nasional, lokal begitupun dengan TV lokal dan nasional.

Selanjutnya Pemko Payakumbuh juga terus berupaya meningkatkan pelayanan adminsitratif kepemerintahan dan layanan masyarakat melalui terintegrasi sistem informasi teknologi pada Sub Domain Web Resmi Kota Payakumbuh, yakni http://www.payakumbuhkota.go.id

Gambar II-35
Salah satu aplikasi terintegrasi, Aplikasi E-Sakip Kota Payakumbuh

Sistem informasi yang telah terintegrasi di Dinas Kominfo Kota Payakumbuh, terdiri dari

- Aplikasi e-Musrenbang, e-Pokir dan SIPKD
- Aplikasi Pengelolaan Jaringan Kota
- Aplikasi CCTV Jalan Raya
- Aplikasi SAKIP (Bagian Organisasi SETDAKO)
- Aplikasi Sicantik (DMD-PTSP)
- Aplikasi SIWARTA (Kominfo)
- Aplikasi SIWASPADA (Kominfo)
- Aplikasi Kliping (Kominfo)

- Aplikasi SIKOPAY (protokoler SETDAKO)
- SMS Centre RSUD (Dinas Kesehatan)
- Aplikasi SKP Online (BKPSDM)

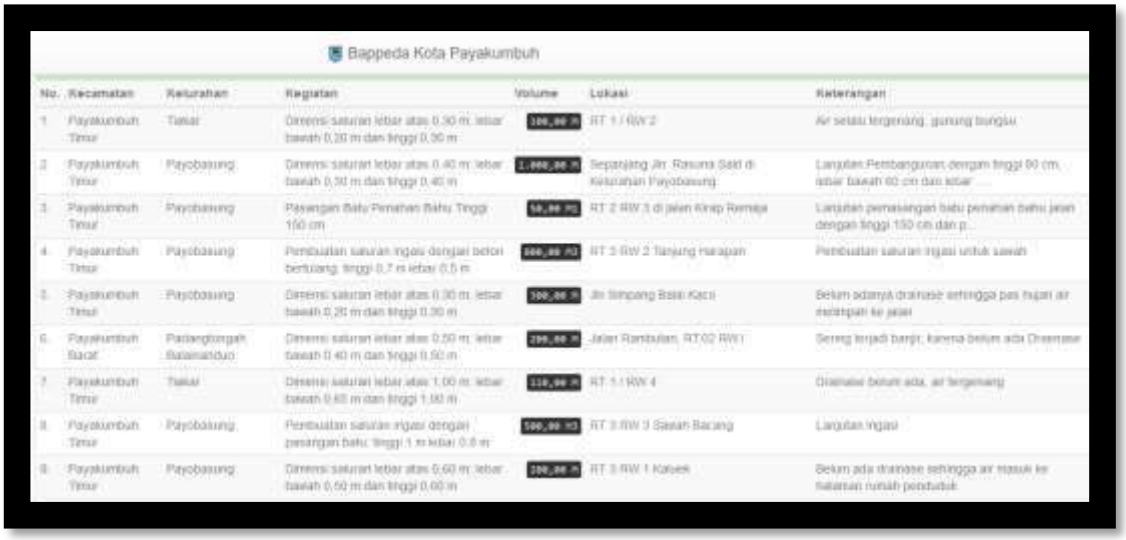

Gambar II-36
Salah satu aplikasi terintegrasi, Aplikasi E-Musrenbang Kota Payakumbuh yang terintegrasi dengan E-Pokir DPRD, SIPPD dan SIPKD

K. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Persentase Koperasi Aktif dan Koperasi Sehat

Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi di Kota Payakumbuh. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi daerah berbasis kerakyatan. Jumlah koperasi pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami penambahan sebanding dengan jumlah koperasi aktif yang ada.

Tabel II-101
Perkembangan Koperasi Kota Payakumbuh Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah koperasi aktif	120	121	123	126	133
2.	Jumlah koperasi	150	151	153	158	144
3.	Persentase koperasi aktif	80	80,1	80,3	81	92,4
4.	Persentase koperasi sehat	9,09	9,85	10,61	11,36	12,03

Sumber:Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, 2018

2. Jenis Koperasi

Jenis koperasi di Kota Payakumbuh cukup beragam, yang dominan adalah Koperasi Serba Usaha, kemudian Koperasi Fungsional dan Koperasi Tani. Jenis dan jumlahnya digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel II-102
Jenis Koperasi Kota Payakumbuh Tahun 2013-2017

No	Jenis koperasi	2013	2014	2015	2016	2017
1	Koperasi Unit desa	5	5	5	5	5
2	Koperasi Fungsional	43	43	43	43	43
3	Koperasi Karyawan	8	8	8	8	8
4	Koperasi serba Usaha	48	51	51	53	43
5	Koperasi wanita	7	7	7	7	7
6	Koperasi Tani	20	20	20	20	15
7	Koperasi Pondok Pesantren	2	2	2	2	2
8	Koperasi Simpan Pinjam	5	5	5	5	6
9	Koperasi Angkutan Darat	1	1	1	1	1
10	Koperasi Pasar	2	2	2	2	0
11	Koperasi Peternak Sapi	2	2	2	2	2
12	Koperasi PEPABRI	1	1	1	1	1
13	Koperasi WERDATAMA	1	1	1	1	1
14	Koperasi Veteran	1	1	1	1	1
15	Koperasi Kepolisian	1	1	1	1	1
16	Koperasi Pedagang Kaki Lima	1	1	1	1	1
17	Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah	5	5	5	5	5
	JUMLAH	**150**	**153**	**156**	**158**	**144**

Sumber:Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, 2018

3. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Usaha kecil dan menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Semakin banyak jumlah UMKM menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UMKM. Pada tahun 2017persentase UMKM di Kota Payakumbuh mengalami peningkatan menjadi 27,14% dari 10,82% pada tahun 2016.

Tabel II-103
Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2013-2017

Jenis usaha	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Usaha Mikro	Unit	14.529	14.935	34.814	32.751	15.262
Usaha Kecil	Unit	5.035	5.217	4.021	5.225	5.471
Usaha Menengah-Besar	Unit	202	207	204	210	214
Persentase UKM terhadap UMKM	%	26,44	26,64	10,82	16,60	27,14
Total UMKM	Unit	19.806	20.359	39.039	38.186	20.947

Sumber: Dinas Koperasidan UKM Kota Payakumbuh, 2018

L. Penanaman Modal

Kinerja pembangunan daerah Kota Payakumbuh pada urusan Penanaman Modal dapat digambarkan melalui indikator jumlah investor, nilai investasi dan rasio daya serap tenaga kerja.

Tabel II-104
Perkembangan Penanaman Modal Kota Payakumbuh Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	investor	4	1	11	28	23
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	milyar	18,5	12,7	37,1	134,7	112,08
3	Nilai realisasi investasi	milyar	207,3	124,4	160,2	240,7	229,3
4	Kenaikan /penurunan nilai realisasi investasi	milyar	74	(-76)	36	14,8	54,3
5	Lama proses perijinan	hari	14	14	7	7	7

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, 2018

Untuk mendukung iklim usaha di Kota Payakumbuh, maka Pemerintah Kota Payakumbuh mengeluarkan regulasi terkait Izin usaha konstruksi pada tahun 2014 (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014) dan regulasi terkait penanaman modal pada tahun 2017 (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017).
Selanjutnya dalam upaya peningkatan pelayanan perizinan di Kota Payakumbuh, Pemerintah Kota bertekad akan membangun Mall Pelayanan Publik yang akan memberikan layanan atas beberapa jenis perizinan dari 44 jenis perizinan yang ada di Kota Payakumbuh. Dengan beridinya Mall Pelayanan Perizinan ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendirikan usaha, meningkatkan potensi investasi dan kesejahteraan masyarakat di Kota Payakumbuh.

Gambar II-37
Salah Satu Model Mall Pelayanan Publik Yang Akan Dibangun Pemko Payakumbuh

Tabel II-105
InformasiPotensidanKawasanInvestasiKotaPayakumbuh Tahun 2017

DataPotensiInvestasi	DataKawasanPotensiInvestasi
A. Peluang Investasi Bidang Industri	
1. IndustriPakanTernak	Lingkar Utara Kel.Padang Sikabu(1Ha)
2. Industri pengelolaan sampah terpadu	TPA Taratak Kel. Kapalo KotoPayakumbuh Selatan
3. Industripengelolaan kakao	TPA Taratak Kel. Kapalo KotoPayakumbuh Selatan
4. Industripengelolaan sirsak	TerminalAgribisnisKel.KotoPanjangPayakumbuh Timur.
5. Industri pengelolaan daging	Terminal AgribisnisKel.KotoPanjangPayakumbuh Timur+Lokasi RPHKel.KotoPanjangPayakumbuh Timur.
B. Peluang Investasi Bidang Pendidikan	
1. KawasanPendidikanIslam Terpadu	- Kel. KotoBaru Kec. PayakumbuhTimur (15Ha) - Kec. Payakumbuh Selatan(6Ha) - Kec. Payakumbuh Utara (6Ha)
C. Peluang Investasi Bidang Pariwisata	
1. Pembangunan Objekwisata Bukik	Bukik Patah Sembilan Kel. Padang Alai Kec. Payakumbuh Timur
2. Pengembangan ObjekWisata Batang Agam	Sepanjang Kawasan Batang Agam
3. PembangunanPariwisata Embung Bulakan	Kel. LimbukanPayakumbuh Selatan
4. Paketwisata ngalauampangan	- Kel. Ampangan, Kec. PayakumbuhSelatan(20Ha) - Kel. Pakan SinayanKec. Payakumbuh Barat
5. Pembangunanstadion sepak bola bertaraf internasionaldansport center	TaratakKel.Kapala Koto Kec.PayakumbuhSelatan

Sumber:DPMPTSP Kota Payakumbuh, 2018

Sedangkan untuk investasi dalam bentuk kerjasama kemitraan dengan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh adalah:

- Parkir Pasar Kota Payakumbuh
- Pengelolaan TPA Taratak Kelurahan Kapalo Koto Payakumbuh Selatan (2 Ha)
- Embung Bulakan Kelurahan Limbukan Payakumbuh Selatan

M. Kepemudaan dan Olahraga

1. Jumlah Atlet Berprestasi

Jumlah atlet berprestasi di Kota Payakumbuh dilihat dari capaian prestasi pada Pekan Olah Raga Provinsi yang dilaksanakan pada tahun 2016 lalu, rinciannya sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini.

Tabel II-106
Prestasi Olahraga Tahun 2017

No	Cabang Olah Raga	Prestasi (Jumlah Medali)	
		PORPROV 2016	Nasional 2017
1	Angkat Berat	11	-
2	Atletik	2	-
3	Balap Sepeda	3	-
4	Bola Basket	1	-
5	Bola Volly	1	-
6	Billyard	4	-
7	Bulu Tangkis		Juara III O2SN Nasional
8	Catur	5	1
9	Dayung	7	-
10	Judo	15	-
11	Karate	8	24
12	Kempo	4	
13	Menembak	4	-
14	Panjat Tebing	2	-
15	Pencak Silat	8	-
16	Renang	9	-
17	Senam	15	-
18	Sepak Bola	1	-
19	Sepak Takraw	1	-
20	Taekwondo	4	7
21	Tarung Drajat	4	-
22	Tenis Lapangan	4	-
24	Tinju	7	2
25	Wushu	11	-
26	Aero Sport	9	2
27	Soft Tenis	3	-
28	Panahan	4	-
29	Muaythai	2	-

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh, 2018

2. Sarana dan Prasarana Olahraga

Jumlah sarana dan prasana olah raga di Kota Payakumbuh cukup signifikan, namun kualitasnya belum representatif untuk even-even skala nasional.

Terkait pembangunan sarana olahraga di Kota Payakumbuh yang representatif, terdapat pula rencana penyiapan spot wilayah yang parallel pengerjaannya dengan pembangunan Normalisasi jalan **sepanjang Sungai Batang Agam** sejal tahun 2017 lalu. Dalam wilayah normalisasi tersebut pada area kelurahan Tanjung Pauh telah dibebaskan lahan seluas 4,5 hektar untuk dibangun Stadion Olahraga. Lahan tersebut direncanakan pula akan dibangun stadion olahraga melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019.

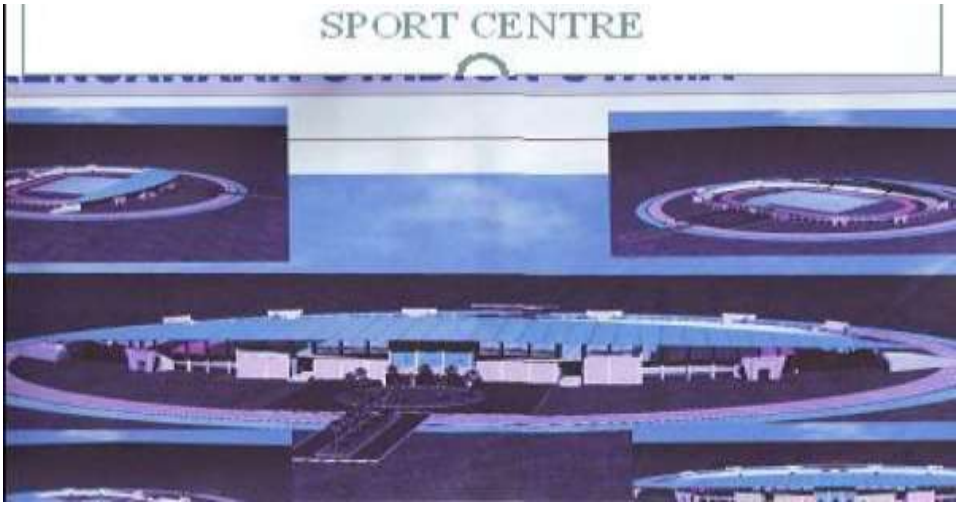

Gambar II-38
Rencana Sport Center Yang Akan Dibangun di Area Sungai Batang Agam Kota Payakumbuh

Selanjutnya terkait jenis sarana dan prasarana olahraga yang ada sampai saat ini di wilayah Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

Tabel II-107
Sarana Prasarana olahraga Tahun 2017

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Lokasi
1	Lapangan Sepak Bola	10 Lapangan	Sawah Padang; Kubu Gadang; Sicincin Mudiak; Subarang Batuang; Parambahan; Padang Kaduduak; Talawi; Balai Jariang Utara; SMAN 2; SMAN 3
2	Lapangan Basket	20 Lapangan	Kubu Gadang; Daya Bangun; SMPN 1; SMPN 2; SMPN 3; SMPN 4; SMPN 5; SMPN 6; SMPN 7; SMPN 8; SMPN 9; SMAN 1; SMAN 2; SMAN 3; SMAN 4; SMAN 5; SMKN 1; SMKN 2; SMKN 3; Ngalau Indah Medan Nan Bapaneh
3	Lapangan Volley	53 Lapangan	Kubu Gadang (GOR); Balai Jariang Timur; SMPN 1; SMPN 2; SMPN 3; SMPN 4; SMPN 5; SMPN 6; SMPN 7; SMPN 8; SMPN 9; SMPN 10; SMAN 1; SMAN 2; SMAN 3; SMAN 4; SMAN 5; SMKN 1; SMKN 2, sebanyak 2 bh;SMKN 3; SMKN 4; SMKN 5; Padang Cubadak; Nan Kodok; Polsek Kaning Bukit; Payolinyam; Cubadak Air; Padang Kaduduak; Tarok; Balai Betung; Bodi; Muaro; Balai Gadang; Balai Cacang; Balai Baru; Labuah Baru; Talawi; Parambahan; Sicincin; Payolansek; Padang Tiakar Hilir; Kubu Gadang (Jl. Jeruk); Balai Gadang; Balai Nan Duo; Aur Kuniang; Kubu Gadang (Dekat PHI); Koto Baru Payobasuang; Napar; Tanah Mati; Ibuh; Tambago; Bonai;
4	Lapangan Bulu Tangkis	36 Lapangan	Ibuh; GOR M. Yamin; Jax's Bonai Tanjung Gadang; Polsek Kota Kaniang Bukit; Kaning Bukit; SMAN 2, Indoor 2 bh; SMKN 2 indoor, 3 bh; GOR Kantor Bupati 50 Kota Lama; Balai Jariang Timur; Nan Kodok; Payolinyam; Cubadak Air; Padang Kaduduak; Tarok; Balai Betung; Muaro; Balai Gadang; Balai Baru; Labuah Baru; Padang Cubadak; Talawi; Parambahan; Sicincin; Payolansek; Balai Gadang; Balai Nan Duo; Aur Kuniang; Koto Baru Payobasuang; Tanah Mati; Padang Karambia; Koto Baru Balai Janggo; Padang Tinggi

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Lokasi
5	Lapangan Tenis	6 Lapangan	Tenis Indoor Kubu Gadang, 2 bh; Tenis Outdoor Kubu Gadang, 2 bh, Tenis Outdoor SMAN 2,Tenis Outdoor MAN 2, Tenis Outdoor Batalyon 131 BS, Tenis Outdoor SMAN 3
6	Lapangan Atletik	2 Lapangan	Gelanggang Kubu Gadang, Lapangan Sicincin
7	Kolam Renang	1 Lapangan	Ngalau Indah
8	Gelanggang/ Balai Remaja	4 Lapangan	Ngalau Indah; Gelanggang Kubu Gandang; GOR M. Yamin; Medan Nan Bapaneh Ngalau Indah
TOTAL		**131**	

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh, 2018

3. Organisasi Pemuda

Organisasi pemuda di Kota Payakumbuh rata-rata sudah mandiri dan jumlahnya selalu meningkat sampai tahun 2017.

Tabel II-108
Jumlah Organisasi Pemuda Kota Payakumbuh yang Aktif Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Organisasi Pemuda yang Mandiri	10	20	30	50	50

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh, 2018

N. Statistik

Sampai saat ini Kota Payakumbuh belum memiliki sistem aplikasi data secara elektronik, sehingga belum terwujud pengarsipan data tahunan yang tertata dengan baik. Ini mengakibatkan sulitnya updating data dan terjadinya perubahan data setiap tahun yang disampaikan oleh penyedia data. Sistim aplikasi yang digunakan saat ini adalah aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang dikelola secara nasional oleh Kementerian Dalam Negeri dan Sistim Database Perencanaan Pembangunan Daerah (SDP2D) yang dikelola oleh Provinsi Sumatera Barat. Dari kedua aplikasi ini justru terjadi persoalan yang mana jenis data yang tersedia dalam aplikasi tidak menggambarkan kondisi lokal kedaerahan, sehingga banyak elemen data yang tidak terisi. Seharusnya Pemerintah Kota Payakumbuh memiliki sebuah sistim aplikasi data terpadu yang terintegrasi dengan semua Perangkat Daerah. Kondisi di atas menyebabkan kurangnya ketersediaan data untuk kebutuhan perencanaan dan penelitian. Tingkat ketersediaan data untuk perencanaan baru sekitar 80%. Ini menandakan bahwa masih ada kekurangan data untuk perencanaan yang bisa berdampak pada kurangnya kualitas perencanaan pembangunan.

O. Kebudayaan

Kebudayaan adalah sesuatu yang memengaruhi pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan bersifat abstrak Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan

hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

Tabel II-109
Perkembangan Kinerja Urusan kebudayaan Kota PayakumbuhTahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Pameran/ Expo per tahun	Kali	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Penyelenggaraan Festival seni dan Budaya	Kali	4	4	5	6	7
3.	Jumlah Sarana penyelenggaraan Seni dan Budaya	Buah	1	1	2	2	2
4.	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yg dilestarikan	Unit	18	18	20	22	22
5.	Total benda, situs dan kawasan yg dimiliki	Unit	18	18	20	22	22
6.	Jumlah Grup Kesenian yang Aktif	Grup	1	33	62	36	50

Sumber:Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh, 2018

P. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan salah satu sarana pembelajaran untuk mencerdaskan bangsa. Perpustakaan memiliki peranan penting sebagai jembatan menuju penguasaan ilmu pengetahuan sekaligus menjadi tempat rekreasi yang menyenangkan dan menyegarkan. Perpustakaan memberi kontribusi penting bagi terbukanya informasi tentang ilmu pengetahuan.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, perpustakaan harus menjadi sarana aktif/interaktif dan menjadi tempat dihasilkannya berbagai hal baru. Untuk mewujudkan kondisi perpustakaan sesuai dengan fungsi dan peranannya, maka perpustakaan harus diubah sistem operasionalnya dari perpustakaan manual/tradisional menjadi perpustakaan yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi (perpustakaan digital). Konsep pengembangan kepustakaan di Kota Payakumbuh mengambil prinsip "**Literasi Menuju Kesejahteraan**", prinsip ini mengupayakan peningkatan budaya baca ditengah-tengah masyarakat.

Dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi diharapkan setiap perpustakaan secara bertahap dapat mengejar ketertinggalannya dari perpustakaan-perpustakaan yang lebih maju dan lebih modern serta dapat mengoptimalkan fungsi perpustakaan bagi masyarakat. Selain hal tersebut diperlukan suatu manajemen pengelolaan yang sesuai dengan standar dalam mengelola perpustakaan. Untuk tahun 2017,terlihat bahwa judul koleksi buku yang ada pada perpustakaan dibandingkan dengan jumlah buku, persentasenya masih rendah yaitu dibawah 55%. Hal ini berarti masih terbatasnya judul koleksi buku yang ada diperpustakaan. Kemudian dari jumlah perpustakaan yang ada ternyata masih jauh dari target populasi yang harus dilayani.

Tabel II-110

Perkembangan Perpustakaan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013-2017

No	Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eks	3.830	4.082	4.579	5.129	5.351
	Jumlah Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eks	9.513	10.010	10.788	11.890	12.375
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	40,26	40,78	42,45	43,14	43,24
2	Kunjungan perpustakaan	orang	4.666	4.765	4.344	4.559	8.850
	Orang dalam populasi yang harus dilayani	orang	50.000	50.000	50.000	50.000	91.672
	Pengunjung perpustakaan	%	9,33	9,53	8,69	9,12	9,66
3	Jumlah perpustakaan	unit	32	36	37	38	37

Sumber:Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Payakumbuh, 2018

Q. Kearsipan

Arsip merupakan dokumen otentik dan legal tercipta karena pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelaksanaan kehidupan kebangsaan. Arsip juga merupakan akuntabilitas kinerja aparatur yang dapat dijadikan sebagai saksi abadi terhadap keberhasilan dan kegagalan tugas aparatur negara. Arsip juga dapat dijadikan sebagai budaya dan sejarah. Untuk itu arsip harus diselamatkan dan dikelola dengan baik. Di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, urusan kearsipan diselenggarakan oleh kantor Arsip dan Perpustakaan. Pengelolaan kearsipan bertujuan untuk tracking surat/arsip serta memudahkan pencarian, pendokumentasian data secara baik, tepat dan akurat serta menjaga data tersimpan dengan baik.

1. Pengelolaan Arsip

Tabel II-111

Perkembangan kerasipan di Kota Payakumbuh Tahun 2013-2017

No	Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku	Perangkat Daerah	-	-	1	3	5
2.	Jumlah Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	30	30	31	31	31
3.	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	%	-	-	3,33	10,00	16,13
4.	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	-	-	1	1	1

Sumber:Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Payakumbuh, 2018

Dari tabel di atasterlihat hampir semua Perangkat Daerah(PD) di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh yang menerapkan arsip secara baku. Hal ini menandakan adanya keseriusan dari pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan arsip secara tertib, walaupun baru dilaksnakan oleh lembaga kerasipan daerah hal ini disebabkan karenasumber daya yang mengelola kearsipan di masing-masing PD masih terbatas. Yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari SDM yang mengelola arsip di setiap PD, karena dari Tabel di atas pada tahun 2013-2014 tidak ada kegiatan peningkatanuntuk peningkatan

SDM pengelola kearsipan,mulai tahun 2015 baru ada kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan.

2. SDM Pengelola Kearsipan

Arsip merupakan dokumen yang harus tersimpan sebagai bukti historis dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Jumlah arsip yang harus dikelola di Kota Payakumbuh tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 meningkat dari 25.000 berkas menjadi 32.000 berkas. Namun kondisi ini tidak sebanding dengan jumalh pejabat fungsional arsiparis yang tersedia. Jumlah pejabat arsiparis ini dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 kondisinya tidak bertambah dimana hanya tersedia 2 orang. Kondisi ini sangat tidak ideal di saat jumlah arsip yang dikelola selalu meningkat setiap tahunnya.

Tabel II-112
Tabel Jumlah Arsip dan Pejabat Arsiparis pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2013-2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Arsip Daerah yang Harus Dikelola	berkas	25.000	26.500	29.000	29.000	31.818
2	Jumlah Pejabat Fungsional Arsiparis	orang	2	2	2	2	1

Sumber:Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Payakumbuh, 2018

2.1.3.4 Urusan Pilihan

A. Urusan Pariwisata

Potensi pengembangan pariwisata di Kota Payakumbuh kedepan cukup besar, baik dalam bentuk wisata alam, wisata budaya, wisata kuliner objek wisata alam yang cukup terkenal dikota ini antara lain adalah Ngalau Indah dan Panorama Ampangan. Untuk objek wisata budaya antara lain meliputi kebudayaan Minangkabau berikut kesenian asli rakyatnya sedangkan untuk wisata kuliner disepanjang Jalan Soekarno Hatta, Jalan Ahmad Yani dan Jalan Jenderal Sudirman Payakumbuh. Dilihat dari jumlah kunjungan wisata, jumlahnya cukup besar dan terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Meskipun jumlah kunjungan wisata cukup tinggi, namun memberikan kontribusi yang cukup berarti kepada perekonomian daerah. Hal ini disebabkan karena jumlah wisatawan yang tercatat umumnya merupakan wisatawan lokal dan regional yang tidak menginap di Kota Payakumbuh.

1. Kunjungan Wisata

Salah satu indikator kinerja kepariwisataan adalah tingkat kunjungan wisata. Capainnya selama kurun waktu perencanaan cenderung terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan jumlah kunjungan wisata erat kaitannya dengan objek wisata dan event wisata yang menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung. Selain itu, untuk melihat peran sektor kepariwisataan terhadap daerah dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB. Walaupun kontribusinya relatif kecil, namun ada kecenderungan peningkatan.

Tabel II-113
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Kota Payakumbuh Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Kunjungan wisata	Orang	105.870	116.648	129.963	166.017	187.133
	Kunjungan wisata Asing	Orang	100	108	1.156	2.355	3.107
	Kunjungan wisata Domestik	Orang	105.770	116.540	128.807	163.662	182.959
2	Jumlah objek wisata unggulan	buah	1	1	1	1	1
3	Jumlah restoran, rumah makan dan warteg	Unit	94	113	138	161	183
4	Jumlah event pariwisata dan budaya yang terlaksana	kali	16	16	11	16	16
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	0,94	0,94	0,95	0,95	1,00

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh, 2018

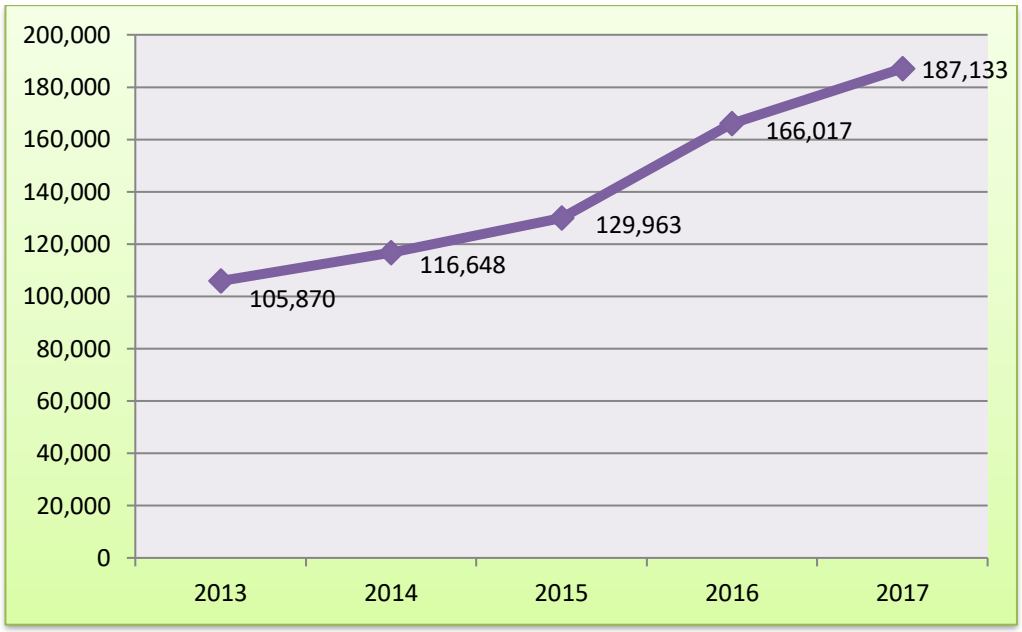

Gambar II-39
Jumlah Kunjungan Wisata Asing dan Domestik di Kota Payakumbuh Tahun 2013-2017
Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh, 2018

Gambar diatas memaparkan bahwa kunjungan wisata di Kota Payakumbuh cenderung mengalami peningkatan yang cukup baik. Peningkatan ini sejalan dengan mulai atraktifnya potensi wisata di Payakumbuh yang meliputi destinasi wisata alam dan wisata event/kegiatan di Payakumbuh.

Tabel II-114
Jumlah Tamu Menginap Di Hotel/Wisma Kota Payakumbuh

No	Nama Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur	Jumlah Tamu Menginap
1	Hotel Mangkuto	46	67	15.800
2	Hotel Bundo Kanduang	50	95	6.113
3	Wisma Flamboyan	9	18	1.703
4	Hotel Ngalo De Villa	22	47	203
5	Hotel Kolivera I	15	30	4.640
6	Hotel Kolivera II	15	26	3.222
7	Hotel Kolivera III	16	26	3.654
8	Hotel Sari I	19	42	3.112
9	Hotel Pondok Bambu	19	21	4.506
Jumlah		211	372	42.953

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh, 2018

Kondisi sampai dengan tahun 2017, perhotelan di Kota Payakumbuh masih didominasi maksimal hotel kelas Melati III. Kondisi ini membuka potensi Investasi di Payakumbuh seiring dengan peningkatan kunjungan wisata sebagaimana tercantum pada Gambar II-39 diatas untuk pendirian hotel berbintang di Payakumbuh.

2 Atraksi Wisata

Salah satu daya tarik wisatawan untuk datang adalah atraksi wisata yang diadakan, pada tahun 2016 terjadi penurunan jumlah atraksi wisata menjadi 11, namun tahun 2017 meningkat menjadi 22 atraksi.

Tabel II-115
Jumlah Atraksi Pariwisata Kota Payakumbuh Tahun 2013–2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Atraksi Wisata	N/A	16	16	11	22

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh, 2018

B. Urusan Pertanian

1. Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan di Kota Payakumbuh cukup tinggi setiap tahunnya sebagai konsekuensi pertumbuhan penduduk dan berubahnya fungsi lahan pertanian menjadi bangunan perumahan dan komersial. Dalam lima tahun terakhir perubahan fungsi lahan sebagaimana tergambar pada table di bawah ini. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, perlu penerapan RTRW yang ketat dalam perizinan dan penyusunan Perda tentang Pertanian Berkelanjutan.

Tabel II-116

Alih Fungsi Lahan Pertanian ke NonPertanian 2013-2017

No	Data Awal (Ha)	Alih Fungsi Lahan (Ha)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Lahan Pertanian Awal; 2751 Ha	2 Ha	3 Ha	2 Ha	3 Ha	1 Ha

Sumber: Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2018

Selain itu, penurunan tingkat kesuburan lahan juga perlu menjadi perhatian, karena dalam pantauan Dinas Pertanian, terdapat luasan lahan pertanian yang menurun tingkat kesuburannya sebagai akibat penggunaan pupuk dan pestisida yang berlelbihan serta pencemaran tanah oleh pesatnya industri dan perbengkelan.

Tabel II-117

Luasan Lahan yang Mengalami Penurunan Tingkat Kesuburan

Tahun 2013-2017

No	Jenis lahan	Luas lahan (ha)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Lahan basah	2 ha	3 ha	6 ha	6 ha	1 Ha
2	Lahan kering	1 ha	1 ha	2 ha	2 ha	1 Ha

Sumber: Dinas PertanianKota Payakumbuh, 2018

2. Potensi Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura

Potensi pertanian tanaman pangan dan hortikultura di wilayah Kota Payakumbuh beraneka ragam dan tersebar di seluruh kecamatan. Komoditas unggulan tanaman pangan dan hortikultura di Kota Payakumbuh terdiri dari padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang panjang, cabe, terung, ketimun, dan kakao merupakan komoditas yang sangat prospektif untuk dikembangkan komoditas hortikultura disamping untuk memenuhi kebutuhan lokal, komoditas hortikultura terutama sayur-sayuran telah dipasarkan ke luar provinsi Sumatera Barat. Lahan pertanian dari tahun 2013 sampai tahun 2017 terus mengalami penurunan karena telah banyak beralih fungsi menjadi area pemukiman dan pemanfaatan lahan untuk non pertanian. Namun dengan program intensifikasi pertanian seperti penggunaan benih unggul bermutu, dan penerapan teknologi anjuran sudah berkembang maka produktifitas komoditi pertanian dapat meningkat selama lima tahun terakhir. Pengembangan komoditas tanaman pangan dan hortikultura juga telah dibarengi dengan peningkatan dan pengembangan kelembagaan, akses permodalan dan pemasaran yaitu Gabungan Kelompok Tani, Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA), Terminal Agribisnis dan Sub Terminal Agribisnis (STA).

Tabel II-118
Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Kota Payakumbuh
Tahun 2013-2017 (ton)

No	Komoditas	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Produksi Padi	33.123	33.424	35.962	37.402	41.150
2.	Produksi Jagung	1.689	1.682	1.519	1.180	1.414
3.	Produksi Ubi Kayu	6.605	14.072	76.647	5.250	6.598
4.	Produksi Kacang panjang	218,8	317,0	305	252	387
5.	Produksi Cabe	236,9	370,5	390	973,9	606
6.	Produksi Terung	276,0	334,0	539.6	1.070,3	1.190
7.	Produksi Ketimun	471,9	539,7	688	1.469,8	1.671
9.	Produksi Kangkung	281	184	8.4	161,8	481
10.	Produksi Kakao	919,61	937,3	967.5	321,5	950

Sumber: Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2018

3. Produktifitas Peternakan

Kemajuan dibidang peternakan dapat dilihat dengan peningkatan populasi ternak, peningkatan produksi daging serta menurunnya berbagai penyakit ternak. Disamping dalam bentuk perkembangan populasi, produksi daging, telur dan susu dalam pembangunan peternakan juga dilakukan berbagai kegiatan yang bersifat penunjang seperti inseminasi buatan dan kegiatan pemeliharaan kesehatan. Perkembangan populasi dan produksi peternakan Tidak hanya dari sisi pengembangan produksi peternakan, Kota Payakumbuh juga telah menyiapkan Sentra Pemasaran Peternakan Terpadu, yang meintegrasikan lokasi Pasar Ternak, Rumah Potong Hewan (RPH), Laboratorium Percontohan, BPP dan instalasi Pengolahan Pakan di kawasan Kelurahan Koto Panjang Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur. Untuk meningkatkan produksi daging, Pemerintah Koto Payakumbuh juga mendirikan *breeding farm* di Kelurahan Kapalo Koto.

Tabel II-119
Produktifitas Peternakan Tahun 2013-2017

No	Ternak	2013	2014	2015	2016	2017
1	Sapi	4.075	5.520	5.699	5.536	5.675
2	Kerbau	296	859	383	189	170
3	Kuda	551	513	531	337	258
4	Kambing	5.875	5.459	5378	5.628	5.240
5	Ayam Kampung	89.588	106.092	83.061	50.728	45.134
6	Puyuh	232.000	219.250	207.800	123.650	192.000
7	Itik	67.855	70.267	87.622	58.964	57.324
8	Ayam Ras Petelur	737.500	751.500	737.250	788.300	1.045.800
9	Ayam Ras Pedaging	1.127.000	1.064.000	1.144.000	1.070.000	2.754.000

Sumber: Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2018

Tabel II-120
Perkembangan Produksi Daging dan Telur Tahun Kota Payakumbuh 2013-2017

No	Jenis Ternak dan Unggas (ekor)	Tahun (Kg)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Daging	**3.006.108**	**3.154.404**	**3.061.946**	**2.404.694**	**4.474.195**
	Daging Sapi	1.031.766	1.152.009	1.074.433	1.250.000	939.256
	Daging Kerbau	105.923	190.533	111.038	46.972	43.051
	Daging kambing	105.862	79.695	89.458	34.632	84.388
	Daging Kuda	13.440	13.440	18.060	7.770	7.350
	Daging ayam kambing	96.576	114.367	89.540	16.405	48.654
	Daging Ayam ras pedaging	1.059.380	1.000.159	1.075.360	497.918	2.525.780
	Daging ayam ras petelur	565.171	575.214	575.072	242.640	802.070
	Daging itik	27.990	28.985	28.985	308.357	314.709
2.	Telur	**5.729.653**	**5.857.687**	**5.794.692**	**6.060.000**	**7.181.078**
	Telur ayam ras	5.299.905	5.404.155	5.284.583	5.700.552	7.437.540
	Telur ayam kampung	57.224	67.766	53.055	32.403	28.829
	Telur itik	372.524	385.765	456.785	308.357	314.709

Sumber: Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2018

4. Dukungan Permodalan

Sebagai perwujudan peran Pemerintah dalam memfasilitasi perekonomian masyarakat, maka Pemerintah Kota Payakumbuh telah memberikan berbagai fasilitas di bidang pertanian kepada kelompok masyarakat petani yang membutuhkan pengembangan usaha dan permodalan.

Tabel II-121
Jumlah Usaha Pertanian Yang Membutuhkan Akses Permodalan
Tahun 2013-2017

No	Sub sektor	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Tanaman pangan	66	75	92	97	98
2	Hortikultura	34	37	40	44	46
3	Bunhut	8	9	11	14	14
4	Perikanan	15	14	14	21	21
5	Peternakan	77	87	89	99	100
6	Up3hp	4	4	4	4	4
7	Poklahsar	3	3	3	3	3

Sumber: Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2018

Tabel II-122
Jumlah Gapoktan yang Difasilitasi Permodalan Tahun 2013-2017

No	Jumlah Awal Gapoktan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	Jumlah awal yang di fasilitasi	32	32	32	32	32
1	Payakumbuh barat	7	7	7	7	7
2	Payakumbuh timur	7	7	7	7	7
3	Payakumbuh utara	4	4	4	4	7
4	Payakumbuh selatan	9	9	9	9	9
5	Latina	5	5	5	5	5

Sumber: Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2018

5. Pemanfaatan Teknologi Pertanian

Di samping itu, dalam meningkat produksi dan produktifitas sektor pertanian, juga telah difasilitasi penerapan teknologi pertanian kepada kelompok masyarakat petani, tidak hanya pada sektor pertanian saja, tapi juga pada sektor peternakan dan perikanan.

Tabel II-123
Jumlah Teknologi Anjuran Yang Telah Diterapkan

No	Sub sektor	Jumlah Teknologi (Paket)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Tanaman pangan	17	18	19	20	21
2	Hortikultura	15	17	19	21	22
3	Perkebunan	13	14	15	15	16
4	Peternakan	13	14	16	17	21
5	Perikanan	4	6	10	10	12

Sumber: Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2018

6. Pelaku Sektor Pertanian

Walaupun secara umum terjadi perubahan alih fungsi lahan pada sektor pertanian, namun minat masyarakat terhadap pertanian justru cukup menggembirakan. Ini ditandai dengan peningkatan jumlah kelompok usaha yang menggeluti sektor pertanian setiap tahunnya sebagaimana tabel di bawah ini. Namun, jika dilihat dari jumlah tenaga kerja pada sektor pertanian justru mengalami penurunan.

Tabel II-124
Perkembangan Kelompok Usaha Pertanian Tahun 2013-2017

No	Jenis usaha/ komunitas	Kelompok yang mengusahakan (kelompok)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Padi	162	166	167	175	175
2	Palawija	33	35	41	45	46
3	Hortikultura					
	- Sayuran	31	34	39	43	45
	- Buah-buahan	5	5	5	8	8
	- Tanaman hias	9	11	14	15	15
	- Biofarmaka	15	15	21	21	21
4	Peternakan					
	- Ternak besar	39	42	45	45	47
	- Unggas	31	32	36	40	40
5	Perikanan	6	8	2	2	3
6	Up3hp	6	6	6	6	6
7	Poklahsar	3	3	3	3	3
8	Perkebunan	18	20	23	24	24

Sumber: Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2018

Tabel II-125
Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian Tahun 2013-2017

No	Sektor	Tenaga Kerja (org)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Tanaman pangan	22.903	22.706	22.547	22.180	22.150
2	Hortikultura	3.512	3.596	3.628	3.697	3.700
3	Perkebunan	1.957	1.903	1.878	1.848	1.840
4	Peternakan	8.984	9.053	9.198	9.242	9.334
Jumlah		37.356	37.258	37.251	36.967	37.024

Sumber:Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2018

Tabel II-126
Jumlah Tenaga Penyuluh Berdasarkan Keahlian Tahun 2013-2017

No	Jenis Keahlian	Jumlah (org)				
		2013	2014	2015	2016	2017
Pegawai Negeri Sipil						
1	Tanaman pangan	16	16	16	16	19
2	Peternakan	14	14	14	14	14
3	Perkebunan	1	1	1	1	1
4	Penyuluhan					
	- Pertanian	4	3	3	3	3
	- Peternakan	2	2	2	2	2
	- Perikanan	3	3	3	3	3
Tenaga Harian Lepas						
S1						
5	Tanaman pangan	6	6	6	6	-
6	Peternakan	1	1	1	1	-
D3						
7	Tanaman pangan	4	4	4	4	-
	SMK					
8	Tanaman pangan	5	5	5	5	-
9	Peternakan	10	10	10	10	7
THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian						
10	Tanaman pangan	8	8	8	8	19
11	Peternakan	12	12	12	11	9

Sumber:Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2018

C. Urusan Perdagangan

Perdagangan di Kota Payakumbuh sangat berperan penting dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan sumber daya lokal serta mengembangkan usaha kecil, mikro dan koperasi. Sektor perdagangan di Kota Payakumbuh terus mengalami peningkatan yang diiringi dengan adanya peningkatan infrastruktur, kejelian pemasaran dari masyarakat dalam membaca peluang, dan lembaga keuangan penyandang dana pinjaman yang ada serta pembinaan pemerintah dalam memotivasi usaha masyarakat.

Tabel II-127
Perkembangan Sarana Perdagangan Kota Payakumbuh Tahun 2013-2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Pasar (Pasar Tradisional, modern, swalayan, kios, toko)	unit	4.237	4.252	4.246	4.260	4.272
2	Pasar Tradisional (Ibuh)	unit	2	2	2	2	2
3	Pasar Lokal (Pusat Pertokoan)	unit	1	1	1	1	1
4	Mall	buah	1	1	1	1	1
5	Pasar Swalayan	buah	16	12	15	15	15
6	Kaki lima	buah	2.301	2.301	2.261	2.261	2.261

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Perindag Kota Payakumbuh, 2016

Dalam rangka mewujudkan Program Pasar Sehat telah dijalin beberapa bentuk kerjasama dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal. Beberapa nota kesepakatan kerjasama yang disepakati antara lain adalah dengan Yayasan Danamon Peduli dalam bentuk bantuan program dan sarana pendukung untuk terwujudnya lingkungan pasar yang sehat dan kerjasama dengan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Kota Payakumbuh untuk menata dan merealisasikan Pasar Kuliner Malam yang sehat dan representatif.

2.4.3.4 Urusan Perindustrian

Lapangan usaha industri pengolahan tahun 2016 berkontribusi sebesar 5,63% terhadap PDRB Payakumbuh dengan laju pertumbuhan cukup tinggi yaitu 7,24%. Jumlah industri selama beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi pertumbuhan. Berfluktuasinya perkembangan industri di Kota Payakumbuh karena industri yang berkembang masih banyak yang berskala rumah tangga dan berskala mikro, kecil, menengah atau *Home Industry* yang dikelola baik secara formal maupun informal, sehingga rentan sekali untuk beralih usaha ke sektor lain jika ditimpa krisis. Industri rumah tangga (*Home Industry*) yang banyak digeluti masyarakat adalah jenis makanan ringan, seperti gelamai, beras rendang, rendang telur, rendang runtiah, kerupuk sanjai, karak kaliang dan jenis kerupuk lainnya.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan pemasaran produk industri ini antara lain melalui kegiatan promosi di pondok promosi serta melalui program *one produk one vilage* (OVOP) yang direalisasikan dengan mendirikan sentra kampung rendang, kampung tenun, sentra makanan ringan dan kampung kerajinan bambu. Kedepan, diharapkan lapangan usaha industri pengolahan yang menggunakan bahan baku dari produk pertanian bisa semakin berkembang sehingga selain untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian juga tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha pertanian khususnya, dan lapangan usaha lainnya dapat diserap oleh lapangan usaha industri.

1. Perkembangan Industri

Tabel II-128
Perkembangan Industri Tahun 2013-2017 Kota Payakumbuh

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Unit Usaha	Unit	1.569	1.616	1.763	1.737	1.793
2.	Formal	unit	230	274	503	503	594
3.	Non Formal	unit	933	1.337	1.260	1.260	1.369
4.	Tenaga Kerja	orang	9.063	5.724	6.410	5.630	4.486
5.	Nilai Investasi	Rp.	85.763.000	85.763.000	86.366.384	86.366.384	86.567.512
6.	Nilai Produksi	Rp.	208.654.000	234.880.000	230.967.00	325.430.000	364.355.333

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, 2018

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai produksi sektor perindustrian selalu meningkat dalam lima tahun terakhir.

2. Kapasitas Produksi

Tabel II-129
Kapasitas Produksi Tahun 2017

Jenis Industri	Unit Usaha	Kapasitas Produksi (Unit/ Tahun)	Nilai Produksi (Rp.000/ Tahun)
Industri kerupuk dan sejenisnya	285	3.698.034	5.904.649
Industri penggilingan padi	54	2.259.444	3.140.550
Industri kue basah	243	6.737.298	2.939.501
Industri makanan yang belum termasuk kelompok manapun	75	326.484	1.804.760
Industri furniture dari kayu	87	55.104	1.675.836
Industri percetakan	33	216.358.704	1.315.700
Industri roti dan sejenisnya	53	1.968.558	1.213.432
Industri air minum dalam kemasan/ air isi ulang	82	1.068.432	1.132.560
Industri anyam-anyaman dari rotan dan bambu	124	450.408	830.500
Industri barang-barang dari semen	75	899.580	786.514
Industri batu bata dari tanah liat	46	5.161.800	466.860
Industri pengolahan dan pengawetan daging	11	1.609	462.750
Industri makanan dari kedele dan kacang-kacangan lainnya selain kecap dan tempe (industri tahu)	28	268.824	416.432
Industri penggergajian kayu	2	5.484	314.000
Industri alat-alat dapur dari kayu, rotan dan bambu	1	480	180.000
Industri bumbu masak dan penyedap makanan	9	40.656	172.700
Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran	13	135.672	161.295
Industri pelumatan buah-buahan dan sayuran	11	153.336	158.000
Industri berbagai macam tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian dan sejenisnya	14	82.788	151.740
Industri peti kemas dari kayu kecuali peti mati	10	2.700	150.000
Industri kerajinan dan ukir-ukiran dari kayu kecuali furniture	4	1.800	140.000

Industri ransum pakan ternak/ikan	5	187.200	86.600
Industri minuman ringan (soft drink)	5	36.672	79.000
Industri es (macam-macam es)	5	32.400	74.470
Industri barang dari batu untuk keperluan rumahtangga dan pajangan	2	21.600	69.000
Industri pengolahan teh dan kopi	5	30.000	56.150
Industri kapur	2	58.800	51.125
Industri pengeringan dan pengolahan tembakau	3	19.440	47.840
Industri tempe	2	36.720	39.000
Industri makaroni, mie, spagheti, bihun, soun dan sejenisnya	3	7.800	38.000
Industri susu	2	1.560	29.000
Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumahtangga termasuk pasta gigi	2	1.248	20.250
Industri jasa reparasi kendaraan bermotor (mobil)	93	62.976	2.363.855
Industri barang-barang logam bukan alumunium siap pasang untuk bangunan	66	21.852	1.316.840
Industri jasa bengkel/ reparasi sepeda motor	78	18.852	1.110.170
Industri pakaian jadi dari tekstil	35	68.160	735.950
Industri barang tekstil jadi kecuali untuk pakaian jadi	34	119.700	642.000
Industri pemeliharaan dan perbaikan elektronik	16	27.000	367.600
Industri kerajinan yang tidak termasuk golongan manapun	30	48.792	358.050
Industri jasa reparasi kendaraan bukan bermotor (sepeda)	29	7.104	351.070
Industri bordir / sulaman	12	6.528	318.150
Industri jasa perorangan lainnya	9	45.348	191.200
Industri pengolahan lainnya yang belum termasuk golongan manapun	6	6.096	181.600
Industri Furnitur dari logam	10	468	168.150
Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi	3	168	110.000
industri kain rajut	2	1.464	65.000
Industri alat pertukangan dari logam	2	60	30.250
Industri alat pertanian dari logam	2	302	30.000
Industri Pertenunan	3	192	21.000
Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari	1	720	18.000
Industri mesin pertanian dan kehutanan	2	156	17.500
Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	2	12	10.000
Industri mainan	1	192	10.000
Industri alat musik tradisional	2	1.140	9.500
Industri penempaan pengepresan dan penggilingan logam	1	480	8.000
Industri alat-alat dapur	2	2.820	260
Jumlah	**1.737**	**240.551.217**	**32.542.359**

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, 2018

E. Kelautan dan Perikanan

Kemajuan pembangunan perikanan dapat dilihat dengan peningkatan produksi perikanan budidaya ikan konsumsi, peningkatan produksi penih ikan dan peningkatan penangkapan ikan di perairan umum.Kegiatan pembangunan di bidang perikanan secara umum adalah bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan mayarakat Kota Payakumbuh akan protein hewani dari ikan. Sampai saat ini walaupun produksi perikanan mengalami peningkatan dari tahun ketahaun tapi untuk pemenuhan kebutuhan Kota Payakumbuh sebagian besar masih didatangkan dari daerah lain seperti dari Danau Maninjau, Waduk Koto Panjang, Rao (Pasaman), Padang Pariaman, Pulau Gadang (Bangkinang), Mudiak (Limapuluh Kota).

Tabel II-130
Perkembangan Populasi, Produksi dan Kegiatan Perikanan Kota Payakumbuh Tahun 2013-2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	**Rumah Tangga Pembudidaya ikan**						
	• Pembudidaya ikan kultur (sambilan utama)	RT	698	698	698	698	698
	• Pembudidaya Ikan Kultur (sambilan tambahan	RT	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513
	• Penangkap ikan	RT	-	38	38	38	38
2	**Produksi Benih Ikan**						
	• Luas Kolam	ha	4,4	4,4	4,4	6,3	6,3
	• Produksi	Juta ekor	6.092	6.092	6.092	8.358	10.865
3	**Produksi Pembudidayaan Ikan Rakyat (Ikan Konsumsi)**						
	• Luas Kolam	Ha	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	• Produksi	Ton	6.092	6.092	6.092	8.358	10.865
4	**Penangkapan Ikan di Perairan Umum**						
	• Luas Kolam	Ha	38,95	38,95	38,95	38,95	201,73
	• Produksi	Ton	9,94	4,9	5,6	6,2	482,25

Sumber: Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2018

Aktivitas budidaya perikanan darat di Kota Payakumbuh melalui budidaya kolam air deras, kolam air tenang, keramba, dan perairan umum. Jenis ikan yang banyak dibudidayakan antara lain ikan nila, ikan lele, ikan mas, dan ikan gurami. Dalam peningkatan kegiatan budidaya dalam rangka peningkatan produksi juga diiringi dengan penyediaan benih unggul, pakan yang murah dan jaminan pasar melalui kegiatan pengolahan. Secara lebih lengkap perkembangan populasi, produksi dan kegiatan perikanan dapat dilihat pada tabel berikut. Adanya kenaikan luas dan produksi budidaya ikan didukung dengan adanya Balai Benih Ikan (BBI) sebanyak 1 unit dan Unit Pembenihan Ikan Rakyat (UPR) sebanyak 4 unit, serta didukung dengan pengembangan pabrik pakan ikan.

Tabel II-131

Jumlah Produksi Perikanan Kota Payakumbuh Tahun 2013 - 2017

No	Jenis produk	Satuan	Produksi				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Produksi Perikanan	Ton	436,4	485,74	512,35	433,27	482,25
2	Produk Olahan Perikanan	Ton	12,5	15	17,9	18,3	20
3	Benih Perikanan	Ribu ekor	6.092	6.092	6.512	8.632	10.865

Sumber: Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2018

2.1.3.4 Penunjang Urusan

A. Perencanaan

Tabel II-132

Tabel keselarasan dokumen perencanaan dan realisasi pembangunan

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	%	90	91,57	95,64	95,69	95,80
2.	Persentase Realisasi Rencana Pembangunan	%	90	93	99,44	99,30	99,35

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh, 2018

Dalam hal perencanaan keselarasan dan realisasi dari perencanaan merupakan salah satu alat ukur berkualitasnya sebuah perencanaan. Keselarasan dan realisasi perencanaan dianggap berhasil apabila seluruh dokumen perencanaan selaras dan dapat direalisasikan seluruhnya. Kondisi dokumen perencanaan di Kota Payakumbuh dilihat dari keselarasan meningkat dari tahun ke tahun.

Terkait dengan perencanaan ini, Pemerintah Kota Payakumbuh pada tahun 2017 memperoleh predikat **Nilai LAKIP BB** dengan total nilai 70 yang diterima dari Kemenpan dan Reformasi Birokrasi. Sejalan dengan hal tersebut pada tahun 2018, Pemerintah Kota Payakumbuh juga menerima predikat nilai tertinggi di wilayah Sumatera atau meraih peringkat 15 tingkat Nasional atas penilaian Kemendagri dari hasil **Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD**) Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Peringkat yang diperoleh ini menggambarkan transparansi dan efektifitas kinerja di jajaran Pemerintah Kota Payakumbuh cenderung mengalami peningkatan yang cukup baik.

B. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

1. Pengembangan Kapasitas Kepegawaian

Tabel II-133
Tabel Jumlah Pejabat yang Mengikuti Diklat Struktural
Tahun 2013-2017

No	Eselon	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Eselon II	orang	1	1	-	3	2
2	Eselon III	orang	5	5	2	1	2
3	Eselon IV	orang	29	30	-	32	-

Sumber: BKPSDM Kota Payakumbuh, 2018

Dari tabel terlihat jumlah pejabat yang mengikuti Diklat Struktural cukup fluktuatif. Untuk eselon II ada kenaikan dari kondisi 1 orang tahun 2013 menjadi 2 orang pada tahun 2017. Untuk eselon III, dari tahun 2013 sampai tahun 2014 tetap sebanyak 5 orang, namun tahun-tahun berikutnya menurun sampai tahun 2016 menjadi 1 orang dan pada tahun 2017 pejabat eselon III tidak ada yang mengikuti Diklat Struktural. Selanjutnya untuk eselon IV juga terjadi peningkatan dari 29 orang tahun 2013 menjadi 32 orang tahun 2016 sedangkan pada tahun 2017 pejabat eselon IV tidak ada yang mengikuti Diklat Struktural.

Tabel II-134
Tabel Jumlah Pejabat yang Mengikuti Diklat Teknis dan Pejabat Fungsional Tertentu
Tahun 2013 -2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Pejabat yang Mengikuti Diklat Teknis	Orang	104	217	97	199	143
2	Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu	orang	2325	2269	2225	1569	1562

Sumber: BKPSDM Kota Payakumbuh, 2018

Jumlah pejabat yang mengikuti diklat teknis tahun 2013 sampai tahun 2014 naik dari 104 orang menjadi 217 orang, sedangkan tahun 2015 turun menjadi 97 orang dan naik lagi tahun 2017 menjadi 143 orang. Kondisi ini sama dengan kondisi jumlah pejabat fungsional tertentu dimana tahun 2013 sebanyak2.325 orang, terjadipenurunan sampai menjadi 1.562 orang tahun 2017.Disamping itu, Data jumlah ASN yang ditempatkan sesuai formasi pada tahun-tahun sebelumnya belum pernah dilakukan perhitungan. Hal ini karena cukup sulit mengidentifikasi posisi ASN sesuai dengan formasi yang dilamar pada saat masuk sebagai CPNS. Kondisi kebutuhan pegawai yang bergerak cukup dinamis antar Perangkat Daerah mengakibatkan beberapa CPNS tidak lagi pada posisinya yang sesuai dengan pada saat penerimaan awal. Namun mulai tahun 2017 telah dilakukan penghitungan terhadap pejabat struktural yang menempati jabatan sesuai dengan formasi kependidikan dan kompetensi yang dimilikinya.

2. Kedisiplinan Pegawai

Permasalahan kepegawaian di Kota Payakumbuh, berdasarkan data pada tahun 2015 dan 2016 diidentifikasikan terkait dengan pelanggaran kewajiban pegawai untuk menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan (ayat 4) dan menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS (ayat 6) pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Disamping itu Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 15 PP Nomor 45 Tahun 1990 walaupun bersifat personal juga nantinya mempengaruhi kinerja PNS secara tidak langsung.

Tabel II-135

Daftar Pelanggaran Kedisiplinan Pegawai

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2015	2016	2017
1.	Pasal3PP Nomor53Tahun 2010	Orang	6	8	-
2.	Pasal9PP Nomor53Tahun 2010	orang	2	0	-

Sumber: BKPSDM Kota Payakumbuh, 2018

Terkait dengan kedisiplinan ini, pemerintah Kota Payakumbuh menerapkan Sistem Kinerja Pegawai Negeri (SKP Online) yang dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kota Payakumbuh dengan menggunakan Aplikasi. SKP Online ini terintegrasi dengan system pembayaran tunjangan kinerja PNS di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh yang menggunakan system Finger Print (Sidik Jari) dalam absensi dan perhitungan sangksi potongan sesuai dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh. Pelaksanaan SKP Online ini telah dimulai sejak Januari 2018.

Gambar II-40

Aplikasi SKP Online Kota Payakumbuh Tahun 2013-2017

Sumber: BKPSDM Kota Payakumbuh, 2018

C. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian daerah sudah mulai dikembangkan setiap tahunnya dengan berbagai topik penelitian, yang didasarkan pada isu strategis, permasalahan terhadap percepatan pembangunan Kota Payakumbuh. Hal ini merupakan kebutuhan Kota Payakumbuh dalam pemenuhan data dan informasi perencanaan pembangunan melalui kajian atau penelitian yang dilaksanakan setiap tahunnya. Jumlah penelitian yang dihasilkan termasuk sangat rendah, dikarenakan tidak adanya fungsional peneliti pada Bappeda atau membidangi Penelitian dan Pengembangan. Untuk pelaksanaan penelitian tersebut, Pemerintah Kota Payakumbuh bekerjasama dengan lembaga penelitian/akademis seperti: STKIP Payakumbuh, Universitas Andalas (UNAND), dan Universitas Negeri Padang (UNP). Untuk kondisi idealnya seharusnya sudah terbentuk Dewan Riset Daerah Kota Payakumbuh, dengan beranggotakan akademisi pemerhati pembangunan daerah, dan Pemerintah Kota Payakumbuh saat ini sedang melakukan proses tersebut.

Tabel II-136
Jumlah Kerjasama Litbang yang berkelanjutan di Kota Payakumbuh
Tahun 2013-2017

Tahun 2012	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	2017
1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	4 dokumen

Sumber:Bappeda Kota Payakumbuh, 2018

Pada tabel diatas, untuk tahun 2013 penelitian daerah dikerjasamakan dengan UNP, pada tahun 2014 penelitian daerah dikerjasamakan dengan UNP, pada tahun 2015 penelitian daerah dikerjasamakan dengan UNP sebanyak 1 penelitian dan UNAND sebanyak 1 penelitian. Dan pada tahun 2016 penelitian daerah berjumlah 3 dokumen yang melibatkan UNP sebanyak 1 penelitian dan UNAND sebanyak 2 penelitian. Sedangkan pada tahun 2017 meningkat menjadi 4 dokuimen. Untuk penyebarluasan atau pemanfaatan terhadap hasil riset/penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah masih dinilai belum optimal karena jumlah penelitian yang sangat kurang/minim. Namun dari seluruh penelitian yang dihasilkan, sebagian besar telah dijadikan sebagai perumusan kebijakan daerah dan bahan perencanaan pembangunan daerah.

D. Pengawasan

Salah satu unsur pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih adalah terciptanya reformasi birokrasi yang baik yang diindikasikan dengan Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi birokrasi dilihat dari kualitas pelayanan publik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Penghitungan indeks reformasi birokrasi Kota Payakumbuh baru dilaksanakan pada tahun 2016 dan angkanya masih berada di bawah indeks RB Nasional, yaitu sebesar 45. Ini menandakan bahwa kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN masih rendah.Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) telah dilaksanakan namun pemerataannya belum optimal, sehingga nilai Maturitas SPIP Kota Payakumbuh masih berada pada level 2. Padahal sesuai dengan

Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019, target Maturitas SPIP pada tahun 2019 harus berada pada Level 3.

Terkait dengan komitmen Pemerintah Kota Payakumbuh untuk bebas dari KKN, seluruh Perangkat Daerah telah ditetapkan sebagai Zona Integritas sebagaimana anjuran dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Zona ini juga dikenal dengan istilah **WBK (wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani)** yang berkomitmen dengan 5 (lima) Nilai Budaya Kerja yang meliputi Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tanggung Jawab dan Keteladanan.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per-Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di kota Payakumbuh menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Payakumbuh dan produk impor, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumahtangga. Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumahtangga adalah sebagai konsumen akhir (final consumer) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumahtangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Untuk analisa data pengeluaran konsumsi rumah tangga ini, masih menggunakan data sampai 2016, karena data tahun 2017 belum dipublikasikan oleh BPS, data tahun 2017 masih memakai angka sementara sema dengan tahun 2016. Selama periode acuan tahun perencanaan, ternyata pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga mengalami peningkatan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Pertambahan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumahtangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan tersedianya berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Tabel II-137
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Kota Payakumbuh Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Total Konsumsi Rumah Tangga (Miliar Rp)					
▪ ADHB/ (Miliar Rp)	1.944,67	2.162,00	2.376,48	2.587,54	2.801,83
▪ ADHK 2010/ (Miliar Rp)	1.648,01	1.721,14	11.800,92	15.209,63	19.730,17
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	52,51	51,72	52,27	51,91	51,71
Rata-rata konsumsi per kapita (Ribu Rp)					
▪ ADHB/ (Miliar Rp)	15.726,17	17.201,05	18.591,49	20.284,22	21.803,57
▪ ADHK 2010/ (Miliar Rp)	13.327,62	13.693,31	14.088,83	14.708,64	15.168,98
Pertumbuhan					
Total konsumsi RT per kapita	2,83	2,75	2,89	4,4	4,92
Jumlah penduduk (000/ orang)	123.654	125.690	127.826	129.807	131.858

Sumber: Buku Informasi Sosial Ekonomi Kota Payakumbuh Tahun 2017

Selama periode 2013–2017 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB cendrung menurun. Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 52,51% dan terendah pada tahun 2017 sebesar 51,71%. Sedangkan pada tahun 2015 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB kembali meningkat seiring dengan semakin membaiknya perekonomian. Pada tahun 2016 turun dari tahun 2015menjadi 51,91%. Sedangkan pada tahun 2017 turun kembali menjadi 51,71%. Secara rata-rata, konsumsi per rumahtangga dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi menurut atas dasar harga berlaku. Pada tahun 2017 diperkirakan total konsumsi rumah tangga rata-rata/kapita sebesar Rp. 21.803.570,- per-tahun meningkat dari tahun 2016 yaitu sebesar Rp.20.284.220,-/tahun. Sementara itu, pertumbuhan konsumsi rata-rata per kapita meningkat sebesar 4,92% pada tahun 2017.

Sementara itu, kontribusi pengeluaran makanan berada pada kisaran 40%, sedangkan sisanya sebanyak 60% dialokasikan untuk pengeluaran non makanan. Kontribusi konsumsi non makanan mengalami trend penurunan dari 59,10% di tahun 2013, menjadi 48,57% di tahun 2017, dan sebaliknya kontribusi konsumsi makanan mengalami trend penurunan dari tahun 2013-2015 dan naik dari tahun 2016-2017. Pada tahun 2017, komposisi pengeluaran non makanan semakin menurun menjadi indikasi bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat belum mengalami peningkatan. Semakin tinggi pendapatan sebagian besar masih dibelanjakan untuk makanan.

Tabel II-138
Kontribusi Kelompok Pengeluaran Makanan dan Non Makanan terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota Payakumbuh Tahun 2013-2017

Kelompok Pengeluaran	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Konsumsi Rumah Tangga (%)					
• Makanan	40,90	38,43	37,47	48,8	51,43
• Non Makanan	59,10	61,57	62,53	51,2	48,57
Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: BPS Kota Payakumbuh, 2017

B. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan/rasio antara Indeks Harga Yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib). Hubungan Nilai Tukar Petani (NTP) dengan tingkat kesejahteraan petani sebagai produsen secara nyata terlihat dari posisi It yang berada pada pembilang (*enumerator*) dari angka NTP. Apabila harga barang/produk pertanian naik, dengan asumsi volume produksi tidak berkurang, maka penerimaan/pendapatan petani dari hasil panennya juga akan bertambah. Disisi lain, untuk melihat tingkat kesejahteraan petani secara utuh perlu juga dilihat faktor pembentuk yang lain yaitu perkembangan jumlah pengeluaran/pembelanjaan mereka baik untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk produksi. Dalam hal ini petani sebagai produsen dan juga konsumen dihadapkan kepada pilihan dalam mengalokasikan pendapatannya yaitu: Pertama, untuk memenuhi kebutuhan pokok (konsumsi) demi kelangsungan hidup petani beserta keluarganya. Kedua, pengeluaran untuk produksi/budidaya pertanian yang merupakan ladang penghidupannya yang mencakup biaya operasional produksi dan investasi atau pembentukan barang modal. Unsur kedua ini hanya mungkin dilakukan apabila kebutuhan pokok petani telah terpenuhi, dengan demikian investasi dan pembentukan barang modal merupakan faktor penentu bagi tingkat kesejahteraan petani.

Penghitungan Nilai Tukar Petani (NTP) di Kota Payakumbuh baru dimulai pada tahun 2014, Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2014 cukup baik yaitu sebesar 100,68% (lebih dari 100%) meskipun belum mencapai kondisi yang ideal. Tahun 2015, NTP Kota Payakumbuh turun menjadi 100,18 dan pada tahun 2016 naik kembali menjadi 100,44%, sedangkan tahun 2017 diharapkan naik kembali menjadi 100,47%. Kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) di Kota Payakumbuh terus diupayakan melalui peningkatan indeks yang diterima petani terutama pada sub sektor yang dibawah 100 persen yaitu subsektor tanaman perkebunan rakyat dan subsektor peternakan diantaranya melalui stabilisasi harga komoditas pertanian/perikanan, insentif usaha tani/perikanan, fasilitasi permodalan bagi petani/peternak ikan dan penguatan kelembagaan dan kemitraan petani/peternak ikan dengan stakeholder pertanian/perikanan.

Tabel II-139
Nilai Tukar Petani (NTP) Kota Payakumbuh Tahun 2014-2017

No	Uraian	2014	2015	2016	2017
1	NTP Subsektor Tanaman Pangan (%)	107,43	98,40	100,20	100,50
2	NTP Subsektor Tanaman Hortikultura (%)	113,28	103,58	102,52	105,58
3	NTP Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (%)	74,88	101,46	99,17	103,46
4	NTP Subsektor Perikanan	118,16	96,94	99,44	99,14
5	NTP Subsektor Peternakan	95,39	100,54	100,26	101,54
	Total	**100,68**	**100,18**	**100,32**	**100,44**

Sumber: Buku Nilai Tukar Petani (NTP) Kota Payakumbuh Tahun 2017

2.1.4.2 Fokus Fasilitasi Wilayah / Infrastruktur

a. Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dalam hal pemanfaatan ruang, berdasarkan indikator pemanfaatan ruang yang tertib berdasarkan dokumen perencanaan tata ruang yang telah tersedia berupa Peraturan daerah nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030.Rasio realisasi rencana tata ruang wilayah dibandingkan dengan rencana peruntukan rencana tata ruang wilayah dari tahun 2015 sampai dengan 2017 cenderung meningkat, hal ini disebabkan karena tingginya ketaatan masyarakat terhadap regulasi penataan ruang dan meningkatnya pengawasan peruntukan lahan oleh Dinas Tata Ruang dan Kebersihan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II-140
Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2013-2017 Kota Payakumbuh

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Realisasi RTRW (ha)	752	761	440	580	612,97
2.	Rencana Peruntukan RTRW (ha)	8.043	8.043	8.043	8.043	8.043
	Rasio (1/2)	**0,093**	**0,094**	**0,054**	**0,072**	**0,076**

Sumber : Dinas PU dan PR Kota Payakumbuh, 2018

Salah satu ketaatan terhadap RTRW adalah semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB sebelum mendirikan bangunan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah bangunan yang memiliki IMB baik bangunan privat maupun bangunan publik. Untuk semakin meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap RTRW kendala yang dihadapi yaitu belum adanya instrumen peraturan yang operasional, pemahaman masyarakat tentang tata ruang masih rendah, dan SDM aparatur belum mencukupi.

b. Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah produktif dilihat dari jumlah luas wilayah produktif dibandingkan dengan jumlah keseluruhan wilayah budidaya. Luas wilayah produktif jika dibandingkan dengan luas seluruh wilayah budidaya dari tahun 2013 sampai dengan 2017 tidak mengalami perubahan dengan rasio rata-rata sebesar 0,94 seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel II-141
Rasio Luas Wilayah Produktif Tahun 2012-2017 Kota Payakumbuh

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Luas Wilayah produktif	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	5.041	5.041	5.041	5.041	5.041
	Rasio (1:2)	**0,94**	**0,94**	**0,94**	**0,94**	**0,94**

Sumber : Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017

c. Luas Wilayah Industri

Rasio luas wilayah industri dilihat dari perbandingan luas seluruh wilayah industri dibandingkan dengan luas wilayah budi daya, rasio luas wilayah industri dari tahun 2013 sampai tahun 2017 tidak mengalami perubahan karena yang dilihat adalah industri skala menengah besar, untuk Kota Payakumbuh yang mengalami perkembangan adalah industri rumah tangga atau berbentuk UMKM , dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-142
Rasio Luas Wilayah Industri Tahun 2013-2017 Kota Payakumbuh

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Luas Wilayah industri	0,91	0,94	1,60	1,60	1,60
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	5.041	5.041	5.041	5.041	5.041
	Rasio (1:2)	**0,01**	**0,01**	**0,03**	**0,03**	**0,03**

Sumber : Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017

2.1.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi

a. Angka Kriminalitas

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat mewujudkan rasa aman bagi masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dsb.

Tabel II-143
Angka Kriminalitas di Kota Payakumbuh Tahun 2013-2017

No	Jenis Kriminal	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah kasus Narkoba	43	36	43	43	59
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	1	0	1	0	1
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	12	7	4	4	5
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	300	226	155	155	175
5.	Jumlah kasus Pencurian	421	338	311	311	352
6.	Jumlah kasus Penipuan	134	125	126	125	181
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	0	0	0	0	0
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	911	732	640	640	773
9.	Jumlah Penduduk	123.654	125.690	127.826	129.807	131.819
10.	Angka Kriminalitas (8)/(9)	73.6733	58.2385	50.0681	50.0681	58.6410

Sumber: Polres Kota Payakumbuh 2018

Tabel II-144
Tindak Kriminal di Kota Payakumbuh Tahun 2013-2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Tindak Kriminal	kasus	487	455	435	430	773
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	124.694	125.690	127.826	129.807	131.819
3	Rasio jumlah kasus per 10.000/Penduduk	%	39,05	36,20	34,03	33,7	58,64

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh, 2018

Tabel II-145
Jumlah Pos Siskamling di Kota Payakumbuh Tahun 2013-2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Pos Siskamling	Unit	143	143	76	48	48
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	124.694	125.690	127.826	129.807	131.819
3	Rasio jumlah kasus per 10.000/Penduduk	%	11,44	11,38	5,94	3,7	3,6

Sumber:Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh, 2018

Angka kriminalitas mempengaruhi keinginan investor untuk berinvestasi di Kota Payakumbuh. Investor dalam menghasilkan barang dan jasa, akan dirugikan jika terganggu oleh kriminalitas, demonstrasi dan ketidakpastian hukum (perijinan). Untuk mengurangi angka kriminalitas, demonstrasi dan ketidakpastian hukum, perlu kerjasama antara masyarakat, pemerintah dan petugas keamanan demi terwujudnya keamanan dan ketertiban di Kota Payakumbuh sehingga investor tidak ragu dan merasa nyaman untuk berinvestasi di Kota Payakumbuh. Dalam upaya peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas diperlukan pengembangan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan keamanan; pengembangan sistem pengamanan rahasia; pengembangan sumber daya manusia (SDM) kepolisian; pengembangan strategi

keamanan dan ketertiban; pemberdayaan potensi keamanan; pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; kerja sama keamanan dan ketertiban; penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Tantangan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas adalah menurunkan tingkat kriminalitas agar aktivitas masyarakat dapat berjalan secara wajar. Keberhasilan dalam menurunkan tingkat kriminalitas akan menjadi landasan bagi keberlangsungan pembangunan secara keseluruhan. Di samping itu, profesionalitas aparat keamanan dalam menyelesaikan kasus kriminal, mengungkap jaringan kejahatan transnasional, mencegah terjadinya konflik komunal merupakan determinan penting bagi kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap iklim investasi di Kota Payakumbuh

b. Jumlah Demonstrasi

Kota Payakumbuh yang terus berkembang berpengaruh juga terhadap wacana berdemokrasi masyarakatnya. Selain memanfaatkan partai politik yang ada, sebagian masyarakat masih berfikir untuk menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi. Untuk Kota Payakumbuh demonstrasi yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, penyampaian aspirasi masyarakat melalui musyawarah yang diterima langsung oleh pemerintah Kota Payakumbuh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

c. Lama Proses perijinan

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan.

Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama.Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari). Pada tahun 2016 lama waktu perizinan menjadi 7 hari lebih banyak dari tahun sebelumnya selama 14 hari. Dengan ini diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah investor yang akan berinvestasi di kota Payakumbuh.

Jenis perijinan yang dianalisis antara lain:

1. SIUP : Surat Izin Usaha Perdagangan
2. TDP : Tanda Daftar Perusahaan
3. IUI : Izin Usaha Industri
4. TDI : Tanda Daftar Industri
5. IMB : Izin Mendirikan Bangunan
6. HO : Izin Gangguan

Tabel II-146
Lama Proses Perijinan Kota Payakumbuh Tahun 2017

No	Uraian	Lama mengurus (hari)	Jumlah persyaratan (dokumen)	Biaya resmi (rata-rata maks Rp)
1.	SIUP	7 Hari	1. Fotocopy SITU/Ho 2. Fotocopy KTP 3. Foto langsung 4. Materai Rp 6.000 5. Stop Map Folio 6. Akta Notaris 7. Fotocopy NPWP 8. Neraca Awal 9. SK mentri Kehakiman/Koperasi 10. Data Akta 11. Fotocopy KTP Direktur 12. Fotocopy KTP Komisaris	gratis
2.	TDP	7 Hari	1. Fotocopy SITU/Ho 2. Fotocopy KTP 3. Foto langsung 4. Materai Rp 6.000 5. Stop Map Folio 6. Akta Notaris 7. Fotocopy NPWP 8. Neraca Awal 9. SK mentri Kehakiman/Koperasi 10. Data Akta 11. Fotocopy KTP Direktur 12. Fotocopy KTP Komisaris	gratis
3.	IUI	7 Hari	1. Fotocopy SITU/Ho 2. Fotocopy KTP 3. Foto langsung 4. Materai Rp 6.000 5. Stop Map Folio 6. Akta Notaris 7. Fotocopy NPWP 8. Neraca Awal 9. SK mentri Kehakiman/Koperasi 10. Data Akta 11. Fotocopy KTP Direktur 12. Fotocopy KTP Komisaris	gratis
4.	TDI	7 Hari	1. Fotocopy SITU/Ho 2. Fotocopy KTP 3. Foto langsung 4. Materai Rp 6.000 5. Stop Map Folio 6. Akta Notaris khusus untuk CV 7. Fotocopy NPWP khusus untuk CV 8. Neraca Awal khusus untuk CV	gratis
5	IMB	7 Hari	1. Mengisi blangko permohonan asli + copy 2. Surat keterangan tanah berupa copy	Biaya dihitung berdasarkan rumus yang

			sertifikat/copy akta/surat keterangan/surat pernyataan/surat kesepakatan/surat kuasa 3. Gambar rencana bangunan yang telah disyahkan DTRK asli + copy 4. Copy bukti lunas PBB tahun terakhir 5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 6. Rekomendasi kepala kelurarahan setempat 7. Map tulang 8. Foto langsung 9. Fotocopy Advise Planning	telah ditetapkan dalam SOP
6.	HO	7 Hari	1. Mengisi formulir permohonan (diketahui lurah) 2. Fotocopy KTP 3. Fotocopy tanda lunas PBB tahun 2011 4. Fotocopy IMB dan sertifikat/surat sewa kontrak 5. Foto langsung di kantor KPPT 6. Fotocopy akta notaris pendirian bagi yang ada untuk CV, PT dan Koperasi 7. Surat keterangan izin tetangga (diketahui lurah) 8. Surat keterangan usaha dari kelurahan 9. Surat kuasa bila diperlukan 10. Untuk usaha yang merupakan anak cabang usaha, wajib melampirkan surat penunjukan/surat kuasa dari perusahaan induk 11. Denah Lokasi untuk yang di survey/cek ulang	Biaya dihitung berdasarkan rumus yang telah ditetapkan dalam SOP

Sumber : DPM & PTSP Kota Payakumbuh, 2018

d). Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak dan retribusi daerah sampai tahun 2017 ini meliputi ; Pajak sebanyak 10 macam dan retribusi terdiri dari 3 jenis yaitu Retribusi jasa umum 9 macam, Retribusi Jasa usaha 9 macam dan retribusi perizinan tertentu 3 macam, sebagaimana tertera pada tabel berikut.

Tabel II-147
Pajak dan Retribusi Daerah sampai dengan Tahun 2017

No	Pajak/Retribusi
I. Pajak	
1.	Pajak Hotel
2.	Pajak Restoran
3.	Pajak Hiburan
4.	Pajak Reklame
5.	Pajak Penerangan Jalan

6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7.	Pajak Parkir
8.	Pajak Air Tanah
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
10.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP)
II. Retribusi	
	Retribusi Jasa Umum
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3.	Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
4.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
5.	Retribusi Pelayanan Pasar
6.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
7.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
8.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
9.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
	Retribusi Jasa Usaha
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
3	Retribusi Tempat Pelelangan
4	Retribusi Terminal
5	Retribusi Tempat Khusus Parkir
6	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa
7	Retribusi Rumah Potong Hewan
8	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
9	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
	Retribusi Perizinan Tertentu
1.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2	Retribusi Izin Gangguan (HO)
3	Retribusi Izin Trayek

Sumber : Profil Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017

Dalam memajukan iklim investasi, Pemda dan masyarakat harus komitmen, dengan memberi rasa aman bagi investor, kemudahan dalam mengurus administrasi perizinan, serta daya dukung anggaran pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi mutakhir. Majunya iklim investasi akan berdampak positif tehadap kemajuan pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan. Apabila hal ini bisa terlaksana dengan baik maka iklim investasi akan terus berkembang dan angka pengangguran akan berkurang, karena terbukanya lapangan kerja baru.

Pemerintah Kota Payakumbuh diharapkan terus memberikan pelayanan terbaik, serta masyarakat terus menjaga keamanan yang kondusif demi mendukung perkembangan iklim investasi demi kemajuan daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini, perlu berupaya mengevaluasi seluruh bidang pembangunan di Kota Payakumbuh yang dapat dijadikan peluang bagi investor untuk berinvestasi di Kota Payakumbuh. Sehingga, dapat diketahui bidang mana yang memerlukan investasi yang lebih baik di Kota Payakumbuh

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

a. Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. kualitas tenaga kerja disuatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang bekerja.untuk kota payakumbuh sendiri kualitas tenaga kerja yang dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel II-148
Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tahun 2013-2017

Pendidikan	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
≤SD	14.950	16.182	17.216	17.222	17.223
SMTP	9.823	10.915	10.242	10.264	10.272
SMTA Umum	13.289	14.287	13.758	14.165	14.741
SMTA Kejuruan	8.701	10.312	10.799	N/A	N/A
DIPLOMA I/II/III/AKADEMI	3.117	2.859	2.690	2.870	3.024
UNIVERSITAS	8.039	6.768	8.312	8.622	8.917
JUMLAH	**57.919**	**61.323**	**63.017**	**53.143**	**54.177**

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2011-2015, diolah; Dinas Nakerperin, 2018

b. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif.

Tabel II-149
Rasio Ketergantungan Kota Payakumbuh Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017*)
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	37.110	37.231	38.146	38.495	38.957
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	6.780	6.445	7.038	7.223	7.371
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2)	43.890	43.676	45.184	45.718	46.327
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	79.764	82.014	82.642	84.089	85.531
5.	Rasio ketergantungan total (3)/(4)	55,02	53,25	54,67	54,37	54,15
6.	Rasio Ketergantungan muda (1/4)	46,52	45,40	46,15	45,78	45,55
7.	Rasio ketergantungan tua (2/4)	8,50	7,86	8,5	8,59	8,62
8.	Jumlah Penduduk	123.654	125.690	127.826	129.807	131.819

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka, 2017
*) Angka Proyeksi

Rasio ketergantungan terbesar selama 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2013 dimana tingkat ketergantungan ini sebesar 55,02. Ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 46,52 dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 8,50. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2013 penduduk usia kerja di Kota Payakumbuh masih dibebani tanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua. Sedangkan untuk tahun 2015 tingkat ketergantungan penduduk produktif terhadap penduduk tidak produktif turun menjadi yaitu 54,67 artinya setiap 100 orang yang berusia kerja mempunyai tanggungan sebanyak 55 orang yang belum produktif atau dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 54,67 ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 46,15 dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 8,50. Sekitar 35,34% dari jumlah penduduk Kota Payakumbuh pada tahun 2015 adalah penduduk usia tidak produktif yang terdiri dari 29,84% dari penduduk yang berusia muda <15 tahun dan 5,50% dari penduduk yang berusia tua >64tahun. Jika dilihat dari proporsi ketergantungan penduduk Kota Payakumbuh, Rasio ketergantungan muda lebih besar dari rasio ketergantungan tua. Ini diartikan beban penduduk produktif proporsi tanggung jawabnya lebih besar terhadap penduduk muda dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai Tahun 2017

Evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2017 dilihat dari Capaian Indikator Kinerja Program, Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Capaian Indikator Kinerja Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2017 sebagai awal RPJMD periode 2017-2022.

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Sampai Tahun 2017

Evaluasi pelaksanaan program yang tertuang dalam RKPD Tahun 2017 dilihat dari capaian indikator kinerja program yang dilksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya.

Tabel II-150
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Pada Tahun 2017

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022(Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2017	Target Kinerja RKPD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja s/d RKPD Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017 (%)	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2017 terhadap RPJMD	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN OLEH SEMUA OPD								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	81,85	80,25	79,35	80,25	101,13	98,05	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	90	80	80	80	100,00	88,89	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100	100	100	100	100,00	100,00	
4	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	BB	BB	BB	100,00	95,00	
1.	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**	-							
1.01	**PENDIDIKAN**								**DINAS PENDIDIKAN**
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase satuan pendidikan PAUD yang pengelolaannya berkategori baik	70	61	60	61	101,67	87,14	
		Persentase satuan PAUDNI yang memiliki sarpras sesuai SNP	80	72	70	72	102,86	90,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022(Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2017	Target Kinerja RKPD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja s/d RKPD Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017 (%)	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2017 terhadap RPJMD	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase PTK PAUD yang sesuai dengan SNP	60	47,5	50	47,5	95,00	79,17	
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Persentase sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai dengan SNP	90	81,5	80	81,5	101,88	90,56	
		Rata - rata nilai Mid semester	7,50	7,50	7,50	7,50	100,00	100,00	
		Rata - rata nilai semester	7,55	7,55	7,55	7,55	100,00	100,00	
3	Program Pendidikan Non Formal	Angka melek huruf (%)	99,85	99,56	99,56	99,56	100,00	99,71	
4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase ketersediaan guru per rombongan belajar	89,0	86,7	86,7	86,7	100,00	97,42	
		Persentase ketersediaan guru per mata pelajaran	82	80	80	80	100,00	97,56	
		Persentase PTK yang sesuai dengan SNP	65	50	50	50	100,00	76,92	
9	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang pengelolaannya berkategori baik	80	70	70	70	100,00	87,50	
1.02	**KESEHATAN**								**DINAS KESEHATAN**
1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan perbelkes untuk 24 bulan	100	100	100	100	100,00	100,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022(Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2017	Target Kinerja RKPD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja s/d RKPD Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017 (%)	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2017 terhadap RPJMD	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase rumah tangga yang mendapatkan sosialisasi pangan sehat	87	82	80	82	102,50	94,25	
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase kepesertaan JKN	100	87	87	87	100,00	87,00	
3	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase kelompok masyakat cerdas menggunakan obat	60	33	25	33	132,00	55,00	
		Persentase kegiatan pengawasan keamanan pangan	100	100	100	100	100,00	100,00	
4	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah tangga ber-PHBS	80	67,5	67	67,5	100,75	84,38	
		Persentase sekolah PHBS	90	75	73	75	102,74	83,33	
5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase peningkatan status gizi masyarakat	100	100	100	100	100,00	100,00	
		Persentase penanganan balita gizi buruk	100	100	100	100	100,00	100,00	
		Cakupan balita gizi buruk (%)	<3	0,07	<3	0,07	100,00	100,00	
6	Program Lingkungan Sehat	Cakupan jamban yang sesuai standar kesehatan (%)	95	87,5	87	87,5	100,57	92,11	
		Cakupan Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (%)	99	97,5	97,5	97,5	100,00	98,48	
		Cakupan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (%)	99,5	98	99	98	98,99	98,49	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022(Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2017	Target Kinerja RKPD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja s/d RKPD Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017 (%)	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2017 terhadap RPJMD	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Cakupan Pengelolan Limbah Cair Rumah Tangga (%)	96	93	93	93	100,00	96,88	
		Cakupan Laik Sehat TPM (%)	83	78,5	78	78,5	100,64	94,58	
		Cakupan Laik Sehat TTU (%)	85	81	80	81	101,25	95,29	
		Persentase peningkatan STBM	100	100	100	100	100,00	100,00	
		Persentase cakupan stop BABS	52,08	35	22,91	35	152,77	67,20	
		Persenatase laik sehat TTM dan TTU	99	95	94	95	101,06	95,96	
7	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular	Cakupan penemuan semua kasus TB (%)	45	40	41	40	97,56	88,89	
		Persentase TB yang mengetahui status HIV	45	40	39	40	102,56	88,89	
		Persentase HIV AIDS yang mendapatkan ARV	20	20	20	20	100,00	100,00	
		Cakupan penanganan kasus diare (%)	100	100	100	100	100,00	100,00	
		Insident rate DBD per 100.000 penduduk	<41	38	<41	38	100,00	100,00	
		Cakupan Kelurahan UCI (%)	99,5	97	97	97	100,00	97,49	
		Cakupan pelayanan imunisasi anak sekolah (%)	100	92	90	92	102,22	92,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022(Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2017	Target Kinerja RKPD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja s/d RKPD Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017 (%)	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2017 terhadap RPJMD	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Cakupan pelayanan imunisasi dasar lengkap (%)	100	88,5	90	88,5	98,33	88,50	
8	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase RS dan Puskesmas terakreditasi	100	80	80	80	100,00	80,00	
		Persentase puskesmas dengan nilai IKM >75	100	100	100	100	100,00	100,00	
		Persentase Sapras puskesmas yang sesuai standar	80	70	65	70	107,69	87,50	
9	Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Pustu dan Jaringannya	Persentase Ketersediaan Prasarana Puskesmas sesuai standar	83	70	70	70	100,00	84,34	
10	Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan persalinan dengan nakes di faskes (%)	100	100	98	100	102,04	100,00	
		Cakupan pelayan Nifas sesuai standar (%)	100	95	95	95	100,00	95,00	
		Cakupan pelayan Neonatal sesuai standar (%)	100	99	98	98	100,00	99,00	
11	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Cakupan penderita hipertensi yang mendapat pelayanan (%)	100	95	95	95	100,00	95,00	
		Cakupan penderita DM yang mendapat pelayanan sesuai standar (%)	100	95	95	95	100,00	95,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022(Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2017	Target Kinerja RKPD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja s/d RKPD Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017 (%)	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2017 terhadap RPJMD	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Cakupan IVA positif yang tertangani (%)	100	95	95	95	100,00	95,00	
		Cakupan pelayanan IVA usia produktif (%)	35	30	30	30	100,00	85,71	
		Cakupan penemuan kasus hipertensi usia > 15 tahun (%)	24	20	20	20	100,00	83,33	
		Cakupan penemuan kasus DM usia > 15 tahun (%)	2	1,5	1,5	1,5	100,00	75,00	
12	Program Operasional BLUD Puskesmas	Persentase peningkatan pelayanan BLUD	100	90	88	90	102,27	90,00	
13	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase Ketersediaan alat kedokteran RS sesuai standar	87	75	78	75	96,15	86,21	
		Persentase Ketersediaan Prasarana RS sesuai standar	87	75	75	75	100,00	86,21	
1.03	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**								**DINAS PU PR**
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang jalan dengan kondisi mantap	80,31	66,56	66,56	66,56	100,00	82,88	
2	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Meningkatnya kualitas & kuantitas saluran drainase/ gorong-gorong (%)	50,44	45	44,46	45	101,21	89,21	
3	Program pembangunan turab/talud bronjong	Persentase jalan kota yang memiliki drainase	75	66,56	66,56	66,56	100,00	88,75	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022(Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2017	Target Kinerja RKPD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja s/d RKPD Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017 (%)	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2017 terhadap RPJMD	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Program rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang jalan yang dipelihara	80,31	67,5	66,56	67,5	101,41	84,05	
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Jumlah alat berat yang tersedia (unit)	17	16	16	16	100,00	94,12	
		Jumlah alat labor yang tersedia (unit)	5	1	1	1	100,00	20,00	
6	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringa Pengairan Lainnya	Persentase irigasi dengan kondisi baik	86,58	73,43	76,34	73,43	96,19	84,81	
7	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Persentase sungai yang dinormalisasi	56,44	72,4	25,44	72,4	284,59	128,28	
8	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Persentase rumah yang terlayani air minum perpipaan	94,89	94,41	92,3	94,41	102,29	99,49	
9	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Panjang trotoar yang dibangun (m)	33600	27150	27150	27150	100,00	80,80	
10	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Tertatanya kawasan pusat kota	78	60	60	60	100,00	76,92	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022(Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2017	Target Kinerja RKPD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja s/d RKPD Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017 (%)	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2017 terhadap RPJMD	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah advice planning yang dikeluarkan (buah)	825	612	583	612	104,97	74,18	
		Keberadaan PERDA RTRW (perda)	1	1	1	1	100,00	100,00	
11	Program Pemanfaatan Ruang	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan keseluruhan	0,23	0,11	0,13	0,11	84,62	47,83	
12	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rasio Ruang Terbuka Hijau	42,5	40,31	40,31	40,31	100,00	94,85	
13	Program Pembinan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	Persentase Kepatuhan Pembangunan sesuai dokumen tata ruang	34,18	78,6	31,32	78,6	250,96	229,96	
1.04	**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**								**DINAS PERA DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
1	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	96,98	91,89	91,7	91,89	100,21	94,75	
2	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase rumah bersanitasi layak	95,76	88,5	88,2	88,5	100,34	92,42	
1.05	**KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								**SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022(Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2017	Target Kinerja RKPD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja s/d RKPD Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017 (%)	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2017 terhadap RPJMD	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase anggota Linmas yang ikut pelatihan	100	90	100	90	90,00	90,00	
2	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Penegakan Perda (%)	100	100	100	100	100,00	100,00	
3	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan pelayanan penanganan kebakaran (%)	100	100	100	100	100,00	100,00	
1.06	**SOSIAL**								**DINAS SOSIAL**
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase peningkatan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya yang diberdayakan	60	25	10	25	250,00	41,67	
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase meningkatnya keterampilan anak cacat, anak terlantar termasuk anak jalanan, dan anak nakal	100	70	70	70	100,00	70,00	
3	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial	100	75	70	75	107,14	75,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022(Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2017	Target Kinerja RKPD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja s/d RKPD Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017 (%)	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2017 terhadap RPJMD	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Program pemeliharaan dan Rehabilitasi TMP	Persentase terpeliharan ya sarana dan prasarana TMP dan makam mayat terlantar dan shelter orang terlantar yang berhasil dilaksanakan	100	70	70	70	100,00	70,00	
2.	**URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**								
2.01.	**TENAGA KERJA**								**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang berwirausaha (orang)	111	57	57	57	100,00	51,35	
		jumlah tenaga kerja yang diserap wira usaha (orang)	166	86	86	86	100,00	51,81	
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan (orang)	261	160	160	160	100,00	61,30	
3	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah penurunan angka PHK (%)	174	8	8	8	100,00	4,60	
2.02.	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**								**DINAS P3AP2KB**
1	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak	Jumlah perwako, himbauan, MoU terkait perlindungan anak (buah)	7	1	0	1	100,00	14,29	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022(Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2017	Target Kinerja RKPD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja s/d RKPD Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017 (%)	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2017 terhadap RPJMD	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan Perempuan	Persentase perempuan yang duduk di legislatif	0,12	0,08	0,08	0,08	100,00	66,67	
		persentase kekerasan terhadap anak	0,00026	0,0007	0,0007	0,0007	100,00	269,23	
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah kelembagaan PUG (lembaga)	33	33	33	33	100,00	100,00	
		Persentase program dan kegiatan yang di PPRG - kan	0,17	0,02	0,02	0,02	100,00	11,76	
		Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (nilai)	850	520	520	520	100,00	61,18	
		Jumlah Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) (lembaga)	12	0	0	0	100,00	0,00	
		Persentase penanganan kasus kekerasan perempuan	100	100	100	100	100,00	100,00	
		Persentase kasus penanganan kekerasan anak	100	100	100	100	100,00	100,00	
3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase pelaku usaha ekonomi perempuan	82	41	41	41	100,00	50,00	
		Persentase kekerasan terhadap perempuan	0,04	0,1	0,1	0,1	100,00	250,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022(Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2017	Target Kinerja RKPD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja s/d RKPD Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017 (%)	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2017 terhadap RPJMD	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Jumlah organisasi perempuan yang aktif (organisasi)	33	20	20	20	100,00	60,61	
2.03.	**PANGAN**								**DINAS KETAHANAN PANGAN**
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	% bahan pangan yang telah memenuhi AKE	100	-	-	-			
		% cadangan pangan yang tersedia	55	-	-	-			
		Cakupan supply lembaga distribusi pangan (%)	60	-	-	-			
		Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan (%)	100	-	-	-			
2.04.	**PERTANAHAN**			-		-			**DINAS PU PR**
1	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase sertifikasi aset tanah dan bangunan pemko	63,64	60,62	56,82	60,62	106,69	95,25	
2.05.	**LINGKUNGAN HIDUP**								**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022(Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2017	Target Kinerja RKPD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja s/d RKPD Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017 (%)	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2017 terhadap RPJMD	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan pelayanan persampahan	95	88,24	88	88,24	100,27	92,88	
2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup	60,01	40	35,05	40	114,12	66,66	
3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase sekolah adiwiyata	78	70	70	70	100,00	89,74	
4	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen informasi lingkungan yang disusun (dokumen)	5	2	2	2	100,00	40,00	
5	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Indeks Pencemaran Air	75	76	75	76	101,33	101,33	
		Indeks Pencemaran udara	80	95,32	80	95,32	119,15	119,15	
6	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase RTH Publik	17	21	15,45	21	135,92	123,53	
2.06	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**								**DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan kepemilikan Kartu keluarga (%)	100	100	100	100	100,00	100,00	
		Cakupan kepemilikan KTP-el (%)	91	97,12	83	97,12	117,01	106,73	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022(Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2017	Target Kinerja RKPD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja s/d RKPD Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017 (%)	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2017 terhadap RPJMD	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Cakupan kepemilikan akte kelahiran usia 1-18 th (%)	92	84,05	85	84,05	98,88	91,36	
		Cakupan penerbitan akta kematian (%)	62	41,69	36	41,69	115,81	67,24	
		Persentase penyelesaian penerbitan dokumen kependudukan tepat waktu	98	85	85	85	100,00	86,73	
		Rata-rata lama waktu penyelesaian pengurusan dokumen kependudukan (SOP)	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	100,00	100,00	
2.08	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							-	**DP3AP2KB**
1	Program Keluarga Berencana	Unmeet Need	10,87	11,85	11,85	11,85	100,00	109,02	
2	Program pelayanan kontrasepsi	Cakupan peserta KB Aktif (%)	77	76,57	76,57	76,57	100,00	99,44	
3	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persentase BKB aktif	100	100	100	100	100,00	100,00	
4	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	Persentase posyandu dengan strata mandiri	85	60	59	60	101,69	70,59	
2.09.	**PERHUBUNGAN**				-				**DINAS PERHUBUNGAN**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022(Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2017	Target Kinerja RKPD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja s/d RKPD Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017 (%)	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2017 terhadap RPJMD	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase Ketersediaan Fasilitasi Umum	90	72,2	72,2	72,2	100,00	80,22	
2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas	80	40	68	40	58,82	50,00	
3	Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase masyarakat yang menggunakan sarana angkutan umum	75	89,22	63	89,22	141,62	118,96	
4	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Persentase ruas jalan yang dilengkapi fasilitas pendukung jalan	89	70	70	70	100,00	78,65	
5	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas	81	40	68	40	58,82	49,38	
6	Pengendalian, Pengamanan dan Peningkatan Pelayanan Parkir	Persentase peningkatan pelayanan parkir	78	65	65	65	100,00	83,33	
2.10.	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
1	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase layanan yang terintegrasi TIK	85	20	20	20	100,00	23,53	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022(Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2017	Target Kinerja RKPD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja s/d RKPD Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017 (%)	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2017 terhadap RPJMD	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Program kerjasama informasi dan media massa	Persentase PD yang menyebarkan informasi melalui media	85	20	20	20	100,00	23,53	
2.11.	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**							-	**DINAS KOPERASI DAN UKM**
1	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase pertambahan tenaga manajer UMKM	2	1	1	1	100,00	50,00	
		Persentase pertambahan tenaga pembukuan UMKM	2	1	1	1	100,00	50,00	
2	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase peningkatan modal UMKM	3,5	2	2	2	100,00	57,14	
		Jumlah pertumbuhan volume penjualan UMKM di pasar modern (%)	2,2	1,5	1,2	1,5	125,00	68,18	
3	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase penurunan jumlah tunggakan	25	5	5	5	100,00	20,00	
		Persentase peningkatan koperasi aktif	49	47	47,52	47	98,91	95,92	
		Persentase peningkatan koperasi sehat	11,9	10	11,4	10	87,72	84,03	
4	Program Penciptan Iklim UKM yang Kondusif	Persentase pertumbuhan UMKM	2	1,2	1,2	1,2	100,00	60,00	
2.12.	**PENANAMAN MODAL**			-		-	-		**DINAS PM DAN PTSP**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022(Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2017	Target Kinerja RKPD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja s/d RKPD Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017 (%)	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2017 terhadap RPJMD	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah kerjasama investasi (kerjasama)	9	8	8	8	100,00	88,89	
		Jumlah Promosi Investasi (kali)	5	2	2	2	100,00	40,00	
2	Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Jumlah Investor (investor)	1451	560	474	560	118,14	38,59	
3	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Persentase peluang investasi yang telah divalidasi	29	22	22	22	100,00	75,86	
2.13.	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							-	**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OR**
1	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah pemuda pelopor yang sampai ke tingkat nasional (orang)	10	-	1	-	0,00	0,00	
2	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase pemuda yang berwirausaha	65	60	60	60	100,00	92,31	
3	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah medali yang diperoleh di tingkat nasional (medali)	684	36	24	36	150,00	5,26	
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik	90	75	75	75	100,00	83,33	
2.14.	**STATISTIK**								**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022(Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2017	Target Kinerja RKPD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja s/d RKPD Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017 (%)	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2017 terhadap RPJMD	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase kepuasan data pengguna statistik	85	90	80	90	112,50	105,88	
2.15.	**KEBUDAYAAN**							-	**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OR**
1	Program pengembangan nilai budaya	Jumlah lingkungan seni dan budaya yang aktif (kelompok)	74	70	66	70	106,06	94,59	
2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah situs cagar budaya yang dilindungi (bcb)	28	18	18	18	100,00	64,29	
3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah penyelenggaraan festival budaya (event)	15	8	8	8	100,00	53,33	
2.16.	**PERPUSTAKAAN**							-	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
1	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Jumlah anggota perpustakaan (orang)	1810	1510	1475	1510	102,37	83,43	
2.17.	**KEARSIPAN**						-	-	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
1	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase PD dan kelurahan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	74,19	20	16,13	20	123,99	26,96	
2	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Jumlah dokumen/ arsip yang diakuisisi (berkas)	3800	0	0	0	100,00	0,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022(Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2017	Target Kinerja RKPD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja s/d RKPD Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017 (%)	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2017 terhadap RPJMD	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Persentase PD dan Kelurahan yang telah memiliki sarana dan prasarana pengelolaan arsip sesuai standar	32,05	15	5,13	15	292,40	46,80	
4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis	100	0	0	0	100,00	0,00	
3.	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**								
3.01.	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**								**DINAS PERTANIAN**
1	Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi ikan konsumsi (ton)	560	329	482,25	329	68,22	58,75	
2	Pengembangan Sistem Penyuluh perikanan	Persentase kelompok tani yang menerapkan anjuran teknologi budidaya perikanan	90,32	75	74,19	75	101,09	83,04	
3	Optimalisasi Pengolahan dan pemasaran produksi	Jumlah fasilitasi pemasaran hasil perikanan (kali)	9	1	1	1	100,00	11,11	
3.02.	**PARIWISATA**			-		-			**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OR**
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan wisatawan	50	10,8	2,5	10,8	432,00	21,60	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022(Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2017	Target Kinerja RKPD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja s/d RKPD Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017 (%)	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2017 terhadap RPJMD	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase promosi kepariwisataan yang dilaksanakan	80	50	50	50	100,00	62,50	
		Rata-rata lama tingggal wisatawan (hari)	1,5	1,2	1,2	1,2	100,00	80,00	
2	Program Pengembangan Destinasi Parawisata	Persentase objek wisata unggulan dengan kondisi baik	50	35	32,5	35	107,69	70,00	
		Jumlah Pengembangan Destinasi Pariwisata (ow)	7	1	1	1	100,00	14,29	
3	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah Kerjasama yang dilakukan dengan pelaku usaha jasa Pariwisata (kerjasama)	7	3	3	3	100,00	42,86	
3.03.	**PERTANIAN**				-		-	-	-
	DINAS PERTANIAN								**DINAS PERTANIAN**
1	Program peningkatan kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	101	100,44	100,38	100,44	100,06	99,45	
2	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Persentase fasilitasi pemasaran hasil produksi Pertanian/ Perkebunan Unggulan	30	20	20	20	100,00	66,67	
3	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Produktivitas Padi (ton/ha)	6	4,5	5,5	4,5	81,82	75,00	
		Produktivitas Cabe (ton/ha)	12	5	10	5	50,00	41,67	
		Produktivitas Bawang (ton/ha)	15	6,5	12	6,5	54,17	43,33	
		Produktivitas Kakao (ton/ha)	1,4	1	1,2	1	83,33	71,43	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022(Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2017	Target Kinerja RKPD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja s/d RKPD Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017 (%)	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2017 terhadap RPJMD	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produksi padi (ton)	43000	28113	37500	28113	74,97	65,38	
		Produksi cabe (ton)	990	306	980	306	31,22	30,91	
		Produksi bawang (ton)	600	92	180	92	51,11	15,33	
		Produksi Kakao (ton)	1230	780	1095	780	71,23	63,41	
5	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan	Persentase kelompok tani yg menerapkan anjuran teknologi budidaya pertanian	60	40	40	40	100,00	66,67	
3.04	**DINAS PERTANIAN**							-	
1	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase angka kematian ternak	0,35	0,4	0,4	0,4	100,00	114,29	
2	Program peningkatan produksi hasil ternak	Populasi Sapi (ekor)	6202	5530	5620	5530	98,40	89,16	
		Jumlah Produksi Sapi Konsumsi (ton)	1131	923	939	923	98,30	81,61	
3	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Persentase Fasilitasi pemasaran hasil produksi peternakan	35	30	29	30	103,45	85,71	
3.06	**PERDAGANGAN**								**DINAS KOPERASI DAN UKM**
1	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan	Persentase peningkatan pelaku usaha yang tertib niaga	8	5,5	5,5	5,5	100,00	68,75	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022(Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2017	Target Kinerja RKPD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja s/d RKPD Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017 (%)	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2017 terhadap RPJMD	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	perdagangan	Persentase peningkatan jumlah komoditi yg diperdagangkan	5,5	3	3	3	100,00	54,55	
2	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	Jumlah Kerjasama Perdagangan (kerjasama)	35	30	30	30	100,00	85,71	
3	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Persentase Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang mematuhi SOP	0,9	0,65	0,65	0,65	100,00	72,22	
3.07.	**PERINDUSTRIAN**								**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**
1	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Persentase industri yang menerapkan standarisasi mutu produk	2,75	1,5	1,5	1,5	100,00	54,55	
2	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase kawasan sentra industri yang dibina	60	40	40	40	100,00	66,67	
3	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase industri yang menerapkan teknologi tepat guna	3,35	3	3	3	100,00	89,55	
4	Program Penataan Struktur Industri	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	10,5	2	3	2	66,67	19,05	
4.	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							-	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022(Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2017	Target Kinerja RKPD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja s/d RKPD Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017 (%)	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2017 terhadap RPJMD	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN**							-	**BAPPEDA**
1	Program Pengembangan data/informasi	Persentase ketersediaan data/informasi perencanaan pembangunan daerah	95	80	78	80	102,56	84,21	
2	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	90	80	80	80	100,00	88,89	
3	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Persentase PD bidang IPW yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras	100	100	100	100	100,00	100,00	
4	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Persentase hasil koordinasi perencanaan pengembangan kota-kota menangah dan besar yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100,00	100,00	
5	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase faskel yang menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik	100	80	79,17	80	101,05	80,00	
6	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	98,8	94,08	94,08	94,08	100,00	95,22	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022(Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2017	Target Kinerja RKPD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja s/d RKPD Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017 (%)	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2017 terhadap RPJMD	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase usulan masyarakat dan stakeholder yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah	70	45,5	45,5	45,5	100,00	65,00	
		Persentase Perangkat Daerah yang mencapai target kinerja tahunan rata-rata minimal 90 %	100	100	100	100	100,00	100,00	
7	Program perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Persentase PD lingkup bidang ekonomi yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras	100	100	100	100	100,00	100,00	
8	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase PD lingkup bidang sosial dan budaya yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras	100	100	100	100	100,00	100,00	
9	Program Penyusunan Aksi Pencagahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah	Jumlah aksi pelaporan PPK (pelaporan)	4	4	4	4	100,00	100,00	
4.02.	**KEUANGAN**								**BADAN KEUANGAN DAERAH**
1	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan APBD tepat waktu	31 Des	22 Sept	20 Des	22 Sept	100,00	99,77	
		Persentase realisasi belanja terhadap anggaran belanja	90	91	95	91	95,79	101,11	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022(Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2017	Target Kinerja RKPD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja s/d RKPD Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017 (%)	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2017 terhadap RPJMD	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu terhadap total pendapatan	10	9	10	9	90,00	90,00	
		Laporan Keuangan berbasis Akrual	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	100,00	
		Persentase RKBMD yang diakomodir dalam APBD	50	60	56	60	107,14	120,00	
		Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	11,61	15,78	11	15,78	143,45	135,92	
		Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	115	106	100	106	106,00	92,17	
		Persentase realisasi penerimaan retribusi daerah	105	105	100	105	105,00	100,00	
2	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase fasilitasi pembiayaan yang lancar dari total pembiayaan	80	70	70	70	100,00	87,50	
4.03	**KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							-	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM**
1	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase prestasi kerja PNS yang bernilai baik	99,5	98,8	98,8	98,8	100,00	99,30	
		Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	64	30	30	30	100,00	46,88	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022(Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2017	Target Kinerja RKPD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja s/d RKPD Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017 (%)	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2017 terhadap RPJMD	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Persentase database kepegawaian yang tersedia secara lengkap	100	100	100	100	100,00	100,00	
		Persentase laporan kesalahan data kepegawaian yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100,00	100,00	
		Persentase penyelesaian produk layanan	100	100	100	100	100,00	100,00	
		Persentase penerimaan PNS sesuai dengan formasi yang dibutuhkan	100	-	100	-	0,00	0,00	
		Persentase penyusunan formasi yang sesuai dengan analisis jabatan	100	100	100	100	100,00	100,00	
4.04	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**								**BAPPEDA**
1	Program Pengembangan Inovasi Daerah	Persentase hasil penelitian yang ditindak lanjuti stakeholder (jumlah penelitian yang ditindak lanjuti dibagi jumlah seluruh penelitian dikali 100%)	95	80	60	80	133,33	84,21	
4.05	**FUNGSI PENUNJANG LAINNYA**							-	
	SEKRETARIAT DAERAH							-	**SETDAKO**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022(Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2017	Target Kinerja RKPD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja s/d RKPD Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017 (%)	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2017 terhadap RPJMD	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Presentase peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100	100	100	100	100,00	100,00	
2	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Presentase peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100	100	100	100	100,00	100,00	
3	Program penataan peraturan perundang-undangan	Persentase penyelesaian masalah hukum yang diproses secara non litigasi	90	50	50	50	100,00	55,56	
4	Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk Sesuai Perundang-undangan	100	100	100	100	100,00	100,00	
5	Program Peningkatan Pengendalian Administrasi Pembangunan	Persentase pengelola kegiatan yang tertib administrasi sesuai dengan aturan	97,5	87,5	87	87,5	100,57	89,74	
6	Program Pembinaan dan Pengawasan jasa konstruksi	Persentase tertib administrasi terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	100	100	100	100	100,00	100,00	
7	Program Optimalisasi Pelayanan Publik	Peringkat LPPD	12	15	20	15	75,00	125,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022(Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2017	Target Kinerja RKPD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja s/d RKPD Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017 (%)	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2017 terhadap RPJMD	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama	Persentase peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan melalui lembaga/ Badan Zakat/ Wakaf	5	3	3	3	100,00	60,00	
		Persentase masjid yang dikelola secara optimal	75	50	50	50	100,00	66,67	
9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindak lanjuti	100	100	100	100	100,00	100,00	
10	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai AKIP	A	BB	BB	BB	100,00	95,00	
11	Program Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Sosial Keagamaan	Persentase organisasi/ lembaga sosial dan keagamaan yang aktif	83	61	61	61	100,00	73,49	
12	Program Peningkatan Pendidikan Usaha Kesehatan Sekolah	Persentase Sekolah/Madrasah yang mencapai Strata yang Maksimal	100	100	100	100	100,00	100,00	
13	Program Fasilitasi dan Koordinasi Forum Pengembangan Ekonomi Daerah	Persentase lembaga yang memanfaatkan data perkembangan produksi daerah	100	100	100	100	100,00	100,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022(Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2017	Target Kinerja RKPD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja s/d RKPD Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017 (%)	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2017 terhadap RPJMD	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SEKRETARIAT DPRD							-	**SEKRETARIAT DPRD**
1	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase fasilitasi rapat rapat dan persidangan DPRD tepat waktu	100	100	100	100	100,00	100,00	
		Jumlah Produk Hukum DPRD yang difasilitasi (buah)	15	10	10	10	100,00	66,67	
	INSPEKTORAT KOTA							-	**INSPEKTORAT**
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Persentase rekomendai hasil pemeriksaan Eksternal yang ditindaklanjuti	60	60	60	60	100,00	100,00	
2	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Tingkat/level kapabilitas APIP	3	2	2	2	100,00	66,67	
3	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase penyelesaian pengaduan gratifikasi yang ditindaklanjuti di lingkungan perangkat daerah	100	100	100	100	100,00	100,00	
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							-	**BPBD**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022(Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2017	Target Kinerja RKPD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja s/d RKPD Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017 (%)	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2017 terhadap RPJMD	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pencegahan Dini dan Penanganan Korban Bencana Alam	Presentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana	18	18	16	18	112,50	100,00	
		Presentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	100	100	100	100	100,00	100,00	
	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT							-	**KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT**
1	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama	Persentase santri yang aktif	85	60	60	60	100,00	70,59	
2	Program Optimalisasi Pelayanan Publik	Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100,00	100,00	
3	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100	100	100	100	100,00	100,00	
9	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase kehadiran peserta musrenbang	100	100	100	100	100,00	100,00	
	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR								**KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022(Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2017	Target Kinerja RKPD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja s/d RKPD Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017 (%)	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2017 terhadap RPJMD	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Optimalisasi Pelayanan Publik	Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100,00	100,00	
2	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama	Persentase santri yang aktif	85	60	60	60	100,00	70,59	
3	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100	100	100	100	100,00	100,00	
4	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase kehadiran peserta musrenbang	100	100	100	100	100,00	100,00	
	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA								**KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA**
1	Program Optimalisasi Pelayanan Publik	Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100,00	100,00	
2	Program peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama	Persentase santri yang aktif	85	60	60	60	100,00	70,59	
3	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100	100	100	100	100,00	100,00	
4	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase kehadiran peserta musrenbang	100	100	100	100	100,00	100,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022(Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2017	Target Kinerja RKPD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja s/d RKPD Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017 (%)	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2017 terhadap RPJMD	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN								**KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN**
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100	100	100	100	100,00	100,00	
2	Program Penigkatan Partisipasi masyarakat dalam membanguan desa	Persentase kehadiran peserta musrenbang	100	100	100	100	100,00	100,00	
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahah Umum dan Perangkat Daerah	Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100,00	100,00	
4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama	Persentase santri yang aktif	85	60	60	60	100,00	70,59	
	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI							-	**KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI**
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100	100	100	100	100,00	100,00	
2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase kehadiran peserta musrenbang	100	100	100	100	100,00	100,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022(Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2017	Target Kinerja RKPD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja s/d RKPD Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017 (%)	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2017 terhadap RPJMD	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah	Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100,00	100,00	
4	Program peningkatan Kualitas kehidupan Beragama	Persentase santri yang aktif	85	60	60	60	100,00	70,59	
	KANTOR KESBANG POL								**KANTOR KESBANGPOL**
1	Progam Pendidikan Politik Masyarakat	Jumlah rapat tim dan sosialisasi pada parpol/ormas (kali)	3	5	5	5	100,00	166,67	
2	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase penanganan konflik yang terjadi di tengah masyarakat	100	100	100	100	100,00	100,00	
3	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah sosialisasi yang diadakan (kali)	3	5	5	5	100,00	166,67	

2.2.2 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran strategis pemerintah Kota Payakumbuh yang tertuang dalam RPJMD periode 2017-2022. Hasil evaluasi capaian indikator Kinerja Utama digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel II-151
Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2017

Sasaran		Indikator Sasaran		Target	Realisasi	Status Capaian
1	Meningkatnya kualitas pendidikan	1	Persentase sekolah (SD, SMP) yang berakreditasi A	42	66,08	▲
2	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	2	Angka Usia Harapan Hidup	73,14*	N/A	-
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	61,70*	N/A	-
4	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan	4	Tingkat Kemiskinan	6,2*	5,88	▲
		5	Tingkat Pengangguran	7,07*	3,45	▲
5	Meningkatnya prestasi Atlet	6	Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Nasional	4	9	▲
6	Meningkatkan Produktivitas Sektor Strategis	7	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	23,92	23,93	●
		8	Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB	5,98	7,25	▲
		9	Laju pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	7,39	7,07	▼
		10	Persentase peningkatan kunjungan wisata	1,2	10,80	▲
7	Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh	11	Nilai Realisasi Investasi (Miliar Rupiah)	195	229,3	▲
		12	Persentase Usaha Kecil Menengah terhadap UMKM	27,14	27,14	●
8	Meningkatnya Kualitas Koperasi	13	Persentase Peningkatan SHU Koperasi	10,26	2,18	▼
9	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan	14	Persentase pelayanan air minum	94,41	94,46	▲
		15	Persentase panjang jalan status Kota dalam kondisi mantap	66,56	66,56	●
		16	Persentase Sistem drainase skala kota	42,17	51,55	▲
		17	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	78,60	78,60	●
		18	Persentase daerah irigasi berkinerja baik	73,43	76,77	▲
		19	Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan	72,22	73,5	▲
10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	56,5	56,5	●
11	Mewujudkan	21	Persentase luas kawasan	1,77	1,60	▲

Sasaran		Indikator Sasaran		Target	Realisasi	Status Capaian
	Perumahan dan pemukiman yang layak		kumuh			
12	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintahan	22	Nilai Evaluasi AKIP Kota	BB	BB	●
		23	Opini BPK	WTP	WTP	●
		24	Persentase Perangkat Daerah terintegrasi Teknologi Informasi	9,68	9,68	●
		25	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,35	79,35	●
		26	Indeks Reformasi Birokrasi	45	56,83	▲
13	Meningkatnya pengamalan ajaran agama	27	Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter berkategori baik	5,81	5,81	●
		28	Persentase peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan melalui lembaga/ Badan Zakat/ Wakaf	3,0	3,5	▲
14	Menguatnya lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat	29	Persentase lembaga keagamaan yang aktif	61,29	62	▲
		30	Persentase lembaga adat yang aktif	80	80	●

Keterangan : ● = tercapai ▲ = melebihi target ▼ = tidak tercapai dan perlu perhatian

Dari ke-14 sasaran dan 30 Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, hanya 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang belum mencapai target yang ditetapkan, yakni capaian laju pertumbuhan PDRB dari sektor pertanian dan indikator persentase peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi. Sehingga secara umum capaian IKU Kota Payakumbuh dari 30 indikator telah terealisasi sesuai target dan melebihi sebanyak 93,3 %.

2.2.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah

2.2.3.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan pemerataan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi, laju inflasi dan PDRB perkapita yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-152
Capaian Kinerja Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Status Capaian
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,11	6,11	●
2.	Laju Inflasi	%	4,17	2,11	▲
3.	PDRB Perkapita	*juta rupiah*	40,11	41,19	▲
4.	Nilai Koefisien Gini	Nilai	0,303	0,303	●

Keterangan : ● = tercapai ▲ = melebihi target

Untuk kinerja pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, semuanya mencapai target yang telah ditetapkan, seperti pertumbuhan ekonomi dengan target realistis sebesar 6,11% dan terealisasi sebesar 6,11%. Walaupun pertumbuhan ekonomi nasional cenderung mengalami penurunan dari tahun 2012 s/d 2015, namun mulai membaik pada tahun 2017, yaitu sebesar 5,07% yang dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi masyarakat dan meningkatnya ekspor luar negeri. Perbaikan ekonomi pada tahun 2017cukup berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh. Pencapaian targetpertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh disebabkan oleh unit-unit produksi dari setiap lapangan usaha mikro, kecil dan menengah sudah mulai berkembang dan bersaing baik dalam produk maupun pemasaran.

Untuk laju inflasi terjadi penurunan yang sangat signifikan dari target 4,17% terealisasi sebesar 2,11%. Ini menggambarkan bahwa supply barang kebutuhan pokok sudah mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga tidak berdampak terhadap melonjaknya harga barang terutama pada setiap bulan puasa dan lebaran.

Pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan PDRB per kapita,dimana target kinerja PDRB Per kapita pada tahun 2017 adalah sebesar 40,11 juta. Dari target tersebut, PDRB per kapita yang terealisasi adalah sebesar 41,19 juta atau 102,69% dari target. Ini menggambarkan bahwa pertumbuhan penduduk dapat diiringi dengan pertumbuhan PDRB.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang cukup baik di atas dapat diimbangi dengan pemerataan yang cukup baik dilihat dari Koefisien Gini sesuai dengan target sebesar 0,303. Ini menggambarkan tingkat ketimpangan yang rendah.

B. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Fokus Kesejahteraan masyarakat meliputi angka kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Angka Usia Harapan Hidup (AHH). Target dan capaian kinerja tergambar pada tabel berikut.

Tabel II-153
Capaian Indikator Kinerja Fokus Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Status Capaian
1.	Angka kemiskinan	%	6,20	5,88	▲
2.	Tingkat Pengangguran	%	6,92	3,45	▲
3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Skor	77,90	77,97	▲
4.	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,40	10,42	▲
5.	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,31	14,25	▼
6.	Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	Tahun	73,14	73,23	▲

Keterangan : ▲ = melebihi target ▼ = tidak tercapai dan perlu perhatian

Dari 6 (enam) indikator kinerja fokus kesejahteraan masyarakat, hanya Angka Harapan Lama Sekolah yang tidak tercapai, dari target sebesar 14,31 tahun terealiasasi sebesar 14,25 tahun. Angka ini sebetulnya masih dalam rata-rata 14 tahun, namun perlu intervensi kegiatan sehingga angkanya mengalami peningkatan. Terutama efektifitas,

efisiensi dan ketetapatan sasaran kegiatan pemberian beasiswa bagi masyarakat miskin dan yang bermasalah dalam pendidikan serta workshop dan parenting bagi orang tua.

Untuk indikator angka kemiskinan dan pengangguran mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yang menandakan program-program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran cukup berhasil. Capaian angka kemiskinan mencapai 5,88% dari yang ditargetkan sebesar 6,20. Demikian pula angka pengangguran dari target sebesar 6,92% menjadi hanya tinggal sebesar 3,45%. Ini disebabkan efektifitas penyerapan tenaga kerja pada sektor Usaha Kecil dan Menengah yang selama ini menjadi penggerak perekonomian Kota Payakumbuh sekaligus penyerap tenaga kerja.

Sementara itu, untuk indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Angka Usia Harapan Hidup juga mengalami peningkatan. Ini menggambarkan telah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pendidikan dan kesehatan. Prioritas pembangunan terhadap bidang pendidikan dan kesehatan perlu dilanjutkan sehingga tingkat Usia Harapan Hidup masyarakat Kota Payakumbuh dan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan semakin meningkat pula.

Pencapaian untuk indikator ini sudah melebihi dari yang ditargetkan hal ini mengindikasikan program/kegiatan yang dilaksanakan sudah cukup efektif untuk meningkatkan kesadaran para ibu dari anak balita untuk memperhatikan keadaan gizi anak mereka, sekaligus mencerminkan semakin membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Payakumbuh.

2.2.3.2 Aspek Pelayanan Umum

A. Fokus Layanan Urusan Wajib

a. Pendidikan

Salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap daerah adalah bidang pendidikan. Kemajuan di bidang pendidikan dapat dilihat dari berbagai indikator sebagai berikut :

Tabel II-154
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Status Capaian
1.	**Angka Partisipasi Kasar (APK)**				
a.	APK PAUD	%	75,00	62,61	▼
b.	APK SD/MI/Paket A	%	114,31	124,20	▲
c.	APK SMP/MTs/Paket B	%	141,05	159,67	▲
2.	**Angka Partisipasi Murni**				
a.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	100,88	110,65	▲
b.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	109,94	121,32	▲
c.	Rasio Siswa SD/MI Perkelas	%	27	28	▲
d.	Rasio Siswa SMP/MTS Perkelas	%	30	30	●
e.	Jumlah sekolah (SD, SMP) yang berakreditasi A	%	67	70	▲

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Status Capaian
f.	Jumlah Lembaga PAUD dan Dikmas yang terakreditasi	%	40	54	▲
g.	Angka kelulusan	%	100,00	99,91	▼
h.	Rata-rata Nilai Ujian Nasional SD	%	7,60	7,60	●
i.	Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP	%	5,75	5,75	●

Keterangan : ● = tercapai ▲ = melebihi target ▼ = tidak tercapai dan perlu perhatian

Pada indikator pendidikan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Payakumbuh pada tahun 2017 sudah menunjukkan hasil yang cukup baik, hampir semua sub indikator untuk ini sudah mencapai target, hanya APK PAUD dan Angka Kelulusan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Ketidaktercapaian target APK PAUD disebabkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memasukkan anak-anaknya ke PAUD. Untuk ini, harus ada kegiatan parenting orang tua akan pentingnya pendidikan mulai dari anak usia dini serta adanya inovasi pada lembaga-lembaga PAUD yang ada sehingga menarik bagi orang tua dan peserta didiknya. Untuk angka kelulusan juga tidak mencapai target 100%, karena adanya siswa yang tidak lulus ujian. Ini lebih banyak disebabkan adanya murid yang bermasalah.

b. Kesehatan

Untuk mengevaluasi efektifitas pelaksanaan kegiatan urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II-155
Pencapaian Indikator Kinerja Kesehatan Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Status Capaian
1	Jumlah Kasus Kematian Bayi	jumlah	27	13	▲
2	Jumlah Kasus Kematian Ibu melahirkan	jumlah	3	3	●
3	Persentase Balita Gizi Buruk	%	<3	0,07	●
4	Jumlah kasus Kematian Balita	jumlah	<13	3	●
5	Persentase Kasus Diare per jumlah penduduk	%	1,72	1,65	▲
6	Persentase Kasus Hipertensi (Usia > 40 tahun)	%	1,94	2,00	▼
7	Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar	%	85	100	▲
8	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan	%	100	100	●

Keterangan : ● = tercapai ▲ = melebihi target ▼ = tidak tercapai dan perlu perhatian

Dari 8 (delapan) indikator kinerja untuk kesehatan, sebagian besar telah mencapai target yang ditetapkan ada beberapa diantaranya melebihi target diantaranya jumlah kasus kematian bayi yang ditargetkan sebesar 27 terealisasi 13 kasus, ini disebabkan

semakin intensifnya sosialisasi tentang melahirkan melalui tenaga yang terlatih dan adanya program jaminan persalinan. Kondisi ini sejalan dengan kasus kematian ibu melahirkan yang juga mencapai target yang ditetapkan sebesar 3 kasus saja. Ke depannya diharapkan ini dapat diturunkan lagi dengan optimalisasi program dan kegiatan, sehingga kasus-kasus seperti ini bisa diminimalisir menjadi zero case. Capaian indikator persentase kasus diare dan cakupan pelayanan kesehatan dasar juga melebihi target yang ditetapkan.

Hanya persentase kasus hipertensi yang tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan. Dari target sebesar 1,94% terealisasi sebesar 2%, berarti kasus hipertensi semakin meningkat di Kota Payakumbuh. Ini menandakan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pola makan yang sehat, seperti kadar gula tinggi, kadar lemak dan kadar garam tinggi serta kebiasaan merokok, minuman bersoda, begadang dan jarang berolah raga.

c. Pekerjaan Umum

Untuk melihat efektifitas pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II-156
Pencapaian indikator kinerja Urusan Pekerjaan Umum tahun 2017

No	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Status Capaian
1	Persentase rumah yang terlayani air minum perpipaan	%	91,61	94,41	▲
2	Persentase irigasi dengan kondisi baik	%	72,43	73,43	▲
3	Persentase Penataan sungai	%	15,44	72,40	▲
4	Persentase panjang jalan status kota dalam kondisi mantap	%	66,56	66,56	●
5	Persentase jalan kota yang memiliki drainase	%	52,17	66,56	▲
6	Persentase Kepatuhan Pembangunan sesuai dokumen tata ruang	%	78,60	78,60	●

Keterangan : ● = tercapai ▲ = melebihi target

Capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum semuanya sudah tercapai dan melebihi target yang ditetapkan. Dari 6 (enam) indikator seperti persenatse rumah yang terlayanai air minum perpipaan, irigasi dengan kondisi baik, penataan sungai dan jalan kota yang memiliki drainase, semuanya melebihi target yang ditetapkan. Sedangkan persentase jalan kota dalam kondisi mantap dan kepatuhan pembangunan terhadap dokumen tata ruang mencapai terget yang ditetapkan. Secara umum ini menandakan bahwa efektifitas pelaksanaan program-program ke-PU-an sudah terlaksana dengan baik.

d. Perumahan Rakyat

Untuk mengevaluasi efektifitas pelaksanaan kegiatan Urusan Perumahan Rakyat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II-157
Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2017

No	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Status Capaian
1	Persentase Rumah Layak Huni	%	91,70	91,89	▲
2	Persentase rumah bersanitasi layak	%	88,20	88,50	▲
3	Luas pengurangan kawasan kumuh	Ha	5,80	5,80	●

Keterangan : ● = tercapai ▲ = melebihi target

Sama halnya dengan Urusan Pekerjaan Umum, capaian kinerja untuk Urusan Perumahan Rakyat juga telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2017. Dari 3 (tiga) indikator, yaitu persentase rumah layak huni dan rumah bersanitasi layak sudah melebihi target yang ditetapkan. Sedangkan target pengurangan kawasan kumuh sudah sesuai dengan target. Hal ini juga sejalan dengan pencapaian target 100-0-100 sebagaimana yang tercantum dalam RPJMN 2014- 2019.

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Untuk mengevaluasi efektifitas pelaksanaan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-158
Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2017

No	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Status Capaian
1	Penegakkan Perda	%	100	100	●
2	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	Rasio	8	8,72	▲
3	Rasio jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk	Rasio	48	39,83	▼
4	Rasio pos siskamling per jumlah desa/ kelurahan	Unit	1	1	●
5	Cakupan pelayanan penanganan kebakaran	%	124,33	124,33	●
6	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%	4,35	64,44	▲

Keterangan : ● = tercapai ▲ = melebihi target ▼ = tidak tercapai dan perlu perhatian

Capaian kinerja untuk urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat juga sudah mencapai target yang ditetapkan, dari 6 (enam) indikator pada urusan ini, hanya indikator rasio jumlah Linmas yang tidak tercapai, ini disebabkan tidak sebandingnya pertambahan tenaga linmas yang cenderung tetap dibandingkan dengan pertambahan penduduk yang selalu meningkat.

f. Sosial

Untuk melihat efektifitas perkembangan pelaksanaan kegiatan sosial di Kota Payakumbuh dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja urusan sosial pada tabel berikut ini :

Tabel II-159
Capaian Indikator Bidang Sosial Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Status Capaian
1	Angka Kemiskinan	%	6,20	5,88	▲
2	Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang keluar dari basis data terpadu	%	0,20	0,53	▲
3	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos	%	44	45,55	▲
4	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	%	99,50	98	▼

Keterangan : ▲ = melebihi target ▼ = tidak tercapai dan perlu perhatian

Dari 4 (empat) indikator bidang sosial, capaian 3 (tiga) indiaktor sudah melebihi target yang ditetapkan, yaitu angka kemiskinan, persentase RTS yang keluar dari basis data terpadu dan persentase PSKS yang berdaya, sedangkan persentase PMKS yang tertangani PSKS yang ditergetkan sebesar 99,5% terealisasi sebesar 98%. Ini disebabkan jumlah dan kualitas PSKS yang ada saat ini belum memadai. Untuk ini perlu peningkatan jumlah dan kualitas PSKS serta revitalisasi tugas dan fungsi PSKS yang ada.

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

a. Ketenagakerjaan

Pada Urusan Ketenagakerjaan Target dan capaian kinerja tergambar pada tabel berikut:

Tabel II-160
Capaian Indikator Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2017

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Status Capaian
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,15	70,62	▲

Keterangan : ▲ = melebihi target

Dari tabel diatas terlihat bahwa hanya ada 1 (satu) indikator untuk menggambarkan capaian urusan ketenagakerjaan, yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pada tahun 2017, capaiannya sudah melebihi target yang ditetapkan, yaitu sebesar 70,62% dari target sebesar 70,15%. Ini menunjukkan bahwa penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari di Kota Payakumbuh semakin tinggi, sehingga semakin menurun tingkat pengangguran.

b. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Untuk melihat sejauh capaian urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan Keluarga Berencana, maka dapat dilihat dari beberapa indikator berikut.

Tabel II-161
Pencapaian Indikator Kinerja Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Status Capaian
1	Persentase Keterwakilan perempuan dalam berpolitik (DPRD)	%	8	8	●
2	Persentase kekerasan terhadap anak	%	0,07	0,07	●
3	Persentase kekerasan terhadap perempuan	%	0,10	010	●

Keterangan : ● = tercapai

Dari 3 (tiga) indikator untuk urusan ini, seluruhnya sudah mencapai target yang ditetapkan, yaitu Persentase Keterwakilan perempuan dalam berpolitik (DPRD), Persentase kekerasan terhadap anak dan Persentase kekerasan terhadap perempuan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, maka perlu optimalisasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dikelola oleh Dinas P3A dan P2KB.

c. Pangan

Pada urusan Pangan, terdapat 5 (lima) indikator yang menjadi alat ukur capaian kinerja sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel II-162
Capaian Indikator Urusan Pangan Tahun 2017

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Status Capaian
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) berbasis ketersediaan	skor	81,50	81,49	▼
2	Skor PPH Konsumsi	skor	80	80,5	▲
3	Tingkat Keamanan Pangan	Indeks	sedang	sedang	●
4	Stabilisasi harga				
	a. Beras	%	≤10	3,18	●
	b. Cabe	%	≤25	28,87	▼
	c. Bawang	%	≤10	11	▼
5	Stabilisasi Pasokan	%	≥77	77,55	●

Keterangan : ● = tercapai ▲ = melebihi target ▼ = tidak tercapai dan perlu perhatian

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja untuk indikator pada urusan pangan masih ada 3 (tiga) indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu skor PPH berbasis ketersediaan dan stabilitas harga untuk komoditi cabe dan bawang. Kurangnya realisasi skor PPH berbasis ketersediaan disebabkan karena belum tercukupinya secara merata ketersediaan pangan yang memberikan sumbangan energi dan gizi bagi masyarakat Kota Payakumbuh. Sementara itu, untuk stabilitas harga cabe dan bawang lebih banyak dipengaruhi oleh pasokan yang kurang dan tingkat konsumsi masyarakat serta prioritas petani yang mengutamakan ekspor ke luar daerah, karena harga yang lebih tinggi.

d. Pertanahan

Untuk mengevaluasi efektifitas pelaksanaan urusan pertanahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II-163
Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2017

No	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Status Capaian
1	Persentase sertifikasi aset tanah dan bangunan pemko	%	56,82	60,62	▲

Keterangan : ▲ = melebihi target

Untuk tahun 2017 lalu, sertifikasi tanah pemerintah kota sudah cukup baik, dari target sebesar 56,82% terealisasi sebesar 60,62%. Ini disebabkan adanya program-program pengadaan tanah yang dianggarkan pada tahun lalu dalam rangka pembangunan berbagai fasilititas untuk kepentingan masyarakat. Walaupun sering terjadi konflik pertanahan, karena permasalahan kepemilikan tanah ulayat di Minangkabau, namun dengan pendekatan yang baik kepada pemilik tanah dan kaum pemilik tanah, semuanya dapat terselesaikan dengan baik.

e. Lingkungan Hidup

Untuk mengevaluasi efektifitas pelaksanaan urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-164
Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2017

No	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Status Capaian
1	Persentase RTH Publik	%	15,45	21	▲
2	Indeks Kualitas Air	nilai	75	75	●
3	Indeks Kualitas Udara	nilai	80	80	●
4	Persentase usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup	%	35,05	40	▲
5	Persentase cakupan pelayanan persampahan	%	88,12	88,24	▲

Keterangan : ● = tercapai ▲ = melebihi target

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat 5 (lima) indikator kinerja, yaitu persentase RTH Publik, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Persentase usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan Persentase cakupan pelayanan persampahan. Kelima indikator tersebut sudah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, untuk indek kualitas air dan udara targetnya adalah bersifat mempertahankan kondisi sekarang agar kualitasnya terjaga dari pencemaran.

f. Kependudukan dan Catatan Sipil

Capaian kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-165
Pencapaian Indikator Kinerja Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Status Capaian
1	Cakupan kepemilikan KTP	%	83,00	97,12	▲
2	Cakupan kepemilikan Akte kelahiran (0 – 18 Tahun)	%	85,00	84,05	▼
3	Cakupan kepemilikan KK	%	100	100	●
4	Cakupan kepemilikan akte kematian	%	36,00	41,69	▲
5	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	%	76,00	81,10	▲

Keterangan : ● = tercapai ▲ = melebihi target ▼ = tidak tercapai dan perlu perhatian

Dari tabel terlihat bahwa terdapat 5 (lima) indikator kinerja untuk urusan ini, 4 (empat) indikator sudah mencapai bahkan melebihi target, yaitu Cakupan kepemilikan KTP, Cakupan kepemilikan KK, Cakupan kepemilikan akte kematian dan Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan. Sedangkan Cakupan kepemilikan Akte kelahiran (0 – 18 Tahun) belum mencapai target, dari target sebesar 85% terealisasi hanya sebesar 84,05%. Ini disebabkan masih kurangnya kesadaran untuk pengurusan akte kelahiran. Untuk meningkatkan target tersebut, maka perlu pendekatan dan sosialisasi langsung pada masyarakat terkait pengurusan dokumen ini, di samping itu optimalisasi program-program unggulan dan inovasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang sudah berjalan selama ini.

g. Perhubungan

Untuk melihat efektifitas pelaksanaan bidang perhubungan sesuai dengan capaian indikator kinerja yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-166
Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Perhubungan Tahun 2017

No	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Status Capaian
1	Persentase masyarakat yang menggunakan sarana angkutan umum	%	63,24	89,22	▲
2	Persentase ketersediaan terminal angkutan penumpang	%	70,45	70,45	●
3	Jumlah rute pelayanan angkutan umum dalam kota	Rute	23	23	●
4	Nilai survey IKM Pelayanan Transportasi	angka	90,16	90	▼
5	Persentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas	%	0,05	0,04	▼

Keterangan : ● = tercapai ▲ = melebihi target ▼ = tidak tercapai dan perlu perhatian

Dari 5 (lima) indikator kinerja untuk urusan perhubungan, terdapat 2 (dua) indikator yang belum mencapai target pada tahun 2017, yaitu Nilai survey IKM Pelayanan Transportasi dan Persentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas. Tidak tercapainya nilai IKM sektor perhubungan menandakan masih kurangnya kualitas pelayanan, sedangkan penurunan angka kecelakaan tidak tercapai disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi tata tertib berlalu lintas serta tingginya penambahan kepemilikan kendaraan bermotor.

h. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Pada urusan Usaha Kecil dan Menengah terdapat 4 (empat) indikator yang menjadi ukuran kinerja urusan ini dengan capaian sebagai berikut.

Tabel II-167
Capaian Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2017

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Status Capaian
1	Persentase pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah	%	1,20	27,14	▲
2	Persentase pertumbuhan tenaga kerja sektor UMKM	%	10,00	10,09	▲
3	Persentase Peningkatan SHU Koperasi	%	7,26	2,18	▼
4	Persentase pertumbuhan aset koperasi	%	2,77	14,54	▲

Keterangan : ▲ = melebihi target ▼ = tidak tercapai dan perlu perhatian

Dari keempat indikator di atas masih ada yang tidak mencapai target, yaitu Persentase Peningkatan SHU Koperasi. Dari target sebesar 7,26% terealisasi hanya sebesar 2,18% yang disebabkan oleh masih kurangnya pertambahan jumlah anggota, jumlah pinjaman dan jumlah simpanan anggota. Untuk mengatasi kondisi ini, harus ada pembinaan dan pelatihan terhadap manajemen koperasi, sehingga tercipta inovasi dan diversifikasi terhadap produk dan pelayanan koperasi yang menarik bagi anggota.

i. Penanaman Modal

Pada bidang Penanaman modal terdapat 3 (tiga) indikator yang menjadi alat ukur capaian kinerja yang tergambar pada tabel berikut

Tabel II-168
Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Tahun 2017

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Status Capaian
1	Jumlah investor	orang	496	560	▲
2	Nilai Survey Kepuasaan Masyarakat	Nilai	83,00	81,67	▼
3	Jumlah penurunan pengaduan perizinan masyarakat	%	28,57	17,14	▲

Keterangan : ▲ = melebihi target ▼ = tidak tercapai dan perlu perhatian

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat indikator capaian kinerja untuk urusan penanaman modal yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu nilai IKM.

Dari target sebesar 83 terealisasi sebesar 81,67. Ini menandakan masih kurangnya kualitas pelayanan dan prosedur perizinan. Sedangkan untuk indikator jumlah investor dan jumlah penurunan pengaduan perizinan masyarakat telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2017.

j. Kepemudaan dan Olah Raga

Pada Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, target dan capaian kinerja dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel II-169
Capaian Indikator Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2017

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Status Capaian
1	Peringkat pemuda pelopor tingkat nasional	Peringkat	1	-	▼
2	Peringkat pramuka tk. Propinsi	Regu	1	-	▼
3	Peringkat pemuda pada lomba wirausaha muda tk. Propinsi dan tk. nasional	Peringkat	1	-	▼
4	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	organisasi	20	50	▲
5	Jumlah medali pada even olahraga tingkat daerah	Medali	24	36	▲

Keterangan : ▲ = melebihi target ▼ = tidak tercapai dan perlu perhatian

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 5 (lima) indikator kinerja bidang kepemudaan dan olah raga terdapat 3 (tiga) indikator yang belum mencapai target, yaitu peringkat pemuda pelopor tingkat nasional, peringkat pramuka tingkat Propinsi serta Peringkat pemuda pada lomba wirausaha muda tingkat Propinsi dan tingkat Nasional. Kondisi ini disebabkan tidak masuknya utusan Kota Payakumbuh dalam lomba pemuda pelopor, baik di tingkat propinsi dan nasional pada tahun 2017.

k. Statistik

Untuk melihat capaian kinerja urusan statistik dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja pada tabel berikut ini

Tabel II-170
Capaian Indikator Urusan Statistik Tahun 2017

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Status Capaian
1	Jumlah dokumen statistik yang tersedia	buah	3	3	●

Keterangan : ● = tercapai

Kinerja pada urusan statistik untuk tahun 2017 menunjukkan pencapaian 100%, dimana indikator hanya mensyaratkan keberadaan dokumen Buku Payakumbuh Dalam Angka, Buku Kecamatan Dalam Angka dan Buku PDRB.

l. Kebudayaan

Terdapat 2 (dua) indikator yang menjadi alat ukur capaian kinerja urusan Kebudayaan sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel II-171
Capaian Indikator Urusan Kebudayaan Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Status Capaian
1	Jumlah Benda Cagar Budaya (BCB) yang dilindungi	unit	18	18	●
2	Jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif	grup	66	70	▲

Keterangan : ● = tercapai ▲ = melebihi target

Dari tabel diatas terlihat jika capaian kinerja untuk indikator urusan kebudayaan sudah mencapai target yang ditetapkan, bahkan untuk indikator jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif sudah melebihi target yang ditetapkan.

m. Perpustakaan

Untuk melihat efektifitas perkembangan pelaksanaan Urusan Kepustakaan dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja pada tabel berikut.

Tabel II-172
Capaian Indikator Perpustakaan Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Status Capaian
1	Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	7.500	8.850	▲

Keterangan : ▲ = melebihi target

Pada Urusan Perpustakaan hanya ada 1 (satu) indikator kinerja, yaitu jumlah pengunjung perpustakaan yang capaiannya melebihi target yang ditetapkan. Kondisi ini cukup menggembirakan walaupun dengan kondisi fisik bangunan perpustakaan yang belum representatif. Ini menandakan bahwa minat baca di Kota Payakumbuh sudah cukup baik. Tahun 2019 direncanakan akan dibangun gedung perpustakaan yang representatif melalui Dana Alokasi Khusus.

n. Kearsipan

Capaian kinerja urusan kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-173
Capaian Indikator Urusan Kearsipan Tahun 2017

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Status Capaian
1	Jumlah khasanah arsip	berkas	6.000	6.541	▲

Keterangan : ▲ = melebihi target

Capaian kinerja pada urusan Kearsipan sangat baik dimana dari indikator yang ada, yaitu jumlah khasanah arsip sudah melebihi target yang ditetapkan. Dari target sebanyak 6.000 berkas terealisasi mencapai 6.541 berkas.

C. Pelayanan Urusan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

Untuk melihat efektifitas perkembangan pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja pada tabel berikut.

Tabel II-174
Capaian Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2017

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Status Capaian
1	Produksi ikan konsumsi	ton	482,25	329	▼
2	Angka Konsumsi Ikan	%	28,99	29	▲

Keterangan : ▲ = melebihi target ▼ = tidak tercapai dan perlu perhatian

Pada urusan pilihan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2017 terdapat 2 (dua) indikator yang menggambarkan keberhasilan untuk sektor ini, yaitu produksi ikan konsumsi dan angka konsumsi ikan. Dari kedua indikator tersebut produksi ikan konsumsi tidak mencapai target. Target sebesar 482,25 ton terealisasi hanya 329 ton, ini disebabkan rendahnya produksi perikanan di kolam-kolam masyarakat.

b. Pariwisata

Capaian kinerja Urusan Pariwisata tergambar pada tabel berikut:

Tabel II-175
Capaian Indikator Urusan Pariwisata Tahun 2017

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Status Capaian
1	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	2,50	10,80	▲

Keterangan : ▲ = melebihi target

Dari tabel di atas terlihat jika capaian kinerja untuk bidang pariwisata yaitu persentase peningkatan kunjungan wisatawan sudah melebihi target yang ditetapkan.

c. Pertanian

Pada Urusan Pertanian terdapat 5 (lima) indikator yang menjadi alat ukur capaian kinerja sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel II-176
Capaian Indikator Urusan Pertanian Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Status Capaian
1	Produksi padi	Ton	35.000	28.113	▼
2	Produksi cabe	Ton	380	306	▼
3	Produksi bawang	Ton	50	92	▲
4	Produksi Kakao	Ton	970	780	▼
5	Jumlah sapi	Ekor	5.620	5.530	▼

Keterangan : ▲ = melebihi target ▼ = tidak tercapai dan perlu perhatian

Dari tabel diatas terlihat jika capaian kinerja untuk indikator bidang pertanian hanya 1 (satu) yang mencapai target, yaitu produksi bawang. Sedangkan produksi padi, cabe, kakao dan jumlah sapi tidak mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2017. Untuk tahun 2019, ini perlu menjadi perhatian, karena dengan rencana pembangunan badan usaha daerah yang salah satu corenya adalah produksi rendang yang erat kaitannya dengan produksi sapi.

d. Perdagangan

Pada Urusan Perdagangan terdapat 2 (dua) indikator yang menjadi alat ukur capaian kinerja sebagaimana tergambar pada tabelberikut.

Tabel II-177
Capaian Indikator Bidang Perdagangan Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Status Capaian
1	Persentase pertumbuhan omset	%	25	28	▲
2	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (2010=100)	%	23,92	23,93	▲

Keterangan : ▲ = melebihi target

Dari tabel diatas terlihat capaian kinerja untuk tiap indikator bidang perdagangan sudah mencapai target yang ditetapkan. Namun kedepannya harus ada peningkatan daya saing usaha terutama produk-produk spesifik daerah serta perlu antisipasi terhadap masalah minimnya investasi di sektor sarana perdagangan.

e. Perindustrian

Terdapat 3 (tiga) indikator yang menjadi alat ukur capaian kinerja Urusan Perindustrian sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel II-178
Capaian Indikator Urusan Perindustrian Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Status Capaian
1	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (2010=100)	%	5,98	7,25	▲
2	Persentase peningkatan nilai produksi	%	3	2	▼
3	Nilai LQ Industri	Nilai	0,52	0,52	●

Keterangan : ● = tercapai ▲ = melebihi target ▼ = tidak tercapai dan perlu perhatian

Dari tabel di atas terlihat capaian kinerja 2 (dua) indikator pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang melaksanakan urusan perindustrian telah mencapai dan melebihi target yang ditetapkan pada RPJMD Kota Payakumbuh, namun terdapat 1 (satu) indikator yang tidak tercapai, yaitu persentase peningkatan nilai produksi yang ditargetkan sebesar 3% terealisasi hanya 2%, disebabkan masih rendahnya kualitas produksi IKM Kota Payakumbuh. Namun secara umum tidak ada kendala dalam pencapaian indikator kinerja Urusan Perindustrian ini.

D. Pendukung

a. Kesekretariatan Daerah

Untuk Urusan Pendukung Kesekretariatan Daerah terdapat indikator kinerja yang akan menggambarkan capaian kinerjanya sebagaimana tabel berikut.

Tabel II-179
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendukung Kesekretariatan Daerah Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Status Capaian
1	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai	B	BB	▲
2	Peringkat LPPD	Peringkat	20	15	▲
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kategori	Baik	Baik	●
4	Persentase jumlah paket lelang yang melalui elektronik	%	100	100	●
5	Persentase penyelesaian masalah hukum yang diproses secara non litigasi	%	50	50	●

Keterangan : ● = tercapai ▲ = melebihi target

Pada Urusan Pendukung Kesekretariatan Daerah, pada tahun 2017 semua indikator kinerja sudah sesuai target bahkan melebihi, yaitu pada indikator Nilai AKIP dan peringkat LPPD. Sedangkan nilai IKM, jumlah paket lelang melalui elektronik dan penyelesaian masalah hukum yang diproses secara non litigasi mencapai angka yang ditargetkan.

b. Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Untuk Urusan Pendukung Kesekretariatan DPRD terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang akan menggambarkan capaian kinerjanya sebagaimana tabel berikut.

Tabel II-180
Capaian Indikator Kinerja Pada Urusan Pendukung Kesekretariatan DPRD Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Status Capaian
1	Tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan	%	70,00	73,29	▲
2	Persentase aspirasi masyarakat yang ditanggapi DPRD	%	80,00	100	▲

Keterangan : ▲ = melebihi target

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari kedua indikator kinerja sudah tercapai dengan baik dan melebihi target yang ditetapkan.

E. Penunjang

a. Inspektorat

Untuk Urusan PenunjangInspektorat terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja yang akan menggambarkan capaian kinerjanya sebagaimana tabel berikut.

Tabel II-181
Capaian Indikator Kinerja Pada Urusan PenunjangInspektorat Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Status Capaian
1	Persentase Perangkat Daerah yang akuntabilitas kinerjanya meningkat per tahun	%	64,50	50	▼
2	Indeks Reformasi Birokrasi	%	67,50	56,83	▼
3	Persentase pelaksanaan PKPT per tahun	%	100	100	●
4	Persentase pengaduan masyarakat yang diproses/diperiksa	%	100	100	●
5	Persentase pemeriksaan dengan tujuan tertentu (khusus) yang diproses/diperiksa	%	100	100	●
6	Persentase Perangkat Daerah yang akuntabilitas keuangannya baik	%	60	75	▲
7	Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap hasil pembinaan pengawasan yang lebih komprehensif	%	60	80	▲

Keterangan : ● = tercapai ▲ = melebihi target ▼ = tidak tercapai dan perlu perhatian

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat 2 (dua) indikator yang tidak mencapai target yang ditetapkan, yaituPersentase Perangkat Daerah yang akuntabilitas kinerjanya meningkat per tahun dan Indeks Reformasi Birokrasi. Untuk Persentase Perangkat Daerah yang akuntabilitas kinerjanya meningkat per tahun, dari target sebesar 64,5% terealisasi sebesar 50%, ini disebabkan secara umum karena masih ada OPD yang nilai akuntabilitasnya tidak sesuai dengan target BB, terutama OPD yang tidak mendapat pendampingan dalam penialian AKIP Tahun 2017. Sedangkan Indeks Reformasi Birokrasi tidak mencapai target, karena dalam penetapan target yang terlalu tinggi, padahal ditingkat nasional target pada tahun 2017 hanya 55. Dari target nasional tersebut Indeks RB Kota Payakumbuh sudah melebihi. Indikator-indikator lain untuk urusan ini sudah mencapai dan melebihi target yang ditetapkan.

b. Perencanaan

Untuk Urusan PenunjangPerencanaan terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang akan menggambarkan capaian kinerjanya sebagaimana tabel berikut.

Tabel II-182
Capaian Indikator Kinerja Pada Urusan Penunjang Perencanaan Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Status Capaian
1	Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	%	31,00	31,23	▲
2	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	%	94,08	100	▲
3	Persentase Indikator RPJMD yang tercapai atau melebihi target	%	85,31	83,29	▼

Keterangan : ▲ = melebihi target ▼ = tidak tercapai dan perlu perhatian

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk urusan ini, terdapat 1 (satu) indikator yang tidak mencapai target yang ditetapkan, yaituPersentase Indikator RPJMD yang tercapai atau melebihi target. Dari target sebesar 85,31% terealisasi sebesar 83,29%, ini disebabkan penetapan target yang terlalu tinggi. Namun secara umum dari semua target indikator kinerja daerah yang ada di RPJMD menunjukkan pencapaian yang signifikan dan menggambarkan kinerja daerah secara keseluruhan. Untuk indikator Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat dan Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD sudah melebihi target yang ditetapkan.

c. Keuangan

Untuk Urusan PenunjangKeuangan terdapat 6 (enam) indikator kinerja yang akan menggambarkan capaian kinerjanya sebagaimana tabel berikut.

Tabel II-183
Capaian Indikator Kinerja Pada Urusan Penunjang Keuangan Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Status Capaian
1	Opini laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP	WTP	●
2	Penetapan Perda APBD tepat waktu	Waktu	27 Des	22 Sept	▲
3	Kontribusi PAD terhadap pendapatan Daerah	%	11,61	15,78	▲
4	Persentase fasilitasi pembiayaan yang lancar dari total pembiayaan	%	70	70	●
5	IKM Pelayanan Pajak Daerah	indeks	83,32	85	▲
6	IKM Fasilitasi Pembiayaan	indeks	83,32	85	▲

Keterangan : ● = tercapai ▲ = melebihi target

Dari tabel di atas terlihat bahwa seluruh indikator kinerja untuk urusan ini sudah mencapai dan melebihi target yang ditetapkan.

d. Kepegawaian

Untuk Urusan PenunjangKepegawaian terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang akan menggambarkan capaian kinerjanya sebagaimana tabel berikut.

Tabel II-184
Capaian Indikator Kinerja Pada Urusan Penunjang Kepegawaian Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Status Capaian
1	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial	%	52,97	50	▼
2	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis	%	41,79	45	▲
3	Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	%	80,00	79,34	▼

Keterangan : ▲ = melebihi target ▼ = tidak tercapai dan perlu perhatian

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari ketiga indikator kinerja yang ada, hanya satu yang melebihi target, yaitu Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis. Sedangkan indikator Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial dan Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian tidak mencapai target. Untuk Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial, dari target sebesar 52,97% terealisasi sebesar 50%, disebabkan pengalokasian kegiatan diklat pada tahun 2017 lebih banyak untuk kompetensi diklat teknis. Pada indikator Persentase IKM Kepegawaian, dari target sebesar 80% terealisasi sebesar 79,34%. Ini menandakan bahwa prosedur dan kualitas pelayanan kepegawaian belum sesuai dengan harapan dan target.

e. Penelitian dan Pengembangan

Untuk Urusan PenunjangPenelitian dan Pengembangan, indikator kinerjanyaadalah sebagai berikut.

Tabel II-185
Capaian Indikator Kinerja Pada Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Status Capaian
1	Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan	%	60	80	▲

Keterangan : ▲ = melebihi target

Hanya ada satu indikator untuk urusan ini, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan. Capaian kinerjanya sudah melebihi target yang ditetapkan. Ini sejalan dengan kebijakan pemerintah bahwa kelitbangan merupakan hal yang cukup penting dan menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan sekaligus meningkatkan eksistensi lembaga kelitbangan yang ada.

F. Kesatuan Bangsa dan Politik

Untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdapat 2 (dua) unsur yang dinilai, yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik serta Penanggulangan Bencana Daerah dengan beberapa indikator dan capaian sebagai berikut.

Tabel II-186
Capaian Indikator Kinerja Pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Status Capaian
a.	**Kesatuan Bangsa dan Politik**				
1	Persentase penanganan konflik yang terjadi di tengah masyarakat	%	100	100	●
2	Persentase ormas yang aktif	%	90,64	90	▼
b.	**Penanggulangan Bencana Daerah**				
1	Presentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana	%	16,24	18	▲
2	Presentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	%	100	100	●

Keterangan : ● = tercapai ▲ = melebihi target ▼ = tidak tercapai dan perlu perhatian

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 4 (empat) indikator untuk urusan ini hanya persentase ormas yang aktif yang tidak tercapai sesuai dengan target yang ada, yaitu dari target 90,64% terealisasi sebesar 90%.

G. Kewilayahan

Sedangkan untuk Urusan Kewilayahan, terdapat 2 (dua) indikator dan capaian sebagai berikut.

Tabel II-187
Capaian Indikator Kinerja Pada Urusan Kewilayahan Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Status Capaian
1	Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	●
2	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	%	100	100	●

Keterangan : ● = tercapai

Dari tabel di atas terlihat bahwa kedua indikator untuk urusan ini, yaitu Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti dan Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif sudah mencapai target yang ditetapkan.

2.2.3.3 Aspek Daya Saing Daerah

a. **Fokus Kemampuan Ekonomi**

Fokus Kemampuan Ekonomi dilihat dari bidang pertanian, karena sebagian besar masyarakat masih menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian.

1. Pertanian

Untuk Bidang Pertanian ini, indikator yang digunakan beserta capaian kinerjanya digambarkan sebagai berikut.

Tabel II-188
Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Pertanian Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Status Capaian
1	Produktifitas Total Daerah	Rp. Jt	81,34	81,92	▲
2	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp. Ribu	1.743,42	1.816,96	▲
3	Nilai Tukar Petani	%	100,38	100,44	▲
4	Rasio Ketergantungan	%	54,39	54,15	▲

Keterangan : ▲ = melebihi target

Dari tabel di atas terlihat bahwa keempat indikator untuk urusan ini, yaitu Persentase Produktifitas Total Daerah, Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, Nilai Tukar Petani dan Rasio Ketergantungan sudah melebihi target yang ditetapkan.

Dari semua capaian-capaian di atas, maka digambarkan rekapitulasinya sebagaimana tabel berikut.

Tabel II-189
Rekapitulasi Capaian Kinerja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Status Capaian
A.	**Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**				
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,11	6,11	●
2.	Laju Inflasi	%	4,17	2,11	▲
3.	PDRB Perkapita	*juta rupiah*	40,11	41,19	▲
4.	Nilai Koefisien Gini	Nilai	0,303	0,303	●
B.	**Fokus Kesejahteraan Masyarakat**				
1.	Angka kemiskinan	%	6,20	5,88	▲
2.	Tingkat Pengangguran	%	6,92	3,45	▲
3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Skor	77,90	77,97	▲
4.	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,40	10,42	▲
5.	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,31	14,25	▼
6.	Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	Tahun	73,14	73,23	▲
C.	**Fokus Layanan Urusan Wajib**				
a.	**Pendidikan**				
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK)				
-	APK PAUD	%	75	62,61	▼
-	APK SD/MI/Paket A	%	114,31	124,20	▲
-	APK SMP/MTs/Paket B	%	141,05	159,67	▲
2.	Angka Partisipasi Murni				
-	Angka Partisipasi Murni (APM)	%	100,88	110,65	▲

	SD/MI/Paket A				
-	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	109,94	121,32	▲
-	Rasio Siswa SD/MI Perkelas	%	27	28	▲
-	Rasio Siswa SMP/MTS Perkelas	%	30	30	●
-	Jumlah sekolah (SD, SMP) yang berakreditasi A	%	67	70	▲
-	Jumlah Lembaga PAUD dan Dikmas yang terakreditasi	%	40	54	▲
-	Angka kelulusan	%	100	99,91	▼
-	Rata-rata Nilai Ujian Nasional SD	%	7,60	7,60	●
-	Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP	%	5,75	5,75	●
b.	**Kesehatan**				
1	Jumlah Kasus Kematian Bayi	jumlah	27	13	▲
2	Jumlah Kasus Kematian Ibu melahirkan	jumlah	3	3	●
3	Persentase Balita Gizi Buruk	%	<3	0,07	●
4	Jumlah kasus Kematian Balita	jumlah	<13	3	●
5	Persentase Kasus Diare per jumlah penduduk	%	1,72	1,65	▲
6	Persentase Kasus Hipertensi (Usia > 40 tahun)	%	1,94	2,00	▼
7	Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar	%	85	100	▲
8	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan	%	100	100	●
c.	**Pekerjaan Umum**				
1	Persentase rumah yang terlayani air minum perpipaan	%	91,61	94,41	▲
2	Persentase irigasi dengan kondisi baik	%	72,43	73,43	▲
3	Persentase Penataan sungai	%	15,44	72,40	▲
4	Persentase panjang jalan status kota dalam kondisi mantap	%	66,56	66,56	●
5	Persentase jalan kota yang memiliki drainase	%	52,17	66,56	▲
6	Persentase Kepatuhan Pembangunan sesuai dokumen tata ruang	%	78,60	78,60	●
d.	**Perumahan Rakyat**				
1	Persentase Rumah Layak Huni	%	91,70	91,89	▲
2	Persentase rumah bersanitasi layak	%	88,20	88,50	▲
3	Luas pengurangan kawasan kumuh	Ha	5,80	5,80	●
e.	**Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**				
1	Penegakkan Perda	%	100	100	●
2	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	Rasio	8	8,72	▲
3	Rasio jumlah Linmas per jumlah	Rasio	48	39,83	▼

	10.000 penduduk				
4	Rasio pos siskamling per jumlah desa/ kelurahan	Unit	1	1	●
5	Cakupan pelayanan penanganan kebakaran	%	124,33	124,33	●
6	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%	4,35	64,44	▲
f.	**Sosial**				
1	Angka Kemiskinan	%	6,20	5,88	▲
2	Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang keluar dari basis data terpadu	%	0,20	0,53	▲
3	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos	%	44	45,55	▲
4	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	%	99,50	98	▼
D.	**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**				
a.	**Ketenagakerjaan**				
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,15	70,62	▲
b.	**Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**				
1	Persentase Keterwakilan perempuan dalam berpolitik (DPRD)	%	8	8	●
2	Persentase kekerasan terhadap anak	%	0,07	0,07	●
3	Persentase kekerasan terhadap perempuan	%	0,10	0,10	●
c.	**Pangan**				
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) berbasis ketersediaan	skor	81,50	81,49	▼
2	Skor PPH Konsumsi	skor	80	80,5	▲
3	Tingkat Keamanan Pangan	Indeks	sedang	sedang	●
4	Stabilisasi harga				
	a. Beras	%	≤10	3,18	●
	b. Cabe	%	≤25	28,87	▼
	c. Bawang	%	≤10	11	▼
5	Stabilisasi Pasokan	%	≥77	77,55	●
d.	**Pertanahan**				
1	Persentase sertifikasi aset tanah dan bangunan pemko	%	56,82	60,62	▲
e.	**Lingkungan Hidup**				
1	Persentase RTH Publik	%	15,45	21	▲
2	Indeks Kualitas Air	%	75	76	▲
3	Indeks Kualitas Udara	%	80	95,32	▲
4	Persentase usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup	%	35,05	40	▲
5	Persentase cakupan pelayanan persampahan	%	88,12	88,24	▲
f.	**Kependudukan dan Catatan Sipil**				

1	Cakupan kepemilikan KTP	%	83,00	97,12	▲
2	Cakupan kepemilikan Akte kelahiran (0 – 18 Tahun)	%	85,00	84,05	▼
3	Cakupan kepemilikan KK	%	100	100	●
4	Cakupan kepemilikan akte kematian	%	36,00	41,69	▲
5	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	%	76,00	81,10	▲
g.	**Perhubungan**				
1	Persentase masyarakat yang menggunakan sarana angkutan umum	%	63,24	89,22	▲
2	Persentase ketersediaan terminal angkutan penumpang	%	70,45	70,45	●
3	Jumlah rute pelayanan angkutan umum dalam kota	Rute	23	23	●
4	Nilai survey IKM Pelayanan Transportasi	angka	90,16	90	▼
5	Persentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas	%	0,05	0,04	▼
h.	**Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**				
1	Persentase pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah	%	1,20	27,14	▲
2	Persentase pertumbuhan tenaga kerja sektor UMKM	%	10,00	10,09	▲
3	Persentase Peningkatan SHU Koperasi	%	7,26	2,18	▼
4	Persentase pertumbuhan aset koperasi	%	2,77	14,54	▲
i.	**Penanaman Modal**				
1	Jumlah investor	orang	496	560	▲
2	Nilai Survey Kepuasaan Masyarakat	Nilai	83,00	81,67	▼
3	Jumlah penurunan pengaduan perizinan masyarakat	%	28,57	17,14	▲
j.	**Kepemudaan dan Olah Raga**				
1	Peringkat pemuda pelopor tingkat nasional	Peringkat	1	-	▼
2	Peringkat pramuka tk. Propinsi	Regu	1	-	▼
3	Peringkat pemuda pada lomba wirausaha muda tk. Propinsi dan tk. nasional	Peringkat	1	-	▼
4	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	organisasi	20	50	▲
5	Jumlah medali pada even olahraga tingkat daerah	Medali	24	36	▲
k.	**Statistik**				
1	Jumlah dokumen statistik yang tersedia	buah	3	3	●
l.	**Kebudayaan**				
1	Jumlah Benda Cagar Budaya (BCB)	unit	18	18	●

	yang dilindungi				
2	Jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif	grup	66	70	▲
m. Perpustakaan					
1	Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	7.500	8.850	▲
n. Kearsipan					
1	Jumlah khasanah arsip	berkas	6.000	6.541	▲
E. Pelayanan Urusan Pilihan					
a. Kelautan dan Perikanan					
1	Produksi ikan konsumsi	ton	482,25	329	▼
2	Angka Konsumsi Ikan	%	28,99	29	▲
b. Pariwisata					
1	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	2,50	10,80	▲
c. Pertanian					
1	Produksi padi	Ton	35.000	28.113	▼
2	Produksi cabe	Ton	380	306	▼
3	Produksi bawang	Ton	50	92	▲
4	Produksi Kakao	Ton	970	780	▼
5	Jumlah sapi	Ekor	5.620	5.530	▼
d. Perdagangan					
1	Persentase pertumbuhan omset	%	25	28	▲
2	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (2010=100)	%	23,92	23,93	▲
e. Perindustrian					
1	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (2010=100)	%	5,98	7,25	▲
2	Persentase peningkatan nilai produksi	%	3	2	▼
3	Nilai LQ Industri	Nilai	0,52	0,52	●
F. Pendukung					
a. Kesekretariatan Daerah					
1	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai	B	BB	▲
2	Peringkat LPPD	Peringkat	20	15	▲
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kategori	Baik	Baik	●
4	Persentase jumlah paket lelang yang melalui elektronik	%	100	100	●
5	Persentase penyelesaian masalah hukum yang diproses secara non litigasi	%	50	50	●
b. Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah					
1	Tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan	%	70,00	73,29	▲
2	Persentase aspirasi masyarakat yang ditanggapi DPRD	%	80,00	100	▲
G. Penunjang					

a. Inspektorat					
1	Persentase Perangkat Daerah yang akuntabilitas kinerjanya meningkat per tahun	%	64,50	50	▼
2	Indeks Reformasi Birokrasi	%	67,50	56,83	▼
3	Persentase pelaksanaan PKPT per tahun	%	100	100	●
4	Persentase pengaduan masyarakat yang diproses/diperiksa	%	100	100	●
5	Persentase pemeriksaan dengan tujuan tertentu (khusus) yang diproses/diperiksa	%	100	100	●
6	Persentase Perangkat Daerah yang akuntabilitas keuangannya baik	%	60	75	▲
7	Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap hasil pembinaan pengawasan yang lebih komprehensif	%	60	80	▲
b. Perencanaan					
1	Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	%	31,00	31,23	▲
2	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	%	94,08	100	▲
3	Persentase Indikator RPJMD yang tercapai atau melebihi target	%	85,31	83,29	▼
c. Keuangan					
1	Opini laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP	WTP	●
2	Penetapan Perda APBD tepat waktu	Waktu	27 Des	22 Sept	▲
3	Kontribusi PAD terhadap pendapatan Daerah	%	11,61	15,78	▲
4	Persentase fasilitasi pembiayaan yang lancar dari total pembiayaan	%	70	70	●
5	IKM Pelayanan Pajak Daerah	indeks	83,32	85	▲
6	IKM Fasilitasi Pembiayaan	indeks	83,32	85	▲
d. Kepegawaian					
1	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial	%	52,97	50	▼
2	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis	%	41,79	45	▲
3	Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	%	80,00	79,34	▼
e. Penelitian dan Pengembangan					
1	Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan	%	60	80	▲

H.	**Kesatuan Bangsa dan Politik**				
a.	Kesatuan Bangsa dan Politik				
1	Persentase penanganan konflik yang terjadi di tengah masyarakat	%	100	100	●
2	Persentase ormas yang aktif	%	90,64	90	▼
b.	Penanggulangan Bencana Daerah				
1	Presentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana	%	16,24	18	▲
2	Presentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	%	100	100	●
I.	**Kewilayahan**				
1	Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	●
2	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	%	100	100	●
J.	**Fokus Kemampuan Ekonomi**				
Pertanian					
1	Produktifitas Total Daerah	Rp. Jt	81,34	81,92	▲
2	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp. Ribu	1.743,42	1.816,96	▲
3	Nilai Tukar Petani	%	100,38	100,44	▲
4	Rasio Ketergantungan	%	54,39	54,15	▲

Keterangan : ● = tercapai ▲ = melebihi target ▼ = tidak tercapai dan perlu perhatian

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Daerah dapat disimpulkan bahwa dari 141 indikator yang diukur terdapat 112 indikator yang sudah mencapai dan melebihi targetyang ditetapkan. Sedangkan masih ada 29 indikator yang belum tercapai atau sekitar 20%. Indikator-indikator yang belum tercapai tersebut terdapat pada :

1. Fokus Kesejahteraan Masyarakat, 1 indikator
2. Fokus Pelayanan Urusan Wajib pada urusan :
   - Pendidikan, 2 indikator
   - Kesehatan, 2 indikator
   - Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, 1 indikator
   - Sosial, 1 indikator
   - Pangan, 2 indikator
   - Kependudukan dan Catatan Sipil, 1 indikator
   - Perhubungan, 2 indikator
   - Koperasi dan UKM, 1 indikator
   - Penanaman Modal, 1 indikator
   - Kepemudaan dan Olah Raga, 3 indikator
3. Urusan Pilihan pada beberapa urusan :
   - Kelautan dan Perikanan, 1 indikator
   - Pertanian, 4 indikator
   - Perindustrian, 1 indikator

4. Urusan Penunjang :
   - Inspektorat, 2 indikator
   - Perencanaan, 1 indikator
   - Kepegawaian, 2 indikator
5. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, 1 indikator.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah diuraikan sebagai berikut :

Tabel II-190
Permasalahan Pembangunan Berkaitan dengan Prioritas dan Sasaran

No	Prioritas	Sasaran	Permasalahan
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya	a. Meningkatnya kualitas pendidikan b. Meningkatnya status kesehatan masyarakat c. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan d. Meningkatnya penanggulangan kemiskinan e. Meningkatnya prestasi Atlet	a. Belum meratanya kualitas pendidikan di Kota payakumbuh; b. Peningkatan penyakit menular dan tidak menular; c. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.; d. Masih rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); e. Masih relatif tingginya angka pengangguran dan kemiskinan f. Masih relatif sedikitnya atlet yang berprestasi di tingkat nasional.
2	Peningkatan Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing dan Berkeadilan dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan	a. Meningkatkan Produktivitas Sektor Strategis b. Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh c. Meningkatnya Kualitas Koperasi	a. Belum optimalnya daya saing produk dan bisnis perdagangan payakumbuh; b. Belum optimalnya produktifitas industri di Kota Payakumbuh; c. Peningkatan produksi sektor pertanian cenderung stagnan; d. Lambatnya pertumbuhan investasi di Kota Payakumbuh; e. Belum optimalnya daya saing produk dan bisnis sektor UMKM; f. Rendahnya daya saing destinasi pariwisata Kota Payakumbuh; g. Masih terbatasnya koperasi dengan kualitas baik.

No	Prioritas	Sasaran	Permasalahan
3	Peningkatan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum yang Nyaman dan Berkelanjutan	a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup c. Mewujudkan Perumahan dan pemukiman yang layak	a. Belum optimalnya sambungan air bersih bagi kawasan permukiman; b. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pemenuhan infrastruktur perkotaan seperti jalan kota dalam kondisi mantap, penanganan genangan air, irigasi berkinerja baik, ketersediaan fasilitas umum perkotaan dan kesesuaian dengan dokumen pemanfaatan ruang; c. Belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip lingkungan hidup yang sehat dalam berbagai macam aktifitas pembangunan; d. Masih terdapat kawasan kumuh.
4	Peningkatan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih (*Good and Clean Governance*)	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintahan	a. Belum optimalnya penerapan reformasi birokrasi; b. Belum optimalnya penerapan teknologi informasi dan integrasi sistem informasi perangkat daerah.
5	Peningkatan Pengamalan Ajaran Agama dan Budaya	a. Meningkatnya pengamalan ajaran agama b. Menguatnya lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat	a. Rendahnya muatan pendidikan karakter dan keagamaan pada sekolah negeri; b. Masih kurangnya peran lembaga sosial keagamaan dan ninik mamak dalam membentuk karakter masyarakat

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan berdasarkan urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi dari setiap perangkat daerah. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diuraikan sebagai berikut :

2.3.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

a. Jumlah SD yang terakreditasi A masih 71% dan SMP masih 55,5%;
b. Kekurangan Guru SD yang ASN (Guru kelas, Penjas dan guru agama) serta guru SMP pada mata pelajaran tertentu (BP, Keterampilan/TIK, Prakarya, Penjaskes);
c. Rendahnya muatan pendidikan karakter dan keagamaan pada sekolah negeri dibanding pada sekolah swasta tertentu;
d. Rendahnya kualitas sarana prasarana pada beberapa sekolah.

2. Urusan Kesehatan

a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan PHBS;
b. Terjadinya pergeseran gaya hidup berdampak pada pergeseran jenis penyakit yang sering muncul (dari Penyakit Menular menjadi Penyakit Tidak Menular); hipertensi, diabetes, TB, dll;
c. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat yang berdampak pada peningkatan jumlah penderita HIV;
d. Masih belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
e. Rendahnya partisipasi JKN mandiri;
f. Belum terpenuhinya kebutuhan SDM kesehatan sesuai standar.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Menurunnya kualitas pelayanan air bersih;
b. Masih rendahnya persentase panjang jalan yang memiliki trotoar;
c. Masih rendahnya persentase RTH;
d. Belum tercapainya target 100% rumah tinggal bersanitasi layak;
e. Belum maksimalnya pengelolaan jaringan irigasi dan pengairan;
f. Belum optimalnya pemanfaatan dokumen rencana tata ruang sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan;
g. Belum optimalnya pengelolaan perizinan pemanfaatan ruang dan pengaturan pemanfaatan ruang;

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Belum optimalnya sambungan air bersih bagi kawasan permukiman;
b. Masih terdapat kawasan kumuh;
c. Masih adanya rumah tidak layak huni;

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Belum optimalnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana alam maupun kebakaran;
b. Masih relatif tingginya kasus Narkoba;
c. Masih relatif tingginya kasus penyakit masyarakat;
d. Masih tingginya kasus pelanggaran PERDA.

6. Urusan Sosial

a. Masih relatif tingginya angka pengangguran dan kemiskinan;
b. Belum terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar bagi PMKS;
c. fasilitas umum yang ramah bagi penyandang disabilitas belum ada;
d. Belum Optimalnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

2.3.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

a. Tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi;
b. Masih rendahnya tingkat pendidikan pencari kerja;
c. Masih rendahnya jumlah wirausahawan baru sebagai potensi untuk penyediaan lapangan kerja;
d. Meningkatnya jumlah pengangguran terdidik, yang muncul karena ketidaksesuaian antara spesifikasi lapangan kerja dengan ketersediaan sumber daya;

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Masih rendahnya indeks pemberdayaan gender (IDG);
b. Masih belum optimalnya pemenuhan terhadap hak-hak anak;
c. Belum semua stakeholder memahami konsep PUG.

3. Urusan Pangan

a. Rendahnya pola pangan harapan payakumbuh;
b. Tingginya persentase pengeluaran belanja pangan dibandingkan dengan belanja non pangan;
c. Masih ditemukan persoalan keamanan dan kesehatan makanan di tengah masyarakat;

4. Urusan Pertanahan

a. Banyak lahan yang belum bersertifikat;
b. Belum tuntasnya penyelesaian tanah Konsolidasi Tanah Perkotaan (KTP);

5. Urusan Lingkungan Hidup

a. Belum optimalnya perlindungan terhadap kawasan lindung dan sumber mata air;
b. Belum adanya regulasi terhadap penggunaan air tanah;
c. Masih rendahnya penanganan pengelolaan persampahan;
d. Masih rendahnya cakupan pelayanan penanganan sampah;
e. Belum memadainya sarana prasarana persampahan;
f. Belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip lingkungan hidup yang sehat dalam berbagai macam aktifitas pembangunan;
g. Belum memadainya pengendalian pencemaran polutan dan kebisingan udara (emisi kendaraan bermotor);
h. Belum adanya regulasi tentang pengelolaan limbah B3;
i. Belum optimalnya *law enforcement* (penegakan hukum) terhadap sanksi pelanggaran izin lingkungan.

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Belum optimalnya proses pengelolaan administrasi dan dokumentasi kependudukan;
b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan dan catatan sipil.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

a. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
b. Belum terpenuhinya SPM ditingkat kelurahan.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Tingginya pertumbuhan penduduk di Kota Payakumbuh yang lebih dipengaruhi oleh migrasi masuk penduduk;
b. Masih tingginya angka TFR (total fertility rate);
c. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya melaksanakan keluarga berencana;
d. Masih kurangnya kuantitas maupun kualitas SDM Petugas KB;
e. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketahanan keluarga.

9. Urusan Perhubungan

a. Belum adanya sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan kenyamanan pengguna, keterkaitan dan keterpaduan antar moda dan antar wilayah;
b. Belum optimalnya kualitas sarana prasarana perhubungan; Belum optimalnya pengelolaan terminal penumpang;
c. Belum tersedianya terminal angkutan barang;

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Belum optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh birokrasi terutama untuk peningkatan pelayanan publik;
b. Belum optimalnya integrasi sistem informasi daerah yang telah tersedia dan cukup baik dalam pelaksanaan pemerintahan;
c. Terbatasnya kemampuan dan keahlian SDM dalam mengelola informasi dan komunikasi;
d. Belum meratanya ketersediaan infrastruktur informatika.

11. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

a. Rendahnya jumlah koperasi yang memiliki akuntabilitas yang baik;
b. Belum optimalnya diversifikasi produk koperasi;
c. Lambatnya pertumbuhan skala usaha UMKM;
d. Belum terbangunnya kelembagaan UMKM yang kuat;

12. Urusan Penanaman Modal

a. Kurangnya informasi potensi investasi yang akurat dan promosi yang terbatas;
b. Rendahnya pertumbuhan realisasi investasi;
c. Belum optimalnya pengembangan infrastruktur pendukung kawasan potensial investasi.

13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

a. Masih rendahnya prestasi atlit daerah;
b. Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga untuk menunjang aktivitas latihan dan pertandingan olahraga;
c. Rendahnya aktifitas organisasi kepemudaan.

14. Urusan Statistik

a. Terbatasnya ketersediaan data statistik daerah untuk memenuhi kepentingan perencanaan dan penelitian;
b. Belum adanya sistem data dan informasi sektoral yang terintegrasi dan terkini dari perangkat daerah.

15. Urusan Kebudayaan

a. Belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya;
b. Kurangnya event-event kesenian dan budaya tradisional;

c. Masih kurangnya peran lembaga sosial keagamaan dan ninik mamak dalam membentuk karakter masyarakat;
d. Belum tersedianya Masjid Agung yang representatif;
e. Belum berfungsinya tempat ibadah sebagaimana mestinya;
f. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran pemuda tentang nilai-nilai sosial budaya serta adat istiadat.

16. Urusan Perpustakaan

a. Masih terbatasnya akses masyarakat dalam memperoleh informasi melalui buku;
b. Masih rendahnya minat baca masyarakat, hal ini terlihat dari relatif kecilnya jumlah keanggotaan perpustakaan dan jumlah pengunjung.

17. Urusan Kearsipan

a. Masih rendahnya sumber daya yang terkait dalam pengelolaan arsip baik sejarah kota maupun dokumen pembangunan daerah;
b. Belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.

2.3.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pariwisata

a. Lambatnya Pertumbuhan kunjungan wisatawan;
b. Rendahnya rata-rata lama kunjungan wisatawan;
c. Rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dan serapan tenaga kerja;
d. Belum terbangunnya kemitraan dan kerjasama dengan daerah lain dalam mengembangkan pariwisata;
e. Lemahnya daya dukung infrastruktur dan SDM lokal pariwisata.

2. Urusan Pertanian

a. Pertumbuhan jumlah populasi ternak cenderung stagnan;
b. Meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian;
c. Manajemen skala usaha pertanian pada umumnya masih rendah;
d. Masih rendahnya produktifitas hasil pertanian Kota Payakumbuh;
e. Berkurangnya tenaga kerja disektor pertanian;
f. Belum terpenuhinya insfrastruktur pendukung usaha pertanian;
g. Rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya kecakapan petani;
h. Belum meratanya kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh;
i. Belum optimalnya nilai produksi pertanian;
j. Terjadinya pengrusakan lahan yang berdampak pada lahan pertanian;
k. Rendahnya daya saing produk perikanan;
l. Terjadinya penurunan tingkat kesuburan lahan pertanian (degradasi lahan);
m. Belum optimalnya penerapan inovasi teknologi anjuran;

3. Urusan Perdagangan

a. Produktifitas perdagangan tidak bertambah signifikan;
b. Daya saing bisnis perdagangan Payakumbuh masih rendah;
c. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pemasaran produk;
d. Belum optimalnya Infrastruktur pasar yang representatif;
e. Masih belum optimalnya penataan pusat perdagangan;
f. Usaha perdagang besar belum punya gudang di area yang telah ditentukan di sepanjang jalan lingkar utara;
g. Belum adanya pasar tertib ukur;

e. Belum tertatanya pedagang kaki lima yang cepat dan cenderung tidak terkendali, sehingga menimbulkan eksternalitas negatif bagi sektor lainnya;

4. Urusan Perindustrian

a. Rendahnya produktifitas usaha industri;
b. Masih terbatasnya kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk industri;
c. Belum optimalnya pengemasan produk industri;
d. Limbah industri kecil belum terkelola dengan baik.

2.3.2.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Urusan Perencanaan

a. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah;
b. Masih belum semua target program pembangunan yang sudah direncanakan dapat direalisasikan.

2. Urusan Keuangan

a. Belum ada pengembangan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional, dan atau melalui kemitraan antara pemerintah dan swasta;
b. Kemampuan keuangan daerah masih terbatas;
c. Potensi-potensi sumber-sumber pendapatan daerah belum tergali secara optimal;
d. Belum optimalnya Pengelolaan keuangan daerah;
e. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah.

3. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

a. Belum adanya Sistem tunjangan berbasis kinerja;
b. Belum optimalnya pengukuran kinerja unit kerja dan individu secara komprehensif;
c. Penempatan ASN belum sepenuhnya berbasis kompetensi;
d. Masih rendah kompetensi dan kapabilitas aparatur;
e. Kurangnya Pejabat Fungsional Tertentu.

4. Urusan Penelitian dan Pengembangan

a. Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil riset/penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah belum berjalan baik;
b. Belum adanya kerjasama pengembangan penelitian yang berkelanjutan antar pemangku kepentingan (Dewan Riset Daerah).

5. Fungsi Penunjang Lainnya

a. Kualitas reformasi birokrasi belum optimal;
b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum dilakukan pemerataan secara optimal.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi perekonomian Kota Payakumbuh Tahun 2017 berikut karakteristiknya serta proyeksi perekonomian tahun 2018-2019 dapat digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik perekonomian daerah. Bab ini membahas kinerja perekonomian daerah Kota Payakumbuh berikut dinamika faktor eksternal dan internalnya. Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2019 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber- sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Payakumbuh

Arah kebijakan ekonomi Kota Payakumbuh Tahun 2019 disusun berdasarkan kajian internal dan eksternal serta berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi tahun 2019 dan pentahapan pembangunan di dalam RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, serta RPJMD Kota Payakumbuh 2017-2022.

Untuk menjamin terintegrasinya Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Nasional, arah kebijakan ekonomi Kota Payakumbuh Tahun 2019 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Tahun 2019. Disamping itu arah pembangunan perekonomian diprioritaskan pada sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB, dan juga pada sektor yang memiliki prospek ke depan yang baik serta tahan terhadap gejolak ekonomi.

A. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2019

Di tingkat Nasional Tema RKP 2019 yaitu "***Pemerataan Pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas"***. Sejalan dengan tema, Pembangunan ekonomi pada tahun 2019 diarahkan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6 persen (range: 5,4-5,8 persen) secara tematik, holistik, dan terintegrasi. Dari 10 (Sepuluh) Program Prioritas Nasional terdapat 5 (lima) Prioritas Nasional yang mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2019 yaitu:

a. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;

Isu strategis:

1. Percepatan penurunan kemiskinan dan ketimpangan
2. Peningkatan akses pelayanan dasar penduduk

Arah kebijakan:

1. **Mempercepat pengurangan kemiskinan**
   a. Memperkuat pelaksanaan bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran;
   b. Memperkuat sistem jaminan sosial;
   c. Memperkuat literasi untuk kesejahteraan;
   d. Melaksanakan reforma agrarian;
   e. Mempercepat pemberian akses kelola sumber daya alam kepada masyarakat melalui perhutanan sosial.
2. **Meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat**
   a. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
   b. Meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana;
   c. Mencegah dan pengendalian penyakit;
   d. Mempercepat penurunan stunting;
   e. Meningkatkan "Gerakan Masyarakat Hidup Sehat".
3. **Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas**
   a. Menyediakan pendidik yang berkualitas dan merata;
   b. Menyediakan afirmasi pendidikan;
   c. Memperkuat kelembagaan satuan pendidikan;
   d. Meningkatkan Kualitas pembelajaran dan akademik.
4. **Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan & permukiman layak**
   a. Menyediakan akses hunian layak dan terjangkau;
   b. Menyediakan akses infrastruktur dasar permukiman layak;
   c. Meningkatkan kualitas lingkungan di permukiman.
5. **Meningkatkan tata kelola layanan dasar**
   a. Memperkuat layanan dan rujukan satu pintu;
   b. Memperkuat integrasi sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil;
   c. Mempercepat Pencapaian SPM di Daerah;

b. Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;

Isu strategis:

1. Pembangunan konektivitas dan jaringan logistik nasional sektor unggulan;
2. Peningkatan keterpaduan transportasi perkotaan dan keselamatan transportasi;
3. Peningkatan sarana prasarana komunikasi dan informatika yang berdaya saing;
4. Optimalisasi pembangunan kota-kota KTI untuk pertumbuhan ekonomi nasional;
5. Peningkatan aksesibilitas pusat pertumbuhan layanan kesehatan, dan pendidikan di daerah tertinggal dan perbatasan;
6. Peningkatan aksesibilitas desa, kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi;
7. Peningkatan kapasitas SDM di daerah dan desa dalam penyediaan sarana prasarana konektivitas;
8. Peningkatan sarasna dan prasarana sistem logistik perikanan;
9. Peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan perikanan.

Arah Kebijakan:

1. Meningkatkan konektivitas;
2. Mengembangkan telekomunikasi dan informatika;
3. Mengembangkan pusat kegiatan ekonomi di wilayah timur dan pembangunan desa;
4. Melaksanakan pembangunan daerah afirmasi;
5. Melaksanakan pembangunan konektivitas untuk mendukung pembangunan sektor unggulan hulu-hilir perikanan.

c. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif;

Isu strategis;

1. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, perikanan dan kehutanan;
2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk industri;
3. Optimalisasi penciptaan nilai tambah jasa produktif;
4. Peningkatan produktivitas tenaga kerja;
5. Optimalisasi pemanfaatan Iptek dan hasil inovasi untuk peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah

Arah kebijakan;

1. Meningkatkan ekspor dan nilai tambah pertanian melalui peningkatan produktivitas, kualitas, serta dukungan kelembagaan dan sarana prasarana
2. Mendorong percepatan peningkatan nilai tambah industri pengolahan melalui perbaikan iklim usaha, peningkatan investasi, penguatan rantai pasok/nilai, dan pemanfaatan inovasi;
3. Meningkatkan nilai tambah jasa produktif antara lain melalui pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif dan digital, peningkatan ekspor terutama produk hilirisasi, dan penguatan kemitraan;
4. Mendorong percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan vokasi dan kompetensi, pengembangan kerja sama dunia usaha dan kewirausahaan;
5. Mengembangkan iptek dan inovasi untuk peningkatan produktivitas antara lain melalui peningkatan SDM iptek, pengembangan litbang keilmuan strategis, dan pengembangan teknologi frontier.

d. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air;

Isu strategis;

1. Peningkatan Kebutuhan Energi;
2. Pemenuhan Kebutuhan Pangan;
3. Pemantapan Ketahanan Sumber Daya Air
4. Upaya Pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
5. Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon

Arah Kebijakan;

1. Meningkatkan produksi energi primer
2. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi
3. Meningkatkan aksesibilitas energi

4. Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik
5. Mempertahankan dan memantapkan penyediaan pangan utama dalam negeri
6. Meningkatkan layanan pertanian antara lain melalui penyediaan sarpras, pembiayaan, penyuluhan dan pendampingan
7. Memperkuat distribusi dan stabilisasi harga pangan dalam rangka meningkatkan akses pangan masyarakat
8. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat terutama untuk menurunkan kasus malnutrisi
9. Memantapkan pembangunan infrastruktur sumber daya air
10. Meningkatkan perlindungan sumber air dan ekosistemnya
11. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air yang adil dan merata
12. Mempercepat regulasi dan pembangunan wilayah berbasis DAS
13. Meningkatkan kesadaran terkait sumber daya air

e. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu;

Isu strategis;

1. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat
3. Peningkatan pertahanan berdaya gentar
4. Penguatan kepastian hukum
5. Penguatan Pelaksanaan Reformasi birokrasi
6. Pelaksanaan pemilu yang sukses
7. Penegakan netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu
8. Pelaksanaan efektivitas diplomasi

Arah Kebijakan;

1. Meningkatkan Kamtibmas dan keamanan siber
   a. Meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan kepolisian;
   b. Menyelesaikan konflik sosial;
   c. Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba;
   d. Meningkatkan pengamanan aktivitas siber;
   e. Meningkatkan penanganan terorisme.
2. Menjamin kesuksesan Pemilu
   a. Meningkatkan kualitas lembaga demokrasi;
   b. Menjamin terlaksananya hak memilih dan dipilih;
   c. Mewujudkan birokrasi yang netral dalam pemilu 2019;
   d. Melaksanakan tahapan pemilu yang berkualitas.
3. Memperkuat pertahanan wilayah nasional
   a. Mengamankan wilayah yurisdiksi nasional;
   b. Memperkuat penjagaan teritorial;
   c. Membangun kapabilitas pertahanan.
4. Meningkatkan kepastian hukum dan Reformasi Birokrasi
   a. Meningkatkan kualitas penegakan hukum;
   b. Meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi;
   c. Mengintegrasikan pelaksanaan *e-government*;
   d. Mengoptimalkan talent management nasional;
   e. Meningkatkan pengawasan Program Prioritas Nasional.

5. Memperkuat efektivitas diplomasi
   a. Memperkuat perlindungan dan pelayanan WNI di luar negeri;
   b. Memperkuat diplomasi maritim, politik dan keamanan;
   c. Memperkuat diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan internasional;
   d. Memantapkan peran indonesia di ASEAN

B. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

Di tingkat Provinsi tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2019 mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yaitu**: "Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera".** Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 merupakan tindak lanjut atau dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Penyusunan prioritas dengan memperhatikan beberapa kriteria antara lain korelasi dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, dunia usaha dan pariwisata, ketahanan pangan, ketahanan energi, infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman, dan pembangunan wilayah. Dari 10 (Sepuluh) Program Prioritas tersebut terdapat 5 (lima) Program Prioritas Provinsi yang mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 dengan target pertumbuhan ekonomi 6,62% yaitu:

1. Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis;
2. Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi;
3. Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan;
4. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal;
5. Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur.

C. Arah Kebijakan Ekonomi Priode RPJMD Ke-3 tahun 2016-2020 sesuai RPJPD 2005-2025

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, visi pembangunan jangka panjang daerah Kota Payakumbuh untuk Tahun 2025 adalah ***"Terwujudnya Payakumbuh Sebagai Kota Maju dengan Pengembangan Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah"***. Berdasarkan RPJPD Kota Payakumbuh untuk periode RPJMD ke-3 tahun 2016-2020 Kebijakan Pembangunan Ekonomi diarahkan kepada :

1. Dalam rangka mewujudkan kegiatan industri pengolahan khas Payakumbuh, maka pada periode RPJMD Ke-3 ini prioritas pengembangan diarahkan pada terwujudnya penerapan teknologi modern dalam kegiatan produksi dan distribusi yang menuju pada peningkatan daya saing produk. Untuk keperluan ini, sasaran utama kegiatan sebaiknya diarahkan pada kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) untuk peningkatan kualitas produk yang telah ada dan penciptaan produk baru khas Kota Payakumbuh. Semua kegiatan ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan lembaga

konsultan dan Polteknik Teknologi dan Tata Niaga yang telah dapat dibangun pada periode sebelumnya;

2. Guna dapat mengupayakan terbangunnya Kawasan Industri Kerajinan Rakyat, maka pada tahap RPJMD Ke-3 ini perhatian perlu diarahkan pada penggunaan teknologi yang lebih baik dan maju untuk mendukung pengelolaan kawasan industri kerajinan tersebut. Dalam kaitan dengan hal ini, perhatian utama diarahkan pada penggunaan peralatan-peralatan baru berteknologi tinggi termasuk pemanfaatan teknologi informasi yang lebih canggih. Penggunaan teknologi yang lebih maju ini sangat penting artinya untuk meningkatkan daya saing produk dalam menghadapi era globalisasi yang sudah datang pada saat itu;
3. Untuk dapat memfasilitasi terlaksananya pengembangan usaha agribisnis maju dan efisien, maka pada periode RPJMD ke-3 ini prioritas diletakkan pada peningkatan penggunaan teknologi produksi guna dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing produk. Dalam hal ini, perhatian terutama diberikan pada penggunaan peralatan dengan teknologi lebih tinggi, termasuk teknologi informasi. Semua ini diperlukan untuk menghadapi persaingan yang sudah akan semakin tajam dengan datangnya era globalisasi;
4. Dalam rangka mengupayakan pengembangan pariwisata, maka pada tahap RPJMD Ke-3 ini, prioritas utama diberikan pada pengembangan penerapan IPTEK tepat guna untuk mendukung kegiatan pariwisata alam dan kuliner. Untuk keperluan ini perlu dibangun sebuah pusat informasi wisata yang telah dilengkapi dengan teknologi informasi yang maju sehingga wisatawan domestik dan mancanegara akan dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata di Kota Payakumbuh. Sejalan dengan hal tersebut, fasilitas hotel dan restoran juga seudah dilengkapi pula dengan berbagai peralatan yang menggunakan teknologi maju untuk meningkatkan pelayanan bagi para pelanggan;
5. Guna mengupayakan terbangunnya lokasi pusat kegiatan sektor informal, maka pada tahap RPJMD ke-3 ini perhatian terutama diberikan pada lanjutan pembangunan fasilitas kios-kios sederhana untuk para pengusaha sektor informal. Sejalan dengan hal tersebut, dilakukan dilanjutnya pula penyediaan tenaga listrik, dan air minum serta penggunaan peralatan yang lebih baik, termasuk fasilitas teknologi informasi sehingga pengusaha sektor informal tersebut akan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik pada para pelanggannya.

D. Arah Kebijakan Ekonomi dalam RPJMD Kota Payakumbuh 2017-2022

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang telah dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2017 yang lalu maka arah kebijakan ekonomi Kota Payakumbuh pada tahun 2019 juga harus mengacu kepada Visi Misi Kepala Daerah Terpilih yang telah disampaikan selama proses kampanye. Visi Misi tersebut sudah dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2017-2022 yang sudah mendapat persetujuan bersama dari DPRD Kota Payakumbuh dan saat ini sedang dalam proses/ tahapan evaluasi Gubernur. Adapun Visi Walikota terpilih adalah **"Payakumbuh Maju, Sejahtera dan Bermartabat, dengan Semangat Kebersamaan Menuju Payakumbuh Menang".** Visi tersebut dijabarkan dalam 5 (lima) Misi yaitu :

1 Mewujudkan sumber daya manusia yang handal, sehat, dan kompetitif.
2 Membangun perekonomian yang tangguh, unggul, berdaya saing dan berkeadilan dengan berbasis ekonomi kerakyatan dengan memunculkan gerakan ekonomi bersama.
3 Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan.
4 Menghadirkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih.
5 Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya berdasarkan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

Kebijakan ekonomi dalam RPJMD Kota Payakumbuh 2017-2022 terdapat pada Misi ke-2 yaitu : ***Membangun perekonomian yang tangguh, unggul, berdaya saing dan berkeadilan dengan berbasis ekonomi kerakyatan dengan memunculkan gerakan ekonomi bersama*** dengan arah kebijakan:

1. Peningkatan volume perdagangan antar daerah;
2. Peningkatan transaksi perdagangan;
3. Peningkatan kelancaran distribusi barang/ jasa;
4. Penguatan kelembagaan petani dan Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian;
5. Peningkatan produktivitas komoditi pertanian strategis;
6. Penerapan sistim pertanian berkelanjutan;
7. Pembentukan sentra-sentra produksi IKM sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang terintegrasi;
8. Peningkatan kemampuan industri dalam penerapan standarisasi mutu produk;
9. Peningkatan kemampuan manajerial dan SDM pelaku industri;
10. Peningkatan penerapan teknologi industri;
11. Peningkatan kualitas sarana prasarana pariwisata;
12. Membangun kemitraan antar jasa usaha pariwisata;
13. Mengembangkan paket-paket destinasi wisata;
14. Pembentukan BUMD untuk mendorong percepatan pertumbuhan sektor strategis;
15. Menciptakan iklim investasi yang kondusif;
16. Meningkatkan kualitas pelayan perizinan Usaha;
17. Fasilitasi penguatan modal bagi UKM, dan IKM;
18. Fasilitasi pemasaran produk UMKM;
19. Meningkatkan pembinaan terhadap koperasi.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Kota Payakumbuh Tahun 2017 dan Perkiraan Tahun 2018

Dari uraian target makro di tingkat nasional dan regional Sumatera Barat serta melihat pada target RPJPD Kota Payakumbuh di tahap ketiga, dan mempertimbangkan capaian kinerja perekonomian pada tahun 2017 yang telah dijelaskan pada BAB II, maka dapat dilakukan analisa perbandingan dan proyeksi kinerja makro Kota Payakumbuh. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun berjalan, pemerintah daerah telah menetapkan beberapa indikator ekonomi makro yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah.

Salah satu indikator utama ekonomi daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu

peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Indikator-indikator lain yang tak kalah penting adalah tingkat pengangguran, kemiskinan, investasi dan inflasi. Pada BAB II telah dibahas mengenai capaian pembangunan daerah pada setiap indikator tersebut. Berikut ini akan dibahas mengenai masing-masing indikator terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja serta perkiraan kondisi ekonomi pada tahun berjalan.

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kota Payakumbuh tahun 2016 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp.4.983.384,6 juta dan Rp.3.766.968,8 juta Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dengan laju pertumbuhan sebesar 6,08 persen (BPS, 2017). Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian kota Payakumbuh tumbuh stabil pada tahun 2016 dan berada di atas angka laju pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 5,2 persen.

Penghitungan PDRB untuk tahun 2017 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sampai dengan dokumen ini disusun belum dirilis secara formal. Tahun 2017 adalah tahun transisi RPJMD kota Payakumbuh dengan Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2017-2022. Program dan kegiatan pada tahun 2017 lebih fokus pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas sektor strategis yang dianggap mampu menopang perekonomian dan mengungkit laju pertumbuhan di sektor lainnya tertuang dalam berbagai arah kebijakan di tahun 2017. Oleh sebab itu, kondisi Ekonomi Kota Payakumbuh terutama pada indikator PDRB diperkirakan dapat mencapai angka Rp. 5.287.869,4 juta ADHB dan Rp. 3.997.130,6 juta ADHK dengan laju pertumbuhan PDRB riil 6,11%. Pada tahun 2018, diperkirakan nilai PDRB akan terus meningkat dengan pertumbuhan mencapai 6,14 persen atau senilai Rp. 5.612.544,6 juta ADHB atau Rp. 4.242.554,4 juta ADHK.

B. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita ADHB pada tahun 2016 adalah Rp.38,39 juta naik 7,93 persen dari tahun 2015, yakni sebesar Rp. 35,57 juta. Sedangkan pada tahun 2017 dengan semakin fokusnya pemerintah terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi diproyeksikan PDRB per kapita kota Payakumbuh mencapai Rp.40,11 juta. Nilai ini sudah mendekati target akhir RPJMD Kota Payakumbuh periode lalu yaitu sebesar 43,73 juta. Dengan melihat capaian pada tahun 2017 tersebut, perkiraan PDRB per kapita pada tahun 2018 paling tidak dapat mencapai nilai yang lebih tinggi yaitu 41,93 juta.

C. Laju Inflasi

Laju inflasi kota Payakumbuh pada tahun 2012-2017 mengacu pada angka inflasi ibu kota Provinsi Sumatera Barat yaitu Kota Padang. Laju inflasi Kota Payakumbuh pada tahun 2016 sebesar 4,17% dan diprediksikan sedikit naik pada angka 4,84% di tahun 2017. Sementara itu perkiraan inflasi tahun 2018 berkemungkinan bersumber dari komoditas bahan pangan, yang produksinya sangat dipengaruhi cuaca pada periode Februari sampai dengan April berpotensi hujan dengan intensitas menengah, sehingga beberapa komoditas strategis perlu dijaga ketersediaan pasokannya agar tidak memicu inflasi. Mempelajari tekanan harga pada

trimester pertama tahun 2018, diperkirakan inflasi Sumbar termasuk Payakumbuh mencapai relatif terjaga pada angka 4,67%.

D. Pengangguran dan Kemiskinan

Pada tahun 2016 tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,07 % dan ekonomi pun mengalami perlambatan dengan tumbuh sebesar 6,08%, dan pada tahun 2017 berdasarkan pada data BPS yang dirilis pada awal tahun 2018 tingkat pengangguran kota Payakumbuh turun drastis menjadi 3,45% lebih rendah dari tingkat pengangguran Sumatera Barat sebesar 5,58%. Hal ini seiring dengan prediksi semakin membaiknya kondisi ekonomi kota Payakumbuh pada tahun 2017. Kondisi positif ini diperkirakan akan tetap membaik di tahun 2018 melalui upaya peningkatan lapangan usaha dan kesempatan kerja yang masih dilakukan pada tahun 2018 sehingga dapat menyerap angkatan kerja.

Sementara itu, penduduk miskin di kota Payakumbuh pada tahun 2017 tercatat 7,72 ribu jiwa atau sekitar 5,88 persen dari jumlah penduduk kota Payakumbuh. Angka ini mengalami penurunan dari angka kemiskinan tahun 2016 yang berjumlah 8,35 ribu jiwa atau 6,46 persen. Hal ini berarti pada tahun 2017 terjadi penurunan penduduk miskin sebanyak 630 jiwa.

Dengan keberlanjutan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan disertai akselerasi perbaikan ekonomi nasional, global, dan iklim investasi serta iklim usaha yang semakin baik di Kota Payakumbuh maka diperkirakan pada tahun 2018 tingkat kemiskinanan di kota Payakumbuh tahun 2018 bisa ditekan pada angka 5,3 persen atau sekitar 7,01 ribu jiwa dari total jumlah penduduk yang diperkirakan pada angka 133.862 jiwa. Indikator Makro Ekonomi secara keseluruhan dirangkum dalam Tabel berikut:

Tabel III.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Payakumbuh

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Proyeksi	
			2016	2017	2018*)	2019**)
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,08	6,11	6,14	6,20
2	Tingkat Inflasi	%	4,17	4,84	4,67	4,44
3	PDRB ADHB	Rp juta	4.983.384,6	5.287.869,4	5.612.544,6	5.960.522,3
4	PDRB ADHK	Rp juta	3.766.968,8	3.997.130,6	4.242.554,4	4.505.592,8
5	PDRB per kapita ADHB	Rp juta	38,39	40,11	41,93	43,87
6	PDRB per kapita ADHK	Rp juta	29,03	30,32	31,69	33,16
7	Angkatan Kerja	Orang	63.017	66.919	66.919	66.919
8	TPAK	Orang	69,85	71,42	71,42	71,42
9	Tingkat Pengangguran	%	7,07	3,45	3,45	3,45
10	Tingkat Kemiskinan	%	6,46	5,88	5,30	5,30

Sumber :Bappeda dan BPS Kota Payakumbuh 2017, data diolah
*Keterangan : *) Data Sementara*
***) Data Perkiraan (Proyeksi)*

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Payakumbuh Tahun 2019

Tantangan perekonomian menggambarkan bagaimana isu-isu perekonomian regional, nasional dan global dapat dikelola oleh daerah untuk memberikan nilai dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan prospek perekonomian menggambarkan peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Tantangan perekonomian dan prospek perekonomian daerah Kota Payakumbuh tahun 2018 di tengah situasi nasional dan global saat ini adalah sebagai berikut :

A. Tantangan Perekonomian

1. Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) memberikan konsekuensi terhadap tingkat persaingan yang semakin terbuka dan tajam, terutama dalam perdagangan barang dan jasa di kawasan ASEAN. Hal ini merupakan peluang sekaligus ancaman bagi perekonomian daerah. Pemerintah harus mampu mempersiapkan tenaga kerja serta produk lokal yang berdaya saing agar mampu diterima pasar global serta menyediakan infrastruktur yang memadai sehingga dapat menjawab kebutuhan pasar global dalam hal kemudahan dan kenyamanan akses menuju dan di dalam kota Payakumbuh;
2. Situasi keterbatasan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Pemerintah daerah dituntut mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
3. Meningkatkanya minat investor untuk menanamkan modal di Indonesia juga merupakan sebuah tantangan bagi kota Payakumbuh untuk menentukan posisi tawar yang lebih tinggi kepada para investor dengan melihat kapasitas internal yang bisa ditingkatkan. Untuk itu pemerintah sekali lagi harus mampu menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dengan mengadakan perbaikan regulasi, pelayanan, dan penyederhanaan prosedur termasuk penyederhanaan birokrasi;
4. Semakin berkembangnya arus teknologi informasi merupakan sebuah tantangan yang harus direspons pemerintah daerah melalui peningkatan sistim pemerintahan yang terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan berbagai sektor unggulan di kota Payakumbuh.

B. Prospek Perekonomian

Di tengah tantangan perekonomian yang tinggi pada tahun periode tahun 2012 s/d 2017, pada dasarnya kota Payakumbuh masih mampu bertahan pada kondisi stabil dengan pertumbuhan ekonomi masih di atas angka 6 persen sampai dengan tahun 2017 dan diperkirakan akan tumbuh lagi pada tahun 2018 dab 2019. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun-tahun mendatang kota Payakumbuh akan mampu lebih baik lagi seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian nasional dan global. Prospek perekonomian Kota Payakumbuh Tahun 2019 diperkirakan akan membaik dan mengalami pertumbuhan yang positif, beberapa indikator yang menunjukkan kondisi tersebut adalah :

1. Pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh masih berada diatas rata-rata provinsi dan nasional, sehingga dilihat dari sisi variabel ekonomi makronya, menjadi kekuatan bagi fundamental perekonomian Payakumbuh untuk beberapa tahun mendatang. Adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan daya beli

masyarakat, kualitas penyerapan anggaran, serta mempercepat pembangunan infrastruktur seperti pembangunan gedung kantor, jembatan dan jalan. Disamping itu, dengan menjadikan Kota Payakumbuh sebagai salah satu daerah tujuan wisata kuliner di Sumatera Barat diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat stabil diatas angka 6% di tahun 2018 – 2019;

2. Pada tahun 2019, tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan diharapkan semakin terkendali dan terjaga pada angka 3,45 persen. Program kegiatan yang mendukung tercapainya target ini di tahun 2017 harus tetap dilaksanakan dan ditingkatkan kinerjanya. Program ini diharapkan mampu menjawab tantangan pasar MEA sehingga Payakumbuh akan tumbuh ditopang dengan ketersediaan tenaga kerja yang handal. Implikasinya juga akan mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modal di kota Payakumbuh pada tahun-tahun yang akan datang;
3. Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Hal ini merupakan peluang yang menentukan prospek perekonomian ke depannya. Dengan adanya harmonisasi antara pemerintah, masyarakat dan swasta diharapkan perekonomian menjadi lebih baik. Terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk pembiayaan pembangunan menuntut adanya sumber pembiayaan swasta yang lebih besar dalam pembangunan;
4. Kota Payakumbuh memiliki letak yang sangat strategis dan merupakan daerah lintasan perdagangan Sumatera Barat menuju Provinsi Riau. Oleh sebab itu, berbagai potensi harus dikembangkan untuk mengoptimalkan peluang pasar tersebut. Prospek perekonomian akan semakin besar karena komitmen pemerintah daerah kota Payakumbuh untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang lebih baik, pengembangan kota Payakumbuh sebagai pusat wisata kuliner di Sumatera Barat dan berbagai faktor pendukung lainnya.
5. Potensi komoditi unggulan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan (pabrik mini kakao), industri makanan ringan (kampung rendang), sulaman dan bordir (kampung tenun), ternak besar, unggas dan ikan (pabrik pakan ikan; pabrik kertas telur) yang terus dikembangkan sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi;
6. Keseriusan pemerintah pusat dalam mengembangkan sektor pariwisata di daerah merupakan peluang yang dapat diambil oleh pemerintah kota Payakumbuh dengan menggali lebih jauh potensi pariwisata yang masih dapat dikembangkan di kota Payakumbuh baik berupa destinasi wisata maupun dalam bentuk event rutin yang akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mengunjungi kota Payakumbuh. Selain itu potensi yang cukup besar adalah kerjasama dengan daerah hinterland yang memiliki potensi destinasi wisata yang lebih banyak merupakan suatu prospek ekonomi yang harus dikembangkan pada tahun-tahun yang akan datang.

3.2. Kebijakan Keuangan

3.2.1 Umum

Reformasi pengelolaan keuangan negara tetap akan dilanjutkan, baik di bidang pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran, guna

menghasilkan APBN yang lebih berkualitas, akuntabel, dan realistis. Di bidang pendapatan negara, reformasi keuangan negara untuk memperkuat dan memperluas basis penerimaan negara. Di bidang belanja negara, berbagai kebijakan telah ditempuh oleh Pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja negara, sehingga mempunyai efektivitas yang tinggi dan mencerminkan kehadiran negara dan mendukung pembangunan. Kebijakan belanja negara terutama untuk mengalihkan belanja yang konsumtif menjadi belanja produktif dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi serta percepatan realisasi belanja negara. Di bidang pembiayaan anggaran, kebijakan pemerintah utamanya ditujukan bagi pembiayaan investasi untuk mendukung program infrastruktur. Selain pembangunan fisik, pembiayaan anggaran juga diarahkan untuk memacu pendidikan dan keadilan antargenerasi, melalui alokasi dana pada sovereign wealth fund/SWF sebagai bagian dari anggaran pendidikan. Upaya efisiensi atas kombinasi sumber-sumber pendanaan juga terus dilakukan dengan tetap mengacu pada rasio utang yang terjaga dan aman guna tercapai kesinambungan fiskal. Setiap langkah dalam pembiayaan anggaran harus mengacu pada prinsip prudent sesuai dengan kaidah fiskal dalam peraturan perundang- undangan.

APBN tahun 2018 merupakan instrumen pelaksanaan strategi fiskal yang disusun sebangun dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018, sebagai penjabaran atas tahapan pembangunan tahunan keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Hal tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. RKP tahun 2018 memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan dalam satu tahun yang disusun dengan tetap mendukung keberlanjutan pembangunan dan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMN.

Kinerja pelaksanaan semester I APBN tahun 2017 semakin baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, baik dari sisi penerimaan maupun belanja. Realisasi penerimaan perpajakan dalam tahun 2017 jauh lebih baik dari pencapaiannya pada tahun lalu, dimana pada tahun 2017 tumbuh mencapai 9,6 persen sedangkan pada tahun 2016 pertumbuhannya sebesar negatif 2,5 persen. Dengan demikian, APBN tetap dijaga sebagai instrumen yang efektif dan kredibel sehingga APBN makin sehat dan perekonomian makin kuat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Namun demikian, Pemerintah masih menghadapi beberapa tantangan yang dapat mempengaruhi kinerja perekonomian domestik, antara lain: (1) moderasi perekonomian global; (2) pelemahan permintaan dunia dan penurunan harga komoditas global; (3) belanja investasi Pemerintah untuk infrastruktur dan program-program peningkatan kesejahteraan didorong sebagai penopang kinerja perekonomian dalam negeri; (4) sektor konstruksi, jasa keuangan dan asuransi, serta informasi dan komunikasi menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi domestik; (5) sementara itu, laju inflasi relatif semakin terkendali, sejalan dengan penurunan harga komoditas dan terjaganya pasokan bahan pokok kebutuhan masyarakat; dan (6) dominasi kepemilikan asing terutama dalam pasar saham dan pasar modal yang masih tinggi dan berisiko terjadinya *sudden reversal*, jika pasar keuangan global dan domestik mengalami goncangan.

Pemerintah setiap tahunnya mengalokasikan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN, sebagai bentuk pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta beberapa UU terkait lainnya. Beberapa jenis dana Transfer ke Daerah, nomenklatur dan cakupannya telah mengalami perubahan dalam beberapa tahun

terakhir agar lebih sesuai dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan daerah dan kebutuhan pendanaan daerah. Pada tahun 2015, nomenklatur Transfer ke Daerah dan Dana Desa mengalami perubahan, dari sebelumnya "Transfer ke Daerah" menjadi "Transfer ke Daerah dan Dana Desa", hal ini sejalan dengan pelaksanaan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Selanjutnya, pada tahun 2016, dilakukan beberapa perubahan struktur dan ruang lingkup Transfer ke Daerah dan Dana Desa agar lebih sesuai dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan daerah, dan kebutuhan pendanaan daerah. Perubahan utama yang dilakukan antara lain adalah adanya nomenklatur baru dalam dana perimbangan yaitu Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum merupakan dana yang sebagian besar merupakan *blockgrant* seperti Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Sedangkan Dana Transfer Khusus menampung alokasi anggaran yang penggunaannya sudah ditentukan, seperti Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Non Fisik). Selain itu pada tahun 2016 juga terjadi perubahan postur TKDD, yaitu pada rincian DAK Fisik yang dilakukan terutama untuk mendukung pelaksanaan Nawacita, khususnya: (1) Cita ketiga : membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (2) Cita kelima : meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; (3) Cita keenam : meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan (4) Cita ketujuh : mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Secara umum, selama tahun 2013-2017 kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa diarahkan untuk: (1) mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah dan mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah; (2) meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; (3) memprioritaskan penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, terluar, terpencil, terdepan, dan pascabencana; (4) mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dasar; (5) mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel; (6) meningkatkan kualitas pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi; (7) meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan (8) memperbaiki mekanisme penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan pada kinerja pelaksanaan untuk setiap tahapannya di daerah.

Dari sisi penyaluran, dalam periode 2013-2017 banyak terdapat perubahan pola penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yang bertujuan agar pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dapat lebih kredibel dan akuntabel. Perubahan terakhir terkait pola penyaluran tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2017 tentang perubahan PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Perubahan mekanisme penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa terutama ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas serta dampak atas pelaksanaannya.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa terus mengalami peningkatan, bahkan pada tahun 2016, untuk pertama kalinya pagu dan realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa lebih tinggi dari pagu dan realisasi anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Pada tahun 2013-2016, realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa meningkat dari Rp513,3 triliun

menjadi Rp710,3 triliun atau meningkat rata-rata sebesar 11,4 persen per tahun. Pada tahun 2017, realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa diperkirakan mencapai Rp755,9 triliun atau meningkat 6,4 persen dari tahun 2016. Peningkatan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam periode 2013-2017 tersebut disebabkan antara lain oleh: (i) perubahan PDN Neto dan perubahan rasio alokasi DAU terhadap PDN Neto; (ii) mulai dialokasikannya Dana Desa sejak tahun 2015 sebagai wujud pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan (iii) peningkatan Dana Transfer Khusus yang terutama disebabkan oleh adanya kebijakan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan adanya kebijakan pengalihan alokasi anggaran dekonsentrasi dari kementerian teknis ke Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk kegiatan yang memang merupakan kewenangan daerah sesuai dengan amanat UU Nomor 33 Tahun 2004.

3.2.2 Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah

Pemerintah setiap tahunnya mengalokasikan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN, sebagai bentuk pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta beberapa UU terkait lainnya. Beberapa jenis dana Transfer ke Daerah, nomenklatur dan cakupannya telah mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir agar lebih sesuai dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan daerah dan kebutuhan pendanaan daerah. Pada tahun 2015, nomenklatur Transfer ke Daerah dan Dana Desa mengalami perubahan, dari sebelumnya “Transfer ke Daerah” menjadi “Transfer ke Daerah dan Dana Desa”, hal ini sejalan dengan pelaksanaan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Selanjutnya, pada tahun 2016, dilakukan beberapa perubahan struktur dan ruang lingkup Transfer ke Daerah dan Dana Desa agar lebih sesuai dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan daerah, dan kebutuhan pendanaan daerah. Perubahan utama yang dilakukan antara lain adalah adanya nomenklatur baru dalam dana perimbangan yaitu Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum merupakan dana yang sebagian besar merupakan *blockgrant* seperti Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Sedangkan Dana Transfer Khusus menampung alokasi anggaran yang penggunaannya sudah ditentukan, seperti Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Non Fisik). Selain itu pada tahun 2016 juga terjadi perubahan postur TKDD, yaitu pada rincian DAK Fisik yang dilakukan terutama untuk mendukung pelaksanaan Nawacita, khususnya: (1) Cita ketiga : membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (2) Cita kelima : meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; (3) Cita keenam : meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan (4) Cita ketujuh : mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Secara umum, selama tahun 2013-2017 kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa diarahkan untuk: (1) mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah dan mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah; (2) meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; (3) memprioritaskan penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, terluar, terpencil, terdepan, dan pascabencana; (4) mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dasar; (5) mendorong peningkatan kualitas pengelolaan

keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel; (6) meningkatkan kualitas pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi; (7) meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan (8) memperbaiki mekanisme penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan pada kinerja pelaksanaan untuk setiap tahapannya di daerah.

Dari sisi penyaluran, dalam periode 2013-2017 banyak terdapat perubahan pola penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yang bertujuan agar pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dapat lebih kredibel dan akuntabel. Perubahan terakhir terkait pola penyaluran tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2017 tentang perubahan PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Perubahan mekanisme penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa terutama ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas serta dampak atas pelaksanaannya.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa terus mengalami peningkatan, bahkan pada tahun 2016, untuk pertama kalinya pagu dan realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa lebih tinggi dari pagu dan realisasi anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Pada tahun 2013-2016, realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa meningkat dari Rp 513,3 triliun menjadi Rp710,3 triliun atau meningkat rata-rata sebesar 11,4 persen per tahun. Pada tahun 2017, realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa diperkirakan mencapai Rp755,9 triliun atau meningkat 6,4 persen dari tahun 2016. Peningkatan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam periode 2013-2017 tersebut disebabkan antara lain oleh: (i) perubahan PDN Neto dan perubahan rasio alokasi DAU terhadap PDN Neto; (ii) mulai dialokasikannya Dana Desa sejak tahun 2015 sebagai wujud pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan (iii) peningkatan Dana Transfer Khusus yang terutama disebabkan oleh adanya kebijakan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan adanya kebijakan pengalihan alokasi anggaran dekonsentrasi dari kementerian teknis ke Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk kegiatan yang memang merupakan kewenangan daerah sesuai dengan amanat UU Nomor 33 Tahun 2004.

Transfer ke Daerah

Transfer ke Daerah merupakan bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal yang terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, serta Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Penerimaan Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sementara itu, Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan kepada provinsi dan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kriteria kinerja tertentu. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Negara yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah.

Peningkatan dana Transfer ke Daerah tersebut diharapkan mampu memberdayakan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan dapat mendorong perekonomian daerah.

Dana Perimbangan

Tujuan dialokasikannya Dana Perimbangan adalah untuk memperkecil kesenjangan fiskal, baik antara Pemerintah Pusat dengan daerah maupun antar daerah. Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah , sebagai upaya untuk menambah kapasitas fiskal daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dialokasikan Dana Perimbangan. Dana Perimbangan tersebut terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Sementara Dana Transfer Khusus terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

Dana Transfer Umum

Dana Transfer Umum bersifat block grant, yang penggunaannya menjadi kewenangan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Pada tahun 2017 terdapat perubahan kebijakan terhadap penggunaan Dana Transfer Umum, yang bertujuan agar penggunaan Dana Transfer Umum tersebut lebih terarah. Perubahan kebijakan tersebut adalah dengan mengarahkan penggunaan Dana Transfer Umum sekurang-kurangnya 25 persen untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi. Dana Transfer Umum terdiri atas Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari Pendapatan Negara yang dibagihasilkan, yaitu penerimaan Pajak dan penerimaan Sumber Daya Alam. DBH bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Untuk itu, DBH dialokasikan berdasarkan prinsip *by origin* dan disalurkan sesuai dengan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (*based on actual revenue*).

DBH Pajak

Terdiri atas PPh Pasal 21, PPhPasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Cukai Hasil Tembakau (CHT).

DBH Sumber Daya Alam (SDA)

Merupakan dana yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SDA, yaitu kehutanan, perikanan, pertambangan mineral dan batubara, pertambangan minyak bumi dan gas bumi, serta pengusahaan panas bumi. Jenis dan besaran persentase bagian daerah dari PNBP SDA tersebut ditetapkan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selama tahun 2013-2016 realisasi DBH SDA mengalami penurunan rata-rata sebesar 2,0 persen per tahun, yaitu dari Rp42,5 triliun pada tahun 2013, menjadi Rp39,9 triliun pada tahun 2016. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh naik turunnya PNBP yang dibagihasilkan kepada daerah.

Penurunan PNBP yang dibagihasilkan kepada daerah tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Penurunan PNBP dari pertambangan mineral dan batubara, terutama disebabkan oleh turunnya harga komoditi batubara yang akhirnya juga memberi dampak pada kecenderungan berkurangnya volume produksi. Sementara penurunan PNBP dari minyak bumi dan gas bumi antara lain dipengaruhi turunnya harga minyak (ICP) dan *lifting* minyak.

Dana Alokasi Umum

DAU yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, dialokasikan sekurang-kurangnya 26 persen dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto. Dalam perkembangannya dari tahun ke tahun, persentase DAU terhadap PDN Neto juga terus mengalami perubahan, utamanya mengikuti dinamika kemampuan

keuangan negara maupun kebutuhan fiskal daerah secara keseluruhan.

Selain itu, peningkatan DAU dalam tahun 2013-2017 juga dipengaruhi oleh adanya pengalihan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi sebagimana amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus (DTK) sebagai suatu bentuk dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya, mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong kualitas belanja daerah. Di samping itu, Dana Transfer Khusus juga menjadi salah satu kunci bagi upaya pencapaian prioritas nasional. Untuk itu, maka upaya perbaikan kebijakan DTK terus dilakukan, termasuk dalam konteks perencanaan dan penganggaran maupun penyalurannya.

Dana Alokasi Khusus Fisik

Dalam periode tahun 2013-2017, banyak terjadi perubahan kebijakan dalam pengalokasian DAK Fisik. Salah satu perubahan besar yang dilakukan adalah perubahan mekanisme pengalokasian DAK Fisik yang sebelumnya pada tahun 2013-2015 lebih banyak bersifat *top-down*, kemudian pada tahun 2016 dirubah melalui mekanisme *botom-up*. Sebelumnya, pengalokasian DAK Fisik sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah Pusat dengan menggunakan 3 kriteria, yaitu kriteria umum yang terkait dengan kemampuan keuangan daerah, kriteria khusus yang terkait dengan kewilayahan, dan kriteria teknis yang terkait dengan data kebutuhan teknis daerah. Pada tahun 2016, pengalokasian DAK Fisik dilaksanakan dengan mekanisme *proposal based*, yaitu melalui mekanisme pengusulan kegiatan dan kebutuhan pendanaan dari daerah kepada pemerintah pusat.

Berdasarkan mekanisme *proposal based* tersebut, mekanisme pengalokasian DAK Fisik dimulai dari penetapan bidang/subbidang/kegiatan yang menjadi prioritas nasional sebagai dasar bagi penyusunan dan penilaian usulan daerah. Berdasarkan menu kegiatan yang sudah ditetapkan, daerah dapat menyampaikan usulan DAK kepada Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan kementerian/lembaga terkait, yang selanjutnya akan melakukan proses verifikasi dan penilaian atas usulan daerah. Hasil penilaian tersebut kemudian dibahas dalam kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan DAK, yang dilakukan antardaerah dalam satu provinsi. Berdasarkan hasil sinkronisasi dan harmonisasi dimaksud, Pemerintah menentukan pagu per bidang/subbidang/subjenis yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan ketersediaan pagu DAK dalam APBN, dan dilanjutkan dengan penghitungan pagu alokasi DAK untuk masing-masing daerah. Dengan demikian, melalui mekanisme *proposal based* ini, diharapkan alokasi DAK Fisik lebih sesuai dengan kebutuhan daerah dan prioritas nasional. Pada tahun 2017, DAK fisik terdiri dari DAK Reguler, DAK Penugasan, dan DAK Afirmasi.

Dana Alokasi Khusus Non fisik

DAK Nonfisik bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan publik yang berkualitas dengan harga yang semakin murah. Dalam perkembangannya, DAK Nonfisik telah mengalami berbagai perubahan kebijakan, baik cakupan, besaran *unit cost*, maupun target sasarannya. Cakupan DAK Nonfisik antara lain, belanja operasional pendidikan dan kesehatan, tunjangan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah PNSD, peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bantuan pelayanan administrasi kependudukan.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 34 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Penyelenggaraan pendidikan tersebut, sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan urusan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. BOS SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT diarahkan untuk mempercepat pencapaian program wajib belajar 12 tahun yang bermutu, mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada satuan pendidikan yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada satuan pendidikan yang sudah memenuhi SPM. Selanjutnya, BOS SMA/SMK diarahkan untuk mewujudkan layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat. Dana BOS diberikan kepada semua satuan pendidikan SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, SD/SMP satu atap (Satap), SMA/SMALB dan SMK, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat di seluruh provinsi di Indonesia, dan yang sudah terdata dalam sistem data pokok pendidikan dasar dan menengah.

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP- PAUD)

Diarahkan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bermutu dan membantu pemerintah daerah mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini. BOP PAUD dialokasikan kepada penyelenggara satuan PAUD dan satuan pendidikan non formal dengan peserta didik yang terdata dalam data pokok pendidikan (DAPODIK) PAUD- DIKMAS.

Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPG PNSD)

Dialokasikan dalam rangka mendukung kebijakan meningkatkan profesionalisme guru. Pemberian tunjangan profesi tersebut, merupakan salah satu bentuk penghargaan dari Pemerintah terhadap para guru yang telah memenuhi kriteria lolos sertifikasi. Dengan adanya peningkatan kesejahteraan dalam bentuk tunjangan sertifikasi guru, diharapkan dapat memberikan motivasi yang kuat bagi guru untuk meningkatkan profesionalisme pengajaran bagi peningkatan kualitas pendidikan.

TPG PNSD diarahkan untuk meningkatkan etos kerja dan kesejahteraan bagi guru PNSD dan ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme guru PNSD melalui peningkatan kesejahteraan guru. Tunjangan tersebut diberikan kepada guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu sebesar 1 (satu) kali gaji pokok PNSD yang bersangkutan, tidak termasuk untuk bulan ke-13. Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah dialokasikan kepada daerah berdasarkan perhitungan kebutuhan Dana TPG PNSD yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (DTP Guru PNSD)

Merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru PNSD yang belum memiliki sertifikasi profesi pendidik dengan tujuan untuk meningkatkan etos kerja dan kesejahteraan bagi guru PNSD. Pemberian tunjangan tambahan ini ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme guru melalui peningkatan kesejahteraan guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DTP Guru PNSD dialokasikan kepada daerah berdasarkan perhitungan kebutuhan DTP Guru PNSD yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan dan diberikan kepada guru PNSD sebesar Rp250.000,- per bulan selama 12 bulan.

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)

Dialokasikan untuk mendukung program pemerintah dibidang kesehatan dan keluarga berencana. Bantuan Operasional Kesehatan diarahkan untuk percepatan pencapaian SPM dan pelaksanaan program nasional dan/atau komitmen Indonesia terhadap program *Sustainable Development Goals* (SDG's) bidang Kesehatan. Tujuan pengalokasian dana BOK antara lain untuk: (1) meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya melalui pelayanan di Puskesmas; (2) menjadi pelengkap dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran kesehatan; dan sekaligus sebagai salah satu sumber pendanaan operasional Puskesmas; (3) meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; (4) menurunkan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan malnutrisi; (5) meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat; serta (6) mendorong pemberantasan penyakit tropis terabaikan (*neglected tropical disease*-NTD).

Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana dialokasikan berdasarkan: (1) jumlah balai penyuluhan KB yang telah terbangun di kecamatan; (2) jumlah klinik dan Posyandu; dan (3) satu Kampung KB di kabupaten/kota. BOK dan BOKB mulai dialokasikan sejak tahun 2016.

Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan

Merupakan program bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di bidang koperasi dan UKM. Dana PK2UKM diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi, usaha kecil dan menengah. Program tersebut ditujukan untuk membantu mendanai penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas bagi para pengurus/pengawas/anggota/pengelola koperasi dan pelaku usaha kecil dan menengah melalui pelatihan dan pendampingan yang dialokasikan berdasarkan kebutuhan dana untuk penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan mulai dialokasikan sejak tahun 2016.

Dana Bantuan Pelayanan Administrasi Kependudukan

Diarahkan untuk menjamin keberlanjutan dan keamanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu dalam menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang akurat dan seragam di seluruh Indonesia sesuai amanat UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dana Bantuan Pelayanan Administrasi Kependudukan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab aparat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil dan meningkatkan peran dan fungsi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan pelayanan dokumen kependudukan (pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil). Dana Bantuan Pelayanan Administrasi Kependudukan diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota, terutama untuk mewujudkan peningkatan kepemilikan akte kelahiran, peningkatan aksesibilitas K/L terhadap *database* kependudukan berbasis Nomor Identitas Kependudukan (NIK) Nasional.

Dana Bantuan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dialokasikan kepada provinsi digunakan untuk: (1) pembinaan kepada kabupaten/kota terkait kebijakan administrasi kependudukan dan catatan sipil; (2) bimbingan teknis

pengelolaan administrasi kependudukan bagi aparat kabupaten/kota; (3) fasilitasi pelaksanaan penerbitan KTP-el di kabupaten/kota; (4) pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan; dan (5) koordinasi/konsultasi administrasi kependudukan. Sedangkan Dana Bantuan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dialokasikan kepada kabupaten/kota digunakan untuk: (1) sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat; (2) pelayanan dokumen kependudukan; (3) penerbitan dokumen kependudukan; (4) pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan; dan (5) koordinasi/konsultasi administrasi kependudukan. Dana Bantuan Pelayanan Administrasi Kependudukan mulai dialokasikan pada tahun 2017.

Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah (DID) diarahkan untuk memberikan penghargaan (*reward*) kepada daerah yang mempunyai kinerja baik dalam upaya peningkatan kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan, kinerja pelayanan dasar publik, serta perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2017 dan 2018, alokasi DID dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

Dalam perkembangannya, realisasi DID mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari semula sebesar Rp1,4 triliun pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp5,0 triliun pada tahun 2016 atau meningkat rata-rata sebesar 53,3 persen per tahun. Peningkatan DID terbesar terjadi pada tahun 2016, hal ini bertujuan agar besaran DID yang diterima masing-masing daerah lebih efektif untuk menstimulasi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal daerah, kinerja pelayanan dasar, dan kinerja ekonomi, serta kesejahteraan rakyat.

Penyaluran Transfer ke Daerah

Dalam perkembangannya pola penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa telah mengalami beberapa kali penyempurnaan, terakhir terkait pola penyaluran tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2017 tentang perubahan PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Perubahan tersebut dilakukan guna memperbaiki mekanisme penyaluran Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan kinerja penyerapan dana dan ketercapaian *output* untuk efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Kebijakan strategis terkait pola penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2017, antara lain: *pertama*, pengalokasian DAU bersifat dinamis, sehingga besaran DAU per daerah dan realisasi penyalurannya akan mengikuti dinamisasi perkembangan PDN neto. *Kedua*, penyaluran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan kinerja penyerapan dan capaian *output* atas penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang disalurkan pada tahun/tahap/triwulan sebelumnya.

Penyaluran berbasis kinerja ini diterapkan pada DAK Fisik, DAK Nonfisik, DID, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Papua Barat, serta Dana Desa. *Ketiga*, penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang sebelumnya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), pada tahun 2017 dilakukan oleh KPPN di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan kepada pemerintah daerah, meningkatkan efisiensi, koordinasi dan konsultasi antara pemerintah daerah dengan Kementerian Keuangan, meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi, serta analisis kinerja pelaksanaan DAK Fisik dan Dana Desa.

3.2.3 Analisis Keuangan Daerah

Tabel III.2
Inkonsistensi BAB III RKPD dengan BAB III RPJMD

NO	Uraian	Proyeksi 2019 RPJMD (Rp)	Proyeksi 2019 RKPD (Rp)	Inkonseistensi/ Deviasi	Keterangan
1	Rekening Pendapatan	803.802.209.176	634.877.075.499	168.925.133.677	Adanya DAK yang belum di proyeksikan dalam RKPD
2	Rekening Belanja	875.688.004.364	677.670.971.468	198.017.032.896	RKPD hanya mengakomodir DAU, DBH dan DID sebagai dana perimbangan sedangkan DAK belum diakomodir
3	Rekening Pembiayaan	52.385.795.188	42.793.895.969	9.591.899.219	Proyeksi tahun 2019, SiLPA kecil di RKPD karena SiLPA sudah disesuaikan dengan target yang tercantum dalam APBD TA. 2018 yang telah ditetapkan dalam Perda APBD

Sumber : RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, BKD dan Bappeda Kota Payakumbuh

Analisis :

1. PENDAPATAN
   Inkonsistensi proyeksi pendapatan dalam RPJMD disebabkan karena terjadinya proyeksi pendapatan di RKPD belum mengakomodir DAK. Usulan DAK di aplikasi KRISNA senilai Rp. 237.725.050.686,-

Penetapan proyeksi pendapatan dari DAK berdasarkan pada usulan yang ada dalam aplikasi KRISNA diharapkan akan menunjukkan konsistensi antara RPJMD dan RKPD

2. BELANJA

   Total belanja dalam RPJMD sesuai pada tabel III.19 adalah Rp. 875.688.004.346,- dengan komposisi terdiri dari Rp. 537.625.384.364,- untuk belanja langsung dan Rp. 338.062.620.000,- untuk belanja tidak langsung.

   Terjadi Inkonsistensi antara total belanja RPJMD dengan RKPD karena RKPD hanya mengakomodir dana perimbangan berupa DAU, DBH dan DID, sedangkan DAK belum diakomodir karena penyusunan BAB III RKPD mengacu pada Permendagri Nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019.

3. PEMBIAYAAN

   Pembiayaan dalam RPJMD inkonsistensi dengan RKPD disebabkan karena:

   - Proyeksi SiLPA 2019 di RKPD lebih kecil dari RPJMD karena SiLPA RKPD sudah disesuaikan dengan target SiLPA dalam APBD Tahun 2018 yang sudah ditetapkan dengan Perda APBD Kota Payakumbuh;
   - Penerimaan Pembiayaan dalam RPJMD tidak hanya bersumber dari SiLPA tahun lalu tetapi juga bersumber dari pinjaman bank senilai Rp.25.000.000.000,- dan Penerimaan kembali non permanen lainnya senilai Rp. 17.119.524.761,- sedangkan penerimaan pembiayaan di RKPD hanya bersumber dari SiLPA tahun lalu, sehingga penerimaan pembiayaan di RPJMD inkonsistensi dengan penerimaan pembiayaan dalam RKPD. Begitu juga halnya dengan pengeluaran pembiayaan RPJMD inkonsisten dengan RKPD karena pengeluaran pembiayaan dalam RPJMD terdiri dari penyertaan modal pemerintah daerah senilai Rp. 17.119.524.761,-, investasi BLUD RSUD senilai Rp. 20.000.000.000,- dan investasi UPTD ternak sapi senilai Rp. 5.000.000.000,-.

     Artinya RKPD Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2019 bila memungkinkan untuk melakukan pinjaman dari Bank dan penerimaan kembali investasi non permanen lainnya untuk investasi produktif dan peningkatan pelayanan bagi masyarakat sesuai dalam RPJMD.

3.2.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, didefinisikan sebagai: “semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu, baik uang maupun barang yang dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut”. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, retribusi daerah, atau sumber penerimaan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan

pemerintah di daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah,dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitasriilkeuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahwa pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun ketidaktersedianya pendanaan pada suatu urusan pemerintahan. Sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (meliputi pajak daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain- lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan yang sah.

Kedudukan APBD sangatlah penting sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah dalam proses pembangunan di daerah. APBD juga merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (*public accountability*) yang diwujudkan melalui program dan kegiatan. APBD merupakan instrumen kebijakan, yaitu sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Proses penganggaran yang telah direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan tertib serta disiplin akan mencapai sasaran yang lebih optimal. APBD juga menduduki posisi sentral dan vital dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah.

3.2.5 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah 2016-2019

Pendapatan Daerah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, didefinisikan sebagai*: "hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih*".

Secara umum, sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber PAD terdiri atas:

   (a) Hasil pajak daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada semua obyek pajak, seperti orang/badan, benda bergerak/tidak bergerak;

   (b) Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa/fasilitas yang berlaku oleh Pemerintah Daerah secara langsung dan nyata;

   (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain:

      i. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;

      ii. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

pemerintah/BUMN;

iii. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

(d) Lain-lain PAD yang sah, antara lain:

i. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
ii. Jasa giro;
iii. Pendapatan bunga;
iv. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
v. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
vi. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
vii. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
viii. Pendapatan denda pajak;
ix. Pendapatan denda retribusi;
x. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
xi. Pendapatan dari pengembalian;
xii. Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
xiii. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan;
xiv. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Pemberian sumber PAD bagi daerah ini bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan/ Pendapatan Transfer merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dana perimbangan ini terdiri atas:

(1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak;
(2) Dana Alokasi Umum; dan
(3) Dana Alokasi Khusus.

Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

(a) hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
(b) dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
(c) dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;
(d) dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan

(e) bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Analisis dan perhitungan pendapatan daerah dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar realisasi dan potensi pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk pendanaan pembangunan di Kota Payakumbuh. Analisis dan perhitungan pendapatan daerah dilakukan dengan melihat data: 1) realisasi pendapatan tahun 2016; 2) realisasi pendapatan tahun 2017; 3) penetapan APBD tahun 2018; dan 4) proyeksi pendapatan tahun 2019 (tahun rencana) serta proyeksi pendapatan tahun 2020

Berdasarkan data tahun 2016-2017 terlihat bahwa sumber penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan, sementara penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami penurunan.

Secara agregat, realisasi pendapatan daerah tahun 2017 sebesar Rp. 739,010 milyar lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar Rp. 717,632 milyar. Secara umum kontribusi per komponen pendapatan adalah sebagai berikut : **Pendapatan Asli Daerah** sebesar Rp. 116,596 milyar (15,77%) pada tahun 2017 dan Rp. 87,445 milyar (12,18 %) pada tahun 2016. Dari sisi persentase kontribusi ada kenaikan sebesar 33,33 % persen pada tahun 2017. **Dana Perimbangan** sebesar Rp. 596,081 milyar (80,65%) pada tahun 2017 dan Rp. 601,830 milyar (83,86%) pada tahun 2016. Dari sisi persentase kontribusi ada penurunan sebesar 0,95 % pada tahun 2017. **Lain-lain Pendapatan yang Sah** sebesar Rp. 26,332 milyar (3,56 %) pada tahun 2017 dan Rp. 28,357 milyar (3,95%) pada tahun 2016. Dari sisi persentase kontribusi ada penurunan sebesar 7,14 persen pada tahun 2017.

Pada tahun anggaran 2018, pendapatan daerah ditetapkan pada nilai Rp.723,592 milyar, dengan komposisi terdiri dari Rp. 107,516 milyar untuk Pendapatan Asli Daerah, Rp. 577,192 milyar untuk Dana Perimbangan, dan Rp. 38,884 milyar untuk Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sementara itu, untuk perhitungan proyeksi pendapatan daerah tahun anggaran 2019, diproyeksikan mencapai angka Rp. 634,877 milyar dengan komposisi terdiri dari Rp. 137,907 milyar untuk Pendapatan Asli Daerah, Rp. 455,344 milyar untuk Dana Perimbangan, dan Rp. 41,625 Milyar untuk Lain-lain Pendapatan yang Sah. Proyeksi pendapatan tahun 2019 tersebut telah memperhitungkan tingkat pertumbuhan masing-masing sumber penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan khususnya DAU, sementara untuk dana alokasi khusus belum dimasukan sebagai bagian dari pendapatan daerah.

Tabel III.3
Realisasi dan Proyeksi /Target Pendapatan
Kota Payakumbuh
Tahun 2016 s.d tahun 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)				
		Realisasi 2016 *	Realisasi 2017*	Penetapan APBD 2018 **	Proyeksi 2019 ***	Proyeksi 2020 ***
1	**PENDAPATAN**	**717.632.636.495**	**739.010.123.926**	**723.592.513.711**	**634.877.075.499**	**766.666.742.001**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**87.445.115.902**	**116.596.302.337**	**107.516.370.711**	**137.907.420.499**	**146.149.156.711**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	11.033.692.749	14.047.192.754	16.572.700.000	38.869.269.919	21,022,361,293
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	6.244.517.288	6.726.133.027	7.513.699.886	11.174.903.765	7,197,767,414
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	9.532.797.149	8.828.124.902	11.534.534.435	12.373.038.605	14,842,563,806
1.1.4	Lain-lain Pandapatan Asli Daerah yang Sah	60.634.108.716	86.994.851.654	71.895.436.390	75.490.208.210	103,086,464,198
1.2	**DANA PERIMBANGAN**	**596.830.078.683**	**545.291.941.107**	**560.692.002.000**	**455.344.655.000**	**576.222.870.250**
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak atau BH Bukan Pajak (SDA)	12.412.466.753	13.378.402.333	17.647.721.000	17.647.721.000	10,350,623,599
1.2.2	Dana Alokasi Umum	445.523.347.000	437.696.934.000	437.696.934.000	437.696.934.000	565.872.247.151
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	138.894.264.930	94.216.604.774	105.347.347.000	0	0
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**23.357.441.910**	**77.121.880.482**	**55.384.141.000**	**41.625.000.000**	**44,294,714,541**
1.3.1	Pendapatan Hibah	3.600.000.000	816.000.000	17.317.000.000	0	8,000,000,000
1.3.2	Dana Insentif Daerah	5.000.000.000	50.789.397.000	16.500.000.000	16.500.000.000	0
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Peme-rintah Daerah Lainnya	22.787.409.910	25.516.483.482	21.567.141.000	25.125.000.000	36.294.714.541
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerin -tah Daerah Lainnya	1.970.032.000	0	0	0	0

Sumber: * Data Realisasi APBD Tahun 2016 & 2017,
** Data penetapan APBD 2018 (tahun berjalan),
*** Data Proyeksi APBD Tahun 2019 & 2020

3.2.6 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2019 disesuaikan dengan kewenangan dan sumber pendapatan daerah dapat dibagi sebagai berikut :

a. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
   i. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada

data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2019 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

ii. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.

iii. Mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan: menerapkan sistem on-line penerimaan Pajak Daerah pada beberapa mata anggaran pajak dan membenahi manajemen data penerimaan PAD;

iv. Optimalisasi di bidang pendapatan asli daerah di tahun 2019 dipertajam dengan keterbukaan akses dan informasi data keuangan;

v. Optimalisasi pendapatan asli daerah dengan tetap menjaga iklim investasi;

vi. Melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang realistis berdasarkan basis data terkini;

vii. Memantapkan regulasi pajak, antara lain BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan), Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah berikut prosedur dan mekanismenya;

viii. Pelaksanaan pertukaran data informasi perpajakan untuk meningkatkan basis pajak daerah dan mencegah praktik penghindaran pajak;

ix. Pemanfaatan data dan implementasi sistem informasi perpajakan yang up to date dan terintegrasi;

x. Pemberian insentif perpajakan untuk meningkatkan gairah investasi dan usaha;

xi. Sementara itu, optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah ditempuh dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

xii. Memantapkan kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Asli Daerah;

xiii. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dengan tetap mengedepankan pelayanan publik serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah;

xiv. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah;

xv. Meningkatkan pelayanan dan membuka akses kemudahan terhadap masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;

xvi. Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pendapatan asli daerah dengan Instansi/lembaga terkait di tingkat kota dan provinsi;

b. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Dana Perimbangan

i. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk meningkatkan dana perimbangan

ii. Penguatan data base yang lengkap dan valid sebagai penunjang kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah.

c. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional, antara lain melalui : peluang pendanaan pihak ketiga berupa

dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

3.2.7 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah 2016-2020

Alokasi Belanja Daerah yang dikeluarkan pemerintah kota setiap tahunnya dimaksudkan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Belanja daerah terdiri atas:

1. Belanja Tidak Langsung meliputi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan tidak terduga;
2. Belanja Langsung yang meliputi belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal.

Perkembangan realisasi belanja daerah Kota Payakumbuh mengalami penurunan dari **Rp.741,093 milyar** pada tahun 2016 menjadi **Rp.694,223 milyar** pada tahun 2017. Dilihat dari proporsinya, perbandingan alokasi **Belanja Tidak Langsung (BTL)** dengan **Belanja Langsung (BL)** adalah sebagai berikut pada tahun 2016 sebesar 52,76 %(**BTL**) dan 47,23 % (**BL**). Sementara pada tahun 2017, menjadi 39,76 %(**BTL**) dan 60,23%(**BL**).

Realisasi **Belanja Tidak Langsung** tahun 2016 mencapai Rp. 360,632 milyar turun menjadi Rp.276,055 milyar pada tahun 2017. Sedangkan untuk realisasi **Belanja Langsung** mencapai Rp. 380,461 milyar pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 418,168 milyar pada tahun 2017. Penurunan realisasi belanja tidak langsung pada Tahun 2017 disebabkan dengan beralihnya kewenangan pengelolaan pendidikan menengah (SMA dan SMK) ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pada tahun 2018, belanja daerah ditetapkan pada nilai Rp.768,043 milyar , dengan komposisi Rp. 337,028 milyar untuk Belanja Tidak Langsung, dan Rp. 431,015 milyar untuk Belanja Langsung. Sementara itu, untuk perhitungan proyeksi belanja daerah tahun 2019, diperkirakan mencapai angka Rp. 677.670 milyar dengan komposisi Rp. 331,471 milyar untuk Belanja Tidak Langsung, dan Rp. 346,199 milyar untuk Belanja Langsung. Secara rinci realisasi dan proyeksi belanja dalam kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.4

Tabel III.4
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah
Kota Payakumbuh
Tahun 2016 s.d tahun 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)				
		Realisasi 2016 *	Realisasi 2017 *	Penetapan APBD 2018 **	Proyeksi 2019 ***	Proyeksi 2020 ***
2	**BELANJA**	**741.093.594.892**	**694.223.803.927**	**768.043.562.778**	**677.670.971.468**	**830.732.137.408**
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**360.632.251.980**	**276.055.631.402**	**337.028.533.769**	**331.471.820.209**	**377.390.276.469**
2.1.1	Belanja Pegawai	344.418.973.231	268.613.558.873	330.401.917.560	325.000.000.000	369.055.065.260
2.1.2	Belanja Bunga	0	0	0	0	0
2.1.3	Belanja Subsidi	0	0		0	0
2.1.4	Belanja Hibah	15.649.000.050	6.942.395.604	5.617.405.000	5.362.609.000	7.326.000.000
2.1.5	Belanja BANSOS	0	0	0	100.000.000	0
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa & Partai Politik	559.211.209	499.676.925	559.211.209	559.211.209	559.211.209
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	5.067.490	0	450.000.000	450.000.000,00	450.000.000,00
2.2	**BELANJA LANGSUNG**	**380.461.342.912**	**418.168.172.525**	**431.015.029.009**	**346.199.151.259**	**453.341.860.939**
2.2.1	Belanja Pegawai	35.066.003.954	37.466.734.399	15.134.238.500	p.m	p.m
2.2.2	Belanja Barang & Jasa	183.879.026.625	204.068.799.002	257.767.375.172	p.m	p.m
2.2.3	Belanja Modal	161.516.312.333	176.632.639.124	158.113.415.337	p.m	p.m

Sumber: * Data RealisasiAPBD Tahun 2016 & 2017,
** Data penetapan APBD 2018 (tahun berjalan),
*** Data Proyeksi APBD Tahun 2019 & 2020

3.2.8 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.
Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2018 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2019 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas penggunaan anggaran kedalam program/kegiatan.

Kebijakan belanja daerah tahun 2019 diarahkan dengan pengaturan pola pembelajaan yang proporsional,efisien dan efektif, yang dilakukan melalui :

1. **Mengalihkan** belanja yang konsumtif menjadi belanja produktif dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi serta percepatan realisasi belanja daerah;
2. **Efisiensi** belanja dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program prioritas;
3. **Melanjutkan** penguatan kualitas belanja daerah dan tetap konsisten melakukan efisiensi belanja non-prioritas tanpa mengurangi pencapaian sasaran output yang telah direncanakan.

Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD; pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas; *acress* yang besarnya 2,5% untuk memenuhi kebutuhan kenaikan gaji berjala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai; serta memperhitungkan tunjangan kinerja daerah (TKD) sebagai bentuk kompensasi dihilangkannya honorarium PNS pada belanja langsung.
2. Mengefektifkan alokasi dana hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada kelompok masyarakat/lembaga yang sesuai dengan ketentuan perundang-udangan dan peraturan yang berlaku dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk fisik dan non fisik. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 53 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

3. Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
4. Mengalokasikan belanja tidak terduga secara rasional, yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya.

Kebijakan untuk belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada kepentingan publik.
2. Penganggaran belanja langsung diprioritaskan untuk menunjang pelayanan dasar Masyarakat meliputi urusan Pendidikan dan urusan Kesehatan serta Peningkatan Infrastruktur Kota bagi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi Masyarakat
3. Belanja dalam rangka penyelenggaran urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
4. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dilakukan dengan sangat selektif dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud. Pemerintah Kota Payakumbuh sejak Tahun Anggaran 2018 telah mulai menerapkan Tunjangan Kinerja. Kebijakan ini dilakukan dengan menghapus semua honorarium panitia pelaksana kegiatan (kecuali honorarium tim pengadaan barang dan jasa, honorarium panitia penerima hasil

pekerjaan barang dan jasa, honorarium pejabat penatausahaan keuangan, honorarium tim pengadaan tanah, honorarium kegiatan yang outputnya berupa Perda APBD, Perda Perubahan APBD, Perda LKPD, Perda RPJMD, Perda Perubahan RPJMD, LAKIP Pemerintah Kota Payakumbuh, LKPJ Tahunan, LKPJ Akhir Masa Jabatan, RKPD, Perubahan RKPD dan honorarium kegiatan-kegiatan tertentu yang bukan merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud) yang berada pada jenis belanja pegawai pada kelompok belanja langsung dan dikonversi menjadi Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada jenis belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung.

5. Mengakomodir serta mempertegas proporsi usulan masyarakat melalui media Musrenbang dan reses DPRD pada beberapa SKPD yang dapat memfasilitasi usulan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
6. Mengefisienkan pengeluaran belanja yang bersifat umum dalam kegiatan pada masing-masing SKPD, sesuai dengan kompleksitas, besaran pagu anggaran dan jumlah personilnya. Kebijakan ini terutama terkait Efisiensi Belanja ATK, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, Belanja Perjalanan Dinas.
7. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan terget kinerja dari perjalanan dinas dimaksud.
8. Moratorium pembangunan gedung kantor, kecuali terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

Mandatory Spending

Adalah kewajiban alokasi belanja yang telah diatur oleh undang-undang. Dalam Undang-Undang APBN ada empat jenis mandatory spending untuk daerah, yaitu:

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari total APBD;
2. Alokasi anggaran kesehatan sebesar 10% dari total APBD;
3. Alokasi anggaran infrastruktur sebesar 25% dari total APBD;
4. Alokasi anggaran dana desa 10% dari total APBD.

Oleh karena itu, selain memberikan insentif bagi Pemerintah Daerah yang berkinerja baik berupa DID, terkait dengan ***mandatory spending*** ini Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan merencanakan untuk memberikan sanksi dan hukuman ***(punishment)*** terhadap daerah yang tidak memenuhi ***mandatory spending*** ini berupa penundaan dengan pemberitahuan untuk melakukan penyesuaian, serta memotong DAU atau DBH.

3.2.9 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah 2016-2019

Pengertian pembiayaan menurut peraturan perundangan adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya (UU No.23/2014).
2. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau

untuk memanfaatkan surplus (Permendagri No.13/2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011).

Istilah pembiayaan berbeda dengan pendanaan (*funding*). Pendanaan diartikan sebagai dana atau uang dan digunakan sebagai kata umum, sedangkan Pembiayaan diartikan sebagai penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Sisi pendapatan dari pembiayaan sebagai faktor penambah sisi penerimaan/pendapatan daerah dimana pos pembiayaan digunakan untuk menutupi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang defisit.

Jenis pembiayaan daerah dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan, yang meliputi: SILPA tahun anggaran sebelumnya, Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman, Penerimaan kembali pemberian pinjaman dan Penerimaan piutang daerah;
2. Pengeluaran Pembiayaan yang meliputi: Pembentukan dana cadangan, Penyertaan modal pemerintah daerah, Pembayaan pokok utang dan Pemberian pinjaman.

Selanjutnya Pembiayaan Netto adalah selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan Netto harus dapat menutup defisit APBD. Berikut ini ditampilkan tabel mengenai perkembangan pembiayaan daerah tahun 2016-2020.

Tabel III.5
Realisasi dan Proyeksi / Target Pembiayaan Daerah
Kota Payakumbuh
Tahun 2019 s.d tahun 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)				
		Realisasi 2016 *	Realisasi 2017 *	Penetapan APBD 2018 **	Proyeksi 2019 ***	Proyeksi 2020 ***
3.1	**PENERIMAAN PEM-BIAYAAN DAERAH**	**91.037.098.246**	**60.870.393.439**	**44.451.049.067**	**42.793.895.969**	**64.065.395.407**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	73.917.573.486	47.701.324.055	44.451.049.067	42.793.895.969	64.065.395.407
3.1.5	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	17.119.524.760	13.169.069.384	0	0	0
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**20.143.000.000**	**17.219.500.000**	**0**	0	**0**
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	20.143.000.000	17.219.500.000	44.451.049.067	42.793.895.969	64.065.395.407
	PEMBIAYAAN NETTO	**70.894.098.246**	**43.650.893.439**	**44.451.049.067**	**42.793.895.969**	

Sumber: * Data Realisasi APBD Tahun 2016 & 2017,
** Data penetapan APBD 2018 (tahun berjalan)
*** Data Proyeksi APBD Tahun 2019 & 2020

3.2.10 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah antara lain apabila memungkinkan dilakukan untuk pengembangan rumah sakit umum daerah sehingga layanan kesehatan semakin meluas dan meningkat, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup pembentukan dana cadangan, penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Dalam proyeksi pembiayaan daerah tahun 2019, sumber penerimaan pembiayaan diharapkan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk penyertaan modal pemerintah daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum.

3.2.11 Proyeksi Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019

Berdasarkan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan diatas, serta kecenderungan perkembangan (*trend*) keuangan dalam kurun waktu 2016-2018, selanjutnya diperkirakan pendapatan dan belanja daerah tahun 2019 sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.5.

Tabel III.6
Penetapan APBD 2018 dan Proyeksi Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Jumlah (Rupiah)		
		APBD 2018 **	Proyeksi 2019 ***	N+1 (2020)***
1	**PENDAPATAN**	**723.592.513.711**	**634.877.075.499**	**766.666.742.001**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**107.516.370.711**	**137.907.420.499**	**146.149.156.711**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	16.572.700.000	38.869.269.919	21,022,361,293
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	7.513.699.886	11.174.903.765	7,197,767,414
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.534.534.435	12.373.038.605	14,842,563,806
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah	71.895.436.390	75.490.208.210	103,086,464,198
1.2	**DANA PERIMBANGAN**	**560.692.002.000**	**455.344.655.000**	**576.222.870.250**
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak atau BH Bukan Pajak (SDA)	17.647.721.000	17.647.721.000	10,350,623,599
1.2.2	Dana Alokasi Umum	437.696.934.000	437.696.934.000	565.872.247.151
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	105.347.347.000	0	0
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**55.384.141.000**	**41.625.000.000**	**44,294,714,541**
1.3.1	Pendapatan Hibah	17.317.000.000	0	8,000,000,000
1.3.2	Dana Insentif Daerah	16.500.000.000	16.500.000.000	0
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	21.567.141.000	25.125.000.000	36.294.714.541
2	**BELANJA**	**768.043.562.778**	**677.670.971.468**	**830.732.137.408**
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**337.028.533.769**	**331.471.820.209**	**377.390.276.469**
2.1.1	Belanja Pegawai	330.401.917.560	325.000.000.000	369.055.065.260
2.1.4	Belanja Hibah	5.617.405.000	5.362.609.000	7.326.000.000
2.1.5	Belanja BANSOS	0	100.000.000	0
2.1.7	Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/kab/kota, Pemerintahan desa &partai politik	559.211.209	559.211.209	559.211.209
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	450.000.000	450.000.000	450.000.000,00
2.2	**BELANJA LANGSUNG**	**431.015.029.009**	**346.199.151.259**	**453.341.860.939**
2.2.1	Belanja Pegawai	15.134.238.500	p.m	p.m
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	257.767.375.172	p.m	p.m
2.2.3	Belanja Modal	158.113.415.337	p.m	p.m
	Surplus/Defisit	(44.451.049.067)	0	p.m
3	**PEMBIAYAAN**	**44.451.049.067**	**42.793.895.969**	**64.065.395.407**
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**44.451.049.067**	**42.793.895.969**	64.065.395.407
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	44.451.049.067	42.793.895.969	64.065.395.407
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	0	0	0

No	Uraian	Jumlah (Rupiah)		
		APBD 2018 **	Proyeksi 2019 ***	N+1 (2020)***
	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN	0	0	0

Sumber: ** Data penetapan APBD 2018 (tahun berjalan); *** Data Proyeksi APBD Tahun 2019

Pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Tahun 2019 ini belum dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan karena pendapatan daerah yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bertujuan untuk mengatasi ketimpangan penyediaan infrastruktur layanan publik

Kebijakan DAK Fisik :

1. berdasarkan usulan daerah dan diselaraskan dg prioritas nasional dengan afirmasi untuk daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi.
2. Sinkronisasi rencana kegiatan DAK Fisik antar bidang/subbidang, antardaerah, dan antara DAK dengan pendanaan lainnya, dengan mengoptimalkan peran Provinsi.
3. Petunjuk teknis ditetapkan dalam Perpres dan dapat berlaku lebih dari satu tahun.
4. Penyaluran berbasis kinerja penyerapan dan pelaksanaan fisik, dan disalurkan melalui KPPN setempat guna efisiensi dan meningkatkan governance:
   a. Sinergi DJPK dan DJPB berupa perubahan peraturan (Revisi PMK 48 jo 187 PMK.07/2016) serta pembuatan aplikasi penyaluran
   b. Permintaan penyaluran dan verifikasi kepada unit yg terdekat dengan daerah (governance lebih terjaga)

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik bertujuan untuk mendukung operasional penyelenggaraan layanan publik

Kebijakan DAK Non Fisik

1. Alokasi disesuaikan dengan kebutuhan disesuaikan dengan kebutuhan riil di daerah, berdasarkan jumlah sasaran yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM), terutama di bidang pendidikan dan kesehatan
2. Juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas koperasi dan usaha kecil dan menengah, serta menjamin keberlanjutan dan keamanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu.
3. Alokasi disesuaikan dengan kebutuhan

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh yang masing-masingnya untuk periode 5 tahun sesuai dengan masa jabatan kepala daerah didasarkan kepada RPJPD kota Payakumbuh tahun 2005-2025. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019. Penyusunan RKPD Tahun 2019 berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan, sasaran strategis daerah yang dituangkan di dalam RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, adalah rencana pelaksanaan tahap ketiga (2016-2010) dan keempat (2021-2025) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025. Adapun visi pembangunan jangka panjang daerah Kota Payakumbuh untuk Tahun 2025 adalah ***"Terwujudnya Payakumbuh Sebagai Kota Maju dengan Pengembangan Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah"***.

Selanjutnya untuk dapat mewujudkan kondisi yang diinginkan tersebut, RPJPD Kota Payakumbuh telah menetapkan 6 misi utama pembangunan kota. Keenam misi pembangunan kota tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk arah dan sasaran pembangunan yang lebih konkrit untuk masing-masing aspek dan bidang pembangunan kota. Arah pembangunan tersebut pada dasarnya adalah rincian kondisi yang diinginkan dimasa mendatang untuk dapat mewujudkan visi yang telah ditetapkan terdahulu.

Arah pembangunan ini mencakup beberapa bidang pembangunan yaitu :

1. Bidang Agama dan budaya dengan fokus pada pendalaman pemahaman keagamaan untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang berbudi luhur berakhlak mulia;
2. Bidang Pemerintahan dan Hukum dengan fokus pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang partisipatif, akuntabel dan transparan, penegakan hukum yang berkeadilan dan demokratis serta pelayanan publik yang prima;
3. Bidang Sumberdaya Manusia dengan fokus pemerataan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan dasar, peningkatan mutu sarana pelayanan kesehatan dan pengembangan IPTEK melalui pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan;
4. Bidang Ekonomi dengan fokus pada penerapan teknologi modern dan tepat guna dalam kegiatan produksi dan distribusi industri pengolahan khas Payakumbuh, industri kerajinan rakyat, agribisnis, mendukung pariwisata alam dan kuliner serta melanjutkan pembangunan sektor informal;
5. Bidang Sarana dan Prasarana Perkotaan dengan fokus pada peningkatan kualitas dan lebar jalan yang sudah sesuai dengan standar perencanaan, perluasan

pemasangan jaringan distribusi yang semakin menjangkau seluruh wilayah kota perluasan pemasangan pipa distribusi air bersih, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk membangun saluran tersier dan saluran rumah tangga dan peningkatan peralatan dan fasilitas telekomunikasi dengan menggunakan teknologi yang lebih tinggi;

6. Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dengan fokus pada pemantapan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang kota, pengembangkan potensi flora dan fauna yang ada di dalamnya, melanjutkan kegiatan pendidikan dan penyuluhan masyarakat tentang sadar lingkungan serta peningkatan kualitas sistem tanggap darurat bencana alam.

Gambar IV.1 memberikan sistematika dan alur pikir tentang kaitan antara visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang dalam RPJPD Kota Payakumbuh 2005-2025

Gambar IV.1 Sistematika Keterkaitan Antara Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025

Guna mewujudkan pembangunan yang terpadu dan bersinergi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah, juga diperlukan sinkronisasi prioritas nasional dan daerah dengan memperhatikan visi dan misi serta prioritas pembangunan yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2015-2019, yang selanjutnya akan dijadikan acuan dalam penentuan prioritas pembangunan daerah. Penyusunan RKPD kota Payakumbuh tahun 2019 berpedoman kepada RKP tahun 2019 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

1. Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan Nasional yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2014-2019 yang dikenal dengan *nawacita* adalah sebagai berikut :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga Bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Prioritas Pembangunan Nasional yang tercantum dalam Rancangan RKP Tahun 2019 antara lain :

1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar;
2. Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman;
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif;
4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air;
5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

Selanjutnya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional dijabarkan kedalam Program Prioritas yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

Prioritas Nasional 1 : Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

a. mempercepat pengurangan kemiskinan;

1. memperkuat pelaksanaan bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran;
2. memperkuat sistem jaminan sosial;
3. memperkuat literasi untuk kesejahteraan;
4. memperkuat reforma agraria; dan
5. Pemberian akses kelola sumber daya alam melalui perhutanan sosial.

b. meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat;

1. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
2. meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana;
3. mencegah dan pengendalian penyakit;
4. mempercepat penurunan stunting; dan
5. meningkatkan "gerakan masyarakat hidup sehat";

c. meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;

1. menyediakan pendidik yang berkualitas dan merata;
2. menyediakan afirmasi pendidikan;
3. memperkuat kelembagaan satuan pendidikan; dan
4. meningkatkan kualitas pembelajaran dan akademik.

d. Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak;

1. menyediakan akses hunian layak dan terjangkau;
2. menyediakan akses infrastruktur dasar pemukiman layak; dan
3. meningkatkan kualitas lingkungan di permukiman.

b. meningkatkan tata kelola layanan dasar

1. memperkuat layanan dan rujukan satu pintu;
2. memperkuat integrasi sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil;
3. dan mempercepat pencapaian SPM di daerah.

Prioritas Nasional 2 : Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Melalui Penguatan Konektivitas Dan Kemaritiman

Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

a. meningkatkan konektivitas;

1. pembangunan konektivitas dan jaringan logistik nasional yang mendukung sektor unggulan; dan
2. Pengembangan transportasi perkotaan

b. Mengembangkan telekomunikasi dan informatika;

1. Pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika khususnya di daerah perbatasan dan tertinggal;

c. Mengembangkan pusat kegiatan ekonomi di wilayah timur dan pengambangan pembangunan desa

1. Peningkatan aksesiblitas desa dan kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi.

d. **melaksanakan pembangunan daerah afirmasi**
   1. Pengembangan aksesibilitas pada kawasan perbatasan dan tertinggal melalui penyediaan infrastruktur dan layanan transportasi.

e. Melaksanakan pembangunan konektivitas untuk mendukung pembangunan sektor unggulan hulu-hilir perikanan
   1. Peningkatan produksi perikanan melalui pembangunan konektivitas logistik perikanan dan tata kelola kawasan perikanan.

Selain arah kebijakan tersebut terdapat isu strategis perioritas nasional kedua, antara lain:

a. pembangunan konektivitas dan jaringan logistik nasional sektor unggulan;
b. peningkatan keterpaduan transportasi perkotaan dan keselamatan transportasi;
c. peningkatan sarana prasarana komunikasi dan informatika yang berdaya saing;
d. optimalisasi pembangunan kota-kota KTI untuk pertumbuhan ekonomi nasional;
e. peningkatan aksesibilitas pusat pertumbuhan, layanan kesehatan, dan pendidikan di daerah tertinggal dan perbatasan;
f. peningkatan aksesibilitas desa, kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi;
g. peningkatan kapasitas SDM di daerah dan desa dalam penyediaan sarana prasarana konektivitas;
h. peningkatan sarana dan prasarana sistem logistik perikanan; dan
i. peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan perikanan.

Prioritas Nasional 3 : Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif

Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

a. meningkatkan ekspor dan nilai tambah pertanian melalui peningkatan produktifitas, kualitas, serta dukungan kelembagaan dan sarana prasarana;
b. mendorong percepatan peningkatan nilai tambah industri pengolahan melalui perbaikaniklim usaha, peningkatan investasi, penguatan rantai/nilai dan pemanfaatan inovasi;
c. meningkatkan nilai tambah jasa produktif antara lain melalui pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif dan digital, peningkatan ekspor terutama produk hilirisasi dan penguatan kemitraan;
d. mendorong percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan vokasi dan kompetensi, pengembangan kerjasama dunia usaha dan kewirausahaan;
e. mengembangan IPTEK dan Inovasi untuk meningkatkan produktivitas antara lain melaui peningkatan SDM dan IPTEK, pengembangan litbang keilmuan.

Selain arah kebijakan tersebut terdapat isu strategis prioritas nasional ketiga, antara lain:

a. peningkatan nilai tambah ekonomi dari hasil pertanian, perikanan dan kehutanan;
b. peningkatan nilai tambah dan daya saing produk industri;

c. optimalisasi penciptaan nilai tambah jasa produktif;
d. peningkatan produktifitas tenaga kerja; dan
e. optimalisasi pemanfaatan IPTEK dan hasil inovasi untuk peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah.

Prioritas Nasional 4: Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan

Pada prioritas nasional ini mengarahkan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber-sumber energi, pangan dan air yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat untuk melakukan segala aktivitasnya. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air ini dilakukan melalui pelestarian lingkungan dengan beberapa arah kebijakan yang harus diperhatikan sebagai berikut;

a. meningkatkan produksi energi primer;
b. meningkatkan penerapan energi baru terbarukan dalam bauran energi;
c. meningkatkan aksesibilitas air;
d. meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik;
e. mempertahankan dan memantapkan penyediaan pangan utama dalam negeri;
f. meningkatkan layanan pertanian antara lain melalui penyediaan sarpras, pembiayaan, penyuluhan dan pendampingan;
g. memperkuat distribusi dan stabilitas harga pangan dalam rangka meningkatkan akses pangan masyarakat;
h. meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat terutama untuk menurunkan kasus malnutrisi;
i. memantapkan pembangunan infrastruktur sumber daya air;
j. meningkatkan perlindungan sumber daya air dan ekosistemnya;
k. meningkatkan pemenuhan kebutuhan air yang adil dan merata;
l. mempercepat regulasi dan pembangunan wilayah berbasis DAS; dan
m. meningkatkan kesadaran sumberdaya air.

Selain arah kebijakan tersebut terdapat isu strategis perioritas nasional keempat, antara lain:

a. Pemenuhan kebutuhan energi

   Kebutuhan energi primer akan meningkat dari 1.555 BOE di tahun 2015 menjadi 2.086 juta Barrel of Equivalent (BOE) di tahun 2019 atau meningkat 7,4 persen.
b. Pemenuhan kebutuhan pangan

   Kebutuhan konsumsi pangan masyarakat yang terus meningkat.
c. Pemantapan ketahanan sumber daya air
   1. pemenuhan kebutuhan air yang belum terpenuhi untuk rumah tangga, industri dan pertanian;
   2. dan suplai air minum.
d. Upaya pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

   Penguatan langkah untuk memingkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

e. Perencanaan pembangunan rendah karbon
   Penguatan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang RAN penurunan emisi gas rumah kaca.

Prioritas Nasional 5: Stabilitas Keamanan Nasional Dan Kesuksesan Pemilu

Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

a. meningkatkan kamtibmas dan keamanan siber
   1) meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan kepolisian;
   2) menyelesaikan konflik sosial;
   3) meningkatkan upaya pencehagan dan pemberantasan narkoba;
   4) meningkatkan pengamanan aktivitas siber; dan
   5) meningkatkan penanganan terorisme.
b. menjamin kesuksesan pemilu
   1) meningkatkan kualitas lembaga demokrasi;
   2) menjamin terlaksananya hak memilih dan dipilih;
   3) mewujudkan birokrasi yang netral dalam Pemilu 2019; dan
   4) melaksanakan tahapan pemilu yang berkualitas.
c. memperkuat pertahanan wilayah nasional
   1) mengamankan wilayah yuridikasi nasional;
   2) pengamanan kawasan perbatasan dan kedaulatan negara; dan
   3) penguatan pertahanan berdaya gentar tinggi.
d. meningkatkan Kepastian hukum dan reformasi birokrasi
   1) meningkatkan kualitas penegakan hukum;
   2) meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi;
   3) meningkatkan pelaksanaan e-Government;
   4) mengoptimalkan Talent Management Nasional;
   5) meningkatkan pengawasan program prioritas nasional.
e. memperkuat efektivitas diplomasi
   1) memperkuat perlindungan dan pelayanan WNI di luar negeri;
   2) memperkuat diplomasi maritim, politik, dan keamanan;
   3) memperkuat diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan internasional;
   4) dan pemantapan peran Indonesia di ASEAN.

2. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 antara lain :

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan
3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

5. Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis.
6. Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi
7. Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan
8. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal
9. Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur
10. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2017 - 2022 dengan visi yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah **"Payakumbuh Maju, Sejahtera dan Bermartabat, dengan semangat Kebersamaam Menuju Payakumbuh Menang".**

Perumusan tujuan dan sasaran pada tiap-tiap misi untuk mencapai visi pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2017-2022 disajikan pada Tabel 4.1

Tabel IV.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kota Payakumbuh 2017-2022

Visi : Payakumbuh Maju, Sejahtera dan Bermartabat, dengan semangat Kebersamaan Menuju Payakumbuh Menang

No	Misi	Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran		Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
									2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Mewujudkan SDM yang handal, sehat dan kompetitif	1	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 79,63	1	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	1	Jumlah sekolah (SD, SMP) yang berakreditasi A	64	67	70	74	77	80	82	82
					2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	2	Angka Usia Harapan Hidup	73,03	73,14	73,40	73,60	73,90	74,30	74,50	74,50
					3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	NA	61.70	61,76	61,80	61,86	61,92	62,50	62,50
					4	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	4	Tingkat Kemiskinan	6,46	6,20	5,93	5,66	5,39	5,12	5,00	5,00
							5	Tingkat Pengangguran	7,07	7.07	6,70	6,50	6,30	6,00	5,80	5,80
					5	Meningkatnya prestasi Atlet	6	Jumlah Atlet berprestasi tingkat Nasional.	3	4	7	11	15	18	20	20
2	Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing Dan Berkeadilan Dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama	2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 6,38%	6	Meningkatnya Produktivitas Sektor Strategis	7	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	23,92	23,92	23,97	24,02	24,07	24,12	24,17	24,17
							8	Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	5,64	5,98	6,00	6,02	6,08	6,11	6,12	6,12
							9	Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	7,39	7,39	7,42	7,44	7,45	7,46	7,47	7,47
							10	Persentase peningkatan kunjungan wisata	27,74	2,5	5,00	5,10	5,50	5,70	7,50	7,50
					7	Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh	11	Nilai Realisasi Investasi (Miliar Rupiah)	175,70	195,00	195,00	196,90	198,90	200,90	202,00	1.188,70
							12	Persentase Usaha Kecil Menengah terhadap UMKM	26,64	27,14	27,64	28,15	28,66	29,18	29,70	29,70
					8	Meningkatnya Kualitas Koperasi	13	Persentase Peningkatan SHU Koperasi	6,25	7,26	10,00	12,15	14,25	16,40	18,30	18,30

No	Misi	Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran		Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
									2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
3	Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur Dan Fasilitas Umum Yang Nyaman Dan Berkelanjutan	3	Meningkatkan keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Persentase Pemenuhan sarana prasarana sesuai dengan Standar pelayanan minimum (SPM) 100%	9	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan	14	Persentase pelayanan air minum	94,21	94,41	96,71	98,80	99,02	99,67	100,00	100,00
							15	Persentase panjang jalan status Kota dalam kondisi mantap	63,81	66,56	69,31	72,06	74,81	77,56	80,30	80,30
							16	Persentase Sistem drainase skala kota	39,88	42,17	44,46	45,95	47,39	48,91	50,44	50,44
							17	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	78,30	78,60	78,90	79,20	79,50	79,80	80,10	80,10
							18	Persentase daerah irigasi berkinerja baik	70,52	73,43	76,34	79,10	81,72	84,21	86,58	86,58
							19	Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan	66,66	72,22	77,78	83,33	88,89	94,44	94,44	94,44
					10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	56,50	56,50	57,00	57,25	57,50	57,75	58,00	58,00
					11	Mewujudkan Perumahan dan pemukiman yang layak	21	Persentase luas kawasan kumuh	1,77	1,77	1,77	1,62	1,47	1,32	1,17	1,17
4	Menghadirkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Bersih	4	Meningkatnya profesionalisme birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 81.85	12	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintahan	22	Nilai Evaluasi AKIP Kota	B	BB	BB	BB	A	A	A	A
							23	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
							24	% PD terintegrasi TI	0,00	9,68	29,03	45,16	64,52	100,00	100,00	100,00
							25	IKM	78,39	79,35	79,85	80,35	80,75	81,35	81,85	81,85
							26	Indeks RB	NA	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00
5	Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia Dan Berbudaya Berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah	5	Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya dan agamis	Persentase peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan melalui lembaga/ Badan Zakat/	13	Meningkatnya pengamalan ajaran agama	27	Persentase Capaian Sekolah Dalam Pelaksanaan Pendidikan Karakter berkategori baik	13,83	13,83	21,28	28,72	36,17	43,62	51,06	50,06
							28	Persentase peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan melalui lembaga/ Badan Zakat/ Wakaf	2,50	3,00	3,40	3,80	4,20	4,60	5,00	5,00

No	Misi	Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran		Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
									2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
				Wakaf 5%	14	Menguatnya lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat	29	Persentase lembaga keagamaan (MUI) yang aktif	20,00	20,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00
							30	Persentase lembaga adat (KAN) yang aktif	75,00	80,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, maka dapat dijabarkan 5 (lima Prioritas Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019. Penyusunan prioritas pembangunan Kota Payakumbuh Tahun 2019 diarahkan pada pencapaian visi dan misi serta program strategis yang belum tercapai dan permasalahan yang muncul dari evaluasi pembangunan tahun 2017. Prioritas Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel IV.2
Prioritas Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019

No	Misi / Prioritas / Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Misi 1 : Mewujudkan SDM yang handal, sehat dan kompetitif**							
	Prioritas 1 : Peningkatan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnypa							
	1. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	1 Jumlah sekolah (SD, SMP) yang terakreditasi A	74	1 Peningkatan Manajemen dan mutu pendidikan	1 Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengawasan pendidikan;	1 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	247,814,712	Dinas Pendidikan
					2 Optimalisasi pemenuhan 8 standar pendidikan;	2 Program Wajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	3,863,324,595	Dinas Pendidikan
						3 Program Pendidikan Anak Usia Dini	2,319,657,000	Dinas Pendidikan
						4 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2,534,689,495	Dinas Pendidikan

No	Misi / Prioritas / Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2 Peningkatan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan	3 Meningkatkan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, melalui pendidikan inklusi, pendidikan informal dan pendidikan non formal;	5 Program Pendidikan Non Formal	283,707,450	Dinas Pendidikan
				3 Penguatan Pendidikan Karakter	4 Penguatan pelaksanaan pendidikan karakter dan akhlak mulia disekolah	6 Program Pendidikan karakter/akhlak mulia	4,667.560,775	Dinas Pendidikan

No	Misi / Prioritas / Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4 Peningkatan angka keberlanjutan pendidikan	5 Mendorong peningkatan pelayanan pendidikan menengah atas (SMA/SMK/MA) dan perguruan tinggi di Kota Payakumbuh melalui bantuan keuangan/hibah	-	-	Dinas Pendidikan
				5 Peningkatan budaya gemar membaca	6 Mendorong pengembangan budaya literasi dan layanan pengelolaan perpustakaan berbasis IT	7 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Kepustakaan	467,176,108	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	2 Angka Usia Harapan Hidup	73,60	6 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, pengendalian penyakit menular dan tidak menular	7 Menurunkan kasus kematian bayi dan ibu melahirkan	8 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	117,789,000	Dinas Kesehatan

No	Misi / Prioritas / Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					8 Meningkatkan partisipasi masyarakt untuk hidup sehat (PHBS) ;	9 Program pengembangan lingkungan sehat	283,846,000	Dinas Kesehatan
						10 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	174,149,450	Dinas Kesehatan
					9 Menurunkan angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular;	11 Program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	232,474,850	Dinas Kesehatan
						12 Pengendalian penyakit tidak menular	33,339,900	Dinas Kesehatan
					10 Meningkatkan kualitas gizi masyarakat	13 Program perbaikan gizi masyarakat	116,601,800	Dinas Kesehatan

No	Misi / Prioritas / Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					11 Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesehatan dan ketahanan keluarga	14 Program keluarga berencana	306,682,100	DP3 & P2KB
						15 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD	717,055,000	DP3 & P2KB
				7 Peningkatan standar layanan kesehatan masyarakat.	12 Meningkatkan sarana prasarana layanan kesehatan serta ketersediaan obat obatan;	16 Program Pengawasan Obat dan Makanan	164,139,925	Dinas Kesehatan

No	Misi / Prioritas / Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					13 Peningkatan sarana prasarana RS yang representastif melalui pendanaan pembiayaan;	Pengadaan alat kesehatan rumah sakit	200,000,000	Dinas Kesehatan
				8 Peningkatan cakupan jaminan kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam penjaminan kesehatan	14 Meningkatkan jaminan dan kemandirian kesehatan dalam penjaminan kesehatan;	18 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	8,256,281,849	Dinas Kesehatan
	3 Meningkatnya pemberdayaan perempuan	33 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,80	9 Peningkatan kesetaraan gender, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	15 Optimalisasi program pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pemenuhan hak anak;	19 Program Penguatan kelembagaan PUG dan anak	540,134,420	DP3 & P2KB

No	Misi / Prioritas / Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						20 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	433,271,100	DP3 & P2KB
	4 Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	4 Tingkat Kemiskinan	5,66	10 Peningkatan penanggulangan PMKS	16 Meningkatkan akses dan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diarahkan kepada rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial serta pemberdayaan sosial	21 Program pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya.	1,015,109,446	Dinas Sosial
						22 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	741,456,662	Dinas Sosial

No	Misi / Prioritas / Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				11 Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan	17 Optimalisasi peran dan fungsi PSKS serta pelaksanaan Sistim Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dalam penanggulangan kemskinan	23 Program pemberdayaan kelembagaan kesos	920,609,504	Dinas Sosial
					18 Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan;	24 Program diversifikasi dan keamanan pangan	752,497,799	Dinas Ketahanan Pangan
						25 Program pengembangan perumahan	2,820,144,925	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
						26 Program Lingkungan sehat perumahan	2,861,490,052	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

No	Misi / Prioritas / Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						27 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	428,900,700	Dinas Koperasi & UKM
						28 Program peningkatan produksi pertanian /perkebunan	402,070,500	Dinas Pertanian
						29 Program Peningkatan kesejahteraan petani	196,356,000	Dinas Pertanian
						30 Program Pembangunan saluran drainasi/ gorong-gorong	11,450,560,449	Dinas PUPR

No	Misi / Prioritas / Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						31 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	11,260,131,329	Dinas PUPR
						32 Program : Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	387,405,000	Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian
						33 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	8,256,281,849	Dinas Kesehatan
						34 Program Pendidikan Non Formal	283,707,450	Dinas Pendidikan
						35 Program Pengembangan Sistim Pendukung Usaha Bagi UMKM	64,816,500	Dinas Koperasi dan UMKM

No	Misi / Prioritas / Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						36 Program Keluarga Berencana	306,682,100	DP3AP2KB
						37 Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu Padu	717,055,000	DP3AP2KB
						38 Program perbaikan gizi masyarakat	116,601,800	Dinas Kesehatan
		5 Tingkat Pengangguran	6,62%	12 Meningkatkan kualitas, produktivitas dan kesempatan kerja	19 Fasilitasi kemitraan dengan dunia usaha dan perluasan kesempatan kerja;	39 Program peningkatan kesempatan kerja	565,712,234	Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian
					20 Peningkatan daya saing angkatan kerja siap pakai	40 Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	322,647,200	Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian

No	Misi / Prioritas / Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						41 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	204,475,000	Dinas Koperasi dan UKM
						42 Program perlindungan, pengembangan lembaga ketenagakerjaan	54,705,500	Dinas Tenaga Kerja dan Industri
	5 Meningkatnya Prestasi Atlet	6 Jumlah Atlet berprestasi tingkat Nasional.	11	13 Peningkatan kualitas pemuda dan olah raga untuk prestasi.	21 Peningkatan pembibitan atlit dan pembinaan olah raga prestasi	43 Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	3,771,156,884	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga
					22 Meningkatkan sarana dan prasarana OR	44 Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga	1,486,200,000	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga

No	Misi / Prioritas / Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						45 Program pembangunan sarana dan prasarana OR	2,792,720,000	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga
2	**Misi 2 : Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing Dan Berkeadilan Dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama**							
	Prioritas 2 : Peningkatan Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing dan Berkeadilan dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan							
	1 Meningkatkan Produktivitas Sektor Strategis	1 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	24,02%	1 Mendorong peningkatan k ontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian melalui perluasan pangsa pasar dan iklim perdagangan yang kondusif;	1 Peningkatan volume perdagangan antar daerah;	1 Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	35,200,000	Dinas Pertanian

No	Misi / Prioritas / Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						2 Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	489,840,000	Dinas Pertanian
					2 Peningkatan transaksi perdagangan	3 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	428,900,700	Dinas Koperasi & UKM
						4 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	1,721,464,576	Dinas Koperasi & UKM
					3 Peningkatan kelancaran distribusi barang/ jasa;	5 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	5,091,974,600	Dinas Koperasi & UKM

No	Misi / Prioritas / Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	7,44%	2 Mendorong peningkatan kontribusi sektor pertanian melalui peningkatan produksi hasil pertanian strategis	4 Penguatan kelembagaan petani dan peningkatan kapasitas SDM petani	6 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan	51,000,000	Dinas Pertanian
						7 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;	196,356,000	Dinas Pertanian
					5 Peningkatan produktivitas komoditi pertanian strategis	8 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	471,980,000	Dinas Pertanian
						9 Program peningkatan produksi hasil peternakan	5,575,220,000	Dinas Pertanian

No	Misi / Prioritas / Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						10 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	402,070,500	Dinas Pertanian
						11 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	233,649,108	Dinas Pertanian
					6 Penerapan sistim pertanian pangan berkelanjutan	12 Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan	752,497,799	Dinas Ketahanan Pangan

No	Misi / Prioritas / Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3 Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	6,02%	3 Mendorong peningkatan kontribusi sektor industri melalui peningkatan produktivitas dan daya saing produk industri berbasis sumberdaya lokal	7 Pembentukan sentra-sentra produksi IKM sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang terintegrasi;	13 Program penataan struktur industri;	2,286,336,258	Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian
					8 Peningkatan kemampuan industri dalam penerapan standarisasi mutu produk;	14 Program peningkatan kapasitas iptek produksi	465,170,000	Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian
					9 Peningkatan kemampuan manajerial dan SDM pelaku industri;	15 Program Penataan Struktur Industri;	2,286,336,258	Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian

No	Misi / Prioritas / Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					10 Peningkatan penerapan teknologi industry	16 Program peningkatan kemampuan teknologi industri	387,405,000	Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian
						17 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	46,603,550	Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian
		4 Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	5,10%	4 Menumbuh kembangkan industri kepariwisataan yang didukung oleh sektor perdagangan, hotel, restoran, industri dan jasa-jasa usaha lainnya	11 Peningkatan kualitas sarana prasarana pariwisata	18 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1,749,534,096	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga

No	Misi / Prioritas / Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					12 Membangun kemitraan antar jasa usaha pariwisata;	19 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.	1,200,904,340	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga
					13 Mengembangkan paket-paket destinasi wisata.	20 Program pengembangan kemitraan	157,392,500	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga
					14 Menyelenggarakan event – event untuk menarik wisatawan	21 Program pengelolaan keragaman budaya	1,218,060,800	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga
						22 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	3,771,156,884	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga
						23 Program pengembangan ekonomi kreatif	343,123,500	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga

No	Misi / Prioritas / Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2 Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh	5 Nilai Realisasi Investasi	196,90 Milyar	5 Mendorong kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi;	15 Pembentukan BUMD untuk mendorong percepatan pertumbuhan sektor strategis;	24 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	79,820,000	DPM PTSP
						25 Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi investasi	19,922,750	DPM PTSP
					16 Menciptakan iklim investasi yang kondusif;	26 Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah	75,549,000	DPM PTSP
						27 Program Perencanaan Tata ruang	557,655,400	Dinas PUPR

No	Misi / Prioritas / Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						28 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	240,198,500	Dinas LH
					17 Meningkatkan kualitas pelayan perizinan Usaha.	29 Program Optimalisasi Pelayanan Publik	1,749,077,374	DPM PTSP
		6 Persentase peningkatan UMKM terhadap UKM	28,15	6 Mendorong peningkatan skala usaha UMKM melalui penguatan modal UMKM	18 Fasilitasi penguatan modal bagi UKM, dan IKM;	30 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	64,816,500	Dinas Koperasi & UKM
						31 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	204,475,000	Dinas Koperasi & UKM

No	Misi / Prioritas / Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					19 Fasilitasi pemasaran produk UMKM.	32 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondus	27,910,000	Dinas Koperasi & UKM
	3 Meningkatnya Kesejahteraan anggota Koperasi	7 Persentase peningkatan SHU anggota Koperasi	12,15%	7 Mendukung tumbuh kembangnya ekonomi kerakyatan melalui penguatan kelembagaan Koperasi	20 Meningkatkan pembinaan terhadap koperasi	33 Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi;	154,534,000	Dinas Koperasi & UKM
3	**Misi 3 : Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur Dan Fasilitas Umum Yang Nyaman Dan Berkelanjutan**							
	Prioritas 3 : Peningkatan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum yang Nyaman dan Berkelanjutan							
	1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan	1 Persentase pelayanan air minum	98,8	1 Percepatan Pembangunan infrastruktur dasar penunjang perekonomian .	1 Mendorong peningkatan layanan dan akses masyarakat terhadap air minum	1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	1,105,480,000	Dinas PUPR

No	Misi / Prioritas / Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						2 Program perluasan dan peningkatan sambungan rumah (SR)	117,594,000	Dinas PUPR
		2 Persentase panjang jalan status Kota dalam kondisi mantap	72,06		2 Meningkatkan persentase panjang jalan dalam kondisi baik	3 Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	5,237,313,000	Dinas PUPR
					3 Peningkatkan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan	4 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan	1,007,685,109	Dinas PUPR
					4 Mengembangkan trotoar yang nyaman, menerus dan universal	5 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	12,576,769,204	Dinas PUPR
		3 Persentase Sistem drainase skala kota	45,95		5 Meningkatkan persentase jalan kota yang memiliki drainase	6 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	11,450,560,449	Dinas PUPR

No	Misi / Prioritas / Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	79,20		6 Meningkatkan Kepatuhan Pembangunan sesuai dokumen tata ruang	7 Program Perencanaan Tata Ruang	557,655,400	Dinas PUPR
						8 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	10,020,210,500	Dinas PUPR
					7 Penyempurnaan tata cara perijinan penataan ruang	9 Program pemanfaatan ruang	491,962,500	Dinas PUPR
					8 Meningkatkan Pembangunan Bangunan Gedung sesuai dengan IMB	10 Program pengendalian pemanfaatan ruang	72,642,800	Dinas PUPR
					9 Pendataan dan Konsolidasi Tanah Eks Perkotaan	11 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Pemanfaatan Tanah	50,340,000	Dinas PUPR

No	Misi / Prioritas / Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5 Persentase daerah irigasi berkinerja baik	79,10		10 Meningkatkan persentase irigasi dalam kondisi baik	13 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	11,260,131,329	Dinas PUPR
					11 Meningkatkan Penataan sungai	14 Program Pembangunan Turab/Talud/Bronjong	875,084,800	Dinas PUPR
					12 Meningkatkan kualitas pengelolaan jaringan irigasi dan bangunan pengairan lainnya	15 Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	5,676,989,879	Dinas PUPR
		6 Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan	83,33		13 Meningkatkan ketersediaan fasilitas umum perkotaan	16 Program Pembangunan Fasilitas Umum	450,000,093	Dinas PUPR

No	Misi / Prioritas / Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					14 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Perhubungan	17 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	100,000,000	Dinas Perhubungan
	2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	7 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,25	2 Mendorong peningkatan kualitas udara, air dan tanah melalui penerapan berbagai intrumen pengendalian	15 Mendorong peningkatan kualitas Lingkungan Hidup melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian	18 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	240,198,500	Dinas Lingkungan Hidup
						19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	51,745,500	Dinas Lingkungan Hidup

No	Misi / Prioritas / Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					16 Meningkatkan Usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup	20 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	183,982,000	Dinas Lingkungan Hidup
					17 Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau	21 Program peningkatan pengendalian polusi	722,549,501	Dinas Lingkungan Hidup
						22 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	1,615,449,621	Dinas Lingkungan Hidup
	3 Mewujudkan Perumahan dan pemukiman yang layak	8 Persentase luas kawasan kumuh	1,62	3 Penataan kawasan kumuh perkotaan	18 Mengurangi persentasi luas Kawasan Kumuh	23 Program pengembangan perumahan	2,820,144,925	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						24 Program lingkungan sehat perumahan	2,861,490,052	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Misi / Prioritas / Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						25 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	5,609,711,307	Dinas Lingkungan Hidup
						26 Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	5,237,313,000	Dinas PUPR
						27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	1,105,480,000	Dinas PUPR
						28 Program perluasan dan peningkatan sambungan rumah (SR)	117,594,000	Dinas PUPR
						29 Program Peningkatan Kesiaggaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	996,053,687	Pol PP Damkar

No	Misi / Prioritas / Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	**Misi 4 : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Bersih**							
	Prioritas 4 : Peningkatan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance);							
	1 Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintahan	1 Nilai Evaluasi AKIP Kota	BB	1 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah	1 Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);	1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1,494,548,466	Seluruh perangkat daerah
						2 Program penyelenggaraan pemerintahan umum dan perangkat daerah	4,975,155,555	Bag. Pemerintahan Setdako & Seluruh kecamatan
						4 Program Perencanaan pembangunan daerah	1,084,043,952	Bappeda
						5 Program Perencanaan pembangunan sosial budaya	51,319,400	Bappeda

No	Misi / Prioritas / Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						6 Program Perencanaan Pembangunan ekonomi	15,089,650	Bappeda
						7 Program kerjasama Pembangunan antar daerah	19,128,000	Bappeda
		2 Opini BPK	WTP	2 Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah	2 Pemantapan pengelolaan keuangan daerah, termasuk pendapatan, pengelolaan barang milik daerah dan akutansi pemerintahan berbasis akrual	8 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	3,764,284,047	BKD
						9 Program Peningkatan pengendalian administrasi pembangunan	75,605,950	Setdako

No	Misi / Prioritas / Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3 Persentase Perangkat Daerah terintegrasi Teknologi Informasi	45,16	3 Mengembangkan pemanfaatan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-Government)	3 Pengembangan dan optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	10 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	4,056,902,339	Dinas Komunikasi dan Informatika
		4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,35	4 Meningkatkan kualitas aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik	4 Peningkatan kualitas aparatur pelayanan, peningkatan kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani;	11 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	350,822,300	BKPSDM

No	Misi / Prioritas / Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					5 Peningkatan pengelolaan manajemen kepegawaianme lalui proses rekruitmen yang sesuai dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah, mutasi dan promosi sesuai dengan kompetensinya, serta kejelasan pengembangan karir aparatur;	12 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	893,323,450	BKPSDM
					6 Penyediaan sarana keterpaduan pelayanan publik	13 Program Optimalisasi Pelayanan Publik	1,749,077,374	DPM PTSP
						14 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	19,922,750	DPM PTSP

No	Misi / Prioritas / Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				5 Meningkatkan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam layanan publik	7 Peningkatan Penerapan Sistem Inovasi Daerah.	15 Program pengembangan inovasi daerah	481,338,853	Bappeda
				6 Meningkatkan fasilitasi dalam menunjang keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat	8 Peningkatan fasilitasi penegakan Perda untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat	16 Program pemeliharaan Kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal	2,749,555,324	Satpol PP & Damkar
		5 Indeks Reformasi Birokrasi	55,00	7 Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal serta pengawasan masyarakat dan ketegasan tindaklanjut hasil pengawasan	9 Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Aparatur;	17 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	314,054,750	Inspektorat

No	Misi / Prioritas / Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					10 Peningkatan kapasitas pengawasan melalui peningkatan independensi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP);	18 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	279,331,306	Inspektorat
						19 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	89,241,700	Inspektorat
				8 Melakukan penguatan kelembagaan dan kompetensi aparatur pengadaan	11 Peningkatan kualitas implementasi sistem *e-procurement*;	20 Program pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi	639,751,375	Setdako

No	Misi / Prioritas / Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				barang dan jasa				
				9 Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik	12 Peningkatan transparansi melalui pengelolaan dan pelayanan informasi publik;	21 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	113,362,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	**Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia Dan Berbudaya Berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah**							
	Prioritas 5 : Peningkatan Pengamalan Ajaran Agama dan Budaya							
	1 Meningkatnya pengamalan ajaran agama	1 Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik	28,72	1 Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat	1 Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan keagamaan;	1 Program pendidikan karakter/akhlak mulia	4,667,560,775	Dinas Pendidikan
		2 Persentase pe ningkatan za kat/wakaf yang dikumpulkan melalui lemba ga/Ba dan Zakat/ Wakaf	3,80		2 Peningkatan peran dan fungsi sarana ibadah;	2 Program Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama	643,528,500	Bagian Kesra Sekretariat Daerah

No	Misi / Prioritas / Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2 Menguatnya lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat.	3 Persentase lembaga keagamaan (MUI) yang aktif	40,00	2 Meningkatkan fungsi dan peran lembaga ke masyarakatan	3 Peningkatan peran dan fungsi lembaga keagamaan;	3 Program peningkatan peran dan fung si lembaga so sial keagamaan	1,406,298,800	Bagian Kesra Sekretariat Daerah
		4 Persentase lembaga adat (Kerapatan Adat Nagari/ KAN) yang aktif	95,00		4 Penguatan tugas pokok dan fungsi Lembaga Adat	4 Program Pengembangan Nilai Budaya	563,220,000	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga
					5 Mendorong revitalisasi Rumah Gadang dan Balai Adat	5 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	3,310,785,000	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga
						6 Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1,218,060,800	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga

4.3 Sinkronisasi Prioritas Program Nasional, Prioritas Provinsi Sumatera Barat dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019

Penyelarasan Prioritas Program Nasional, Prioritas Provinsi Sumatera Barat ke dalam Prioritas Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel IV.3
Sinkronisasi Prioritas RKP Nasional, RKPD Provinsi Sumatera Barat dan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2019

RKP NASIONAL TAHUN 2019	RKPD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019	RKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019
1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar;	**1. Peningkatan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya**	3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan
		4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
		8. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif	**2. Peningkatan Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing dan Berkeadilan dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan**	5. Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis.
5. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air		6. Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi
2. Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman	**3. Peningkatan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum yang Nyaman dan Berkelanjutan**	9. Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur
		10. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam

		7. Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan
4. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	**4. Peningkatan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)**	2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan
1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar;	**5. Peningkatan Pengamalan Ajaran Agama dan Budaya**	1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat

Tabel IV.4
Sinkronisasi Program Prioritas Nasional, Provinsi Sumatera Barat dengan Kota Payakumbuh Tahun 2019

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT	PRIORITAS KOTA PAYAKUMBUH	
		PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4
1. Percepatan Pengurangan Kemiskinan ; ✓ Penguatan pelaksanaan bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran ✓ Penguatan sistem jaminan social ✓ Penguatan literasi untuk kesejahteraan ✓ Pelaksanaan reforma agrarian ✓ Percepatan pemberian akses kelola sumber daya alam kepada masyarakat melalui perhutanan sosial	**1. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal** ✓ Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial ✓ Program Pembinaan Anak Terlantar ✓ Program Pembinaan Para Penyandang Dissabilitas dan Eks Trauma ✓ Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Lansia ✓ Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Wanita Tuna Susila, dan Penyakit Sosial Lainnya) ✓ Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial ✓ Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya ✓ Program Penaganan Korban Bencana Alam dan Becana	**1. Peningkatan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya**	
		1. Program pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya.	1,015,109,446
		2. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	741,456,662
		3. Program pemberdayaan kelembagaan kesos	920,609,504
		4. Program Ketersediaan dan Distribusi Pangan	162,244,950
		5. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	196,356,000
		6. Program pengembangan perumahan	2,820,144,925
		7. Program Lingkungan sehat perumahan	2,861,490,052
		8. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	428,900,700
		9. Program peningkatan produksi pertanian /perkebunan	402,070,500
		10. Program Peningkatan Kemampuan	387,405,000

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT	PRIORITAS KOTA PAYAKUMBUH	
		PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4
	Sosial ✓ Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba ✓ Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja ✓ Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diverifikasi Usaha ✓ Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Teknologi Industri	
		11. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	8,256,281,849
		12. Program perbaikan gizi masyarakat	116,601,800
		13. Program Pendidikan Non Formal	283,707,450
		14. Program Pengembangan Sistim Pendukung Usaha Bagi UMKM	64,816,500
		15. Program Keluarga Berencana	306,682,100
		16. Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu Padu	717,055,000
		17. Program peningkatan kesempatan kerja	565,712,234
		18. Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	322,647,200
		19. Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	54,705,500
		20. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	204,475,000
2. peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat; ✓ Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan ✓ Peningkatan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana ✓ Pencegahan dan pengendalian	**2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;** ✓ Program Upaya Kesehatan Masyarakat; ✓ Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak; ✓ Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/ Tidak Menular; ✓ Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; ✓ Pengembangan Lingkungan Sehat;	**1. Peningkatan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya**	
		1. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	117,789,000
		2. Program pengembangan lingkungan sehat	283,846,000
		3. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan	174,149,450

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT	PRIORITAS KOTA PAYAKUMBUH	
		PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4
penyakit ✓ Percepatan penurunan *stunting* ✓ Penguatan "Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	✓ Program Obat dan Pembekalan Kesehatan ✓ Program Perbaikan Gizi Masyarakat ✓ Program Pengadaan, Penigkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS. Paru/ RS. Mata ✓ Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS. Paru/ RS. Mata ✓ Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan ✓ Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan ✓ Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD ✓ Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan ✓ Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba ✓ Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	masyarakat	
		4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	232,474,850
		5. Pengendalian penyakit tidak menular	33,339,900
		6. Program Keluarga Berencana	306,682,100
		7. Program perbaikan gizi masyarakat	116,601,800
		8. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD	717,055,000
		9. Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu, dan Jaringannya	200,000,000
		10. Standarisasi pelayanan kesehatan	400,300,250
		11. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	8,256,281,849
3. Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas ; ✓ Penyediaan pendidik yang berkualitas dan merata ✓ Penyediaan afirmasi pendidikan ✓ Penguatan kelembagaan satuan pendidikan ✓ Peningkatan kualitas pembelajaran dan akademik	**3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan** ✓ Program Peningkatan Akses, Perluasan dan Mutu Pendidikan SMA ✓ Program Peningkatan Akses, Perluasan dan Mutu Pendidikan SMK ✓ Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan ✓ Program Manajemen Pelayanan Pendidikan ✓ Program Pendidikan Berkarakter ✓ Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus ✓ Program Pengembangan Budaya Baca dan pembinaan promosi	**1. Peningkatan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya**	
		1. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	247,814,712
		2. Program Wajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	3,863,324,595
		3. Program Pendidikan Anak Usia Dini	2,319,657,000
		4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2,534,689,495
		5. Program Pendidikan Non Formal	283,707,450

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT	PRIORITAS KOTA PAYAKUMBUH	
		PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4
	Perpustakaan	6. Program Pendidikan karakter/akhlak mulia	4,667,560,775
		7. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Kepustakaan	467,176,108
4. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak ; ✓ Penyediaan akses hunian layak dan terjangkau ✓ Penyediaan akses infrastruktur dasar permukiman layak ✓ Peningkatan kualitas lingkungan di permukiman	**4. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal** ✓ Program Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Pada Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal	**1. Peningkatan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya**	
		1. Program pengembangan perumahan	2,820,144,925
		2. Program lingkungan sehat perumahan	2,861,490,052
5. Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar ; ✓ Penguatan layanan dan rujukan satu pintu ✓ Penguatan integrasi sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil ✓ Percepatan Pencapaian SPM di daerah	**5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu** ✓ Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik ✓ Program Penataan Administrasi Kependudukan ✓ Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	**2. Peningkatan Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing dan Berkeadilan dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan**	
		1. Program Optimalisasi Pelayanan Publik	1,749,077,374
		2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	19,922,750
6. Peningkatan Konektivitas; ✓ Pengembangan pelabuhan hub dan *feeder* tol laut ✓ Pembangunan transportasi multimoda ✓ Pembangunan bandara ✓ Pembangunan transportasi	**6. Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur** ✓ Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi ✓ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ke Binamargaan ✓ Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah ✓ Program Penyelenggaraan	**3. Peningkatan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum yang Nyaman dan Berkelanjutan**	
		1. Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	5,237,313,000
		2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan	1,007,685,109
		3. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan	12,576,769,204

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT	PRIORITAS KOTA PAYAKUMBUH	
		PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4
perkotaan ✓ Keselamatan transportasi	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota ✓ Program Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi ✓ Program Perencanaan Penataan Ruang ✓ Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang ✓ Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah ✓ Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku ✓ Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai ✓ Program Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi ✓ Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya ✓ Program Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi ✓ Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Lintas Daerah Kab/Kota ✓ Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkerataapian	Jembatan	
		4. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	11,450,560,449
		5. Program perencanaan penataan ruang	557,655,400
		6. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	10,020,210,500
		7. Program pemanfaatan ruang	491,962,500
		8. Program pengendalian pemanfaatan ruang	72,642,800
		9. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan danPenggunaan Pemanfaatan Tanah	50,340,000
		10. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	11,260,131,329
		11. Program Pembangunan Turab/Talud/Bronjong	875,084,800
		12. Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	6,144,989,879
		13. Rogram Pembangunan Fasilitas Umum	450,000,093
		14. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	100,000,000
7. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika; ✓ Penyediaan infrastruktur telekomunikasi ✓ Peningkatan sarana	**7. Pengembangan energi dan pembangunan infrastruktur** ✓ Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut; ✓ Pembangunan Prasarana	**3. Peningkatan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum yang Nyaman dan Berkelanjutan**	
		1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	4,056,902,339

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT	PRIORITAS KOTA PAYAKUMBUH	
		PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4
dan prasarana informatika ✓ Pengembangan Infrastruktur TIK menuju *e- Digital*	dan Fasilitas Perhubungan; ✓ Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian; ✓ Peningkatan Pelayanan Angkutan; ✓ Fasilitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi.	2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	113,362,000
		3. Program kerjasama informasi dan media massa	2,114,056,392
8. Pengembangan Pusat Kegiatan Ekonomi di Wilayah Timur dan Pembangunan Desa ✓ Pengembangan pusat kegiatan ekonomi di wilayah Timur ✓ Pengembangan Kawasan Perdesaan, termasuk Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dan Kawasan Transmigrasi			
9. Pembangunan Daerah Afirmasi . ✓ Percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat ✓ Pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan ✓ Pengembangan wilayah kepulauan ✓ Penanganan kawasan rawan bencana			
8. Pembangunan Konektivitas untuk Mendukung Pembangunan Sektor Unggulan Hulu –Hilir Perikanan ✓ Pembentukan sistem logistik ikan	**Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis** ✓ Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas ✓ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ✓ Program Pengolahan dan	**2. Peningkatan Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing dan Berkeadilan dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan**	
		1. Program peningkatan produksi hasil peternakan	5,575,220,000
		4. Program peningkatan produksi pertanian/perkebuna	402,070,500

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT	PRIORITAS KOTA PAYAKUMBUH	
		PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4
nasional ✓ Operasionalisasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) terpilih ✓ Rehabilitasi dan peningkatan layanan pelabuhan perikanan ✓ Pengadaan kapal angkut ikan berpendingin dan garam ✓ Pembentukan kelembagaan 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penyelesaian rencana zonasi pesisir dan laut	Pemasaran Hasil ✓ Program Pengembangan Ekonomi Maritim ✓ Program Rehabilitasi, Konservasi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	n	
11. Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian ✓ Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan,Kehutanan dan Jasa Lingkungan ✓ Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Perikanan, & Kehutanan ✓ Peningkatan Mutu, Sertifikasi, dan Standarisasi Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan ✓ Penguatan Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ✓ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Nilai	**Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis** ✓ Program Peningkatan SDM Pertanian ✓ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian ✓ Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas ✓ Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas ✓ Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil ✓ Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis	**2. Peningkatan Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing dan Berkeadilan dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan**	
		1. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan	51,000,000
		2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;	196,356,000
		3. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	471,980,000
		4. Program peningkatan produksi hasil peternakan	5,575,220,000
		5. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	402,070,500
		6. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	233,649,108
		7. Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan	752,497,799

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT	PRIORITAS KOTA PAYAKUMBUH	
		PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4
Tambah Pertanian dan Perikanan			
12. Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan ✓ Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi ✓ Perbaikan Struktur Industri ✓ Peningkatan Daya Saing Industri ✓ asilitasi Pengembangan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/ Logistik	**Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi** ✓ Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing UMKM ✓ Program Pengembangan Kewilayahan Industri ✓ Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	**2. Peningkatan Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing dan Berkeadilan dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan**	
		1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	79,820,000
		2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi investasi	19,922,750
		3. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	428,900,700
		4. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	1,721,464,576
		5. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	5,091,974,600
		6. Program penataan struktur industri;	2,286,336,258
		7. Program peningkatan kapasitas iptek produksi	465,170,000
		8. Program peningkatan kemampuan teknologi industri	387,405,000
		9. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	46,603,550
13. Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif ✓ Percepatan Pengembangan 7 Kawasan Pariwisata, dan 2 KEK Pariwiata ✓ Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif ✓ Pengembangan Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil	**Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi** ✓ Program Pengembangan Kelembagaan, SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ✓ Program Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata ✓ Program Pengembangan Kewilayahan Industri ✓ Program Pengembangan	**2. Peningkatan Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing dan Berkeadilan dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan**	
		10. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	64,816,500
		11. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	204,475,000

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT	PRIORITAS KOTA PAYAKUMBUH	
		PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4
(UMK) ✓ dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB) ✓ Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri ✓ Perluasan Akses Keuangan/ Pembiayaan	Industri Kecil dan Menengah		
		12. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	154,534,000
		13. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1,749,534,096
		14. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.	1,200,904,340
		15. Program pengembangan kemitraan	157,392,500
		16. Program pengembangan ekonomi kreatif	343,123,500
		17. Program pengelolaan keragaman budaya	3,310,785,800
		18. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	27,910,000
14. Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja ✓ Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha ✓ Penguatan Penyelenggaraan Diklat Vokasi ✓ Pemantapan Sistem Sertifikasi Kompetensi ✓ Peningkatan Keterampilan Wirausaha	**Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal** ✓ Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja ✓ Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diverifikasi Usaha ✓ Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan ✓ Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja	**1. Peningkatan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya**	
		1. Program peningkatan kesempatan kerja	1,149,542,234
		2. Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	705,781,566
15. Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas ✓ Penelitian dan Pengembangan Bidang Keilmuan Strategis penunjang produktivitas ✓ Pengembangan	**Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan** ✓ Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Untuk Menunjang Pemerintahan Daerah dan Pembangunan	**4. Peningkatan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)**	
		1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	4,056,902,339
		2. Program pengembangan inovasi daerah	481,338,853

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT	PRIORITAS KOTA PAYAKUMBUH	
		PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4
dan Pemanfaatan teknologi pengungkit produktivitas ✓ Penyiapan SDM Iptek (Peneliti, Perekayasa) ✓ Penguatan inovasi dan penguasaan teknologi frontier			
16. Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi ✓ Peningkatan Produksi dan Cadangan Minyak dan Gas Bumi ✓ Pembangunan Pembangkit, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik Pengembangan EBT ✓ Peningkatan Pemanfaatan Batubara dan Gas Bumi Dalam Negeri ✓ Peningkatan Efisiensi Energi			
17. Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan ✓ Peningkatan penyediaan pangan hasil pertanian dan perikanan ✓ Peningkatan Sistem Logistik Pertanian dan Perikanan ✓ Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat ✓ Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian dan	**Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis.** ✓ Program Diversifikasi Pangan ✓ Program Peningkatan Ketahanan Pangan ✓ Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis ✓ Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas ✓ Program Pembedayaan Penyuluhan ✓ Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil ✓ Program Pengamanan Sumber Daya Hewani	**2. Peningkatan Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing dan Berkeadilan dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan**	
		1. Program Ketersediaan dan Distribusi Pangan	162,244,950
		2. Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan	752,497,799

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT	PRIORITAS KOTA PAYAKUMBUH	
		PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4
Perikanan ✓ Penguatan cadangan dan stabilisasi harga pangan			
18. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas SD Air ✓ Perlindungan Sumber Air dan Ekosistemnya ✓ Pembangunan Sarana Prasarana Sumber Daya Air ✓ Pemulihan dan Pengendalian Air Permukaan dan Air Tanah ✓ Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan Penegakan Hukum ✓ dalam Pengelolaan Sumber Daya Air	**Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur** ✓ Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah ✓ Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku ✓ Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya	**3. Peningkatan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum yang Nyaman dan Berkelanjutan**	
		1. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	240,198,500
19. Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan ✓ Pencegahan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ✓ Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup ✓ Rehabilitasi dan pemulihan kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ✓ Penguatan ketahanan terhadap bencana	**Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana** ✓ Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup ✓ Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam ✓ Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ✓ Program Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan ✓ Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam ✓ Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ✓ Program Pengendalian Kebakaran Hutan ✓ Program Rehabilitasi dan	**3. Peningkatan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum yang Nyaman dan Berkelanjutan**	
		1. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	240,198,500

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT	PRIORITAS KOTA PAYAKUMBUH	
		PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4
	Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam		
20. Pemantapan Regulasi dan Penguatan Kelembagaan Energi, Pangan dan SD Air ✓ Penyempurnaan Regulasi Migas dan Pertambangan ✓ Penguatan Pembiayaan Pertanian dan Perikanan ✓ Pemanfaatan Inovasi Teknologi dan Penguatan Penyuluhan-pendampingan Pertanian dan Perikanan ✓ Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Sumber Daya Air ✓ Penguatan Kelembagaan di bidang Lingkungan Hidup	**Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis**	**2. Peningkatan Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing dan Berkeadilan dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan**	
		1. Program Ketersediaan dan Distribusi Pangan	162,244,950
		2. Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan	752,497,799
21. Kamtibmas dan Keamanan Siber ✓ Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap ✓ Penanganan Konflik Sosial ✓ Penanganan Penyalahgunaan Narkoba ✓ Penguatan Kelembagaan Siber serta Identifikasi, Deteksi, Proteksi Penanggulangan, dan Pemulihan Dampak Kejahatan Siber ✓ Penanggulangan Terorisme	**Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan** ✓ Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat ✓ Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum	**4. Peningkatan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)**	
		1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	89,241,700
		2. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	314,054,750
		3. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	279,331,306

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT	PRIORITAS KOTA PAYAKUMBUH	
		PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4
22. Kesukesesan Pemilu ✓ Penguatan Lembaga Demokrasi ✓ Peningkatan Kebebasan Sipil dan Hak-hak Politik ✓ Netralitas Birokrasi dalam Pemilu 2019 ✓ Pengamanan Pemilu		**4. Peningkatan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)**	
		1. Program pendidikan politik masyarakat 2. Program pengembangan wawasan kebangsaan	297,895,210 979,474,500
23. Pertahanan Wilayah Nasional ✓ Pengamanan Wilayah Laut ✓ Pengamanan Kawasan Perbatasan dan Kedaulatan Negara ✓ Penguatan Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi	**Peningkatan pemanfataan potensi kemaritiman dan kelautan** ✓ Program Rehabilitasi, Konservasi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	**4. Peningkatan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)**	
		Kota Payakumbuh tidak memiliki wilayah laut	
24. Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi ✓ Penegakan Hukum ✓ Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ✓ Pelaksanaan *e-Government* yang Terintegrasi ✓ Talent Management Nasional ✓ Pengawasan Program Prioritas Nasional 2019	**Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan;** ✓ Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum ✓ Program Pembangunan Materi Hukum ✓ Program Peningkatan Budaya Hukum ✓ Program Peningkatan Supremasi dan Perlindungan HAM ✓ Program Sarana dan Informasi Hukum ✓ Program Peningkatan Penataan Perundang-Undangan	**4. Peningkatan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)**	
		1. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	239,054,750
		2. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	243,631,306
		3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	55,805,000
		4. Program penataan kelembagaan dan organisasi daerah	94,907,700

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT	PRIORITAS KOTA PAYAKUMBUH	
		PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4
		5. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	13,256,216,500
		6. Program peningkatan pengendalian administrasi pembangunan	75,605,950
		7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1,456,548,466
		8. Program perencanaan pembangunan daerah	906,082,410
25. Efektivitas Diplomasi ✓ Perlindungan dan Pelayanan WNI di Luar Negeri ✓ Penguatan Diplomasi Maritim, Politik, dan Keamanan ✓ Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerjasama ✓ Pembangunan Internasional ✓ Pemantapan Peran Indonesia di ASEAN			

4.4 Prioritas Pembangunan Daerah Melalui Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) merupakan program pembangunan daerah yang disusun dengan prinsip Holistik-Tematik yang dimaknai untuk mencapai sasaran prioritas Kota Payakumbuh perlu koordinasi multi sektoral. Selanjutnya, integratif yaitu pencapaian tujuan perlu dilakukan secara terintegrasi dalam hal perencanaan dan penganggaran dengan kegiatan lain atau dengan kata lain adanya kombinasi berbagai program atau kegiatan. Pendekatan terakhir yakni spasial dimaknai pelaksanaan kegiatan harus mempertimbangkan lokasi dengan mengintegrasikan fasilitas pendukung lainnya dan

regulasi penataan ruang yang ada. Untuk itu program prioritas pembangunan daerah yang ada disusun juga melalui pendekatan THIS yang mana program ini merupakan gabungan dari beberapa program dan kegiatan yang akan dianggarkan pada tahun 2019. Program pembangunan daerah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kualitas SDM yang Berkarakter

Tema kegiatan ini adalah " Penguatan Pendidikan Karakter". Leading sektor kegiatan ini adalah Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh. Untuk menjalankan kegiatan ini, disamping program yang biasa dijalankan di Dinas Pendidikan, juga dibuatkan program khusus terkait pendidikan karakter yaitu "Program Pendidikan Karakter/Akhlak Mulia", dalam program ini terdapat beragam kegiatan yang bertujuan untuk penguatan pendidikan karakter bagi anak didik. Secara Holistik kegiatan ini melibatkan banyak pihak. Kecamatan melakukan pembinaan terhadap anak – anak yang memiliki ketertarikan dalam mempelajari Alquran melalui pondok Alquran. Bagian Kesra bertugas melakukan pembinaan terhadap UKS/M, fasilitasi kampung alquran, fasilitasi didikan subuh, sertifikasi guru TPA/TPSA, serta fasilitasi pelaksanaan MTQ. Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam pembinaan sekolah adiwiyata dan bank sampah sekolah. Dinas Sosial berperan dalam pendataan dan pembinaan terhadap anak – anak nakal dan terlantar. Dinas Kesehatan dan Puskesmas berperan dalam hal pemeriksanaan gizi dan kesehatan siswa di sekolah. Dinas P3AP2KB berperan melalui pemberian makanan tambahan bagi siswa tidak mampu di sekolah. Kementerian Agama mengambil peran terkait pembinaan terhadap sekolah sekolah agama (MTsN). Sedangkan Pendekatan Spasial kegiatan ini dilaksanakan disekolah (SD, SMP) Kota Payakumbuh, serta Pondok Alquran dan TPA/TPSA di seluruh Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kota Payakumbuh.

2. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit

   a. SMS Center Kesehatan

   Untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat di Puskesmas, maka Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh membuka SMS Centre Kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah tersebut. SMS center Kesehatan ini akan dibuka sepanjang 24 jam untuk menerima masukan apapun dari masyarakat.

   Nomor-nomor yang bisa dihubungi publik, yaitu SMS Centre Kesehatan pada Dinas Kesehatan, adalah: 0823-89-2020-15. Kemudian, untuk Puskesmas Ibuh (0823-90.8488-05), Puskesmas Parit Rantang (0823-92-3016-66), Puskesmas Payolansek (0853-64-5549-00). Lalu Puskesmas Lampasi (0812-70-5557-11), Puskesmas Tarok (0812-67-9123-00), Puskesmas Air Tabit (0823-87-0634-56), Puskesmas Tiakar (0853-64-5486-28), Puskesmas Padang Karambia (0823-91-1699-11) dan Gudang Farmasi Payakumbuh (0812-77-4936-37).

   b. Klinik Berhenti Merokok Puskesmas Padang Karambia

   Inovasi layanan publik yang diusung Puskesmas Padang Karambia adalah layanan Klinik Berhenti Merokok (KBM). Terbilang sudah 16 orang di tahun 2017 yang telah berhasil berhenti dari kecanduan akibat rokok. Klinik ini buka setiap hari Selasa dan Kamis pada jam pelayanan puskesmas. Klinik Berhenti Merokok di Puskesmas Padang Karambia ini sudah mulai berjalan sejak tahun 2015 yang lalu, klinik ini juga tersedia di 7 Puskesmas lain di Payakumbuh. Klinik Berhenti Merokok akan menjadi alternatif solusi yang terbaik bagi para ahli hisap olahan tembakau yang sulit berhenti.

c. Konsultasi dan Rehabilitasi Narkoba

Di Kota Payakumbuh sudah tersedia Puskesmas Payolansek yang berfungsi sebagai puskesmas Institusi Pelayanan Wajib Lapor (IPWL), dimana keluarga dan penderita wajib melaporkan diri untuk direhabilitasi. Puskesmas payolansek sebagai Institusi Pelayanan Wajib Lapor atas penderita Narkoba ini sudah mulai melayani sejak 2011 yang lalu, cukup banyak pasien yang konsultasi rehabilitasi narkoba di Puskesmas ini sejak layanan tersebut dibuka.Pelayanan ini juga bekerjasama dengan BNN Kota Payakumbuh dan seluruh kecamatan.

d. Sistem Antrian melalui SMS Center di RSUD dr.Adnaan WD Kota Payakumbuh.

Layanan berobat di RSUD Adnan WD sudah dipermudah artinya masyarakat tak perlu mengantri lagi dari subuh karena adanya terobosan yaitu melalui SMS Center. Dalam penggunaan SMS Center pendaftaran dibuka pukul 12.00 Wib siang sampai pukul 06.30 Wib esok harinya. Melalui berbagai media cetak, online, radio maupun televisi lokal, bahwa RSUD Adnan WD sudah melaunching untuk mempermudah pendaftaran, SMS Center hadir sebagai solusi. Masyarakat tidak perlu lagi mendaftar sejak subuh di RSUD. pasien yang ingin berobat ke poliklinik bisa mengirimkan SMS ke nomor 0815 1997 0500. pasien juga harus mengetik dengan format REG#NOMOR MR#NAMA#POLI YANG DITUJU# TANGGAL BEROBAT#BPJS/UMUM.

3. Penangulangan Kemiskinan secara Terpadu.

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan program pengentasan Kemiskinan secara terpadu di Kota Payakumbuh. Tema kegiatan ini adalah Kemiskinan Terpadu (KINDU). Leading sektor kegiatan ini adalah Dinas Sosial. Secara holistik kegiatan ini melibatkan banyak pihak. Ada 10 Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini. 10 Perangkat Daerah tersebut adalah Dinas Sosial,Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Bappeda sebagai institusi penunjang. 10 OPD tersebut melaksanakan penanggulagan kemiskinan sesuai fungsi dan kewenangannya. Dinas Sosial menyiapkan data sasaran program penanggulangan kemiskinan dan penurunan PMKS, Dinas Kesehatan menyediakan jaminan kesehatan, Dinas Pendidikan menyiapkan beasiswa dan bantuan pendidikan, DP3AP2 KB menyiapkan sarana prasarana KB dan pengendalian penduduk, Dinas Tenaga Kerja dan Perinduatrian menyiapkan pelatihan tenaga kerja, Dinas Koperasi dan UMKM menyiapkan daya saing industri kecil, Dinas Pertanian menyiapkan bibit dan sarana pertanian, Dinas PUPR menyiapkan infrastruktur, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman menyiapkan Rumah Layak Huni dan Bappeda menjalankan fungsi koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan. Secara integrasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ini dilaksanakan sevara terpadu melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang berada di Dinas Sosial. Sedangkan pendekatan spasialnya kegiatan ini dilaksanakan 5 Kecamatan dan 47 Kelurahan dalam wilayah Kota Payakumbuh

4. Pengembangan Industri Kecil Menengah Unggulan melalui Kampung Rendang dan Kampung Tenun

Program ini mendukung pencapaian prioritas daerah kota Payakumbuh yang kedua yaitu **Peningkatan Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing dan Berkeadilan dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan.** Indikator Kinerja Utama yang hendak dikejar dengan adanya program ini adalah peningkatan Kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi kota Payakumbuh. Sebagainmana tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Payakumbuh kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 untuk pencapaian sasaran strategis kota Payakumbuh pada misi ke-2 diperlukan adanya suatu pembangunan ekonomi yang terintegrasi mulai dari hulu sampai ke hilir.

Tema program ini adalah "Memperkenalkan produk unggulan kota Payakumbuh melalui Kampung Rendang dan Kampung Tenun ."

a. Kampung Rendang

Kota Payakumbuh merupakan pusat produsen rendang di Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan produk rendang sebagai produk unggulan sudah melalui kajian yang mendalam. Program ini secara terintegrasi didukung oleh berbagai program dan kegiatan lintas sektoral. *Leading sector* program ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian juga melaksanakan pembangunan fisik sentra IKM Rendang dengan didukung oleh dana dari pusat melalui Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Tahap selanjutnya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha yang sudah ditetapkan dan bersedia dibina dalam rangka meningkatkan daya saing produk yang ada dan pemenuhan terhadap kebutuhan pasar. Untuk mendukung program ini Dinas Pertanian juga terlibat dalam menjamin ketersediaan bahan baku rendang terutama daging sapi, bawang merah dan cabe. Ketiga komoditi ini merupakan produk unggulan yang selalu dievaluasi ketersediaannya di Kota Payakumbuh untuk menjamin ketersediaan bahan baku rendang yang akan diproduksi. Untuk mendukung program ini Pemerintah Kota Payakumbuh juga didukung oleh tersedianya RPH modern. Dinas Koperasi dan UKM juga berpartisipasi membuka peluang pasar dengan berbagai program dan kegiatan untuk mendorong volume pemasaran rendang hingga ke luar daerah bahkan ke luar negeri. Sementara dari segi ketersediaan sarana prasarana seperti jalan, drainase, penerangan, dan lainnya didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Secara spasial, kampung rendang berada di kecamatan Lamposi Tigo Nagari (Latina) dan didukung oleh Sentra IKM rendang yang berada di Kecamatan Payakumbuh Utara yang merupakan kecamatan tetangga Latina. Pemilihan lokasi sentra IKM rendang sudah memperhatikan penataan ruang kota Payakumbuh yang tertuang dalam dokumen RTRW dan RDTR kota Payakumbuh. Pemilihan lokasi ini juga dekat dengan lokasi pasar yang dibangun berdekatan dengan Sentra IKM sehingga dapat mendukung kemudahan dalam meperoleh bahan baku yang diperlukan serta mempermudah proses pemasaran.

b. Kampung Tenun

Tenun Balai Panjang Kota Payakumbuh merupakan produk unggulan yang sudah mulai dikenal luas sampai ke luar daerah. Pengembangan industri tenun dilakukan secara holistik dan integratif oleh berbagai sektor. Rumah produksi dan galeri tenun telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tahun 2016. Pembinaan

terhadap pelaku usaha juga dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian serta Dinas Koperasi dan UKM. Secara pemasaran dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM baik melalui UPTD Pondok Promosi kota Payakumbuh maupun berbagai pameran-pameran lokal dan nasional. Dinas pariwisata juga berperan dalam mempromosikan tenun Balai Panjang Kota Payakumbuh melalui event-event pariwisata yang menggunakan tenun Balai Panjang sebagai *icon fashion* Kota Payakumbuh. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung penataan lokasi dan penyiapan sarana prasarana pendukung Kampung Rendang agar mudah diakses dan nyaman bagi pengunjung.

Secara spasial kampung tenun berada di Kelurahan Balai Panjang yang berada dekat dengan Pondok Promosi kota Payakumbuh.

5. Penanggulangan dan Pengentasan Kawasan kumuh permukiman.

Kegiatan ini didasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tema kegiatan ini adalah Payakumbuh Tanpa Kumuh, kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) indicator yakni, bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran. Leading sector kegiatan ini adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, secara holistic kegiatan ini melibatkan banyak pihak. Dimana pihak yang terlibat yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sendiri yang bertanggung jawab dalam hal penyediaan rumah yang layak huni dan penyediaan sanitasi layak, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertanggung jawab terhadap penataan dan pembangunan jalan lingkungan , drainase lingkungan serta penyediaan air minum bekerjasama dengan PDAM, Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab dalam hal pengelolaan persampahan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bertanggung jawab dalam hal proteksi kebakaran dengan membangun Akses dan Ketersediaan Hydran, Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi tentang kesehatan dan kebersihan lingkungan, Kecamatan dan kelurahan yang menyiapkan data berkaitan dengan kawasan kumuh yang di damping oleh Fasilitator Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang sekaligus melakukan kegiatan penataan sekaligus pencegahan kawasan kumuh melalui dana Bantuan Dana Investasi (BDI), sedangkan pendekatan spasialnya kegiatan penanggulangan dan pengentasan kawasan kumuh dilaksanakan 5 Kecamatan dan 47 Kelurahan diwilayah Kota Payakumbuh.

6. Belakang jadi Depan melalui penataan kawasan sepanjang aliran Sungai Batang Agam.

Kegiatan ini dimulai pada tahun 2016 dengan diawali kerjasama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Pengelolaan Sumber Daya Air dengan Pemerintah Kota Payakumbuh. Tema kegiatan ini adalah Belakang jadi Depan, dimana diharapkan dari Program penataan kawasan sepanjang aliran sungai batang agam ini dapat merubah cara pandang masyarakat yang awalnya membelakangi sungai menjadi menghadap sungai dalam segala aktifitas masyarakat di Kota Payakumbuh. Leading sector kegiatan ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Secara holistic kegiatan ini melibatkan banyak pihak. Pihak yang terlibat yaitu Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab dalam penyiapan terhadap penataan ruang terbuka hijau, DinasPariwisata, Pemuda dan Olahraga bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana olah raga, Kecamatan Payakumbuh Barat dan Kecamatan Payakumbuh Utara bertanggung jawab terhadap kelancaran dalam

pembebasan lahan , Dinas Perhubungan bertanggung jawab terhadap aksesories kelengkapan jalan dan rambu-rambu jalan, Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab terhadap keamanan dan kenyaman masyarakat yang berkunjung ke lokasi penataan kawasan sepanjang aliran sungai batang agam. Sedangkan pendekatan spasialnya kegiatan penataan kawasan sepanjang aliran sungai Batang Agam dilaksanakan di tiga kecamatan dan delapan kelurahan.

7. Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kelengkapan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Tema dari Kegiatan ini adalah "SEMEDI" yang maksudnya "Sepuluh Menit Jadi" atau "Sehari Mesti Jadi. Program Semedi merupakan pengurusan dokumen kependudukan, seperti KTP, Kartu Keluarga, Surat Pindah, Pembuatan Akte Kelahiran dipastikan akan selesai dalam "sepuluh menit" atau paling lama "satu hari" dengan persyaratan bila dokumen pendukung yang dibawa lengkap. Untuk kepastian layanan semedi ini bisa terus eksis, Disdukcapil Payakumbuh juga memastikan bahwa jam layanan kependudukan tidak berlaku jam istirahat, artinya petugas secara shift terus membuka jam layanan mulai pukul 08.00 pagi sampe sore pukul 16.00. Dalam melayani masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh telah membuat kelurahan binaan yang ada di masing-masing kecamatan yang ada di Kota Payakumbuh. Dimana kelima kelurahan binaan tersebut di antaranya Kelurahan Payolansek dari Kecamatan Payakumbuh Barat, Kelurahan Ikua tigo di Balai Kecamatan Payakumbuh Utara, Kelurahan Padang Sikabu Kecamatan Latina, Padang Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur dan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan, Dimana kelima kelurahan tersebut menjadi tolok ukur nantinya, bahkan untuk melayani masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil membuka kesempatan saat waktu hari libur yang dimulai sejak pukul 08.30 Wib sampai 12.30 Wib, serta program jemput bola kemasyarakat dalam memenuhi administrasi kependudukan dan Catatan Sipil. Program Jemput Bola menerapkan sebuah pola kerja turun langsung kemasyarakat agar setiap pelayanan yang diberikan langsung tertuju dan tepat sasaranserta berjalan dengan lancar.

Untuk mengumpulkan data e-KTP, Disdukcapil bekerjasama dengan seluruh kecamatan dan kelurahan dan untuk program akte kelahiran anak Disdukcapil bekerjasama dengan seluruh rumah sakit dan tempat bersalin serta Posyandu yang berada di kota Payakumbuh, semua itu dilakukan agar data yang didapatkan dilapangan adalah benar-benar data yang valid.

8. Festival Budaya Daerah (Payokumbuah Bagodang Festival)

Leading sector program ini adalah Dinas Pariwisata Kota Payakumbuh. Program ini mendukung prioritas daerah kota Payakumbuh yang kedua yaitu **Peningkatan Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing dan Berkeadilan dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan**. Indikator Kinerja Utama yang hendak dikejar dengan adanya program ini adalah Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata yang pada akhirnya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi kota Payakumbuh. Untuk itu tema yang dibangun adalah "*Payokumbuah bagodang, basamo manjapuik nan tatingga mambangkik batang tarandam*" artinya Payokumbuah Bagodang, bersama membangun kembali tradisi minang yang sudah mulai hilang. Dengan tema ini diharapkan peran seluruh *stake holder*s. Dinas Pariwisata sebagai *leading sector*

melaksanakan penampilan seni dan budaya tradisional dan kontemporer seperti pertunjukan silek, tari tradisional minangkabau, dan menampilkan tradisi-tradisi lokal. Secara integratif dinas pariwisata didukung oleh ketersediaan fasilitas, penataan fisik lokasi serta kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai termasuk kesiapan jalan, jembatan dan fasilitas umum perkotaan lainnya untuk kenyamanan pengunjung yang disiapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dinas Pendidikan juga berpartisipasi dengan menyiapkan peserta festival dengan melibatkan seluruh sekolah yang ada di Kota Payakumbuh. Dinas Lingkungan Hidup melakukan penataan keindahan dan kebersihan, Dinas Kesehatan melakukan kegiatan dukungan bantuan kesehatan, dan Dinas Perhubungan melakukan kegiatan pengaturan lalu lintas di sekitar wilayah festival, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan dukungan pengamanan.

Sedangkan pendekatan spasialnya dapat dilihat dari pemilihan lokasi yang dilaksanakan di Medan Nan Bapaneh Ngalau Indah yang merupakan titik lokasi yanng terintegrasi dan memiliki keunggulan lokasi. Lokasi ini sangat mudah dijangkau dan berada pada pintu masuk kota Payakumbuh sehingga sangat mudah menarik masa dan wisatawan untuk menghadiri festival ini. Pada lokasi yang sama juga terdapat pondok promosi Kota Payakumbuh yang dikelola oleh UPTD Dinas Koperasi dan UKM. Dengan adanya festival ini otomatis akan meningkatkan penjualan pondok promosi Kota Payakumbuh yang menyediakan berbagai macam oleh-oleh lokal dan hasil kerajinan masyarakat kota Payakumbuh.

9. Revitalisasi nilai budaya (Kampuang Rumah Gadang)

Leading sector program ini adalah Dinas Pariwisata Kota Payakumbuh. Pelaksanaan program ini sesuai dengan prioritas daerah yang ke lima yaitu Peningkatan Pengamalan Ajaran Agama dan Budaya. Secara tidak langsung juga mendukung prioritas daerah yang kedua yaitu **Peningkatan Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing dan Berkeadilan dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan** . Pada tahun 2019 dianggarkan pembelian tanah untuk pembangunan rumah gadang di wilayah Balai Kaliki Kelurahan Koto Kociak kubu Tapak Rajo. Tema dari program ini adalah "*Rumah gadang tali panyambuang silaturahmi*". Secara holistik program ini selain bertujuan untuk melestarikan kebudayaan daerah sekaligus dapat menjadi destinasi wisata ke depannya. Bangunan rumah gadang ini pun akan difungsikan sebagai penginapan yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Pelaksanaan program ini didukung oleh beberpa kegiatan secara integratif. Dinas Pariwisata menyiapkan bangunan fisik dan pengelolaannya. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan sarana prasarana terutama jalan dan jembatan untuk kemudahan akses menuju ke perkampungan rumah gadang. Dinas Lingkungan Hidup menyiapkan kajian lingkungan untuk pembangunan kampuang rumah gadang. Secara Spasial program ini berlokasi di Payakumbuh Utara nagari Koto Nan Godang yang masih konsisten memegang nilai-nilai budaya yang ada. Lokasi ini masih berada dekat dengan pusat kota dan dekat dengan fasilitas umum kota.

4.5 Arah kebijakan Pembangunan Kota Payakumbuh sesuai Arah Kebijakan Provinsi Sumatera Barat

Sub Bab ini mengemukakan tentang arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi, yang nantinya akan menjadi pedoman bagi daerah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD.

4.5.1 Arah dan Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota

Tabel IV.5
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Payakumbuh
Tahun 2019 (%)

No	Uraian	Target 2019	Keterangan
1	Target Propinsi Sumbar	5,83	
2	Target Propinsi untuk Kota Payakumbuh	5,98	
3	Target Kota Payakumbuh	6,2	

Target laju pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh adalah sebesar 6,2 %. Hal ini lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 sebesar 5,98 %. Hal ini didasarkan atas capaian laju pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 6,09 %. Target 2019 tersebut juga yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

4.5.2 Kemiskinan dan Pengangguran

a. Kemiskinan

Tabel IV.6
Proyeksi Tingkat Kemiskinan Kota Payakumbuh
Tahun 2019 (%)

No	Uraian	Target 2019	Keterangan
1	Target Propinsi Sumbar	6,15	
2	Target Propinsi untuk Kota Payakumbuh	5,47	
3	Target Kota Payakumbuh	5,66	

Dalam arah kebijakan pembangunan RKPD provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, ditetapkan target kemiskinan di Kota Payakumbuh sebesar 5,47%. Hal ini berbeda dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Payakumbuh 2017-2022, yang kemudian dituangkan dalam RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2019. Dalam dokumen tersebut target tingkat kemiskinan Kota Payakumbuh adalah sebesar 5,66 %.

b. Pengangguran

Tabel IV.7
Proyeksi Pengangguran Kota Payakumbuh
Tahun 2019 (%)

No	Uraian	Target 2019	Keterangan
1	Target Propinsi Sumbar	6,03	
2	Target Propinsi untuk Kota Payakumbuh	6,62	
3	Target Kota Payakumbuh	6,62	

Untuk target tingkat pengangguran Kota Payakumbuh Tahun 2019 yang ditetapkan oleh provinsi Sumatera Barat telah sama dengan yang terdapat dalam RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2019 yakni sebesar 6,62%.

4.6. Kebijakan Pembangunan Berdimensi Kewilayahan

4.6.1 Pengembangan Kawasan Budidaya

a. Kawasan Sentra Produksi (KSP) Pertanian

Tabel IV.8

Kawasan Pengembangan Komoditi Peternakan

No	Kawasan/Komoditi Peternakan	Lokasi Kawasan		Ket
		Provinsi	Kab/Kota	
1.	Kawasan Sentra Produksi			
	Sapi	Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Pasaman Barat, Kab. Tanah Datar, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Padang Pariaman, Kab. Dharmasraya, Kab. Solok, Kab. Solok Selatan		
	Kerbau	Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung		
	Unggas	Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Tanah Datar, Kab. Agam, ***Kota Payakumbuh***, Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat	**Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori (Latina)**	
2.	Kawasan Integrasi Ternak Sapi dan Tanaman Perkebunan			
	Sapi, Sawit dan Kakao	Kab. Agam, Kab. Pasaman Barat, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Sijunjung, Kab. Dharmasraya, Kab. Pesisir Selatan		
	Sapi dan Kakao	Kab. Padang Pariaman, Kab. Tanah Datar dan Kab. Solok		

Pengembangan Unggas yang menonjol terdapat pada 2 kecamatan di kota Payakumbuh yaitu Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori. Namun demikian peternakan unggas dalam skala kecil dengan populasi di bawah 5.000 ekor masih dibudidayakan pada 3 kecamatan lain yaitu itik di kecamatan Payakumbuh Timur dan Selatan, ayam dan puyuh di kecamatan Payakumbuh Barat.

b. Kawasan Agribisnis

Tabel IV.9
Kawasan Pengembangan Agribisnis

No	Komoditi/Produk	Lokasi Kawasan		Ket
		Provinsi	Kab/Kota	
1	Daging	Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh kota , Kabupaten Agam, ***Kota Payakumbuh***	Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan	
2	Sayuran Dataran Tinggi	Kabupaten Agam, Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar		
3	Kakao	Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, ***Kota Payakumbuh,*** Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman	Kelurahan kapalo koto Ampangan kec. Payakumbuh Selatan	

Pengembangan Unggas yang menonjol terdapat pada 2 kecamatan di kota Payakumbuh yaitu Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori. Namun demikian peternakan unggas dalam skala kecil dengan populasi di bawah 5.000 ekor masih dibudidayakan pada 3 kecamatan lain yaitu itik di kecamatan Payakumbuh Timur dan Selatan, ayam dan puyuh di kecamatan Payakumbuh Barat.

c. Kawasan dan Sentra Industri

Tabel IV.10
Pengembangan Kawasan dan Sentra Industri di Provinsi Sumatera Barat

No	Sentra Industri	Lokasi Kawasan		Ket
		Provinsi	Kab/Kota	
1 .	Industri Tekstil dan Produk Tekstil	Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kota Bukittinggi, ***Kota Payakumbuh***, Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kab. Tanah Datar, Kab. Sijunjung, Kota Padang Panjang, Kab. Pasaman Barat	Kelurahan Balai Panjang kecamatan Payakumbuh Selatan Tenun Balai Panjang) Kelurahan koto kociak kubu tapak rajo (lilit songkok)	

No	Sentra Industri	Lokasi Kawasan		Ket
		Provinsi	Kab/Kota	
2.	Industri Makanan Ringan	Kota Padang, Kota Bukittinggi, ***Kota Payakumbuh***, Kota Padang Panjang, Kota Solok, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Tanah Datar, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kab. Dharmasraya, Kab. Solok Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Sijunjung	Kelurahan Payolansek, Padang tinggi, padang Tangah, Sungai Durian	
3.	Industri Pengolahan Kakao	Kab. Padang Pariaman, ***Kota Payakumbuh***, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Agam, Kab. Pasaman, Kota Sawahlunto, Kota Padang	Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan	
4.	Industri Semen dan Turunannya	Kota Solok, Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, ***Kota Payakumbuh***, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang		
5.	Industri Alsintan	Kab. Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Padang Pariaman, ***Kota Payakumbuh***, Kota Padang, Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya Kabuapten Pasaman, Kab. Sijunjung, Kab. Kepulauan Mentawai	Kelurahan Tanah mati, kecamatan Payakumbuh Barat	
6.	Industri Minyak Atsiri dan Turunannya	Kota Solok, Kab. Agam, Kab. Mentawai, Kab. Pasaman Barat, Kab. Solok, Kota Sawahlunto, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Padang Pariaman, Kab. Dharmasraya, Kota Padang		
7.	Industri Kulit dan Alas Kaki	Kota Padang Panjang, Kab. Padang Pariaman, Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar		
8.	Industri Pengolahan Gambir	Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Psisir Selatan, Kab. Agam		
9.	Industri Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan	Kab. Pesisir Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kota Pariaman, Kota Padang, Kab. Pasaman, Kab. Lima Puluh Kota		
10.	Industri Maritim	Kab. Pesisir Selatan, Kab. Agam, Kab. Pasaman Barat, Kab. Padang Pariaman, Kota Padang.		

d. Kawasan Pariwisata

Tabel IV.11
Wilayah Pengembangan Pariwisata

No	Wilayah Pengembangan	Lokasi Kawasan		Ket
		Provinsi	Kab/Kota	
1	Wilayah I Padang dan sekitarnya	1. Kawasan yang dikembangkan, sebagai berikut: a. KUPP Kota Padang (Kawasan Wisata Terpadu Kota Padang) b. KSPP Kab. Pesisir Selatan (Kawasan Wisata Mandeh). 2. Kawasan strategis dan potensial yang akan dikembangkan sebagai berikut: a. KSPP Kab. Padang Pariaman (Kawasan Wisata Pantai Tiram) b. KPPP Kota Pariaman (Kawasan Pantai Gondariah, Pulau Angso Duo)		
2	Wilayah II Bukittinggi dan sekitarnya	1. Kawasan yang dikembangkan, sebagai berikut: KUPP Bukittinggi (kawasan Jam Gadang Pasar Atas, Bukittinggi sebagai Kota Pusaka dan Geopark) 2. Kawasan strategis dan potensial yang akan dikembangkan sebagai berikut: a. KSPP Kab. Agam, (Kawasan Maninjau) b. KSPP Kab. Lima Puluh Kota, (Kawasan Harau) c. KPPP Kab. Pasaman, (Kawasan Equator) d. KPPP Kab. Pasaman Barat (Kawasan Pulau Panjang) *e.* ***KPPP Kota Payakumbuh (Kawasan Ngalau Indah)***	Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan	
3	Wilayah III Tanah Datar dan sekitarnya	1. Kawasan yang dikembangkan, sebagai berikut: KUPP Kab. Tanah Datar, (Istano Basa Pagaruyuang sebagai Kawasan Wisata Budaya) 2. Kawasan strategis dan potensial		

No	Wilayah Pengembangan	Lokasi Kawasan		Ket
		Provinsi	Kab/Kota	
		yang akan dikembangkan sebagai berikut: a. KSPP Kota Padang Panjang, (Bukit Tui sebagai Kawasan Berkuda) b. KSPP Kab. Solok, (Wisata Danau Singkarak dan Danau Kembar) c. KPPP Kota Solok (Kawasan Wisata Pulau Belibis) d. KPPP Kab. Solok Selatan (Kawasan Wisata Budaya 1000 Rumah Gadang)		
4	Wilayah IV Sawahlunto dan sekitarnya	1. Kawasan yang dikembangkan : KUPP Sawahlunto (Wisata Tambang di Kawasan Wisata Kota Tua) 2. Kawasan strategis dan potensial yang akan dikembangkan berikutnya, sebagai berikut: a. KSPP Kab. Sijunjung (Kawasan Silokek) b. KSPP Dharmasraya (Kawasan Wisata Sejarah Candi Padang Roco)		
5	Wilayah V Kepulauan Mentawai dan sekitarnya	1. Kawasan yang dikembangkan: KUPP Dusun Jati dan Dusun Mapadegat, 2. Kawasan strategis dan potensial yang akan dikembangkan sebagai berikut: a. KSPP Teluk Katurai, b. KSPP Katiet, c. KSPP Tua Pejat, d. KPPP Desa Silabu		

Keterangan:
KUPP = Kawasan Utama Pengembangan Pariwisata
KSPP = Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata
KPPP = Kawasan Potensial Pengembangan Pariwisata

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan daerah tahun 2019 yang disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian pembangunan tahun 2017 dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dianalisa sebagai bahan perencanaan pembangunan dalam rangka menciptakan perencanaan yang efektif dan efisien yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kota Payakumbuh.

RKPD Kota Payakumbuh tahun 2019 terdiri dari rencana program/kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kota Payakumbuh pada tahun 2019. RKPD Kota Payakumbuh disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu-isu strategis dan prioritas pembangunan dalam rangka mendukung tema pembangunan daerah. Rencana program/ kegiatan tersebut dibiayai oleh :

a. APBD Kota Payakumbuh
   Rencana program/ kegiatan yang membiayai dari APBD Kota disusun melalui rangkaian proses perencanaan pembangunan yang diawali dari musrenbang kelurahan, kecamatan yang telah disepakati melalui forum antar Perangkat Daerah serta musrenbang Kota. Rencana penganggaran untuk belanja pembangunan yang dianggarkan pada belanja langsung yang dialokasikan pada seluruh Perangkat Daerah.

b. APBD Provinsi Sumatera Barat
   Rencana kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 yang pembiayaannya bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah disampaikan pada Musrenbang di tingkat Provinsi Sumatera Barat.

c. APBN
   Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 yang pembiayaannya bersumber dari APBN sebagaimana telah disampaikan pada Musrenbang di tingkat Nasional.

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan rinci yang menjelaskan kode rekening, nama urusan dan program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan dan kebutuhan dana/pagu indikatif. Klasifikasi program dan kegiatan dalam Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 dituangkan secara lengkap dalam tabel V.1.

Tabel V.1
REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**								**186,138,690,863**	**273,601,532,886**	
1.01.01.	**PENDIDIKAN**								**16,051,728,598**	**13,810,089,718**	
0.00.1.01.1.01.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai IKM**	**88.00**	**1,938,441,371**	**1,957,825,785**	**DIKNAS**
0.00.1.01.1.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat				Jumlah benda pos, cek giro yang dibeli dan jasa pengiriman yang dibayar	2 jenis dan 2 kali			7,535,000	7,610,350	
0.00.1.01.1.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Jumlah rekening air, listrik, telepon yang dibayarkan	12 rekening untuk 12 bulan			214,812,000	216,960,120	
0.00.1.01.1.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya	20 Unit			6,800,000	6,868,000	
0.00.1.01.1.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	240 orang			762,471,000	770,095,710	
0.00.1.01.1.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Jumlah bahan-bahan kebersihan kantor yang dibeli	28 jenis			35,088,300	35,439,183	
0.00.1.01.1.01.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				Jumlah Peralatan yang diperbaiki	58 Unit			42,994,200	43,424,142	
0.00.1.01.1.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor				Jumlah ATK yang tersedia	63 jenis			75,010,000	75,760,100	
0.00.1.01.1.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan	35 jenis			70,806,620	71,514,686	
0.00.1.01.1.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia dan pemeliharaan jaringan yang dilaksanakan	17 jenis dan 1 paket			59,300,000	59,893,000	
0.00.1.01.1.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Jumlah bahan bacaan yang disediakan	5760 eksemplar			28,800,000	29,088,000	
0.00.1.01.1.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				Jumlah porsi makanan dan minuman/snack yang tersedia	2.131 makan, 4.352 snack			88,994,000	89,883,940	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.1.01.1.01.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah yang dilaksanakan	99 x dalam daerah, 28 x luar daerah			400,526,403	404,531,667	
0.00.1.01.1.01.01.01.19	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran				Jumlah tenaga admin/ teknik perkantoran yang dibayarkan	6 org THL (4 org Diknas, 2 SKB)			145,303,848	146,756,886	
0.00.1.01.1.01.01.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik**	**80.00%**	**112,993,600**	**105,000,000**	**DIKNAS**
0.00.1.01.1.01.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	20 unit			112,993,600	105,000,000	
0.00.1.01.1.01.01.01.05	**Program Peningkatan Kapasitas SDA SKPD**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Jumlah ASN yang melaksanakan bimtek**	**2 orang**	**42,100,000**	**76,500,000**	**DIKNAS**
0.00.1.01.1.01.01.01.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan (DID)				Jumlah sosialisasi peraturan perundang - undangan	80 org.			15,000,000	15,000,000	
0.00.1.01.1.01.01.01.05.05	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (DID)				Jumlah ASN yang melaksanakan Bimtek	3 orang			27,100,000	61,500,000	
0.00.1.01.1.01.01.01.06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai evaluasi AKIP**	**A**	**41,439,600**	**41,853,996**	**DIKNAS**
0.00.1.01.1.01.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Jumlah laporan pencapaian kinerja yang tersusun	6 laporan			2,601,500	2,627,515	
0.00.1.01.1.01.01.01.06.06	Penyebarluasan dan Publikasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD				Jumlah publikasi pada media massa yang dilakukan	20 kali			10,000,000	10,100,000	
0.00.1.01.1.01.01.01.06.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik				Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelayanan Publik yang tersusun	5 dokumen			4,066,500	4,107,165	
0.00.1.01.1.01.01.01.06.13	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan				Jumlah Monitoring evaluasi dan pelaporan	2 kali			5,560,000	5,615,600	
0.00.1.01.1.01.01.01.06.14	Pengelolaan dan pengendalian aset				Jumlah TBM yang dikelola	1 TBM			19,211,600	19,403,716	
1.01.01.1.01.01.01.15.	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	**1**	**Jumlah Lembaga PAUD dan Dikmas yang terakreditasi**	**7 sekolah**			**Persentase satuan PAUDNI yang memiliki sapras sesuai SNP**	**64.00%**	**2,319,657,000**	**2,265,304,760**	**DIKNAS**

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			APK PAUD	**75.70%**			**Persentase satuan pendidikan PAUD yang pengelolaannya berkategori baik**	**75.00%**			
							Persentase PTK PAUD yang sesuai dengan SNP	**54.00%**			
1.01.01.1.01.01.01.15.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa				Jumlah alat pembelajaran edukatif yang diadakan	11 paket			62,084,000	62,704,840	
1.01.01.1.01.01.01.15.42	Rehabilitasi sedang / berat bangunan sekolah				Jumlah sekolah yang direhab	3 sek			320,000,000	323,200,000	
1.01.01.1.01.01.01.15.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik				Jumlah tenaga pendidikan yang mengikuti diklat berjenjang	75 orang			61,880,000	62,498,800	
1.01.01.1.01.01.01.15.58	Pengembangan pendidikan anak usia dini				Jumlah bunda PAUD, pengelola PAUD yang diberi insentif	54 bunda PAUD, 52 pengelola PAUD			142,912,000	144,341,120	
1.01.01.1.01.01.01.15.59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini				Jumlah pendidik anak usia dini yang diberi insentif	275 orang			1,656,000,000	1,672,560,000	
1.01.01.1.01.01.01.15.70	Penguatan kompetensi dan kualifikasi Tenaga Pendidik				Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan penyusunan kurikulum	150 orang			45,321,000		
1.01.01.1.01.01.01.15.71	Uji Kompetensi dan kualifikasi Tenaga Pendidik				Jumlah peserta uji kompetensi tenaga PAUDNI	20 org			18,790,000		
1.01.01.1.01.01.01.15.72	Pembinaan Gugus PAUD				Jumlah gugus PAUD yang dibina	15 gugus			12,670,000		
1.01.01.1.01.01.01.16.	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun**	**1**	**Jumlah sekolah (SD, SMP)yg berakreditasi A**	**74 sekolah**			**Persentase sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai dengan SNP**	**85.00%**	**3,863,324,595**	**3,901,957,841**	**DIKNAS**
			APK SD/MI/Paket A	**125.05%**			**Rata - rata nilai Mid semester**	**7.60**			
			APK SMP/MTs/Paket B	**158.10%**			**Rata - rata nilai semester**	**7.60**			
			APM SD/MI/Paket A	**109.75%**							
			APM SMP/MTs/Paket B	**120.15%**							
			Rata - rata nilai US SD	**7.70**							
			Rata rata nilai UN SMP	**5.85**							
1.01.01.1.01.01.01.16.03	Penambahan ruang kelas sekolah				Jumlah ruang kelas sekolah yang dibangun	2 ruang			650,000,000	656,500,000	
1.01.01.1.01.01.01.16.09	Pembangunan taman, lapangan upacara, fasilitas parkir				Jumlah lapangan yang dibangun	1 Paket			626,532,100	632,797,421	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.01.1.01.01.01.16.14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi				Jumlah sarana air bersih dan sanitasi yang dibangun	1 Paket			450,000,000	454,500,000	
1.01.01.1.01.01.01.16.18	Pengadaan alat praktek dan peraga siswa (DID)				jumlah pengadaan laptop/ notebook/ chromebook UNBK yang diadakan	37 unit			200,000,000	202,000,000	
1.01.01.1.01.01.01.16.44	rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah				Jumlah sekolah yang direhab	7 sekolah			300,000,000	303,000,000	
1.01.01.1.01.01.01.16.57	pelatihan dan kompetensi tenaga pendidik				Jumlah kegiatann pembinaan tenaga pendidik yang dilakukan	2 kegiatan			66,669,000	67,335,690	
1.01.01.1.01.01.01.16.66	Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS				Jumlah sekolah yang dilakukan assesment ABK	66 Sekolah			46,703,000	47,170,030	
1.01.01.1.01.01.01.16.67	Penyelenggaraan paket A setara SD				Jumlah rombel pembelajaran paket A dan ujian Paket A setara SD	3 Rombel			76,079,650	76,840,447	
1.01.01.1.01.01.01.16.68	Penyelenggaraan paket B setara SMP				Jumlah rombel pembelajaran paket B setara SMP yang terselenggara	3 Rombel			128,054,645	129,335,191	
1.01.01.1.01.01.01.16.80	Pembangunan Pagar Sekolah (DID)				Jumlah Pagar Sekolah yang dibangun	5 paket			484,090,000	488,930,900	
1.01.01.1.01.01.01.16.85	pelatihan penyusunan kurikulum SD/MI				Jumlah guru dan kepsek yang dilatih penyusunan kurikulum SD	380 Orang			70,120,000	70,821,200	
1.01.01.1.01.01.01.16.86	pelatihan penyusunan kurikulum SMP/Mts				Jumlah guru dan kepsek yang dilatih penyusunan kurikulum SMP	100 orang			73,798,000	74,535,980	
1.01.01.1.01.01.01.16.87	Pelaksanaan akreditasi sekolah				jumlah sekolah yang diakreditasi	5 sekolah			62,533,200	63,158,532	
1.01.01.1.01.01.01.16.88	Pelaksanaan evaluasi hasil akhir belajar SD/MI				Jumlah siswa yang mengikuti USBN dan USBK	3013 siswa			387,110,000	390,981,100	
1.01.01.1.01.01.01.16.89	Pelaksanaan evaluasi akhir belajar SMP/MTs				Jumlah siswa yang mengikuti UASBN SMP/MTs	3730 siswa			241,635,000	244,051,350	
1.01.01.1.01.01.01.18.	**Program Pendidikan Non Formal**	**1**	**Rata rata lama sekolah**	**10,60 tahun**			**Angka melek huruf**	**99.66%**	**283,707,450**	**286,544,525**	**DIKNAS**
			Angka Harapan Lama sekolah	**14,49 tahun**							

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.01.1.01.01.01.18.01	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal				Jumlah tenaga pendidik dikmas yang mengikuti worshop	80 orang			41,181,000	41,592,810	
1.01.01.1.01.01.01.18.03	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan				Jumlah lembaga kursus yang dibina	3 kelompok			15,752,500	15,910,025	
1.01.01.1.01.01.01.18.04	Pengembangan pendidikan keaksaraan				Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional	20 orang			23,153,000	23,384,530	
1.01.01.1.01.01.01.18.05	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup (DID)				Jumlah peserta yang mengikuti kursus/ pelatihan kecakapan hidup	27 Orang			65,546,000	66,201,460	
1.01.01.1.01.01.01.18.12	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal				Jumlah peserta yang mengikuti HAI	16 orang			21,634,950	21,851,300	
1.01.01.1.01.01.01.18.18	Penyelenggaraan paket C				Jumlah rombongan belajar Paket C setara SLTA yang diselenggarakan	3 rombel			116,440,000	117,604,400	
1.01.01.1.01.01.01.20.	**Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**1**	**Rata - rata nilai US SD**	**7.70**			**Persentase ketersediaan guru per rombongan belajar**	**87.00%**	**2,534,689,495**	**329,956,390**	**DIKNAS**
			Rata rata nilai UN SMP	**5.85**			**Persentase ketersediaan guru per mata pelajaran**	**80.50%**			
			Jumlah sekolah (SD, SMP)yg berakreditasi A	**74 sekolah**			**Persentase PTK yang sesuai dengan SNP**	**55.00%**			
1.01.01.1.01.01.01.20.01	Pelaksanaan sertifikasi pendidik				Jumlah pendidik yang menerima sertifikasi	900 org			9,512,495	9,607,620	
1.01.01.1.01.01.01.20.02	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan				jumlah guru yang mengikuti seleksi berbagai lomba	130 org			148,409,500	149,893,595	
1.01.01.1.01.01.01.20.04	Pembinaan kelompok kerja guru(KKG) dan MGMP				Jumlah KKG , K3S dan MGMP yang terbina	4 pokja			43,423,000	43,857,230	
1.01.01.1.01.01.01.20.08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan				Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang dilatih dengan IT	170 orang			38,439,000	38,823,390	
1.01.01.1.01.01.01.20.10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik				Jumlah penilaian angka kredit jafung dan kenaikan pangkat 2 periode	1500 berkas			49,828,500	50,326,785	
1.01.01.1.01.01.01.20.13	Peningkatan Kualitas Tenaga Pengajar				Jumlah tenaga pendidik yang dilatih dalam penilaian	25 orang			23,034,000	23,264,340	
1.01.01.1.01.01.01.20.14	Pengelolaan Dana BOS				Jumlah peserta yang dilatih terkait BOS	94 sekolah			14,043,000	14,183,430	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.01.1.01.01.01.20.16	Penyediaan Jasa Pendidik				Jumlah guru honor SD dan SMP yang diberi insentif	328 orang			1,968,000,000	1,987,680,000	
1.01.01.1.01.01.01.20.09	Pengembangan sistim pendataan dan pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan				Jumlah pengelola database pendidikan yang diberi insentif	80 orang			240,000,000	242,400,000	
1.01.01.1.01.01.01.21.	**Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**	**1**	**Jumlah sekolah (SD, SMP) yg berakreditasi A**	**74 sekolah**			**Persentase satuan pendidikan yang pengelolaannya berkategori baik**	**74.00%**	**247,814,712**	**130,910,039**	**DIKNAS**
1.01.01.1.01.01.01.21.01	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan				Jumlah supervisi/pengawasan yang dievaluasi	4 jenis			80,000,000	0	
1.01.01.1.01.01.01.21.05	Pembinaan dewan pendidikan				Jumlah kepsek dan anggota Dewan Pendidikan yang mengikuti lokakarya	110 orang			49,999,900	50,499,899	
1.01.01.1.01.01.01.21.06	Pembinaan komite sekolah				Jumlah komite sekolah yang mengikuti forum diskusi	150 orang			19,097,000	19,287,970	
1.01.01.1.01.01.01.21.07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan				Jumlah buku pendataan dan profil yang dihasilkan sebagai informasi pendidikan	2 dokumen			39,177,000	39,568,770	
1.01.01.1.01.01.01.21.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				Jumlah monitoring evaluasi dan pelaporan dalam tahun berjalan	3 kegiatan			6,340,000	6,403,400	
1.01.01.1.01.01.01.21.11	Penyelenggaraan pelatihan/seminar/lokakarya/diskusi tentang jabatan fungsional bidang pendidikan				Jumlah peserta pelatihan penilaian kinerja yang dilatih	125 org			15,000,000	15,150,000	
1.01.01.1.01.01.01.21.12	Penyediaan Informasi Pendidikan (DID)				jumlah sistim aplikasi informasi pendidikan yang disediakan	1 paket			38,200,812	38,582,820	
1.01.01.1.01.01.01.94.	**Program Pendidikan Karakter/ Akhlak Mulia**	**1**	**Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik**	**28.72%**			**Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik**	**28.72%**	**4,667,560,775**	**4,714,236,383**	**DIKNAS**
			Jumlah prestasi siswa di tingkat propinsi	**16 prestasi**							

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah prestasi siswa di tingkat nasional	**2 prestasi**							
1.01.01.1.01.01.01.94.70	Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa (dikdas)				Jumlah kegiatan pembinaan bakat dan kreativitas siswa se Kota Payakumbuh yang dilaksanakan	8 kegiatan			753,295,000	760,827,950	
1.01.01.1.01.01.01.94.19	Pendidikan Karakter				Jumlah peserta/guru yang mengikuti pelaksanaan pendidikan karakter	200 Orang			193,135,500	195,066,855	
1.01.01.1.01.01.01.94.15	Peningkatan Kemampuan Baca Al Quran				Jumlah siswa mengikuti kegiatan lomba hafis Al-Qur'an	Peserta Tk Kec. 750 org; Tk Kota 208 org			291,554,000	294,469,540	
1.01.01.1.01.01.01.94.16	Peningkatan Iman Taqwa dan Akhlak Budi Pekerti Siswa				Jumlah siswa yang mengikuti pesantren ramadhan	16000 Siswa			1,046,781,000	1,057,248,810	
1.01.01.1.01.01.01.94.17	Pembinaan dan Penyelenggaraan TPA/TPSA/MDA				Jumlah guru TPQ/TPSQ/MDA yang diberi insentif dan dibina	452 orang			2,066,200,000	2,086,862,000	
1.01.01.1.01.01.01.94.18	Peningkatan Disiplin Siswa				Jumlah kegiatanwawasan kebangsaan, bela negara, lomba antar siswa dan antar sekolah	6 kegiatan			112,999,500	114,129,495	
1.01.01.1.01.01.01.94.79	Piloting Karakter				Jumlah sekolah untuk piloting pendidkan karakter	2 sekolah			87,448,000	88,322,480	
1.01.01.1.01.01.01.94.08	TOT Pendidikan Karakter				Jumlah peserta yang mengikuti TOT pendidikan karakter	50 Peserta			20,463,225	20,667,857	
1.01.01.1.01.01.01.94.09	Pelatihan Orang Tua Siswa (Parenting) (DID)				Jumlah orang tua siswa yang mengikuti pelatihan parenting	200 orang			42,928,000	43,357,280	
1.01.01.1.01.01.01.94.12	Pembinaan Minat dan Bakat dan Kreatifitas Siswa (PAUD)				Jumlah kegiatan pembinaan bakat dan kreatifitas siswa dan lomba kreatifitas se Kota Payakumbuh yang dilaksakan	2 kegiatan			35,465,550	35,820,206	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.01.1.01.01.01.94.13	Workshop Pendidikan Karakter PTK dan Pengawas (DID)				Jumlah peserta yang mengikuti workshop pendidikan karakter	80 org.			17,291,000	17,463,910	
1.01.02.	**KESEHATAN**								**78,134,559,904**	**78,177,846,128**	
0.00.1.01.1.01.02.01.01.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**1**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai IKM**	**81.00**	**2,563,767,730**	**2,589,405,407**	**DKK**
0.00.1.01.1.01.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat				Jumlah benda Pos, cek giro yang dibeli dan jasa pengiriman yang dibayar	Materai 3000=125 lbr; Materai 6000=95 bh; buku cek=6bh			1,500,000	1,515,000	
0.00.1.01.1.01.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Jumlah rekening air, listrik, telepon, fax dan hosting web yang dibayarkan	12 bln			124,200,000	125,442,000	
0.00.1.01.1.01.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya	47 unit			12,500,000	12,625,000	
0.00.1.01.1.01.02.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	72 orang			481,792,000	486,609,920	
0.00.1.01.1.01.02.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Jumlah bahan-bahan kebersihan kantor yang dibeli	28 jenis			4,985,200	5,035,052	
0.00.1.01.1.01.02.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				Jumlah perbaikan peralatan kerja	120 unit			61,200,000	61,812,000	
0.00.1.01.1.01.02.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor				Jumlah jenis ATK yang disediakan	50 Jenis			35,062,100	35,412,721	
0.00.1.01.1.01.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Jumlah barang cetakan dan pengadaan	6 cetak, 100.015 lbr fc			34,143,000	34,484,430	
0.00.1.01.1.01.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	18 jenis			3,203,750	3,235,788	
0.00.1.01.1.01.02.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Jumlah bahan bacaan yang disediakan	3 media			7,200,000	7,272,000	
0.00.1.01.1.01.02.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				Jumlah porsi makanan dan minuman / snack yang disediakan	500 porsi			30,660,000	30,966,600	
0.00.1.01.1.01.02.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan	364 x dlm daerah, 39 x luar daerah			629,858,000	636,156,580	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.1.01.1.01.02.01.01.19	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran				Jumlah tenaga administrasi perkantoran yang dibayar	75 orang			1,137,463,680	1,148,838,317	
0.00.1.01.1.01.02.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**2**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik**	**80.00%**	**328,220,700**	**331,502,907**	**DKK**
0.00.1.01.1.01.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Jumlah jenis pemeliharaan yang akan dilaksanakan	2 unit			65,710,000	66,367,100	
0.00.1.01.1.01.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	114 unit			262,510,700	265,135,807	
0.00.1.01.1.01.02.01.03.	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**1**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap**	**100.00%**	**174,360,000**	**176,103,600**	**DKK**
0.00.1.01.1.01.02.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapan yang diadakan	386 stel			174,360,000	176,103,600	
0.00.1.01.1.01.02.01.06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**1**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**	**46,625,550**	**47,091,806**	**DKK**
0.00.1.01.1.01.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan yg disusun	7 dokumen			10,410,000	10,514,100	
0.00.1.01.1.01.02.01.06.06	Penyebarluasan dan Publikasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD				Jumlah survey IKM	2 kali survey, 3 oter			36,215,550	36,577,706	
1.01.02.1.01.02.01.15.	**Program Obat dan Perbekalan Kesehatan**	**1**	**Persentase peningkatan mutu pengelolaan obat dan perbelkes**	**85.00%**			**Persentase ketersediaan obat dan perbelkes untuk 24 bulan**	**100.00%**	**42,943,000**	**43,372,430**	**DKK**
							Persentase rumah tangga yang mendapatkan sosialisasi pangan sehat	**85.00%**			
1.01.02.1.01.02.01.15.05	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan (DID)				Jumlah kegiatan suvervisi penggunaan obat yang dilaksanakan; dan Jumlah pelatihan peningkatan mutu obat yang dilaksanakan	12 keg dan 2 kali			42,943,000	43,372,430	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.02.1.01.02.01.16.	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	**1**	**Persentase kemandirian masyarakat hidup sehat**	**85.00%**			**Persentase kepesertaan JKN**	**95.00%**	**8,256,281,849**	**8,338,844,667**	**DKK**
1.01.02.1.01.02.01.16.02	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan				Jumlah masyarakat yang dijamin pelayanan kesehatan oleh pemerintah kota	40.093 org			8,176,832,700	8,258,601,027	
1.01.02.1.01.02.01.16.12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan				Jumlah sosialisasi tim reaksi cepat bencana, sosialisasi tanggap bencana yang diadakan	4 kegiatan			36,217,460	36,579,635	
1.01.02.1.01.02.01.16.16	Peningkatan Mutu Pelayanan Puskesmas dan jaringanya (DID)				Jumlah kegiatan peningkatan kutu Yankes dasar (PPGD/BTCLS, manajemen Logistik, Manajemen Resiko yang diadakan	8 kegiatan			43,231,689	43,664,006	
1.01.02.1.01.02.01.17.	**Program Pengawasan Obat dan Makanan**	**1**	**Persentase IRTP sesuai standar kesehatan**	**65.00%**			**Persentase kelompok masyakat cerdas menggunakan obat**	**35.00%**	**164,139,925**	**165,781,324**	**DKK**
			Persentase peningkatan mutu pengelolaan obat dan perbelkes	**85%**			**Persentase kegiatan pengawasan keamanan pangan**	**100.00%**			
1.01.02.1.01.02.01.17.01	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan (DID)				Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi tentang penggunaan obat yang benar	180 orang			44,298,000	44,740,980	
1.01.02.1.01.02.01.17.02	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya				Jumlah unit penjual obat, kosmetik dan makanan yang diawasi, jumlah IRTP yang mendapat sertifikasi penyuluhan , masy yang mendapatkan sosialisasi tentang keamanan pangan, jumlah sekolah yang mendapatkan sosialisasi PJAS.	1 pkt			119,841,925	121,040,344	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.02.1.01.02.01.19.	**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat**	**1**	**Persentase kemandirian masyarakat hidup sehat**	**85.00%**			**Persentase Rumah tangga ber-PHBS** **Persentase sekolah PHBS**	**75.00%** **78.00%**	**174,149,450**	**101,958,945**	**DKK**
1.01.02.1.01.02.01.19.01	Pengembangan media promosi & informasi sadar hidup sehat (DAU+DID)				Jumlah pengembangan media promosi hidup sehat dan bersih	1paket radio,1 pkt spanduk,1 pkt alat studio			73,200,000	73,932,000	
1.01.02.1.01.02.01.19.02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat				Jumlah keg senam bersama/car free day,spanduk,posyandu,toga	8 kegiatan			100,949,450	101,958,945	
1.01.02.1.01.02.01.20.	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**	**1**	**Persentase Balita gizi buruk**	**< 3%**			**Persentase peningkatan status gizi masyarakat** **Persentase penanganan balita gizi buruk** **Cakupan balita gizi buruk**	**100.00%** **100.00%** **< 3%**	**116,601,800**	**117,767,818**	**DKK**
1.01.02.1.01.02.01.20.03	Penggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya				Jumlah penanggulangan masalah kes akibat gizi	5 kegiatan			106,601,800	107,667,818	
1.01.02.1.01.02.01.20.04	Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi				Jumlah orientasi pemantapan kesehatan akibat masalah gizi	1 kali			10,000,000	10,100,000	
1.01.02.1.01.02.01.21.	**Program Pengembangan Lingkungan Sehat**	**1**	**Persentase Kelurahan STBM**	**90**			**Cakupan jamban yang sesuai standar kesehatan** **Cakupan Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga** **Cakupan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga** **Cakupan Pengelolan Limbah Cair Rumah Tangga** **Cakupan Laik Sehat TPM** **Cakupan Laik Sehat TTU** **Persentase peningkatan STBM** **Persentase cakupan stop BABS**	**90.00%** **98.25%** **99.20%** **94.50%** **80.00%** **82.00%** **100.00%** **31.25%**	**283,846,000**	**286,684,460**	**DKK**

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Persenatase laik sehat TTM dan TTU	**96.00%**			
1.01.02.1.01.02.01.21.05	Peningkatan Lingkungan Sehat				Jumlah kegiatan peningkatan Lingkungan Sehat	8 kegiatan			283,846,000	286,684,460	
1.01.02.1.01.02.01.22.	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**	**1**	**Persentase penanganan kasus penyakit menular berpotensi KLB**	**100.00%**			**Cakupan penemuan semua kasus TB**	**42.00%**	**232,474,850**	**160,463,599**	**DKK**
							Persentase TB yang mengetahui status HIV	**42.00%**			
							Persentase HIV AIDS yang mendapatkan ARV	**20.00%**			
							Cakupan penanganan kasus diare	**100.00%**			
							Insident rate DBD per 100.000 penduduk	**<41**			
							Cakupan Kelurahan UCI	**98.00%**			
							cakupan pelayanan imunisasi anak sekolah	**93.00%**			
							Cakupan pelayanan imunisasi dasar lengkap	**95.00%**			
							cakupan penanganan kasus DBD	**100.00%**			
1.01.02.1.01.02.01.22.05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular				Jumlah kegiatan pencegahan penyakit menular	10 keg			158,874,850	160,463,599	
1.01.02.1.01.02.01.22.08	Peningkatan Imunisasi				Jumlah peningkatan pengetahuan masyarakat tentang imunisasi	3 kagiatan			73,600,000		
1.01.02.1.01.02.01.23.	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	**1**	**persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar**	**89.00%**			**Persentase RS dan Puskesmas terakreditasi**	**100.00%**	**400,300,250**	**404,303,253**	**DKK**
							Persentase puskesmasn dengan nilai IKM >75	**100.00%**			
							Persentase Sapras puskesmas yang sesuai standar	**72.00%**			
1.01.02.1.01.02.01.23.02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan (DID)				Jumlah evaluasi palayanan kesehatan sesuai standar	4 kali			32,047,750	32,368,228	
1.01.02.1.01.02.01.23.07	Revitalisasi Sistem Kesehatan (DID)				Jumlah Puskesmas yang mengacu pely terakreditasi	5 Puskesmas			357,437,500	361,011,875	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.02.1.01.02.01.23.08	Peningkatan Perencanaan Pelayanan Kesehatan				Jumlah Dokumen Perencanaan yang disiapkan ,renstra,rba blud,rka,renja	4 dok			10,815,000	10,923,150	
1.01.02.1.01.02.01.25.	**Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu, dan Jaringannya**	**1**	**persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar**	**89.00%**			**Persentase Ketersediaan Prasarana Puskesmas sesuai standar**	**85,50%**	**200,000,000**	**202,000,000**	**DKK**
1.01.02.1.01.02.01.25.21	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu (DID)				Jumlah gedung pustu dan jaringanya yang direhabilitasi	2 unit			200,000,000	202,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.30.	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**	**1**	**Cakupan Lansia yang mendapatkan skrining kesehatan**	**100.00%**			**Cakupan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia sesuai standar**	**100.00%**	**59,332,400**	**59,925,724**	**DKK**
1.01.02.1.01.02.01.30.08	Pelayanan Kesehatan Lansia (DAU+DID)				Jumlah kegiatan peningkatan mutu dan cakupan pelayanan lansia	4 kagiatan			59,332,400	59,925,724	
1.01.02.1.01.02.01.32.	**Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**	**1**	**Jumlah kasus kematian Balita**	**<11**			**Cakupan persalinan dengan nakes di faskes**	**100%**	**117,789,000**	**118,966,890**	**DKK**
			Jumlah kasus kematian ibu melahirkan	**3**			**Cakupan pelayan Nifas sesuai standar**	**100%**			
			Jumlah kasus kematian bayi	**26**			**Cakupan pelayan Neonatal sesuai standar**	**100%**			
1.01.02.1.01.02.01.32.04	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				Jumlah kegiatan pelayanan ibu dan anak yang dilaksanakan	15 kegiatan	Meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak	**95**	117,789,000	118,966,890	
1.01.02.1.01.02.01.33	**Program peningkatan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)**	**1**	**persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar**	**89.00%**			**Persentase peningkatan pelayanan BLUD**	**95.00%**	**64,940,387,500**	**65,000,000,000**	**DKK**
			Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan	**100.00%**							
			Cakupan usia produktif yang mendapatkan skrining kesehatan	**100.00%**							
1.01.02.1.01.02.01.33.01	Pelaksanaan UPTD BLUD RSUD dr.Adnaan WD				Jumlah kegiatan pelayanan RSUD dr Adnaan WD	1 tahun			56,068,600,000	57,311,354,250	
1.01.02.1.01.02.01.33.02	Pelaksanaan UPTD BLUD Puskesmas Ibuh				Jumlah jenis belanja pelayanan kesehatan Puskesmas Ibuh	3 jenis			1,404,476,000	1,337,330,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.02.1.01.02.01.33.03	Pelaksanaan UPTD BLUD Puskesmas Parit Rantang				Jumlah jenis belanja pelayanan kesehatan Puskesmas Parit rantang	3 jenis			902,266,000	878,751,000	
1.01.02.1.01.02.01.33.04	Pelaksanaan UPTD BLUD Puskesmas Padang Karambia				Jumlah jenis belanja pelayanan kesehatan Puskesmas Padang Karambia	3 jenis			655,272,500	641,672,750	
1.01.02.1.01.02.01.33.05	Pelaksanaan UPTD BLUD Puskesmas Tiakar				Jumlah jenis belanja pelayanan kesehatan Puskesmas Tiakar	3 jenis			897,516,000	815,016,000	
1.01.02.1.01.02.01.33.06	Pelaksanaan UPTD BLUD Puskesmas Air Tabit				Jumlah jenis belanja pelayanan kesehatan Puskesmas Air Tabit	3 jenis			1,733,020,000	865,910,000	
1.01.02.1.01.02.01.33.01	Pelaksanaan UPTD BLUD Puskesmas Lampasi				Jumlah jenis belanja pelayanan kesehatan Puskesmas Lampasi	3 jenis			996,440,000	1,016,320,000	
1.01.02.1.01.02.01.33.01	Pelaksanaan UPTD BLUD Puskesmas Tarok				Jumlah jenis belanja pelayanan kesehatan Puskesmas Tarok	3 jenis			1,352,210,000	1,270,550,000	
1.01.02.1.01.02.01.33.01	Pelaksanaan UPTD BLUD Puskesmas Payolansek				Jumlah jenis belanja pelayanan kesehatanPuskesmas Payolansek	3 jenis			930,587,000	863,096,000	
1.01.02.1.01.02.01.34	**Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular**	**1**	**Persentase penanganan kasus penyakit tidak menular**	**100.00%**			**Cakupan penderita hipertensi yang mendapat pelayanan**	**100.00%**	**33,339,900**	**33,673,299**	**DKK**
							Cakupan penderita DM yang mendapat pelayanan sesuai standar	**100.00%**			
							Cakupan IVA positif yang tertangani	**100.00%**			
							Cakupan pelayanan IVA usia produktif	**33.00%**			
							Cakupan penemuan kasus hipertensi usia > 15 tahun	**22.80%**			
							Cakupan penemuan kasus DM usia > 15 tahun	**1.70%**			
1.01.02.1.01.02.01.34.01	Penanggulangan Penyakit Tidak Menular				Jumlah peserta sosialisasi PTM dan IVA	240 orang			33,339,900	33,673,299	
1.01.03.	**PEKERJAAN UMUM**								**76,422,690,769**	**161,995,164,110**	
0.00.1.01.1.01.03.01.01.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai IKM**	**81.00**	**6,815,682,980**	**6,577,201,050**	**PUPR**

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.1.01.1.01.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Jumlah rekening listrik,telepon dan air yang dibayar	11 Rekening			4,499,520,000	4,550,000,000	
0.00.1.01.1.01.03.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya	95 unit			46,835,500	49,900,000	
0.00.1.01.1.01.03.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Jumlah jasa administrasi keuangan yang dibayarkan	23 orang, 2030 lembar, 15 bk			593,214,000	600,000,000	
0.00.1.01.1.01.03.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Tersedianya tenaga kebersihan dan bahan kebersihan kantor	24 jenis dan 1 orang			37,983,888	39,883,000	
0.00.1.01.1.01.03.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	12 unit			25,438,000	26,709,000	
0.00.1.01.1.01.03.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor				Jumlah alat tulis kantor yang dibeli	50 Jenis			58,673,500	61,607,175	
0.00.1.01.1.01.03.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Jumlah fotocopy, cetak dan jilid dokumen dinas	500 buah, 10 kotak, 128 buku, 8205 lembar			41,021,000	42,815,000	
0.00.1.01.1.01.03.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	16 Jenis			10,639,000	11,170,950	
0.00.1.01.1.01.03.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	8 Unit			70,000,000	217,539,000	
0.00.1.01.1.01.03.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4776 lembar			24,960,000	26,208,000	
0.00.1.01.1.01.03.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				Jumlah makanan dan minuman untuk kegiatan dinas	1751 porsi, 1751 bungkus, 100 galon			48,652,500	51,085,125	
0.00.1.01.1.01.03.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	36 kali			1,095,988,000	624,388,800	
0.00.1.01.1.01.03.01.01.19	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran				Jumlah gaji PTT yang dibayarkan	84 ob			262,757,592	275,895,000	
0.00.1.01.1.01.03.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik**	**80.00%**	**2,425,271,200**	**6,769,076,260**	**PUPR**

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.1.01.1.01.03.01.02.03	Pembangunan gedung kantor				Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan yang Representatif	1.572 m²			1,697,770,000	6,000,000,000	
0.00.1.01.1.01.03.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	2 unit			245,000,000	257,250,000	
0.00.1.01.1.01.03.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan	49 unit			452,501,200	475,126,260	
0.00.1.01.1.01.03.01.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur				Jumlah mebeluer yang dilakukan pemeliharaan rutin	14 unit			5,000,000	5,500,000	
0.00.1.01.1.01.03.01.02.49	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja				Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja	10 unit			25,000,000	31,200,000	
0.00.1.01.1.01.03.01.03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**1**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap**	**100.00%**	**60,020,000**	**63,000,000**	**PUPR**
0.00.1.01.1.01.03.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	146 set			60,020,000	63,000,000	
0.00.1.01.1.01.03.01.06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**1**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**	**101,444,000**	**172,680,000**	**PUPR**
0.00.1.01.1.01.03.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Jumlah Laporan pencapaian kinerja (Laporan tahunan, Lakip, LKB, LPPD,EKPOD,ILPD dan EKKPD) yang tersusun	5 laporan			45,000,000	87,400,000	
0.00.1.01.1.01.03.01.06.05	Penyusunan Profil SKPD				Jumlah Buku Profil Dinas PUPR	30 buku			12,063,500	12,700,000	
0.00.1.01.1.01.03.01.06.06	Penyebarluasan dan Publikasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD				Jumlah penyeberluasan dan publkasi capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	10 lipsus			26,000,000	27,300,000	
0.00.1.01.1.01.03.01.06.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik				Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik yang di susun	4 dokumen			18,380,500	45,280,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.03.1.01.03.01.15.	**Program Pembangunan Jalan dan Jembatan**	**3**	**persentase Panjang jalan status kota dengan kondisi mantap**	**72.06%**			**persentase Panjang jalan status kota dengan kondisi mantap**	**72.06%**	**5,237,313,000**	**8,383,515,000**	**PUPR**
1.01.03.1.01.03.01.15.03	Pembangunan jalan				Terlaksananya pembangunan jalan di Kota Payakumbuh	1280 m			1,225,600,000	1,259,265,000	
1.01.03.1.01.03.01.15.05	Pembangunan Jembatan				Terlaksananya pembangunan jembatan di Kota Payakumbuh	2 unit			1,511,713,000	3,449,250,000	
1.01.03.1.01.03.01.15.09	Pengadaan Tanah				Terlaksananya pengadaan tanah jl. Sudirman	500 m			2,500,000,000	3,675,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.16.	**Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong**	**3**	**persentase jalan kota yang memiliki drainase**	**45.95%**			**persentase jalan kota yang memiliki drainase**	**45.95%**	**11,450,560,449**	**21,310,225,000**	**PUPR**
1.01.03.1.01.03.01.16.01	Perencanaan pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong				Terlaksananya Penyusunan Dokumen Teknis Pembangunan Drainase	1 dokumen			32,000,000	39,325,000	
1.01.03.1.01.03.01.16.03	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong				Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	12.259 m			11,418,560,449	21,270,900,000	
1.01.03.1.01.03.01.17.	**Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong**	**3**	**Persentase penataan sungai**	**21.69%**			**Persentase penataan sungai**	**21.69%**	**875,084,800**	**2,027,650,000**	**PUPR**
1.01.03.1.01.03.01.17.03	Pembangunan turap/ talud/ bronjong				Terlaksananya Normalisasi Saluran sungai	210 m			875,084,800	2,027,650,000	
1.01.03.1.01.03.01.18.	**Program rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**	**3**	**persentase Panjang jalan status kota dengan kondisi mantap**	**72.06%**			**persentase Panjang jalan yang dipelihara**	**72.06%**	**12,576,769,204**	**63,321,779,000**	**PUPR**
1.01.03.1.01.03.01.18.03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan				Terlaksananya Rehabilitasi Berkala Berkala jalan dan trotoar di Kota Payakumbuh	32 km			2,555,389,984	20,935,820,000	
1.01.03.1.01.03.01.18.04	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan				Terlaksananya pemeliharaan berkala/rutin jembatan di Kota Payakumbuh	1 unit			419,910,000	519,225,000	
1.01.03.1.01.03.01.18.06	Peningkatan jalan				Terlaksananya peningkatan jalan di Kota Payakumbuh	9274 m			8,138,762,700	39,001,546,500	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.03.1.01.03.01.18.07	Jaringan listrik dan penerangan jalan umum				Terlaksananya pemeliharaan, pengadaan dan pemasangan lampu dan tiang	850 titik pemeliharaan, 100 titik pemasangan, 75 titik pengadaan			1,462,706,520	2,865,187,500	
1.01.03.1.01.03.01.23.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan**	**3**	**persentase Panjang jalan status kota dengan kondisi mantap**	**72.06%**			**1. Jumlah alat berat yang tersedia; 2. Jumlah alat labor yang tersedia**	**17 unit; 2 unit**	**1,007,685,109**	**981,000,000**	**PUPR**
1.01.03.1.01.03.01.23.04	Pengadaan alat-alat berat				Terlaksananya pengadaan alat-alat berat dinas PUPR	1 Unit			150,000,000	160,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.23.06	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan				Terlaksananya pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan Dinas PUPR	1 Paket			450,250,000	500,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.23.10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat				Terlaksananya Pemeliharaan Alat - Alat Berat	10 unit			299,681,029	300,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.23.12	Rehabilitasi alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan				Terlaksananya pemeliharaan alat alat ukur dan bahan laboratorium	11 unit			107,754,080	21,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.24.	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringa Pengairan Lainnya**	**3**	**persentase irigasi dengan kondisi baik**	**79.10%**			**persentase irigasi dengan kondisi baik**	**79.10%**	**11,260,131,329**	**28,845,098,300**	**PUPR**
1.01.03.1.01.03.01.24.01	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi				Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	1 dokumen			184,000,000	193,200,000	
1.01.03.1.01.03.01.24.05	Perencanaan normalisasi saluran sungai				Terlaksananya perencanaan dan AMDAL untuk penataan dan pengamanan sungai	1 dokumen			84,000,000	225,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.24.08	Pembangunan pintu air				Terlaksananya pembangunan pintu air	1 unit			50,000,000	157,500,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.03.1.01.03.01.24.09	Pelaksanaan normalisasi saluran sungai (DID)				Terlaksananya normalisasi saluran sungai	530 m			1,674,999,875	3,709,110,000	
1.01.03.1.01.03.01.24.10	Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi				Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi	7897 m			6,459,521,190	20,812,837,500	
1.01.03.1.01.03.01.24.13	Rehabilitasi/Pemeliharaan pintu air				Terlaksananya pemeliharaan pintu air	3 unit			61,098,000	165,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.24.14	Rehabilitasi/Pemeliharaan normalisasi saluran sungai (DID)				Terlaksananya pemeliharaan saluran sungai	7 DAS			806,127,471	846,450,800	
1.01.03.1.01.03.01.24.15	Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun				tersedianya jaringan irigasi yang berfungsi optimal	25 D.I			1,354,940,693	1,500,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.24.16	Rehabilitasi/Pemeliharaan petani pemakai air				Terlaksananya pembinaan petani pemakai air Kota Payakumbuh	75 kelompok			85,444,100	136,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.24.23	Pembangunan Prasarana Irigasi Pompa (DID)				Terlaksananya pembangunan irigasi pompa	1 unit			500,000,000	1,100,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.26.	**Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya**	**3**	**Persentase penataan sungai**	**21.69%**			**Persentase sungai yang dinormalisasi**	**35.44%**	**5,676,989,879**	**6,064,600,000**	**PUPR**
1.01.03.1.01.03.01.26.05	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya				Terlaksananya sosialisasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai	70 orang			61,443,219	64,600,000	
1.01.03.1.01.03.01.26.12	Pengadaan Tanah				Terlaksananya pengadaan tanah untuk kepentingan pengelolaan Sumber Daya Air	540 m			5,615,546,660	6,000,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.27.	**Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah**	**3**	**Persentase rumah yang terlayani air minum perpipaan**	**92.97%**			**Persentase rumah yang terlayani air minum perpipaan**	**92.97%**	**1,105,480,000**	**1,041,800,000**	**PUPR**
1.01.03.1.01.03.01.27.08	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah (DID)				Terlaksananya pemeliharaan drainase perkotaan	1 Km			920,000,000	1,041,800,000	
	Revisi Dokumen RISPAM				tersusunnya Revisi RISPAM	1 dokumen			185,480,000		

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.03.1.01.03.01.29.	**Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh**	**3**	**persentase Panjang jalan status kota dengan kondisi mantap**	**72.06%**			**Panjang trotoar yang dibangun**	**29600m**	**10,020,210,500**	**1,593,555,000**	**PUPR**
1.01.03.1.01.03.01.29.01	Perencanaan pengembangan infrastruktur				Terlaksananya survey harga bahan dan upah serta tersusunnya HSBGN	4 dokumen			9,416,500	53,390,000	
1.01.03.1.01.03.01.29.02	Pembangunan/peningkatan infrastruktur				Terlaksananya pembangunan infrastruktur berupa pembangunan trotoar	1 unit			9,713,287,000	1,433,775,000	
1.01.03.1.01.03.01.29.03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan di dinas PUPR	12 Bulan			42,143,000	44,500,000	
1.01.03.1.01.03.01.29.04	Peningkatan dan penguatan pengembangan infrastruktur				Terlaksananya pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung	4 dokumen 360 berkas			55,364,000	61,890,000	
1.01.03.1.01.03.01.29.05	Rehabilitasi dan pemeliharaan trotoar				Terlaksananya pemeliharaan trotoar jalan	29600 m			200,000,000	210,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.30.	**Program pembangunan Infrastruktur Pedesaan**	**3**	**persentase Panjang jalan status kota dengan kondisi**	**72.06%**			**Panjang jalan lingkung yang dibangun**	**4403 mtr**	**5,964,961,476**	**6,796,655,000**	**PUPR**
1.01.03.1.01.03.01.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan				Terlaksananya pembangunan jalan	7502 m			5,964,961,476	6,796,655,000	
1.01.03.1.01.03.01.31.	**Program Perencanaan Tata Ruang**	**3**	**Persentase Kepatuhan pelaku Pembangunan sesuai dokumen tata ruang**	**32.02%**			**1. Persentase Tertatanya kawasan pusat kota 2.Jumlah advice planning yang dikeluarkan 3. Keberadaan PERDA RTRW**	**1. 69% 2. 571 buah 3. 1 perda**	**557,655,400**	**706,731,000**	**PUPR**
1.01.03.1.01.03.01.31.01	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang				Jumlah ranperwako tentang rencana teknik ruang kota	2 aturan			53,880,325	104,181,000	
1.01.03.1.01.03.01.31.06	Penyusunan rencana teknis ruang kawasan				Jumlah Blad RTRK yang dimutakhirkan	50 Blad			238,188,250	275,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.31.16	Peningkatan dan Penguatan Perencanaan Tata Ruang				Jumlah keterangan Rencana Kota atau Advice Planning yang diterbitkan	600 berkas			24,664,325	27,550,000	
1.01.03.1.01.03.01.31.17	Pengembangan sistem informasi penataan ruang				Terlaksananya pengumpulan dan penyusunan	1 sistem			240,922,500	300,000,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.03.1.01.03.01.32.	**Program Pemanfaatan Ruang**	**3**	**Persentase Kepatuhan pelaku Pembangunan sesuai dokumen tata ruang**	**32.02%**			**Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan keseluruhan**	**0.18**	**491,962,500**	**618,714,500**	**PUPR**
1.01.03.1.01.03.01.32.01	Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang				Terlaksananya penyusunan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan	1 dokumen			9,883,500	21,450,500	
1.01.03.1.01.03.01.32.05	Survey dan pemetaan				Terlaksananya pendataan bangunan gedung di Kota Payakumbuh	1 kecamatan			256,669,000	287,514,000	
1.01.03.1.01.03.01.32.07	Sosialisasi kebijakan, norma standar prosedur dan manual pemanfaatan ruang (DID)				Terlaksananya sosialisasi kebijakan, norma standar prosedur	5 kecamatan			145,880,000	189,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.32.10	Peningkatan dan Penguatan Pemanfaatan Ruang				Terlaksananya pelayanan penerbitan IMB dan IMB pengganti	700 berkas			79,530,000	120,750,000	
1.01.03.1.01.03.01.33.	**Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang**	**3**	**Persentase Kepatuhan pelaku Pembangunan**	**32.02%**			**Rasio Ruang Terbuka Hijau**	**42.44**	**72,642,800**	**162,868,500**	**PUPR**
1.01.03.1.01.03.01.33.01	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang				Jumlah Perwako Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Pengawasan Bangunan dan Pemanfaatan Ruang	1 Perwako			7,179,000	60,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.33.05	Pengawasan pemanfaatan ruang				Jumlah bangunan yang sesuai dengan perizinan yang diterbitkan	450 berkas			14,052,500	44,141,500	
1.01.03.1.01.03.01.33.09	Peningkatan dan Penguatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang				Jumlah bangunan dan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan Tata Ruang	400 Berkas			51,411,300	58,727,000	
1.01.03.1.01.03.01.34.	**Program Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi**	**3**	**Persentase Kepatuhan pelaku Pembangunan sesuai dokumen tata ruang**	**32.02%**			**Persentase Kepatuhan pelaku Pembangunan sesuai dokumen tata ruang**	**32.02%**	**155,232,050**	**359,015,500**	**PUPR**

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.03.1.01.03.01.34.02	Analisa / pengkajian kelayakan perizinan				Terlaksananya kegiatan penerbitan KPJT-BU dan rekomendasi IUJK sebagai salah satu bentuk kegiatan pengaturan penerbitan IUJK	1 Tahun			8,322,025	8,738,500	
1.01.03.1.01.03.01.34.04	Pembinaan kelembagaan dan Sumber daya konstruksi				Terlaksananya monitoring dan evaluasi badan usaha	12 bulan			8,798,750	56,812,000	
1.01.03.1.01.03.01.34.05	Pembinaan kompetensi dan produktivitas konstruksi (DID)				Terlaksananya pembinaan penyedia jasa konstruksi	100 orang			37,003,750	104,465,000	
1.01.03.1.01.03.01.34.06	Pembinaan tertib penyelenggaraan konstruksi				Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan dan jasa konstruksi	4 kali			101,107,525	189,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.37.	**Program Perluasan dan Peningkatan Sambungan Rumah (SR)**	**3**	**Persentase rumah yang terlayani air minum perpipaan**	**92.97%**			**Persentase rumah yang terlayani air minum perpipaan**	**92.97%**	**117,594,000**	**200,000,000**	**PUPR**
1.01.03.1.01.03.01.37.01	Penambahan Jaringan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				Terlaksananya penambahan jaringan distribusi sistem penyediaan air minum (SPAM)	1 Kawasan			117,594,000	200,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.38.	**Program Pembangunan Fasilitas Umum**	**3**	**Persentase Kepatuhan pelaku Pembangunan sesuai dokumen tata ruang**	**32.02%**			**Persentase Ketersediaan Fasilitas Umum**	**77,78%**	**450,000,093**	**6,000,000,000**	**PUPR**
1.01.03.1.01.03.01.38.01	Penggadaan Tanah Mesjid Agung (DID)				Terlaksananya pengadaan tanah untuk fasilitas umum rumah ibadah di Kota Payakumbuh				450,000,093	6,000,000,000	
1.01.04.	**PERUMAHAN RAKYAT**								**6,789,512,116**	**7,512,239,339**	
0.00.1.01.1.01.04.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai IKM**	**83.00**	**785,522,114**	**748,064,888**	**DINAS PKP**
0.00.1.01.1.01.04.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Jumlah rekening listrik, telepon dan air yamh dibutuhkan	4 rekening, 12 bulan			19,800,000	20,790,000	
0.00.1.01.1.01.04.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Pajak kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan	19 unit			13,850,000	14,542,500	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.1.01.1.01.04.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Jumlah ASN yang telah dibayarkan jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan Keuangan Dinas	19 orang, 300 lembar dan 10 buku			134,968,000	141,716,400	
0.00.1.01.1.01.04.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Jumlah THL Kebersihan yang dibayarkan gaji dan BPJS dan banyaknya alat-alat kebersihan yang disediakan Alat-Alat Kebersihan	12 ob dan 26 jenis			38,948,784	40,896,223	
0.00.1.01.1.01.04.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				Jumlah Perbaikan Peralatan kerja	189 kali service			18,688,000	19,622,400	
0.00.1.01.1.01.04.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor				Banyaknya Penyediaan alat tulis kantor	59 Jenis			28,372,839	29,791,099	
0.00.1.01.1.01.04.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Jumlah fotocopy, cetak, jilid dokumen dinas	9 Jenis, 25.300 lembar dan 50 buah			20,560,805	21,588,845	
0.00.1.01.1.01.04.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Jumlah Penyediaan Komponen Listrik	9 jenis			9,124,000	9,580,200	
0.00.1.01.1.01.04.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Jumlah Penyediaan Bahan bacaan dan surat kabar	644 eksemplar			5,180,000	5,439,000	
0.00.1.01.1.01.04.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				Jumlah Porsi Makanan dan Minuman	800 porsi dan 5 jenis			14,846,750	15,589,088	
0.00.1.01.1.01.04.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	27 kali			375,424,000	317,462,250	
0.00.1.01.1.01.04.01.01.19	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran				Jumlah THL Administrasi dan Teknis Perkantoran yang dibayarkan Gaji dan BPJS	12 bulan			105,758,936	111,046,883	
0.00.1.01.1.01.04.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik**	**80.00%**	**283,108,750**	**297,264,188**	**DINAS PKP**
0.00.1.01.1.01.04.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				Jumlah pengadaan Perlengkapan Kantor	2 unit			16,000,000	16,800,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.1.01.1.01.04.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Jumlah Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	17 unit			254,608,750	267,339,188	
0.00.1.01.1.01.04.01.02.29	Pemeliharaan rutin /berkala mebeleur				Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobiler	27 Buah			10,000,000	10,500,000	
0.00.1.01.1.01.04.01.02.49	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja				Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja	1 unit			2,500,000	2,625,000	
0.00.1.01.1.01.04.01.03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap**	**100.00%**	**15,750,000**	**16,537,500**	**DINAS PKP**
0.00.1.01.1.01.04.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas harian dan pakaian kerja lapangan	35 stel			15,750,000	16,537,500	
0.00.1.01.1.01.04.01.0	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**	**23,496,275**	**24,671,089**	**DINAS PKP**
0.00.1.01.1.01.04.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Jumlah Dokumen Laporan Capaian OPD	5 dokumen			9,517,775	9,993,664	
0.00.1.01.1.01.04.01.06.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik				Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD dan Dokumen Pelayanan Publik	5 dokumen			13,978,500	14,677,425	
1.01.04.1.01.04.01.15.	**Program Pengembangan Perumahan**	**3**	**Persentase Rumah Layak Huni**	**93.81%**			**Persentase Rumah Layak Huni**	**93.81%**	**2,820,144,925**	**3,278,062,617**	**DINAS PKP**
1.01.04.1.01.04.01.15.01	Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan (DID)				Jumlah dokumen regulasi bidang perumahan	1 dokumen ranperda			102,358,900	176,077,990	
1.01.04.1.01.04.01.15.04	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan				Jumlah ASN dan Stakeholder yang Paham Tentang Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perumahan	50 orang			7,074,975	7,782,472	
1.01.04.1.01.04.01.15.06	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu				Jumlah RTLH Yang Ditingkatkan Kualitasnya	100 unit			2,161,723,100	2,435,366,010	
1.01.04.1.01.04.01.15.09	Penyusunan Sistim Informasi / Database Perumahan dan Pemukiman				Jumlah sistem Informasi Data Base Perumahan	1 dokumen			15,755,100	17,330,610	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.04.1.01.04.01.15.11	Pengumpulan, Updating dan Analisa Data Bidang Perumahan (DID)				Data Rumah, Data Backlog, Data RTLH	1 dokumen			174,753,200	192,228,520	
1.01.04.1.01.04.01.15.12	Pendampingan pelaksanaan bantuan stimulan pembangunan swadaya/APBN				Jumlah RTLH Yang Ditingkatkan Kualitasnya	50 unit			70,899,425	95,538,768	
1.01.04.1.01.04.01.15.13	Penguatan Kelembagaan Pokja PKP				Jumlah ASN dan Stakholder yang memahami koordinasi penyelenggaraan bidang PKP	4 kali			17,703,875	56,874,263	
1.01.04.1.01.04.01.15.14	Pengawasan dan pengendalian pengembangan perumahan				Jumlah rencana tapak perumahan yang diawasi pelaksanaan pembangunannya	6 perumahan			99,215,950	109,137,545	
1.01.04.1.01.04.01.15.16	Pendampingan CSR Pembangunan / Rehabilitasi RTLH				Jumlah unsur/stakeholder yang berperan serta dalam perbaikan RTLH	1 CSR			14,624,000	16,086,400	
1.01.04.1.01.04.01.15.17	Penyusunan Profil Perumahan				Jumlah dokumen profil bidang PKP	1 dokumen			80,130,300	88,143,330	
1.01.04.1.01.04.01.15.18	Pembuatan Media Layanan Publik Perumahan				Jumlah media pelayanan publikasi perumahan	1 Software			75,906,100	83,496,710	
1.01.04.1.01.04.01.16.	**Program Lingkungan Sehat Perumahan**	**2**	**Persentase rumah bersanitasi layak**	**91.22%**			**Persentase rumah bersanitasi layak**	**91.22%**	**2,861,490,052**	**3,147,639,057**	**DINAS PKP**
1.01.04.1.01.04.01.16.02	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin				Jumlah pembangunan tanki septik individu dan komunal	300 unit			2,055,907,500	2,180,922,370	
1.01.04.1.01.04.01.16.04	Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan				Jumlah penyedotan limbah tinja pada bangunan gedung	550 kali			235,394,952	258,144,647	
1.01.04.1.01.04.01.16.08	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kawasan Permukiman				Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	260 orang			38,118,600	44,896,060	
1.01.04.1.01.04.01.16.09	Pendampingan Program Kota Tanpa Kumuh				Jumlah pelaporan pendampingan untuk pelaksanaan program KOTAKU	1 Laporan			108,061,300	142,787,480	
1.01.04.1.01.04.01.16.11	Verifikasi Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan				Jumlah permohonan PSU perumahan yang diverifikasi	3 dokumen			207,186,500	227,243,500	
1.01.04.1.01.04.01.16.12	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah				Jumlah sarana dan prasarana pelayanan limbah tangki septic	8 unit			61,000,000	122,100,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.04.1.01.04.01.16.13	Pengumpulan, Updating dan Analisa Data Bidang PSU Kawasan Pemukiman (DID)				Jumlah data dan regulasi kawasan permukiman yang dimutahirkan	1 dokumen			155,821,200	171,545,000	
1.01.05.	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								**5,118,620,877**	**8,448,399,207**	
0.00.1.01.1.01.05.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai IKM**	**82.00**	**745,503,416**	**1,697,557,240**	**POLPP DAMKAR**
0.00.1.01.1.01.05.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat				Jumlah benda pos yang dibeli	520 benda pos			3,545,000	3,545,000	
0.00.1.01.1.01.05.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Jumlah rekening air, listrik, telepon yang dibayarkan	3 rekening			13,266,000	16,900,000	
0.00.1.01.1.01.05.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan dinas yang di bayar pajaknya	20 unit			11,650,000	11,650,000	
0.00.1.01.1.01.05.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	13 orang			159,398,000	159,398,000	
0.00.1.01.1.01.05.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Jumlah bahan bahan kebersihan kantor yang di beli	9 jenis			1,165,200	1,735,200	
0.00.1.01.1.01.05.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				Jumlah peralatan kerja yang di perbaiki	3 jenis			6,916,000	14,000,000	
0.00.1.01.1.01.05.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor				Jumlah jenis ATK yang disediakan	52 jenis			10,494,200	12,433,600	
0.00.1.01.1.01.05.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Jumlah barang yang dicetak, digandakan, dijilid	59 buku, 10.000 lbr, 50 jilid			3,260,000	12,433,600	
0.00.1.01.1.01.05.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Jumlah bahan bacaan yang disediakan	1208 eksamplar			2,778,400	6,175,900	
0.00.1.01.1.01.05.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				Jumlah porsi makanan dan minuman / snack yang disediakan	1400 porsi			9,625,000	11,000,000	
0.00.1.01.1.01.05.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	53 kali			232,772,000	319,464,000	
0.00.1.01.1.01.05.01.01.19	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran				Jumlah tenaga non PNS yang disediakan	16 orang			290,633,616	1,128,821,940	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.1.01.1.01.05.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik**	**80.00%**	**415,265,450**	**650,000,000**	**POLPP DAMKAR**
0.00.1.01.1.01.05.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	Roda dua 9 unit, roda empat 6 unit, roda enam 5 unit			415,265,450	650,000,000	
0.00.1.01.1.01.05.01.03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap**	**100.00%**	**198,443,000**	**430,887,750**	**POLPP DAMKAR**
0.00.1.01.1.01.05.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang dibeli	185 stel			198,443,000	430,887,750	
0.00.1.01.1.01.05.01.06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**	**3,800,000**	**15,000,000**	**POLPP DAMKAR**
0.00.1.01.1.01.05.01.06.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik				Jumlah dokumen Perencanaan SKPD dan Dokumen Pelayanan Publik yang disusun	5 dokumen			3,800,000	15,000,000	
1.01.05.1.01.05.01.15.	**Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan**	**4**	**Jumlah Linmas per 10.000 penduduk**	**48**			**Persentase anggota Linmas yang ikut pelatihan**	**100.00%**	**10,000,000**	**10,000,000**	**POLPP DAMKAR**
1.01.05.1.01.05.01.15.	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan				jumlah tenaga linmas yang disiapkan	525 org			10,000,000	10,000,000	
1.01.05.1.01.05.01.16.	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	**4**	**Penegakan Perda**	**100.00%**			**Penegakan Perda**	**100.00%**	**2,749,555,324**	**5,441,080,182**	**POLPP DAMKAR**
1.01.05.1.01.05.01.16.01	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja				Terlaksananya Kegiatan Penegakan Perda, Kep. Kepala Daerah dan penanggulangan Trantibum , terlaksananya Pengamanan Rumah Dinas dan Kantor Serta Aset negara setiap waktu	720 kali, 11 tempat			1,947,359,324	4,065,724,032	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.05.1.01.05.01.16.02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan				Terlaksananya operasional Tim 7 dalam penanggulangan pekat	60 kali			716,076,000	1,104,699,650	
1.01.05.1.01.05.01.16.03	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan (DID)				Jumlah latihan dalmas/beladiri/PBB yang dilaksanakan	48 kali			36,120,000	91,060,000	
1.01.05.1.01.05.01.16.06	Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah (DID)				Jumlah operasional pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan daerah	5 kegiatan			50,000,000	179,596,500	
1.01.05.1.01.05.01.19.	**Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran**	**4**	**Persentase Cakupan pelayanan penanganan kebakaran**	**124.33%**			**Persentase Cakupan pelayanan penanganan kebakaran**	**124.33%**	**996,053,687**	**203,874,035**	**POLPP DAMKAR**
			Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	**40,91%**							
1.01.05.1.01.05.01.19.08	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran (DID)				Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kebakaran	baju 4 set, senter kepala 13 buah			63,622,050	125,000,000	
1.01.05.1.01.05.01.19.11	Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran				Jumlah tabung pemadam kebakaran yang diperiksa	750 set			32,238,500	75,000,000	
1.01.05.1.01.05.01.19.12	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran				Jumlah bahaya kebakaran yang tertangani dan bencana lainnya	168 kali			900,193,137	3,874,035	
1.01.06.	**SOSIAL**								**3,621,578,599**	**3,657,794,385**	
1.01.06.01.01.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai IKM**	**85.00**	**792,329,662**	**800,252,959**	**DINSOS**
1.01.06.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat				Jumlah benda pos, cek giro yang dibeli dan jasa pengiriman yang dibayar	200 lbr matrai, 5 buku cek, 4 kali pengiriman			1,575,000	1,590,750	
1.01.06.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Jumlah rekening air, listrik dan telepon yang dibayarkan	2 rekening, 12 bulan			10,800,000	10,908,000	
1.01.06.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya	15 Kendaraan			14,725,000	14,872,250	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.06.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	24 orang			221,282,450	223,495,275	
1.01.06.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Jumlah bahan-bahan kebersihan kantor yang dibeli, jumlah THL kebersihan yang dibayarkan	23 jenis, 3 orang		100 %	83,075,387	83,906,141	
1.01.06.01.01.09	P.enyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	16 jenis		100 %	16,861,000	17,029,610	
1.01.06.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor				Jumlah jenis ATK yang disediakan	48 jenis		100 %	12,060,000	12,180,600	
1.01.06.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Jumlah barang cetak yang digandakan dan dijilid	11 jenis		100 %	13,572,000	13,707,720	
1.01.06.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	10 jenis			2,439,700	2,464,097	
1.01.06.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Jumlah bahan bacaan yang dibayarkan	2 jenis			3,987,625	4,027,501	
1.01.06.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				Jumlah porsi makanan dan minuman/snack yang disediakan	1690 Porsi			24,082,500	24,323,325	
1.01.06.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah yang dilaksanakan	128 kali dalm daerah, 22 kali luar daerah			387,869,000	391,747,690	
1.01.06.01.02.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik**	**80.00%**	**117,378,800**	**118,552,588**	**DINSOS**
1.01.06.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki dan di service	15 unit			117,378,800	118,552,588	
1.01.06.01.03.	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap**	**100.00%**	**13,500,000**	**13,635,000**	**DINSOS**
1.01.06.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang diadakan	26 stel			13,500,000	13,635,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.06.01.06.	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**	**10,616,775**	**10,722,943**	**DINSOS**
1.01.06.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang di susun	4 dokumen			4,016,775	4,056,943	
1.01.06.01.06.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik				Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelayanan Publik yang Disusun	4 dokumen			6,600,000	6,666,000	
1.01.06.15.	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	**1**	**Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang keluar dari basis data terpadu**	**0.40%**			**Persentase peningkatan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya yang diberdayakan**	**36.00%**	**1,015,109,446**	**1,025,260,540**	**DINSOS**
1.01.06.15.01	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya				Jumlah petugas LKKS dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS	100 orang			34,357,000	34,700,570	
1.01.06.15.06	Bimbingan Sosial Penumbuhan KUBE Fakir Miskin				Jumlah kelompok KUBE yang diberi bantuan	29 kelompok			629,012,500	635,302,625	
1.01.06.15.07	Penanganan Kemiskinan Kesejahteraan Sosial Terpadu				Jumlah pengaduan dan individu (RTS) yang terlayani	73.709 jiwa			31,783,746	32,101,583	
1.01.06.15.08	Operasional Program Keluarga Harapan				Jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan	4178 KPM			319,956,200	323,155,762	
1.01.06.16.	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	**1**	**Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos**	**50.00%**			**Persentase meningkatnya keterampilan anak cacat, anak terlantar termasuk anak jalanan, dan anak nakal**	**85.00%**	**741,456,662**	**748,871,229**	**DINSOS**
			Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	**99.70%**							

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.06.16.04	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal				Jumlah Anak terlantar, anak jalanan dan anak nakal yang difasilitasi balai diklat dan mengikuti pelatihan	10 orang			18,746,100	18,933,561	
1.01.06.16.07	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS				Jumlah penerima Rastra yang termasuk dalam PBDT, dan jumlah peserta sosialisasi BPNT	5745 KK dan 200 orang peserta			118,478,400	119,663,184	
1.01.06.16.08	Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial				jumlah kegiatan verivali data PMKS, BPDT dan PBI JKN yang dilaksanakan	2 kali			541,202,662	546,614,689	
1.01.06.16.10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa				Jumlah orang/mayat terlantar yang ditangani, dan persentase penyelenggaraan cepat tanggap darurat	20 orang, dan 100%			42,272,000	42,694,720	
1.01.06.16.13	Peningkatan Kualitas Hidup Bagi Lanjut Usia Melalui Pemberian Bantuan UEP				Jumlah lanjut usia potensial yang dibantu/menerima UEP	5 orang			20,757,500	20,965,075	
1.01.06.21.	**Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**	**1**	**Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos**	**50.00%**			**Persentase peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial**	**85.00%**	**920,609,504**	**929,815,599**	**DINSOS**
			Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	**99.70%**							
1.01.06.21.03	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat				Jumlah PSM, Karang Taruna, Organisasi Sosial yang terseleksi dan terkirim; Jumlah insentif pekerja sosial yang dibayarkan	150 orang terseleksi dan 5 org terkirim; 133 org Pekerja sosial			447,173,600	451,645,336	
1.01.06.21.04	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial				Jumlah kasus masalah keluarga yang terfasilitasi oleh LK3	120 kasus			56,579,550	57,145,346	
1.01.06.21.05	Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan				Jumlah pelaksanaan sarasehan, temu ramah dan napak tilas	2 kegiatan			89,708,854	90,605,943	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.06.21.06	Pemberdayaan Karang Taruna (DID)				Jumlah pengurus karang taruna yang dibina; dan jumlah tenaga SKKT yang dibayar insentifnya	305 orang pengurus dan 3 orang Tenaga SKKT			327,147,500	330,418,975	
1.01.06.22.	**Program Pemeliharaan dan Rehabilitasi TMP**	**1**	**Persentase terpeliharan ya sarana dan prasarana TMP dan makam mayat terlantar dan shelter orang terlantar yang berhasil dilaksanakan**	**85.00%**			**Persentase terpeliharan ya sarana dan prasarana TMP dan makam mayat terlantar dan shelter orang terlantar yang berhasil dilaksanakan**	**85.00%**	**10,577,750**	**10,683,528**	**DINSOS**
1.01.06.22.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TMP				jumlah sarana prasarana TMP dan makam mayat yerlantar yang dipelihara	3 lokasi			10,577,750	10,683,528	
1.02.	**URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**								**52,741,078,890**	**50,100,672,498**	
1.02.01.	**TENAGA KERJA**								**2,401,414,124**	**4,366,776,057**	
0.00.1.02.1.02.01.01.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai IKM**	**83.00**	**1,263,396,190**	**719,160,842**	**DISNAKERIN**
0.00.1.02.1.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat				Jumlah benda pos dan jasa pengiriman surat	750 lembar			3,900,000	3,902,500	
0.00.1.02.1.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	84 rekening			40,992,000	64,625,000	
0.00.1.02.1.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan yang dibayar pajaknya	10 unit			3,880,000	5,342,500	
0.00.1.02.1.02.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Jumlah jasa pengelola administrasi keuangan yang dibayar	46 orang			291,096,000	115,212,000	
0.00.1.02.1.02.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Jumlah bahan-bahan kebersihan kantor yang dibeli	29 jenis			5,487,325	5,480,000	
0.00.1.02.1.02.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor				Jumlah alat tulis kantor yang dibeli	46 jenis			18,712,453	18,707,250	
0.00.1.02.1.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Jumlah barang cetakan dan penggandaan	8 jenis			28,791,000	26,515,000	
0.00.1.02.1.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	12 jenis			2,502,100	2,515,000	
0.00.1.02.1.02.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Jumlah bahan bacaan/koran yang dibeli	1460 koran			8,760,000	8,760,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.1.02.1.02.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				Jumlah pelayanan makan minum rapat dan tamu yang disediakan	1830 porsi			43,342,000	43,348,000	
0.00.1.02.1.02.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang disediakan	24 kali			707,444,000	274,244,000	
0.00.1.02.1.02.01.01.19	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran				Jumlah honor THL yang dibayarkan	4 orang			108,489,312	150,509,592	
0.00.1.02.1.02.01.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik**	**80.00%**	**168,106,000**	**186,371,968**	**DISNAKERIN**
0.00.1.02.1.02.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional kantor	2 unit roda 4, 11 unit roda 2			135,406,000	153,671,968	
0.00.1.02.1.02.01.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja kantor yang dibayarkan	1. AC 3 unit 2. komputer 6 unit 3. printer 5 unit			9,700,000	9,700,000	
0.00.1.02.1.02.01.01.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur				Jumlah pemeliharaan rutin/berkala meubeiler yang dibayarkan	1. meja kerja 20 unit 2. kursi 10 unit			8,000,000	8,000,000	
0.00.1.02.1.02.01.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor				jumlah perbaikan partisi gedung kantor yang dibayarkan	1 paket			15,000,000	15,000,000	
0.00.1.02.1.02.01.01.03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase ASN berpakaian dinas dengan lengkap**	**100.00%**	**17,550,000**	**18,600,000**	**DISNAKERIN**
0.00.1.02.1.02.01.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Jumlah pakaian dinas berserta perlengkapannya yang diadakan	39 orang			17,550,000	18,600,000	
0.00.1.02.1.02.01.01.06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**	**9,297,000**	**9,384,500**	**DISNAKERIN**
0.00.1.02.1.02.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Jumlah pembuatan LAKIP, LKPJ, LPPD dan Laporan keuangan yang tersusun	4 dokumen laporan			3,513,000	3,546,500	
0.00.1.02.1.02.01.01.06.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik				jumlah dokumen penyusunan SOP, RENJA, IKM dan IPM OPD	4 dokumen laporan			5,784,000	5,838,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.01.1.02.01.01.15.	**Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**1**	**Tingkat pengangguran** **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**	**6.62** **71,30**			**Jumlah tenaga kerja yang berwirausaha;** **jumlah tenaga kerja yang diserap wira usaha**	**59 org;** **88 org**	**322,647,200**	**1,181,291,470**	**DISNAKERIN**
1.02.01.1.02.01.01.15.06	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja				1.Pelatihan Menjahit Tingkat Pengembangan Gorden & Bad Cover 2. Pelatihan menjahit tingkat pengembangan busana 3. Pelatihan elektronik 4. Pelatihan peserta seleksi magang ke jepang	1. 16 orang 2. 16 orang 3. 25 orang 4. 25 orang			322,647,200	1,181,291,470	
1.02.01.1.02.01.01.16.	**Program Peningkatan Kesempatan Kerja**	**1**	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**	**71,30**			**Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan**	**172 org**	**565,712,234**	**2,154,775,777**	**DISNAKERIN**
1.02.01.1.02.01.01.16.02	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja DID)				Jumlah penerima informasi pasar kerja	200 orang			164,421,984	165,896,796	
1.02.01.1.02.01.01.16.04	Penyiapan tenaga kerja siap pakai				Jumlah penempatan tenaga kerja siap pakai	25 orang			215,290,250	318,200,346	
1.02.01.1.02.01.01.16.08	Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Provinsi				Jumlah pembekalan tenaga kerja ke luar provinsi	40 orang			186,000,000	1,670,678,635	
1.02.01.1.02.01.01.17.	**Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**	**1**	**Tingkat pengangguran** **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**	**6.62** **71,30**			**jumlah penurunan angka PHK**	**25 orang**	**54,705,500**	**97,191,500**	**DISNAKERIN**
1.02.01.1.02.01.01.17.02	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial				1. jumlah kasus perselisihan antara pekerja dengan pemberi kerja 2. jumlah pemetaan kerawanan hubungan industrial di perusahaan yang disusun 3. jumlah perusahaan peserta bimtek syarat kerja	1. 10 kasus 2. 25 perusahaan 3. 50 perusahaan			19,727,500	26,025,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.01.1.02.01.01.17.05	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja				1. Jumlah peserta sosialisasi peraturan-peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja 2. jumlah penyuluhan oleh tim terpadu kepatuhan norma ketenagakerjaan	1. 100 pekerja 2. 10 kali			34,978,000	71,166,500	
1.02.02.	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**								**2,116,939,440**	**1,987,842,549**	
0.00.1.02.1.02.02.01.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai IKM**	**87.00**	**785,442,840**	**793,297,268**	**DP3A & P2KB**
0.00.1.02.1.02.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat				Jumlah benda pos, cek giro yang dibeli	296 bh			1,651,000	1,667,510	
0.00.1.02.1.02.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Jumlah rekening air, listrik, telepon yang dibayarkan	3 rekening 12 bulan			36,000,000	36,360,000	
0.00.1.02.1.02.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya	51 unit			10,500,000	10,605,000	
0.00.1.02.1.02.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya dan pengelola barang milik daerah	38 orang; 12 bln			229,787,000	232,084,870	
0.00.1.02.1.02.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Jumlah bahan-bahan kebersihan kantor yang dibeli	24 jenis			7,515,000	7,590,150	
0.00.1.02.1.02.02.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	17 unit			6,000,000	6,060,000	
0.00.1.02.1.02.02.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor				Jumlah jenis ATK yang disediakan	42 jenis			17,764,000	17,941,640	
0.00.1.02.1.02.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Jumlah barang yang dicetak, digandakan, dan dijilid	8 jenis, 44.350 lembar dan 60 buku			13,099,750	13,230,748	
0.00.1.02.1.02.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	7 jenis			2,875,000	2,903,750	
0.00.1.02.1.02.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Jumlah bahan bacaan yang disediakan	2 media cetak			3,821,550	3,859,766	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.1.02.1.02.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				Jumlah porsi makanan dan snack yang disediakan dalam rapat	681 porsi			8,857,500	8,946,075	
0.00.1.02.1.02.02.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah yang dilaksanakan	75 kali dalam daerah, 16 kali luar daerah			209,790,000	211,887,900	
0.00.1.02.1.02.02.01.19	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran				Jumlah tenaga administrasi perkantoran yang dibayarkan honornya	10 orang			237,782,040	240,159,860	
0.00.1.02.1.02.02.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik**	**80.00%**	**256,170,500**	**157,732,205**	**DP3A & P2KB**
0.00.1.02.1.02.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (DID)				Jumlah gedung yang dilakukan pemeliharaan	1 unit			100,000,000	101,000,000	
0.00.1.02.1.02.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas roda dua dan empat	51 Unit			156,170,500	157,732,205	
0.00.1.02.1.02.02.01.03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribu lengkap**	**100.00%**	**25,998,300**	**26,258,283**	**DP3A & P2KB**
0.00.1.02.1.02.02.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang diadakan	54 stel			25,998,300	26,258,283	
0.00.1.02.1.02.02.01.06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**	**2,741,780**	**2,769,198**	**DP3A & P2KB**
0.00.1.02.1.02.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja yang disusun	2 laporan			2,741,780	2,769,198	
1.02.02.1.02.02.01.15.	**Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan**	**4**	**1. IDG 2. Tingkat kategori capaian KLA 3. Persentase kekerasan terhadap anak**	**1. 61,80 2. Madya 3. 0,052%**			**1. Jumlah perwako, himbauan, MoU terkait perlindungan anak 2. Persentase perempuan yang duduk di legislatif 3. persentase kekerasan terhadap anak**	**1. 1 perwako 2. 12.00% 3. 0.052%**	**55,037,000**	**42,218,000**	**DP3A & P2KB**

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.02.1.02.02.01.15.06	Sosialisasi terkait dengan perlindungan anak (DID)				jumlah peserta sosialisasi tentang ABK, ABH dan sosialisasi forum anak	180 org			41,800,000	42,218,000	
1.02.02.1.02.02.01.15.07	Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum dan Sosial				Jumlah perempuan yang mengikuti sosialisasi paemberdayaan perempuan bidang politik, hukum dan sosial	100 orang			13,237,000		
1.02.02.1.02.02.01.16.	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**	**9**	**1. IDG 2. Tingkat kategori capaian KLA 3. Persentase kekerasan terhadap anak 4. Persentase kekerasan terhadap perempuan 5. Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 6. IPG**	**1. 61,80 2. Madya 3. 0,052% 4. 0,074% 5. 95,00% 6. 98,52**			**1. Jumlah kelembagaan PUG 2. Persentase program dan kegiatan yang di PPRG - kan 3. Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak 4. Jumlah Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) 5. Persentase penanganan kasus kekerasan perempuan 6. Persentase kasus penanganan kekerasan anak**	**1. 33 Lembaga 2. 10,00% 3. 610 4. 10 Lembaga 5. 100% 6. 95%**	**540,134,420**	**509,638,849**	**DP3A & P2KB**
1.02.02.1.02.02.01.16.01	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan (DID)				Jumlah peserta PPRG yang mengikuti bimbingan dan pelatihan PPRG	64 orang			30,742,500		
1.02.02.1.02.02.01.16.02	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)				Persentase fasilitasi penanganan kasus oleh P2TP2A	100%			81,182,500	81,994,325	
1.02.02.1.02.02.01.16.05	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak				Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi KLA	54 orang			10,583,620	10,689,456	
1.02.02.1.02.02.01.16.10	Pemberdayaan gerakan PKK				Jumlah PKK aktif	53 klp			412,826,800	416,955,068	
1.02.02.1.02.02.01.16.12	Penyusunan profil gender dan anak				Jumlah dokumen profil data gender dan anak yang disusun	1 dokumen			4,799,000	4,846,990	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.02.1.02.02.01.17.	**Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**	**1**	**IDG**	**61.80**			**1. Persentase pelaku usaha ekonom perempuan 2. Persentase kekerasan terhadap perempuan**	**1. 60,00% 2. 0.074%**	**18,143,500**	**18,324,935**	**DP3A & P2KB**
1.02.02.1.02.02.01.17.01	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah				Jumlah peserta lomba perempuan inspiratif; jenis rangkaian kegiatan hari ibu	15 peserta; 2 jenis			18,143,500	18,324,935	
1.02.02.1.02.02.01.18.	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan**	**1**	**IPG**	**98.52**			**Jumlah organisasi perempuan yang aktif**	**27 Buah**	**433,271,100**	**437,603,811**	**DP3A & P2KB**
1.02.02.1.02.02.01.18.01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan				Jumlah organisasi perempuan yang dibina	27 organisasi			433,271,100	437,603,811	
1.02.03.	**PANGAN**								**1,724,740,679**	**2,187,822,758**	
1.02.03.1.02.03.01.01.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**4**	**Nilai Evaluasi AKIP**	**BB**			**Nilai IKM**	**83.00**	**715,406,765**	**530,898,500**	**DISTAPANG**
1.02.03.1.02.03.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat				Jumlah benda pos materai 6000 ,materai 3000 dan cheque	626 buah			2,669,000	3,140,000	
1.02.03.1.02.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Jumlah rekening jasa telekomunikasi, sumber daya air dan listrik	1. rekening listrik 2. rekening telepon 3. rekening air			23,400,000	23,400,000	
1.02.03.1.02.03.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				Jumlah jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	29 unit			4,800,500	8,987,000	
1.02.03.1.02.03.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2	1. roda empat 2 unit 2. roda dua 6 unit			2,580,000	2,580,000	
1.02.03.1.02.03.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Jumlah jasa pengelolaan administrasi keuangan kantor	32 org			246,348,000	246,348,000	
1.02.03.1.02.03.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				- Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor	21 jenis			2,456,015	2,455,500	
1.02.03.1.02.03.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor				Jumlah alat tulis kantor	34 jenis			10,700,600	14,849,250	
1.02.03.1.02.03.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	86 buku, 330 bh, 18857 lbr, 36 jilid			10,004,400	12,565,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.03.1.02.03.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan gedung	7 jenis			1,711,750	1,711,750	
1.02.03.1.02.03.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	3 unit			14,000,000	30,750,000	
1.02.03.1.02.03.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Jumlah bahan bacaan surat kabar dan majalah	4 media			10,440,000	10,560,000	
1.02.03.1.02.03.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				Jumlah makan minum dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas	730 porsi			10,037,500	12,500,000	
1.02.03.1.02.03.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah				Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	dalam daerah 170 oh; luar daerah 108 oh			376,259,000	161,052,000	
1.02.03.1.02.03.01.02.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**4**	**Nilai Evaluasi AKIP**	**BB**			**% sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik**	**80.00%**	**74,122,600**	**74,122,600**	**DISTAPANG**
1.02.03.1.02.03.01.02.24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional				Jumlah pemeliharaan rutin kendaraaan dinas / operasional roda 4 dan roda 2	1. roda empat 2 unit 2. roda dua 6 unit			74,122,600	74,122,600	
1.02.03.1.02.03.01.03.	**Program Peningkatan Disisplin Aparatur**	**4**	**Nilai Evaluasi AKIP**	**BB**			**% ASN yang berpakaian dinas dengan atribut lengkap**	**100.00%**	**13,500,000**	**15,000,000**	**DISTAPANG**
1.02.03.1.02.03.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang disediakan	30 stel			13,500,000	15,000,000	
1.02.03.1.02.03.01.06.	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**4**	**Nilai Evaluasi AKIP**	**BB**			**Nilai Evaluasi AKIP**	**BB**	**6,968,565**	**13,180,000**	**DISTAPANG**
1.02.03.1.02.03.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Jumlah laporan capaian kinerja dan ihktisar ralisasi kinerja SKPD	3 dokumen			3,404,400	6,650,000	
1.02.03.1.02.03.01.06.07	Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik				Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik	4 dokumen			3,564,165	6,530,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.03.1.02.03.01.	**Program Ketersediaan dan Distribusi Pangan**	**1**	**Stabilisasi Pasokan**	**> 77,00%**			**1. % bahan pangan yang telah memenuhi AKE 2. % cadangan pangan yang tersedia 3. cakupan supply lembaga distribusi pangan 4. Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses**	**1. 88,00% 2. 21,00% 3. 30,00% 4. 35,00%**	**162,244,950**	**557,149,158**	**DISTAPANG**
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) berbasis ketersediaan	**86.00**							
			Stabilisasi harga : beras; cabe; bawang	**<10;<25;<10**							
1.02.03.1.02.03.01.01	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan				Jumlah dokumen buku Neraca Bahan Makanan (NBM) dan buku Pola Pangan Harapan(PPH),	2 dokumen			14,506,000	50,000,000	
1.02.03.1.02.03.01.02	Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok				-Jumlah pemantauan dan analisis Harga Pangan , - Jumlah dokumen perkembangan analisis harga pangan	52 kali, 1 dokumen			8,866,500	47,693,905	
1.02.03.1.02.03.01.03	Pengembangan cadangan pangan daerah (DID)				Jumlah cadangan pangan pemerintah yang diadakan	3 ton			32,788,000	116,364,000	
1.02.03.1.02.03.01.04	Pengembangan desa mandiri pangan				1. jumlah pelaksana desa mandiri pangan tahap pengembangan 2. jumlah desa mandiri pangan lanjutan yang dipinta	1 kelompok, 4 kelurahan			43,156,000	116,401,253	
1.02.03.1.02.03.01.05	Koordinasi pengawalan pembinaan dan pemantauan distribusi pangan masyarakat (LDPM)				Jumlah koordinasi dan pembinaan LDPM, PUPM/TTI dan LPM	20 kali			8,892,000	75,464,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.03.1.02.03.01.06	Koordinasi pengkajian perumusan kebijakan ketahanan pangan (DID)				- Jumlah Rakor Dewan Ketahanan Pangan , - Jumlah Lomba Ketahanan Pangan (APN) Tahun 2018, - Jumlah Peringatan HPS yang diikuti	2 kali, 2 kali, 1 kali			54,036,450	151,226,000	
1.02.03.1.02.03.02.	**Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan**	**1**	**Tingkat Keamanan Pangan** **Skor PPH Konsumsi**	**sedang** **82**			**1. % masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE** **2. % penurunan konsumsi beras** **3. % bahan pangan yang aman dikonsumsi**	**1. 45%** **2. 5%** **3. 82%**	**752,497,799**	**997,472,500**	**DISTAPANG**
1.02.03.1.02.03.02.01	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan				- Jumlah kelompok peserta sekolah lapang optimalisasi pekarangan , - Jumlah KWT penerima bantuan benih sayuran,polybag dan kompos, -Jumlah dasawisma penerima bantuan benih sayuran,polybag dan kompos, -Jumlah kelurahan percontohan KRPL , - jumlah buku PPH Konsumsi	5 KWT, 20 KWT, 40 Dasawisma, 3 kelurahan , 1 dok			638,417,500	550,000,000	
1.02.03.1.02.03.02.02	Peningkatan mutu dan keamanan pangan (DID)				- Jumlah Lomba Cipta Menu Tingkat Kota dan tingkat Provinsi, - Jumlah uji sampel pangan segar yahg beredar di masyarakat, - Jumlah peserta sosialisasi pangan B2SA, - Jumlah peserta sosialisasi keamanan	2 kali, 47 kali, 30 orang, 30 orang			75,776,000	374,652,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.03.1.02.03.02.03	Pengembangan dan pembinaan Pangan Lokal Non Beras Non Terigu				- Jumlah peserta pelatihan pengembangan pangan lokal non beras non terigu, - Jumlah lomba pengolahan pangan lokal non beras non terigu	30 org, 1 kali			38,304,299	72,820,500	
1.02.04.	**PERTANAHAN**								**50,340,000**	**131,250,000**	
1.02.04.1.01.03.01.16.	**Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**	**3**	**Persentase sertifikasi aset tanah dan bangunan pemko**	**59.55%**			**Persentase sertifikasi aset tanah dan bangunan pemko**	**59.55%**	**50,340,000**	**131,250,000**	**PUPR**
1.02.04.1.01.03.01.16.01	Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah				Jumlah aset tanah yang disertifikatkan	3 bidang			50,340,000	131,250,000	
1.02.05.	**LINGKUNGAN HIDUP**								**10,311,008,642**	**14,255,691,229**	
0.00.1.02.1.02.05.01.01.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai IKM**	**81.00**	**1,568,811,363**	**1,226,980,867**	**DLH**
0.00.1.02.1.02.05.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat				Jumlah benda pos, cek giro yang dibeli dan jasa pengiriman surat yang dibayarkan	Cek giro 18 buku Materai 3000 210 lembar Materai 6000 100 lembar Pengiriman 10			2,257,500	2,575,000	
0.00.1.02.1.02.05.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Jumlah rekening air, listrik dan telepon yang dibayarkan	5 rekening			52,800,000	52,800,000	
0.00.1.02.1.02.05.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	33 unit			8,000,000	10,035,200	
0.00.1.02.1.02.05.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan & Perizinan kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan yang dibayar pajaknya	Roda 6 = 18 unit Roda 4 = 7 unit Becak motor = 16 unit Roda 2 = 14 unit			46,850,000	46,850,000	
0.00.1.02.1.02.05.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	39 orang			275,180,500	283,930,500	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.1.02.1.02.05.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Tersedianya peralatan kebersihan kantor taman kota	1 tahun			342,110,273	383,163,506	
0.00.1.02.1.02.05.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor				Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	59 jenis			16,371,000	13,785,000	
0.00.1.02.1.02.05.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Jumlah barang yang dicetak, digandakan dan diijilid	13 jenis			13,436,000	12,554,000	
0.00.1.02.1.02.05.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	4 jenis			1,207,500	2,415,000	
0.00.1.02.1.02.05.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Jumlah bahan bacaan yang disediakan	3 media			3,168,000	3,600,000	
0.00.1.02.1.02.05.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				Jumlah porsi makan dan minuman/snack yang disediakan	890 porsi			9,700,000	9,700,000	
0.00.1.02.1.02.05.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah				Jumlah rapat-rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah yang dilaksanakan	73 kali			527,730,000	103,172,000	
0.00.1.02.1.02.05.01.01.19	Penyediaan tenaga administrasi/teknis perkantoran				Jumlah honorarium, upah dan premi asuransi yang dibayarkan	46 orang			270,000,590	302,400,661	
0.00.1.02.1.02.05.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik**	**80.00%**	**151,738,000**	**157,238,000**	**DLH**
0.00.1.02.1.02.05.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor	1 paket			20,000,000	20,000,000	
0.00.1.02.1.02.05.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	18 unit			131,738,000	137,238,000	
0.00.1.02.1.02.05.01.03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap**	**100%**	**153,930,000**	**154,565,000**	**DLH**
0.00.1.02.1.02.05.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	294 stel			153,930,000	154,565,000	
0.00.1.02.1.02.05.01.06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**	**12,892,850**	**8,629,700**	**DLH**

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.1.02.1.02.05.01.06.01	Penyusunan laporan pencapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan Realisasi keuangan yang dihasilkan	5 dokumen			2,411,350	2,693,600	
0.00.1.02.1.02.05.01.06.06	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah				Jumlah dokumen informasi yang disebarkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	1 dokumen			8,635,000	2,693,600	
0.00.1.02.1.02.05.01.06.07	Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik				Jumlah dokumen perencanaan dan pelayanan publik	4 dokumen			1,846,500	3,242,500	
1.02.05.1.02.05.01.15.	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	**4**	**Persentase cakupan pelayanan persampahan**	**91.22%**			**Persentase cakupan pelayanan persampahan**	**91.22%**	**5,609,711,307**	**8,562,255,000**	**DLH**
1.02.05.1.02.05.01.15.02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan				Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang diadakan	46 unit 15 jenis			272,935,000	1,292,235,000	
1.02.05.1.02.05.01.15.04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan				Operasional Tenaga Kebersihan dan Operasional Sarana Kebersihan	9 bulan			4,991,026,307	6,898,759,000	
1.02.05.1.02.05.01.15.05	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan				Jumlah peserta pelatihan pengolahan sampah dan bank sampah	60 orang			126,289,000	110,000,000	
1.02.05.1.02.05.01.15.11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan				- Jumlah masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Program Pengolahan Persampahan - Berfungsinya TPST dan berjalannya Program duta Zero Waste di Kota Payakumbuh	100 masyarakat dan pelajar 6 unit 10 orang			218,461,000	260,261,000	
1.02.05.1.02.05.01.15.13	Pembangunan incenerator sampah (DID)				Jumlah unit incenerator yang dibangun	1 unit			1,000,000	1,000,000	
1.02.05.1.02.05.01.16.	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	**3**	**Persentase Usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup**	**46.03%**			**Persentase Usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup**	**46.03%**	**240,198,500**	**664,018,000**	**DLH**
1.02.05.1.02.05.01.16.01	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura				Jumlah koordinasi dan penilaian Kota Sehat/Adipura yang diikuti	3 Kali			97,653,500	250,000,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.05.1.02.05.01.16.03	Pemantauan kualitas lingkungan				- Jumlah titik pantau kualitas air - Jumlah Peserta Sosialisasi Penurunan beban pencemaran lingkungan	60 titik pantau dan 30 peserta			46,147,000	150,000,000	
1.02.05.1.02.05.01.16.04	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup				Jumlah pengawasan rutin dan verifikasi pengaduan pencemaran lingkungan hidup yang dilaksanakan	75 usaha dan 15 kasus			16,501,000	46,881,000	
1.02.05.1.02.05.01.16.07	Pengkajian Dampak Lingkungan				Jumlah izin lingkungan dan SPPL Usaha/Kegiatan yang diterbitkan	120 dokumen			3,647,000	33,473,000	
1.02.05.1.02.05.01.16.21	Penyusunan RPPLH				Jumlah dokumen teknis RPPLH	1 buku			76,250,000	183,664,000	
1.02.05.1.02.05.01.19.	**Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**	**3**	**Persentase sekolah adiwiyata**	**72.00%**			**Persentase sekolah adiwiyata**	**72.00%**	**51,745,500**	**136,794,000**	**DLH**
1.02.05.1.02.05.01.19.01	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan				Jumlah program penilaian Sekolah Adiwiyata serta program penilaian Lingkungan Hidup lainnya	35 sekolah			41,271,500	75,000,000	
1.02.05.1.02.05.01.19.02	Pengembangan data dan informasi lingkungan				Jumlah Dokumen Data dan Informasi Lingkungan	2 dokumen			10,474,000	61,794,000	
1.02.05.1.02.05.01.17.	**Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**	**3**	**Persentase Usaha yang memenuhi baku mutu**	**46.03%**			**Jumlah dokumen informasi lingkungan yang**	**5 dokumen**	**183,982,000**	**260,000,000**	**DLH**
1.02.05.1.02.05.01.17.01	Konservasi SDA dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air (DID)				Penanaman pohon pelindung sebagai penahan erosi pada Daerah Aliran Sungai (DAS) dan sumber Daya Air lainnya di Kota Payakumbuh	300 batang 100 batang			107,860,000	150,000,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.05.1.02.05.01.17.05	Pengendalian dampak perubahan iklim (DID)				Jumlah peserta sosialisasi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim - Aparatur Kelurahan - LPK Kelurahan - Kelompok masyarakat	48 orang 48 orang 48 orang			21,712,000	50,000,000	
1.02.05.1.02.05.01.17.06	Pengendalian kerusakan hutan dan lahan				Dokumen laporan informasi kerusakan tanah	1 buku			54,410,000	60,000,000	
1.02.05.1.02.05.01.20.	**Program Peningkatan Pengendalian Polusi**	**3**	**Indeks Kualitas Air**	**75.00**			**Indeks Kualitas Air**	**75.00**	**722,549,501**	**824,111,601**	**DLH**
			Indeks Kualitas udara	**80.00**			**Indeks Kualitas udara**	**80.00**			
1.02.05.1.02.05.01.20.02	Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri (DID)				Jumlah titik pantau kualitas udara ambien di Kota Payakumbuh	4 lokasi			141,422,425	158,393,116	
1.02.05.1.02.05.01.20.03	Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair				Jumlah personil laboratorium yang dilatih pada in house training peningkatan kapasitas personil laboratorium	10 peserta			28,358,200	31,761,184	
1.02.05.1.02.05.01.20.05	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran				Jumlah peserta penyuluhan pengelolaan lingkungan hidup	100 orang			35,782,000	54,932,000	
1.02.05.1.02.05.01.20.07	Pengadaan peralatan laboratorium (DID)				Jumlah alat laboratorium kimia dan alat keselamatan yang diadakan	1 paket alat kimia laboratorium 1 paket alat keselamatan			150,337,500	168,378,000	
1.02.05.1.02.05.01.20.08	Operasional UPTD Laboratorium Lingkungan (DID)				Jumlah parameter kualitas air yang dapat diuji dan terpenuhinya jaminan mutu pengujian	10 Parameter			366,649,376	410,647,301	
1.02.05.1.02.05.01.24.	**Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**	**3**	**Persentase RTH Publik**	**16.25%**			**Persentase RTH Publik**	**16.25%**	**1,615,449,621**	**2,261,099,061**	**DLH**
1.02.05.1.02.05.01.24.05	Penataan RTH (DID)				Penataan taman pinggir kota	60m'			156,080,000	170,000,000	
1.02.05.1.02.05.01.24.06	Pemeliharaan RTH				- Pemeliharaan RTH dan Taman kota - RTH Jalur Hijau Jalan	10 lokasi 12 Ruas jalan			1,414,369,621	2,046,099,061	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.05.1.02.05.01.24.09	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH				Pemberian bibit pohon pelindung dan tanaman hias untuk sekolah, pemukiman, perkantoran, puskesmas, pasar, terminal dan taman kota	800 batang			45,000,000	45,000,000	
1.02.06.	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**								**1,591,883,000**	**1,607,508,765**	
0.00.1.02.1.02.06.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai IKM**	**87.00**	**721,426,750**	**728,641,018**	**DISDUKCAPIL**
0.00.1.02.1.02.06.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat				Jumlah benda pos, cek giro yang dibeli dan jasa pengiriman yang dibayar	50 prangko,600 matrai dan 2 kali pengiriman			4,775,000	4,822,750	
0.00.1.02.1.02.06.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Jumlah rekening air, listrik, telepon dan internet yang dibayar	4 Rekening			119,200,000	120,392,000	
0.00.1.02.1.02.06.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya	13 unit			5,350,000	5,403,500	
0.00.1.02.1.02.06.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	31 orang			201,530,075	203,545,376	
0.00.1.02.1.02.06.01.01.08	P.enyediaan jasa kebersihan kantor				Jumlah bahan-bahan kebersihan kantor yang dibeli dan Jumlah tenaga kebersihan kantor yang dibayar	15 jenis dan 1 orang			31,193,200	31,505,132	
0.00.1.02.1.02.06.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	55 unit			14,000,000	14,140,000	
0.00.1.02.1.02.06.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor				Jumlah jenis ATK yang disediakan	45 jenis			26,579,475	26,845,270	
0.00.1.02.1.02.06.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Jumlah barang yang digandakan, dijilid, dan spanduk yang dibeli	12.000 lbr FC, 200 jilid dan 70 bh spanduk			6,696,000	6,762,960	
0.00.1.02.1.02.06.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	6 jenis			4,764,000	4,811,640	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.1.02.1.02.06.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				Jumlah peralatan dan perlengakapan kantor yang diadakan	13 jenis			67,050,000	67,720,500	
0.00.1.02.1.02.06.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Jumlah bahan bacaan yang disediakan	3 jenis			11,204,000	11,316,040	
0.00.1.02.1.02.06.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				Jumlah porsi makanan dan minuman/snack yang disediakan	535 porsi			11,612,500	11,728,625	
0.00.1.02.1.02.06.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan	15 kali dalam daerah, 13 kali luar daerah			191,128,000	193,039,280	
0.00.1.02.1.02.06.01.01.19	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran				Jumlah tenaga adm/ teknik yang dibayarkan	1 orang			26,344,500	26,607,945	
0.00.1.02.1.02.06.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik**	**80.00%**	**192,378,250**	**194,302,033**	**DISDUKCAPIL**
0.00.1.02.1.02.06.01.02.03	Pembangunan gedung kantor (DID)				Jumlah bangunan yang dibangun	1 unit			26,268,000	26,530,680	
0.00.1.02.1.02.06.01.02.10	Pengadaan mebeleur				Jumlah mebeleur yang diadakan	2 jenis			11,500,000	11,615,000	
0.00.1.02.1.02.06.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Jumlah item bangunan yang dipelihara	2 jenis			35,000,000	35,350,000	
0.00.1.02.1.02.06.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	13 unit			119,610,250	120,806,353	
0.00.1.02.1.02.06.01.03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribu lengkap**	**100.00%**	**22,686,000**	**22,912,860**	**DISDUKCAPIL**
0.00.1.02.1.02.06.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang diadakan	37 Paket			22,686,000	22,912,860	
0.00.1.02.1.02.06.01.06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**	**21,433,000**	**21,647,330**	**DISDUKCAPIL**
0.00.1.02.1.02.06.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan yang dihasilkan	4 dokumen			10,013,000	10,113,130	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.1.02.1.02.06.01.06.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik				Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik yang disusun	4 dokumen			11,420,000	11,534,200	
1.02.06.1.02.06.01.15.	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	**4**	**Persentase Penduduk Yang Memiliki Dokumen Kependudukan**	**79,25**			**Cakupan kepemilikan Kartu keluarga**	**100.00%**	**633,959,000**	**640,005,525**	**DISDUKCAPIL**
							Cakupan kepemilikan KTP-el	**88.00%**			
							Cakupan kepemilikan akte kelahiran usia 1-18 th	**89.00%**			
							cakupan penerbitan akta kematian	**40.00%**			
							Persentase penyelesaian penerbitan dokumen kependudukan tepat waktu	**90.00%**			
							Rata-rata lama waktu penyelesaian pengurusan dokumen kependudukan (SOP)	**1 hari**			
1.02.06.1.02.06.01.15.06	Pengolahan dalam penyusunan Laporan Informasi Pencatatan Sipil (DID)				Jumlah dokumen laporan yang disusun dan jumlah dokumen arsip capik yang didigitalisasikan	12 dokumen dan 2500 berkas			42,452,000	42,876,520	
1.02.06.1.02.06.01.15.08	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan				jumlah KK yang didata dan jumlah penerbitan KK penduduk dalam bentuk format	32.375 KK dan 9.300 lbr			247,260,125	249,732,726	
1.02.06.1.02.06.01.15.14	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				Jumlah dokumen lapoarn yang dihasilkan	12 laporan			28,666,100	28,952,761	
1.02.06.1.02.06.01.15.15	Pelayanan Publik Dalam Bidang Pencatatan Sipil				jumlah akta yang diterbitkan	3.500 lbr			215,968,000	218,127,680	
1.02.06.1.02.06.01.15.18	Pengelolaan Arsip dokumen kependudukan				Jumlah pencetakan dokumen kependudukan	19.000 dokumen kependudukan			29,306,500	29,306,500	
1.02.06.1.02.06.01.15.49	Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Berstandar ISO 9001-2015 ISO 9001-2015				Jumlah kerjasama terkait ISO 9001: 2015	2 kerjasama			70,306,275	71,009,338	
1.02.08.	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**								**1,391,579,700**	**1,405,233,447**	
1.02.08.1.02.02.01.15.	**Program Keluarga Berencana**	**1**	**CPR**	**76.90%**			**Unmeet Need**	**11.13**	**306,682,100**	**309,486,871**	**DP3A & P2KB**

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Cakupan pelayanan program KKBPK	**80.00%**							
1.02.08.1.02.02.01.15.01	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin				Jumlah kegiatan momentum strategis dengan mita kerja KB	3 momentum strategis			45,075,100	45,525,851	
1.02.08.1.02.02.01.15.05	Pembinaan Keluarga Berencana				Jumlah kader KB yang mendapatkan pembinaan	280 orang			235,402,000	237,756,020	
1.02.08.1.02.02.01.15.08	Pengembangan Model parameter kependudukan (DID)				Jumlah dokumen parameter dan profil kependudukan yang disusun	1 dokumen			26,205,000	26,205,000	
1.02.08.1.02.02.01.17.	**Program pelayanan kontrasepsi**	**1**	**CPR**	**76.90%**			**Cakupan peserta KB Aktif**	**76.61%**	**23,193,500**	**23,425,435**	**DP3A & P2KB**
1.02.08.1.02.02.01.17.01	Pelayanan konseling KB				Jumlah faskes KB yang memberikan pelayanan KB	40 klinik faskes KB			23,193,500	23,425,435	
1.02.08.1.02.02.01.22.	**Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak**	**1**	**Cakupan pelayanan program KKBPK**	**80.00%**			**Persentase BKB aktif**	**100.00%**	**344,649,100**	**348,095,591**	**DP3A & P2KB**
1.02.08.1.02.02.01.22.01	Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak				Jumlah kader BKB yang dibayar biaya operasionalnya	380 orang			344,649,100	348,095,591	
1.02.08.1.02.02.01.24.	**Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU**	**1**	**Cakupan pelayanan program KKBPK**	**80.00%**			**Persentase posyandu dengan strata mandiri**	**70.00%**	**717,055,000**	**724,225,550**	**DP3A & P2KB**
1.02.08.1.02.02.01.24.02	Fasilitasi Penyelenggaraan PMTAS dan Posyandu (DID + DAU)				Jumlah sekolah penerima PMTAS; Jumlah kader posyandu yang mendapatkan pembinaan	10 sekolah; 660 kader			717,055,000	724,225,550	
1.02.09.	**PERHUBUNGAN**								**3,412,090,359**	**3,896,498,702**	
0.00.1.02.1.02.09.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai IKM**	**92.00**	**1,449,598,568**	**1,448,652,352**	**DISHUB**
0.00.1.02.1.02.09.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat				Tersedianya benda pos, cek giro yang dibeli dan jasa pengiriman surat	Materai 3.000=50 lbr,Materai 6.000=75lbr,Cek=			1,075,000	1,075,000	
0.00.1.02.1.02.09.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Jumlah rekening air,listrik,telepon yang dibayarkan	7 Rekening, 12 bulan			25,200,000	25,200,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.1.02.1.02.09.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya	2 unit Bus, 7 unit Mobil Dinas, 13 Unit Roda Dua			12,380,000	12,380,000	
0.00.1.02.1.02.09.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	21 orang			210,304,000	136,148,000	
0.00.1.02.1.02.09.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Tersedianya bahan-bahan kebersihan kantor yang dibeli	14 jenis, 1 petugas kebersihan			23,141,820	25,442,776	
0.00.1.02.1.02.09.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan kantor	6 jenis			3,632,000	3,632,000	
0.00.1.02.1.02.09.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor				Jumlah Jenis ATK yang disediakan	41 jenis			14,239,000	21,079,000	
0.00.1.02.1.02.09.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Jumlah barang yang dicetak, digandakan dan dijilid	13 jenis, 39.646 lembar, 30 buku			30,038,500	30,038,500	
0.00.1.02.1.02.09.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	10 jenis			931,000	931,000	
0.00.1.02.1.02.09.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Tersedianya bahan bacaanyang disediakan	720 exp			4,320,000	4,320,000	
0.00.1.02.1.02.09.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				Jumlah porsi makan, dan minum/ snack yang disediakan	281 bungkus, 284 porsi			7,750,000	7,750,000	
0.00.1.02.1.02.09.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah yang dilaksanakan	40 kali (DD), 12 kali (LD)			173,132,000	105,100,000	
0.00.1.02.1.02.09.01.01.19	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran				Jumlah tenaga adm/teknik perkantoran yang dibayarkan	43 orang			943,455,248	1,075,556,076	
0.00.1.02.1.02.09.01.02.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik**	**80.00%**	**311,138,050**	**313,138,050**	**DISHUB**

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.1.02.1.02.09.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	2 unit bus; 7 unit mobil dinas;13 unit roda dua			309,938,050	311,938,050	
0.00.1.02.1.02.09.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Jumlah peralatan gedung kantor	1 jenis			1,200,000	1,200,000	
0.00.1.02.1.02.09.01.03.	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap**	**100.00%**	**129,950,000**	**130,710,000**	**DISHUB**
0.00.1.02.1.02.09.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang diadakan	89 stel, 25 petugas parkir			129,950,000	130,710,000	
0.00.1.02.1.02.09.01.06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**	**6,823,500**	**8,573,500**	**DISHUB**
0.00.1.02.1.02.09.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Tersedianya dokumen Lakip, LKPJ, EKPPD, LPPD bidang perhubungan	2 dokumen			1,153,500	1,153,500	
0.00.1.02.1.02.09.01.06.06	Penyebarluasan dan Publikasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD				Terlaksananya koordinasi antarpemerintah kota payakumbuh dengan mass media terhadap penyebaran informasi	1 paket			5,000,000	6,750,000	
0.00.1.02.1.02.09.01.06.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik				Tersedianya dokumen Renja dan Renstra	2 dokumen			670,000	670,000	
1.02.09.1.02.09.01.16.	**Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ**	**3**	**Persentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas**	**73.25%**			**Persentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas**	**73.25%**	**115,889,000**	**123,269,000**	**DISHUB**
1.02.09.1.02.09.01.16.01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor				Terlaksananya perawatan dan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor	1 tahun			56,840,000	56,840,000	
1.02.09.1.02.09.01.16.05	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas				Terlaksananya pemeliharaan prasarana dan kelengkapan lalu lintas	1 Tahun			59,049,000	66,429,000	
1.02.09.1.02.09.01.18.	**Program Pembangunan Sarana dan Prsarana Perhubungan**	**3**	**Persentase ketersediaan terminal angkutan penumpang**	**70.75**			**Persentase Ketersediaan Fasilitasi Umum**	**83.33%**	**100,000,000**	**0**	**DISHUB**

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.09.1.02.09.01.18.01	Pembangunan gedung terminal				Terlaksananya studi kelayakan pembanguna terminal angkutan barang	1 dokumen			100,000,000	0	
1.02.09.1.02.09.01.17.	**Program peningkatan pelayanan angkutan**	**3**	**Persentase masyarakat yang menggunakan sarana angkutan umum**	**67.48%**			**Persentase masyarakat yang menggunakan sarana angkutan umum**	**67.48%**	**335,767,950**	**852,228,800**	**DISHUB**
			Jumlah rute pelayanan angkutan umum dalam kota	**13 Trayek**							
1.02.09.1.02.09.01.17.02	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan (DID)				Terikutinya kegiatan Wahana Tata Nugraha Tingkat Nasional	1 kali event			54,705,950	116,059,000	
1.02.09.1.02.09.01.17.06	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal (DID)				Terlaksananya pengawasan dan penertiban di lingkungan terminal	1 tahun			140,487,000	449,369,800	
1.02.09.1.02.09.01.17.15	Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan				Terlaksananya pemilihan sopir, awak dan juru mudi teladan	2 orang			7,939,000	19,259,000	
1.02.09.1.02.09.01.17.16	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan				Jumlah PAM Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1 tahun			126,636,000	259,591,000	
1.02.09.1.02.09.01.17.18	Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan				Terlaksananya pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	1 X			6,000,000	7,950,000	
1.02.09.1.02.09.01.19.	**Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas**	**3**	**Persentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas**	**73,23%**			**Persentase ruas jalan yang dilengkapi fasilitas pendukung jalan**	**80.00%**	**539,066,291**	**429,990,000**	**DISHUB**
1.02.09.1.02.09.01.19.01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas				Terpasangnya rambu lalu lintas	76 buah			67,146,291	143,330,000	
1.02.09.1.02.09.01.19.02	Pengadaan marka jalan				Jumlah Marka ZOS	1 Paket			330,000,000	143,330,000	
1.02.09.1.02.09.01.19.04	Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL)				Terpasangnya warning light	4 Tiang			141,920,000	143,330,000	
1.02.09.1.02.09.01.20.	**Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor**	**3**	**Persentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas**	**73,23%**			**Persentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas**	**73.25%**	**102,900,000**	**260,460,000**	**DISHUB**
1.02.09.1.02.09.01.20.04	Penyediaan bahan operasional pengujian kendaraan bermotor				Tersedianya bahan operasional pengujian kendaraan bermotor	1 tahun			102,900,000	260,460,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.09.1.02.09.01.21.	**Program pengendalian, pengamanan, dan peningkatan pelayanan parkir**	**3**	**Nilai survey IKM pelayanan transportasi**	**92.28**			**Persentase peningkatan pelayanan parkir**	**69.00%**	**320,957,000**	**329,477,000**	**DISHUB**
1.02.09.1.02.09.01.21.01	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan parkir				Jumlah petugas pemungut parkir	25 juru parkir			320,957,000	329,477,000	
1.02.10.	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								**7,766,742,214**	**7,834,734,099**	
0.00.1.02.1.02.10.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai IKM**	**92.00**	**1,205,020,233**	**1,709,600,708**	**DISKOMINFO**
0.00.1.02.1.02.10.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat				Jumlah benda pos dan cek giro yang dibeli	Materai 220 lembar, Cek 5 buku			1,960,000	1,960,000	
0.00.1.02.1.02.10.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Jumlah rekening air, listrik dan telepon yang dibayarkan	3 rekening			3,000,000	254,800,000	
0.00.1.02.1.02.10.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajak	14 unit			15,900,000	16,960,000	
0.00.1.02.1.02.10.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	17 orang			445,664,000	684,194,000	
0.00.1.02.1.02.10.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Jumlah bahan-bahan kebersihan yang dibeli	19 jenis			33,032,404	33,032,404	
0.00.1.02.1.02.10.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor				Jumlah jenis ATK yang disediakan	32 jenis			25,067,725	25,069,000	
0.00.1.02.1.02.10.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Jumlah barang yang dicetak, digandakan, dan dijilid	8 jenis, 50000 lbr, 190 buku			13,358,750	14,361,000	
0.00.1.02.1.02.10.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Jumlah alat-alat listrik yang dibeli	9 jenis			2,502,550	2,504,500	
0.00.1.02.1.02.10.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Jumlah buku dan majalah yang dibeli	8 buku			1,720,000	4,000,000	
0.00.1.02.1.02.10.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				Jumlah porsi makanan dan snack yang disediakan	900 porsi			11,750,000	11,750,000	
0.00.1.02.1.02.10.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan	42 kali dalam daerah, 26 kali luar daerah			624,110,000	634,015,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.1.02.1.02.10.01.01.19	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran				Jumlah tenaga adm/teknis perkantoran yang dibayarkan	7 orang			26,954,804	26,954,804	
0.00.1.02.1.02.10.01.02.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik**	**80.00%**	**246,541,800**	**237,961,800**	**DISKOMINFO**
0.00.1.02.1.02.10.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	4 unit roda 4, 8 unit roda 2			233,216,800	224,636,800	
0.00.1.02.1.02.10.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	15 unit computer, 7 unit printer, 18 bh meja kerja, 18 bh kursi kerja			13,325,000	13,325,000	
0.00.1.02.1.02.10.01.03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap**	**100%**	**27,000,000**	**27,000,000**	**DISKOMINFO**
0.00.1.02.1.02.10.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang disediakan	40 stel			27,000,000	27,000,000	
0.00.1.02.1.02.10.01.06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**	**3,859,450**	**3,859,450**	**DISKOMINFO**
0.00.1.02.1.02.10.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Jumlah laporan pemerintah daerah yang disusun	4 dokumen			1,840,350	1,840,350	
0.00.1.02.1.02.10.01.06.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik				Jumlah OPD yang disusun	4 dokumen			2,019,100	2,019,100	
1.02.10.1.02.10.01.15.	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**4**	**Persentase perangkat daerah yang telah terintegrasi TI**	**45.16%**			**Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan aplikasi pemerintahan yang terintegrasi**	**50.00%**	**113,362,000**	**113,362,000**	**DISKOMINFO**
1.02.10.1.02.10.01.15.09	Pemberdayaan Kelompok Komunitas Kreatif melalui PUSKOM				Terlaksananya pembinaan, pelatihan serta peningkatan SDM kelompok kreatif masyarakat Kota Payakumbuh	6 kelompok pelajar, 4 non pelajar			113,362,000	113,362,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.10.1.02.10.01.18.	**Program kerjasama informasi dan media massa**	**4**	**Persentase perangkat daerah yang telah terintegrasi TI**	**45.16%**			**Persentase PD yang menyebarkan informasi melalui media**	**50.00%**	**2,114,056,392**	**2,329,228,260**	**DISKOMINFO**
1.02.10.1.02.10.01.18.01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah				Terlaksananya peliputan semua kegiatan Pemko	27 baliho, 1728 milis, 15 berita, 4 edisi tabloid			1,513,189,892	1,728,361,760	
1.02.10.1.02.10.01.18.02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah				Terlaksananya kegiatan peliputan dan ekspose ke media elektronik dan media cetak di Sumatera Barat	50 lepsus harian			600,866,500	600,866,500	
1.02.10.1.02.10.01.19.	**Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi**	**4**	**Persentase perangkat daerah yang telah terintegrasi TI**	**45.16%**			**Persentase layanan yang terintegrasi TIK**	**50.00%**	**4,056,902,339**	**5,392,143,839**	**DISKOMINFO**
1.02.10.1.02.10.01.19.01	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik (DID)				Terlaksananya pengelolaan informasi layanan publik	1 buah website			10,293,500	236,637,000	
1.02.10.1.02.10.01.19.02	Pengembangan sistem informasi				Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan aplikasi system informasi pemerintah Kota Payakumbuh	2 aplikasi dan 1 data center			1,519,719,000	1,602,219,000	
1.02.10.1.02.10.01.19.03	Pengembangan pembangunan infrastruktur e-Goverment Kota Payakumbuh				Terlaksananya pengelolaan jaringan Fiber Optic dan pemasangan jaringan Wireless di Pemko Payakumbuh	15 titik Hotspot			2,241,880,000	2,291,480,000	
1.02.10.1.02.10.01.19.04	Pelaksanaan persandian dan pengelolaan panggioan darurat call center 112 (DID)				Terlaksanannya pengamanan informasi berklasifikasi (persandian) dan operasional layanan panggilan darurat (emergency call) 112 di Kota Payakumbuh	1 Kegiatan			68,629,064	97,679,064	
1.02.10.1.02.10.01.19.05	Pengembangan sumber daya manusia pengelola TIK (DID)				Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan pengembangan SDM	70 orang			61,594,000	79,834,000	
1.02.10.1.02.10.01.19.06	Pembangunan dan pengelolaan data center (DID)								100,000,000	1,000,000,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.10.1.02.10.01.19.07	Monitoring dan evaluasi keamanan informasi dan layanan help desk (DID)								54,786,775	84,294,775	
1.02.11.	**KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**								**2,851,949,910**	**553,769,260**	
0.00.1.02.1.02.11.0101	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai IKM**	**81.00**	**2,104,461,410**	**2,109,304,900**	**DKUKM**
0.00.1.02.1.02.11.0101.01	Penyediaan jasa surat menyurat				Jumlah Benda Pos, Cek Giro yang Dibeli dan Jasa Pengiriman yang Dibayar	1151 materai dan 5 paket pengiriman			5,325,000	5,325,000	
0.00.1.02.1.02.11.0101.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Jumlah Rekening Air, Listrik, Telepon yang Dibayarkan	4 rek. listrik, 3 rek. air dan 3 rek. Telepon			75,600,000	92,400,000	
0.00.1.02.1.02.11.0101.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah				Jumlah Bangunan Pasar Berupa Toko, Kios dan Los yang Dibayarkan Premi Asuransi Toko	8 Blok (paket)			162,585,000	162,585,000	
0.00.1.02.1.02.11.0101.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibayar Pajak	5 kendaraan roda 4, 27 kendaraan roda 2			14,500,000	14,500,000	
0.00.1.02.1.02.11.0101.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan yang Dibayarkan Jasanya	50 org			286,308,000	285,673,000	
0.00.1.02.1.02.11.0101.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				-Jumlah Bahan Kebersihan Kantor yang Disediakan - Jumlah THL Kebersihan yang Dibayarkan Honornya	-30 jenis - 15 orang			424,212,660	424,212,660	
0.00.1.02.1.02.11.0101.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor				Jumlah Jenis ATK yang Disediakan	50 jenis			29,253,622	29,000,000	
0.00.1.02.1.02.11.0101.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Jumlah Jenis Barang Cetakan yang Dicetak	7 jenis			25,770,000	75,160,000	
0.00.1.02.1.02.11.0101.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan	9 jenis			5,754,000	5,754,000	
0.00.1.02.1.02.11.0101.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan	2 unit			10,000,000	272,450,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.1.02.1.02.11.0101.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Tersedianya Bahan Bacaan KoranJumlah Bahan Bacaan yang Disediakan	1800 exp.			10,440,000	10,440,000	
0.00.1.02.1.02.11.0101.17	Penyediaan makanan dan minuman				JUmlah Porsi Makanan dan Minuman/ Snack yang Disediakan	1500 porsi makan minum rapat dan 350 porsi makan minum tamu			55,999,000	55,999,000	
0.00.1.02.1.02.11.0101.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah yang Dilaksanakan	342 kali			671,476,000	335,630,000	
0.00.1.02.1.02.11.0101.19	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran				Jumlah Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran yang Dibayarkan	12 orang			327,238,128	340,176,240	
0.00.1.02.1.02.11.0102.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik**	**80.00%**	**250,013,000**	**264,899,500**	**DKUKM**
0.00.1.02.1.02.11.0102.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Jumlah Kendaraan Dinas yang Dilaksanakan Pemeliharaannya	5 kendaraan roda 4, 27 kendaraan roda 2			234,013,000	243,899,500	
0.00.1.02.1.02.11.0102.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dilaksanakan Pemeliharaannya	26 unit komputer, 2 unit AC, 2 unit mesin tik, 3 unit HT			13,000,000	18,000,000	
0.00.1.02.1.02.11.0102.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur				Jumlah Mebeleur yang Dilaksanakan Pemeliharaannya	4 unit meja			3,000,000	3,000,000	
0.00.1.02.1.02.11.0103	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap**	**100.00%**	**38,700,000**	**38,700,000**	**DKUKM**
0.00.1.02.1.02.11.0103.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya yang Diadakan	79 orang			38,700,000	38,700,000	
0.00.1.02.1.02.11.0106	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**	**7,040,000**	**7,900,000**	**DKUKM**

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.1.02.1.02.11.0106.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Jumlah Laporan capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD (LAKIP SKPD dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan SKPD) yang Disusun	2 dokumen			4,340,000	5,200,000	
0.00.1.02.1.02.11.0106.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik				Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelayanan Publik yang Disusun	2 dokumen			2,700,000	2,700,000	
1.02.11.1.02.11.01.15.	**Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif**	**2**	**persentase UKM terhadap UMKM**	**28.15%**			**persentase pertumbuhan UMKM**	**1.40%**	**27,910,000**	**18,297,860**	**DKUKM**
1.02.11.1.02.11.01.15.08	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah				- Jumlah Peserta Temu Pelaku Usaha Sukses yang Dilaksanakan - Jumlah UMKM Binaaan yang Dimonitoring	- 40 UMKM - 200 UMKM			27,910,000	18,297,860	
1.02.11.1.02.11.01.16.	**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**	**2**	**Persentase pertumbuhan tenaga kerja sektor UMKM**	**14.00%**			**1. Persentase pertambahan tenaga manajer UMKM 2. Persentase pertambahan tenaga pembukuan UMKM**	**1.40% 1.40%**	**204,475,000**	**202,280,900**	**DKUKM**
1.02.11.1.02.11.01.16.06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan				- Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan bagi Wirausaha Pemula/ Calon Wirausaha Baru yang Dilaksanakan - Jumlah Peserta AMT bagi Pengusaha Mikro dan Kecil yang Dilaksanakan	- 30 UMKM - 30 UMKM			32,735,000	60,555,000	
1.02.11.1.02.11.01.16.07	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD				Jumlah Peserta Pelatihan Pengelolaan Koperasi/ KUD yang Dilaksanakan	40 orang			74,740,000	26,033,000	
1.02.11.1.02.11.01.16.12	Penyusunan Buku Profil Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah				Jumlah dokumen Buku Profil Koperasi dan UMKM yang disusun	1 dokumen			97,000,000	115,692,900	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.11.1.02.11.01.17.	**Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**	**2**	**persentase UKM terhadap UMKM**	**28.15%**			**Persentase peningkatan modal UMKM**	**2,50%**	**64,816,500**	**153,836,500**	**DKUKM**
							Jumlah pertumbuhan volume penjualan UMKM di pasar modern	**1.70%**			
1.02.11.1.02.11.01.17.01	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan				- Jumlah Peserta Sosialisasi KUR yang Dilaksanakan - Jumlah Peserta Sosialisasi PKBL-BUMN yang Dilaksanakan	- 45 UMKM - 45 UMKM			13,895,000	16,095,000	
1.02.11.1.02.11.01.17.04	Koordinasi penggunaan dana pemerintahan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah				Jumlah Koperasi yang Dikoordinir Penggunaan Dana Pemerintahnya	30 Koperasi			6,809,500	43,069,500	
1.02.11.1.02.11.01.17.05	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah				1. jumlah koperasi yang dipantau pengelolaan penggunaan dana pemerintahnya 2. Jumlah koperasi peserta sosialisasi	1. 70 koperasi 2. 70 koperasi			7,520,000	10,570,000	
1.02.11.1.02.11.01.17.09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah (DID)				Jumlah UMKM yang Terlibat Dalam Kegiatan Harkopnas Expo	4 UMKM			36,592,000	84,102,000	
1.02.11.1.02.11.01.18.	**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**	**2**	**Persentase Peningkatan SHU Koperasi**	**12,15%**			**Persentase penurunan jumlah tunggakan**	**5.00%**	**154,534,000**	**179,354,000**	**DKUKM**
			Persentase pertumbu-han aset koperasi	**6,50%**			**Persentase peningkatan koperasi aktif**	**48.00%**			
							Persentase peningkatan koperasi sehat	**11.60%**			
1.02.11.1.02.11.01.18.01	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi				Jumlah Koperasi yang Tidak Aktif yang Dibubarkan	5 Koperasi Tidak Aktif			4,745,000	4,745,000	
1.02.11.1.02.11.01.18.04	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian				Jumlah Pra Koperasi/ Koperasi yang Badan Hukumnya Ditertibkan	15 Pra Koperasi/ Koperasi yang berbadan hukum			23,683,000	25,933,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.11.1.02.11.01.18.05	Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi				* Jumlah peserta tangkas terampil koperasi tingkat SLTA dan gerakan koperasi yang dilaksanakan * Jumlah koperasi yang dinilai untuk mengikuti penilaian koperasi berprestasi/koperasi award tingkat Nasional, Provinsi dan Kota Payakumbuh * Jumlah klasifikasi koperasi yang dikelompokkan 2. Terlaksananya Pengawasan koperasi * Jumlah koperasi simpan pinjam yang diawasi usahanya	- 20 SLTA/ 30 Koperasi - 10 Koperasi - 90 Koperasi - 120 Koperasi			126,106,000	148,676,000	
1.02.12.	**PENANAMAN MODAL**								**3,029,254,350**	**3,623,006,676**	
0.00.1.02.1.02.12.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**4**	**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai IKM**	**82.40**	**933,939,776**	**835,259,776**	**DPM dan PTSP**
0.00.1.02.1.02.12.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat				Jumlah benda pos yang tersedia	600 helai benda pos			2,700,000	2,700,000	
0.00.1.02.1.02.12.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Jumlah rekening listrik,air,telepon dan internet yang dibayarkan	1 rekening listrik, 1 rekening air, 2 rekening telepon,1 sms gateway,1 tv kabel			84,000,000	84,000,000	
0.00.1.02.1.02.12.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya	4 unit roda 4, 13 unit roda 2			8,050,000	8,050,000	
0.00.1.02.1.02.12.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	28 orang			251,325,000	251,325,000	
0.00.1.02.1.02.12.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Jenis bahan kebersihan kantor yang dibeli	36 Jenis			7,029,000	7,029,000	
0.00.1.02.1.02.12.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	8 item			12,000,000	12,000,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.1.02.1.02.12.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor				Jumlah jenis ATK yang disediakan	54 jenis			19,548,000	19,548,000	
0.00.1.02.1.02.12.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Jumlah barang yang dicetak,digandakan dan diijilid	11 jenis			17,759,000	17,759,000	
0.00.1.02.1.02.12.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	13 jenis			7,660,000	7,660,000	
0.00.1.02.1.02.12.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Jumlah bahan bacaan yang disediakan	2 jenis (730 eksemplar)			3,650,000	3,650,000	
0.00.1.02.1.02.12.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				Jumlah porsi makanan dan minuman/snack yang disediakan	340 porsi makan,340 porsi minum dan 250 galon			17,125,000	17,125,000	
0.00.1.02.1.02.12.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan	40 kali			292,462,000	193,782,000	
0.00.1.02.1.02.12.01.01.19	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran				Jumlah tenaga adm/teknik perkantoran yang dibayarkan	8 orang			210,631,776	210,631,776	
0.00.1.02.1.02.12.01.02.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**4**	**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik**	**80.00%**	**132,945,450**	**132,945,450**	**DPM dan PTSP**
0.00.1.02.1.02.12.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor	2 Paket			15,550,000	15,550,000	
0.00.1.02.1.02.12.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	4 unit roda empat dan 13 unit roda 2			116,795,450	116,795,450	
0.00.1.02.1.02.12.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				Jumlah pengisian ulang tabung racun api	8 tabung			600,000	600,000	
0.00.1.02.1.02.12.01.03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**4**	**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap**	**100.00%**	**18,000,000**	**18,000,000**	**DPM dan PTSP**
0.00.1.02.1.02.12.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapanannya yang diadakan	38 stel			18,000,000	18,000,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.1.02.1.02.12.01.06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**4**	**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**	**20,000,000**	**20,000,000**	**DPM dan PTSP**
0.00.1.02.1.02.12.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Jumlah pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4 dokumen			10,000,000	10,000,000	
0.00.1.02.1.02.12.01.06.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik				Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik	3 dokumen			10,000,000	10,000,000	
1.02.12.1.02.12.01.15.	**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**	**4**	**Nilai Realisasi Investasi**	**196,90 Miliar**			**1. Jumlah kerjasama investasi 2. Jumlah Promosi Investasi 3. Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek**	**8 kerjasama, 5 kali 4 orang**	**79,820,000**	**88,637,950**	**DPM dan PTSP**
1.02.12.1.02.12.01.15.06	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha (DID)				1. jumlah koordinasi bidang penanaman modal 2. Jumlah promosi dengan instansi pemerintah dan dunia usaha 3. Jumlah leaflet serta kantong untuk promosi peluang investasi	1. 8 rapat 2. 5 kali 3.1 paket			35,012,950	62,377,950	
1.02.12.1.02.12.01.15.08	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal				Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	12 perusahaan yang terdaftar			10,891,050		
1.02.12.1.02.12.01.15.09	Peningkatan kualitas SDM guna pengingkatan pelayanan investasi (DID)				Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan pengembangan SDM bidang penanaman modal	4 orang			25,296,000	11,820,000	
1.02.12.1.02.12.01.15.12	Penyusunan Profil Penanaman Modal dan Perizinan				Jumlah profil penanaman modal dan perizinan yang disusun	1 dokumen			8,620,000	14,440,000	
1.02.12.1.02.12.01.16.	**Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**	**4**	**Nilai Realisasi Investasi**	**196,90 Miliar**			**Jumlah Investor**	**936 investor**	**19,922,750**	**56,288,750**	**DPM dan PTSP**

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Investor	**936**							
1.02.12.1.02.12.01.16.12	Fasilitasi dan Penyelesaian/Penanganan pengaduan masyarakat				Jumlah penanganan pengaduan masyarakat dibidang perizinan dan non perizinan	6 pengaduan			10,013,600	16,193,600	
1.02.12.1.02.12.01.16.16	Penyusunan Regulasi				Jumlah dokumen regulasi dalam bentuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	2 dokumen			9,909,150	40,095,150	
1.02.12.1.02.12.01.18.	**Program Optimalisasi Pelayanan Publik**	**4**	**Nilai Survey kepuasaan masyarakat**	**82,20**		**82.2**	**Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti**	**100.00%**	**1,749,077,374**	**2,346,874,750**	**DPM dan PTSP**
							Persentase layanan PTSP yang memenuhi standar waktu layanan sesuai SOP	**100.00%**			
1.02.12.1.02.12.01.18.10	Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan penanaman modal				Jumlah izin yang dikeluarkan	1 Paket			8,363,000	14,863,000	
1.02.12.1.02.12.01.18.13	Analisa / pengkajian kelayakan perizinan				Jumlah survey kelayakan perizinan	85 kali			31,628,374	50,610,750	
1.02.12.1.02.12.01.18.14	Pelaksanaan aplikasi perizinan online				Jumlah sistim informasi perizinan yang terkelola dan terpelihara	2 jenis perizinan			22,941,000	37,321,000	
1.02.12.1.02.12.01.18.15	Sosialisasi pelayanan perizinan (DID)				Jumlah sosialisasi perizinan	3 kali			61,145,000	119,080,000	
1.02.12.1.02.12.01.18.18	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Perizinan				1. Mall Pelayanan Publik 2. Jumlah jenis izin yang dikeluarkan	1 paket			1,625,000,000	2,125,000,000	
1.02.12.1.02.12.01.17.	**Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah**	**4**	**Nilai Realisasi Investasi**	**196,90 Miliar**			**Persentase peluang investasi yang telah divalidasi**	**27.00%**	**75,549,000**	**125,000,000**	**DPM dan PTSP**
1.02.12.1.02.12.01.17.01	Kajian Potensi Sumber Daya yang terkait dengan Investasi (DID)				Jumlah dokumen kajian potensi investasi	1 dokumen			75,549,000	125,000,000	
1.02.13.	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**								**8,705,125,894**	**4,656,178,760**	
1.02.13.2.00.02.01.16.	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	**1**	**Peringkat pemuda pelopor tingkat nasional**	**peringkat 1**			**Jumlah pemuda pelopor yang sampai ke tingkat nasional**	**2 orang**	**60,687,000**	**80,657,000**	**DISPARPORA**
			Jumlah organisasi kepemudaan yg aktif	**24**							

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.13.2.00.02.01.16.01	Pembinaan Organisasi kepemudaan				Jumlah pembinaan yang dilakukan terhadap organisasi kepemudaan	20 okp			33,060,000	44,700,000	
1.02.13.2.00.02.01.16.03	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan				Jumlah aksi bakti sosial pemuda yang difasilitasi Dinarpora	2 aksi			7,550,000	8,050,000	
1.02.13.2.00.02.01.16.07	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan				Jumlah pemuda pelopor yang dibina untuk dilakukan pemilihan	5 orang			16,720,000	24,550,000	
1.02.13.2.00.02.01.16.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				Jumlah monev yang dilakukan terhadap OKP	4 kali			3,357,000	3,357,000	
1.02.13.2.00.02.01.17.	**Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda**	**1**	**Peringkat pemuda pada lomba wirausaha muda tk. Propinsi dan tk.nasional** **Peringkat pramuka tk. Propinsi**	**1** **2**			**Persentase pemuda yang berwirausaha**	**63.00%**	**594,362,010**	**658,962,010**	**DISPARPORA**
1.02.13.2.00.02.01.17.02	Pelatihan keterampilan bagi pemuda (DID)				Jumlah peserta keterampilan pemuda yang mengikuti pelatihan	30 orang			90,248,000	154,848,000	
1.02.13.2.00.02.01.17.23	Pelatihan Paskibraka				Jumlah peserta pelatihan keterampilan paskibraka pelajar, TNI, dan POLRI	120 orang			504,114,010	504,114,010	
1.02.13.2.00.02.01.20.	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**	**1**	**Jumlah medali pada even olahraga tingkat daerah**	**30 medali**			**Jumlah medali pada event olahraga tingkat daerah**	**30 medali**	**3,771,156,884**	**3,180,359,750**	**DISPARPORA**
1.02.13.2.00.02.01.20.01	Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga (DID)				Jumlah jenis olahraga yang diikuti pelajar dalam kompetisi olahraga Tk Prov dan Nas	30 cabang olahraga			206,496,000	276,850,000	
1.02.13.2.00.02.01.20.04	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah				Jumlah pembinaan cabang olahraga	30 cabang olahraga			2,633,353,884	2,012,159,750	
1.02.13.2.00.02.01.20.05	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi				Intensitas pelaksanaan senam kesegaran jasmani dan rekreasi	80 kali			28,550,000	43,550,000	
1.02.13.2.00.02.01.20.06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga				Jumlah kompetisi olahraga yang diselenggarakan	4 paket			559,102,000	745,200,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.13.2.00.02.01.20.11	Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi				Jumlah olahraga rekreasi yang diselenggarakan Disparpora	5 kali			343,655,000	102,600,000	
1.02.13.2.00.02.01.21.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga**	**1**	**Jumlah medali pada even olahraga tingkat daerah**	**30 medali**			**Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik**	**83.00%**	**1,486,200,000**	**486,200,000**	**DISPARPORA**
1.02.13.2.00.02.01.21.04	Pengadaan peralatan olahraga/lomba				Jumlah peralatan olahraga/lomba yang dibeli	4 jenis			200,000,000	200,000,000	
1.02.13.2.00.02.01.21.07	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga				Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dilakukan pemeliharaan	5 objek			1,286,200,000	286,200,000	
1.02.13.2.00.02.01.22.	**Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga**	**3**	**Jumlah medali pada even olahraga tingkat daerah**	**30 medali**			**Jumlah sapras olah raga yang dibangun**	**3 buah**	**2,792,720,000**	**250,000,000**	**DISPARPORA**
1.02.13.2.00.02.01.22.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga				Jumlah pembangunan sarana dan prasarana olahraga	3 buah			2,792,720,000	250,000,000	
1.02.14.	**STATISTIK**								**77,497,950**	**119,572,100**	
1.02.14.1.02.10.01.15.	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	**1**	**Jumlah dokumen statistik yang tersedia**	**4 buah**			**Persentase kepuasan data pengguna statistik**	**80.00%**	**77,497,950**	**119,572,100**	**DISKOMINFO**
1.02.14.1.02.10.01.15.01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah				Jumlah data/informasi dari OPD di lingkungan Pemko yang telah diolah/disusun baik berupa cetak maupun online/visualisasi	1 aplikasi dan 1 dokumen			77,497,950	119,572,100	
1.02.16.	**KEBUDAYAAN**								**5,092,065,800**	**1,234,156,800**	
1.02.16.2.00.02.01.15.	**Program Pengembangan Nilai Budaya**	**5**	**Jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif**	**71 group**			**1. Jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif 2. Jumlah pemangku adat yang aktif pada kegiatan adat dan budaya daerah**	**1. 71 group 2. 24 orang**	**563,220,000**	**231,940,000**	**DISPARPORA**
1.02.16.2.00.02.01.15.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah				Jumlah fasilitasi budaya daerah yang difasilitasi penyelenggarannya	3 event : Duta Budaya Minang, Payakumbuh Bagodang, Festival Silek Tradisi			563,220,000	231,940,000	
1.02.16.2.00.02.01.16.	**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**	**5**	**Jumlah Benda Cagar Budaya (BCB) yang dilindungi**	**22 bcb**			**Jumlah benda cagar budaya yang dilindungi**	**22 bcb**	**3,310,785,000**	**180,895,000**	**DISPARPORA**

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.16.2.00.02.01.16.06	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata				1. Jumlah acara hiburan rakyat yang dilaksanakan 2. Jumlah pengadaan tanah 3. Jumlah pembangunan Rumah Gadang 4. Jumlah Perkampungan minangkabau yang direhabilitasi	1. 2 pket: kegiatan sabtu sore dan Payakumbuh Sepanjang Masa 2. 1 Paket 3. 2 Paket 4. 1 Paket			3,310,785,000	180,895,000	
1.02.16.2.00.02.01.17.	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	**5**	**Jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif**	**71 group**			**Jumlah penyelenggaraan festival budaya**	**9 event**	**1,218,060,800**	**821,321,800**	**DISPARPORA**
1.02.16.2.00.02.01.17.01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah				1. Jumlah kegiatan dan kebudayaan daerah yang diselenggarakan 2. jumlah	0.8			387,405,000	260,430,000	
1.02.16.2.00.02.01.17.08	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah				1. Jumlah LKAAM, Bundo Kanduang Kota, KAN dan Bundo Kanduang 10 Nagari 2. Jumlah fasilitasi hadiah lomba adat dan budaya bagi masyarakat 3. Jumlah BCB yang ada di Kota Payakumbuh	1. 22 intansi 2. 2 paket 3. 1 paket			207,727,000	253,015,000	
1.02.16.2.00.02.01.17.09	Penyelenggaraan pengembangan pelestarian adat budaya daerah				1. Jumlah peserta yang mengikuti pelestarian adat budaya daerah 2. Jumlah fasilitasi hadiah penulisan cerita rakyat dan naskah randai 3. Jumlah buku kebudayaan kota Payakumbuh yang dicetak	1. 400 orang 2. 2 paket 3. 2 paket			315,464,800	307,876,800	
1.02.16.2.00.02.01.17.10	Penyelenggaraan Payokumbuah Botuang Festival				jumlah pelaksanaan kegiatan pagelaran kesenian	1 kali			307,464,000	350,000,000	
1.02.17.	**PERPUSTAKAAN**								**2,057,281,338**	**2,077,854,151**	
0.00.1.02.1.02.17.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**4**	**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai IKM**	**86.00**	**530,762,835**	**536,070,463**	**ARSIP**

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.1.02.1.02.17.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat				Jumlah benda pos, cek dan giro yang dibeli	benda pos 270 buah, buku cek 12 buku			2,311,000	2,334,110	
0.00.1.02.1.02.17.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Jumlah rekening air, listrik dan telp ysng dibayarkan	4 rekening, 12 bulan			25,200,000	25,452,000	
0.00.1.02.1.02.17.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan yang dibayar pajak dan KIR nya	11 unit			6,495,000	6,559,950	
0.00.1.02.1.02.17.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Jumlah pengelola administrasi kuangan yang dibayar jasanya	20 orang			182,013,000	183,833,130	
0.00.1.02.1.02.17.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Jumlah bahan kebersihan yang dibeli, dan Jumlah tenaga kebersihan yang dibayar jasanya	18 jenis, 1 orang			29,517,967	29,813,147	
0.00.1.02.1.02.17.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	21 unit			3,688,000	3,724,880	
0.00.1.02.1.02.17.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor				Jumlah ATK yang disediakan	51 jenis			9,249,400	9,341,894	
0.00.1.02.1.02.17.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Jumlah barang yang dicetak, digandakan dan dijilid	Cetak 8 jenis, fotocopy 29.356 lembar, jilid 45 buah			22,361,528	22,585,143	
0.00.1.02.1.02.17.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	5 jenis			1,380,000	1,393,800	
0.00.1.02.1.02.17.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				Jumlah Peralatan kantor yang disediakan	7 jenis			1,207,500	1,219,575	
0.00.1.02.1.02.17.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Jumlah bahan bacaan yang disediakan	13 jenis, 2010 eksemplar			13,247,000	13,379,470	
0.00.1.02.1.02.17.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				Jumlah Porsi makanan dan minuman/snack yang disediakan	300 porsi, 423 porsi, 423 porsi			10,000,000	10,100,000	
0.00.1.02.1.02.17.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Jumlah rapat koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan	75 kali , 19 kali			224,092,440	226,333,364	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.1.02.1.02.17.01.02.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**4**	**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik**	**80.00%**	**1,090,266,000**	**1,101,168,660**	**ARSIP**
0.00.1.02.1.02.17.01.02.03	Pembangunan gedung kantor (DID)				Pembangunan DEPO Arsip	22%			953,000,000	962,530,000	
0.00.1.02.1.02.17.01.02.10	Pengadaan meubeler				Jumlah meubeler yang dibeli	Filling kabinet 6 unit, rak siku 26 unit, kursi kerja 3 unit,lemari buku 1 unit			12,466,000	12,590,660	
0.00.1.02.1.02.17.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan dinas	roda 2 7 unit, roda 4 4 unit			124,800,000	126,048,000	
0.00.1.02.1.02.17.01.03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**4**	**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap**	**100%**	**9,900,000**	**9,999,000**	**ARSIP**
0.00.1.02.1.02.17.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Jumlah Pakaian dinas dan perlengkapan yang diadakan	22 stel			9,900,000	9,999,000	
0.00.1.02.1.02.17.01.06.	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**4**	**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**	**10,040,395**	**10,140,799**	**ARSIP**
0.00.1.02.1.02.17.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Jumlah Dokumen capaian kinerja yang dihasilkan/dicetak	5 buku (Laporan)			3,599,845	3,635,843	
0.00.1.02.1.02.17.01.06.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik				Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan/dicetak	3 buku (Laporan)			6,440,550	6,504,956	
1.02.17.1.02.17.01.15.	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	**1**	**Jumlah pengunjung perpustakaan**	**10500**			**Jumlah anggota perpustakaan**	**1600 orang**	**416,312,108**	**420,475,229**	**ARSIP**
1.02.17.1.02.17.01.15.02	Pengembangan minat dan budaya baca				Jumlah kunjungan perpustakaan keliling	180 kali			74,632,608	75,378,934	
1.02.17.1.02.17.01.15.03	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat				Jumlah pengelola perpustakaan yang dibina	47 orang			168,317,000	170,000,170	
1.02.17.1.02.17.01.15.08	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca				Jumlah peserta lomba publikasi perpustakaan	120 orang			54,967,000	55,516,670	
1.02.17.1.02.17.01.15.09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah				Jumlah bahan pustaka yang diadakan	600 eks			47,650,000	48,126,500	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.17.1.02.17.01.15.11	Otomasi perpustakaan				Jumlah buku perpustakaan yang di otomasi	1000 eks			21,961,500	22,181,115	
1.02.17.1.02.17.01.15.12	Pemeliharaan buku-buku dan pelestarian bahan perpustakaan				Jumlah Koleksi buku yang terpelihara	350 eks koleksi umum, 50 jilid koran dan 25 jilid majalah			48,784,000	49,271,840	
1.02.18.	**KEARSIPAN**								**161,165,490**	**162,777,145**	
1.02.18.1.02.17.01.16.	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**4**	**Jumlah khasanah arsip**	**8000 berkas**			**Jumlah dokumen/ arsip yang diakuisisi**	**760 berkas**	**62,721,000**	**63,348,210**	**ARSIP**
1.02.18.1.02.17.01.16.02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah				Jumlah SKPD/arsip yang ditata, pilah,	12 kelurahan			54,774,000	55,321,740	
1.02.18.1.02.17.01.16.03	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika				Jumlah Arsip yang di rekam secara digital	6.000 lembar			7,947,000	8,026,470	
1.02.18.1.02.17.01.18.	**Program peningkatan kualitas pelayanan informasi**	**4**	**Jumlah khasanah arsip**	**8000 berkas**			**Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis**	**32,25%**	**76,997,000**	**77,766,970**	**ARSIP**
1.02.18.1.02.17.01.18.03	Sosialisasi/ penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta				Jumlah PD/kelurahan yang telah mengelola arsip sesuai kaidah kearsipan	31 SKPD			30,986,500	31,296,365	
1.02.18.1.02.17.01.18.04	Pengawasan kearsipan				Jumlah pemantauan kearsipan sesuai dengan perda yang telah disahkan	31 SKPD			5,269,500	5,322,195	
1.02.18.1.02.17.01.18.05	Sosialisasi sistem informasi kearsipan dinamis (DID)				Jumlah OPD yang diberikan sosialisasi sistem informasi kearsipan dinamis	16 SKPD			40,741,000	41,148,410	
1.02.18.1.02.18.01.15.	**Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan**	**4**	**Jumlah khasanah arsip**	**8000 berkas**			**Persentase PD dan kelurahan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku**	**35,48%**	**13,217,490**	**13,349,665**	**ARSIP**
1.02.18.1.02.18.01.15.08	Penilaian dan pendataan ulang dokumen /arsip daerah				Jumlah Arsip usul simpan dan usul musnah	500 berkas			4,124,150	4,165,392	
1.02.18.1.02.18.01.15.10	Penelusuran arsip statis				Jumlah daftar arsip statis	1 berkas			9,093,340	9,184,273	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.18.1.02.18.01.17.	**Program Pemelihraan Rutin / berkala sarana dan prasarana kearsipan**	**4**	**Jumlah khasanah arsip**	**8000**			**Persentase PD dan Kelurahan yang telah memiliki sarana dan prasarana pengelolaan arsip sesuai standar**	**12,82%**	**8,230,000**	**8,312,300**	**ARSIP**
1.02.18.1.02.18.01.17.03	Monitoring evaluasi dan pelaporan situasi data				Jumlah SKPD yang dikunjungi untuk monitoring arsip	31 SKPD			8,230,000	8,312,300	
2.00.	**URUSAN PILIHAN**								**26,182,560,737**	**21,519,161,364**	
2.00.01.	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**								**605,988,160**	**813,077,160**	
2.00.01.2.00.03.01.20.	**Program pengembangan budidaya perikanan**	**2**	**Produksi ikan konsumsi**	**520 ton**			**Produksi ikan konsumsi**	**520 ton**	**494,934,160**	**491,514,160**	**PERTANIAN**
2.00.01.2.00.03.01.20.02	Pendampingan pada kelompok pembudidaya ikan				Jumlah kelompok tani pembudidaya ikan yang didampingi	6 pokdatan			36,564,160	36,564,160	
2.00.01.2.00.03.01.20.03	Pembinaan dan pengembangan perikanan (DID)				jumlah petani yang mengikuti pelatihan pembuatan pakan ikan	80 orang			70,720,000	67,850,000	
2.00.01.2.00.03.01.20.04	Pengendalian hama dan penyakit ikan				jumlah pelatihan; jumlah pengujian sampel ikan; jumlah pengujian sampel air; jumlah alat pengujian kualitas air	1 hari; 30 orang; 10 sampel; 1 paket			26,880,000	57,100,000	
2.00.01.2.00.03.01.20.05	Optimalisasi sarana dan prasarana UPTD perbenihan dan pakan ikan				Jumlah sarana prasarana UPTD perbenihan dan pakan ikan yang tersedia	pakaian lapangan untuk 10 org; pompa air 10 unit; pakan ikan 2950 kg; honor THL 8 org			360,770,000	330,000,000	
2.00.01.2.00.03.01.22.	**Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan**	**2**	**Produksi ikan konsumsi**	**520 ton**			**Persentase kelompok tani yang menerapkan anjuran teknologi budidaya perikanan**	**80,65%**	**92,414,000**	**244,329,000**	**PERTANIAN**

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00.01.2.00.03.01.22.02	Penyuluhan GEMARIKAN				Jumlah pelatihan masak serba ikan; jumlah kelompok mengikti lomba serba ikan tk. Kota; jumlah kelompok mengikti lomba serba ikan tk. Propinsi; sosialisai gemar ikan bagi kader posyandu dan PKK; lomba kinerja forikan tk kelurahan tk kota dan propinsi; lomba implementasi gemarikan pada kurikulum PAUD tk Kota dan propinsi	30 orang; 5 kelompok; 1 kelompok; 57 orang; 1 kali; 1 kali; 1 kali; 1 kali			92,414,000	244,329,000	
2.00.01.2.00.03.01.23.	**Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan**	**3**	**Produksi ikan konsumsi** **Angka konsumsi ikan**	**520 ton** **31.50%**			**Jumlah fasilitasi pemasaran hasil perikanan**	**1 kali**	**18,640,000**	**77,234,000**	**PERTANIAN**
2.00.01.2.00.03.01.23.03	Pengembangan pengolahan hasil perikanan				1. jumlah sampel olahan ikan yang diperiksa labor terhadap zat kimia berbahaya 2. jumlah kelompok pengolah hasil perikanan yang dibina	10 sampel; 4 kelompok			18,640,000	77,234,000	
2.00.02.	**PARIWISATA**								**5,245,848,352**	**4,215,112,610**	
0.00.2.00.2.00.02.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai IKM**	**81.00**	**1,623,047,416**	**831,440,974**	**DISPARPORA**
0.00.2.00.2.00.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat				Jumlah perangko, materai dan buku cek yang dibeli	335 buah materai dan 12 buah buku cek			2,800,000	2,800,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.2.00.2.00.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Jumlah rekening telepon, pulsa listrik LED Pariwisata, fax/speedy, air dan listrik yang dibayarkan	7 rekening listrik, 1 pulsa LED Pariwisata, 1 rekening/paket listrik terutang, 3 rekening telepon, 6 rekening air			272,298,000	267,998,000	
0.00.2.00.2.00.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya	3 unit kendaraan roda 4 dan 15 unit kendaraan roda 2, 2 unit becak motor			3,498,000	3,498,000	
0.00.2.00.2.00.02.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	29 orang			281,000,000	152,842,000	
0.00.2.00.2.00.02.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Jumlah alat dan bahan kebersihan kantor yang dibeli	26 jenis			10,641,000	12,700,000	
0.00.2.00.2.00.02.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	47 kali dan 2 unit LED Pariwisata			10,000,000	8,722,000	
0.00.2.00.2.00.02.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor				Jumlah ATK yang disediakan	47 jenis			18,046,700	19,067,000	
0.00.2.00.2.00.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Jumlah Cetak, Penggandaan serta Jilid dan dokumen dinas yang disediakan	16 jenis cetak			14,979,752	17,999,610	
0.00.2.00.2.00.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Jumlah jenis alat listrik yang dibeli	10 jenis			7,000,000	7,000,000	
0.00.2.00.2.00.02.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Jumlah bahan bacaan dan perudang undangan yang disediakan	787 ekspemplar			4,000,000	6,000,000	
0.00.2.00.2.00.02.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				Jumlah porsi makan dan minumk rapat/tamu yang disediakan	1020 porsi			11,000,000	17,022,500	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.2.00.2.00.02.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Jumlah koordinasi dan konsultansi ke luar daerah yang diikuti	136 kali			960,621,000	290,662,500	
0.00.2.00.2.00.02.01.01.19	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran				1. Jumlah upah/honor tenaga administrasi dan teknis perkantoran (penjaga kantor) 2. Jumlah penjaga kantor yang ikut serta dalam asuransi/BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan serta Jaminan Hari Tua	1. 1 orang 2. 12 ob BPJS Kesehatan dan 12 ob BPJS Ketenagakerjaan			27,162,964	25,129,364	
0.00.2.00.2.00.02.01.02.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik**	**80%**	**133,017,500**	**133,017,700**	**DISPARPORA**
0.00.2.00.2.00.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	20 unit			133,017,500	133,017,700	
0.00.2.00.2.00.02.01.03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap**	**100.00%**	**20,250,000**	**17,550,000**	**DISPARPORA**
0.00.2.00.2.00.02.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Jumlah pakaian dinas yang dibeli	45 orang			20,250,000	17,550,000	
0.00.2.00.2.00.02.01.06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**	**18,579,000**	**27,973,500**	**DISPARPORA**
0.00.2.00.2.00.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja Disparpora yang disusun	7 dokumen			12,117,900	15,000,000	
0.00.2.00.2.00.02.01.06.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik				Jumlah dokumen perencanaan dan pelayanan publik yang dibuat/disusun	6 dokumen			6,461,100	12,973,500	
2.00.02.2.00.02.01.15.	**Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**	**1**	**Persentase Peningkatan Kunjungan wisatawan**	**5.10%**			**Persentase promosi kepariwisataan yang dilaksanakan** **Rata-rata lama tingggal wisatawan**	**55.00%** **1.27 hari**	**1,200,904,340**	**1,317,868,840**	**DISPARPORA**

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	**3**	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00.02.2.00.02.01.15.02	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata				Jumlah meida informasi dan pemasaran pariwisata yang disediakan	2 media			15,000,000	4,300,000	
2.00.02.2.00.02.01.15.05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri				jumlah promosi wisata didalam dan luar negeri yang dilaksanakan	3 event			498,655,340	593,095,340	
2.00.02.2.00.02.01.15.09	Pelaksanaan Tour De Singkarak				Jumlah Tour De Singkarak yang difasilitasi Disparpora	1 kali			292,925,000	393,385,000	
2.00.02.2.00.02.01.15.11	Pengembangan Pelestarian Kesenian dan Budaya Daerah				jumlah kegiatan Payakumbuh Festival Sepanjang Tahun	2 paket			133,395,500	145,755,500	
2.00.02.2.00.02.01.15.12	Pengembangan Pariwisata dan Seni Budaya Daerah (DID)				jumlah paket pagelaran seni di Tk. Daerah, Propinsi dan Nasional	1 paket			254,578,500	167,228,000	
2.00.02.2.00.02.01.15.50	Penyusunan Kebijakan Bidang Usaha Pariwisata				julah kebijakan bidang usaha pariwisata yang dibuat	2 dokumen			6,350,000	14,105,000	
2.00.02.2.00.02.01.16.	**Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**	**1**	**Persentase Peningkatan Kunjungan wisatawan**	**5.10%**			**Persentase objek wisata unggulan dengan kondisi baik** **Jumlah Pengembangan Destinasi Pariwisata**	**37.00%** **1 ow**	**1,749,534,096**	**1,666,964,096**	**DISPARPORA**
2.00.02.2.00.02.01.16.01	Pengembangan objek pariwisata unggulan				1. Jumlah objek wisata yang dikembangkan 2. Jumlah dokumen yang dibuat oleh jasa konsultasi	1. 4 paket 2. 1 dokumen			547,991,000	349,091,000	
2.00.02.2.00.02.01.16.02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata				1. Jumlah peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata serta fasilitas objek wisata yang dilaksanakan/dibeli 2. Jumlah dokumen yang dibuat oleh jasa konsultasi	5 paket			242,070,000	350,000,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	**3**	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00.02.2.00.02.01.16.08	Pemeliharaan bangunan sarana dan prasarana pariwisata				1. Jumlah sarana dan prasarana pariwisata serta objek wisata yang dilakukan pemeliharaan 2. Jumlah bahan kimia yang dibeli 3. Jumlah tenaga kebersihan yang dibayar 4. Jumlah asuransi/ BPJS yang dibayar oleh THL	1. 2 objek 2. 2 jenis 3. 29 orang tenaga kebersihan 4. 2 jenis : BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan			959,473,096	967,873,096	
2.00.02.2.00.02.01.17.	**Program Pengembangan Kemitraan**	**9**	**Persentase Peningkatan Kunjungan wisatawan**	**5.10%**			**Jumlah Kerjasama yang dilakukan dengan pelaku usaha jasa Pariwisata**	**4 kerjasama**	**157,392,500**	**220,297,500**	**DISPARPORA**
2.00.02.2.00.02.01.17.01	Pengembangan dan penguatan,informasi dan database				Jumlah informasi dan database objek wisata, industri pariwisata, atraksi dan seni budaya yang dibuat dalam bentuk CD, leaflet, booklet, dan tas promosi	200 CD Promosi, 200 lbr leaflet, 200 buah booklet, 200 buah tas promosi, 200 paket kelender			47,290,000	42,700,000	
2.00.02.2.00.02.01.17.05	Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata (DID)				jumlah rapat koordinasi pembangaunan kemitraan pariwisata yang dilakukan koordinasi	10 kali			81,845,000	146,800,000	
2.00.02.2.00.02.01.17.06	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan				Jumlah data pelaksanaan program peningkatan kemitraan yang dipantau dan dievaluasi yang dituangkan dalam buku Usaha Jasa Wisata	1 dokumen			11,010,000	13,550,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00.02.2.00.02.01.17.08	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata				Jumlah persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	2 objek			17,247,500	17,247,500	
2.00.02.2.00.02.01.18.	**Program Pengembangan Ekonomi Kreatif**	**2**	**Persentase Peningkatan Kunjungan wisatawan**	**5.10%**			**Jumlah karya ekonomi kreatif yang difasilitasi**	**1 fasilitasi**	**343,123,500**	**0**	**DISPARPORA**
2.00.02.2.00.02.01.18.01	Gelar Karya Pelaku Ekonomi (DID)				Terlaksananya gelar karya pelaku ekonomi kreatif	1 tahun			343,123,500	0	
2.00.03.	**PERTANIAN**								**9,902,869,541**	**6,842,843,539**	
0.00.2.00.2.00.03.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai IKM**	**81.00**	**1,568,725,321**	**1,018,801,650**	**PERTANIAN**
0.00.2.00.2.00.03.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat				jumlah benda pos yang dibeli dan jasa pengiriman	505 lembar, 9 kali			2,385,000	2,148,000	
0.00.2.00.2.00.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				jumlah rekening telpon, air dan listrik	30 rekening			318,000,000	200,980,000	
0.00.2.00.2.00.03.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				jumlah kendaraan dinas operasional yang dibayar KIR dan pajak kendaraan bermotor	8 unit roda 4, 1unit truk,5 unit bentor dan 125 roda 2			35,500,000	34,500,000	
0.00.2.00.2.00.03.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				jumlah pengelola administrasi keuangan	67 orang, 12 bulan			356,536,000	188,208,000	
0.00.2.00.2.00.03.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Jumlah bahan-bahan kebersihan kantor yang dibeli, jumlah tenaga kebersihan kantor yang dibayar	30 item peralatan/bahan pembersih dan 1 orang tenaga			34,799,095	7,705,000	
0.00.2.00.2.00.03.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	100 unit			9,680,000	11,872,000	
0.00.2.00.2.00.03.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor				Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	57 jenis			34,255,000	38,096,000	
0.00.2.00.2.00.03.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Jumlah spanduk yang diadakan, barang yang dicetak, digandakan dan dijilid	16 meter; 8 jenis; 39.868 lmbr; 132 buku			20,000,000	22,460,000	
0.00.2.00.2.00.03.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	12 item			8,398,000	6,994,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.2.00.2.00.03.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Jumlah bahan bacaan yang disediakan	1.080 exp			3,000,000	7,200,000	
0.00.2.00.2.00.03.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				Jumlah porsi makanan dan minum.snack yang disediakan	50 kotak air mineral, 1350 porsi makan, dan 1450 porsi minum			47,267,500	44,750,000	
0.00.2.00.2.00.03.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah yang dilaksanakan	1 tahun			567,259,000	284,318,000	
0.00.2.00.2.00.03.01.01.19	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran				Jumlah tenaga adm/teknis perkantoran yang dibayarkan	5 orang			131,645,726	169,570,650	
0.00.2.00.2.00.03.01.02.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik**	**80.00%**	**799,628,612**	**496,682,800**	**PERTANIAN**
0.00.2.00.2.00.03.01.02.03	Pembangunan gedung kantor				Jumlah dannluas gedung kantor yang dibangun (100 m2; 1 unit)	100 m2; 1 unit			300,000,000	0	
0.00.2.00.2.00.03.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	8 unit roda 4, 1 unit truk,5 unit bentor dan 125 roda 2,			499,628,612	496,682,800	
0.00.2.00.2.00.03.01.03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap**	**100,00%**	**79,200,000**	**74,250,000**	**PERTANIAN**
0.00.2.00.2.00.03.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan	170 stel			79,200,000	74,250,000	
2.00.03.2.00.03.01.15.	**Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**	**2**	**Produksi padi** **Produksi cabe** **Produksi bawang** **Produksi Kakao**	**3858.8** **985 ton** **300 ton** **1095 ton**			**Nilai Tukar Petani (NTP)**	**100,61%**	**196,356,000**	**339,100,000**	**PERTANIAN**

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00.03.2.00.03.01.15.01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis				- Jumlah peserta pekan daerah (PEDA) tani dan nelayan yang difasilitasi - Jumlah peserta pelatihan petani dan pelaku agribisnis	16 org 50 org			122,800,000	158,470,000	
2.00.03.2.00.03.01.15.03	Peningkatan kemampuan lembaga petani (DID)				- Jumlah pelatihan adm kelembagaan kelompok tani - Penilaian kelas kemampuan kelompok tani - Jumlah kelompok tani berprestasi mimbar sarasehan tk. Kec dan tk. Kota	45 org 273 kelompok 1 kali 6 kali			52,956,000	121,650,000	
2.00.03.2.00.03.01.15.04	Peningkatan sistem insentif dan disnisentif bagi petani/kelompok tani				- Jumlah asuransi usaha ternak sapi - Jumlah asuransi usaha tani - Jumlah Gapoktan dan LKMA yang dibina	100 ekor 300 ha 32 gapoktan/LKMA			20,600,000	58,980,000	
2.00.03.2.00.03.01.17.	**Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan**	**3**	**Produksi padi**	**3858.8**			**Produktivitas Padi**	**5,60 ton/ha**	**471,980,000**	**1,863,414,349**	**PERTANIAN**
			Produksi cabe	**985 ton**			**Produktivitas Cabe**	**10,80 ton/ha**			
			Produksi bawang	**300 ton**			**Produktivitas Bawang**	**12,80 ton/ha**			
			Produksi Kakao	**1095 ton**			**Produktivitas Kakao**	**1,30 ton/ha**			
2.00.03.2.00.03.01.17.02	Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (DID)				Jumlah sarana prasarana teknologi pertanian yang diadakan	opkup GKP calon benih 20 ton; benih padi berlabel/bersertifikat 16 ton; honor THL 2920 shift			285,000,000	948,650,665	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00.03.2.00.03.01.17.04	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna				- Jumlah demplot bawang - Jumlah demplot cabe - Jumlah demplot bawang - Jumlah demlpot kakao	1 lokasi (0.1 ha); 1 lokasi (0.1 ha); 1 lokasi (0.1 ha); 100 batang			62,780,000	132,638,000	
2.00.03.2.00.03.01.17.10	Peningkatan produksi dan mutu produk horti melalui gerakan mandiri hortikultura (gema horti)				Luas lahan yang ditanam sayuran bawang	2 ha			124,200,000	782,125,684	
2.00.03.2.00.03.01.18.	**Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan**	**2**	**Produksi padi**	**3858.8**			**Produksi padi**	**38588 ton**	**402,070,500**	**663,109,740**	**PERTANIAN**
			Produksi cabe	**985 ton**			**Produksi cabe**	**985 ton**			
			Produksi bawang	**300 ton**			**Produksi bawang**	**300 ton**			
			Produksi Kakao	**1095 ton**			**Produksi Kakao**	**1095 ton**			
2.00.03.2.00.03.01.18.03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan				- Jumlah pembibitan cabe - Luas lahan yang ditanami bawang	10.000 btg; 0,25 ha			90,000,000	173,828,740	
2.00.03.2.00.03.01.18.05	Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian				- Jumlah luas lahan yang didata dan diukur - Jumlah naskah akademis LP2D	2 kecamatan; 1 dokumen			180,470,000	200,000,000	
2.00.03.2.00.03.01.18.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				- Jumlah kecamatan pemanfaatan alsintan; - Jumlah penyusunan RDKK Pupuk bersubsidi	5 kecamatan 5 kecamatan			23,360,500	84,250,000	
2.00.03.2.00.03.01.18.07	Pengendalian hama/penyakit pada tanaman pertanian/perkebunan				- Jumlah pelatihan pengendalian hama penyakit secara terpadu pada tanaman pertanian/perkebunan (kakao) - persentase peningkatan pengetahuan/keterampilan petani dan petugas	5 kali: 70 %			18,400,000	33,356,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00.03.2.00.03.01.18.08	Peningkatan produktivitas dan mutu produk florikultura berkelanjutan				- Jumlah demplot hias: - Jumlah pameran tanaman hias tk Kota dan tk Provinsi - Jumah peringatan pangan dan florikultura nusantara	1 klp; 1 kali; 1 kali			23,940,000	100,000,000	
2.00.03.2.00.03.01.18.10	Pengembangan intensifikasi tanaman padi/palawija				- Luas area demonstrasi intensifikasi tanaman padi; - luas area demonstrasi pemakaian alsintan untk padi	5 ha; 5 ha			65,900,000	71,675,000	
2.00.03.2.00.03.01.19.	**Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan**	**2**	**Produksi padi** **Produksi cabe** **Produksi bawang** **Produksi Kakao**	**3858.8** **985 ton** **300 ton** **1095 ton**			**Persentase kelompok tani yg menerapkan anjuran teknologi budidaya pertanian**	**45.00%**	**51,000,000**	**126,675,000**	**PERTANIAN**
2.00.03.2.00.03.01.19.01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan (DID)				- Jumlah temu teknis penyuluh tk. Kota payakumbuh; - jumlah trainning bulanan penyuluh di kecamatan; - jumlah evaluasi kinerja penyuluh THL-TB; - Jumlah penilaian penyuluh tani berprestasi; - dokumen programa penyuluhan	2 kali; 12 kali; 19 org; 1 kali 1 dokumen			51,000,000	126,675,000	
2.00.03.2.00.03.01.20.	**Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak**	**2**	**Populasi sapi**	**5.846**			**Persentase angka kematian ternak**	**0.36%**	**233,649,108**	**305,700,000**	**PERTANIAN**

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00.03.2.00.03.01.20.01	Pendataan masalah peternakan				- dokumen statistik peternakan - buku data depo obat hewan - jumlah sampel untuk uji sebaran penyakit	1 dok 1 dok 200 sampel			12,300,000	59,300,000	
2.00.03.2.00.03.01.20.02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak				- Jumlah pemberian vitamin pada ternak besar - Jumlah pemeriksaan hewan qurban - Jumlah vaksinasi rabies	1000 ekor; 1700 ekor; 2000 ekor			173,209,108	135,200,000	
2.00.03.2.00.03.01.20.03	Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik				Jumlah positive rabies pada hewan	3 ekor			32,800,000	56,550,000	
2.00.03.2.00.03.01.20.04	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah				- Jumlah peserta sosialisasi juru sembelih halal (hewan qurban) - Jumlah penerbitan SKKH	100 org 150 SKKH			15,340,000	54,650,000	
2.00.03.2.00.03.01.21.	**Program peningkatan produksi hasil peternakan**	**2**	**Populasi sapi**	**5.846**			**Populasi Sapi (ekor)**	**5846**	**5,575,220,000**	**1,317,964,000**	**PERTANIAN**
							Jumlah Produksi Sapi Konsumsi (ton)	**996 ton**			

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00.03.2.00.03.01.21.01	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak				Jumlah sarana dan prasarana pembibitan ternak yang dibangun	- pembangunan kandang dan kelengkapan 1 unit - pengadaan sapi 50 ekor - konsentrat 125.000 kg; HMT 2.400.000 kg - kendaraan roda 4 1 unit - mesin pengolah pakan 1 unit - vitamin 5 jenis; obat obatan 14 jenis; mineral 1 jenis			5,000,000,000	302,500,000	
2.00.03.2.00.03.01.21.02	Pembibitan dan perawatan ternak				Jumlah semen beku yang diadakan untuk pembibitan dan perawatan ternak	100 dosis			19,160,000	50,346,000	
2.00.03.2.00.03.01.21.10	Pembinaan dan pengembangan peternak (DID)				Jumlah kelompok peternak penerima bantuan pemerintah yang dibina	15 kelompok			29,480,000	425,118,000	
2.00.03.2.00.03.01.21.11	Operasional UPTD Pembibitan dan pakan terkak				Populasi sapi yang dikelola	150 ekor			526,580,000	540,000,000	
2.00.03.2.00.03.01.22.	**Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan**	**2**	**Populasi sapi**	**5.846**			**Persentase Fasilitasi pemasaran hasil produksi peternakan**	**31.00%**	**489,840,000**	**637,146,000**	**PERTANIAN**
2.00.03.2.00.03.01.22.05	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan				- Jumlah pemotongan ternak besar; - pelayanan pada pedagang ternak	3.650 ekor; 160 orang			378,790,000	475,846,000	
2.00.03.2.00.03.01.22.07	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah (DID)				Jenis hasil produksi peternakan yang dipromosikan dalam kontes ternak	6 kategori			111,050,000	161,300,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00.03.2.00.03.01.16.	**Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan**	**2**	**Produksi padi**	**3858.8**			**Persentase fasilitasi pemasaran hasil produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan**	**27.00%**	**35,200,000**	**40,000,000**	**PERTANIAN**
			Produksi cabe	**985 ton**							
			Produksi bawang	**300 ton**							
			Produksi Kakao	**1095 ton**							
2.00.03.2.00.03.01.16.06	Pelatihan Pengelolaan Hasil Pertanian				Jumlah pelatihan pengelolaan cabe dan labu tingkat kota	2 kali			35,200,000	40,000,000	
2.00.06.	**PERDAGANGAN**								**7,242,339,876**	**6,246,386,725**	
2.00.06.1.02.11.01.15.	**Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan**	**2**	**Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (2010=100)**	**24,02%**			**Persentase peningkatan pelaku usaha yang tertib niaga**	**65.00%**	**428,900,700**	**636,147,250**	**DKUKM**
			Persentase pertumbuhan omset	**29,00%**			**Persentase peningkatan jumlah komoditi yg diperdagangkan**	**4.00%**			
2.00.06.1.02.11.01.15.02	Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen (DID)				1. jumlah alat UTTP yang dilakukan tera ulang 2. persentase pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti	1. 1750 unit 2. 100 %			110,252,000	163,768,000	
2.00.06.1.02.11.01.15.03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa				'- Jumlah Monitoring harga Sembako yang Dilaksanakan - Jumlah RTS yang Menerima Pembagian Sembako - Jumlah Bazar Ramadhan yang Dilaksanakan - Jumlah Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan Dalam Pangan yang Dilaksanakan	- 225 Kali - 2245 RTS - 1 kali - 2 kali			318,648,700	472,379,250	
2.00.06.1.02.11.01.18.	**Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri**	**2**	**Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (2010=100)**	**24,02%**			**Jumlah Kerjasama Perdagangan**	**32 kerjasama**	**5,091,974,600**	**3,566,734,899**	**DKUKM**
			Persentase pertumbuhan omset	**29,00%**							

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00.06.1.02.11.0118.02	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha				- Jumlah Distributor dan Pengecer pupuk bersubsidi yang difasilitasi dalam perijinan dan pengembangan usaha - jumlah distributor beras yang difasilitasi dalam perijinan dan pengembangan usaha - jumlah pengumpul hasil bumi yang difasilitasi dalam perijinan dan pengembangan usaha	- 2 distributor dan 14 Pengecer - 4 distributor - 13 pengumpul			20,861,500	28,661,500	
2.00.06.1.02.11.01.18.03	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk				Jumlah Prasarana Pasar yang Dikembangkan	22 paket			3,921,790,000	2,093,962,899	
2.00.06.1.02.11.01.18.05	Pengembangan pasar lelang daerah (DID)				Jumlah event Pasar Lelang Dalam/ luar Daerah yang diikuti	9 kali			39,528,000	140,484,000	
2.00.06.1.02.11.01.18.09	Peningkatan efisiensi kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah (DID)				1. jumlah jenis karcis yang dicetak untuk pemungutan PAD 2. pelalsanaan pasar nabukoan	1. 10 jenis 2. 1 kali			101,634,000	181,850,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00.06.1.02.11.01.18.10	Pengembangan pondok promosi dan distribusi produk unggulan				- Jumlah Promosi dan Pemasaran Produk UMKM Kota Payakumbuh yang Dilaksanakan - Jumlah Workshop Produk Kreatif yang Dilaksanakan - Jumlah Peserta Pelatihan Pemasaran Produk UMKM Melalui Media Online yang Dilaksanakan - Jumlah Peserta Sosialisasi tentang Cara Peningkatan Produk UMKM yang Dilaksanakan - Termonitor dan Terevaluasinya Produk UMKM Secara Berkala	- 12 kali - 3 paket - 50 orang - 50 orang			675,081,100	802,376,500	
2.00.06.1.02.11.01.18.11	Pemeliharaan rutin/berkala usaha perdagangan (DID)				1. pemeliharaan rutin bangunan pasar 2. pemeliharaan rutin drainase pasar	1. 1 paket 2. 1 paket			333,080,000	319,400,000	
2.00.06.1.02.11.01.19.	**Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan**	**2**	**Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (2010=100)** **Persentase pertumbuhan omset**	**24,02%** **29,00%**			**Persentase Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang mematuhi SOP**	**75.00%**	**1,721,464,576**	**2,043,504,576**	**DKUKM**
2.00.06.1.02.11.01.19.03	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan				- Tim Operasional Trantib pasar - Jumlah THL Transtib Pasar	- 60 orang - 53 orang			1,699,278,576	2,011,958,576	
2.00.06.1.02.11.01.19.05	Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan				Jumlah Penyuluhan Mutu Barang Terhadap Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang Dilaksanakan	2 kali			22,186,000	31,546,000	
2.00.07.	**PERINDUSTRIAN**								**3,185,514,808**	**3,401,741,330**	
2.00.07.1.02.01.01.15.	**Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi**	**2**	**Jumlah produk industri yang mendapatkan sertifikat industri**	**12 produk**			**Persentase industri yang menerapkan standarisasi mutu produk**	**2.00%**	**465,170,000**	**711,393,000**	**DISNAKERIN**

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	**3**	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00.07.1.02.01.01.15.04	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas				Jumlah peningkatan daya saing melalui pelaksanaan sertifkasi, legalitas dan jaminan mutu produk dengan kegiatan sbb: - Jumlah fasilitasi sertifikasi halal, HAKI (Pendaftaran merk) (30 IKM) - Jumlah uji labor pada makanan (20 IKM)	1. 30 pelaku IKM 2. 15 pelaku IKM			99,274,000	160,180,000	
2.00.07.1.02.01.01.15.05	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri (DID)				- Jumlah pelatihan/workshop penguatan IKM elektronika - Jumlah peserta pelatihan pengembangan produk IKM bahan bangunan	1. 20 pelaku IKM 2. 10 pelaku IKM			206,428,000	272,415,000	
2.00.07.1.02.01.01.15.06	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi				1. jumlah pelatihan diversifikasi tenun 2. jumlah peserta magang usaha kerajinan	1. 15 pelaku IKM 2. 2 pelaku IKM			159,468,000	278,798,000	
2.00.07.1.02.01.01.17.	**Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri**	**2**	**Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB**	**6,02%**			**Persentase industri yang menerapkan teknologi tepat guna**	**3.20%**	**387,405,000**	**1,553,569,000**	**DISNAKERIN**
			Persentase peningkatan nilai produksi	**1.50%**							
2.00.07.1.02.01.01.17.01	Pembinaan kemampuan teknologi industri				1. jumlah IKM terbina melalui klinik konsultasi bisnis 2. jumlah peserta pelatihan peningkatan daya saing melalui efesiensi dan efektivitas usaha	1. 10 pelaku IKM 2. 20 pelaku IKM			68,826,000	1,118,034,000	
2.00.07.1.02.01.01.17.02	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri (DID)				jumlah peserta pelatihan pengembangan kerajinan rajut	12 pelaku IKM			69,521,000	284,622,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00.07.1.02.01.01.17.03	Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur				- Jumlah peserta workshop dan sertifikasi kompetensi las untuk IKM - Jumlah peserta workshop peningkatan penguasaan teknologi IKM benngkel motor	1. 10 pelaku IKM 2. 10 pelaku IKM			249,058,000	150,913,000	
2.00.07.1.02.01.01.18.	**Program Penataan Struktur Industri**	**2**	**Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB**	**6,02%**			**Jumlah produk industri yang mendapat sertifikat produk**	**1 buah**	**2,286,336,258**	**1,090,175,780**	**DISNAKERIN**
			Persentase peningkatan nilai produksi	**1.50%**							
2.00.07.1.02.01.01.18.01	Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir				sinergitas pembinaan dan pengembangan IKM dengan Dekranasda Kota Payakumbuh	5 paket			573,770,625	325,803,625	
2.00.07.1.02.01.01.18.02	Operasional rumah produksi dan gallery tenun				operasional rumah produksi dan galery tenun	1 unit			138,982,593	140,156,305	
2.00.07.1.02.01.01.18.03	Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir				1. jumlah event payakumbuh fair 2. jumlah keikutsertaan event	1. 1 event 2. 3 event			608,083,850	624,215,850	
2.00.07.1.02.01.01.18.04	Operasional Sentra Rendang				jumlah operasional sentra IKM rendang	1 unit			907,596,640		
2.00.07.1.02.01.01.18.05	Pendataan Potensi IKM Kota Payakumbuh				dokumen data IKM Kota Payakumbuh	1 dokumen			57,902,550		
2.00.07.1.02.01.01.19.	**Program Pengembangan Sentra Potensial**	**2**	**Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB**	**6,02%**			**Persentase sentra/klaster industri yang tertata**	**20.00%**	**46,603,550**	**46,603,550**	**DISNAKERIN**
2.00.07.1.02.01.01.19.02	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat				Jumlah penyediaan informasi sentra rendang	1 sentra			46,603,550	46,603,550	
3.00.	**PENDUKUNG**								**40,391,972,139**	**41,551,869,811**	
3.00.03.	**KESEKRETARIATAN DAERAH**								**17,432,082,409**	**18,362,381,184**	
0.00.3.00.3.00.03.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**4**	**Nilai AKIP Setdako oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai IKM Setdako**	**81.00**	**7,324,441,518**	**6,001,745,393**	**SETDAKO**
0.00.3.00.3.00.03.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat				Jumlah benda pos yang tersedia	2800 lembar			15,250,000	15,250,000	
0.00.3.00.3.00.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Jumlah rekening telepon, air, TV berlangganan dan listrik yang disediakan	4 rekening			834,000,000	834,000,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.3.00.3.00.03.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				Persentase lancarnya aktivitas perkantoran	100.00%			385,215,000	385,215,000	
0.00.3.00.3.00.03.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan dinas opearsional yang pajaknya dibayarkan	61 unit			50,500,000	50,500,000	
0.00.3.00.3.00.03.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Jumlah Penyedia Administrasi Keuangan	26 orang			304,722,900	366,665,400	
0.00.3.00.3.00.03.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Jumlah Jasa Kebersihan yang tersedia	12 bulan			508,800,000	508,800,000	
0.00.3.00.3.00.03.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	30 unit			17,200,000	17,200,000	
0.00.3.00.3.00.03.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor				Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	42 item			37,279,900	37,279,900	
0.00.3.00.3.00.03.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	13 item			59,573,773	59,573,773	
0.00.3.00.3.00.03.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	1452 unit			75,000,000	75,000,000	
0.00.3.00.3.00.03.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 jenis buku			5,000,000	5,000,000	
0.00.3.00.3.00.03.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				Jumlah makan dan minum yang disediakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas	25000 porsi; 15000 porsi			1,167,100,000	1,167,100,000	
0.00.3.00.3.00.03.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah yang dillaksanakan	432 kali; 216 kali			2,397,887,625	1,013,249,000	
0.00.3.00.3.00.03.01.01.19	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran				Jumlah tenaga harian lepas yang dipekerjakan	45 orang			1,456,912,320	1,456,912,320	
0.00.3.00.3.00.03.01.01.21	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PNS				Jumlah non PNS yang dijamin pemeliharaan kesehatannya	4 orang			10,000,000	10,000,000	
0.00.3.00.3.00.03.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik**	**80.00%**	**3,132,561,250**	**3,132,561,250**	**SETDAKO**
0.00.3.00.3.00.03.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	5 jenis			977,000,000	977,000,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.3.00.3.00.03.01.02.08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas				Jumlah peralatan rumah Jabatan/Dinas yang disediakan	5 unit			114,765,500	114,765,500	
0.00.3.00.3.00.03.01.02.10	Pengadaan mebeleur (DID)				Jumlah Meubeleur yang disediakan	221 unit			200,000,000	200,000,000	
0.00.3.00.3.00.03.01.02.11	Pengadaan kelengkapan sarana prasarana rumah jabatan/dinas				Jumlah kelengkapan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan yang diadakan	5 item			96,345,750	96,345,750	
0.00.3.00.3.00.03.01.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan				Jumlah Rumah Jabatan yang dilakukan pemeliharaan	3 rumah jabatan			500,000,000	500,000,000	
0.00.3.00.3.00.03.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	1 unit gedung			78,000,000	78,000,000	
0.00.3.00.3.00.03.01.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin	5 unit mobil			285,000,000	285,000,000	
0.00.3.00.3.00.03.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin	61 unit			662,550,000	662,550,000	
0.00.3.00.3.00.03.01.02.25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas				Jumlah perlengkapan rumah jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin	3 unit			37,500,000	37,500,000	
0.00.3.00.3.00.03.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin	1 unit gedung			45,000,000	45,000,000	
0.00.3.00.3.00.03.01.02.27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas				Jumlah Rumah Jabatan/Dinas yang dilakukan pemeliharaan rutin	3 unit gedung			80,000,000	80,000,000	
0.00.3.00.3.00.03.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Jumlah peralatan Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin	1 unit gedung			56,400,000	56,400,000	
0.00.3.00.3.00.03.01.03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap**	**100.00%**	**155,650,000**	**155,650,000**	**SETDAKO**
0.00.3.00.3.00.03.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Jumlah pakaian dinas yang disediakan	157 stel			155,650,000	155,650,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.3.00.3.00.03.01.06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**	**411,069,821**	**792,411,481**	**SETDAKO**
			Nilai IKM Kota	**80,35**			**Nilai IKM Kota**	**80,35**			
0.00.3.00.3.00.03.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja yang disusun	4 dokumen			7,088,000	63,410,000	
0.00.3.00.3.00.03.01.06.08	Penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)				Jumlah laporan SPM yang disusun	2 dokumen			3,298,940	19,662,940	
0.00.3.00.3.00.03.01.06.10	Penyusunan laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)				Jumlah Laporan SKM yang disusun	1 dokumen			85,629,965	118,617,965	
0.00.3.00.3.00.03.01.06.12	Penyusunan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja SKPD				Jumlah perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja yang disusun	2 dokumen			14,051,000	81,863,000	
0.00.3.00.3.00.03.01.06.13	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan bantuan hibah (DID)				Persentase proposal bahan Hibah yang dievaluasi	100.00%			14,000,000	2,000,000	
0.00.3.00.3.00.03.01.06.15	Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik				Jumlah laporan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang disusun	1 dokumen			5,391,540	48,527,540	
0.00.3.00.3.00.03.01.06.16	Peningkatan Kapasitas Ketatalaksanaan				Jumlah sosialisasi pelayanan publik yang dilaksanakan dan jumlah Rakornis ,Rakortek pelayanan publik yang diikuti	2 kali dan 4 kali			59,246,322	106,248,322	
0.00.3.00.3.00.03.01.06.17	Penilaian unit pelayanan publik				Jumlah perangkat daerah yang pelayanan publiknya dalam kategori hijau/baik	5 PD			23,943,954	50,599,954	
0.00.3.00.3.00.03.01.06.19	Penyusunan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh				Jumlah dokumen perjanjian kinerja (PK) dan laporan kinerja instansi (LKiIP)	2 dokumen			113,072,250	119,131,760	
0.00.3.00.3.00.03.01.06.20	Peningkatan kapasitas akuntabilitas kinerja dan kelembagaan				Jumlah peserta bimtek penyusunan dokumen SAKIP dan kelembagaan	96 orang			64,510,000	107,750,000	
0.00.3.00.3.00.03.01.06.21	Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur & Standar Pelayanan (DID)				Jumlah perangkat daerah yang dievaaluasi SOP dan SP sesuai dengan aturan	6 PD			2,000,000	2,000,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.3.00.3.00.03.01.06.23	Forum Konsultasi Publik (DID)				Jumlah forum konsultasi publik yang dilakukan	1 kali			18,837,850	72,600,000	
3.00.03.3.00.03.01.16.	**Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah**	**4**	**Peringkat LPPD**	**16**			**Presentase peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah**	**100.00%**	**2,352,057,500**	**2,492,330,000**	**SETDAKO**
3.00.03.3.00.03.01.16.04	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah				Jumlah Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	12 kali			68,524,000	101,765,000	
3.00.03.3.00.03.01.16.05	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah				Jumlah Kunjungan Kerja Kepala Daerah/Wakil kepala daerah	24 kali; 72 kali			828,352,000	639,912,000	
3.00.03.3.00.03.01.16.06	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya				Jumlah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya	24 kali; 72 kali			703,310,000	604,290,000	
3.00.03.3.00.03.01.16.07	Penyebarluasan informasi kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah				Persentase Penyebarluasan Informasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	90.00%			710,147,500	1,020,399,000	
3.00.03.3.00.03.01.16.08	Peningkatan pelayanan keprotokolan				Persentase Pelayanan Keprotokoleran	100.00%			41,724,000	125,964,000	
3.00.03.3.00.03.01.25.	**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**	**4**	**Persentase penyelesaian masalah hukum yang diproses secara non litigasi**	**70, 00%**			**Persentase penyelesaian masalah hukum yang diproses secara non litigasi**	**70.00%**	**313,105,000**	**811,000,000**	**SETDAKO**
3.00.03.3.00.03.01.25.01	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan				Jumlah perkara hukum yang ditangani	3 perkara			181,848,925	350,000,000	
3.00.03.3.00.03.01.25.03	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan				Jumlah ranperda yang dibahas di DPRD	10 ranperda			27,742,000	120,000,000	
3.00.03.3.00.03.01.25.04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan				Jumlah Sosialisasi yang akan dilaksanakan	2 kali			25,780,450	90,000,000	
3.00.03.3.00.03.01.25.05	Publikasi peraturan perundang-undangan				Jumlah lembaran daerah yang dipublikasikan	150 buku			21,758,625	80,000,000	
3.00.03.3.00.03.01.25.06	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah				Jumlah Keputusan Wako, Perwako dan MOU	500 kep wako, 50 pewako, 5 MoU (3 kajian)			11,225,000	96,000,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00.03.3.00.03.01.25.07	Bantuan hukum bagi masyarakat miskin (DID)				Jumlah perkara masyarakat miskin yang dapat bantuan hukum	5 perkara			44,750,000	75,000,000	
3.00.03.3.00.03.01.47.	**Program penataan kelembagaan dan organisasi daerah**	**4**	**Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah**	**BB**			**Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk Sesuai Perundang-undangan**	**100.00%**	**94,907,700**	**126,816,470**	**SETDAKO**
3.00.03.3.00.03.01.47.03	Penataan organisasi perangkat daerah, penyusunan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas OPD				Jumlah Ranperda/ Perda/Perwako yang disusun	5 ranperda/perda /perwako			19,742,400	59,574,350	
3.00.03.3.00.03.01.47.04	Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja				Jumlah dokumen Anjab dan ABK perangkat daerah yang disusun	2 dokumen			75,165,300	67,242,120	
3.00.03.3.00.03.01.28.	**Program penyelenggaraan pemerintahan umum dan perangkat daerah**	**4**	**Peringkat LPPD**	**16**			**Peringkat LPPD**	**16**	**529,460,545**	**919,770,000**	**SETDAKO**
3.00.03.3.00.03.01.28.01	Penyelenggaraan lomba kompetensi lurah (DID)				Jumlah Lurah terbaik	2 orang			2,000,000	90,000,000	
3.00.03.3.00.03.01.28.02	Peningkatan kompetensi aparatur pemerintahan kelurahan				Jumlah peserta pelatihan peningkatan kompetensi aparatur pemerintahan kelurahan	47 orang			24,710,000	80,000,000	
3.00.03.3.00.03.01.28.03	Penyelenggaraan lomba kompetensi camat				Jumlah Camat terbaik	1 orang			17,073,750	80,000,000	
3.00.03.3.00.03.01.28.04	Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)				Jumlah kecamatan yang melaksanakan PATEN	5 kecamatan			11,170,000	50,000,000	
3.00.03.3.00.03.01.28.05	Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)				Jumlah dokumen LKPJ Kota Payakumbuh Tahun n-1 yang disusun	1 dokumen			140,510,000	108,438,000	
3.00.03.3.00.03.01.28.09	Koordinasi penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD)				Jumlah dokumen ILPPD Kota Payakumbuh tahun n-1 yang disusun	1 dokumen			29,818,000	51,642,000	
3.00.03.3.00.03.01.28.10	Data rupa bumi				Jumlah dokumen Updating Data Rupa Bumi yang disusun	1 dokumen			38,945,000	100,000,000	
3.00.03.3.00.03.01.28.63	Koordinasi pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat				Jumlah Kecamatan, Kelurahan, dan LPM yang dibina dan mengikuti lomba kelurahan berprestasi, lomba LPM dan pencanangan BBGRM	5 kec, 47 kelurahan, 10 ketua LPM			50,000,000	51,642,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	**3**	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00.03.3.00.03.01.28.68	Fasilitasi Batas Daerah (DID)				Jumlah pilar yang dibangun	72 patok			157,001,950	250,000,000	
3.00.03.3.00.03.01.28.69	Koordinasi penyusunan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)				Jumlah dokumen EKPPD dan LPPD yang dikoordinasikan tahun n-1	2 dokumen			51,364,000	52,048,000	
3.00.03.3.00.03.01.28.70	Rapat koordinasi Pemerintahan Umum (DID)				Jumlah rapat koordinasi Pemerintahan Umum yang diikuti	12 kali			2,867,845	2,000,000	
3.00.03.3.00.03.01.28.71	Rapat kerja Camat dan Lurah di Kota Payakumbuh (DID)				Jumlah Rapat kerja dengan camat dan lurah yang dilaksanakan	12 kali			2,000,000	2,000,000	
3.00.03.3.00.03.01.28.72	Penyelenggaraan administrasi RT/RW se Kota Payakumbuh (DID)				Jumlah buku administrasi RT/RW yang disusun	47 paket			2,000,000	2,000,000	
3.00.03.3.00.03.01.51.	**Program peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama**	**5**	**Persentase peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan melalui lembaga/ Badan Zakat/ Wakaf**	**3,80 %**			**Persentase peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan melalui lembaga/ Badan Zakat/ Wakaf**	**3.80%**	**643,528,500**	**885,854,840**	**SETDAKO**
							Persentase masjid yang dikelola secara optimal	**60.00%**			
3.00.03.3.00.03.01.51.01	Pelayanan ibadah haji				Jumlah jemaah haji yang difasilitasi	300 orang			189,207,000	222,185,040	
3.00.03.3.00.03.01.51.02	Operasional tim ramadhan				Jumlah mesjid yang dikunjungi tim ramadhan	20 mesjid			110,758,000	168,928,100	
3.00.03.3.00.03.01.51.03	Operasional wirid pengajian				Jumlah wirid pengajian yang dilaksanakan	45 kali			60,682,000	81,442,744	
3.00.03.3.00.03.01.51.04	Peringatan hari besar islam				Jumlah peringatan hari besar islam yg dilaksanakan	6 kali			132,287,000	196,459,956	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	**3**	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00.03.3.00.03.01.51.07	Fasilitasi Kegiatan Kampung Al-Quran				1. Jumlah tempat ibadah yang melaksanakan magrib mengaji 2. Jumlah tempat ibadah yang melaksanakan sholat 5 waktu 3. Persentase jumlah kk yang melaksanakan magrib mengaji 4. Persentase jumlah kk yang mematikan TV waktu magrib mengaji 5. Persentase jumlah warung yang ditutup waktu magrib mengaji	1. 8 Tempat Ibadah 2. 15 Tempat Ibadah 3. 40% 4. 80% 5. 60%			64,168,000	115,762,500	
3.00.03.3.00.03.01.51.08	Fasilitasi Gerakan Subuh Berjamaah dan Magrib Mengaji (DID)				Jumlah mesjid yang melakukan magrib mengaji dan subuh berjamaah	44 masjid			34,000,000	48,400,000	
3.00.03.3.00.03.01.51.09	Peningkatan kompetensi imam, khatib dan pengurus masjid (DID)				Jumlah peserta yang dilatih sebagai Imam dan Khatib	40 orang			52,426,500	52,676,500	
3.00.03.3.00.03.01.52.	**Program peningkatan peran dan fungsi lembaga sosial keagamaan**	**5**	**Persentase lembaga keagamaan (MUI) yang aktif**	**40,00 %**			**Persentase organisasi/ lembaga sosial dan keagamaan yang aktif**	**74.00%**	**1,406,298,800**	**753,806,348**	**SETDAKO**
3.00.03.3.00.03.01.52.01	Fasilitasi kegiatan Didikan Subuh				1. Jumlah Lembaga Didikan Subuh Tergiat yang dinilai Tk. Kota Payakumbuh 2. Jumlah Lembaga Didikan Subuh Tergiat yang dinilai Tk. Propinsi Sumatera Barat	1. 5 LDS 2. 1 LDS			74,069,700	84,358,685	
3.00.03.3.00.03.01.52.02	Fasilitasi kegiatan keagamaan dan budaya				Jumlah lembaga keagamaan (MUI) dan kegiatan keagamaan yang difasilitasi	6 lembaga; 2 kegiatan keagamaan			162,250,000	296,929,645	
3.00.03.3.00.03.01.52.03	Koordinasi fasilitasi dan pembinaan Pelaksanaan bidang pendiidkan keagamaan				Jumlah kegiatan pembinaan pendidikan keagamaan yang difasilitasi	2 kegiatan			64,848,100	61,366,360	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00.03.3.00.03.01.52.05	Fasilitasi MTQ Nasional				Jumlah cabang lomba MTQ yang diikuti	18 cabang			1,012,629,500	148,378,450	
3.00.03.3.00.03.01.52.08	Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat (DID)				Jumlah Koordinasi pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 kali			16,892,000	61,366,360	
3.00.03.3.00.03.01.52.09	Sertifikasi guru TPQ/MDTA				1. Jumlah Guru TPQ/MDTA yang dilatih 2. Jumlah Guru TPQ/MDTA yang disertifikasi	1. 200 orang 2. 190 orang			75,609,500	101,406,848	
3.00.03.3.00.03.01.32.	**Program peningkatan kapasitas kelembagaan**	**4**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Baik**			**Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindak lanjuti**	**100.00%**	**66,498,200**	**302,623,021**	**SETDAKO**
3.00.03.3.00.03.01.32.05	Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pembangunan				Jumlah Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan	15 kali			32,506,400	120,908,970	
3.00.03.3.00.03.01.32.06	Pembinaan dan monitoring usaha pertambangan dan energi				Jumlah Pembinaan dan monitoring usaha pertambangan dan energi	5 kali			14,646,200	57,048,863	
3.00.03.3.00.03.01.32.07	Koordinasi dan pengendalian inflasi daerah				Jumlah rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah	4 kali			17,345,600	59,307,885	
3.00.03.3.00.03.01.32.08	Koordinasi dan fasilitasi forum pengembangan ekonomi (DID)				Jumlah rapat FGD FPED	3 kali			2,000,000	65,357,303	
3.00.03.3.00.03.01.48.	**Program peningkatan pengendalian administrasi pembangunan**	**4**	**Persentase jumlah paket lelang yang melalui elektronik**	**100%**			**Persentase pengelola kegiatan yang tertib administrasi sesuai dengan aturan**	**92.50%**	**75,605,950**	**150,000,000**	**SETDAKO**
3.00.03.3.00.03.01.48.01	Monitoring, evaluasi, pengendalian administrasi pembangunan (DAU & non DAU)				Jumlah monitoring Perangkat Daerah yang mengelola Dana DAU & Non DAU	10 kali			51,350,600	120,000,000	
3.00.03.3.00.03.01.48.02	Penyusunan laporan kegiatan pembangunan				Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang disusun	12 dokumen			24,255,350	30,000,000	
3.00.03.3.00.03.01.49.	**Program pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi**	**4**	**Persentase jumlah paket lelang yang melalui elektronik**	**100%**			**Persentase tertib administrasi terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**	**100.00%**	**639,751,375**	**1,010,000,000**	**SETDAKO**

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00.03.3.00.03.01.49.02	Operasional penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)				Persentase paket pengadaan barang/jasa yang metode pelaksanaannya wajib dilakukan melalui LPSE	100.00%			183,747,000	350,000,000	
3.00.03.3.00.03.01.49.03	Operasional penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan (ULP)				Persentase tertib administrasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah	100.00%			456,004,375	660,000,000	
3.00.03.3.00.03.01.53.	**Program peningkatan pendidikan Usaha Kesehatan Sekolah**	**1**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Baik**			**Jumlah Sekolah/Madrasah yang mencapai Strata yang Maksimal**	**100.00%**	**154,912,450**	**301,632,768**	**SETDAKO**
3.00.03.3.00.03.01.53.01	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)				1. Jumlah rakor UKS TK Kecamatan yg dilaksanakan 2. Jumlah rakor UKS TK Kota yg dilaksanakan 3. Jumlah Rakerda UKS TK Kota yang dilaksanakan 4.Jumlah sekolah yang dibina untuk lomba sekolah sehat tk Provinsi 5. Jumlah sekolah yang dinilai dalam lomba sekolah sehat TK Kota 6. Jumlah peserta yang difasilitasi untuk mengikuti jambore UKS TK Prop dan Nasional 7. Jumlah peserta yang difasilitasi untuk mengikuti jambore UKS TK Prop dan Nasional	1. 5 Kali 2. 1 Kali 3. 1 kali 4. 1 Sekolah 5. 1 Sekolah 6. 20 sekolah 7. 7 orang			154,912,450	301,632,768	
3.00.03.3.00.03.01.55.	**Program Peningkatan Produksi Daerah**	**2**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Baik**			**Persentase lembaga yang memanfaatkan data perkembangan produksi daerah**	**100%**	**128,547,800**	**500,143,613**	**SETDAKO**

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00.03.3.00.03.01.55.01	Fasilitasi dan Koordinasi Pembentukan BUMD				Jumlah rapat koordinasi pembentukan BUMD	5 Kali			45,720,000	33,075,000	
3.00.03.3.00.03.01.55.02	Fasilitasi promosi produk unggulan daerah (DID)				Jumlah fasilitasi promosi produk unggulan daerah	1 kali			2,000,000	323,483,423	
3.00.03.3.00.03.01.55.03	Pengumpulan, updating dan analisis data informasi perkembangan produksi daerah				Jumlah dokumen produksi daerah bidang ekonomi yang disusun	1 dokumen			80,827,800	143,585,190	
3.00.03.3.00.03.01.93.	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**4**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Baik**			**Presentase peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah**	**100%**	**3,686,000**	**26,036,000**	**SETDAKO**
3.00.03.3.00.03.01.93.03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH				Jumlah fasilitasi kegiatan staf ahli	3 kali			3,686,000	26,036,000	
3.00.04.	**KESEKRETARIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**								**22,959,889,730**	**23,189,488,627**	
0.00.3.00.3.00.04.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**BB**			**Nilai IKM**	**80.35**	**8,026,968,150**	**8,107,237,832**	**SEKWAN**
0.00.3.00.3.00.04.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat				Jumlah benda pos yang dibeli	2700 buah			12,900,000	13,029,000	
0.00.3.00.3.00.04.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Jumlah rekening air, listrik, telepon yang dibayarkan	8 rekening 12 bulan			190,800,000	192,708,000	
0.00.3.00.3.00.04.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya	22 unit			35,150,000	35,501,500	
0.00.3.00.3.00.04.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	30 orang			334,742,000	338,089,420	
0.00.3.00.3.00.04.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Jumlah bahan - bahan kebersihan kantor yang dibeli ; Jumlah THL kebersihan yang dibayarkan	32 jenis ; 11 org			326,659,844	329,926,442	
0.00.3.00.3.00.04.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				Jumlah perbaikan peralatan kerja	20 unit			25,400,000	25,654,000	
0.00.3.00.3.00.04.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor				Jumlah jenis ATK yang disediakam	52 jenis			61,813,450	62,431,585	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.3.00.3.00.04.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Jumlah barang cetakan, digandakan dan dijilid	cetak 9 jenis, pengganndaan 200 rb lembar, jilid 100 buku			64,200,000	64,842,000	
0.00.3.00.3.00.04.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Jumlah komponen listrik yang disediakan	16 jenis			15,635,000	15,791,350	
0.00.3.00.3.00.04.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	5 jenis			160,250,000	161,852,500	
0.00.3.00.3.00.04.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Jumlah bahan bacaan yang disediakan	6 jenis			338,870,000	342,258,700	
0.00.3.00.3.00.04.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				Jumlah porsi makanan/snack yang disediakan; Jumlah makan/minum rumah dinas ketua DPRD yang disediakan	12.934 porsi ; 12 bulan			380,754,000	384,561,540	
0.00.3.00.3.00.04.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Jumlah rapat koordinasi dalam dan keluar daerah	141 kali dalam daerah; 324 kali luar daerah			5,445,508,000	5,499,963,080	
0.00.3.00.3.00.04.01.01.19	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran				JUmlah tenaga administrasi / teknik perkantoran yang dibayarkan	21 orang			533,435,856	538,770,215	
0.00.3.00.3.00.04.01.01.21	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PNS				Jumlah premi yang dibayarkan untuk asuransi kesehatan anggota DPRD	80 orang			100,850,000	101,858,500	
0.00.3.00.3.00.04.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**BB**			**Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik**	**80%**	**832,286,300**	**840,609,163**	**SEKWAN**
0.00.3.00.3.00.04.01.02.08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas (DID + DAU)				Jumlah peralatan kebersihan dan mobiler peralatan rumah dinas yang disediakan	2 jenis mobiler; 15 peralatan kebersihan			119,998,000	121,197,980	
0.00.3.00.3.00.04.01.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan				Jumlah jenis pemeliharaan yang dilaksanakan	15 jenis			54,500,000	55,045,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.3.00.3.00.04.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (DID + DAU)				Jumlah jenis pemeliharaan yang dilaksanakan	7 jenis			50,000,000	50,500,000	
0.00.3.00.3.00.04.01.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				Jumlah kendaraan yang dilakukan pemeliharaan	4 unit			203,110,500	205,141,605	
0.00.3.00.3.00.04.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan yang dilakukan pemeliharaan	19 unit			357,177,800	360,749,578	
0.00.3.00.3.00.04.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Jumlah jenis pemelilharaan peralatan gedung yang dilaksanakan	25 unit			47,500,000	47,975,000	
0.00.3.00.3.00.04.01.03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**BB**			**Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap**	**100.00%**	**222,500,000**	**224,725,000**	**SEKWAN**
0.00.3.00.3.00.04.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang diadakan	125 stel			222,500,000	224,725,000	
0.00.3.00.3.00.04.01.06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**BB**			**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**BB**	**621,918,780**	**628,137,968**	**SEKWAN**
0.00.3.00.3.00.04.01.06.01	Penyebarluasan dan Publikasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD (DID + DAU)				Jumlah jenis media/informasi yang dipublikasikan	3 jenis		100%	621,918,780	628,137,968	
3.00.04.3.00.04.01.15.	**Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah**	**4**	**Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Payakumbuh terhadap pelayanan Sekretariat DPRD**	**76.00**			**Persentase fasilitasi rapat rapat dan persidangan DPRD tepat waktu**	**100%**	**13,256,216,500**	**13,388,778,665**	**SEKWAN**
			Persentase aspirasi masyarakat yang ditanggapi oleh DPRD	**85.00%**			**Jumlah Produk Hukum DPRD yang difasilitasi**	**11**			
3.00.04.3.00.04.01.15.01	Pembahasan rancangan peraturan daerah				Jumlah ranperda yang dibahas di DPRD	10 Ranperda			289,945,000	292,844,450	
3.00.04.3.00.04.01.15.02	Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama				Jumlah hearing/dialog yang dilaksanakan dalam satu tahun	30 kali			100,045,000	101,045,450	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00.04.3.00.04.01.15.03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan				Jumlah rapat - rapat alat kelengkapan dewan yang dilaksanakan dalam satu tahun	30 kali			68,400,000	69,084,000	
3.00.04.3.00.04.01.15.04	Rapat-rapat paripurna				Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan dalam satu tahun	25 kali			355,675,000	359,231,750	
3.00.04.3.00.04.01.15.05	Kegiatan Reses				Jumlah Reses yang dilaksanakan dalam satu tahun	3 kali			2,219,500,000	2,241,695,000	
3.00.04.3.00.04.01.15.06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah (DID + DAU)				Jumlah kunjungan kerja dalam propinsi dan keluar propinsi	216 kali dalam daerah, 278 luar daerah			6,131,964,000	6,193,283,640	
3.00.04.3.00.04.01.15.07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD (DID + DAU)				Jumlah diklat, workshop, seminar, lokakarya, bimtek dan lain-lain yang diikuti dalam satu tahun	6 kali			3,033,486,000	3,063,820,860	
3.00.04.3.00.04.01.15.11	Evaluasi Laporan Pemerintah Daerah (DID + DAU)				jumlah perda LKPD yang ditetapkan, dan jumlah rekomendasi LKPJ yang diterbitkan	1 perda; 1 rekomendasi			42,660,000	43,086,600	
3.00.04.3.00.04.01.15.51	Fasilitasi Rapat-Rapat Pembahasan APBD (DID + DAU)				Jumlah kegiatan dalam pembahasan APBD yang difasilitasi	4 kegiatan			299,177,500	302,169,275	
3.00.04.3.00.04.01.15.52	Fasilitasi Pengawasan Internal DPRD (DID + DAU)				jumlah kegiatan rapat pengawasan yang dilaksanakan BK dan Banem Perda	15 kali			715,364,000	722,517,640	
4.00.	**PENUNJANG**								**18,317,709,212**	**18,537,110,488**	
4.00.01.	**INSPEKTORAT**								**1,808,776,105**	**1,826,863,866**	
4.00.01.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai IKM**	**80,35%**	**938,819,405**	**948,207,599**	**INSPEKTORAT**
4.00.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat				Jumlah benda pos, cek giro yang dibeli dan jasa pengiriman yang dibayar	350 lembar matrai , 2 irimankali peng			1,700,000	1,717,000	
4.00.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Jumlah rekening listrik dan telepon yang dibayarkan	2 rekening 12 bulan			36,600,000	36,966,000	
4.00.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya	21 unit			8,750,000	8,837,500	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	24 orang			299,556,000	302,551,560	
4.00.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Jumlah bahan-bahan kebersihan kantor yang dibeli, jumlah tenaga kebersihan kantor yang dibayar	20 jenis, 2 orang			56,604,730	57,170,777	
4.00.01.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	28 unit			20,150,000	20,351,500	
4.00.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor				Jumlah jenis ATK yang disediakan	55 jenis			66,777,675	67,445,452	
4.00.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Jumlah barang cetak yang digandakan dan dijilid	10 jenis cetak, 12.500 lbr FC, 20 jilid			9,594,000	9,689,940	
4.00.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	6 jenis			1,159,000	1,170,590	
4.00.01.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	9 unit, 4 lusin, 2 set			0	0	
4.00.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Jumlah bahan bacaan yang disediakan	3 jenis			6,210,000	6,272,100	
4.00.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				Jumlah porsi makanan dan minuman/snack yang disediakan	1000 porsi makan dan 1000 snack			29,084,000	29,374,840	
4.00.01.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah yang dilaksanakan	92 kali dalam daerah, 27 kali luar daerah			402,634,000	406,660,340	
4.00.01.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur**	**4**	**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik**	**80.00%**	**157,128,944**	**158,700,233**	**INSPEKTORAT**
4.00.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	21 unit			157,128,944	158,700,233	
4.00.01.01.03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**4**	**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap**	**100.00%**	**18,000,000**	**18,180,000**	**INSPEKTORAT**
4.00.01.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapan yang diadakan	40 stel			18,000,000	18,180,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00.01.01.06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**4**	**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**	**12,200,000**	**12,322,000**	**INSPEKTORAT**
4.00.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	5 dokumen			1,100,000	1,111,000	
4.00.01.01.06.06	Penyebarluasan dan Publikasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD				Jumlah Penyebarluasan Informasi yang diselenggarakan	2 kali			10,000,000	10,100,000	
4.00.01.01.06.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik				Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	2 dokumen			1,100,000	1,111,000	
4.00.01.01.20	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah**	**4**	**Persentase Perangkat Daerah yang akuntabilitas keuangannya baik**	**80.00%**			**Persentase rekomendai hasil pemeriksaan Eksternal yang ditindaklanjuti**	**60.00%**	**89,241,700**	**90,134,117**	**INSPEKTORAT**
			Persentase perangkat daerah yang akuntabilitas kinerjanya meningkat per tahun	**77.40%**							
4.00.01.01.20.01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala				Jumlah PKPT yang dilakukan pemeriksanaan	50 obrik			13,200,000	13,332,000	
4.00.01.01.20.02	Penanganan Kasus pengaduan dan pengawasan khusus di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh				Jumlah penanganan kasus/khusus	15 kasus			5,500,000	5,555,000	
4.00.01.01.20.05	Inventarisasi temuan pengawasan				Jumlah gelar pengawasan yang diadakan	2 kali			7,428,000	7,502,280	
4.00.01.01.20.06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan				Jumlah tindak lanjut dan temuan hasil pemeriksanaan	2 kali			1,522,000	1,537,220	
4.00.01.01.20.07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif				Jumlah pengawasan komprehensif yang dilaksanakan	12 kali			1,500,000	1,515,000	
4.00.01.01.20.08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan				Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang diadakan	6 kali			5,000,000	5,050,000	
4.00.01.01.20.12	Penyampaian Laporan Satgas Kota dan Satgas OPD				Jumlah laporan satgas kota dan satgas OPD yang disampaikan	32 laporan			3,075,000	3,105,750	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00.01.01.20.13	Evaluasi SPIP dengan penilaian resiko				Jumlah PD yang dilakukan evaluasi SPIP dengan penilaian resiko	31 PD			4,830,000	4,878,300	
4.00.01.01.20.14	Verifikasi LHKASN Kota Payakumbuh				Jumlah PD yang diverifikasi LHKSN nya	31 PD			11,000,000	11,110,000	
4.00.01.01.20.15	Evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi				Nilai evaluasi PMPRB	55			36,186,700	36,548,567	
4.00.01.01.21	**Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan**	**4**	**Persentase Perangkat Daerah yang akuntabilitas keuangannya baik**	**80.00%**			**Tingkat/level kapabilitas APIP**	**3.00**	**314,054,750**	**317,195,298**	**INSPEKTORAT**
			Persentase perangkat daerah yang akuntabilitas kinerjanya meningkat per tahun	**77.40%**							
4.00.01.01.21.01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan				Persentase APIP yang mengikuti bimtek/pelatihan	100%			314,054,750	317,195,298	
4.00.01.01.22	**Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan**	**4**	**Nilai indek reformasi birokrasi**	**55.00**			**Persentase penyelesaian pengaduan gratifikasi yang ditindaklanjuti di lingkungan perangkat daerah**	**100.00%**	**279,331,306**	**282,124,619**	**INSPEKTORAT**
4.00.01.01.22.04	Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemko Payakumbuh				Persentase penyelesaian pengaduan gratifikasi yang ditindaklanjuti di lingkungan perangkat daerah	100%			173,345,306	175,078,759	
4.00.01.01.22.07	Bimtek pencegahan dan pengendalian Gratifikasi dan Saber Pungli di Lingkungan Pemko Payakumbuh (DID)				Jumlah peserta sosialisasi terkait saber pungli dan gratifikasi	350 org			105,986,000	107,045,860	
4.00.02.	**PERENCANAAN**								**3,556,445,008**	**4,477,271,890**	
0.00.4.00.4.00.02.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**4**	**Nilai Evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai IKM**	**81.00**	**1,853,593,072**	**1,056,223,277**	**BAPPEDA**
0.00.4.00.4.00.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat				Jumlah benda pos, cek giro yang dibeli dan jasa pengiriman yang dibayar	benda pos 300 lembar, cek giro 10 buku, paket pengiriman 15 kg			2,387,000	2,888,270	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.4.00.4.00.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Jumlah rekening air,listrik,telpon yang dibayarkan	4 rekening, 12 bulan			99,999,996	213,444,000	
0.00.4.00.4.00.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya	22 unit			5,375,000	6,503,750	
0.00.4.00.4.00.02.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	14 orang			462,571,000	222,717,440	
0.00.4.00.4.00.02.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Jumlah bahan-bahan kebersihan kantor yang dibeli, jumlah tenaga kebersihan kantor yang dibayar	17 jenis, 2 orang			58,608,336	68,274,085	
0.00.4.00.4.00.02.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	56 unit			18,011,000	21,793,310	
0.00.4.00.4.00.02.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor				Jumlah jenis ATK yang disediakan	59 jenis			30,360,896	27,224,032	
0.00.4.00.4.00.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Jumlah barang yang dicetak, digandakan dan dijilid	8 jenis, 50.000 lembar, 200 buku			19,807,872	23,967,525	
0.00.4.00.4.00.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	2 jenis			5,600,000	6,776,000	
0.00.4.00.4.00.02.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Jumlah bahan bacaan yang disediakan	3.600 eksemplar; 48 buku			21,120,000	25,555,200	
0.00.4.00.4.00.02.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				Jumlah porsi makanan; dan minuman/snack yang disediakan	574 porsi; 967 porsi; 63 galon			15,931,000	19,276,510	
0.00.4.00.4.00.02.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Jumlah rapat koordinasi dan kosultasi dalam dan keluar daerah yang dilaksanakan	40 kali; 25 kali			1,087,492,000	357,097,620	
0.00.4.00.4.00.02.01.01.19	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran				Jumlah tenaga adm/teknik perkantoran yang dibayarkan	1 orang			26,328,972	60,705,535	
0.00.4.00.4.00.02.01.02.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**4**	**Nilai Evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik**	**80.00%**	**158,818,340**	**173,222,960**	**BAPPEDA**

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.4.00.4.00.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	16 unit kendaraan roda dua; 3 unit kendaraan roda empat			158,818,340	173,222,960	
0.00.4.00.4.00.02.01.03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**4**	**Nilai Evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap**	**100.00%**	**18,900,000**	**21,600,000**	**BAPPEDA**
0.00.4.00.4.00.02.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan	42 stel			18,900,000	21,600,000	
0.00.4.00.4.00.02.01.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD**	**4**	**Nilai Evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat**	**A**			**Jumlah ASN yang mengikuti bimtek**	**3 org**	**26,840,724**	**61,517,276**	**BAPPEDA**
0.00.4.00.4.00.02.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				Jumlah aparatur yang dikirim untuk mengikuti bimbingan teknis	3 orang			26,840,724	61,517,276	
0.00.4.00.4.00.02.01.06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**4**	**Nilai Evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**	**13,500,000**	**13,500,000**	**BAPPEDA**
0.00.4.00.4.00.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun	6 laporan			6,820,000	6,820,000	
0.00.4.00.4.00.02.01.06.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik				Jumlah dokumen perencanaan dan pelayanan public yang tersusun	4 dokumen			6,680,000	6,680,000	
4.00.06.4.00.02.01.15.	**Program Pengembangan data/informasi**	**4**	**Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD**	**89,44**			**Persentase ketersediaan data/informasi perencanaan pembangunan daerah**	**80.00%**	**144,812,010**	**267,694,302**	**BAPPEDA**
4.00.06.4.00.02.01.15.08	Penyusunan informasi pembangunan daerah				Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Yang disusun	2 dokumen			53,521,700	113,040,862	
4.00.06.4.00.02.01.15.10	Penyusunan Data Indeks Nilai Tukar Petani (NTP)				Jumlah dokumen indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Kota Payakumbuh	1 Dok			75,394,450	115,437,207	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00.06.4.00.02.01.15.26	Koordinasi, rekapitulasi dan konsolidasi data teknis dan rencana kegiatan usulan DAK				Jumlah Bidang DAK yang diusulkan	10 bidang			15,895,860	39,216,233	
4.00.02.4.00.02.01.32.	**Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah**	**4**	**Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat**	**33,00%**			**Persentase faskel yang menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik**	**85.11%**	**78,377,010**	**97,801,517**	**BAPPEDA**
4.00.02.4.00.02.01.32.04	Peningkatan kapasitas tenaga fasilitator perencana				Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	48 orang			78,377,010	97,801,517	
4.00.02.4.00.02.01.16.	**Program perencanaan pembangunan daerah**	**4**	**Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD**	**95,24%**			**Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD**	**95,24%**	**1,084,043,952**	**1,770,230,400**	**BAPPEDA**
			Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	**33,00%**			**Persentase usulan masyarakat dan stakeholder yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah**	**55,00%**			
			Persentase Indikator RPJMD yang tercapai atau melebihi target	**89.44%**			**Persentase Perangkat Daerah yang mencapai target kinerja tahunan rata-rata minimal 90 %**	**100.00%**			
4.00.02.4.00.02.01.16.08	Penyusunan rancangan RKPD				Jumlah draft dokumen rancangan awal RKKPD yang tersusun	1 dokumen			254,837,000	271,051,253	
4.00.02.4.00.02.01.16.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD				Jumlah hari pelaksanaan Musrenbang RKPD	2 hari			135,143,615	294,076,585	
4.00.02.4.00.02.01.16.10	Penetapan RKPD				Jumlah Perwako RKPD yang diterbitkan	1 perwako			29,202,320	97,069,007	
4.00.02.4.00.02.01.16.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah				Jumlah Dokumen Evaluasi, Pengendalian, Pelaporan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	3 Dokumen			10,552,400	91,228,434	
4.00.02.4.00.02.01.16.18	Perubahan RKPD				Jumlah Perwako Perubahan RKPD yang diterbitkan	1 perwako			221,817,242	226,190,564	
4.00.02.4.00.02.01.16.21	Investigasi usulan kegiatan pembangunan				laporan & rekap usulan kegiatan hasil investigasi	100.00%			7,626,725	8,952,983	
4.00.02.4.00.02.01.16.22	Keberlanjutan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				Jumah dokumen yang disusun dengan aplikasi SIPPD	2 dokumen			210,322,650	390,830,787	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00.02.4.00.02.01.16.32	Intensifikasi SAKIP (DID)				Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penguatan SAKIP	31 Perangkat Daerah			214,542,000	390,830,787	
4.00.02.4.00.02.01.34.	**Program perencanaan pembangunan ekonomi**	**4**	**Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD**	**95,24%**			**Persentase PD lingkup bidang ekonomi yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras**	**100.00%**	**15,089,650**	**137,384,187**	**BAPPEDA**
4.00.02.4.00.02.01.34.09	Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pengembangan SDA				Jumlah rapat-rapat koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pengembangan SDA	4 kali			7,804,250	82,292,403	
4.00.02.4.00.02.01.34.10	Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang kewirausahaan dan ekonomi kreatif				Jumlah koordinasi sub bidang kewirausahaan dan ekonomi kreatif	4 kali			7,285,400	55,091,784	
4.00.02.4.00.02.01.35.	**Program perencanaan sosial budaya**	**4**	**Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD**	**95,24%**			**Persentase PD lingkup bidang sosial dan budaya yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras**	**100.00%**	**51,319,400**	**340,500,000**	**BAPPEDA**
4.00.02.4.00.02.01.35.03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya				Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan, rapat-rapat, perjalanan dinas dalam dan luar daerah	6 Kali Rapat, 15 kali perjalanan dinas dalam dan luar daerah			10,809,400	141,000,000	
4.00.02.4.00.02.01.35.05	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)				- Jumlah Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan - Jumlah Dokumen LP2KD yang dibuat	- Rapat Koordinasi 3 Kali - LP2KD 1 Dokumen			25,350,000	150,000,000	
4.00.02.4.00.02.01.35.06	Koordinasi Penyusunan Aksi PUG				- Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Aksi PUG	4 kali rapat; 8 kali rapat/konsultasi luar daerah			7,580,000	16,500,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00.02.4.00.02.01.35.07	Koordinasi Penyusunan Aksi SDG'S				- Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Aksi SDG'S	4 kali rapat; 8 kali rapat/konsultasi luar daerah			7,580,000	33,000,000	
4.00.02.4.00.02.01.28.	**Program Kerjasama Pembangunan**	**4**	**Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD**	**95,24%**			**Persentase kerjasama daerah yang ditindaklanjuti**	**90.00%**	**19,128,000**	**131,917,830**	**BAPPEDA**
4.00.02.4.00.02.01.28.02	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah				- Jumlah rapat koordinasi perencanaan kerjasama pembangunan antar daerah yang dilaksanakan - Jumlah MOU yang dibuat	- 4 kali - 3 MOU			19,128,000	131,917,830	
4.00.02.4.00.02.01.30.	**Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh**	**4**	**Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD**	**95,24%**			**Persentase PD bidang IPW yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras**	**100.00%**	**11,762,725**	**84,721,478**	**BAPPEDA**
4.00.02.4.00.02.01.30.02	Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh				Jumlah rapat-rapat koordinasi pemanfaatan ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh tingkat kota, Propinsi dan Pusat	12 SKPD, 5 kali			6,202,475	36,350,215	
4.00.02.4.00.02.01.30.05	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah				Jumlah rapat-rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah Tingkat Kota, propinsi dan pusat	8 kali			5,560,250	48,371,263	
4.00.02.4.00.02.01.31.	**Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar**	**4**	**Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD**	**95,24%**			**Persentase hasil koordinasi perencanaan pengembangan kota-kota menangah dan besar yang ditindaklanjuti**	**100.00%**	**69,722,125**	**235,958,663**	**BAPPEDA**

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00.02.4.00.02.01.31.09	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan				jumlah rapat-rapat koordinasi pengentasan masalah air minum dan sanitasi tingkat kota propinsi dan pusat	12 SKPD, 5 kali			15,438,875	65,340,908	
4.00.02.4.00.02.01.31.12	Koordinasi Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh				jumlah Rapat-Rapat dan Koordinasi penataan, pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh tingkat kota propinsi dan pusat	12 SKPD, 6 kali			5,671,500	38,617,755	
4.00.02.4.00.02.01.31.13	Revisi RPIJM				Jumlah dokumen RPIJM yang direvisi	1 dokumen			48,611,750	132,000,000	
4.00.02.4.00.02.01.24.	**Program penyusunan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat**	**A**			**Jumlah aksi pelaporan PPK**	**4 pelaporan**	**10,538,000**	**85,000,000**	**BAPPEDA**
4.00.02.4.00.02.01.24.	Penyusunan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah				Jumlah Pelaporan Aksi PPK	4 Kali Pelaporan			10,538,000	85,000,000	
4.00.03.	**KEUANGAN**								**9,752,244,638**	**9,083,381,078**	
0.00.4.00.4.00.03.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai IKM**	**86.00**	**4,149,067,966**	**3,636,130,474**	**BKD**
0.00.4.00.4.00.03.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat				Jumlah material, perangko, buku cek yang dibeli	1.112 buah			5,516,000	5,025,000	
0.00.4.00.4.00.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Jumlah rekening listrik, air dan telepon yang dibayarkan	3 rekening x 12bulan, 12 bulan kawan/faximile, internet dan astinet			271,200,000	872,400,000	
0.00.4.00.4.00.03.01.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah				jumlah barang milik daerah yang diasuransikan	108 unit			414,119,466	422,919,466	
0.00.4.00.4.00.03.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Jumlah pajak kendaraan dinas yang dibayarkan	44 unit kendaraan roda 2, 11 unit kendaraan roda 4			22,000,000	19,140,000	
0.00.4.00.4.00.03.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				jumlah pengelola adm keuangan yang dibayarkan	66 orang			1,664,220,000	732,982,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.4.00.4.00.03.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				jumlah alat kebersihan yang disediakan, tenaga kebersihan dan security yang dibayarkan jasanya	4 jenis, 6 orang			112,512,500	208,782,000	
0.00.4.00.4.00.03.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	6 jenis			15,000,000	30,000,000	
0.00.4.00.4.00.03.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor				Jumlah ATK yang dibayarkan	38 jenis			42,800,000	56,836,625	
0.00.4.00.4.00.03.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Jumlah fotocopy, cetak dan jilid	10 jenis cetak, 70.000 lembar fotocopy dan 250 buku			47,000,000	57,447,000	
0.00.4.00.4.00.03.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Jumlah alat listrik dan elektronik yang dibayarkan	2 jenis			20,000,000	3,000,000	
0.00.4.00.4.00.03.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Jumlah media cetak dan buku peraturan tentang keuangan yang dibayarkan	4 media cetak dan 2 buku peraturan keuangan			9,000,000	7,405,000	
0.00.4.00.4.00.03.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				jumlah porsi makanan yang dibayarkan	2500 porsi			85,475,000	99,997,383	
0.00.4.00.4.00.03.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah				jumlah aparat yang mengikuti koordinasi dan konsultasi ke pemerintah pusat dan propinsi	70 orang			1,440,225,000	1,120,196,000	
0.00.4.00.4.00.03.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik**	**80.00%**	**398,797,000**	**363,161,000**	**BKD**
0.00.4.00.4.00.03.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda2 yang biaya rutin berkalanya dibayarkan	44 unit roda 2, 11 unit roda 4			398,797,000	363,161,000	
0.00.4.00.4.00.03.01.03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap**	**100.00%**	**33,750,000**	**33,750,000**	**BKD**
0.00.4.00.4.00.03.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				jumlah pakaian dinas ASN badan keuangan daerah	75 stel			33,750,000	33,750,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.4.00.4.00.03.01.06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**	**6,345,625**	**34,370,000**	**BKD**
0.00.4.00.4.00.03.01.06.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik				Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	6 dokumen			6,345,625	34,370,000	
4.00.03.4.00.03.01.15.	**Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**4**	**Opini laporan keuangan pemerintah daerah**	**WTP**			**Penetapan Perda APBD tepat waktu**	**20 Des**	**3,764,284,047**	**4,015,969,604**	**BKD**
			Penetapan Perda APBD tepat waktu	**20 Des**			**Persentase realisasi belanja terhadap anggaran belanja**	**95.00%**			
			Kontribusi PAD terha-dap pendapatan Daerah	**12,00%**			**Persentase sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu terhadap total pendapatan**	**< 10,00%**			
							Laporan keuangan berbasis akrual	**ada**			
							Persentase RKBMD yang diakomodir dalam APBD				
							Kontribusi PAD terha-dap pendapatan Daerah	**12,00%**			
							Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	**100.00%**			
							Persentase penerimaan retribusi daerah	**100.00%**			
							IKM Pelayanan Pajak Daerah	**83,00**			
4.00.03.4.00.03.01.15.02	Penyusunan standar satuan harga				Jumlah buku standar satuan harga yang disusun	2 dokumen SSH 2020			58,057,750	58,327,401	
4.00.03.4.00.03.01.15.06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD				jumlah perda APBD TA 2020, KUA dan PPAS serta nota kesepahaman	4 jenis dokumen			273,993,950	283,029,950	
4.00.03.4.00.03.01.15.07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD				Jumlah dokumen perwako penjabaran APBD TA 2020 dan DPA TA 2020	3 dokumen			79,568,150	123,188,950	
4.00.03.4.00.03.01.15.08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD				jumlah dokumen perda perubahan APBD tahun 2019, KUPA dan PPAS-P serta nota kesepahaman	4 jenis dokumen,			263,956,000	251,145,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00.03.4.00.03.01.15.09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD				jumlah Perwako tentang penjabaran perubahan APBD, Nota Keuangan P-APBD dan Pergeseran APBD	4 jenis dokumen			80,023,500	114,715,000	
4.00.03.4.00.03.01.15.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD				jumlah peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 dokumen perda			184,754,305	208,347,550	
4.00.03.4.00.03.01.15.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD				jumlah peraturan KDH ttg penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 dokumen perwako			28,960,973	81,929,975	
4.00.03.4.00.03.01.15.13	Pengembangan dan Keberlanjutan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah				jumlah pengembangan dan keberlanjutan SIPKD	32 OPD dan 2 dokumen elektronik			202,874,000	341,934,440	
4.00.03.4.00.03.01.15.22	Pendataan PAD dan PBB				Jumlah objek pajak yang dilakukan pendataan	80.00%			127,158,130	157,487,525	
4.00.03.4.00.03.01.15.23	Penyusunan laporan keuangan triwulan, semester dan tahunan				jumlah laporan keuangan triwulan, semesteran dan tahunan	4 dokumen			13,672,737	77,227,950	
4.00.03.4.00.03.01.15.24	Penyelesaian TP-TGR keuangan daerah				Jumlah dokumen TP-TGR keuangan daerah yang dirindaklanjuti	12 dokumen tindak lanjut			12,018,980	10,926,350	
4.00.03.4.00.03.01.15.25	Pengendalian dan penghapusan asset darah (DID)				jumlah pelaksanaan penghapusan aset	4 kali			59,507,700	87,443,700	
4.00.03.4.00.03.01.15.26	Pelaksanaan pengelolaan barang/asset daerah				Jumlah jasa penilai aset daerah	5 paket			65,973,500	80,853,500	
4.00.03.4.00.03.01.15.27	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah				Jumlah dokumen rekonsiliasi yang dihasilkan	4 dokumen			18,840,000	18,150,000	
4.00.03.4.00.03.01.15.28	Pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah (DID)				Jumlah pembinaan yang dilakukan kepada SKPD dalam setahun	4 kali			43,792,500	83,367,000	
4.00.03.4.00.03.01.15.32	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber PAD non Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)				Jumlah realisasi PAD yang ditargetkan	90%			35,236,250	109,671,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00.03.4.00.03.01.15.33	Penyusunan satuan standar biaya				Jumlah dokumen yang disusun	2 dokumen Perubahan SBU 2018, SBU 2018			14,793,500	14,542,500	
4.00.03.4.00.03.01.15.35	Inventarisasi dan rekonsiliasi aset daerah (DID)				1. lama pelaksanaan inventarisasi dan rekon aset SKPD, triwulan,semesteran dan tahunan 2. jumlah buku induk inventaris semesteran dan tahunan pemerintah kota payakumbuh 3. jumlah buku induk, kartu inventaris barang semesteran dan tahunan SKPD 4. jumlah peserta bimtek pengurus barang ttg SIAP BMD	1. 1 tahun 2. 5 buku 3. 31 buku 4. 350 orang			228,087,300	235,845,500	
4.00.03.4.00.03.01.15.36	Penyusunan daftar kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD) dan daftar pemeliharaan BMD				Jumlah DKBMD dan DKPBMD OPD yang disediakan	31 SKPD			23,355,000	29,361,526	
4.00.03.4.00.03.01.15.38	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD khusus PBB-P2				Jumlah realisasi PBB yang ditargetkan	90%			49,575,500	70,105,000	
4.00.03.4.00.03.01.15.39	Penyediaan dokumen pelayanan PBB-P2 (DAU+DID)				Jumlah dokumen yang dihasilkan	14 dokumen			198,116,400	185,187,800	
4.00.03.4.00.03.01.15.40	Penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah (DID)				Jumlah dokumen rancangan regulasi keuangan daerah Kota Payakumbuh yang disusun	3 dokumen			23,251,800	88,518,800	
4.00.03.4.00.03.01.15.42	Peningkatan pengelolaan manajemen kas daerah				jumlah pelaksanaan SPK Deposito dengan Bank umum	2 kali			5,379,000	4,890,000	
4.00.03.4.00.03.01.15.45	Penyelenggaraan pelayanan pajak daerah				Jumlah jenis realisasi pemungutan pajak daerah	10 jenis			344,361,256	307,643,187	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	**3**	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00.03.4.00.03.01.15.52	Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah				1.jumlah SK ttg uang persediaan yang diterbitkan 2.jumlah SPD per-triwulan dan SPD Perubahan yang diterbitkan 3.jumlah Perwako anggaran kas, pergeseran dan perubahannya yang diterbitkan 4. jumlah pergeseran anggaran kas yang diterbitkan 5.jumlah dokumen perubahan anggaran kas yang diterbitkan 6. jumlah dokumen	1. 1 dokumen 2. 110 dokumen 3. 3 dokumen 4. 31 dokumen 5. 31 dokumen 5. 31. dokumen			41,330,000	34,684,000	
4.00.03.4.00.03.01.15.53	Sosialisasi peraturan tentang penganggaran keuangan daerah (DID)				jumlah sosialisasi tugas dan fungsi tim anggaran pemerintah daerah	35 orang			191,241,500		
4.00.03.4.00.03.01.15.54	Rekonsiliasi Data Dana Transfer				1. jumlah laporan realisasi pemanfaatan dan penggunaan DBH CHT 2. Jumlah pelaksanaan inventarisasi dan singkronisasi data dan tunjangan guru di Kota Payakumbuh 3. jumlah laporan dana transfer ke daerah yang akurat	1. … laporan 2. …. laporan 3. …. Laporan			11,140,000	11,776,000	
4.00.03.4.00.03.01.15.55	Penataan PBB-P2				Persentase pendataan PBB-P2	90.00%			1,085,264,366	945,670,000	
4.00.03.4.00.03.01.46.	**Program peningkatan pelayanan BLUD Fasilitasi Pembiayaan**	**4**	**Kontribusi PAD terha-dap pendapatan Daerah**	**12,00%**			**Persentase fasilitasi pembiayaan yang lancar dari total pembiayaan** **IKM Fasilitasi Pembiayaan**	**80.00%** **83,00**	**1,400,000,000**	**1,000,000,000**	**BKD**
4.00.03.4.00.03.01.46.01	Pelayanan fasilitasi pembiayaan daerah				Jumlah masyarakat atau nasabah yang menerima manfaat dari BLUD	800 pemanfaat			1,400,000,000	1,000,000,000	
4.00.04.	**KEPEGAWAIAN**								**2,718,904,608**	**2,746,093,654**	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.4.00.4.00.04.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**4**	**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai IKM**	**81.55**	**1,360,141,208**	**1,373,742,620**	**BKPSDM**
0.00.4.00.4.00.04.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat				Jumlah benda pos dan paket pengiriman yang dilaksanakan	668 materai dan paket pengiriman selama 1 tahun			3,155,000	3,186,550	
0.00.4.00.4.00.04.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	3 rekening/bulan			54,120,000	54,661,200	
0.00.4.00.4.00.04.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional	3 unit roda 4 13 unit roda 2			5,064,000	5,114,640	
0.00.4.00.4.00.04.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan jasanya	18 orang			297,538,000	300,513,380	
0.00.4.00.4.00.04.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Jumlah alat kebersihan, peralatan dan bahan pembersih kantor yang disediakan	22 item			33,457,328	33,791,901	
0.00.4.00.4.00.04.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	45 unit			10,803,250	10,911,283	
0.00.4.00.4.00.04.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor				Jumlah Alat Tulis Kantor	52 item			35,794,030	36,151,970	
0.00.4.00.4.00.04.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Jumlah barang yang dicetak, digandakan dan dijilid	12 jenis, 50.000 lembar, 200 buah			22,889,600	23,118,496	
0.00.4.00.4.00.04.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	8 item			5,365,000	5,418,650	
0.00.4.00.4.00.04.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Jumlah bahan bacaan	3 media			4,512,000	4,557,120	
0.00.4.00.4.00.04.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				Jumlah makanan dan minuman yang tersedia dalam rangka pelaksanaan tugas	550 porsi; 550 porsi; 66 galon			15,805,000	15,963,050	
0.00.4.00.4.00.04.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	48 kali; 24 kali			871,638,000	880,354,380	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.4.00.4.00.04.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**4**	**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik**	**80.00%**	**86,943,450**	**87,812,885**	**BKPSDM**
0.00.4.00.4.00.04.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Jumlah pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	16 unit			86,943,450	87,812,885	
0.00.4.00.4.00.04.01.03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**4**	**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap**	**100.00%**	**18,450,000**	**18,634,500**	**BKPSDM**
0.00.4.00.4.00.04.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	40 Stel			18,450,000	18,634,500	
0.00.4.00.4.00.04.01.06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**4**	**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**	**9,224,200**	**9,316,442**	**BKPSDM**
0.00.4.00.4.00.04.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan yang dihasilkan	5 Dokumen			5,075,000	5,125,750	
0.00.4.00.4.00.04.01.06.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik				Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Pelayanan Publik Yang Dihasilkan	3 Dokumen			4,149,200	4,190,692	
4.00.04.4.00.04.01.16.	**Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**	**4**	**Persentase Pegawai yg memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial**	**70.68**			**Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi**	**40.00%**	**350,822,300**	**354,330,523**	**BKPSDM**
			Persentase pegawai yg memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis	**54.31%**							
4.00.04.4.00.04.01.16.01	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah (DID)				Jumlah CPNSD yang mengikuti pelatihan prajabatan	160 Orang			31,169,500	31,481,195	
4.00.04.4.00.04.01.16.02	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (DID)				Jumlah peserta Diklat PIM Tk. IV Dan Pengiriman Peserta Diklat PIM Tk. III Dan Tk .II	33 Orang			100,000,000	101,000,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00.04.4.00.04.01.16.03	Diklat Teknis, Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah				Jumlah Pengiriman Peserta Diklat Teknis dan Fungsional	15 orang			219,652,800	221,849,328	
4.00.04.4.00.04.01.17.	**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**	**4**	**Persentase Indeks Ke-puasan Pelayanan Adm - inistrasi Kepegawaian**	**81,55**			**Persentase database kepegawaian yang tersedia secara lengkap**	**100.00%**	**893,323,450**	**902,256,685**	**BKPSDM**
							Persentase laporan kesalahan data kepegawaian yang ditindaklanjuti	**100.00%**			
							Persentase penyelesaian produk layanan	**100.00%**			
							Persentase penerimaan PNS sesuai dengan formasi yang dibutuhkan	**100.00%**			
							Persentase penyusunan formasi yang sesuai dengan analisis jabatan	**100.00%**			
							Persentase prestasi kerja PNS yang bernilai baik	**98.90%**			
4.00.04.4.00.04.01.17.02	Seleksi penerimaan calon PNS (DIP)				Jumlah PNS Yang Diterima	1 Paket			2,834,500	2,862,845	
4.00.04.4.00.04.01.17.04	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS				Jumlah dokumen penataan administrasi PNS	2 dok			4,181,000	4,222,810	
4.00.04.4.00.04.01.17.05	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah				Jumlah dokumen informasi Kepegawaian yang diterbitkan	6 dokumen			6,401,300	6,465,313	
4.00.04.4.00.04.01.17.09	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS				Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang ditangani	21 kasus			29,864,800	30,163,448	
4.00.04.4.00.04.01.17.11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas				Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar dan Izin belajar	29 orang			401,411,000	405,425,110	
4.00.04.4.00.04.01.17.17	Pengurusan ujian dinas dan penyesuaian ijazah				Jumlah dokumen Pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah PNS	2 dok			14,385,000	14,528,850	
4.00.04.4.00.04.01.17.19	Bimbingan dan konseling terhadap PNS				Jumlah pelaksanaan pembekalan persiapan perkawinan dan perceraian PNS	25 kali sidang			11,405,900	11,519,959	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00.04.4.00.04.01.17.20	Pengurusan pemberian penghargaan tanda kehormatan satya lencana				Jumlah Pengurusan Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya	300 orang			2,367,500	2,391,175	
4.00.04.4.00.04.01.17.21	Pemutakhiran dan pengelolaan data kepegawaian wajib LHKPN				Jumlah Penyampaian LHKPN	100.00%			2,627,950	2,654,230	
4.00.04.4.00.04.01.17.22	Pengelolaan dokumen kepegawaian				Jumlah dokumen kepegawaian yang dikelola	3177dokumen PNS			2,640,000	2,666,400	
4.00.04.4.00.04.01.17.24	Penilaian Kinerja Aparatur				Jumlah pelaksanaan evaluasi SKP	31 OPD			44,956,850	45,406,419	
4.00.04.4.00.04.01.17.25	Penerbitan kartu identitas pegawai				Jumlah Kartu Identitas PNS Kota Payakumbuh yang disediakan	2 Jenis kartu			1,361,000	1,374,610	
4.00.04.4.00.04.01.17.26	Pengurusan kartu istri dan kartu suami PNS				Jumlah kartu istri dan kartu suami PNS	100 Karis/Karsu			905,900	914,959	
4.00.04.4.00.04.01.17.27	Penyusunan perhitungan kebutuhan ASN sistem elektronik (e-formasi)				Jumlah Perhitungan Kebutuhan ASN Kota Payakumbuh Tahun 2019	1 E-dokumen			4,235,000	4,277,350	
4.00.04.4.00.04.01.17.30	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS pejabat struktural				Jumlah Penempatan Pejabat Sesuai Dengan Kompetensi Yng Dimilikinya	3 Dokumen			40,035,000	40,435,350	
4.00.04.4.00.04.01.17.31	Pelaksanaan Tes Pemetaan Potensi dan Kompetensi Pejabat Struktural				Jumlah tes pemetaan potensi bagi pejabat dilingkungan Kota Payakumbuh	200 org			169,562,750	171,258,378	
4.00.04.4.00.04.01.17.32	Penataan sistem administrasi pensiun dan pengurusan kartu taspen				Jumlah SK Pensiun, Kartu Taspen yang diterbitkan.	2 Dokumen			1,868,000	1,886,680	
4.00.04.4.00.04.01.17.33	Penyusun Standar Kompetensi Manajerial dan teknis PNS				Jumlah standar kompetensi pejabat struktural yang disusun	3 buku			94,678,000	95,624,780	
4.00.04.4.00.04.01.17.34	Fasilitas Korps Organisasi Profesi ASN				Jumlah fasilitasi kegiatan korpri	3 kali			57,602,000	58,178,020	
4.00.06.	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**								**481,338,853**	**403,500,000**	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00.02.4.00.02.01.29.	**Program pengembangan inovasi daerah**	**4**	**Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan**	**80%**			**Persentase hasil penelitian yang ditindak lanjuti stakeholder (jumlah penelitian yang ditindak lanjuti dibagi jumlah seluruh penelitian dikali 100%)**	**80.00%**	**481,338,853**	**403,500,000**	**BAPPEDA**
4.00.02.4.00.02.01.29.29	Kajian Ekonomi Pembangunan Daerah dan Kewilayahan				Jumlah dokumen penelitian kebijakan perencanaan ekonomi pembangunan daerah dan kewilayahan yang disusun	1 dokumen			206,802,500	145,000,000	
4.00.02.4.00.02.01.29.30	Kajian Sosial dan Pemerintahan				Jumlah dokumen penelitian kebijakan perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya yang disusun	2 dokumen			185,389,000	120,000,000	
4.00.02.4.00.02.01.29.31	Penguatan Inovasi Kepemerintahan dan Layanan Publik				Jumlah rekomendasi kebijakan kelitbangan dan inovasi daerah	5 rekomendasi			32,007,000	40,500,000	
4.00.02.4.00.02.01.29.35	Pengembangan Karya Inovasi dan Teknologi Tepat Guna				jumlah fasilitasi inovasi dan teknologi tepat guna	3 kali fasilitasi			57,140,353	98,000,000	
5.00.	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**								**3,408,377,663**	**5,156,221,199**	
5.00.01.	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**								**2,189,911,742**	**3,086,999,056**	
0.00.5.00.5.00.01.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai IKM**	**87.00**	**635,301,832**	**599,611,656**	**KESBANGPOL**
0.00.5.00.5.00.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat				Jumlah benda pos, cek giro yang dibeli	143 buah benda pos			999,000	999,000	
0.00.5.00.5.00.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Jumlah rekening PLN, PDAM, Telkom yang dibayarkan	3 rekening			24,000,000	26,400,000	
0.00.5.00.5.00.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajak dan stnk	8 unit			1,725,000	1,725,000	
0.00.5.00.5.00.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Tersedianya jasa pengelola keuangan	12 orang			101,096,332	46,507,616	
0.00.5.00.5.00.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Jumlah bahan pembersih dan peralatan kebersihan	16 jenis			29,138,000	50,559,440	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.5.00.5.00.01.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	5 unit			5,435,000	5,435,000	
0.00.5.00.5.00.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor				Jumlah atk yang disediakan	48 jenis			19,248,000	19,333,100	
0.00.5.00.5.00.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Jumlah barang cetakan, penggandaan dan jilid	21 jenis			21,593,400	21,593,400	
0.00.5.00.5.00.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Jumlah komponen listrik dan elektronik yang disediakan	9 jenis			4,746,100	4,746,100	
0.00.5.00.5.00.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Jumlah bahan bacaan dan peraturan peruu yang disediakan	1080 eks			5,760,000	5,760,000	
0.00.5.00.5.00.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				Jumlah makan minum yang disediakan	1100 porsi			15,125,000	15,125,000	
0.00.5.00.5.00.01.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan	64 kali			406,436,000	401,428,000	
0.00.5.00.5.00.01.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik**	**80.00%**	**74,916,000**	**84,066,000**	**KESBANGPOL**
0.00.5.00.5.00.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	1 unit			15,000,000	24,150,000	
0.00.5.00.5.00.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dipelihara	8 unit			59,916,000	59,916,000	
0.00.5.00.5.00.01.01.03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap**	**100.00%**	**5,850,000**	**6,750,000**	**KESBANGPOL**
0.00.5.00.5.00.01.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Jumlah pakaian dinas yang diadakan	13 orang			5,850,000	6,750,000	
0.00.5.00.5.00.01.01.06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**4**	**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**	**25,000,000**	**30,000,000**	**KESBANGPOL**
0.00.5.00.5.00.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Jumlah dokumen laporan capaian kinerja ikhtisar dan realisasi kinerja SKPD	5 dokumen			10,000,000	10,000,000	
0.00.5.00.5.00.01.01.06.06	Penyebarluasan dan Publikasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD				Jumlah informasi yang dipublikasikan	1 kali			5,000,000	10,000,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.5.00.5.00.01.01.06.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik				Jumlah dokumen sop, ikm, spm, spp, renja, iku dll	5 dokumen			10,000,000	10,000,000	
5.00.01.5.00.01.01.43.	**Program pendidikan politik masyarakat**	**4**	**Persentase ormas yang aktif**	**90.64%**			**Persentase ormas yang aktif**	**90.64%**	**297,895,210**	**471,210,330**	**KESBANGPOL**
5.00.01.5.00.01.01.43.01	Penyuluhan kepada masyarakat				Jumlah rapat tim dan sosialisasi	9 kali			211,506,250	363,369,800	
5.00.01.5.00.01.01.43.03	koordinasi forum-forum diskusi politik				Jumlah sosialisasi dan rapat yang diadakan	4 kali			67,849,750	67,777,000	
5.00.01.5.00.01.01.43.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				Jumlah monitoring yang diadakan	50 kali			18,539,210	40,063,530	
5.00.01.5.00.01.01.41	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	**4**	**Persentase penanganan konflik yang terjadi di tengah masyarakat**	**100.00%**			**Persentase penanganan konflik yang terjadi di tengah masyarakat**	**100.00%**	**979,474,500**	**1,638,336,750**	**KESBANGPOL**
5.00.01.5.00.01.01.41.01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama				Jumlah rapat tim pakem dan fkub serta jumlah sosialisasi	12 kali			75,798,100	533,235,200	
5.00.01.5.00.01.01.41.02	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat				Jumlah rapat PPWK, ormas, konflik sosial, pengamanan akhir tahun dll	13 kali			697,731,200	714,794,000	
5.00.01.5.00.01.01.41.03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa				Jumlah sosialisasi yang diadakan	3 kali			107,455,000	99,842,000	
5.00.01.5.00.01.01.41.04	Fasilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat				Jumlah rapat tim fkdm dan rapat kominda	10 kali			98,490,200	290,465,550	
5.00.01.5.00.01.01.42	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	**4**	**Persentase ormas yang aktif**	**90.64%**			**Jumlah sosialisasi yang diadakan**	**5 kali**	**171,474,200**	**257,024,320**	**KESBANGPOL**
5.00.01.5.00.01.01.42.02	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan (DID)				Jumlah rapat dan sosialisasi yang diadakan	6 kali			171,474,200	257,024,320	
5.00.02.	**PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**								**1,218,465,921**	**2,069,222,143**	
0.00.5.00.5.00.02.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**4**	**Nilai Evaluasi AKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai IKM**	**83.00**	**477,523,900**	**694,385,000**	**BPBD**
0.00.5.00.5.00.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat				Jumlah legalitas administrasi	243 lembar			999,000	1,200,000	
0.00.5.00.5.00.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Jumlah Pembayaran rekening telpon, air dan listrik	2 rekening			10,800,800	504,000	
0.00.5.00.5.00.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Jumlah Pembayaran Pajak dan Surat Menyurat Kendaraan Dinas / Operasional	10 unit			3,850,000	6,850,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.5.00.5.00.02.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Jumlah Jasa Pengelola Keuangan	17 orang			106,364,000	106,364,000	
0.00.5.00.5.00.02.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Jumlah Alat-Alat Kebersihan Kantor	18 jenis			28,277,700	56,450,000	
0.00.5.00.5.00.02.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki	21 unit			27,784,000	57,764,000	
0.00.5.00.5.00.02.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor				Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	41 jenis			9,946,000	18,000,000	
0.00.5.00.5.00.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Jumlah Cetak dan Penjilidan	15 jenis			14,685,000	17,000,000	
0.00.5.00.5.00.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Jumlah Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	11 jenis			2,938,000	3,838,000	
0.00.5.00.5.00.02.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 media			12,280,000	12,280,000	
0.00.5.00.5.00.02.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				Jumlah Makan Minum Rapat Kantor	363 porsi			11,390,000	12,655,000	
0.00.5.00.5.00.02.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	1 tahun			199,766,000	350,000,000	
0.00.5.00.5.00.02.01.01.19	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran				Jumlah Tenaga Non PNS / THL	2 orang			48,443,400	51,480,000	
0.00.5.00.5.00.02.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**4**	**Nilai Evaluasi AKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik**	**80.00%**	**129,640,521**	**143,115,643**	**BPBD**
0.00.5.00.5.00.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	14 unit			129,640,521	143,115,643	
0.00.5.00.5.00.02.01.03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**4**	**Nilai Evaluasi AKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap**	**100.00%**	**44,470,000**	**62,000,000**	**BPBD**
0.00.5.00.5.00.02.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Jumlah pakaian dinas lengkap dengan atribut	40 stel			44,470,000	62,000,000	
0.00.5.00.5.00.02.01.06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**4**	**Nilai Evaluasi AKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**	**6,600,000**	**10,000,000**	**BPBD**
0.00.5.00.5.00.02.01.06.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik				Jumlah pedoman perencanaan, monitoring dan evaluasi OPD	21 buku			6,600,000	10,000,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00.02.5.00.02.01.44.	**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**	**4**	**Presentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana**	**17.34%**			**Presentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana**	**17.34%**	**560,231,500**	**1,159,721,500**	**BPBD**
			Presentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	**100.00%**			**Presentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana**	**100.00%**			
5.00.02.5.00.02.01.44.05	Koordinasi peningkatan penanganan tanggap darurat				Jumlah pelaksanaan koordinasi penanganan tanggap darurat	1 tahun			234,669,000	501,954,000	
5.00.02.5.00.02.01.44.06	Peningkatan informasi dan sosialisasi daerah rawan bencana				Jumlah pembentukan KSB dan Sosialisasi Sekolah Siaga Bencana	1250 orang			57,580,000	126,965,000	
5.00.02.5.00.02.01.44.07	Pelatihan Kelompok Siaga Bencana (KSB) (DID)				Jumlah kegiatan pelatihan bagi KSB	150 orang			52,830,000	151,000,000	
5.00.02.5.00.02.01.44.08	Pengkajian kapasitas pemulihan paska bencana				Jumlah kajian pemulihan pasca bencana	1 tahun			19,560,000	58,260,000	
5.00.02.5.00.02.01.44.09	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bencana				Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kebencanaan	10 jenis			142,400,000	155,000,000	
5.00.02.5.00.02.01.44.10	Pencegahan dan pengurangan resiko bencana				Jumlah lokasi kewaspadaan masyarakat terhadap bencana alam	9 kelurahan			31,092,500	94,542,500	
5.00.02.5.00.02.01.44.11	Survey lokasi potensi bencana				Jumlah survey kesiapsiagaan masyarakat dalam menanggulangan bencana	60 kali			22,100,000	72,000,000	
6.00.	**KEWILAYAHAN**								**19,018,761,755**	**16,888,587,332**	
6.00.01.	**KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT**								**4,532,968,558**	**5,079,931,058**	
0.00.6.00.6.00.01.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**4**	**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai IKM**	**87.00**	**1,098,054,982**	**935,987,182**	**PAYAKUMBUH BARAT**
0.00.6.00.6.00.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat				Jumlah jenis benda pos dan buku cek yang dibeli	1105 lembar			5,290,000	5,290,000	
0.00.6.00.6.00.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Jumlah rekening telepon dan internet, air, listrik	4 rekening			65,000,000	79,999,992	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.6.00.6.00.01.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan yang disediakan	4 jenis			21,750,000	21,750,000	
0.00.6.00.6.00.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya	57 unit			10,755,000	10,755,000	
0.00.6.00.6.00.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayar jasanya	70 orang			423,000,000	220,000,000	
0.00.6.00.6.00.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Jumlah jenis peralatan kebersihan yang dibeli	12 jenis			10,278,000	10,278,000	
0.00.6.00.6.00.01.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				Jumlah jenis peralatan yang diperbaiki	7 jenis			13,424,000	13,424,000	
0.00.6.00.6.00.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor				Jumlah jenis ATK yang dibeli	22 jenis			41,708,750	49,448,750	
0.00.6.00.6.00.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Jumlah jenis barang yang dicetak, penggandaan dan jilid	4 jenis, 36.000 lembar, 510 buah			14,855,000	19,985,000	
0.00.6.00.6.00.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Jumlah jenis komponen listrik yang dibeli	6 jenis			5,518,000	5,518,000	
0.00.6.00.6.00.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Jumlah jenis surat kabar yang disediakan	1 jenis			48,300,000	48,300,000	
0.00.6.00.6.00.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				Jumlah porsi Makanan dan snack yang disediakan	7315 porsi			101,145,000	101,145,000	
0.00.6.00.6.00.01.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	50 kali			231,378,000	250,000,000	
0.00.6.00.6.00.01.01.01.19	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran				Jumlah THL yang dibayar jasanya	4 orang			105,653,232	100,093,440	
0.00.6.00.6.00.01.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**4**	**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik**	**80.00%**	**738,000,000**	**207,293,600**	**PAYAKUMBUH BARAT**
0.00.6.00.6.00.01.01.02.03	Pembangunan gedung kantor				Jumlah bangunan kantor yang dibangun	1 unit			498,000,000	0	
0.00.6.00.6.00.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Jumlah gedung kantor yang diberikan pemeliharaan	10 unit			50,000,000	0	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.6.00.6.00.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan yang diberikan service, suku cadang dan BBM	47 unit			190,000,000	207,293,600	
0.00.6.00.6.00.01.01.03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**4**	**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap**	**100.00%**	**54,000,000**	**56,250,000**	**PAYAKUMBUH BARAT**
0.00.6.00.6.00.01.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Jumlah pakaian dinas yang disediakan	125 stel			54,000,000	56,250,000	
0.00.6.00.6.00.01.01.06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**4**	**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**	**4,150,000**	**4,150,000**	**PAYAKUMBUH BARAT**
0.00.6.00.6.00.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Jumlah laporan pemerintah yang disusun	5 dokumen			2,400,000	2,400,000	
0.00.6.00.6.00.01.01.06.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik				Jumlah dokumen perencanaan dan pelayanan publik yang disusun	4 dokumen			1,750,000	1,750,000	
6.00.01.6.00.01.01.16.	**Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama**	**4**	**Persentase santri yang berkualitas**	**70.00%**			**Persentase santri yang berkualitas**	**70.00%**	**76,500,000**	**150,000,000**	**PAYAKUMBUH BARAT**
6.00.01.6.00.01.01.16.06	Peningkatan kehidupan beragama				Jumlah santri yang dibina di pondok al quran	150 santri			76,500,000	150,000,000	
6.00.01.6.00.01.01.15.	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**	**4**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**100%**			**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**100.00%**	**875,389,656**	**1,595,249,556**	**PAYAKUMBUH BARAT**
6.00.01.6.00.01.01.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan				Jumlah kelurahan dengan organisasi kemasyarakatan yang dibina	17 kelurahan			799,913,406	1,525,589,556	
6.00.01.6.00.01.01.15.02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan masyarakat				Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	3 org			4,280,000	5,700,000	
6.00.01.6.00.01.01.15.04	Pembinaan kegiatan kemasyarakatan (DID)				Jumlah kelompok kerja kelurahan yang dibina	51 Pokja			71,196,250	63,960,000	
6.00.01.6.00.01.01.17.	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**4**	**Persentase kehadiran peserta musrenbang**	**100%**			**Persentase kehadiran peserta musrenbang**	**100.00%**	**184,993,000**	**117,825,000**	**PAYAKUMBUH BARAT**
6.00.01.6.00.01.01.17.02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa				Jumlah Musrenbang yang terlaksana	18 kali			184,993,000	117,825,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00.01.6.00.01.01.50.	**Program penyelenggaraan pemerintahan umum dan perangkat daerah**	**4**	**Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti**	**100%**			**1. Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti 2. Nilai IKM**	**1. 100% 2. 87,00**	**1,501,880,920**	**2,013,175,720**	**PAYAKUMBUH BARAT**
6.00.01.6.00.01.01.50.04	Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)				Jenis pelayanan perizinan dan rekomendasi PATEN yang dilaksanakan	87 jenis			62,382,920	63,406,720	
6.00.01.6.00.01.01.50.14	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tanjuangodang Sungaipinago				Terselenggaranya Operasional Kelurahan	12 bulan			130,000,000	180,000,000	
6.00.01.6.00.01.01.50.15	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padangtengah Balainanduo				Terselenggaranya Operasional Kelurahan	12 bulan			130,000,000	180,000,000	
6.00.01.6.00.01.01.50.16	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Kubu Gadang				Terselenggaranya Operasional Kelurahan	12 bulan			60,000,000	80,000,000	
6.00.01.6.00.01.01.50.17	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Bulakan Balai Kandi				Terselenggaranya Operasional Kelurahan	12 bulan			75,000,000	80,000,000	
6.00.01.6.00.01.01.50.18	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Nunang Daya Bangun				Terselenggaranya Operasional Kelurahan	12 bulan			120,000,000	180,000,000	
6.00.01.6.00.01.01.50.19	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Ubuh				Terselenggaranya Operasional Kelurahan	12 bulan			75,000,000	100,000,000	
6.00.01.6.00.01.01.50.20	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Koto Tangah				Terselenggaranya Operasional Kelurahan	12 bulan			60,000,000	80,000,000	
6.00.01.6.00.01.01.50.21	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Labuah Basilang				Terselenggaranya Operasional Kelurahan	12 bulan			60,000,000	80,000,000	
6.00.01.6.00.01.01.50.23	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Tinggi Piliang				Terselenggaranya Operasional Kelurahan	12 bulan			130,000,000	180,000,000	
6.00.01.6.00.01.01.50.24	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Payolansek				Terselenggaranya Operasional Kelurahan	12 bulan			75,000,000	100,000,000	
6.00.01.6.00.01.01.50.25	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Pakan Sinayan				Terselenggaranya Operasional Kelurahan	12 bulan			60,000,000	80,000,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00.01.6.00.01.01.50.26	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Parak Batuang				Terselenggaranya Operasional Kelurahan	12 bulan			54,000,000	80,000,000	
6.00.01.6.00.01.01.50.27	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Parik Rantang				Terselenggaranya Operasional Kelurahan	12 bulan			72,000,000	100,000,000	
6.00.01.6.00.01.01.50.28	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Subarang Batuang				Terselenggaranya Operasional Kelurahan	12 bulan			60,000,000	80,000,000	
6.00.01.6.00.01.01.50.29	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Talang				Terselenggaranya Operasional Kelurahan	12 bulan			60,000,000	80,000,000	
6.00.01.6.00.01.01.50.31	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tanjuang Pauah				Terselenggaranya Operasional Kelurahan	12 bulan			60,000,000	80,000,000	
6.00.01.6.00.01.01.50.62	Koordinasi dan sosialisasi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat				Terselenggaranya Operasional Kelurahan	12 bulan			28,498,000	29,769,000	
6.00.01.6.00.01.01.50.65	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padangdata Tanahmati				Terselenggaranya Operasional Kelurahan	12 bulan			130,000,000	180,000,000	
6.00.02.	**KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR**								**3,386,740,535**	**3,644,510,933**	
0.00.6.00.6.00.01.02.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**4**	**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai IKM**	**85.00**	**990,927,493**	**903,755,672**	**PAYAKUMBUH TIMUR**
0.00.6.00.6.00.01.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat				Jumlah benda pos dan buku cek yang dibeli	1 tahun			9,999,000	4,160,000	
0.00.6.00.6.00.01.02.01.02	P.enyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Jumlah rekening telekomunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	1 tahun			73,400,000	83,400,000	
0.00.6.00.6.00.01.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				Jumlah Jasa Service Komputer, Mesin Tik dan Printer yang tersedia	74 kali service, 1 pengisian tabung pemadam kebakaran			10,804,000	13,089,000	
0.00.6.00.6.00.01.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Jumlah pembayaran perizinan kendaraan dinas	29 unit			5,680,000	5,680,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.6.00.6.00.01.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Jumlah jasa pengelola administrasi keuangan, barang dan jasa yang dibayar	31 orang			278,567,000	173,758,500	
0.00.6.00.6.00.01.02.01.08	P.enyediaan jasa kebersihan kantor				Jumlah bahan-bahan dan alat-alat kebersihan kantor yang disediakan				88,315,160	85,923,816	
0.00.6.00.6.00.01.02.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				Jumlah jasa perbaiakan peralatan kerja service mesin potong rumput yang disediakan	58 unit			696,000	696,000	
0.00.6.00.6.00.01.02.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor				Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	1 tahun			48,000,000	24,355,000	
0.00.6.00.6.00.01.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Jumlah barang	1 tahun			30,000,000	16,348,000	
0.00.6.00.6.00.01.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Jumlah konponen instalasi listrik yang disediakan	1 tahun			10,000,000	3,000,000	
0.00.6.00.6.00.01.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Jumlah bahan bacaan berupa padang Ekspress yang disediakan	1 tahun			41,496,000	35,988,000	
0.00.6.00.6.00.01.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				jumlah makan dan minum dalam rangka pelaksanaan tugas di kelurahan dan kecamatan	makmin kel 2828 dan 1872 porsi kecamatan			78,187,500	76,187,500	
0.00.6.00.6.00.01.02.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah				jumlah rapat koordinasi dalam dan keluar daerah yang dilaksanakan	28 kali ke dalam daerah dan 14 kali keluar daerah			170,412,673	232,040,000	
0.00.6.00.6.00.01.02.01.19	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran				Jumlah tenaga THL kel dan kec yang dibayarkan	6 orang			145,370,160	149,129,856	
0.00.6.00.6.00.01.02.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**4**	**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik**	**80.00%**	**717,044,550**	**144,676,550**	**PAYAKUMBUH TIMUR**
0.00.6.00.6.00.01.02.02.10	Pengadaan mebeleur				Jumlah Mebeleur yang diadakan	6 jenis			52,748,000	0	
0.00.6.00.6.00.01.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Jumlah dan jenis pemeliharaan kantor camat yang	1 unit			17,000,000	0	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.6.00.6.00.01.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	25 unit roda 2, 1 unit roda 1, 4 unit roda 3			137,296,550	144,676,550	
0.00.6.00.6.00.01.02.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Jumlah mebeleur kantor yang dilakukan perbaikan	38 unit			10,000,000		
0.00.6.00.6.00.01.02.02.42	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur				Tersedianya peralatan untuk kelurahan model	14 peralatan gedung kantor			150,000,000	0	
0.00.6.00.6.00.01.02.02.47	Pelaksanaan pengadaan tanah				Jumlah tanah yang dibebaskan	1 persil			350,000,000		
0.00.6.00.6.00.01.02.03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**4**	**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap**	**100.00%**	**39,600,000**	**40,130,000**	**PAYAKUMBUH TIMUR**
0.00.6.00.6.00.01.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Jumlah pakain dinas beserta kelengkapannya yang diadakan	88 stel			39,600,000	40,130,000	
0.00.6.00.6.00.01.02.06.	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**4**	**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**	**16,000,000**	**10,198,000**	**PAYAKUMBUH TIMUR**
0.00.6.00.6.00.01.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Jumlah laporan pemerintah yang disusun	5 dokumen			8,000,000	5,398,000	
0.00.6.00.6.00.01.02.06.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik				Jumlah dokumen perencanaan dan pelayanan publik yang disusun	4 dokumen			8,000,000	4,800,000	
6.00.01.6.00.01.02.16.	**Program peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama**	**4**	**Persentase santri yang berkualitas**	**70.00%**			**Persentase santri yang aktif**	**70.00%**	**70,547,500**	**525,017,000**	**PAYAKUMBUH TIMUR**
6.00.01.6.00.01.02.16.06	Peningkatan kehidupan beragama				Jumlah pondok Al-quran dan pelatihan imam dan khatib	9 Pondok Alquran			70,547,500	525,017,000	
6.00.01.6.00.01.02.15.	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**	**4**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**100.00%**			**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**100.00%**	**530,446,152**	**693,888,152**	**PAYAKUMBUH TIMUR**
6.00.01.6.00.01.02.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan				Jumlah kelurahan dengan organisasi kemasyarakatan yang dibina	Kecamatan dan 9 kelurahan			458,375,152	621,807,152	
6.00.01.6.00.01.02.15.02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan masyarakat				Jumlah sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1 kegiatan			10,000,000	10,000,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00.01.6.00.01.02.15.04	Pembinaan kegiatan kemasyarakatan (DID)				Jumlah kelompok kerja kelurahan yang dibina	1 kec dan kelurahan			62,071,000	62,081,000	
6.00.01.6.00.01.02.17.	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**4**	**Persentase kehadiran peserta musrenbang**	**100.00%**			**Persentase kehadiran peserta musrenbang**	**100.00%**	**155,074,000**	**161,552,000**	**PAYAKUMBUH TIMUR**
6.00.01.6.00.01.02.17.02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa				Jumlah kegiatan musrenbang kecamatan/kelurahan yang dilaksanakan	9 kelurahan dan 1 Kecamatan			155,074,000	161,552,000	
6.00.01.6.00.01.02.50.	**Program penyelenggaraan pemerintahan umum dan perangkat daerah**	**4**	**Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti**	**100.00%**			**1. Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti 2. Nilai IKM**	**1. 100% 2. 85**	**867,100,840**	**1,165,293,559**	**PAYAKUMBUH TIMUR**
6.00.01.6.00.01.02.50.04	Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)				Jenis pelayanan perizinan dan rekomendasi PATEN yang dilaksanakan	87 jenis			10,000,000	21,093,559	
6.00.01.6.00.01.02.50.32	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Koto Baru				Terselenggaranya Operasional Kelurahan	12 bulan			60,000,000	80,000,000	
6.00.01.6.00.01.02.50.33	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Alai Bodi				Terselenggaranya Operasional Kelurahan	12 bulan			130,000,000	180,000,000	
6.00.01.6.00.01.02.50.34	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tiakar				Terselenggaranya Operasional Kelurahan	12 bulan			130,000,000	180,000,000	
6.00.01.6.00.01.02.50.35	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Tiakar				Terselenggaranya Operasional Kelurahan	12 bulan			130,000,000	180,000,000	
6.00.01.6.00.01.02.50.36	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Sicincin				Terselenggaranya Operasional Kelurahan	12 bulan			115,000,000	180,000,000	
6.00.01.6.00.01.02.50.37	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Koto Panjang				Terselenggaranya Operasional Kelurahan	12 bulan			91,080,840	80,000,000	
6.00.01.6.00.01.02.50.38	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Payobasung				Terselenggaranya Operasional Kelurahan	12 bulan			60,000,000	80,000,000	
6.00.01.6.00.01.02.50.39	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Tangah Payobadar				Terselenggaranya Operasional Kelurahan	12 bulan			60,000,000	80,000,000	
6.00.01.6.00.01.02.50.40	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Balai Jaring				Terselenggaranya Operasional Kelurahan	12 bulan			60,000,000	80,000,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00.01.6.00.01.02.50.62	Koordinasi dan sosialisasi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat				Jumlah sosialiasi keamanan lingkungan yang dilaksanakan	4 kali			21,020,000	24,200,000	
6.00.01.03	**KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA**								**6,829,745,395**	**3,958,284,098**	
0.00.6.00.6.00.01.03.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**4**	**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai IKM**	**88.00**	**1,015,846,080**	**1,010,010,098**	**PAYAKUMBUH UTARA**
0.00.6.00.6.00.01.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat				Jumlah benda pos dan buku cek yang tersedia	1674 lembar, 10 buku			8,222,000	8,222,000	
0.00.6.00.6.00.01.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Jumlah rekening listrik, air, dan telepon yang dibayarkan	61 Rekening			67,488,000	69,000,000	
0.00.6.00.6.00.01.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajak	37 unit			4,626,000	6,000,000	
0.00.6.00.6.00.01.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Jumlah pengelola asministrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	33 orang			333,992,000	190,536,000	
0.00.6.00.6.00.01.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Jumlah bahan kebersihan kantor yang tersedia	20 Jenis			2,343,700	52,027,000	
0.00.6.00.6.00.01.03.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	111 unit			9,400,000	12,594,000	
0.00.6.00.6.00.01.03.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor				Jumlah alat tulis yang tersedia	51 Jenis			43,989,450	44,922,000	
0.00.6.00.6.00.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Jumlah barang yang dicetak, digandakan, dan dijilid	5 Jenis 128.980 Lembar 252 Buku			35,000,000	35,000,000	
0.00.6.00.6.00.01.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Jumlah komponen listrik yang tersedia	18 Jenis			6,642,130	7,071,000	
0.00.6.00.6.00.01.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Jumlah bahan bacaan yang tersedia	4.721 Eksemplar			38,860,800	27,000,000	
0.00.6.00.6.00.01.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				Jumlah makan, minum, dan snack yang tersedia	9.272 Porsi			72,415,000	120,000,000	
0.00.6.00.6.00.01.03.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	95 Kali dalam daerah 24 kali keluar daerah			187,641,000	244,548,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.6.00.6.00.01.03.01.19	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran				Jumlah tenaga administrasi dan teknis perkantoran yang tersedia	7 Orang			205,226,000	193,090,098	
0.00.6.00.6.00.01.03.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**4**	**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik**	**80.00%**	**3,846,953,700**	**192,663,100**	**PAYAKUMBUH UTARA**
0.00.6.00.6.00.01.03.02.03	Pembangunan gedung kantor				Jumlah Kantor kecamatan refresentatif yang dibangun	1 kantor			3,000,000,000	0	
0.00.6.00.6.00.01.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	34 Unit			153,682,600	192,663,100	
0.00.6.00.6.00.01.03.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				Jumlah pengisian tabung racun api dan tabung LPG kompr gas	2 Buah			920,000	0	
0.00.6.00.6.00.01.03.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor				Jumlah Kantor	4 kantor			244,750,000		
0.00.6.00.6.00.01.03.02	Pelaksanaan pengadaan tanah				Jumlah tanah yang diurus	3 Persil			447,601,100	0	
0.00.6.00.6.00.01.03.03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**4**	**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap**	**100.00%**	**31,500,000**	**29,150,000**	**PAYAKUMBUH UTARA**
0.00.6.00.6.00.01.03.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapan yang tersedia	63 Stel			31,500,000	29,150,000	
0.00.6.00.6.00.01.03.06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**4**	**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**	**2,976,000**	**2,800,000**	**PAYAKUMBUH UTARA**
0.00.6.00.6.00.01.03.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Jumlah laporan pemerintah yang disusun	5 dokumen			1,488,000	1,400,000	
0.00.6.00.6.00.01.03.06.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik				Jumlah dokumen perencanaan dan pelayanan publik yang disusun	4 dokumen			1,488,000	1,400,000	
6.00.01.6.00.01.03.16.	**Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama**	**4**	**Persentase santri yang berkualitas**	**70.00%**			**Persentase santri yang berkualitas**	**70.00%**	**83,393,950**	**131,529,200**	**PAYAKUMBUH UTARA**
6.00.01.6.00.01.03.16.06	Peningkatan kehidupan beragama				Jumlah santri yang diberi pendidikan	100 Orang			83,393,950	131,529,200	
6.00.01.6.00.01.03.15.	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**	**4**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**100%**			**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**100 %**	**646,344,575**	**897,196,700**	**PAYAKUMBUH UTARA**

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00.01.6.00.01.03.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan				Jumlah kelurahan dengan organisasi kemasyarakatan yang dibina	9 Kelurahan			557,218,575	803,840,700	
6.00.01.6.00.01.03.15.02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan masyarakat				Jumlah perangkat kecamatan dan kelurahan yang ikut sosialisasi	50 orang			7,570,000	8,100,000	
6.00.01.6.00.01.03.15.04	Pembinaan kegiatan kemasyarakatan (DID)				Jumlah kelompok kerja kelurahan yang dibina	9 Kelurahan			81,556,000	85,256,000	
6.00.01.6.00.01.03.17.	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**4**	**Persentase usulan Musrenbang yang diakomodir di tingkat kecamatan**	**100.00%**			**Persentase kehadiran peserta musrenbang**	**100.00%**	**126,875,550**	**139,894,000**	**PAYAKUMBUH UTARA**
6.00.01.6.00.01.03.17.02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa				Jumlah kegiatan musrenbang kecamatan/kelurahan yang dilaksanakan	10 kali			126,875,550	139,894,000	
6.00.01.6.00.01.03.50.	**Program penyelenggaraan pemerintahan umum dan perangkat daerah**	**4**	**Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti**	**100.00%**			**1. Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti 2. Nilai IKM**	**1. 100% 2. 88**	**1,075,855,540**	**1,555,041,000**	**PAYAKUMBUH UTARA**
3.00.03.6.00.01.03.28.04	Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)				Jenis pelayanan perizinan dan rekomendasi PATEN yang dilaksanakan	87 jenis			7,960,000	19,130,000	
3.00.03.6.00.01.03.28.20	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Narkoba Dan Miras				Jumlah penyelenggaraan sosialisasi anti narkoba	1 Kali			4,735,590	4,977,000	
3.00.03.6.00.01.03.28.41	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Balai Tonga Koto				Terselenggaranya Operasional Kelurahan	12 bulan			121,360,455	180,000,000	
3.00.03.6.00.01.03.28.42	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo				Terselenggaranya Operasional Kelurahan	12 bulan			130,000,000	180,000,000	
3.00.03.6.00.01.03.28.43	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Kapalo Koto Dibalai				Terselenggaranya Operasional Kelurahan	12 bulan			112,467,500	180,000,000	
3.00.03.6.00.01.03.28.44	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tigo Koto Diate				Terselenggaranya Operasional Kelurahan	12 bulan			130,000,000	180,000,000	
3.00.03.6.00.01.03.28.45	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Napar				Terselenggaranya Operasional Kelurahan	12 bulan			72,000,000	80,000,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00.03.6.00.01.03.28.46	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Taratak Padang Kampuang				Terselenggaranya Operasional Kelurahan	12 bulan			114,933,310	180,000,000	
3.00.03.6.00.01.03.28.47	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Ompang Tanah Sirah				Terselenggaranya Operasional Kelurahan	12 bulan			121,815,020	180,000,000	
3.00.03.6.00.01.03.28.48	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tigo Koto Dibaruah				Terselenggaranya Operasional Kelurahan	12 bulan			126,808,750	180,000,000	
3.00.03.6.00.01.03.28.49	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Ikua Koto Dibalai				Terselenggaranya Operasional Kelurahan	12 bulan			115,897,425	169,800,000	
3.00.03.6.00.01.03.28.62	Koordinasi dan sosialisasi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat				Jumlah Jumlah koordinasi, sosialisasi, monitoring dan penyuluhan hukum yang dilakukan	5 kali			17,877,490	21,134,000	
6.00.01.04	**KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN**								**2,003,969,712**	**2,280,472,506**	
0.00.6.00.6.00.01.04.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**4**	**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai IKM**	**85.00**	**697,542,562**	**664,792,560**	**PAYAKUMBUH SELATAN**
0.00.6.00.6.00.01.04.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat				Jumlah benda Pos dan buku cek yang di beli	Materai 1050 buah dan 4 buah buku cek			4,900,000	4,900,000	
0.00.6.00.6.00.01.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Jumlah Rekening Listrik,air dan Telepon ayng harus di bayar	9 rekening air, 8 rekening listrik dan 1 rekening telepon			40,000,000	48,600,000	
0.00.6.00.6.00.01.04.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				Jumlah Jasa Service Komputer,Mesin Tik dan Printer yang tersedia	21 Kali Service Komputer, 3 kali Mesin Tik dan 10 Kali Service Printer			9,063,000	9,500,000	
0.00.6.00.6.00.01.04.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Terwujudnya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	27 unit			5,310,000	4,310,000	
0.00.6.00.6.00.01.04.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Jumlah Jasa Pengelola Administrasi Keuangan dan Honor Pengurus Barang yang harus di bayar	25 orang			206,270,000	142,870,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.6.00.6.00.01.04.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Jumlah honor Petugas Kebersihan kantor dan Alat kebersihan Kantor yang disediakan	5 Petugas Kebersihan dan 26 Macam Alat Kebersihan			138,630,600	110,593,728	
0.00.6.00.6.00.01.04.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				Jumlah Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja: Service Potong Rumput yang di sediakan	6 kali			174,000	174,000	
0.00.6.00.6.00.01.04.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor				Jumlah dan Jenis ATK yang disediakan	61 Jenis			33,211,458	38,500,000	
0.00.6.00.6.00.01.04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Jumlah Cetak, Jilid dan Penggandaan yang disediakan	433 cetak,52235 lbr Penggandaan dan 325 Jilid			15,806,000	19,030,400	
0.00.6.00.6.00.01.04.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan yang disediakan	13 Jenis			3,332,000	5,516,000	
0.00.6.00.6.00.01.04.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Jumlah bahan bacaan yang disediakan	2320 Eksempar			13,920,000	13,104,000	
0.00.6.00.6.00.01.04.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				Jumlah makan minum dalam rangka melaksanakan tugas di kel & Kec	6456 Porsi & 198 Air Galon			75,247,500	88,362,500	
0.00.6.00.6.00.01.04.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Jumlah rapat Koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar yang dilaksanakan	23 + 10 Kali			125,342,000	154,247,000	
0.00.6.00.6.00.01.04.01.19	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran				Jumlah Jasa Pengamanan di Kantor camat dan premi asuransi yang harus dibayarkan	1 tahun			26,336,004	25,084,932	
0.00.6.00.6.00.01.04.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**4**	**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik**	**80.00%**	**177,069,200**	**136,805,200**	**PAYAKUMBUH SELATAN**
0.00.6.00.6.00.01.04.02.09	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				Jumlah Perlengkapan Kantor yang disediakan	Pengisian Tabung racun api 2bh, Spanduk/Baliho 89 Meter			3,458,000	4,194,000	
0.00.6.00.6.00.01.04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Terlaksananya kegiatan rehap gedung kantor	1 Paket			41,000,000	0	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.6.00.6.00.01.04.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Jumlah Kendaraan dinas yang dilakukan Pemeliharaan	27 Unit			131,601,200	131,601,200	
0.00.6.00.6.00.01.04.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Jumlah Pemeliharaan yang dilaksanakan	1 unit			1,010,000	1,010,000	
0.00.6.00.6.00.01.04.03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**4**	**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap**	**100.00%**	**24,750,000**	**25,545,000**	**PAYAKUMBUH SELATAN**
0.00.6.00.6.00.01.04.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Jumlah Pakaian Dinas yang di sediakan	55 stell			24,750,000	25,545,000	
0.00.6.00.6.00.01.04.06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**4**	**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**	**7,834,300**	**14,200,000**	**PAYAKUMBUH SELATAN**
0.00.6.00.6.00.01.04.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Jumlah laporan pemerintah yang disusun	5 dokumen			3,917,150	7,100,000	
0.00.6.00.6.00.01.04.06.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik				Jumlah dokumen perencanaan dan pelayanan publik yang disusun	4 dokumen			3,917,150	7,100,000	
6.00.01.6.00.01.04.16.	**Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama**	**4**	**Persentase santri yang berkualitas**	**70.00%**			**Persentase santri yang berkualitas**	**70.00%**	**58,920,600**	**134,531,000**	**PAYAKUMBUH SELATAN**
6.00.01.6.00.01.04.16.06	Peningkatan kehidupan beragama				Pelatihan Imam dan Khatib dan Jumlah Murid Pondok Alquran	3 Keg			58,920,600	134,531,000	
6.00.01.6.00.01.04.15.	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**	**4**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**100.00%**			**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**100.00%**	**353,442,500**	**396,079,746**	**PAYAKUMBUH SELATAN**
6.00.01.6.00.01.04.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan				Jumlah kelurahan dengan organisasi kemasyarakatan yang dibina	6 Kel dan 65 RT/RW			306,629,300	317,923,300	
6.00.01.6.00.01.04.15.04	Pembinaan kegiatan kemasyarakatan (DID)				Jumlah kelompok kerja kelurahan yang dibina	6 Kelurahan, 1 Kecamatan	Terwujudnya Kecamatan Sehat dan Kelurahan sehat se-Kec.Pyk.Selatan	**100.00%**	46,813,200	78,156,446	
6.00.01.6.00.01.04.17.	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**1**	**Persentase kehadiran peserta musrenbang**	**100.00%**			**Persentase kehadiran peserta musrenbang**	**100.00%**	**105,711,900**	**112,230,000**	**PAYAKUMBUH SELATAN**
6.00.01.6.00.01.04.17.02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa				Jumlah kegiatan musrenbang kecamatan/kelurahan yang dilaksanakan	6 kelurahan, 1 Kecamatan			105,711,900	112,230,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00.01.6.00.01.04.50.	**Program penyelenggaraan pemerintahan umum dan perangkat daerah**	**4**	**Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti**	**100%**			**1. Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti 2. Nilai IKM**	**1. 100% 2. 85**	**578,698,650**	**796,289,000**	**PAYAKUMBUH SELATAN**
6.00.01.6.00.01.04.50.04	Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)				Jumlah Kegiatan PATEN yang dilaksanakan	1 paket			5,612,650	9,496,000	
6.00.01.6.00.01.04.50.50	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Sawah Padang Aua Kunjang				Terselenggaranya Operasional Kelurahan	12 bulan			130,000,000	180,000,000	
6.00.01.6.00.01.04.50.51	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Karambia				Terselenggaranya Operasional Kelurahan	12 bulan			60,000,000	80,000,000	
6.00.01.6.00.01.04.50.52	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Limbukan				Terselenggaranya Operasional Kelurahan	12 bulan			60,000,000	80,000,000	
6.00.01.6.00.01.04.50.53	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang				Terselenggaranya Operasional Kelurahan	12 bulan			130,000,000	180,000,000	
6.00.01.6.00.01.04.50.54	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Balai Panjang				Terselenggaranya Operasional Kelurahan	12 bulan			60,000,000	80,000,000	
6.00.01.6.00.01.04.50.55	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Kapalo Koto Ampangan				Terselenggaranya Operasional Kelurahan	12 bulan			130,000,000	180,000,000	
6.00.01.6.00.01.04.50.62	Koordinasi dan sosialisasi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat				Jumlah Kegiatan monitoring yang disediakan	2 kegiatan			3,086,000	6,793,000	
6.00.01.05	**LATINA**								**2,265,337,555**	**1,925,388,737**	
0.00.6.00.6.00.01.05.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**4**	**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai IKM**	**81.00**	**650,535,670**	**601,744,712**	**LATINA**
0.00.6.00.6.00.01.05.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat				jumlah benda pos; cek giro	Benda pos 468 buah; cek giro 6 buku ;cek giro 6 buku			2,328,000	2,328,000	
0.00.6.00.6.00.01.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Jumlah rekening telepon dan internet, air, listrik,	8 rekening, 12 bulan			38,400,000	37,800,000	
0.00.6.00.6.00.01.05.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 jenis			3,725,000	3,925,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.6.00.6.00.01.05.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibayar Pajaknya	17 Roda2, 1 Roda4			2,200,000	2,200,000	
0.00.6.00.6.00.01.05.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Jumlah ASN yang telah dibayarkan jasa pengelolaan administrasi keuangan	30 orang			219,825,000	144,540,000	
0.00.6.00.6.00.01.05.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Jumlah THL kebersihan yang dibayarkan gaji dan BPJS dan banyaknya alat-alat kebersihan yang disediakan	1 orang, 27 jenis			35,817,035	34,359,500	
0.00.6.00.6.00.01.05.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki	6 Jenis			14,873,500	14,431,000	
0.00.6.00.6.00.01.05.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor				Jumlah Jenis ATK yang di sediakan	48 Jenis			31,190,675	30,346,212	
0.00.6.00.6.00.01.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Jumlah jenis yang dicetak, jumlah penggandaan dan jumlah yang dijilid	5 Cetakan; 55000 LmbrFc; 95 Jilid			15,648,000	15,533,000	
0.00.6.00.6.00.01.05.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Jumlah jenis alat listrik yang disediakan	8 Jenis			4,033,500	4,043,000	
0.00.6.00.6.00.01.05.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Jumlah jenis surat kabar yang disediakan	2 Jenis, 12 bulan			20,074,000	20,074,000	
0.00.6.00.6.00.01.05.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				Jumlah air galon / kotak, porsi makanan dan snack yang disediakan	100 Galon, 160 Kardus, 3150 porsi makan, 4200 snack			97,400,000	98,425,000	
0.00.6.00.6.00.01.05.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Jumlah rapat-rapat kordinasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan	12 bulan			137,600,000	167,820,000	
0.00.6.00.6.00.01.05.01.19	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran				Jumlah Tenaga/ Adm Teknik Perkantoran yang Dibayarkan	1 orang			27,420,960	25,920,000	
0.00.6.00.6.00.01.05.02.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**4**	**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik**	**80.00%**	**677,452,550**	**144,644,200**	**LATINA**

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.6.00.6.00.01.05.02.03	Pembangunan gedung kantor				Jumlah pembangunan kantor lurah	1 unit			491,220,000	0	
0.00.6.00.6.00.01.05.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Jumlah kantor yang diberikan pemeliharaan	7 Unit			56,000,000	15,000,000	
0.00.6.00.6.00.01.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan yang diberikan jasa service, penggantian suku cadang dan BBM	17 Roda2; 1 Roda4			130,232,550	129,644,200	
0.00.6.00.6.00.01.05.03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**4**	**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap**	**100.00%**	**20,250,000**	**21,045,000**	**LATINA**
0.00.6.00.6.00.01.05.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Jumlah pakaian dinas yang disediakan	45 stel			20,250,000	21,045,000	
0.00.6.00.6.00.01.05.06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**4**	**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**	**10,632,000**	**10,632,000**	**LATINA**
0.00.6.00.6.00.01.05.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Jumlah laporan pemerintah yang disusun	5 dokumen			4,467,000	4,467,000	
0.00.6.00.6.00.01.05.06.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik				Jumlah dokumen perencanaan dan pelayanan publik yang disusun	4 dokumen			6,165,000	6,165,000	
6.00.01.6.00.01.05.16.	**Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama**	**4**	**Persentase santri yang berkualitas**	**70.00%**			**Persentase santri yang berkualitas**	**70.00%**	**46,003,000**	**162,118,000**	**LATINA**
6.00.01.6.00.01.05.16.06	Peningkatan kehidupan beragama				Jumlah santri yang dibina di pondok al quran	150 santri			46,003,000	162,118,000	
6.00.01.6.00.01.05.15.	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**	**4**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**100.00%**			**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**100.00%**	**387,896,775**	**391,516,825**	**LATINA**
6.00.01.6.00.01.05.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan				Jumlah kelurahan dengan organisasi kemasyarakatan yang dibina	6 Kelurahan, 1 Kecamatan			341,923,400	345,617,700	
6.00.01.6.00.01.05.15.04	Pembinaan kegiatan kemasyarakatan (DID)				Jumlah kelompok kerja kelurahan yang dibina	6 Kelurahan dan 1 kecamatan			45,973,375	45,899,125	
6.00.01.6.00.01.05.17.	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**4**	**Persentase kehadiran peserta musrenbang**	**100.00%**			**Persentase kehadiran peserta musrenbang**	**100.00%**	**50,408,500**	**61,674,000**	**LATINA**

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00.01.6.00.01.05.17.02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa				Jumlah kegiatan musrenbang kecamatan/kelurahan yang dilaksanakan	7 Kali			50,408,500	61,674,000	
6.00.01.6.00.01.05.50.	**Program penyelenggaraan pemerintahan umum dan perangkat daerah**	**4**	**Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti**	**100.00%**			**1. Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti 2. Nilai IKM**	**1. 100% 2. 81,00**	**422,159,060**	**532,014,000**	**LATINA**
6.00.01.6.00.01.05.50.04	Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)				Jumlah jenis perlengkapan ruangan PATEN;Jumlah jenis pelayanan yang di berikan	12 jenis			4,750,000	21,907,000	
6.00.01.6.00.01.05.50.56	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Sungai Durian				Terselenggaranya Operasional Kelurahan	12 bulan			70,427,960	80,000,000	
6.00.01.6.00.01.05.50.57	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Sikabu				Terselenggaranya Operasional Kelurahan	12 bulan			68,000,960	80,000,000	
6.00.01.6.00.01.05.50.58	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Parik Muko Aia				Terselenggaranya Operasional Kelurahan	12 bulan			64,027,460	80,000,000	
6.00.01.6.00.01.05.50.59	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Koto Panjang Dalam				Terselenggaranya Operasional Kelurahan	12 bulan			66,365,960	80,000,000	
6.00.01.6.00.01.05.50.60	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Koto Panjang Padang				Terselenggaranya Operasional Kelurahan	12 bulan			60,321,960	80,000,000	
6.00.01.6.00.01.05.50.61	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Parambahan				Terselenggaranya Operasional Kelurahan	12 bulan			61,101,760	80,000,000	
6.00.01.6.00.01.05.50.62	Koordinasi dan sosialisasi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat				jumlah monitoring yg dilaksanakan	24 kali			27,163,000	30,107,000	
TOTAL									**346,199,151,259**	**427,355,155,579**	

REKAPITULASI RENCANA
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2019
MENURUT URUSAN

NO	URUSAN	OPD	PAGU 2019
1	2	3	4
1.01	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**		**186,138,690,863**
1.01.01	**PENDIDIKAN**		**16,051,728,598**
		DINAS PENDIDIKAN	16,051,728,598
1.01.02	**KESEHATAN**		**78,134,559,904**
		DINAS KESEHATAN	78,134,559,904
1.01.03	**PEKERJAAN UMUM**		**76,422,690,769**
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	76,422,690,769
1.01.03	**PERUMAHAN RAKYAT**		**6,789,512,116**
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6,789,512,116
1.01.04	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**		**5,118,620,877**
		SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	5,118,620,877
1.01.05	**SOSIAL**		**3,621,578,599**
		DINAS SOSIAL	3,621,578,599
1.02	**URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**		**52,741,078,890**
1.02.01	**TENAGA KERJA**		**2,401,414,124**
		DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	2,401,414,124
1.02.02	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**		**2,116,939,440**
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2,116,939,440
1.02.03	**PANGAN**		**1,724,740,679**
		DINAS KETAHANAN PANGAN	1,724,740,679
1.02.04	**PERTANAHAN**		**50,340,000**
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	50,340,000
1.02.05	**LINGKUNGAN HIDUP**		**10,311,008,642**
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10,311,008,642
1.02.06	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**		**1,591,883,000**
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1,591,883,000
1.02.08	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**		**1,391,579,700**
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1,391,579,700

NO	URUSAN	OPD	PAGU 2019
1	2	3	4
1.02.09	**PERHUBUNGAN**		**3,412,090,359**
		DINAS PERHUBUNGAN	3,412,090,359
1.02.10	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**		**7,766,742,214**
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7,766,742,214
1.02.11	**KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**		**2,851,949,910**
		DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	2,851,949,910
1.02.12	**PENANAMAN MODAL**		**3,029,254,350**
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3,029,254,350
1.02.13	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**		**8,705,125,894**
		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	8,705,125,894
1.02.14	**STATISTIK**		**77,497,950**
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	77,497,950
1.02.16	**KEBUDAYAAN**		**5,092,065,800**
		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	5,092,065,800
1.02.17	**PERPUSTAKAAN**		**2,057,281,338**
		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2,057,281,338
1.02.18	**KEARSIPAN**		**161,165,490**
		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	161,165,490
2.00	**URUSAN PILIHAN**		**26,182,560,737**
2.00.01	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**		**605,988,160**
		DINAS PERTANIAN	605,988,160
2.00.02	**PARIWISATA**		**5,245,848,352**
		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	5,245,848,352
2.00.03	**PERTANIAN**		**9,902,869,541**
		DINAS PERTANIAN	9,902,869,541
2.00.06	**PERDAGANGAN**		**7,242,339,876**
		DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	7,242,339,876
2.00.07	**PERINDUSTRIAN**		**3,185,514,808**
		DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	3,185,514,808
3.00	**PENDUKUNG**		**40,391,972,139**
3.00.03	**KESEKRETARIATAN DAERAH**		**17,432,082,409**
		SEKRETARIAT DAERAH	17,432,082,409
3.00.03	**KESEKRETARIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**		**22,959,889,730**
		SEKRETARIAT DPRD	22,959,889,730

NO	URUSAN	OPD	PAGU 2019
1	2	3	4
4.00	**PENUNJANG**		**18,317,709,212**
4.00.01	**INSPEKTORAT**		**1,808,776,105**
		INSPEKTORAT KOTA	1,808,776,105
4.00.02	**PERENCANAAN**		**3,556,445,008**
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3,556,445,008
4.00.03	**KEUANGAN**		**9,752,244,638**
		BADAN KEUANGAN DAERAH	9,752,244,638
4.00.04	**KEPEGAWAIAN**		**2,718,904,608**
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2,718,904,608
4.00.06	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**		**481,338,853**
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	481,338,853
5.00	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**		**3,408,377,663**
5.00.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**		**2,189,911,742**
		KANTOR KESBANG POL	2,189,911,742
5.00.02	**PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**		**1,218,465,921**
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	**1,218,465,921**
6.00	**KEWILAYAHAN**		**19,018,761,755**
6.00.01	**KECAMATAN**		**19,018,761,755**
		KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT	4,532,968,558
		KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR	3,386,740,535
		KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA	6,829,745,395
		KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN	2,003,969,712
		KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI	2,265,337,555
	JUMLAH		**346,199,151,259**

REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 MENURUT OPD

NO	PERANGKAT DAERAH	Dana Indikatif Tahun 2019
1	Dinas Pendidikan	16,051,728,598
2	Dinas Kesehatan	78,134,559,904
3	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	76,473,030,769
4	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman	6,789,512,116
5	Sat Pol PP & Pemadam Kebakaran	5,118,620,877
6	Dinas Sosial	3,621,578,599
7	Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian	5,586,928,932
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3,508,519,140
9	Dinas Ketahanan Pangan	1,724,740,679
10	Dinas Lingkungan Hidup	10,311,008,642
11	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	1,591,883,000
12	Dinas Perhubungan	3,412,090,359
13	Dinas Komunikasi & Informatika	7,844,240,164
14	Dinas Koperasi & UKM	10,094,289,786
15	Dinas Penanaman Modal & PTSP	3,029,254,350
16	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	2,218,446,828
17	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olah Raga	19,043,040,046
18	Dinas Pertanian	10,508,857,701
19	Bappeda	4,037,783,861
20	Badan Keuangan Daerah	9,752,244,638
21	Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM	2,718,904,608
22	Inspektorat	1,808,776,105
23	Sekretariat Daerah	17,432,082,409
24	Sekretariat DPRD	22,959,889,730
25	Kecamatan Payakumbuh Barat	4,532,968,558
26	Kecamatan Payakumbuh Timur	3,386,740,535
27	Kecamatan Payakumbuh Utara	6,829,745,395
28	Kecamatan Payakumbuh Selatan	2,003,969,712
29	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	2,265,337,555
30	BPBD	1,218,465,921
31	Kesbangpol	2,189,911,742
JUMLAH		**346,199,151,259**

TABEL V.2
USULAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KOTA PAYAKUMBUH YANG BELUM DIAKOMODIR
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PAGU (Rp)	PD PENANGGUNG JAWAB
	Sekretariat Daerah			**SETDAKO**
1	Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur dan Standar pelayanan	Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur dan Standar pelayanan	38,427,625	
2	Fasilitasi dan koordinasi forum pengembangan ekonomi daerah (FPED)	fasilitasi dan koordinasi forum pengembangan ekonomi daerah (FPED)	55,843,000	
3	Rapat kerja Camat dan Lurah	Rapat kerja Camat dan Lurah	86,440,000	
4	Penyelenggaraan lomba kompetensi lurah	Lomba Kompetensi lurah	68,177,500	
5	Lomba LPM berprestasi dan fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	Lomba LPM berprestasi dan fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	250,678,000	
6	Penyelenggaraan administrasi RT/RW se Kota Payakumbuh	Penyelenggaraan administrasi RT/RW se Kota Payakumbuh	187,440,000	
7	Fasilitasi promosi produk unggulan daerah	Fasilitasi promosi produk unggulan daerah	156,240,400	
	Sekretariat DPRD			**Sekretariat DPRD**
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Pengadaan kendaraan dinas 3 unit untuk pimpinan dewan baru	1,703,545,000	
2	pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kekurangan pengadaan pakaian untuk dewan	387,950,000	
	Inspektorat			**Inspektorat**
	NIHIL			
	Dinas Pendidikan			
	Program Pendidikan Karakter/ Akhlak Mulia			**Dinas Pendidikan**
1	Piloting Karakter	Penambahan Sekolah Piloting (4 sekolah) kareana target dalam IKU Dinas Pendidikan	303,209,790	
2	Pelatihan Orang Tua Siswa (Parenting)		200,000,000	
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun			
3	Pembangunan pagar sekolah	Untuk SDN 06, 25, 47, 50, 65	1,000,000,000	
4	Pembangunan ruang ibadah	Untuk SDN 38, 41, 48, 64	800,000,000	
5	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD/MI	Penambahan volume guru yang dilatih	25,000,000	

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PAGU (Rp)	PD PENANGGUNG JAWAB
6	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Sanawiyah dan Satuan Pendidikan Non Formal Islam setara SD dan SMP	Sesuai Perda No. 1 Tahun 2017 (Rp. 100.000,- x 25.000 siswa)	2,505,900,000	
	Program Pendidikan Non Formal			**Dinas Pendidikan**
7	Pembangunan taman, lapangan upacara, fasilitas parkir	Untuk taman SKB (SPNF)	100,000,000	
8	Rehabilitasi Asrama dan Mushalla SPNF	SPNF	500,000,000	
9	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Perlu penambahan kegiatan setelah koordinasi dengan Dekranasda (Pelatihan sepatu tenun, tas dan kerajinan)	80,000,000	
	Program Pendidikan Anak Usia Dini			**Dinas Pendidikan**
10	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Penambahan pendidik anak usia dini sebanyak 35 orang x Rp. 500.000,- x 12 bulan	210,000,000	
11	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Untuk tambahan makan dan minum	16,000,000	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			**Dinas Pendidikan**
12	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Penambahan pembayaran pajak kendaraan	1,200,000	
13	Penyediaan makanan dan minuman	Penambahan volume untuk makan minum pengawasan	17,248,625	
14	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Penambahan perjalanan dinas luar daerah tiap bidang menjadi 28X dan perjalanan dinas dalam daerah 70X	211,645,403	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Penambahan pembayaran BBM karena adanya penambahan kendaraan dinas	10,560,000	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			**Dinas Pendidikan**
16	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya		360,000,000	
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			
17	Peningkatan Kualitas Tenaga Pengajar	Penambahan untuk penyesuaian honor narasumber sesuai SB	9,000,000	
	Dinas Kesehatan			**DKK**
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembelian 3 unit laptop, 3 Printer, 2 infokus dan 5 lemari arsip	110,000,000	

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PAGU (Rp)	PD PENANGGUNG JAWAB
2	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Alat kesehatan Rumah Sakit	745,598,386	
3	Pembanguan gedung sarana dan prasarana IPSRS	Gedung IPSRS	1,072,488,000	
	Dinas PUPR			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			**Dinas PUPR**
1	Kegiatan pembangunan gedung kantor	- Gedung balaikota senilai Rp. 1.000.000.000,- - Pengadaan tanah mesjid Rp. 6.000.000.000,- - lansdscape Rp. 1.000.000.000,-, - Perencanaan gedung pertemuan yang representatif dikawasan kubu gadang Rp. 300.000.000.- - Perencanaan kawasan olahraga Rp. 300.000.000.-	8,600,000,000	
	Program Tehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			**Dinas PUPR**
2	Pelaksanaan pengadaan tanah	Jl.Sudirman-Soekarno Hatta Rp. 3.500.000.000.,-.	3,500,000,000	
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya			**Dinas PUPR**
3	Pengadaan tanah	Pengadaan tanah untuk Batang Agam sebesar Rp. 2.152.000.000	2,152,000,000	
	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			**DPKP**
1	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Rehab gedung kantor sebesar Rp. 250.000.000,-	250,000,000	
2	Pengadaan Mobiler	Pengadaan Mobiler Rp. 50.600.000,-	50,600,000	
	Satpol PP & PK			
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			**Satpol PP & PK**
1	Penyiapan tenga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Anggaran yang dibutuhkan untuk pengadan pakaian linmas lengkap untuk 550 personil Rp 657.000.000	657,000,000	

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PAGU (Rp)	PD PENANGGUNG JAWAB
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			**Satpol PP & PK**
2	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	operasional kantibmas sebesar Rp. 1.400.000.000	1,400,000,000	
3	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	operasi penegakan perda sebesar Rp. 257.323.950	257,323,950	
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran			**Satpol PP & PK**
4	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	penanggulangan bahaya kebakaran sebesar Rp. 1,154.358.003,-	1,154,358,003	
	Dinas Sosial			**Dinas Sosial**
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Opr	Pembelian Kendaraan Roda 2 sbyk 8 unit	168,000,000	
2	Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS	Penyusunan Ranperda PMKS	200,000,000	
	Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian			**Disnakerin**
1	Penyediaan jasa administrasi keuangan		85,824,000	
2	Pengadaan mobelier		8,910,000	
3	Pemeliharaan rutin/berkala mobelier	Perbaikan mobiler yang rusak	2,350,000	
4	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	1. Pelatihan menjahit tingkat pengembangan Gorden dan Bad Cover (25 org), 2. Pelatihan menjahit tingkat pengembangan busana 2 kls (50 org), 3. Peltihan menjahit busana tingkat mahir (Desaigner) 15 org, 4. Pelatihan elektronik (25 org), 5. Pelatihan peserta seleksi magang ke jepang (25 org)	669,201,470	
5	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Penyebarluasan informasi pasar kerja	73,728,984	
6	Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	Penempatan tenaga kerja siap pakai	63,000,000	
7	Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Ke Luar Provinsi	Pembekalan tenaga kerja ke luar negeri	1,089,878,600	
8	Pelaksanaan Job Fair	Pameran bursa kerja job fair	332,604,000	
9	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Terfasilitasinya perselisihan antara pekerja dengan pemberi kerja, terdeteksinya tingkat kerawanan hubungan industrial di perusahaan serta tersosialisasikannya peraturan tentang syarat kerja dan hubungan industrial	19,824,500	

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PAGU (Rp)	PD PENANGGUNG JAWAB
10	Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Sosialisasi peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja	48,963,500	
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			**Dinas P3A & P2KB**
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rehab Gedung PKK	850,000,000	
2	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Kend dinas untuk Sekretaris	250,000,000	
3	Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Pembuatan Kartu Tumbuh Kembang Anak	240,000,000	
	Dinas Ketahanan Pangan			**Distapang**
1	Penyediaan jasa administrasi keuangan		4,500,000	
1	**Dinas Lingkungan Hidup**			
	Program pelayanan administrasi perkantoran			**DLH**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat kekurangan sebesar Rp. 2.257.400	2,257,400	
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honorarium pptk dan staf pengelola kekurangan sebesar Rp. 275.930.500	275,930,500	
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor kekurangan sebesar Rp. 8.000.000	8,000,000	
4	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pengadaan perlengkapan kantor sebesar Rp. 8.700.000	1,856,520,020	
5	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor Rp. 14.727.455	14,727,455	
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp. 1.207.500	1,207,500	
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp. 3.168.000	3,168,000	
8	Penyediaan tenaga teknis dan administrasi perkantoran	Kekurangan Penyediaan tenaga administrasi/teknis perkantoran sebasar Rp. 1.856.520.020,-	8,700,000	

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PAGU (Rp)	PD PENANGGUNG JAWAB
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			**DLH**
1	Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan kekurangan sebesar Rp. 202.549.188,-	202,549,188	
2	Pembangunan insenerator sampah	Pembangunan insenerator sampah sebesar Rp. 1.999.0000.000	1,999,000,000	
	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil			**Dinas Kependudukan & Catatan Sipil**
1	Pembangunan gedung kantor	Pembangunan ruang pelayanan, lanskap dan Pagar	676,097,000	
2		Pengadaan Kartu Identitas Anak (0-17 Tahun)	225,000,000	
3		Pengadaan Alat Perekam dan Cetak KTP (2 unit)	100,000,000	
3	**Dinas Perhubungan**			
	Program pelayanan administrasi perkantoran			**Dishub**
1	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan sebesar Rp. 15.420.000,-	15,420,000	
2	Penyediaan jasa kebersihan	honor tenaga kebersihan sebesar Rp. 2.186.000	2,186,000	
3	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sebesar Rp. 40.000.000,-	40,000,000	
4	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sebesar Rp. 80.000.000,-	80,000,000	
5	Penyediaan tenaga teknis administrasi perkantoran	Tenaga teknis administrasi perkantoran sebesar Rp. 93.998.000	93,998,000	
	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas			**Dishub**
6	Pengadaan APILL	Pengadaan Warning light 4 unit, trafifc laight 15 unit. sebesar Rp. 958.940.000	958,940,000	
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			**Dishub**
7	Sosialisasi/penyuluhan lalu lintas	Sosialisasi/penyuluhan lalu lintas sebesar Rp. 35.000.000	35,000,000	
8	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal	Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal sebesar Rp. 104.000.000,-	104,000,000	
	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor			**Dishub**
9	Penyediaan bahan operasional pengujian kendaraan bermotor	bahan operasional pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp. 53.300.000	53,300,000	

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PAGU (Rp)	PD PENANGGUNG JAWAB
	Dinas Komunikasi & Informatika			**Diskominfo**
	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa			
1	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Studi komparatif dengan stokeholder	355,025,000	
	Dinas Koperasi & UMKM			**Dinas Koperasi & UMKM**
	NIHIL			
	Dinas Penanaman Modal & PTSP			**DPM PTSP**
1	Penyediaan jasa administrasi keuangan		3,600,000	
2	Pengadaan Kendaraan Bermotor	3 unit kendaraan roda 2 dan 1 unit kendaraan roda 4	199,250,000	
3	Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi	tersedianya data lahan untuk peluang investasi yang valid dan akurat	38,430,000	
4	Kajian Potensi Sumber Daya yang terkait dengan Investasi	Tersedianya informasi akurat mengenai potensi investasi yang ada di Kota Payakumbuh	11,820,000	
5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Perizinan	Penambahan untuk Mall Pelayanan Publik (1 M)	1,000,000,000	
	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga			**Disparpora**
1	Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tambah biaya listrik vidiotron	4,300,000	
2	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	oke (service 2 videotron)	10,000,000	
3	Penyedian Barang Cetakan dan Pengadaan		1,100,257	
4	Pengadaan Pakaian Dinas/Perlengkapannya		1,350,000	
	Urusan Pariwisata			
5	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata	isi konten videotron	10,700,000	
6	Pendampingan DAK usulan (Pariwisata)	Untuk pendampingan DAK	236,000,000	
7	Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database	Meliputi informasi objek wisata, industri pariwisata, atraksi dan seni budaya	13,030,000	
8	Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	taman anggrek dan taman air mancur di medan nan bapaneh, merk kota Payakumbuh, taman di Ampangan	3,365,209,000	
	Urusan Kepemudaan dan Olahraga			**Disparpora**
9	Pendampingan DAK Kepemudaan	Untuk pendampingan DAK	1,350,000,000	
10	Pelatihan Paskibraka	Pelatih dan pelajar yang terlibat dalam paskibraka	600,000,000	

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PAGU (Rp)	PD PENANGGUNG JAWAB
	Dinas Perpustakaan & Kearsipan			
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan notebook, printer, printer laser jet, scanner dan infocus	46,591,500	**Dinas Perpustakaan & Kearsipan**
2	Pembangunan Gedung Kantor (Depo Arsip)	Pembangunan Gedung Depo Arsip	3,447,000,000	
3	Pengadaan kendaraan dinas	Pengadaan mobil panel van, mobil kijang innova dan sepeda motor 6 unit	580,000,000	
4	Pengadaan mebeleur	Pengadaan 5 set kursi tunggu	18,975,000	
5	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Pembuatan pagar kantor	56,096,370	
	Dinas Pertanian			**Dinas Pertanian**
1	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	Anggaran utk BBI	30,000,000	
2	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Tambahkan pojok asi, gudang uptd	150,000,000	
3	jasa pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional	penambahan bentor	1,000,000	
4	pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Penambahan Personil Dinas Parpora	2,700,000	
5	bimtek tenaga teknis perikanan	Kegiatan baru dalam rangka mendukung pencapaian IKU PD	54,000,000	
6	pelatihan petani dan pelaku agrobisnis	Persiapan PENAS --> PEDA	100,000,000	
7	peningkatan insetif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani	penambahan	7,200,000	
8	peningkatan produksi dan mutu produk horti melalui GEMA HORTI	penambahan untuk mencapai target produksi bawang merah	100,000,000	
9	pelatihan pengolahan hasil pertanian	selaras dengan program provinsi dan nasional dalam rangka pemanfaatan alat yang tidak tersedia di dinas	25,000,000	
10	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	UPTD Keswan, penambahan obat-obatan untuk operasional	50,000,000	
11	Operasional UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak	UPTD Baru	600,000,000	
12	pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan	Penambahan untuk persiapan operasional RPH Modern (310 jt) dan untuk pagar dan Gang Way pasar ternak (200 jt)	510,000,000	
13	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	penganggaran dilakukan melalui silpa DAK 2017 sebsesar 1.5 M	1,500,000,000	

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PAGU (Rp)	PD PENANGGUNG JAWAB
	Bappeda			**Bappeda**
1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan notebook, PC, printer dan infocus	55,000,000	
2	Pengadaan perlengkapan kantor	Pengadaan AC	20,000,000	
3	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Pojok Asi dan parkir	16,500,000	
4	Keberlanjutan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	Pengembangan SIMRAL	470,000,000	Bappeda/Diskominfo
	Badan Keuangan Daerah			**BKD**
1	Perencanaan pendirian BUMD	Dokumen perencanaan pendirian BUMD	50,000,000	
	Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM			**BKPSDM**
1	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah		710,526,200	
2	Diklat Teknis, Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Untuk pelaksanaan diklat analisa kebutuhan diklat, diklat purna tugas, diklat pengadaan barang dan jasa	672,611,900	
3	Seleksi penerimaan calon PNS		136,884,050	
4	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah		744,797,900	
5	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Pengembangan SIMPEG	180,000,000	BKPSDM/Diskominfo
	Kecamatan Payakumbuh Barat			**Pyk Barat**
1	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor lurah Parik rantang sebesar Rp. 571.650.000,- dimasukan kedalam cadangan prioritas	571,650,000	
2	Pengadaan Tanah	Pengadaan Tanah untuk Kantor Lurah Balai Nan Duo Rp. 361.600.000, dimasukan kedalam cadangan prioritas	361,600,000	
3	AAK	AAK disesuaikan dengan tahun 2018, Alokasi Becak Motor dupayakan dalam DAK LH	669,000,000	
	Kecamatan Payakumbuh Utara			**Pyk Utara**
	NIHIL			
	Kecamatan Payakumbuh Timur			**Pyk Timur**
	NIHIL			
	Kecamatan Payakumbuh Selatan			**Pyk Selatan**
	NIHIL			

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PAGU (Rp)	PD PENANGGUNG JAWAB
	Kecamatan LATINA			**Latina**
	NIHIL			
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
	Program pelayanan administrasi perkantoran			**BPBD**
1	Penyediaan Jasa komonikasi, Sumberdaya air dan listrik	Penambahan pembayaran tagihan listrik, air dan telpon karena perpindahan kantor ke Bukik Sibaluik	50,400,000	
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Penambahan pembayaran STNK	3,150,000	
3	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	21,355,300	
	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			**BPBD**
1	Koordinasi peningkatan penanganan tanggap darurat	Pelaksanaan latihan gabungan dengan TNI/Polri plus kelompok siaga bencana dan OPD terkait sebanyak 2x latihan	537,284,000	
	Kesbangpol			
	Program pengembangan wawasan kebangsaan			**Kesbangpol**
1	Kegiatan Peningkatan rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	Rapat dan koordinasi penanganan konflik-konflik sosial serta pengamanan akhir tahun sebesar Rp. 433.340.000,-	433,340,000	
2	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Tim Pakem dan FKUB sebesar Rp. 48.900.000,-	48,900,000	
	Program pendidikan politik masyarakat			**Kesbangpol**
1	Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	Forum diskusi politik sebesar Rp.51.329.750	51,329,750	
2	Penyuluhan Kepada Masyarakat	Sosialisasi dan pemantauan pemilu sebesar Rp.112.372.250	112,372,250	
	Jumlah		**60,491,738,276**	

Tabel V.3
DAFTAR RENCANA USULAN KEGIATAN KOTA PAYAKUMBUH
YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	BIDANG	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	OPD PENGUSUL
I	Pertanian	1 Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian	3,400,000,000	Dinas Pertanian
		2 Pembangunan/ perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di kecamatan penyediaan sarana pendukung penyuluhan	950,000,000	Dinas Pertanian
		3 Pembangunan /Perbaikan Balai/Instalasi Pembitan dan Hijauan Pakan Ternak, Pusat Kesehatan Hewan, Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Penyediaan Sarana Pendukungnya	2,765,000,000	Dinas Pertanian
		4 Pembangunan/Perbaikan Lumbung Pangan Masyarakat dan Penyediaan Sarana Pendukungnya	420,000,000	Dinas Pertanian
II	Kelautan dan Perikanan	1 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Kab/Kota)	1,438,000,000	Dinas Pertanian
III	Sanitasi	1 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di Daerah Perkotaan dan/atau Perdesaan	4,483,000,000	Dinas Perkim
IV	Perumahan dan Pemukiman	1 Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni untuk memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan	10,565,625,000	Dinas Perkim
V	Pendidikan	1 Pembangunan Prasarana Belajar SD	5,288,000,000	Dinas Pendidikan
		2 Pengadaan Sarana Belajar SD	5,081,634,976	Dinas Pendidikan
		3 Rehabilitasi Prasara Belajar SD	2,575,000,000	Dinas Pendidikan

NO.	BIDANG	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	OPD PENGUSUL
		4 Pembangunan Prasarana Belajar SKB	2,025,000,000	Dinas Pendidikan
		5 Pengadaan Sarana Belajar SKB	868,000,000	Dinas Pendidikan
		6 Rehabilitasi Prasara Belajar SKB	1,730,000,000	Dinas Pendidikan
		7 Sarana dan Prasarana PAUD	1,748,000,000	Dinas Pendidikan
		8 Pembangunan Prasarana Belajar SMP	5,355,000,000	Dinas Pendidikan
		9 Pengadaan Sarana Belajar SMP	12,083,100,000	Dinas Pendidikan
		10 Rehabilitasi Prasara Belajar SMP	8,905,000,000	Dinas Pendidikan
VI	Kesehatan dan KB	1 Penyediaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB	90,100,000	Dinas Kesehatan
		2 Pengadaan Mobil Unit Penerangan KB	690,900,000	Dinas Kesehatan
		3 Pengadaan Sarana Pendataan	157,927,500	Dinas Kesehatan
		4 Penyediaan Obat dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) di Kab/Kota	2,100,000,000	Dinas Kesehatan
		5 Penyediaan Sarana Puskesmas non Afirmasi	7,500,000,000	Dinas Kesehatan
		6 Penyediaan Alat, Mesin dan Bahan serta Sistem Informasi Kesehatan (SIK) untuk pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat di Puskesmas non Afirmasi	341,440,000	Dinas Kesehatan
		7 Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas non Afirmasi	3,278,527,398	Dinas Kesehatan
		8 Penyediaan Prasarana Puskesmas non Afirmasi	946,000,000	Dinas Kesehatan
		9 Pembangunan dan Rehabilitasi RS Kab/Kota dan Provinsi	1,077,488,000	Dinas Kesehatan
		10 Peneyediaan Prasarana RS Kab/Kota dan Provinsi	1,007,245,000	Dinas Kesehatan
		11 Penyediaan Alat Kesehatan di RS Kab/Kota dan Provinsi	19,556,426,952	
VII	Irigasi	1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi	6,482,900,000	Dinas PUPR
VIII	Jalan	1 Pemeliharaan Berkala /Rehabilitasi Jalan/Jembatan (Reguler)	16,567,000,000	Dinas PUPR
		2 Peningkatan (struktur dan kapasitas jalan/jembatan (reguler)	27,726,500,000	Dinas PUPR
IX	Air Minum	1 Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan idle capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun (Penugasan)	25,741,441,860	Dinas PUPR

NO.	BIDANG	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	OPD PENGUSUL
		2 Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun (Penugasan)	18,649,094,000	Dinas PUPR
X	Industri Kecil dan Menengah	1 Pembangunan Sentra IKM	1,000,000,000	Dinas Nakerperin
XI	Pariwisata	1 Pengembangan Daya Tarik Wisata	2,335,165,000	Dinas Parpora
XII	Olahraga	1 Pembangunan Baru Prasarana GOR dan Penyediaan Sarananya	13,500,000,000	Dinas Parpora
XIII	Pasar	1 Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat, Khususnya Tipe D	928,900,000	Dinas Koperasi dan UMKM
		2 penyediaan Sarana dalam Mendukung pembentukan Unit Metrologi Legal	2,366,135,000	Dinas Koperasi dan UMKM
IVX	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Pengelolaan Sampah serta sarana prasarana pendukung	737,000,000	DLH
		2 Pengurangan dan pengendalian beban pencemaran air limbah cair melalui IPA	380,000,000	DLH
		3 Pengadaan Alat Angkut Sampah Dump Truck	4,612,500,000	DLH
VX	Perpustakaan Daerah	1 Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan	10,000,000,000	Perpustakaan dan Arsip
		2 Rehabilitasi Gedung Layanan Perpustakaan	172,000,000	Perpustakaan dan Arsip
		3 Pengengembangan Koleksi Perpustakaan	100,000,000	Perpustakaan dan Arsip
TOTAL			**237,725,050,686**	

-

Tabel V.4

DAFTAR USULAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN KOTA PAYAKUMBUH SUMBER DANA APBN (HASIL ENTRI SIMLARAS)

TAHUN ANGGARAN 2019

No	Program Prioritas	Urusan Pemerintah Daerah	Kementerian / Lembaga	Kegiatan K/L	Nama Usulan Proyek / Output Kegiatan	Target Daerah	Usulan Pagu (Rupiah)	OPD PENGUSUL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Pendidikan	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Layanan Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu PAUD dan Dikmas	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD DIKMAS	150 Orang	104,920,000	Dinas Pendidikan
2	Percepatan Pengurangan Kemiskinan	Pendidikan	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembinaan Sekolah Dasar	Beasiswa PIP SD	5.439 Anak	2,447,550,000	Dinas Pendidikan
3	Percepatan Pengurangan Kemiskinan	Pendidikan	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	Beasiswa PIP SMP	2.778 Anak	2,083,500,000	Dinas Pendidikan
4	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Pendidikan	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Layanan Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu PAUD dan Dikmas	Peningkatan SDM Pamong dan Penilik	2 Kegiatan	200,000,000	Dinas Pendidikan
5	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Pendidikan	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Layanan Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu PAUD dan Dikmas	Pembinaan PKG Gugus PAUD	5 Kelompok	105,000,000	Dinas Pendidikan
6	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Pendidikan	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyediaan Layanan Paud	Penguatan Gugus PAUD	1 Kegiatan	150,000,000	Dinas Pendidikan
7	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Pendidikan	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Penguatan Inklusif SD dan SMP	2 Kegiatan	2,000,000,000	Dinas Pendidikan
8	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Pendidikan	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembinaan Sekolah Dasar	Penyelenggaran Gala Siswa SD	1 Kegiatan	100,000,000	Dinas Pendidikan

No	Program Prioritas	Urusan Pemerintah Daerah	Kementerian / Lembaga	Kegiatan K/L	Nama Usulan Proyek / Output Kegiatan	Target Daerah	Usulan Pagu (Rupiah)	OPD PENGUSUL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Pendidikan	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Galasiswa SMP	1 Kegiatan	100,000,000	Dinas Pendidikan
10	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Pendidikan	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembinaan Sekolah Dasar	Pendidikan Karakter SD	1 Kegiatan	100,000,000	Dinas Pendidikan
11	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Pendidikan	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Paud dan Dikmas	Pembinaan Guru dan tenaga kependidikan	20 Orang	176,000,000	Dinas Pendidikan
12	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Pendidikan	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pelaksanaan Pelatihan Kurikulum untuk Guru SMP	100 Orang	150,000,000	Dinas Pendidikan
13	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Pendidikan	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	Pendidikan Karakter SMP	1 Kegiatan	100,000,000	Dinas Pendidikan
14	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Pendidikan	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pelatihan Kepala Sekolah PAUD, SD, SMP	3 Kegiatan	300,000,000	Dinas Pendidikan
15	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Pendidikan	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembinaan Sekolah Dasar	Kursus Mahir Dasar (KMD) Guru Parmuka SD	100 Orang	150,000,000	Dinas Pendidikan
16	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Pendidikan	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	Kursus Mahir Dasar (KMD) Guru Pramuka SMP	100 Orang	150,000,000	Dinas Pendidikan
17	Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar	Kesehatan	KEMENTERIAN KESEHATAN	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer	Pembangunan/penambahan ruang/rehab gedung rawat inap Puskesmas	1 Gedung	7,500,000,000	Dinas Kesehatan
18	Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar	Kesehatan	KEMENTERIAN KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Kefarmasian	Pengadaan Obat dan bahan medis habis pakai	8 Puskesmas	2,100,000,000	Dinas Kesehatan

No	Program Prioritas	Urusan Pemerintah Daerah	Kementerian / Lembaga	Kegiatan K/L	Nama Usulan Proyek / Output Kegiatan	Target Daerah	Usulan Pagu (Rupiah)	OPD PENGUSUL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar	Kesehatan	KEMENTERIAN KESEHATAN	Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan alat kesehatan dan penunjang rumah sakit	5 Paket	11,000,000,000	Dinas Kesehatan
20	Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar	Kesehatan	KEMENTERIAN KESEHATAN	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Promosi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	1 Paket	175,000,000	Dinas Kesehatan
21	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Kesehatan	KEMENTERIAN KESEHATAN	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		Pencegahan dan pengendalian penyakit Aktivitas	4,498,045,750	Dinas Kesehatan
22	Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar	Kesehatan	KEMENTERIAN KESEHATAN	Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Akreditasi Puskesmas	5 Puskesmas	572,075,000	Dinas Kesehatan
23	Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar	Kesehatan	KEMENTERIAN KESEHATAN	Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan dan penunjang Puskesmas	1 Paket	3,000,000,000	Dinas Kesehatan
24	Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar	Kesehatan			Pembangunan IGD RSUD	Peningkatan capaian SPM daerah Gedung	35,000,000,000	Dinas Kesehatan
25	Percepatan Pengurangan Kemiskinan	Kesehatan	KEMENTERIAN KESEHATAN	Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS	Penyelenggaraan JKN	34000 Orang Bulan	7,360,000,000	Dinas Kesehatan
26	Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan	Pekerjaan umum dan penataan ruang	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Pengelolaan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Lanjutan pembangunan Embung Bulakan	1 Unit	20,500,000,000	Dinas PU & PR
27	Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan	Pekerjaan umum dan penataan ruang	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Pengelolaan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Pembangunan embung lurah rawang	1 Unit	25,000,000,000	Dinas PU & PR

No	Program Prioritas	Urusan Pemerintah Daerah	Kementerian / Lembaga	Kegiatan K/L	Nama Usulan Proyek / Output Kegiatan	Target Daerah	Usulan Pagu (Rupiah)	OPD PENGUSUL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas SD Air	Pekerjaan umum dan penataan ruang	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Pengelolaan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Pembangunan Bendung Padang Ambacang	1 Unit	17,500,000,000	Dinas PU & PR
29	Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas SD Air	Pekerjaan umum dan penataan ruang	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Pengembangan Kawasan Perkotaan	Lanjutan Normalisasi dan Pengendalian Banjir Sungai Batang Agam	5000 Meter	125,000,000,000	Dinas PU & PR
30	Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas SD Air	Pekerjaan umum dan penataan ruang	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Pengembangan Kawasan Perkotaan	Pembangunan Drainase Primer Kawasan Pusat Kota	4,4 Kilometer	6,600,000,000	Dinas PU & PR
31	Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas SD Air	Pekerjaan umum dan penataan ruang	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Tambak	Rehabilitasi DI Latinura (Irigasi Interkoneksi)	3091 Hektar	9,500,000,000	Dinas PU & PR
32	Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas SD Air	Pekerjaan umum dan penataan ruang	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Pengembangan Kawasan Perkotaan	Normalisasi dan Pengamanan Tebing Sungai Batang Agam	950 Meter	23,750,000,000	Dinas PU & PR
33	Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas SD Air	Pekerjaan umum dan penataan ruang	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Pengembangan Kawasan Perkotaan	Pembangunan Groundsil Sungai Batang Agam	4 Unit	12,000,000,000	Dinas PU & PR
34	Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas SD Air	Pekerjaan umum dan penataan ruang	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Tambak	Rehabilitasi DI Seltimut (Irigasi Interkoneksi)	3424 Hektar	10,800,000,000	Dinas PU & PR
35	Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas SD Air	Pekerjaan umum dan penataan ruang	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Pengembangan Kawasan Perkotaan	Normalisasi dan Pengamanan Tebing Sungai Batang Lampasi	1800 Meter	45,000,000,000	Dinas PU & PR

No	Program Prioritas	Urusan Pemerintah Daerah	Kementerian / Lembaga	Kegiatan K/L	Nama Usulan Proyek / Output Kegiatan	Target Daerah	Usulan Pagu (Rupiah)	OPD PENGUSUL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas SD Air	Pekerjaan umum dan penataan ruang	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Tambak	Rehabilitasi DI Sungai Dareh	3000 Meter	3,100,000,000	Dinas PU & PR
37	Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas SD Air	Pekerjaan umum dan penataan ruang	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Pengembangan Kawasan Perkotaan	Pembangunan Groundsil Sungai Batang Lampasi	3 Unit	9,000,000,000	Dinas PU & PR
38	Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas SD Air	Pekerjaan umum dan penataan ruang	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Tambak	Rehabilitasi DI Batang Agam	2000 Meter	2,400,000,000	Dinas PU & PR
39	Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas SD Air	Pekerjaan umum dan penataan ruang	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Pengembangan Kawasan Perkotaan	Normalisasi dan Pengamanan Tebing Sungai Batang Sikali	950 Meter	19,000,000,000	Dinas PU & PR
40	Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas SD Air	Pekerjaan umum dan penataan ruang	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Tambak	Rehabilitasi DI Batang Lampasi	2700 Meter	3,105,000,000	Dinas PU & PR
41	Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas SD Air	Pekerjaan umum dan penataan ruang	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Pengembangan Kawasan Perkotaan	Normalisasi dan Pengamanan Tebing Sungai Tembok Jua	750 Meter	6,000,000,000	Dinas PU & PR
42	Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas SD Air	Pekerjaan umum dan penataan ruang	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Tambak	Rehabilitasi DI Batang Tabik	650 Meter	617,500,000	Dinas PU & PR
43	Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas SD Air	Pekerjaan umum dan penataan ruang	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Tambak	Rehabilitasi DI Banda Ngalau	1500 Meter	1,400,000,000	Dinas PU & PR

No	Program Prioritas	Urusan Pemerintah Daerah	Kementerian / Lembaga	Kegiatan K/L	Nama Usulan Proyek / Output Kegiatan	Target Daerah	Usulan Pagu (Rupiah)	OPD PENGUSUL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas SD Air	Pekerjaan umum dan penataan ruang	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Pengembangan Kawasan Perkotaan	Normalisasi dan Pengamanan Tebing Sungai Talang	700 Meter	5,600,000,000	Dinas PU & PR
45	Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas SD Air	Pekerjaan umum dan penataan ruang	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Pengembangan Kawasan Perkotaan	Normalisasi dan Pengamanan Tebing Sungai Bai	700 Meter	5,600,000,000	Dinas PU & PR
46	Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas SD Air	Pekerjaan umum dan penataan ruang	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Tambak	Rehabilitasi DI Batang Talawi	2200 Meter	2,400,000,000	Dinas PU & PR
47	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Pemberdayaan Perumahan Swadaya	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang mampu	535 Unit	6,737,500,000	Dinas Perumahan dan Waskin
48	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Pendampingan Penyusunan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT)	1 Paket	400,000,000	Dinas Perumahan dan Waskin
49	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Pembinaan dan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Rehab berat IPLT	1 Paket	5,000,000,000	Dinas Perumahan dan Waskin
50	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Pengadaan Truk Tinja Kapasitas 4 m3	1 Unit	500,000,000	Dinas Perumahan dan Waskin
51	Percepatan Pengurangan Kemiskinan	Sosial	KEMENTERIAN SOSIAL	Jaminan Sosial Keluarga	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendampingan Sosial	20 Alat	600,000,000	Dinas Sosial

No	Program Prioritas	Urusan Pemerintah Daerah	Kementerian / Lembaga	Kegiatan K/L	Nama Usulan Proyek / Output Kegiatan	Target Daerah	Usulan Pagu (Rupiah)	OPD PENGUSUL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	Percepatan Pengurangan Kemiskinan	Sosial	KEMENTERIAN SOSIAL	Jaminan Sosial Keluarga	Operasional Program Keluarga Harapan	4265 Orang	8,060,850,000	Dinas Sosial
53	Percepatan Pengurangan Kemiskinan	Sosial	KEMENTERIAN SOSIAL	Jaminan Sosial Keluarga	Penyaluran RASTRA untuk keluarga miskin dan Monitoring terhadap PMKS	6383 Orang Bulan	7,583,400,000	Dinas Sosial
54	Percepatan Pengurangan Kemiskinan	Sosial	KEMENTERIAN SOSIAL	Jaminan Sosial Keluarga	Bimbingan Sosial Penumbuhan KUBE Fakir Miskin	30 Kelompok	600,000,000	Dinas Sosial
55	Percepatan Pengurangan Kemiskinan	Sosial	KEMENTERIAN SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	Peningkatan Kualitas Hidup bagi Lanjut Usia melalui Pemberian Bantuan UEP	50 Orang	75,000,000	Dinas Sosial
56	Percepatan Pengurangan Kemiskinan	Tenaga kerja	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Meningkatnya pelaku HI yang mendapatkan pemahaman mengenai Program Jaminan Sosial	Kota Payakumbuh Perusahaan	100,000,000	Dinas Naker & Perind
57	Percepatan Pengurangan Kemiskinan	Tenaga kerja	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja	Terciptanya pencari kerja yang siap pakai	Kota Payakumbuh Orang	1,200,000	Dinas Naker & Perind
58	Percepatan Pengurangan Kemiskinan	Tenaga kerja	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas	Terciptanya wirausaha baru	Kota Payakumbuh Orang	600,000,000	Dinas Naker & Perind
59	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)	Pembinaan Ketahanan Remaja	Peningkatan Informasi Ketahan Remaja	200 Orang	100,000,000	DP3AP2KB
60	Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan	Pangan	KEMENTERIAN PERTANIAN	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Pemberdayaan Pekarangan Pangan	10 Desa/Kelurahan	500,000,000	Dinas Ketahanan Pangan

No	Program Prioritas	Urusan Pemerintah Daerah	Kementerian / Lembaga	Kegiatan K/L	Nama Usulan Proyek / Output Kegiatan	Target Daerah	Usulan Pagu (Rupiah)	OPD PENGUSUL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan	Pangan	KEMENTERIAN PERTANIAN	Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)	1 Desa/Kelurahan	260,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
62	Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan	Pangan	KEMENTERIAN PERTANIAN	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Pengembangan Pengolahan Pangan Lokal	1 paket Advokasi	200,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
63	Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan	Pangan	KEMENTERIAN PERTANIAN	Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	1 paket Advokasi	250,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
64	Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan	Lingkungan hidup	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Pengendalian Pencemaran Air	Pemantauan Kualitas Air Danau/Sungai/Mata Air dan Air Tanah	1 Paket	2,500,000,000	DLH
65	Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan	Lingkungan hidup	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati	1 Paket	8,000,000,000	DLH
66	Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan	Lingkungan hidup	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Pengendalian Pencemaran Udara	Pelaksanaan pengukuran kualitas udara ambien di kabupaten/kota	1 Paket	645,000,000	DLH
67	Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan	Lingkungan hidup	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Pengendalian Pencemaran Air	Peningkatan kualitas air sungai dengan menurunkan beban pencemaran	1 Paket	800,000,000	DLH
68	Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan	Lingkungan hidup	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Pengendalian Pencemaran Air	Peningkatan proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu air limbah	1 Paket	300,000,000	DLH

No	Program Prioritas	Urusan Pemerintah Daerah	Kementerian / Lembaga	Kegiatan K/L	Nama Usulan Proyek / Output Kegiatan	Target Daerah	Usulan Pagu (Rupiah)	OPD PENGUSUL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil	Pelayanan Kartu Identitas Anak	20000 Anak	200,000,000	Dinas Kependudukan dan Capil
70	Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	Pengadaan Alat Perekaman KTP-El	2 Set	185,000,000	Dinas Kependudukan dan Capil
71	Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	PENGADAAN MOBIL PELAYANAN KELILING	1 Unit	800,000,000	Dinas Kependudukan dan Capil
72	Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan	Koperasi, usaha kecil, dan menengah	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah	Fasilitasi Legalitas Usaha	30 UMKM	100,000,000	Dinas Koperasi dan UKM
73	Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif	Koperasi, usaha kecil, dan menengah	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah	Satuan Tugas Pengawasan Koperasi	1 Paket	10.000.000	Dinas Koperasi dan UKM
74	Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif	Koperasi, usaha kecil, dan menengah	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah	Fasilitasi pameran dan promosi produk UMKM	1 Paket	20,000,000	Dinas Koperasi dan UKM
75	Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan	penanaman modal	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV	Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan perizinan	MOBIL PELAYANAN PERIZINAN Unit	350,000,000	DPM - PTSP
76	Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan	penanaman modal	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV	Sertifikasi Sistim Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008	1 Paket	100,000,000	DPM - PTSP

No	Program Prioritas	Urusan Pemerintah Daerah	Kementerian / Lembaga	Kegiatan K/L	Nama Usulan Proyek / Output Kegiatan	Target Daerah	Usulan Pagu (Rupiah)	OPD PENGUSUL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif	kebudayaan	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembinaan Kesenian	Karya seni yang direvitalisasi	1 (satu) Paket	500,000,000	Dinas Parpora
78	Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif	kebudayaan	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi	Jumlah desa-desa adat yang direvitalisasi	2 (dua) Desa/Kelurahan	1,500,000,000	Dinas Parpora
79	Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif	kebudayaan	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi	Jumlah komunitas budaya yang difasilitasi	2 (dua) Kelompok	500,000,000	Dinas Parpora
80	Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi	kearsipan	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan ANRI	Pembangunan Depo Arsip Kota Payakumbuh	1 Gedung	4,500,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
81	Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif	pariwisata	KEMENTERIAN PARIWISATA	Pengembangan Kompetensi SDM Kepariwisataan	Jumlah SDM yang tersertifikasi bidang kepariwisataan	10 (sepuluh) Orang	300,000,000	Dinas Parpora
82	Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif	pariwisata	BADAN EKONOMI KREATIF	Edukasi Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang diedukasi	2 (dua) Orang	175,000,000	Dinas Parpora
83	Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif	pariwisata	KEMENTERIAN PARIWISATA	Pengembangan SDM Pariwisata dan Hubungan Antar Lembaga	Jumlah SDM tersertifikasi dan memperoleh pembekalan bidang pariwisata	10 (sepuluh) Orang	300,000,000	Dinas Parpora
84	Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	pertanian	KEMENTERIAN PERTANIAN	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	Hijauan Pakan Ternak	15 Hektar	75,000,000	Dinas Pertanian
85	Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	pertanian	KEMENTERIAN PERTANIAN	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	Pakan Konsentrat yang diperbaiki	50 Ton	1,000,000,000	Dinas Pertanian
86	Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	pertanian	KEMENTERIAN PERTANIAN	Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	Penambahan Sapi Indukan/Pejantan	100 Ekor	2,800,000,000	Dinas Pertanian

No	Program Prioritas	Urusan Pemerintah Daerah	Kementerian / Lembaga	Kegiatan K/L	Nama Usulan Proyek / Output Kegiatan	Target Daerah	Usulan Pagu (Rupiah)	OPD PENGUSUL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	pertanian	KEMENTERIAN PERTANIAN	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	100 Hektar	160,000,000	Dinas Pertanian
88	Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	pertanian	KEMENTERIAN PERTANIAN	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	Biaya Operasional Penyuluh (BOP) THL-TB PP Wilayah Barat	19 Orang	72,960,000	Dinas Pertanian
89	Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	pertanian	KEMENTERIAN PERTANIAN	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	Sekolah Lapangan dalam Rangka Mendukung UPSUS (SL UPSUS)	5 Unit	190,000,000	Dinas Pertanian
90	Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	pertanian	KEMENTERIAN PERTANIAN	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan (Power thresher)	6 Unit	129,601,512	Dinas Pertanian
91	Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	pertanian	KEMENTERIAN PERTANIAN	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan (corn sheller)	5 Unit	167,115,750	Dinas Pertanian
92	Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	pertanian	KEMENTERIAN PERTANIAN	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	Penyediaan Alsintan Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan (traktor roda 2)	5 Unit	137,500,000	Dinas Pertanian
93	Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	pertanian	KEMENTERIAN PERTANIAN	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	Penyediaan Alsintan Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan (traktor roda 4)	1 Unit	425,000,000	Dinas Pertanian
94	Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	pertanian	KEMENTERIAN PERTANIAN	Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI	Penyediaan Alsintan Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan (sprayer pertanian)	10 Advokasi	35,000,000	Dinas Pertanian

No	Program Prioritas	Urusan Pemerintah Daerah	Kementerian / Lembaga	Kegiatan K/L	Nama Usulan Proyek / Output Kegiatan	Target Daerah	Usulan Pagu (Rupiah)	OPD PENGUSUL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
95	Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	pertanian	KEMENTERIAN PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)	100 Ekor	16,000,000	Dinas Pertanian
96	Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	pertanian	KEMENTERIAN PERTANIAN	Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI	Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	100 Hektar	14,400,000	Dinas Pertanian
97	Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	pertanian	KEMENTERIAN PERTANIAN	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	Pengadaan Alsin Pakan	1 Unit	50,000,000	Dinas Pertanian
98	Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi	energi dan sumber daya mineral	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro	1 Unit	13,600,000,000	Dinas Pertanian
99	Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif	perdagangan	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian	Peningkatan Kompetensi SDM Kemetrologian	4 Orang Paket	200,000,000	Dinas Koperasi dan UKM
100	Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas	perindustrian	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)	Pengoperasian dan Pemanfaatan Reaktor Serba Guna	Penerapan teknologi irradiator gamma dalam pengemasan produk industri daerah	1 Paket	200,000,000,000	Dinas Naker & Perind
101	Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan	perindustrian	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	Riset dan Standardisasi Bidang Industri	Terlaksananya pendampingan dan tersedianya sertifikat HACCP / SNI / ISO bagi pelaku IKM Kota Payakumbuh	Kota Payakumbuh IKM	450,000,000	Dinas Naker & Perind
102	Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan	perindustrian	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	Riset dan Standardisasi Bidang Industri	Terlaksananya Pembangunan Rumah Celup bagi IKM Tenun Balai Panjang	Kota Payakumbuh Sentra	500,000,000	Dinas Naker & Perind

No	Program Prioritas	Urusan Pemerintah Daerah	Kementerian / Lembaga	Kegiatan K/L	Nama Usulan Proyek / Output Kegiatan	Target Daerah	Usulan Pagu (Rupiah)	OPD PENGUSUL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan	perindustrian	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	Riset dan Standardisasi Bidang Industri	Tersedianya media / sarana pemasaran / promosi secara online	Kota Payakumbuh IKM	500,000,000	Dinas Naker & Perind
104	Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan	perindustrian	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	Riset dan Standardisasi Bidang Industri	Tersedianya mesin / peralatan pembuatan kemasan beserta operasionalnya	Kota Payakumbuh IKM	4,000,000	Dinas Naker & Perind
105			BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)	Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	pengadaan pusdalops kota payakumbuh provinsi sumatera barat	tersedianya pusat pengendalian operasional penanggulangan bencana Aset	1,200,000,000	BPBD
							708,564,118,012	

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator kinerja yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan provinsi, nasional serta Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga terkait.

6.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dalam pencapaian sasaran strategis dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja daerah secara makro. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk meningkatkan fokus pembangunan pemerintah dalam rangka pencapaian visi misi tersebut maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 berikut adalah target capaian kinerja Tahun 2019 dan perkiraan maju tahun 2020 menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi yang disajikan dalam Tabel VI.1:

Tabel VI.1
Target Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kota Payakumbuh Tahun 2019-2020

NO	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN TAHUN		
		2018	2019	2020
1	2	3	4	5
Misi I : Mewujudkan SDM yang handal, sehat dan kompetitif				
1	Jumlah sekolah (SD, SMP) yang berakreditasi A	70	74	77
2	Angka Usia Harapan Hidup	73,40	73,60	73,90
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,76	61,80	61,86
4	Tingkat Kemiskinan	5,93	5,66	5,39
5	Tingkat Pengangguran	6,70	6,62	6,47
6	Jumlah Atlet berprestasi tingkat Nasional.	7	11	15

NO	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN TAHUN		
		2018	2019	2020
1	2	3	4	5
Misi II : Membangun Perekonomian yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing dan Berkeadilan dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama				
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	23,97	24,02	24,07
2	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	6,00	6,02	6,08
3	Kontribusi Sektor Sektor Pertanian terhadap PDRB	7,42	7,44	7,45
4	Persentase peningkatan kunjungan wisata	5,00	5,10	5,50
5	Nilai Realisasi Investasi (Miliar Rupiah)	195,00	196,90	198,90
6	Persentase Usaha Kecil Menengah terhadap UMKM	27,64	28,15	28,66
7	Persentase Peningkatan SHU Koperasi	10,00	12,15	14,25
Misi III : Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum yang Nyaman dan Berkelanjutan				
1	Persentase pelayanan air minum	96,71	98,80	99,02
2	Persentase panjang jalan status Kota dalam kondisi mantap	69,31	72,06	74,81
3	Persentase sistem drainase skala kota	44,46	45,95	47,39
4	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	78,90	79,20	79,50
5	Persentase daerah irigasi berkinerja baik	76,34	79,10	81,72
6	Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan	77,78	83,33	88,89
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,00	57,25	57,50
8	Persentase luas permukiman kumuh	1,77	1,62	1,47
Misi IV : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih				
1	Nilai Evaluasi AKIP Kota	BB	BB	A
2	Opini BPK	WTP	WTP	WTP
3	Persentase Perangkat Daerah yang telah terintegrasi TI	29,03	45,16	64,52
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,85	80,35	80,75
5	Indeks Reformasi Birokrasi	50,00	55,00	60,00
Misi V : Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia Dan Berbudaya Berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah				
1	Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik	21,28	28,72	36,17
2	Persentase peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan melalui lembaga/ Badan Zakat/ Wakaf	3,40	3,80	4,20
3	Persentase lembaga keagamaan (MUI) yang aktif	20,00	40,00	60,00
4	Persentase lembaga adat yang aktif	90,00	95,00	100,00

6.2. INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja daerah ini meliputi 3 aspek utama pembangunan daerah yaitu Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum dan Daya Saing Daerah. Aspek Kesejahteraan Masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi dan sosialndikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang meliputi indikator kinerja dalam penyelenggaraan Pelayanan Urusan Wajib dan Pelayanan Urusan Pilihan. Sedangkan aspek daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dangan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Tabel VI.2
Target Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Kota Payakumbuh Tahun 2019-2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,14	6,20	6,26
2	Laju Inflasi	%	4,97	4,44	3,91
3	PDRB (ADHK) Perkapita	(Rp/juta)	31,74	33,19	34,74
4	PDRB (ADHB) Perkapita (2010=100)	(Rp/juta)	41,93	43,87	44,64
5	Nilai Koefisien Gini	Nilai	0,302	0,301	0,300
6	Indeks Ketimpangan Regional	Nilai	0,17	0,16	0,15
7	Tingkat Kemiskinan	%	5,93	5,66	5,39
8	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Nilai	0,71	0,69	0,66
9	Tingkat Pengangguran	%	6,77	6,62	6,47
10	Pertumbuhan Jumlah Penganggur	%	9,58	-1,46	-2,78
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Skor	78,25	78,60	78,94
12	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,50	10,60	10,70
13	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,40	14,49	14,58
14	Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	Tahun	73,40	73,60	73,90
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM				
I.	Layanan Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar				
1	Urusan Pendidikan				
1.1	Angka Partisipasi Kasar				

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
1.1.1	APK PAUD	%	75,50	75,70	75,90
1.1.2	APK SD/MI/Paket A	%	121,66	125,05	127,50
1.1.3	APK SMP/MTs/Paket B	%	156,98	158,10	160,08
1.2	**Angka Partisipasi Murni**				
1.2.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	108,39	109,75	110,50
1.2.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	119,30	120,15	121,30
1.2.3	Jumlah Prestasi Siswa Tingkat Provinsi	Prestasi	15	16	16
1.2.4	Jumlah Prestasi Siswa Tingkat Nasional	Prestasi	2	2	3
1.2.5	Jumlah sekolah (SD, SMP) yang berakreditasi A	sekolah	70	74	77
1.2.6	Jumlah Lembaga PAUD dan Dikmas yang terakreditasi	sekolah	5	7	9
1.2.7	Angka kelulusan	%	100,00	100,00	100,00
1.2.8	Rata-rata nilai Nasional SD	Nilai	7,65	7,70	7,75
1.2.9	Rata-rata Nilai ujian Nasional SMP	Nilai	5,80	5,85	5,90
2	**Urusan Kesehatan**				
2.1	Jumlah Kasus Kematian Bayi	jumlah	27	26	25
2.2	Jumlah Kasus Kema-tian Ibu melahirkan	jumlah	3	3	3
2.3	Persentase Balita Gizi Buruk	%	<3	<3	<3
2.4	Jumlah kasus Kematian Balita	jumlah	<12	<11	<10
2.5	Persentase Penanganan Kasus Penyakit Menular berpotensi KLB	%	100	100	100
2.6	Persentase Penaganan Kasus Penyakit Tidak Menular	%	100	100	100
2.7	Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar	%	87,00	89,00	92,00
2.8	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan	%	100,00	100,00	100,00
2.9	Persentase Kelurahan STBM	%	87	90	92
2.10	Persentase Kemandirian Masyarakat Hidup Sehat	%	77	80	82
2.11	Persentase Peningkatan Mutu	%	80	85	87

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Pengelolaan Obat dan Perbelkes				
2.12	Persentase IRTP sesuai standar kesehatan	%	60	65	70
3	**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				
3.1	Persentase rumah yang terlayani air minum perpipaan	%	92,30	92,97	93,62
3.2	persentase irigasi dengan kondisi baik	%	76,34	79,10	81,72
3.3	Persentase Penataan sungai	%	18,56	21,69	23,52
3.4	Persentase panjang jalan status Kota dalam kondisi mantap	%	69,31	72,06	74,81
3.5	Persentase jalan kota yang memiliki drainase	%	44,46	45,95	47,39
3.6	Persentase Kepatuhan Pembangunan sesuai dokumen tata ruang	%	31,32	32,02	32,74
4	**Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman**				
4.1	Persentase Rumah Layak Huni	%	92,95	93,81	94,87
4.2	Persentase pengurangan Backlog	%	2,04	3,04	2,08
4.3	Persentase rumah bersanitasi layak	%	89,71	91,22	92,74
4.4	Luas Pengurangan kawasan kumuh	Ha	5,70	5,60	5,50
4.5	Persentase penyerahan PSU Perumahan oleh Pengembangan	%	0,00	1,95	3,92
4.6	Persentase Pengelolaan PSU Perumahan	%	0,00	0,00	0,98
5	**Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**				
5.1	Penegakkan Perda	%	100,00	100,00	100,00
5.2	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	Rasio	8,00	8,00	13,00
5.3	Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk	Rasio	48,00	48,00	48,00
5.4	Rasio pos siskamling per jumlah desa/ kelurahan	Unit	1,00	2,00	2,00
5.5	Cakupan pelayanan penanganan kebakaran	%	124,33	124,33	124,33
5.6	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%	40,91	40,91	40,91
6	**Urusan Sosial**				
6.1	Tingkat Kemiskinan	%	5,93	5,66	5,39
6.2	Persentase Rumah Tangga sasaran (RTS) yang keluar dari basis data terpadu	%	0,20	0,40	0,60

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
6.3	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos	%	48,00	50,00	60,00
6.4	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	%	99,60	99,70	99,80
II	**Layanan Urusan Wajib Terkait Non Pelayanan Dasar**				
1	**Urusan Ketenagakerjaan**				
1.1	Tingkat Pengangguran	%	6,77	6,62	6,47
1.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,25	71,30	71,42
2	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				
2.1	Indeks Pembangunan gender (IPG)	Nilai	98,52	98,52	98,62
2.2	Tingkat Kateori Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Kategori	Utama	-	Utama
2.3	Tingkat Kategori Capaian Kota Layak Anak (KLA)	Kategori	-	Madya	-
2.4	Jumlah Kebijakan tekait hak dan perlindungan anak	Jumlah	1	1	1
2.5	Persentase Penanganan kasus kekerasan terhada perempuan & anak (termasuk TPPO)	%	95	95	100
2.6	Persentase perempuan yang duduk dalam legislatif (DPRD)	%	8,00	12,00	12,00
2.7	Persentase kekerasan terhadap anak	%	0,061	0,052	0,040
2.8	Persentase kekerasan terhadap perempuan	%	0,092	0,074	0,06
3	**Urusan Pangan**				
3.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) berbasis ketersediaan	skor	83,00	86,00	90,00
3.2	Skor PPH Konsumsi	skor	80,50	82,00	86,00
3.3	Tingkat Keamanan Pangan	Indeks	Sedang	sedang	tinggi
3.4	Stabilisasi harga				
	a. Beras	%	≤10	≤10	≤10
	b. Cabe	%	≤25	≤25	≤25
	c. Bawang	%	≤10	≤10	≤10
3.5	Stabilisasi Pasokan	%	≥77	≥77	≥77
4	**Urusan Pertanahan**				
4.1	Persentase sertifikasi aset tanah dan bangunan pemko	%	58,11	59,55	61,36
5	**Urusan Lingkungan Hidup**				

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
5.1	Persentase RTH Publik	%	15,91	16,25	16,50
5.2	Indeks Kualitas Air	%	75,00	75,00	75,00
5.3	Indeks Kualitas udara	%	80,00	80,00	80,00
5.4	Persentase Usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup	%	42,02	46,03	51,05
5.5	Persentase cakupan pelayanan persampahan	%	90,16	91,22	92,26
6	**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**				
6.1	Contrasepsi Prevalens Rate	%	76,80	76,9	77,00
6.2	Cakupan Pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	%	74,00	80,00	83,00
7	**Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				
7.1	Cakupan kepemilikan KTP	%	84,00	88,00	89,00
7.2	Cakupan kepemilikan Akte kelahiran (0 – 18 Tahun)	%	87,00	89,00	90,00
7.3	Cakupan kepemilikan KK	%	100,00	100,00	100,00
7.4	Cakupan kepemilikan akte kematian	%	37,00	40,00	46,00
7.5	Persentase penduduk yg memiliki dokumen kependudukan	%	77,00	79,25	81,25
7.6	Persentase Penyelesaian Penerbitan dokumen kependudukan tepat waktu	%	88,00	90,00	93,00
7.7	Rata-rata lama waktu penyelesaian pengurusan dokumen	hari	1	1	1
8	**Perhubungan**				
8.1	Persentase masyarakat yang menggunakan sarana angkutan umum	%	65,36	67,48	70,60
8.2	Persentase ketersediaan terminal angkutan penumpang	%	70,60	70,75	71,20
8.3	Jumlah rute pelayanan angkutan umum dalam kota	Rute	23,00	13,00	13,00
8.4	Nilai survey IKM Pelayanan transportasi	angka	90,22	90,28	100,00
8.5	Persentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas	%	70,70	73,25	75,33
9	**Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**				
9.1	Persentase UKM terhadap UMKM	%	27,64	28,15	28,66
9.2	Persentase pertumbuhan tenaga kerja sektor UMKM	%	12,00	14,00	16,00

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
9.3	Persentase Peningkatan SHU Koperasi	%	10,00	12,15	14,25
9.4	Persentase pertumbuhan aset koperasi	%	5,00	6,50	8,55
10	**Urusan Penanaman Modal**				
10.1	Jumlah investor	orang	766	936	1.151
10.2	Nilai Survey kepuasaan masyarakat	Nilai	82,0	82,20	82,40
10.3	Jumlah penurunan pengaduan perizinan masyarakat	pengaduan	7	6	5
10.4	Nilai Realisasi Investasi	(Miliar Rupiah)	195,00	196,90	198,90
11	**Urusan Kepemudaan dan Olahraga**				
11.1	Peringkat pemuda pelopor tingkat nasional	Peringkat	1	1	1
11.2	Peringkat pramuka tk. Propinsi	Regu	1	2	2
11.3	Peringkat pemuda pada lomba wirausaha muda tk. Propinsi dan tk.nasional	Peringkat	1	1	1
11.4	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	organisasi	22	24	26
11.5	Jumlah medali pada even olahraga tingkat daerah	Medali	145	30	155
12	**Urusan Statistik**				
12.1	Jumlah dokumen statistik yang tersedia	Buah	4	4	4
13	**Urusan Komunikasi dan Informatika**				
13.1	Persentase Perangkat Daerah yang telah terintegrasi TI	%	29,03	45,16	64,52
14	**Urusan Kebudayaan**				
14.1	Jumlah Benda Cagar Budaya (BCB) yang dilindungi	unit	20	22	24
14.2	Jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif	grup	70	71	72
15	**Urusan Perpustakaan**				
15.1	Jumlah pengunjung perpustakaan	orang	9	10.5	11.5
16	**Urusan Kearsipan**				
16.1	Jumlah khasanah arsip	berkas	7.25	8	8.5
III	**Layanan Urusan Pilihan**				
1	**Urusan Kelautan dan Perikanan**				
1.1	Produksi ikan konsumsi	Ton	500,00	520,00	540,00
1.2	Angka Konsumsi Ikan	%	31,00	31,50	33,00

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
2	**Urusan Pariwisata**				
2.1	Persentase Peningkatan Kunjungan wisatawan	%	5,00	5,10	5,50
3	**Urusan Pertanian**				
3.1	Kontribusi Sektor Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	7,42	7,44	7,45
3.2	Produksi padi	Ton	37.750	38.588	40.517
3.3	Produksi cabe	Ton	980	985	985
3.4	Produksi bawang	Ton	200	300	400
3.5	Produksi Kakao	Ton	1.095	1.095	1.100
3.6	Jumlah sapi	Ekor	5.732	5.846	5.962
4	**Urusan Perdagangan**				
4.1	Persentase pertumbuhan omset	%	27,00	29,00	31,00
4.2	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (2010=100)	%	23,97	24,02	24,07
5	**Urusan Perindustrian**				
5.1	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (2010=100)	%	6,00	6,02	6,08
5.2	Persentase peningkatan nilai produksi	%	1,50	1,50	2,00
5.3	Jumlah Produk Industri Yang Mendapatkan Sertifikat Industri	Buah	8,00	8,00	12,00
IV	**Fungsi Pendukung**				
1	**Kesekretariatan Daerah**				
1.1	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai	BB	BB	A
1.2	Peringkat LPPD	Peringkat	18	16	15
1.3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kategori	Baik	Baik	Baik
1.4	Persentase jumlah paket lelang yang melalui elektronik	%	100,00	100,00	100,00
1.5	Persentase penyelesaian masalah hukum yang diproses secara non litigasi	%	60,00	70,00	80,00
2	**Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**				
2.1	Indeks kepuasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Skor	74,00	76,00	78,00
2.2	Persentase aspirasi masyarakat yang ditanggapi DPRD	%	82,00	85,00	85,00
V	**Fungsi Penunjang**				
1	**Inspektorat**				

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
1.1	Persentase Pearngkat Daerah yang bebas dari temuan Keuangan	%	25,80	35,48	45,16
1.2	Persentase Pearngkat Daerah yang bebas dari temuan Aset	%	25,80	35,48	45,16
1.3	Nilai Indeks RB pada area pengawasan	Indeks	50,00	55,00	60,00
1.4	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal yang ditindaklanjuti	%	59,00	59,00	59,00
1.5	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal yang ditindaklanjuti	%	60,00	60,00	60,00
1.6	Persentase Perangkat Daerah yang akuntabilitas kinerjanya meningkat pertahun	%	54,83	61,29	67,74
1.7	Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat yang diberikan oleh tim Evaluasi AKIP	Nilai	BB	BB	BB
2	**Perencanaan**				
2.1	Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	%	32,00	33,00	34,00
2.2	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	%	95,21	95,24	97,04
2.3	Persentase Indikator RPJMD yang tercapai atau melebihi target	%	87,78	89,44	91,67
3	**Keuangan**				
3.1	Opini laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP	WTP	WTP
3.2	Penetapan Perda APBD tepat waktu	Waktu	28 Des	20-Des	20-Des
3.3	Kontribusi PAD terhadap pendapatan Daerah	%	12,00	12,00	12,00
4	**Kepegawaian**				
4.1	Persentase Pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial	%	57,54	70,68	83,13
4.2	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis	%	47,27	54,31	68,38
4.3	Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	%	80,40	81,55	82,70
5	**Penelitian dan Pengembangan**				
5.1	Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan	%	75,00	80,00	85,00

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	kebijakan				
6	**Kesatuan Bangsa dan Politik**				
6.1	Persentase penanganan konflik yang terjadi di tengah masyarakat	%	100,00	100,00	100,00
6.2	Persentase ormas yang aktif	%	90,64	90,64	90,64
7	**Penanggulangan Bencana Daerah**				
7.1	Presentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana	%	17,34	17,34	18,36
7.2	Presentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	%	100,00	100,00	100,00
8	**Kewilayahan**				
8.1	Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00
8.2	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	%	100,00	100,00	100,00
C	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**				
1	Produktivitas Total Daerah	Rp. Jt	85,91	90,74	95,84
2	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp. Jt	1.848,89	1.954,43	2.060,03
3	Nilai Tukar Petani	%	100,51	100,61	100,73
4	Rasio Ketergantungan	%	54,40	54.41	54.42

6.3 INOVASI DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2018

Dari realisasi kinerja dan keuangan Kota Payakumbuh tahun 2017, dilakukan akselerasi melalui beberapa inovasi pada tahun 2018 dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama yang berhubungan dengan pelayanan langsung masyarakat di Kota Payakumbuh. Dengan sumberdaya yang tersedia, pelayanan masyarakat tetap menjadi fokus utama dalam pemerintahan.

Daftar dan jenis inovasi yang dilahirkan di Kota Payakumbuh selama tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 6.2 :

Tabel 6.2
Inovasi Kota Payakumbuh Tahun 2018

No.	Nama Inovasi	Jenis Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
1.	Pemberian dana Alokasi Anggaran Kelurahan	Tata Kelola	Untuk stimulan bagi kelurahan karena kelurahan tidak mendapatkan dana desa dari kementerian desa	mendukung untuk operasional kelurahan
2.	Payakumbuh Action Research (PARE)	Pelayanan Publik	Keterbatasan kemampuan guru dalam menulis dan melakukan penelitian menjadi masalah utama yang dihadapi. Disamping keterbatasan kemampuan juga disebabkan keterbatasan waktu. Para guru yang telah tersertifikasi bahkan wajib mengajar 24 jam perminggu. Disisi lain, untuk membuat karya tulis hasil penelitian misalnya Penelitian Tindakan Kelas (PTK) butuh waktu yang cukup lama. Proses PTK dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil. Selain itu para guru juga memiliki kendala dalam proses menuangkan hasil PTK tersebut dalam bentuk naskah publikasi yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah maupun karya ilmiah populer yang dimuat dalam surat kabar . Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Pendidikan merancang suatu program/kegiatan yang bertujuan memberi bimbingan untuk melahirkan karya tulis ilmiah dalam bentuk Penelitian Tindakan Kelas untuk guru, Penelitian Tindakan Sekolah untuk Kepala Sekolah dan Pengawas. Bimbingan penulisan penelitian tindakan kelas/sekolah dimulai dari sosialisasi, penyusunan rencana	Tujuan dari Pare (Payakumbuh Action Reserach) adalah : Meningkatkan kompetensi guru melakukan penelitian (PTK/PTS) dalam rangka mewujudkan tenaga pendidik yang profesional. Manfaat yang diperoleh antara lain sebagai berikut : 1. Membantu guru mendapatkan poin untuk angka kredit pengusulan kenaikan pangkat. 2. Masukan bagi guru dan sekolah untuk evaluasi / perbaikan proses belajar mengajar

No.	Nama Inovasi	Jenis Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
			penelitian, proses penelitian, penulisan laporan hasil penelitian serta memfasilitasi publikasi dalam jurnal ilmiah.	
3.	Alih Media Dokumen dan Arsip Daerah	Inovasi Bentuk Lainnya	Dalam rangka penyelamatan dan pelestarian dokumen dan arsip daerah	Terselamatkannya dokumen dan arsip daerah
4.	Gebu Masyarakat BPJS	Pelayanan Publik	Jaminan kesehatan yang belum terjaring oleh program kesehatan Masyarakat	Membantu masyarakat kelurahan Payobasung dalam hal penanganan masyarakat
5.	ANJALI " Antar Jemput Layanan Persalinan"	Pelayanan Publik	Untuk Kota Payakumbuh kasus kematian ibu melahirkan masih dibawah angka nasional maupun propinsi, akan tetapi hal ini tetap perlu menjadi perhatian khusus, dan diharapkan tidak ada lagi kasus kematian ibu melahirkan yang disebabkan faktor-faktor kesehatan dan kelalaian dalam antisipasi. dari lima tahun terakhir dari kasus kasus kamatian ibu hamil, melahirkan dan kematian bayi baru lahir terus terjadi disebabkan tiga terlambat yaitu: 1. Terlambat mengenai tanda bahaya dan keputusan 2. Terlambat mencapai fasilitas kesehatan, dan 3. Terlambat dalam menangani kegawat daruratan adalah terlambatnya proses penanganan.	Tujuan : - Percepatan program nasional dalam upaya menekan angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir - Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat khusus pelayanan kesehatan ibu dan anak Manfaat : - Menekan kasus kematian ibu melahirkan/bersalin yang disebabkan keterlambatan mendapatkan akses pelayanan di Faskes - Mengatasi masalah modal transportasi untuk ibu bersalin

No.	Nama Inovasi	Jenis Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
6.	GESIT KEJAR DAKU "BANG"	Pelayanan Publik	Kepemilikan dokumen akta kelahiran anak yang berusaha 0-18 tahun Kota Payakumbuh pada akhir tahun 2016, tercatat hanya pada angka 69%. angka ini masih jauh dibawah target Kementrian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil yang berada pada angka 75%.	Pencapaian target nasional kepemilikan angka kelahiran anak usia 0-18 tahun sebesar 90%
7.	Kartu Identitas Pengusaha (KIP)	Pelayanan Publik	Berkas untuk proses pengurusan izin usaha sudah banyak, diperlukan penyimpanan data-data permohonan secara elektronik/e-arsip (menyimpan data hasil scan) sehingga mempermudah pelaku usaha mendapatkan data-data permohonnya kembaliketika yang akan memperbarui/memperpanjang izin usahanya.	Meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat/pelaku usaha; Manfaat dari sisi pemohon, yang sudah pernahmengurus izin usaha, maka tidak perlu berulangkali melengkapi berkas yang sama, pemohon hanya perlu melengkapi bahan/data yang belum ada pada arsip yang ada di DPMPTSP.
8.	One Day Service (ODS)	Pelayanan Publik	Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat/pelaku usaha, DPMPTSP Kota Payakumbuh membuat kegiatan pelayanan perizinan jemput bola, satu hari jadi yang disebut One Day Service untuk beberapa jenis izin yang tidak memerlukan rekomentasi kajian Teknis dari dinas/usaha mikro.	Mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, tepat dan transparan. manfaat : memudahkan masyarakat/pelaku usaha dalam mengurus perizinan dan mempersingkat waktu pelayanan perizinan waktu pelayanan perizinan.
9.	SI CECE URUS KAKEKKU (Siap Cerai Cepat Urus KArtu KEluarga KU)	Pelayanan Publik	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk pengurusan pisah KK anggota keluarganya yang telah bercerai	menggiatkan pelayanan dokumen administrasi kependudukan

No.	Nama Inovasi	Jenis Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
10.	SINI KAKEK SELEB (SIap NIkah KArtu KEluarga Ku SElesai diBuat)	Pelayanan Publik	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk pengurusan pisah KK anggota keluarganya yang telah menikah	Menggiatnya pelayanan dokumen administrasi kependudukan
11.	SORE JK (SOsialisasikan, REkam KTP-el, Jemput berKas akta kelahiran)	Pelayanan Publik	Gerakan Indonesia Sadar Administrasi kependudukan (GISA), pelaksanaan pileg dan pilpres 2019	Pemuktahiran dokumen kependudukan di Kelurahan Sadar Administrasi Kependudukan
12.	PELAKOR TUA dan DISABILITAS (PELayanan KTP ORang TUA dan DISABILITAS)	Pelayanan Publik	Capaian perekaman KTP el bagi penduduk Wajib KTP El Kota Payakumbuh	Pencapaian 100% target nasional tentang perekaman KTP el bagi penduduk wajib KTP el Kota Payakumbuh
13.	SIWARTA	Pelayanan Publik	1. Proses distribusi pemberitaan dari pembangunan selama ini baru melibatkan komponen penyusunan relis berita saja. 2. Belum adanya proses evaluasi yang baik dari segi penyimpanan relis berita, keaktifan wartawan dan registrasi pewarta. 3. Belum adanya peran OPD dalam menyampaikan pemberitaan atas kegiatan OPD masing-masing.	1. Untuk percepatan distribusi berita pembangunan kepada wartawan se-Payakumbuh. 2. Untuk bahan evaluasi, penyimpanan relis berita, keaktifan wartawan dan registrasi pewarta. 3. Untuk menjembatani relis berita antara OPD dengan bidang kehumasan dan wartawan.

No.	Nama Inovasi	Jenis Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
14.	e-SPPD (Elektronik Surat Perintah Perjalanan Dinas)	Tata Kelola	1. Proses Pengajuan izin pengurusan perjalanan dinas luar daerah secara online 2. Pengawalan terhadap Telaahan staf yang membutuhkan waktu 3. Adanya kemungkinan terlewatnya salah satu birokrasi ketika pengurusan izin manual 4. Pengikut kegiatan/perjalanan dinas tidak tepat sasaran 5. Belum optimalnya pelaporan perjalanan dinas 6. Terjadinya penumpukan telaahan staf di meja pimpinan	1. Untuk percepatan proses pengurusan telaahan staf 2. Untuk kesesuaian peruntukan perjalanan dinas' 3. Untuk pendomentasian perjalanan dinas dari proses pengajuan izin sampai pelaporan kembali
15.	Manajemen " SIKAT HABIS "	Inovasi Bentuk Lainnya	Pembangunan kesehatan masyarakat merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hoslitik. Pelayanan kesehatan dipandang sebagai upaya paripurna, yakni promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Upaya-upaya ini membutuhkan sinergisme dalam pelaksanaannya, sehingga peningkatan derajat kesehatan masyarakat menjadi lebih nyata dapat diwujudkan. Sinergisitas pembangunan kesehatan dapat diwujudkan apabila pelaku pelayanan kesehatan memiliki satu visi, satu pandangan dan semangat yang sama dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Untuk itu guna membangkitkan motivasi dan semangat pelayanaan kesehatan perlu dikembangkan suatu system atau manajemen pengembangan kualitas mental SDM dengan membuat motto yang menggelorakan sikap petugas dalam melaksanakan fungsinya, yang dinamai**" SIKAT HABIS "** yang merupakan singkatan dari **"Selalu Ingin Kesehatan Anda Terpelihara, Harus Bisa!.**	1. memberikan tekad yang kuat pada jajaran Dinas Kesehatan termasuk unit pelaksana teknis melalui kesepakatan gerak langkah pembangunan kesehatan di Payakumbuh; 2. meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dengan memberikan tekad yang kuat dalam pengelolaan komitmen jajaran kesehatan di Kota Payakumbuh; 3. sebagai pemupuk dan pemersatu semangat kerja jajaran Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh termasuk unit-unit pelaksana teknis dalam lingkup kerjanya.

No.	Nama Inovasi	Jenis Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
			Dalam perwujudannya, Motto dan Logo ini akan menjadi penyemangat dan penyatuan gerak langkah para petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat secara holistik dan paripurna. Permasalahan : Dalam melaksanakan pembangunan kesehatan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara langsung, dukungan sarana prasarana, pembiayaan maupun tingkat kompetensi SDM tidak akan memberikan hasil yang optimal jika tidak dibarengi dengan komitmen dan motivasi dari SDM itu sendiri. Masih rendah semangat, motivasi dan komitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelayanan kesehatan menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target-target kinerja yang telah ditetapkan.	
16.	Relawan Pemantau Peduli Hipertensi " Repetisi "	Pelayanan Publik	Perobahan paradigma dalam pelayanan kesehatan mengalami perubahan secara significant, dengan diberlakukannya UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN dan diperkuat dengan pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS (Badan Pelaksanan Jaminan Sosial) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) . Konsepsi dasar dalam pelaksanaan undang-undang ini adalah, bagaimana pelaksanaan sistem "Managed Care" atau Pemeliharaan kesehatan merupakan pilar utama dalam penjaminan kesehatan masyarakat. Dimana pada prinsip ini, pelayanan kesehatan terlihat dalam satu kebulatan utuh antara pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Terutama untuk penyakit-	1. Pencegahan dan penanggulangan peningkatan kasus hipertensi 2. Mencegah munculnya kasus-kasus penyakit tidak menular lainya yang disebabkan oleh hipertensi 3. Meningkatkan kualitas dan derajat kesehatan masyarakat Mamfaat Inovasi : 1. Menekan prevalensi hipertensi dan kasus penyakit lainnya yang disebabkannya. 2. Meningkatkan produktifitas masyarakat

No.	Nama Inovasi	Jenis Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
			penyakit Catastrophy (penyakit yang menimbulkan kecacatan dan penggunaan biaya besar) seperty Hipertensi dan resikonya. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007 menunjukkan prevelensi Hipertensi sebanyak 31,7%. Hipertensi menjadi salah satu penyebab kematian utama di perkotaan maupun perdesaan pada usia 55-64 tahun. Dan dalam beberapa tahun terakhir Hipertensi sudah mulai terindikasi diderita oleh kelompok umur yang lebih muda antara usia 30-40 tahun. Dari data tersebut dapat terlihat bahwa satu dari tiga orang dewasa Indonesia menderita Hipertensi, bahkan di kalangan usia 50 tahun keatas satu dari dua orang. Permasalahan : 1. Meningkatnya kasus hipertensi yang disebabkan pola dan perilaku hidup yang tidak sehat 2. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap hipertensi Masih rendahnya intervensi untuk penanggulangan penyakit hipertensi yang disebabkan sebahagian masyarakat tidak menyadari kalau dirinya mengidap atau beresiko tinggi hipertensi	

No.	Nama Inovasi	Jenis Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
17.	Pedoman Teknis Perencanaan Partisipatif	Tata Kelola	1. Masih rendahnya usulan masyarakat dan pemangku kepentingan yang sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah; Dalam Musrenbang tahun 2017, dari 864 usulan yang diterima pada proses perencanaan partisipatif dimana hanya 260 usulan atau 30,09% usulan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa usulan yang disampaikan belum sepenuhnya mempedomani prioritas pembangunan daerah dan belum berdasarkan kebutuhan. 2. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam tahapan perencanaan *bottom-up* (bawah-atas); Pada setiap tahapan musrenbang, keterlibatan dan peran aktif stakeholder sangat dibutuhkan, mengingat stakeholder tersebut yang memahami dan mengetahui kondisi di lapangan. Peran aktif stakeholder tersebut tercermin dalam kehadiran dan kualitas usulan yang disampaikan. Untuk tingkat kehadiran pada musrenbang RKPD tahun 2017, dari 154 unsur masyarakat yang diundang, hanya dihadiri 106 unsur atau 68,83% dari total undangan. Sementara untuk kualitas usulan, usulan –usulan yang disampaikan masih dominan untuk pembangunan fisik daripada pembangunan manusia dan ekonomi.	1. Meningkatkan kualitas usulan masyarakat dan pemangku kepentingan yang sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah; 2. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam tahapan perencanaan *bottom-up* (bawah-atas);
18	Gerakan Terpadu Pengembangan Ekonomi Masyarakat Menuju Payakumbuh Kota Randang	Tata Kelola	Beberapa hal yang melatarbelakangi mengapa kemudian memilih Rendang sabagai Branding Image Kota Payakumbuh : a) Rendang Merupakan Masakan Khas Minang Kabau yang sudah sangat dikenal oleh dunia. Melalui penjaringan	Tujuan dan manfaat inovasi ini adalah Membangun Branding Image “Payakumbuh Kota Randang” / “Payakumbuh The City Of Randang” bertujuan untuk menciptakan

No.	Nama Inovasi	Jenis Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
			pendapat kepada penikmat kuliner secara global yang dilakukan oleh media internasional CNN terhadap makanan khas di seluruh dunia, dalam tiga tahun terakhir secara berturut-turut Rendang berhasil menjadi Makanan terlezat di Dunia. Oleh karena itu Rendang mempunyai peluang pasar bukan hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Peluang inilah yang akan kita tangkap. b) Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Payakumbuh melalui pendekatan One Village One Product (OVOP) telah menginisiasi beberapa kelurahan untuk menjadi sentra produk unggulan spesifik yang dituangkan dalam SK Walikota Payakumbuh nomor 530/763/WK-KUPP/VI/2015 tentang Pembentukan Sentra-Sentra Produksi Industri Kecil Kota Payakumbuh, dan salah satu sentra produksi industry kecil tersebut adalah Kampung Rendang yang berada di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori. Pada saat itu dikawasan Kampung Rendang tersebut terdapat 16 UMKM Rendang, dan hingga saat ini di Kota Payakumbuh sudah terdapat 36 UMKM rendang yang sudah eksis berproduksi dan berpeluang untuk ditingkat kapasitas produksinya. c) Sarana prasarana pendukung sudah cukup tersedia seperti, - Kampung rendang sebagai cikal bakal industri rendang Kota Payakumbuh yang masih bersifat tradisional dan berskala kecil, terdapat di Kelurahan Sungai Durian. - Sentra IKM Rendang sebagai sarana produksi sebagai Rumah Produksi bersama yang lebih bersifat moderen untuk menghasilkan produk berstandar mutu tinggi dan	produk unggulan Kota Payakumbuh yang dikenal secara global sehingga memiliki daya jual yang tinggi. Disamping itu, branding Image “Payakumbuh Kota Rendang” ini adalah untuk mewujudkan Kota Payakumbuh sebagai Produsen Rendang terbesar di dunia

No.	Nama Inovasi	Jenis Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
			berskala besar, yang berada di Kelurahan Padang Kaduduak. - Rumah potong hewan modern sebagai pemasok daging segar berkualitas tinggi yang terdapat di kelurahan Koto Panjang Payo Basuang. d) Bahan Baku pembuatan rendang relatif cukup mudah dipenuhi baik secara internal maupun dari daerah tetangga.	

BAB VII
PENUTUP

RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Payakumbuh tahun 2017-2022. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sendiri salah satu tahapan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan melalui tahap penyelarasan dengan berbagai kebijakan Pembangunan Nasional dengan Nawacita yang tercantum dalam RPJMN, kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang tercantum dalam RPJMD Sumatera Barat, baik yang bersifat *Common goals* maupun kebijakan tematik kewilayahan. RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2019 menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2019, seluruh jajaran pemerintah daerah hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam "kerangka regulasi" maupun dalam "kerangka anggaran", penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pembangunan Kota Payakumbuh dilakukan secara terencana dalam upaya menuju perkembangan yang lebih baik bagi masyarakat Kota Payakumbuh. Upaya tersebut di susun dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan RKPD merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan daerah, yang mana dalam proses penyusunannya dimulai dari: Mufakat RW, Musrenbang tingkat kelurahan, Musrenbang tingkat Kecamatan dan Musrenbang tingkat Kota. Selain itu juga memeperhatikan renja Perangkat Daerah, arahan Walikota, dan aspirasi dari Legislatif melalui mekanisme reses dan Epokir serta kebijakan dari pusat. Semoga apa yang telah dilaksanakan bersama-sama selama ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Payakumbuh.

WALIKOTA PAYAKUMBUH

RIZA FALEPI